



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO
TAHUN 2022**

**PEMERINTAH KABUPATEN KARO
2021**



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2022 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PENYUSUNAN RKPD
Pasal 2

- (1) RKPD yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja PD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2022; dan
 - b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (5) Ketentuan mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan RKPD untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Karo dengan rencana program dan kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja PD Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala PD.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Kepala PD menyampaikan rancangan Renja PD Tahun 2022 kepada Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2022, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD tahun 2022 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2022; dan
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pasal 5

Pengesahan Renja PD oleh Bupati dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengesahan rancangan akhir Renja PD Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan; dan
- b. penetapan Renja PD Tahun 2022 oleh Kepala PD paling lama 14 (empat belas) hari setelah Renja PD disahkan oleh Bupati.

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan kebijakan RKPD Kabupaten Karo;
- b. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD;
- c. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing PD;
- d. Kepala PD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja PD bila belum sesuai dengan RKPD;
- e. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2022 dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud harus sesuai dengan hasil kesepakatan musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan sebelum musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dan telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2022;
- g. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- h. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- i. untuk memaksimalkan pencapaian target indikator sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, PD mengupayakan pendanaan alternatif untuk usulan sebagaimana dimaksud pada huruf f yang belum terdani.
- j. penyesuaian RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati; dan
- k. RKPD Tahun 2022 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2022 serta bahan arahan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 7

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 8

- (1) RKPD Tahun 2022 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan, seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renja PD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2022.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 Juli 2021
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 7 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2021 NOMOR...23.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR : 23 TAHUN 2021
TANGGAL : 07 JULI 2021
TENTANG :
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2022



RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN KARO
2021

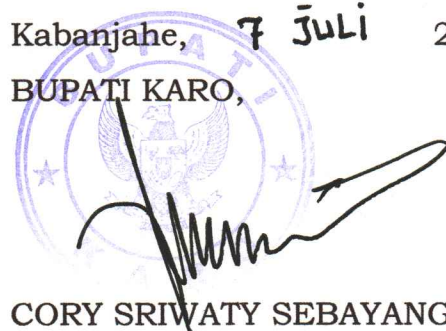
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju. Rencana Kerja, pendanaan dan prakiraan maju mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

Akhir kata, diharapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022 ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Kabanjahe, 7 Juli 2021
BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG

DAFTAR ISI	
	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-I
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-6
1.4. Maksud dan Tujuan.....	I-7
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah	II-1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2 Aspek Masyarakat	II-40
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	II-65
2.1.4 Aspek Daya Saing.....	II-160
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	II-166
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah	II-170
2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II-170
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II-174
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-24
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-30
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-33
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.2. Proritas Dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022	IV-8
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
BAB VII PENUTUP.....	VII-1

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
2.1. Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo	II-2
2.2. Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo.....	II-7
2.3. Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo	II-15
2.4. Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo	II-16
2.5. Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-17
2.6. Potensi Bahaya Cuaca Ekstrem per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-19
2.7. Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo.....	II-21
2.8. Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per kecamatan di Kabupaten Karo	II-23
2.9. Potensi Bahaya Kekeringan per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-25
2.10. Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-27
2.11. Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo	II-29
2.12. Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020	II-31
2.13. Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2020	II-32
2.14. Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-33
2.15. Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2020	II-34
2.16. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d 2020 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo	II-41
2.17. Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 s.d. 2020 Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo.....	II-42
2.18. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2016-2020	II-44
2.19. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten tetangga (Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	II-46
2.20. Perbandingan dan Peranan PDRB ADRB Beberapa Kabupaten Tetangga (Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020	II-47
2.21. PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-48
2.22. PDRB per Kapita Kabupaten Dataran Tinggi di Provinsi Sumatera Utara 2016-2020.....	II-49
2.23. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-50
2.24. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-54
2.25. Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun keatas Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-56
2.26. Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-58
2.27. Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-63
2.28. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-66
2.29. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-66
2.30. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-67
2.31. Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-68
2.32. Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-68

2.33.	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-69
2.34.	Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-70
2.35.	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016 – 2020.....	II-71
2.36.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2016–2020.....	II-71
2.37.	Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2020.....	II-73
2.38.	Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-74
2.39.	Presentasi Tenaga Pendidik S-1/D-IV Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-74
2.40.	Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Karo	II-75
2.41.	Perkembangan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Karo per 100.000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020	II-76
2.42.	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-78
2.43.	Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-80
2.44.	Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-81
2.45.	Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-81
2.46.	Presentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-82
2.47.	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-83
2.48.	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-84
2.49.	Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-85
2.50.	Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-85
2.51.	Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-86
2.52.	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-86
2.53.	Cakupan Penderita Diare yang ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016- 2020	II-87
2.54.	Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-88
2.55.	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-88
2.56.	Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2016-2019.....	II-89
2.57.	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-89
2.58.	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-90
2.59.	Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-91
2.60.	Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-93
2.61.	Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020	II-94
2.62.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-97

2.63.	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-98
2.64.	Capaian Indikator Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-99
2.65.	Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Karo	II-99
2.66.	Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	II-100
2.67.	Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-100
2.68.	Pencapaian SPM Urusan Sosial Kabupaten Karo	II-101
2.69.	Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-102
2.70.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-104
2.71.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-104
2.72.	Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-106
2.73.	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-106
2.74.	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-107
2.75.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-107
2.76.	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	II-108
2.77.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-109
2.78.	Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-110
2.79.	Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-112
2.80.	Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-114
2.81.	Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-114
2.82.	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-115
2.83.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-115
2.84.	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-115
2.85.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-116
2.86.	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-116
2.87.	Jumlah Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-117
2.88.	Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-118
2.89.	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-118
2.90.	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)p Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-119
2.91.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-120
2.92.	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-121

2.93.	Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-121
2.94.	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-122
2.95.	Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-125
2.96.	Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-125
2.97.	Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-126
2.98.	Indikator Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-127
2.99.	Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-128
2.100.	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 ..	II-129
2.101.	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-129
2.102.	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-130
2.103.	Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-131
2.104.	Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-131
2.105.	Sistem data dan Statistik yang Terintegrasi	II-132
2.106.	Buku Kabupaten dalam Angka dan PDRB	II-132
2.107.	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	II-133
2.108.	Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan Kabupaten Karo Tahun 2014-2018.....	II-135
2.109.	Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2015-2019	II-136
2.110.	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-137
2.111.	Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-137
2.112.	Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-138
2.113.	Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-139
2.114.	Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-140
2.115.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-141
2.116.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-143
2.117.	Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-144
2.118.	Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim (Ton) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-145
2.119.	Produksi Tanaman Buah-buahan Tahunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-145
2.120.	Produksi Tanaman Hias (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-146
2.121.	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-146
2.122.	Produksi Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-147

2.123.	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-147
2.124.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-148
2.125.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-148
2.126.	Presentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-149
2.127.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-150
2.128.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-151
2.129.	Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-152
2.130.	Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-153
2.131.	Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-154
2.132.	Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-156
2.133.	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural Kabupaten Karo Tahun 2016-202	II-158
2.134.	Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-160
2.135.	Pengeluaran RT Perkapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-161
2.136.	Pengeluaran Konsumsi Nonpangan per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-161
2.137.	Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-165
2.138.	Persentase Penduduk Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas Kabupaten Karo Tahun 2016-2020.....	II-166
2.139.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020	II-166
2.140.	Predikat Kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2020 pada masing-masing Perangkat Daerah	II-167
3.1	Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022.....	III-8
3.2	Target Makro Kabupaten Karo Tahun 2022	III-24
3.3	Realisasi/ Proyeksi Pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2022-2023	III-26
3.4	Realisasi/ Proyeksi Belanja Kabupaten Karo Tahun 2022-2023.....	III-32
3.5	Realisasi/ Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022-2023	III-34
4.1	Perumusan Visi	IV-3
4.2	Matrikulasi Keterkaitan Antara Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022	IV-34
4.3	Program/Kegiatan Daerah yang mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan Major Project Membangun Desa Menata Kota (MDMK)	IV-39
4.4	Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2022	IV-42

4.5 Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 IV-43

5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2022 V-2

5.2 Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2022 yang mendukung prioritas Nasional dan Provinsi V-9

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022 VI-1

6.2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022 VI-4

DAFTAR PETA

PETA	HALAMAN
2.1 Peta Administrasi Kabupaten Karo	II-1
2.2 Peta Topografi Kabupaten Karo.....	II-4
2.3 Peta Geologi Kabupaten	II-6
2.4 Peta Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo.....	II-16
2.5 Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo.....	II-18
2.6 Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrim di Kabupaten Karo.....	II-20
2.7 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo.....	II-22
2.8 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo	II-24
2.9 Peta Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Karo.....	II-26
2.10 Peta Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Karo.....	II-28
2.11 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karo.....	II-28
2.12 Peta Risiko Multi Bencana di Kabupaten Karo.....	II-30

DAFTAR GRAFIK

GRAFIK	HALAMAN
2.1	Proyeksi Perkembangan Dependency Ratio Kabupaten Karo II-36
2.2	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2019-2043..... II-37
2.3	Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043..... II-39
2.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia Tahun 2016-2020..... II-45
2.5	PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020..... II-48
2.6	Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2016-2020..... II-50
2.7	Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2016-2020..... II-51
2.8	Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2016-2020..... II-52
2.9	Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2016-2020..... II-53
2.10	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020..... II-53
2.11	Posisi Relatif IPM Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020..... II-55
2.12	Posisi Relatif Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke atas Sumatera Utara Tahun 2020..... II-55
2.13	Rata-Rata Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2020..... II-58
2.14	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020..... II-59
2.15	Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020..... II-60
2.16	Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2020..... II-61
2.17	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020..... II-61
2.18	Perkembangan Jumlah Bayi Bergizi Buruk di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020..... II-62
2.19	Posisi Relatif Jumlah Bayi Bergizi Buruk (jiwa) Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara 2020..... II-63
2.20	Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Karo Per 1000 Kelahiran Hidup 2016-2020..... II-77
2.21	Posisi Relatif Angka Kematian Bayi dan Balita Kabupaten Karo di Sumatera Utara per 1000 Kelahiran Hidup 2018..... II-77
2.22	Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020..... II-78
2.23	Posisi Relatif Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Karo Tahun 2019..... II-79
2.24	Posisi Relatif TPAK Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara II-103
2.25	Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara..... II-105

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2020
LAMPIRAN II	PROGRAM DAN KEGIATAN KABUPATEN KARO TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Mekanisme dan tatacara perencanaan pembangunan mengacu pada ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan pelaksanaan dari Undang-undang dimaksud yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perencanaan pembangunan Daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Daerah meliputi Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah. Rencana pembangunan Daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman

dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 maka Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Karo merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Pada pasal 14 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dalam penyusunan RKPD, BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dan dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kementerian Dalam Negeri.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022 mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah di Tahun 2022;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 yang akan diusulkan oleh Bupati untuk disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah;
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah ini adalah:

1. Undang – Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten–Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2020;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo;
18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
27. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

-
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023;
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2022-2026 maka Penyusunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.

Berdasarkan uraian di atas, maka RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen lain, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 merupakan tahapan dari serangkaian tahapan penyusunan perencanaan pembangunan tahunan daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tahapan penyusunan RKPD merupakan konsekuensi dari perencanaan yang berorientasi pada proses dan substansi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselenggarakan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari desa, kecamatan, daerah kabupaten/kota, daerah provinsi, hingga nasional. Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian

tujuan pembangunan Daerah. Sementara pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi ke ruangan dalam perencanaan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.

Mekanisme dan tahapan perencanaan yang dilakukan ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan para pihak untuk berperan dalam proses pembangunan daerah serta secara substansi dapat menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang mampu mewujudkan target dan sasaran yang ingin dicapai baik secara tahunan maupun jangka menengah di daerah yang pada akhirnya dapat mendukung untuk pencapaian visi misi kepala daerah terpilih.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - 2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
 - 2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
 - 2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

BAB III KERANGKA DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

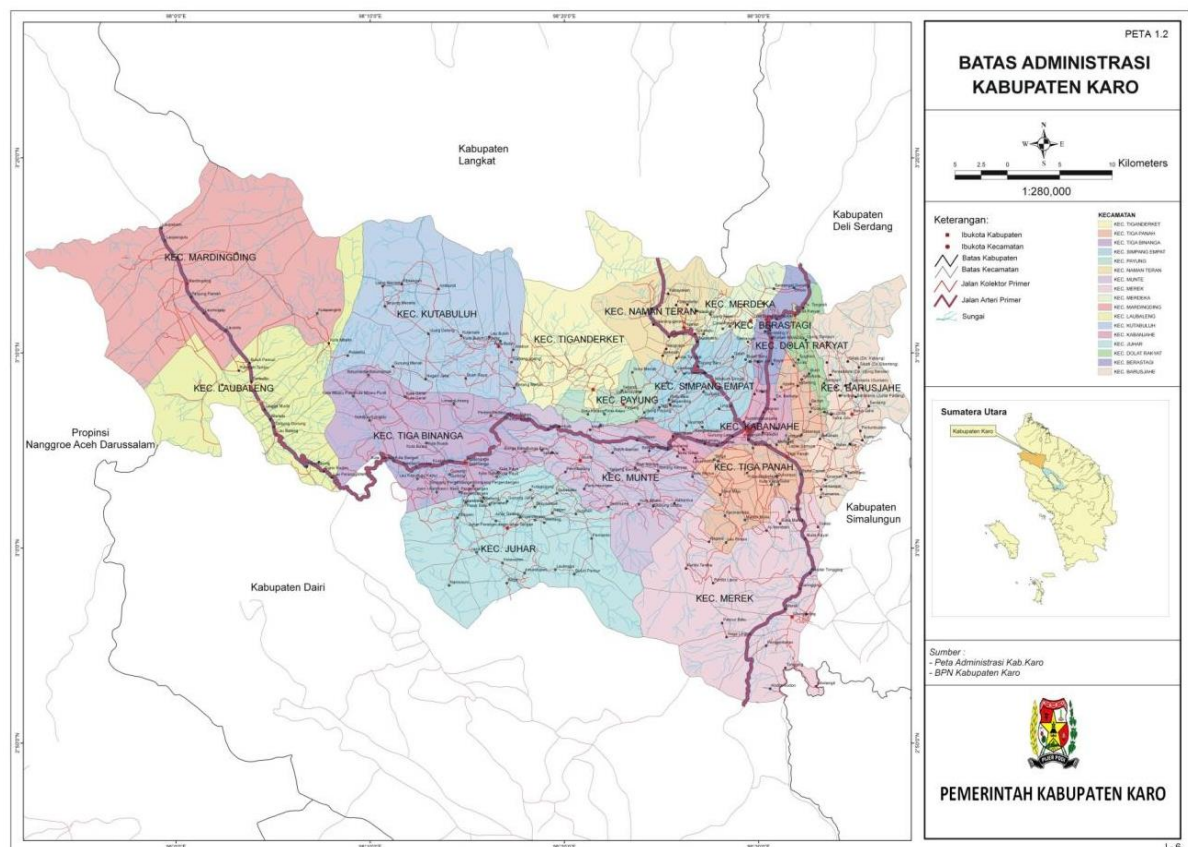
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.127,25 km². Batas Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 2.1
Administrasi Kabupaten Karo



Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo

Wilayah Kabupaten Karo di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Dairi, serta di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Pembagian wilayah administrasi

Kabupaten Karo berdasarkan luas wilayah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase thd Luas Kab. (%)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Kel./Desa
1	Mardingding	267,11	12,56	12	-	12
2	Laubaleng	252,6	11,87	15	-	15
3	Tigabinanga	160,38	7,54	19	1	20
4	Juhar	218,56	10,27	25	-	25
5	Munte	125,64	5,91	22	-	22
6	Kutabuluh	195,7	9,2	16	-	16
7	Payung	47,24	2,22	8	-	8
8	Tiganderket	86,76	4,08	17	-	17
9	Simpang Empat	93,48	4,39	17	-	17
10	Naman Teran	87,82	4,13	14	-	14
11	Merdeka	44,17	2,08	9	-	9
12	Kabanjahe	44,65	2,1	8	5	13
13	Berastagi	30,50	1,43	6	4	10
14	Tigapanah	186,84	8,78	26	-	26
15	Dolat Rayat	32,25	1,52	7	-	7
16	Merek	125,51	5,9	19	-	19
17	Barusjahe	128,04	6,02	19	-	19
Jumlah		2 127,25	100	259	10	269

Sumber: BPS Kabupaten Karo 2021

Dari Tabel Pembagian Wilayah Administrasi Kabupaten Karo dapat dilihat bahwa jumlah kecamatan di Kabupaten Karo sebanyak 17 (Tujuh belas) kecamatan. Jumlah seluruh desa/kelurahan adalah 269 (Dua ratus enam puluh sembilan) yang terdiri dari 259 desa dan 10 kelurahan. Wilayah kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mardingding dengan luas 267,11 km² (12,56% dari luas kabupaten) dan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Berastagi seluas 30,50 Km² (1,43% dari luas kabupaten).

2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Karo berada pada posisi geografis 2°50’ sampai 3°19’ Lintang Utara dan 97°55’ sampai 98°38’ Bujur Timur, dan terletak pada jajaran Dataran Tinggi Bukit Barisan.

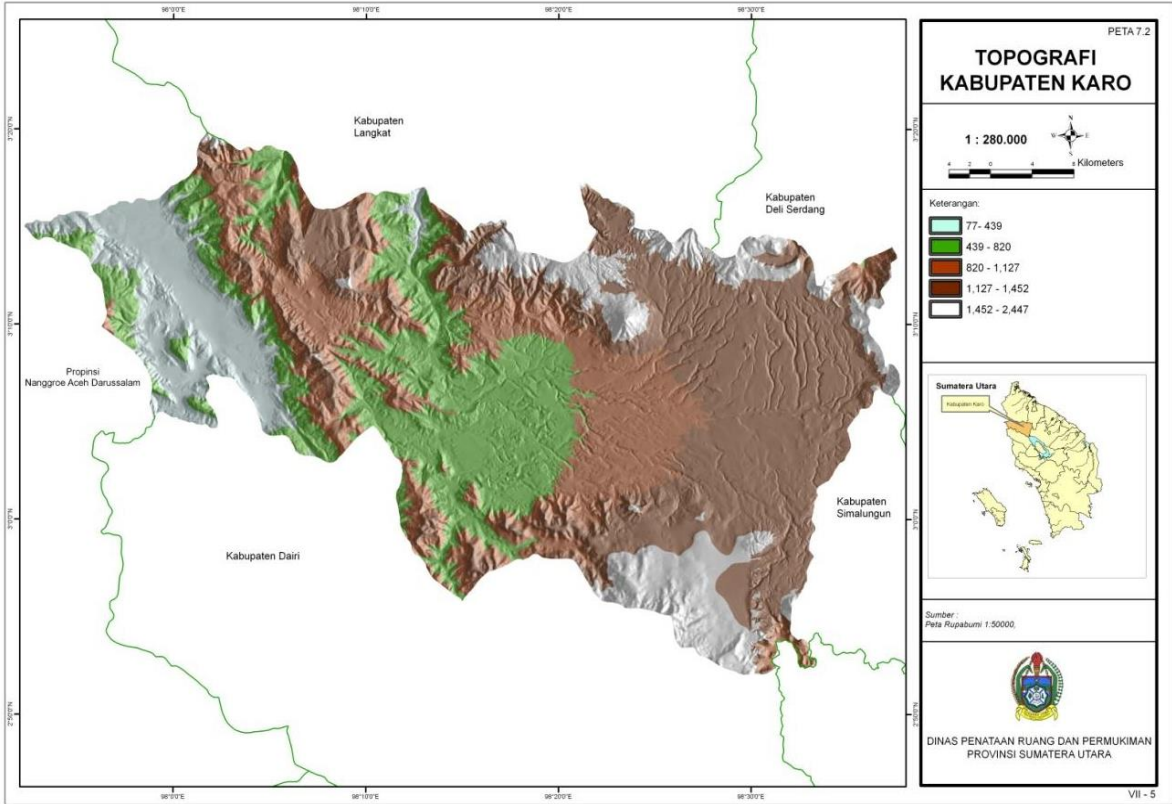
Letak Kabupaten Karo yang berada di dataran tinggi bukit barisan dengan hawa sejuk, dan berada pada jalur perlintasan Kota Medan

Kabupaten Karo merupakan wilayah dengan karakter agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian seluas 197.525,00 ha (92,85%).

Kondisi topografi adalah bentuk permukaan bumi dan karakteristik fisiknya, seperti gunung, lembah, dan lainnya. Tujuan utama topografi adalah untuk mengetahui posisi geografis dan ketinggian di atas permukaan laut. Wilayah Kabupaten Karo dengan elevasi terendah +77 m di atas permukaan laut berada di Paya Lah-lah (Kecamatan Mardinding) dan elevasi tertinggi +2.447 m di atas permukaan laut adalah di Gunung Sinabung.

Daerah Kabupaten Karo yang berada di daerah dataran tinggi bukit barisan dengan kondisi topografi yang berbukit dan bergelombang, maka di wilayah ini ditemui banyak lembah dan alur sungai yang dalam dan lereng-lereng bukit yang curam/terjal. Kondisi Geologi Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Peta 2.2
Topografi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.1.4. Geologi

Geologi adalah pengetahuan bumi yang menyelidiki lapisan-lapisan batuan yang ada dalam kerak bumi. Di dalam kerak bumi terdapat bermacam-macam batuan dan diantar lapisan-lapisan kerak bumi terdapat air yang digunakan sehari-hari, sedangkan Peta geologi adalah gambaran kecil permukaan bumi, gambaran ini mengenai informasi sebaran dan juga jenis serta sifat batuan, umur, struktur, tektonika, dan lain-lain yang berhubungan dengan adanya sumber daya.

Keadaan Geologi di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut:

- a. Qh: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini banyak terdapat di Kecamatan Mardinding dan Lau Baleng.
- b. Qvsn, Erupsi Sinabung: Lava andesit-dasit. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Tiganderket dan Payung.
- c. Qvba, Erupsi Sibayak, Satuan Sibayak: Andesit, Dasit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Berastagi dan Merdeka.
- d. Qvbr, Erupsi Barus: Lava andesit piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah utara Kecamatan Dolat Rayat.
- e. Qvbs, Erupsi Sibayak, Satuan Singkut: Andesit, dasit, mikrodiorit, tufa.

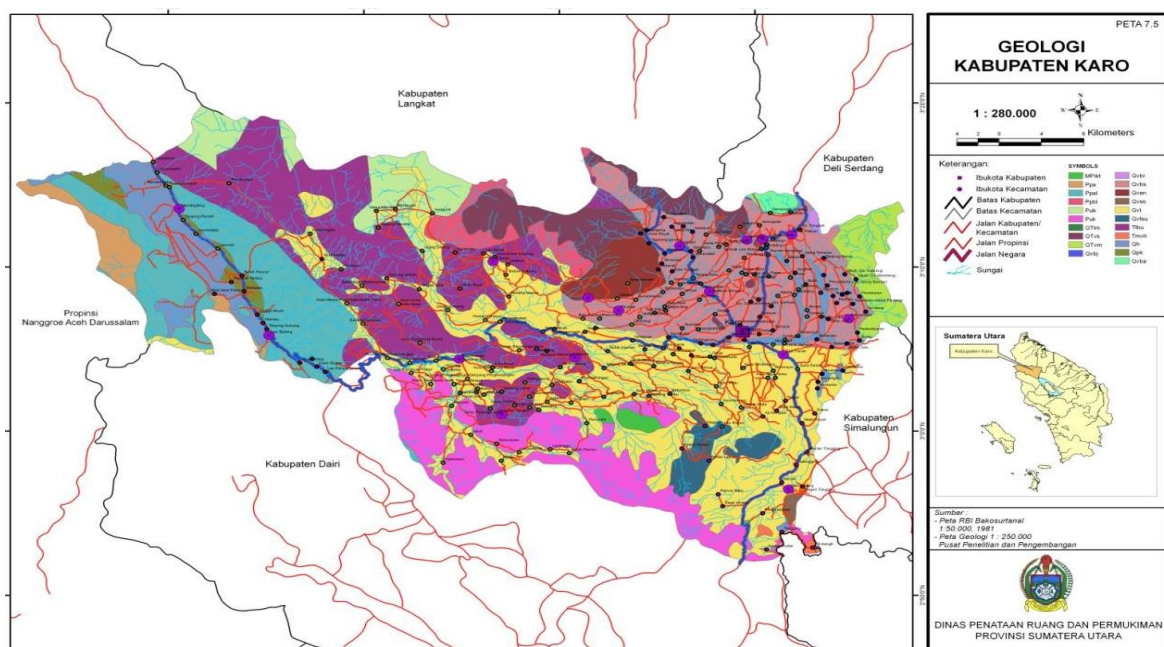
Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di Kecamatan Barusjahe, Kabanjahe, Simpang Empat, Payung, Dolat Rayat, Berastagi, Merdeka, Naman Teran dan Tiga Panah.

- f. Qpm, Formasi Melaboh: Gravel, pasir dan lempung
- g. Qvss, Erupsi Sipiso-piso: Dasit dan Andesit. Jenis batuan ini terdapat di bagian Timur Kecamatan Merek.
- h. Qpk, Formasi Kotacane: Kerikil, pasir, lempung. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardingding dan Lau Baleng.
- i. Qvtsu, Erupsi Toba, Satuan Sibutar: Campuran lava riolitik dan piroklastik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Merek.
- j. Qvt, Erupsi Toba: Tufa riodasit sebagian terelaskan. Jenis batuan ini merupakan jenis batuan yang mendominasi di Kabupaten Karo. Hampir semua kecamatan memiliki jenis batuan ini, akan tetapi yang lebih mendominasi adalah Kecamatan Merek, Tiga Panah, Munte dan Kutabuluh.
- k. QTvm, Erupsi Takurtakur, Satuan Mentar: Piroklastik andesitik-dasitik. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Barusjahe.
- l. QTvk, Erupsi Takurtakur, Satuan Takurtakur: Andesit, dasit dan piroklastik. Jenis batuan ini sebagian besar terdapat di sebelah Utara Kabupaten Karo, yaitu Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran dan Merdeka.
- m. Tmvh, Formasi Gunung Api Haranggaol: Andesit, dasit, piroklastik
- n. Tlbu, Formasi Butar: Selang seling batu pasir dengan batu pasir, batu lumpur. Formasi Tlbu juga termasuk formasi yang banyak terdapat di Kabupaten Karo. Jenis batuan ini melingkupi sebagian Kecamatan Mardingding, Lau Baleng, Tiga Binanga, Kutabuluh dan Tiganderket.
- o. Ppbl, Formasi Batu gamping Batu milmil: Batu gamping dan rijan. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Kutabuluh dan Tiganderket.
- p. Mpikt: Intrusi Granit. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Munte.
- q. Mpik: Intrusi granit
- r. Ppal, Formasi Alas, Anggota Batu gamping: Batu gamping oolit atau batu gamping kristalin. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardingding dan sebagian Kecamatan Lau Baleng.

- s. Ppa, Formasi Alas: Batuserpih, batulanau, batupasir, konglomerat, *wacke*. Jenis batuan ini terdapat di sebelah Barat Kecamatan Mardindingding.
- t. Puk, Formasi Kluet: Batu sabak, filit, meta batu pasir, meta batu lempung. Jenis batuan ini terletak di sebelah Selatan Kabupaten Karo, melingkupi sebagian Kecamatan Juhar dan Merek.
- u. Pub, Formasi Bahorok: batu *metawacke*, batu sabak, meta batu lanau, meta batu pasir arenit meta batu konglomerat. Jenis batuan ini terdapat di sebagian Kecamatan Mardindingding dan Kutabuluh.

Keadaan geologi wilayah Kabupaten Karo dapat di lihat pada peta di bawah ini:

Peta 2.3
Geologi Kabupaten Karo



Sumber: Dinas Penataan Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

2.1.1.1.5. Hidrologi

Kabupaten Karo dilalui oleh dua sungai utama yaitu Sungai Wampu (Lau Biang) yang bermuara ke Selat Malaka dan Sungai Lau Renun (Lau Bengap) yang bermuara Samudra Hindia. Jumlah anak-anak sungai yang bermuara ke kedua sungai diatas tercatat lebih kurang 43 buah. Pada umumnya Daerah Aliran Sungai (DAS) anak-anak sungai tersebut relatif kecil dan mempunyai kemiringan relatif tinggi.

Selain dari pada air dalam bentuk aliran sungai dan anak-anak sungai juga terdapat air permukaan dalam bentuk danau yakni Danau

Lau Kawar di Kecamatan Naman Teran dan Danau Toba di Kecamatan Merek.

Wilayah aliran sungai di Kabupaten Karo terdiri dari 6 (enam) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu Daerah Aliran Sungai (DAS) Alas, DAS Deli, DAS Percut, DAS Sei Ular, DAS Serdang, dan DAS Wampu.

2.1.1.1.6. **Klimatologi**

Kabupaten Karo terletak dekat dengan garis khatulistiwa, sehingga keadaan iklim di Kabupaten Karo tergolong ke dalam daerah beriklim tropis yang mempunyai 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Tipe iklim daerah Kabupaten Karo adalah E2 menurut klasifikasi *Oldeman* dengan bulan basah lebih tiga bulan dan bulan kering berkisar 2–3 bulan atau A menurut *Koppen* dengan curah hujan rata-rata di atas 1.000 mm/tahun dan merata sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 1.000–4.000 mm/tahun. Musim hujan pertama mulai bulan Agustus sampai dengan Januari dan musim kedua pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, sedangkan musim kemarau biasanya pada bulan Februari, Juni dan Juli.

Untuk lebih jelasnya curah hujan dan hari hujan di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.2
Curah Hujan dan Hari Hujan Kabupaten Karo

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan (hari)
1	Januari	86	7
2	Februari	60	3
3	Maret	136	6
4	April	200	15
5	Mei	109	9
6	Juni	95	8
7	Juli	232	17
8	Agustus	54	8
9	September	190	13
10	Oktober	175	13
11	November	180	14
12	Desember	199	17

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa curah hujan di Kabupaten Karo tahun 2020 tertinggi pada bulan Juli sebesar 232 mm dan terendah pada bulan Agustus sebesar 54 mm. Sedangkan jumlah hari hujan tertinggi pada bulan Juli dan Desember sebanyak 17 hari dan terendah pada bulan Februari sebanyak 3 hari.

Suhu udara di Kabupaten Karo berkisar antara 17,4°C–23,6°C dengan kelembaban udara antara 86,9–117,7 %. Sedangkan arah angin di Kabupaten Karo terbagi atas dua musim yakni:

- a. Angin berhembus dari arah Barat, kira-kira bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.
- b. Angin berhembus dari arah Timur dan Tenggara, antara bulan April sampai dengan bulan September.

2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan

Kabupaten Karo memiliki lahan pertanian yang luas. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Karo pada tahun 2019, dipergunakan untuk lahan sawah sebesar 10.223 ha (4,81%), lahan pertanian bukan sawah 187.302 ha (88,05%), dan Lahan penggunaan lainnya 15.200 ha (7,14%).

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Peraturan Daerah Kabupaten Karo tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karo sampai dengan tahun 2020 masih dalam tahap penyusunan, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi Dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten Kota dan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi, Kabupaten dan Kota. Adapun pemanfaatan dan pengembangan wilayah Kabupaten Karo berdasarkan *draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo terbagi dalam rencana struktur ruang dan pola ruang.

2.1.1.2.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Karo berdasarkan *draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo terdiri dari:

-
1. Sistem pusat kegiatan meliputi Pusat Kegiatan Lokal, Pusat Pelayanan Kawasan dan Pusat Pelayanan Lokal;
 2. Sistem jaringan transportasi meliputi Sistem jaringan transportasi darat dan Sistem jaringan transportasi udara;
 3. Sistem jaringan energi meliputi Sistem jaringan energi kelistrikan dan Sistem jaringan prasarana energi;
 4. Sistem jaringan telekomunikasi meliputi Jaringan teresterial, Jaringan satelit dan Jaringan bergerak seluler;
 5. Sistem jaringan sumber daya air meliputi Sumber air dan Prasarana sumber daya air; dan
 6. Sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi sistem persampahan, pengelolaan air limbah, penyediaan air bersih wilayah, drainase, proteksi kebakaran, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki serta jalur dan ruang evakuasi bencana.

Namun dilihat dari RTRWN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional bahwa Kecamatan Kabanjahe merupakan Pusat Kegiatan Lokal dengan Jalan Kabanjahe-Berastagi dan Jalan Kabanjahe-Dairi merupakan Jalan Kolektor Primer.

2.1.1.2.2. Rencana Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Kabupaten Karo berdasarkan *draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo meliputi:

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan terdiri atas:

- a) Kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 65,617 hektar meliputi Kecamatan Mardinding, Lau Baleng, Kutabuluh, Tigabinanga, Juhar, Munte, Merek, Simpang Empat, Barusjahe, Dolatrayat, dan Berastagi.
- b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya meliputi sebagian Kecamatan Merek, Barusjahe, Namanteran, Tiganderket, Payung, Kutabuluh, sebagian Kecamatan Munte, Tigabinanga, Mardinding, Dolatrayat, Tigapanah, Simpang Empat, dan sebagian Kecamatan Juhar.

-
- c) Kawasan Perlindungan setempat meliputi sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
- d) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya yang meliputi:
- ✓ Taman Hutan Raya yang berada di Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Naman Teran, sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, Berastagi, Dolat Rayat, dan Barusjahe.
 - ✓ Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan di Desa Lingga di Kecamatan Simpang Empat, Desa Dokan di Kecamatan Merek, Gua Liang Dahar di Kecamatan Kutabuluh, Gua Erci di Kecamatan Barusjahe, Gua Ling-ling Gara di Kecamatan Mardinding, Meriam Puntung di Desa Sukanalu Kecamatan Barusjahe, Hikayat Putri Hijau di Desa Seberaya Kecamatan Tigapanah dan Palas Si Pitu Ruang di Desa Ajinembah Kecamatan Merek.
- e) Kawasan Rawan Bencana Alam meliputi:
- ✓ Kawasan rawan banjir di Kecamatan Laubaleng dan Mardinding
 - ✓ Kawasan rawan banjir bandang di Kecamatan Juhar, Kabanjahe, Kutabuluh, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Munte, Payung, Simpang Empat, Tigabinanga, dan Tiganderket.
 - ✓ Kawasan cuaca ekstrim di seluruh kecamatan Kabupaten Karo
 - ✓ Kawasan Gempa Bumi di Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Laubaleng, Mardinding, Merek dan Tigabinanga.
 - ✓ Kawasan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kecamatan Barusjahe, Juhar, Mardinding, Merek dan Tigabinanga
 - ✓ Kawasan kekeringan di Kecamatan Barusjahe, Berastagi, Dolatrayat, Kabanjahe, Laubaleng, Mardinding, Merdeka, Merek, Munte, Namanteran, Simpang Empat, dan Tigapanah.
 - ✓ Kawasan rawan bencana letusan gunungapi Sibayak di Kecamatan Namanteran.
 - ✓ Kawasan rawan bencana letusan gunungapi Sinabung di Kecamatan Payung, Tiganderket, Namanteran, dan Simpang Empat.
- f) Kawasan Lindung Geologi meliputi batu mil-mil yang terletak di Kecamatan Kabanjahe

- g) Kawasan Lindung Lainnya meliputi kawasan koridor bagi jenis satwa yang dilindungi meliputi Koridor Aceh-Sumatera Utara yang menghubungkan Taman Nasional Gunung Leuser–Taman Hutan Raya Bukit Barisan sebagai koridor satwa Badak, Gajah, Orang Utan, Harimau, dan Burung di sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolatrayat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Karo meliputi:

- a. Hutan Produksi Terbatas memiliki luasan 4.455 ha meliputi Kecamatan Juhar, Lau Baleng dan Juhar.
- b. Hutan Produksi Tetap memiliki luasan 4.127 ha meliputi Kecamatan Juhar, Kutabuluh, Merek, Munte dan Tigabinanga.
- c. Kawasan pertanian lahan basah dengan luasan lebih kurang 13.601 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- d. Kawasan pertanian lahan kering dengan luasan lebih kurang 73.108 Ha tersebar di seluruh kecamatan dan dikelola secara intensif untuk peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan.
- e. Kawasan peruntukan perkebunan seluas kurang lebih 25.422 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- f. Kawasan Peternakan hewan besar meliputi Kecamatan Berastagi, Merdeka, Simpang Empat, Merek, Tigapanah, Tiganderket, Tigabinanga, Kutabuluh, Juhar, Payung, Laubaleng, Mardinding dan Munte.
- g. Kawasan Peternakan hewan kecil meliputi Kecamatan Dolat Rayat, Merdeka, Namanteran, Simpang Empat, Merek, Barusjahe, Payung, Munte, Mardinding dan Laubaleng.
- h. Kawasan Peternakan unggas meliputi Kecamatan Tigapanah, Tigabinanga, Munte dan Juhar.
- i. Kawasan perikanan budidaya di perairan umum yang tersebar di wilayah Kabupaten Karo.
- j. Kawasan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Merek dan Namanteran.
- k. Kawasan pertambangan mineral logam dan pengikutnya di Kecamatan Lau Baleng, Mardinding, Juhar dan Munte.

-
- l. Kawasan pertambangan mineral bukan logam di Kecamatan Kutabuluh, Payung, Namanteran, Mardinding, Lau Baleng, Tiganderket, dan Munte.
 - m. Kawasan pertambangan batuan di Kecamatan Tigabinanga, Merek, Kabanjahe, Tiganderket, Payung, Kutabuluh, Laubaleng, dan Mardinding.
 - n. Kawasan pertambangan panas bumimeliputi Kecamatan Merdeka, Payung, Tiganderket, dan Namanteran.
 - o. Kawasan pertambangan air tanah tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Karo.
 - p. Kawasan pertambangan radio aktif meliputi Kecamatan Mardinding dan Kutabuluh.
 - q. Kawasan peruntukan industri rumah tangga, kawasan peruntukan industri kecil, kawasan peruntukan industri menengah tersebar di seluruh wilayah kabupaten.
 - r. Kawasan peruntukan industri besar meliputi Kecamatan Merek, Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga dan Berastagi.
 - s. Kawasan peruntukan pariwisata terdiri atas Kawasan Strategis Pariwisata Liang Melas sebagai kawasan Agrowisata dan Ekowisata, Kawasan Strategis Pariwisata Namokarang Siosar sebagai kawasan Agro-ekowisata berbasis budaya, Kawasan Strategis Pariwisata Gajah Bobok Tongging sebagai kawasan Geowisata Supervolcano Toba berbasis budaya Karo dan pengembangan Desa Wisata Dokan, Kawasan Strategis Pariwisata Liang Dahar-Titan Arum sebagai Kawasan Geowisata Gua Liang Dahar dan Ekowisata Bunga Titan Arum, Kawasan Strategis Pariwisata Sinabung sebagai Kawasan Geowisata Gunung Api Sinabung dan Agrowisata, Kawasan Strategis Pariwisata Barus Sibayak sebagai kawasan strategis Geowisata Gunung Api Sibayak–Barus dan Agrowisata.
 - t. Kawasan peruntukan permukiman dengan luasan lebih kurang 2.427 ha meliputi kawasan permukiman dengan kepadatan tinggi dan kepadatan sedang di Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Tigabinanga, Merek, Munte, Tigapanah, Kutabuluh, Dolat Rayat, Barusjahe dan permukiman perdesaan tersebar di seluruh kecamatan.
 - u. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara meliputi Markas Komando Militer 0205/TK di Kecamatan Berastagi, Yonif

125/Simbisa Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe, Kepolisian Resort Tanah Karo di Kecamatan Kabanjahe, Kepolisian Sektor tersebar di ibukota kecamatan dan Komando Rayon Militer tersebar di ibukota kecamatan.

3) Kawasan Strategis

- a. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi kawasan penguatan ketahanan pangan di Kecamatan Juhar, Munte, Tiganderket, Tigabinanga, Lau Baleng, Kutabuluh, dan Mardinding, kawasan pengembangan hortikultura di Kecamatan Berastagi, Dolatrayat, Merdeka, Namanteran, Tigapanah, dan Merek, kawasan pariwisata budaya dan alam di Kecamatan Merek, Simpang Empat, Dolat Rayat, Berastagi, Namanteran, Juhar, dan Merdeka dan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Berastagi, Kabanjahe, Merek, Tigabinanga, Tigapanah, dan Simpang Empat.
- b. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi Desa Lingga di Kecamatan Simpang Empat, Rumah pengasingan Presiden Republik Indonesia pertama di desa Lau Gumba Kecamatan Berastagi dan Desa Dokan di Kecamatan Merek.
- c. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Danau Toba dan sekitarnya di Kecamatan Merek, Kawasan ekosistem Leuser di Kecamatan Mardinding, Kutabuluh, dan Tiganderket, Kawasan Taman Hutan Rakyat di Kecamatan Kutabuluh, Tiganderket, Namanteran, sebagian wilayah Kecamatan Merdeka, sebagian wilayah Kecamatan Berastagi, sebagian wilayah Kecamatan Dolatrayat, dan sebagian wilayah Kecamatan Barusjahe dan Kawasan rawan bencana Gunung api Sinabung dan Sibayak.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Jenis bencana berdasarkan UU Nomor

24/2007 dibedakan menjadi bencana alam, bencana nonalam dan bencana sosial, berdasarkan penyebab kejadiannya. Penjelasan pengertian jenis tersebut ialah:

- 1) Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
- 2) Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
- 3) Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas dan teror.

Sejarah bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Karo terdiri dari banjir, letusan gunung api, longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kecelakaan transportasi. Dari kejadian ini juga terdapat satu kejadian banjir yang disertai dengan tanah longsor.

Dari Analisis Kajian Resiko Bencana Kabupaten Karo juga terdapat beberapa tambahan potensi bencana yang dapat terjadi di Kabupaten Karo yaitu bencana gempa bumi, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi serta kebakaran hutan dan lahan. Melalui Kajian Resiko Bencana terdapat 4 (empat) prioritas jenis bencana yaitu, letusan Gunung Api Sinabung, gempa bumi, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan. Rekapitulasi kajian bahaya di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kabupaten Karo

Jenis Bahaya	Bahaya	
	Total Luas (ha)	Kelas
Banjir	7.542	Tinggi
Banjir Bandang	3.185	Tinggi
Cuaca Ekstrim	164.569	Tinggi
Gempa Bumi	212.723	Tinggi
Kebakaran Hutan dan Lahan	66.117	Tinggi
Kekeringan	212.723	Tinggi
Letusan Gunung Api Sibayak	10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung	44.635	Tinggi
Longsor	103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.1. Banjir

Peristiwa banjir adalah tergenangnya suatu wilayah daratan yang normalnya kering dan diakibatkan oleh sejumlah hal, antara lain air yang meluap yang disebabkan curah hujan yang tinggi dan sejenisnya. Dalam beberapa kondisi, banjir bisa menjadi bencana yang merusak lingkungan dan bahkan merenggut nyawa manusia. Oleh sebab itu, penanganan terhadap penyebab banjir selalu menjadi hal yang serius. Potensi bencana banjir dikaji berdasarkan parameter-parameter dalam pengkajian risiko bencana, parameter tersebut adalah:

1. Daerah rawan banjir dan kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
2. Jarak dari sungai, data yang digunakan jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
3. Curah hujan, data yang digunakan curah hujan wilayah dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016

Berdasarkan perhitungan parameter-parameter bahaya banjir, dapat ditentukan kelas bahaya dan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Karo. Berdasarkan parameter bahaya banjir tersebut, maka

diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya banjir di Kabupaten Karo, seperti pada tabel berikut.

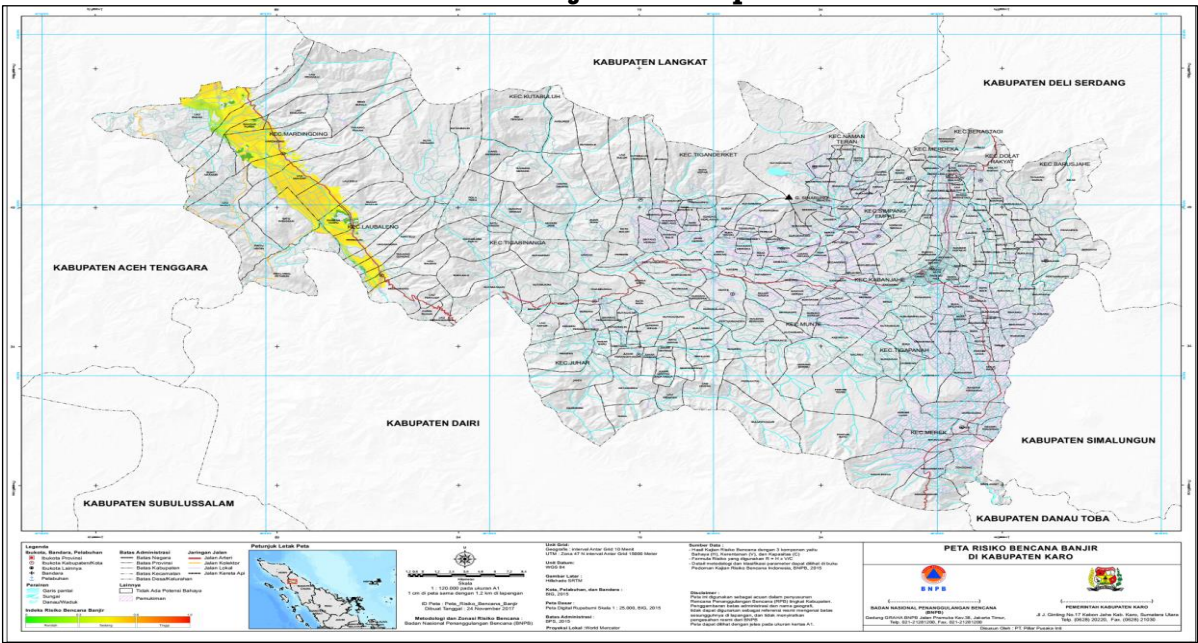
Tabel 2.4
Potensi Bahaya Banjir Klasifikasi Tinggi di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Laubaleng	2.951	Tinggi
2	Mardingding	4.591	Tinggi
Total Kabupaten Karo		7.542	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir di Kabupaten Karo terdapat pada 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Laubaleng dan Mardinding. Berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir di Kabupaten Karo adalah **7.542 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kabupaten/kota terdampak. Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo dapat dilihat di bawah ini.

Peta 2.4
Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.2. Banjir Bandang

Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh kosentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendungan alam, yang terbentuk dari material longsor gelincir pada area hulu sungai.

Pengkajian bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo dilakukan berdasarkan parameter bahaya banjir bandang, yaitu:

- 1. Sungai utama, data yang digunakan adalah jaringan sungai dengan sumber data BIG Tahun 2013
- 2. Topografi, data yang digunakan adalah DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
- 3. Potensi longsor di hulu sungai, data yang digunakan adalah peta bahaya tanah longsor dengan sumber data USGS Tahun 2000 dan PVMBG Tahun 2010

Dari parameter bahaya banjir bandang tersebut, maka dapat ditentukan luas terpapar bahaya banjir bandang per kecamatan di Kabupaten Karo. Luas bahaya banjir bandang dapat dilihat pada tabel berikut.

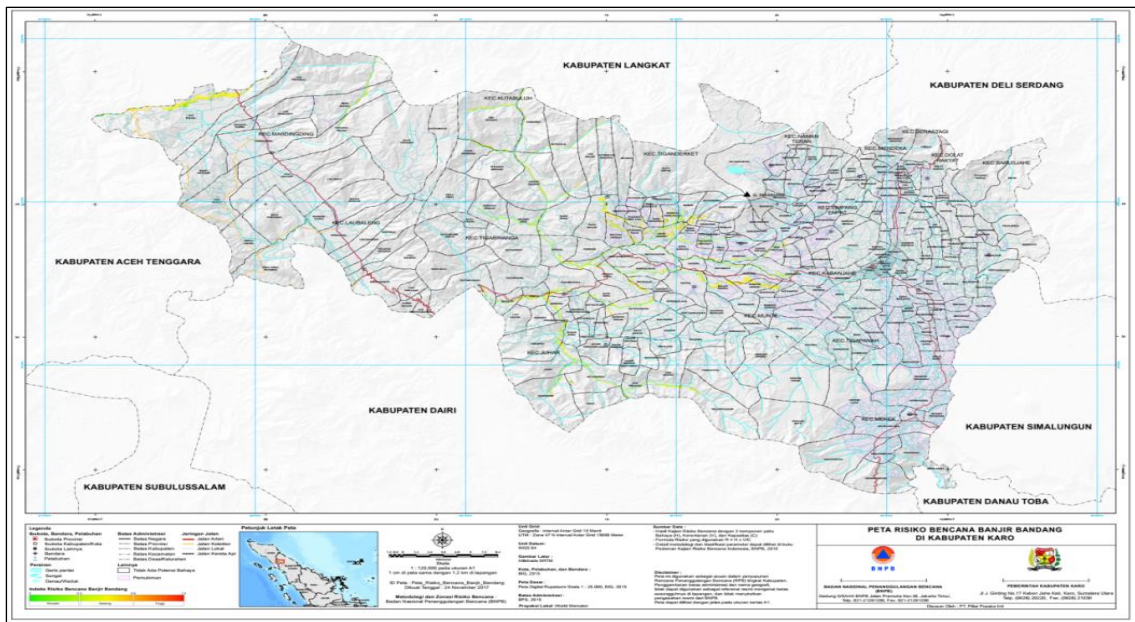
Tabel 2.5
Potensi Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Juhar	518	Tinggi
2	Kabanjahe	51	Tinggi
3	Kutabuluh	624	Tinggi
4	Laubaleng	7	Tinggi
5	Mardingding	397	Tinggi
6	Munte	465	Tinggi
7	Payung	160	Tinggi
8	Simpang Empat	54	Tinggi
9	Tigabinanga	515	Tinggi
10	Tiganderket	393	Tinggi
Total Kabupaten Karo		3.185	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana banjir bandang, diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Kabupaten Karo di 10 (Sepuluh) kecamatan, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana banjir bandang di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **3.185 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Resiko bencana banjir bandang di Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta berikut.

Peta 2.5
Risiko Bencana Banjir Bandang di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.3. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, dimana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi dan kondisi atmosfer. Bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Karo, cuaca ekstrim diantaranya adalah angin puting beliung dan hujan es yang sering terjadi di Kabupaten Karo. Potensi bahaya cuaca Ekstrim per kecamatan di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.267	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi
4	Juhar	13.789	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi
6	Kutabuluh	11.153	Tinggi
7	Laubaleng	16.620	Tinggi
8	Mardingding	17.910	Tinggi
9	Merdeka	4.393	Tinggi
10	Merek	7.292	Tinggi
11	Munte	11.326	Tinggi
12	Naman Teran	6.884	Tinggi
13	Payung	4.517	Tinggi
14	Simpang Empat	9.346	Tinggi
15	Tigabinanga	14.277	Tinggi
16	Tiganderket	5.371	Tinggi
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		164.569	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

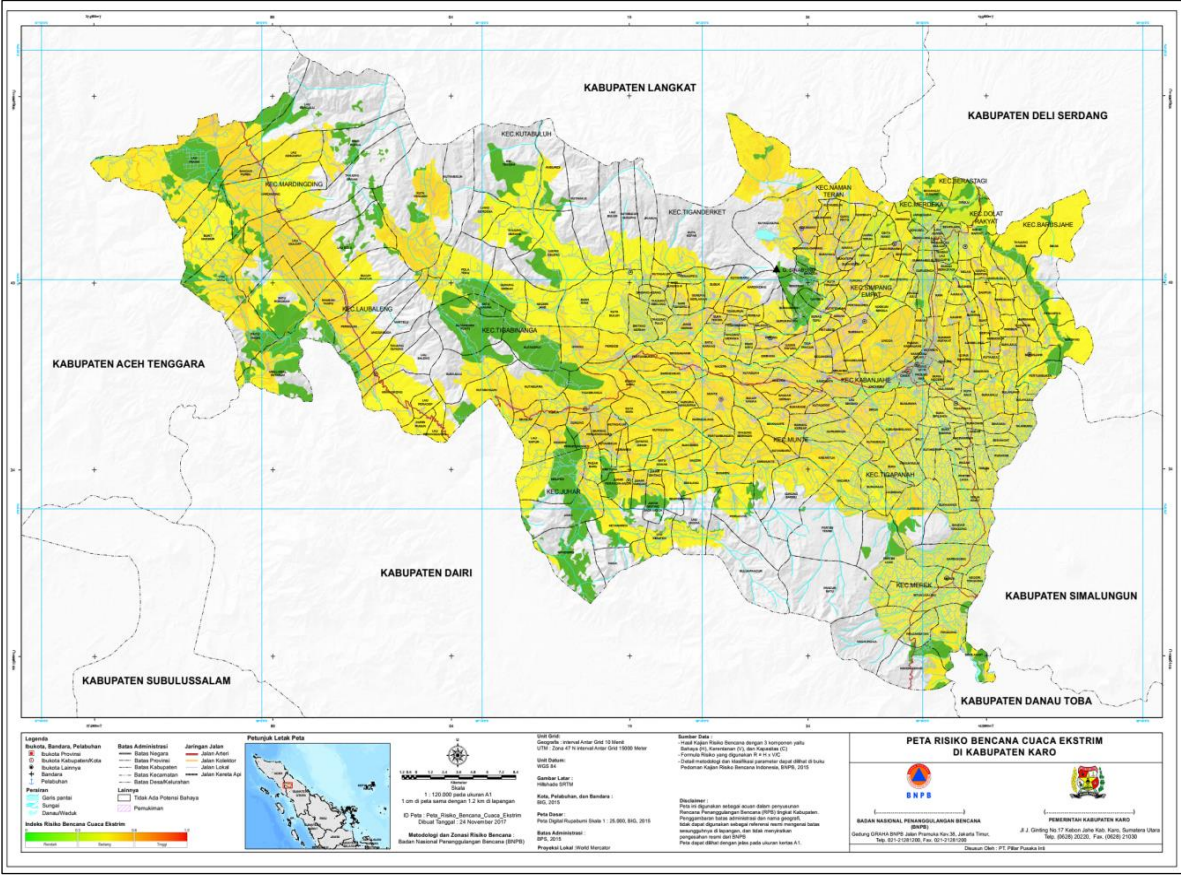
Perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter berikut:

1. Keterbukaan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016
2. Kemiringan lereng, data yang digunakan DEM AVG 30 dengan sumber data ALOS Tahun 2000
3. Curah hujan tahunan, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016.

Berdasarkan parameter bahaya cuaca ekstrim tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo, sebagaimana tabel tersebut di atas dapat menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana cuaca ekstrim diperoleh bahwa potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Kabupaten Karo terdapat di 17 kecamatan dan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Karo total luas bahaya adalah **164.569 ha** yang

berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Karo dapat dilihat sebagai mana peta berikut.

Peta 2.6
Risiko Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.4. Gempa Bumi

Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuhnya batuan (BNPB, *Definisi dan Jenis bencana*, <http://www.bnpb.go.id>). Pengkajian bahaya gempa bumi di Kabupaten Karo dilakukan berdasarkan parameter bahaya gempa bumi, yaitu:

1. Kelas topografi, data yang digunakan DEM AVG30, sumber data ALOS Tahun 2000
2. Intensitas guncangan pada batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan, data yang digunakan peta zona gempa bumi (s1 1.0” di SB untuk probabilitas terlampaui 10% dalam 50 tahun (redaman 5%) dengan sumber data JICA Tahun 2016.

Dari hasil analisa kondisi daerah terhadap setiap parameter tersebut, dapat ditentukan potensi bahaya gempa bumi Kabupaten Karo. Luas bahaya gempa bumi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Potensi Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Karo

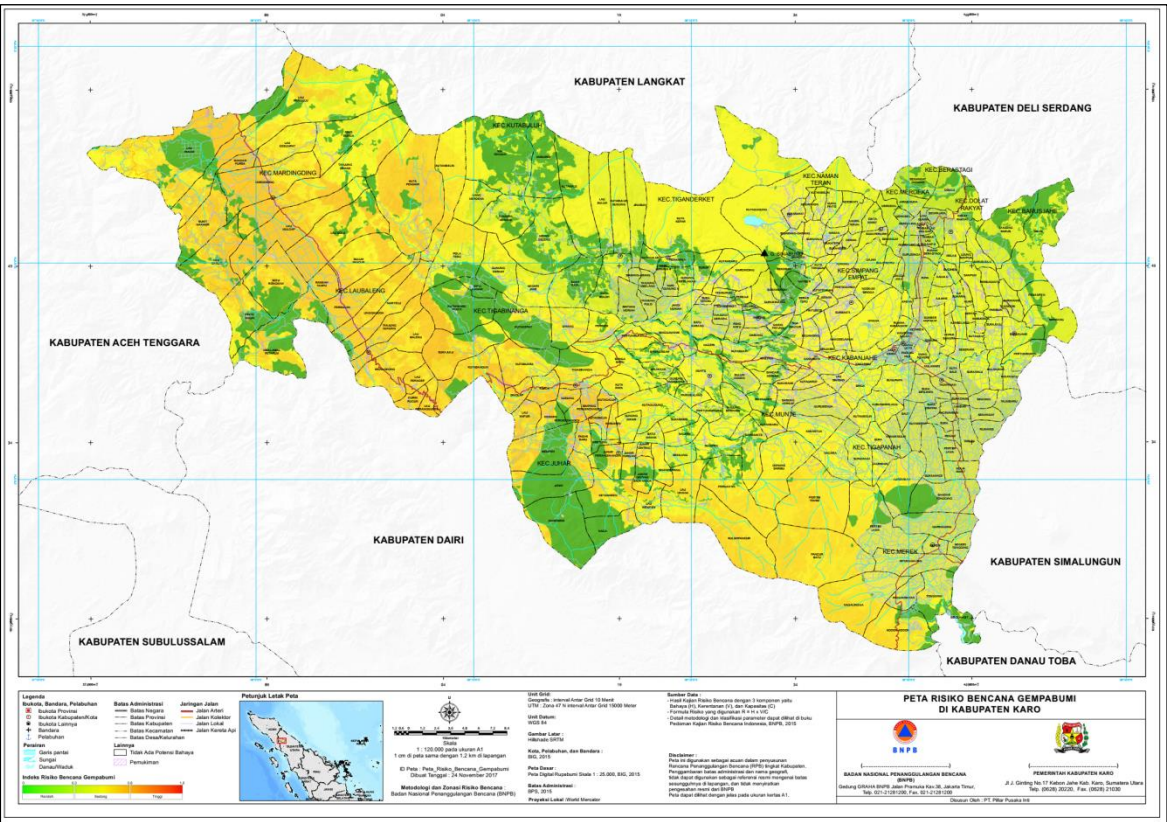
No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.804	Sedang
2	Berastagi	3.050	Sedang
3	Dolat Rakyat	3.225	Sedang
4	Juhar	21.857	Tinggi
5	Kabanjahe	4.465	Sedang
6	Kutabuluh	19.569	Tinggi
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Sedang
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Sedang
12	Naman Teran	8.782	Sedang
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Sedang
15	Tigabinanga	16.039	Tinggi
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Sedang
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan dan berdasarkan luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut sedangkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana gempa bumi di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh

berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo dapat dilihat pada pada peta berikut.

Peta 2.7
Risiko Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.5. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan merupakan kebakaran permukaan dimana api membakar bahan bakar yang ada di atas permukaan (misalnya: serasah, pepohonan, semak, dan lain-lain), api kemudian menyebar tidak menentu secara perlahan di bawah permukaan (ground fire), membakar bahan organik melalui pori-pori tanah dan melalui akar semak belukar/pohon yang bagian atasnya. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter berikut:

1. Jenis hutan dan lahan, data yang digunakan peta penutupan/penggunaan lahan dengan sumber data KEMENLHK Tahun 2016.
2. Iklim, data yang digunakan peta curah hujan tahunan dengan sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016.
3. Jenis tanah, data yang digunakan peta jenis tanah dengan sumber data BBSDLP Tahun 2016.

Berdasarkan parameter bahaya kebakaran hutan dan lahan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karo seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Potensi Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per kecamatan di Kabupaten Karo

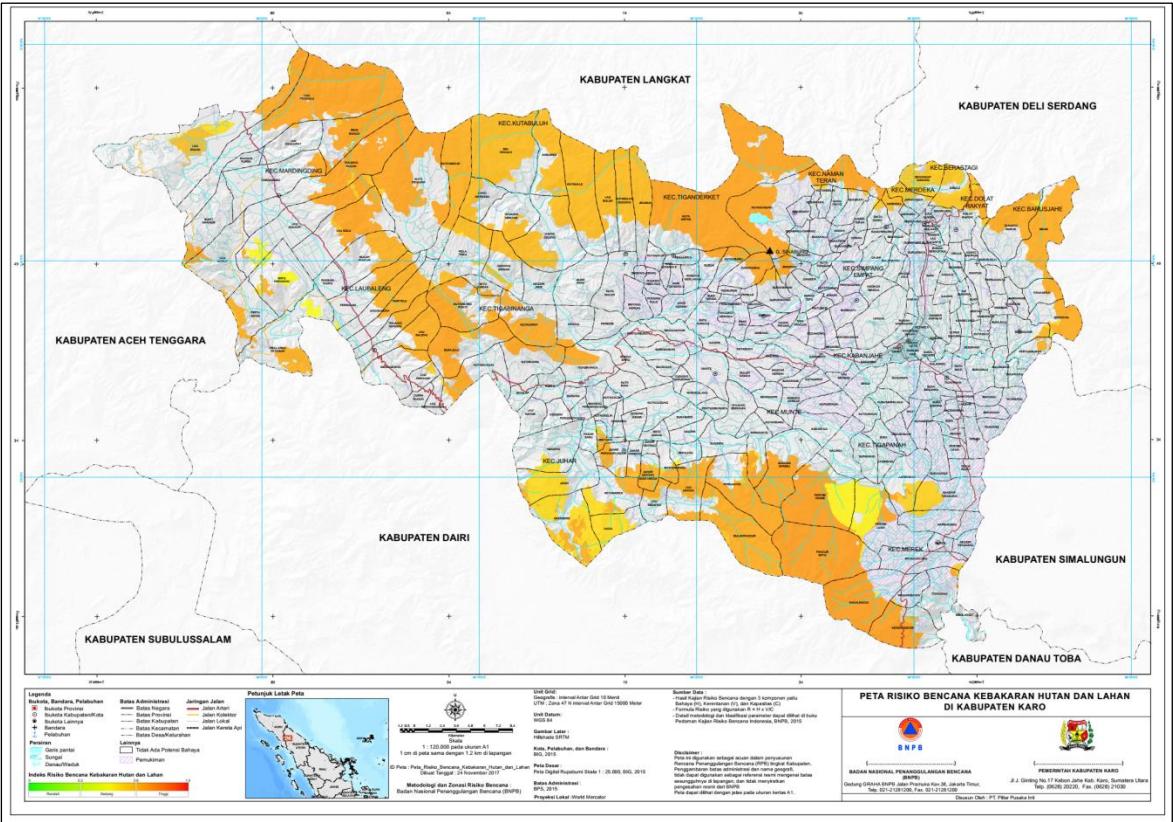
No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	4.051	Tinggi
2	Berastagi	736	Sedang
3	Dolat Rakyat	477	Sedang
4	Juhar	9.685	Tinggi
5	Kutabuluh	9.836	Sedang
6	Laubaleng	9.092	Sedang
7	Mardingding	10.979	Tinggi
8	Merdeka	1.704	Sedang
9	Merek	5.479	Tinggi
10	Munte	1.317	Sedang
11	Naman Teran	3.080	Sedang
12	Payung	209	Sedang
13	Simpang Empat	1	Sedang
14	Tigabinanga	4.622	Tinggi
15	Tiganderket	4.848	Sedang
Total Kabupaten Karo		66.117	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil kajian bahaya terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan diperoleh bahwa potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karo

terdapat di 15 kecamatan. Luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Karo adalah **66.117 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo dapat dilihat pada peta tersebut di bawah ini.

Peta 2.8
Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.6. Kekeringan

Kekeringan merupakan suatu kondisi dalam kurun waktu yang panjang, bulan atau tahun, dimana suatu daerah mengalami kekurangan air. Pada umumnya terjadi ketika daerah tersebut secara terus-menerus mengalami hujan di bawah rata-rata. Hal ini bisa mengakibatkan dampak substansial terhadap ekosistem dan pertanian dari daerah yang terkena bencana kekeringan. Rawan kekeringan adalah kurun waktu kekeringan yang relatif lebih lama dari biasanya, atau kurang dari 50% curah hujan lebih sedikit dari rata-rata dalam kurun waktu tiga bulan. Kekeringan menyangkut neraca air antara presipitasi dan evapotranspirasi. Kekeringan tidak hanya dilihat sebagai fenomena fisik cuaca saja, tapi

juga sebagai fenomena yang terkait dengan tingkat kebutuhan masyarakat terhadap air.

Parameter yang digunakan adalah kekeringan meteorologi data yang digunakan curah hujan bulanan (*CHIRPS periode 1986–2016*) dari sumber data CHIRPS Tahun 1986-2016. Berdasarkan perhitungan parameter bahaya kekeringan, dapat ditentukan besaran potensi luas bahaya di Kabupaten Karo. Berdasarkan parameter bahaya kekeringan tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya dan kelas bahaya kekeringan di Kabupaten Karo, seperti pada tabel di bawah ini.

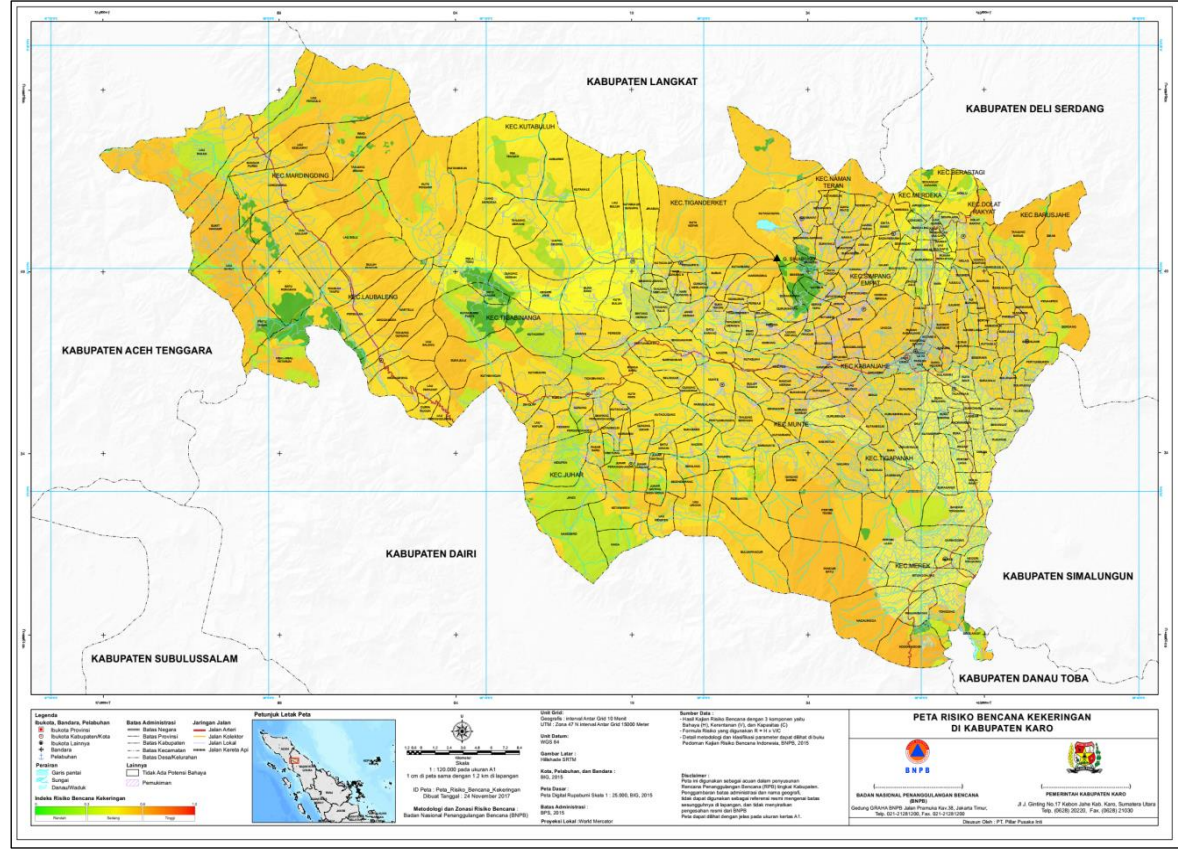
Tabel 2.9
Potensi Bahaya Kekeringan per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	12.804	Tinggi
2	Berastagi	3.050	Tinggi
3	Dolat Rakyat	3.225	Tinggi
4	Juhar	21.857	Sedang
5	Kabanjahe	4.465	Tinggi
6	Kutabuluh	19.569	Sedang
7	Laubaleng	25.260	Tinggi
8	Mardingding	26.710	Tinggi
9	Merdeka	4.417	Tinggi
10	Merek	12.551	Tinggi
11	Munte	12.564	Tinggi
12	Naman Teran	8.782	Tinggi
13	Payung	4.725	Sedang
14	Simpang Empat	9.348	Tinggi
15	Tigabinanga	16.039	Sedang
16	Tiganderket	8.675	Sedang
17	Tigapanah	18.684	Tinggi
Total Kabupaten Karo		212.723	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana kekeringan diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Karo terdapat di 17 (Tujuh belas) kecamatan, luas bahaya dan kelas bahaya seluruh kecamatan tersebut diketahui luas wilayah yang berpotensi mengalami bahaya kekeringan di Kabupaten Karo adalah **212.723 ha** yang berada pada kelas **tinggi**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta tersebut di bawah.

Peta 2.9
Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.7. Letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung

Letusan gunung api bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan istilah "erupsi". Bahaya letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material (pijar), hujan abu lebat, lava, gas racun dan banjir lahar (*Definisi dan Jenis Bencana, BNPB*). Paramater yang digunakan untuk menghitung luas bahaya letusan gunungapi antara lain zona aliran (aliran lava, aliran piroklastik, gas beracun, lahar erupsi, dan suage), dan zona jatuhan (jatuhan piroklastik).Hasil dari pengkajian

potensi bahaya berdasarkan parameter tersebut menentukan kelas bahaya setiap di Kabupaten Karo. Maka diperoleh hasil kajian bahaya letusan Gunung Api Sibayak dan Sinabung untuk Kabupaten Karo seperti terlihat pada tabel berikut.

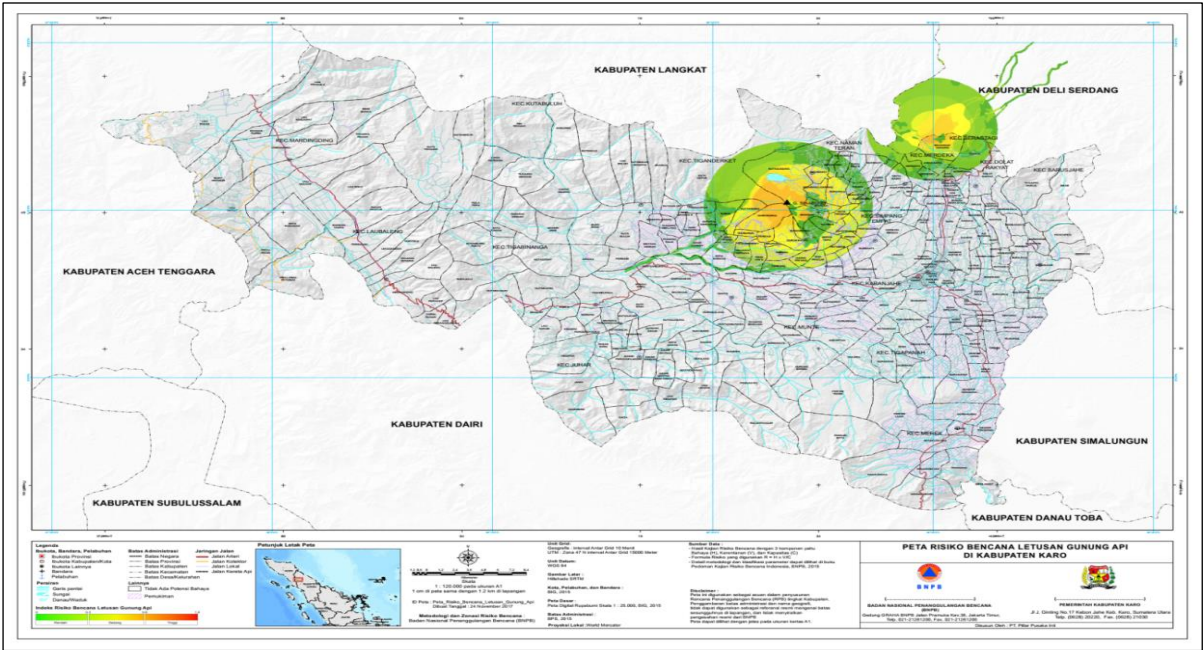
Tabel 2.10
Potensi Bahaya di Gunung Api Sinabung dan Sibayak per Kecamatan di Kabupaten Karo

No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (Ha)	Kelas
Letusan Gunung Api Sibayak			
1	Berastagi	1.042	Rendah
2	Merdeka	7.389	Sedang
3	Naman Teran	1.679	Tinggi
Total Kabupaten Karo		10.110	Tinggi
Letusan Gunung Api Sinabung			
1	Kabanjahe	144	Rendah
2	Kutabuluh	31	Rendah
3	Merdeka	90	Rendah
4	Munte	444	Rendah
5	Naman Teran	13.687	Tinggi
6	Payung	14.771	Tinggi
7	Simpang Empat	8.812	Tinggi
8	Tigabinanga	12	Rendah
9	Tiganderket	6.639	Tinggi
Total Kabupaten Karo		44.635	Tinggi

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa hasil pengkajian bahaya terhadap bencana Gunung Api Sibayak dan Sinabung. Diketahui potensi luas bahaya letusan Gunung Api Sibayak tersebar di 3 (Tiga) kecamatan dan Gunung Api Sinabung pada 9 (Sembilan) kecamatan. Berdasarkan luas dan kelas bahaya, dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana letusan Gunung Api Sibayak adalah **10.110 ha** yang berada pada kelas **tinggi** dan luas bencana Gunung Api Sinabung adalah **44.635 ha** yang berada pada kelas **tinggi**.

Peta 2.10
Risiko Bencana Letusan Gunung Api di Kabupaten Karo

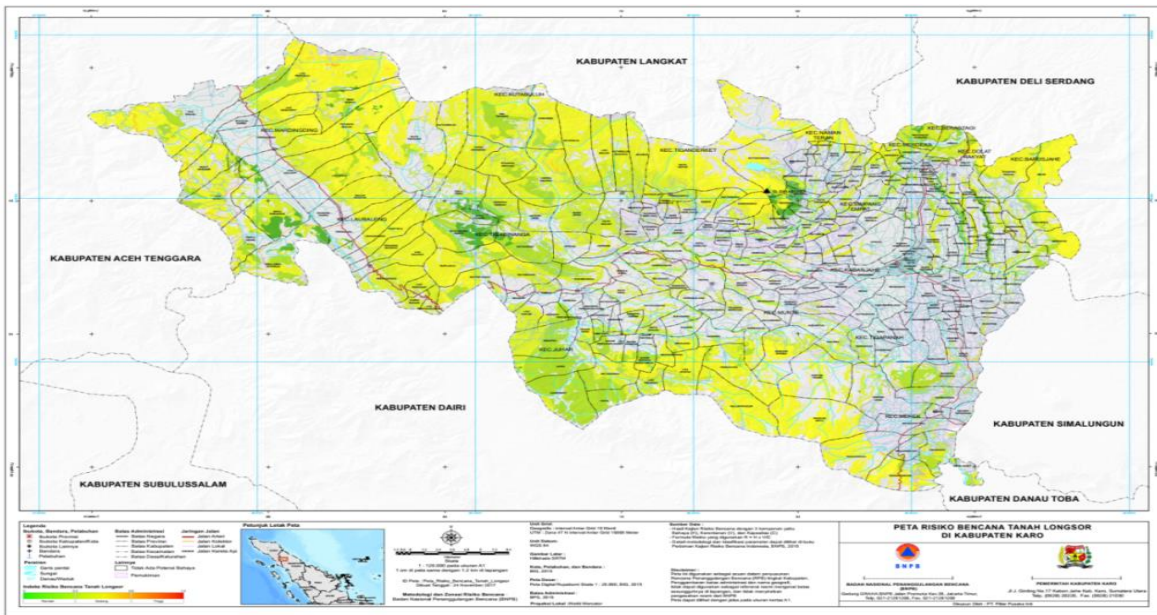


Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

2.1.1.3.8. Longsor

Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng (BNPB, Definisi dan Jenis bencana, <http://www.bnpb.go.id>). Faktor utama penyebab terjadinya tanah longsor adalah jenis tanah pada lapisan atas permukaan (*top soil*), vegetasi penutup, kemiringan lereng, dan tinggi rendahnya curah hujan.

Peta 2.11
Risiko Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Dari parameter bahaya tanah longsor tersebut, maka dapat ditentukan potensi luas bahaya terpapar bencana tanah longsor per kecamatan di Kabupaten Karo. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Potensi Bahaya di Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Karo

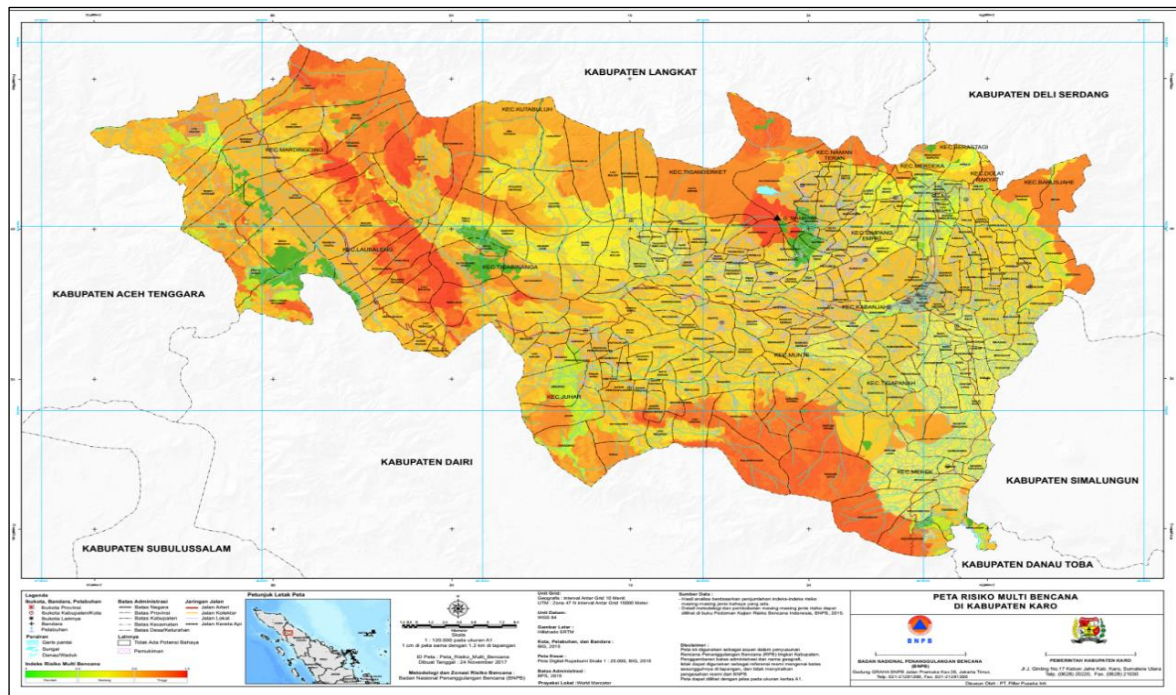
No	Kecamatan	Bahaya	
		Total Luas (ha)	Kelas
1	Barusjahe	6.438	Sedang
2	Berastagi	1.101	Sedang
3	Dolat Rakyat	1.172	Sedang
4	Juhar	14.992	Sedang
5	Kabanjahe	373	Sedang
6	Kutabuluh	15.032	Sedang
7	Laubaleng	16.257	Sedang
8	Mardingding	16.570	Sedang
9	Merdeka	2.434	Sedang
10	Merek	4.634	Sedang
11	Munte	3.038	Sedang
12	Naman Teran	3.770	Sedang
13	Payung	1.366	Sedang
14	Simpang Empat	1.794	Sedang
15	Tigabinanga	8.756	Sedang
16	Tiganderket	4.426	Sedang
17	Tigapanah	1.694	Sedang
Total Kabupaten Karo		103.845	Sedang

Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Tabel tersebut menjelaskan hasil pengkajian bahaya terhadap bencana tanah longsor. Hasilnya diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Kabupaten Karo terdapat di 17 (tujuh belas) kecamatan seperti yang tertera pada tabel di atas. Berdasarkan luas bahaya dan kelas

bahaya seluruh kecamatan tersebut, maka dihasilkan luas wilayah yang berpotensi mengalami bencana tanah longsor di Kabupaten Karo, total luas bahaya adalah **103.845 ha** yang berada pada kelas **sedang**. Penentuan kelas bahaya diperoleh berdasarkan kelas bahaya maksimal per kecamatan terdampak. Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Karo secara umum dapat dilihat pada peta berikut.

Peta 2.12
Risiko Multi-Bencana di Kabupaten Karo



Sumber: Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Karo 2018-2022

Demografi

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan.

Secara demografi, hasil sensus tahun 2020 Penduduk Kabupaten Karo berjumlah 404.998 jiwa yang mendiami wilayah seluas 2.127,25 km². Kepadatan penduduk diperkirakan sebesar 190 jiwa/km². Laju Pertumbuhan Penduduk Karo adalah sebesar 1,40 persen per tahun.

Jumlah desa, luas wilayah dan jumlah penduduk per kecamatan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kel	Penduduk (ribu)	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk Tiap Km ²
1	Mardingding	12	19.954	267,11	75
2	Laubaleng	15	20.652	252,60	82
3	Tigabinanga	20	22.395	160,38	140
4	Juhar	25	14.787	218,56	68
5	Munte	22	22.909	125,64	182
6	Kutabuluh	16	12.602	195,70	64
7	Payung	8	12.249	47,24	259
8	Tiganderket	17	14.555	86,76	168
9	Simpang Empat	17	21.355	93,48	228
10	Naman Teran	14	14.622	87,82	166
11	Merdeka	9	15.580	44,17	353
12	Kabanjahe	13	73.581	44,65	1648
13	Berastagi	10	48.244	30,50	1582
14	Tigapanah	26	34.263	186,84	183
15	Dolat Rayat	7	9.848	32,25	305
16	Merek	19	22.746	125,51	181
17	Barusjahe	19	24.656	128,04	193
Jumlah 2020		269	404.998	2.127,25	190

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Kabanjahe, dengan kepadatan penduduk sebanyak 1.648 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Berastagi sebanyak 1.582 jiwa/km². Kepadatan penduduk terdapat di kecamatan tersebut, disebabkan karena Kecamatan Kabanjahe sebagai ibukota kabupaten yang merupakan pusat kegiatan jasa dan perdagangan di wilayah Kabupaten Karo, kemudian Kecamatan Berastagi sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi Sumatera Utara, serta banyaknya kegiatan jasa dan perhotelan, sehingga banyak

masyarakat berdomisili untuk melakukan aktivitas kegiatan bidang pariwisata.

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Berdasarkan Sex Ratio per Kecamatan
Kabupaten Karo Tahun 2020

No	Kecamatan	Sex Ratio
1	Mardingding	100.02
2	Laubaleng	96.63
3	Tigabinanga	98.87
4	Juhar	98.38
5	Munte	96.31
6	Kutabuluh	94.99
7	Payung	94.46
8	Tiganderket	95.95
9	SimpangEmpat	97.11
10	NamanTeran	98.37
11	Merdeka	98.80
12	Kabanjahe	98.40
13	Berastagi	99.79
14	Tigapanah	95.92
15	DolatRayat	97.79
16	Merek	100.72
17	Barusjahe	95.34
Jumlah 2020		97,80
2019		98,53
2018		98,52
2017		98,54
2016		98,60

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2020 sebanyak 404.998 jiwa, dengan rincian jenis kelamin laki-laki sebanyak 200.247 jiwa dan perempuan 204.751 jiwa. Dari angka tersebut dapat disimpulkan *sex ratio*

penduduk Kabupaten Karo adalah 97,80 yang artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat ± 97 penduduk laki-laki. Nilai *sex ratio* terbesar terdapat di Kecamatan Merek yakni sebesar 100,72 sedangkan yang terkecil terjadi di Kecamatan Payung yakni 94,46.

Secara umum perbandingan komposisi gender penduduk di Kabupaten Karo relatif seimbang, dengan angka *sex ratio* sebesar 97,80 yang artinya jumlah penduduk perempuan 2,2% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Karo mempunyai angka *sex rasio* dibawah 100, kecuali beberapa kecamatan seperti Kecamatan Mardinding dengan angka *sex ratio* 100,02 dan Merek 100,72 yang artinya penduduk dengan jenis kelamin laki laki di kecamatan tersebut lebih banyak dibanding perempuan.

Tabel 2.14
Jumlah dan Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)/Persentase (%)			Jumlah Penduduk
	0-14 tahun	15-64 tahun	> 65 tahun	
2016	124.083/31,28	251.197/63,4	21.318/5,38	396.598
2017	125.043/31,01	255.752/63,43	22.412/5,56	403.207
2018	125896/30,73	260.127/63,50	23.652/5,77	409.675
2019	126.529/30,42	264.313/63,56	25.036/6,02	415.878
2020	106.130/26,21	272.595/67,31	26.273/6,49	404.998

Sumber: BPS, Karo dalam Angka 2021

Berdasarkan kelompok umur, pada tahun 2020 dengan kelompok umur 0-14 tahun (usia anak-anak) mencapai 106.130 jiwa atau sekitar 26,21% dari total populasi penduduk. Kemudian penduduk kelompok umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 272.595 jiwa atau sebesar 67,31% dan kelompok umur lebih dari 65 tahun (usia sudah tidak produktif) berjumlah 26.273 jiwa atau sebesar 6,49% dari total populasi.

Komposisi penduduk menurut umur di Kabupaten Karo dengan persentase penduduk umur muda (di bawah umur 15 tahun) sebesar 30,42% dan penduduk umur 65 tahun ke atas sebesar 6,02% dengan umur median 25 tahun. Ini memberikan implikasi bahwa potensi kelompok umur muda perlu mendapat perhatian dan pengembangan

sehingga mampu menghasilkan tenaga-tenaga terampil, mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi yang ada.

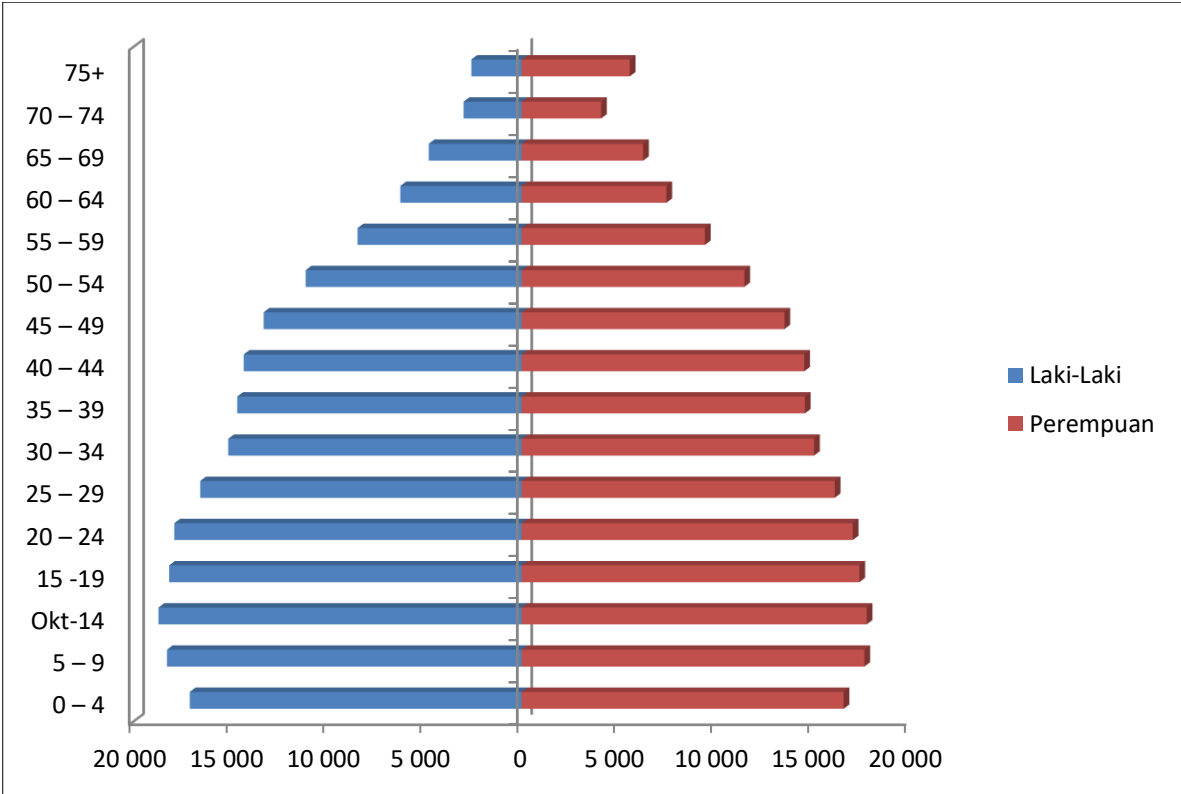
Tabel 2.15
Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur Kabupaten Karo Tahun 2020

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
0 – 4	17.098	16.597	33.695	8,32
5 – 9	18.274	17.665	35.939	8,87
10 – 14	18.712	17.784	36.496	9,01
15 – 19	18.162	17.408	35.570	8,78
20 – 24	17.894	17.069	34.963	8,63
25 – 29	16.557	16.137	32.694	8,07
30 – 34	15.117	15.071	30.188	7,45
35 – 39	14.655	14.597	29.252	7,22
40 – 44	14.320	14.568	28.888	7,13
45 – 49	13.292	13.547	26.839	6,63
50 – 54	11.123	11.477	22.600	5,58
55 – 59	8.449	9.446	17.895	4,42
60 – 64	6.247	7.459	13.706	3,38
65 – 69	4.778	6.261	11.039	2,73
70 – 74	2.984	4.094	7.078	1,75
75+	2.585	5.571	8.156	2,01
Total	200.247	204.751	404.998	100

Sumber: BPS, Karo dalam Angka 2021

Dari informasi tabel di atas, dapat dilihat struktur kependudukan Kabupaten Karo pada usia muda umur 0-14 tahun cenderung meningkat sedangkan umur 15 tahun sampai 70 tahun mulai berkurang jumlahnya. Akan tetapi, pada usia 75 tahun mengalami peningkatan dari kelompok umur sebelumnya. Dapat juga digambarkan bahwa usia muda yakni pada usia sekolah dan usia produktif cenderung sedikit atau menurun jumlahnya di Kabupaten Karo, hal ini mungkin dikarenakan kualitas sekolah dan jumlah lapangan kerja lebih memadai di luar Kabupaten Karo.

Gambar 2.1
Piramida Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2020



Sumber : BPS, Karo Dalam Angka 2021

Piramida penduduk Kabupaten Karo tahun 2020, menggambarkan komposisi penduduk yang sedang tumbuh yang ditandai dengan tingkat kelahiran yang tinggi sehingga penduduk usia mudanya lebih besar dari pada usia tua, dapat juga diartikan penduduk usia produktif (15-64 tahun) banyak menanggung beban usia muda (usia 0-14 tahun) dan tua (65+ tahun).

Pada gambar piramida penduduk Kabupaten Karo tahun 2020 menunjukkan adanya peningkatan penduduk pada usia 0-14 tahun dengan persentase penduduk 26,21% sedangkan kelompok usia pelajar umur 15-19 yaitu sekitar 8,78% kemudian diikuti oleh kelompok usia *fres graduated* 20-24 tahun sebesar 8,63% dan usia produktif 25-64 sebesar 49,88% sedangkan usia tua 65+ tahun 6,49%, sehingga angka ketergantungan yaitu sebesar 49,69%. Berdasarkan hal tersebut diperlukan kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya penduduk usia sekolah (0-14) tahun atau usia sekolah tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah pertama dan peningkatan lapangan kerja untuk usia produktif.

Bonus Demografi Kabupaten Karo

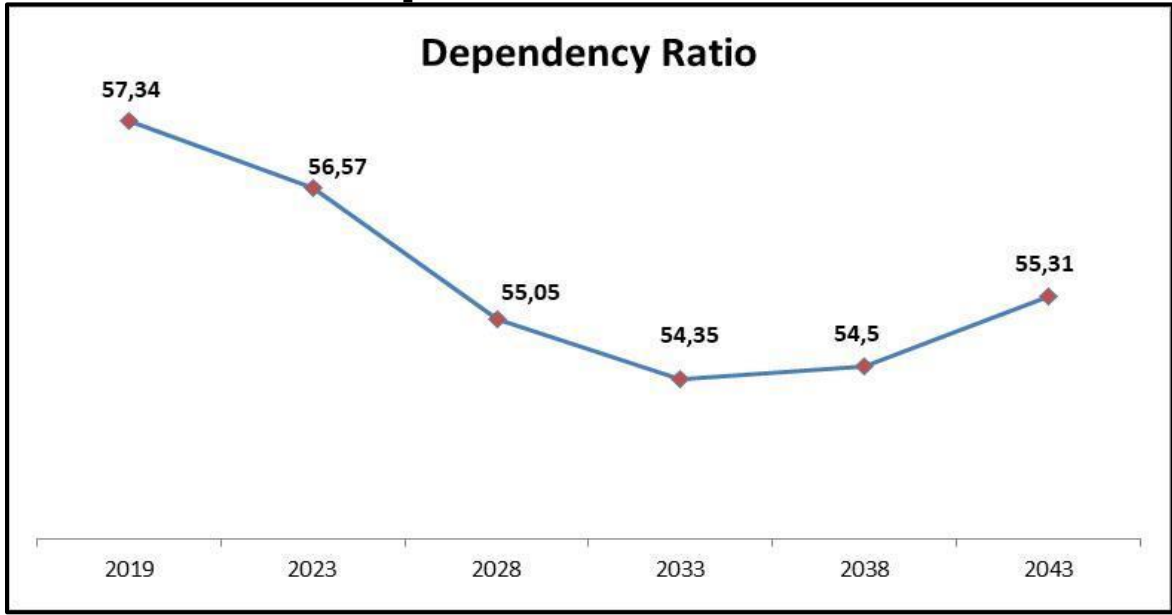
Pengertian bonus demografi adalah merupakan suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15-65 tahun) di suatu wilayah jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (0-14 tahun dan 65+ keatas).

Jendela peluang (*window of opportunity*) menjadi nyata bila memenuhi yakni:

- 1. Angka ketergantungan berada 50%
- 2. Migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil)
- 3. TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang.

Proyeksi Angka ketergantungan atau *dependency ratio* di Kabupaten Karo periode tahun 2019-2033 mengalami penurunan akan tetapi periode tahun 2038-2043 mengalami kenaikan. Proyeksi *dependency ratio* tahun 2019 sebesar 57,34%, pada tahun 2023 menurun menjadi 56,57%, kemudian pada tahun 2028 menurun menjadi 55,05%, pada tahun 2033 menurun menjadi 54,35%. Akan tetapi pada tahun 2038 meningkat menjadi 54,50% dan pada tahun 2043 kembali meningkat menjadi 55,31%. Selengkapanya disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.1
Proyeksi Perkembangan *Dependency Ratio*
Kabupaten Karo Tahun 2019-2043



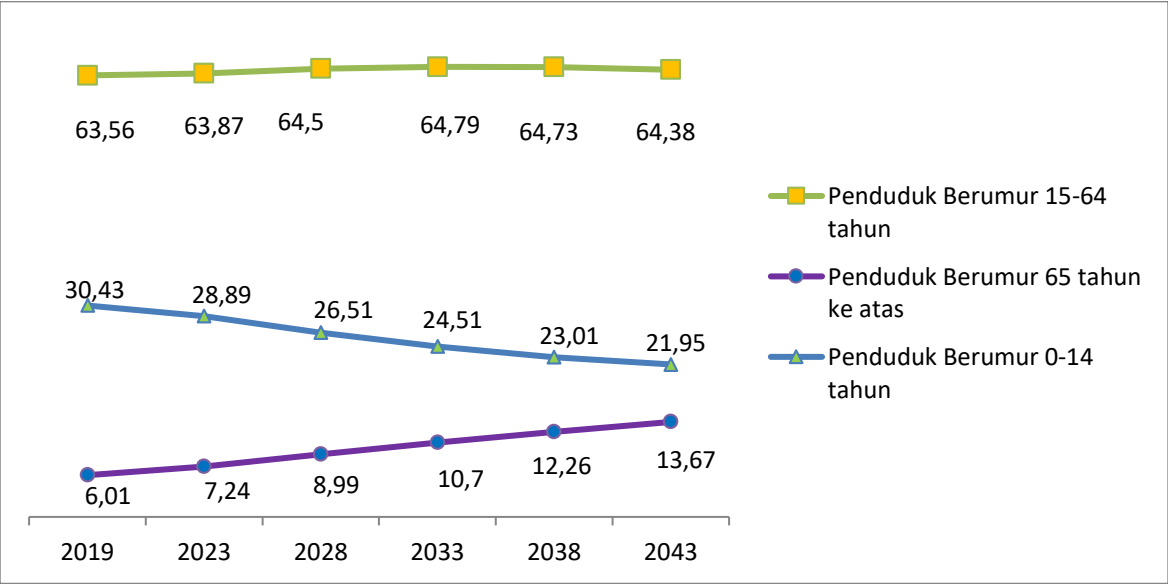
Sumber: BPS

Penurunan *dependency ratio* berkorelasi negatif dengan peningkatan jumlah penduduk usia produktif. Artinya jika jumlah penduduk usia produktif umur 15-64 tahun meningkat maka *dependency ratio* akan menurun. Peningkatan jumlah penduduk usia 15-64 tahun terjadi pada

tahun 2019 tahun sebesar 63,56% dari jumlah populasi, tahun 2023 meningkat menjadi 63,87% dari jumlah populasi, tahun 2028 meningkat menjadi 64,50% dari jumlah populasi, tahun 2033 meningkat menjadi 64,79%.

Pada tahun 2038-2043 proyeksi *dependency ratio* meningkat yakni pada tahun 2038 meningkat menjadi 54,50% dan tahun 2043 kembali meningkat menjadi 55,31%. Hal ini juga berkorelasi negative dengan penurunan jumlah penduduk usia produktif pada tahun tersebut, dimana pada tahun 2038 menurun menjadi 64,73% dari jumlah populasi dan tahun 2043 kembali menurun menjadi 64,38% dari jumlah populasi. Proyeksi perkembangan jumlah penduduk disajikan sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2.2
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2019-2043



Sumber: BPS Karo dalam Angka 2020

Proyeksi perkembangan penduduk di Kabupaten Karo tahun 2019-2043 akan terjadi peningkatan yaitu pada tahun 2019 sebanyak 415.878 jiwa, pada tahun 2023 meningkat menjadi 439.464 jiwa, pada tahun 2028 meningkat menjadi 465.464 jiwa, tahun 2033 meningkat menjadi 487.665 jiwa, tahun 2038 meningkat menjadi 506.513 jiwa, pada tahun 2043 meningkat menjadi 524.359 jiwa.

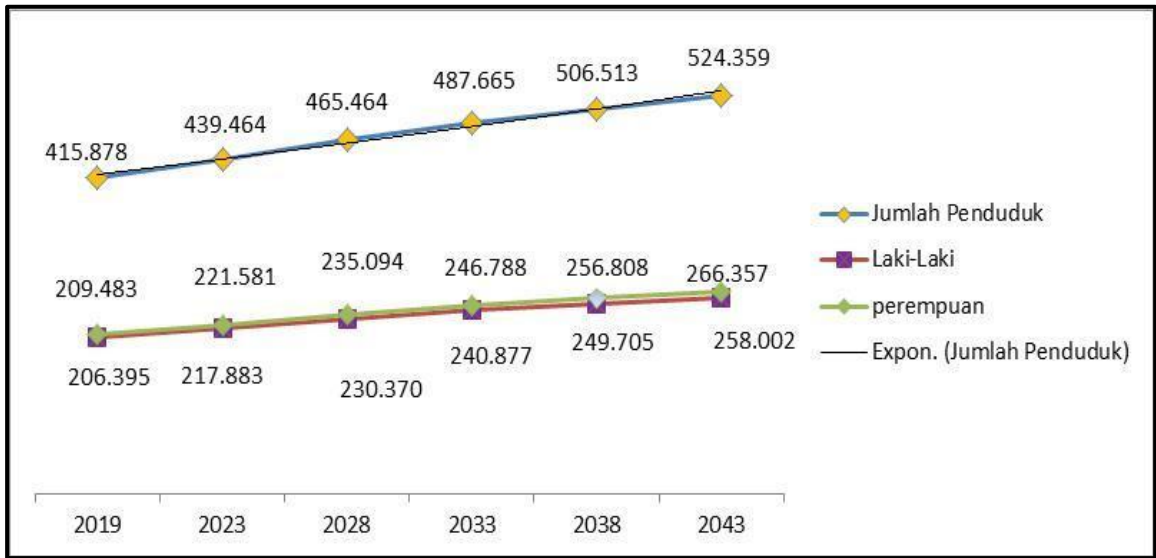
Berdasarkan komposisi penduduk, proyeksi penduduk usia muda (0-14 tahun) dari tahun 2019-2043 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 sebesar 30,43% dari jumlah populasi, tahun 2023 menurun menjadi

28,89% dari jumlah populasi, tahun 2028 menurun menjadi 26,52% dari jumlah populasi, tahun 2033 menurun menjadi 24,51% dari jumlah populasi, tahun 2038 menurun menjadi 23,01% dari jumlah populasi dan pada tahun 2043 menurun menjadi 21,95% dari jumlah populasi. Jumlah penduduk usia muda yang menurun dapat diindikasikan adanya penurunan tingkat kelahiran pada periode tahun tersebut. Hal ini menggambarkan adanya kesadaran masyarakat untuk membentuk keluarga berencana.

Untuk komposisi penduduk lansia, proyeksi pada tahun 2019-2043 mengalami peningkatan. Tahun 2019 sebesar 6,01% dari jumlah populasi, tahun 2023 meningkat menjadi 7,24% dari jumlah populasi, tahun 2028 meningkat menjadi 8,99 dari jumlah populasi, tahun 2033 meningkat menjadi 10,70% dari jumlah populasi, tahun 2038 meningkat menjadi 12,26% dari jumlah populasi dan pada tahun 2043 meningkat menjadi 13,67% dari jumlah populasi. Dari peningkatan tersebut dapat diartikan bahwa adanya peningkatan kesehatan maupun keberdayaan pada lansia.

Sedangkan proyeksi perkembangan penduduk usia produktif sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2019-2033 mengalami peningkatan sedangkan proyeksi pada tahun 2038-2043 mengalami penurunan dan porsi penduduk perempuan tetap lebih banyak dari penduduk laki-laki. Untuk beban tanggungan, beban yang ditanggung usia produktif pada usia lansia semakin meningkat sedangkan pada pada usia muda semakin menurun walaupun proporsi beban yang paling tinggi disumbang oleh usia muda. Perkembangan jumlah penduduk disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Proyeksi Perkembangan Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Laki-Laki dan Perempuan Kabupaten Karo Tahun 2019-2043



Sumber : BPS

Selanjutnya untuk mencapai bonus demografi yaitu migrasi keluar dan migrasi masuk terkendali (stabil). Adapun migrasi netto (migrasi masuk dikurang migrasi keluar) per 1000 penduduk di Kabupaten Karo pada tahun 2017 sebesar -54,90% dan tahun 2018 sebesar -47,15%. Dapat disimpulkan bahwa migrasi netto bertanda negatif artinya migrasi keluar lebih banyak dibanding migrasi masuk.

Jadi untuk mendapatkan bonus demografi, maka pemerintah harus mampu menekan migrasi *out* (keluar) yang terlalu besar, dimana migrasi out ini terjadi pada penduduk muda dan produktif yakni usia sekolah dan angkatan kerja, hal ini dikarenakan minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan lapangan kerja di Kabupaten Karo. Untuk itu pemerintah harus mampu menyediakan kebutuhan akan pendidikan dan memperluas peluang-peluang ekonomi.

Syarat selanjutnya untuk mendapatkan bonus demografi yaitu TFR adalah 2 atau rata-rata anak dalam keluarga 2 (dua) orang. Dari tren proyeksi pertumbuhan penduduk untuk usia 0-14 tahun terus menurun, artinya jumlah kelahiran juga menurun akan tetapi untuk kepemilikan anak diproyeksikan belum mencapai 2 (dua) orang per keluarga.

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa periode 2019-2043 Kabupaten Karo belum mencapai bonus demografi hal ini dikarenakan yaitu : 1). *dependency ratio* belum di bawah 50%, 2). migrasi keluar dan masuk tidak stabil karena migrasi keluar terlalu tinggi, dan 3). belum tercapainya kepemilikan anak rata-rata 2 (dua) per keluarga.

Oleh karena itu dalam mempersiapkan bonus demografi pada tahun 2045 pemerintah harus mampu membuat kebijakan terkait syarat untuk mencapai bonus demografi.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari 2 (dua) fokus yakni fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, serta fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga. Masing-masing fokus tersebut akan dibahas pada bagian di bawah ini.

a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Karo, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup pertumbuhan PDRB, tingkat inflasi, perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Karo, pendapatan regional dan penduduk di atas garis kemiskinan.

• Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang memberikan informasi tentang gambaran keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 (Tujuh belas) sektor strategis. PDRB dapat disajikan berdasarkan atas harga berlaku (PDRB ADHB) dan berdasarkan atas harga konstan (PDRB ADHK). Penyajian PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan diperoleh dengan menggunakan harga tetap suatu tahun dasar, semua barang dan jasa yang dihasilkan, biaya antara yang digunakan ataupun nilai tambah masing-masing sektor dinilai berdasarkan harga tahun dasar. PDRB atas dasar harga konstan akan memperlihatkan perkembangan produktivitas secara riil karena pengaruh perubahan harga (inflasi/deflasi) sudah dikeluarkan. Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Karo atas dasar harga konstan, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.164,56	57,34	7.554,44	57,47	7.729,99	56,24	7.883,42	54,84	7.876,71	55,23
2	Pertambangan & Penggalian	30,63	0,25	31,43	0,24	33,72	0,25	36,21	0,25	32,56	0,23
3	Industri Pengolahan	388,00	3,11	411,14	3,13	437,59	3,18	480,71	3,34	467,42	3,28
4	Pengadaan Listrik, Gas,	11,30	0,09	11,60	0,09	12,41	0,09	13,33	0,09	13,83	0,10
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,22	0,08	10,46	0,06	11,21	0,08	12,05	0,08	12,20	0,09
6	Konstruksi	813,95	6,51	860,72	6,55	924,97	6,73	999,22	6,95	958,86	6,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.205,16	9,65	1.287,95	9,80	1.389,20	10,11	1.485,18	10,33	1.458,89	10,23
8	Transportasi dan Pergudangan	560,90	4,49	584,99	4,45	630,96	4,59	682,20	4,75	658,70	4,62
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	305,21	2,44	321,87	2,45	346,84	4,59	375,37	4,75	369,98	2,59
10	Informasi dan Komunikasi	115,78	0,93	121,86	0,93	131,25	0,95	142,04	0,99	148,72	1,04
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	159,88	1,28	159,54	1,21	172,02	1,25	184,37	1,28	184,42	1,29
12	Real Estate	391,08	3,13	405,86	3,09	435,31	3,17	470,86	3,28	475,93	3,34
13	Jasa Perusahaan	23,21	0,19	24,58	0,19	26,33	0,19	28,38	0,20	27,37	0,19
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	695,68	5,57	716,80	5,45	771,63	5,61	836,03	5,82	831,03	5,83
15	Jasa Pendidikan	311,51	2,49	321,04	2,44	344,91	2,51	373,04	2,59	373,09	2,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	150,79	1,21	156,80	1,19	168,52	1,23	182,30	1,27	182,25	1,28
17	Jasa Lainnya	157,00	1,26	164,79	1,25	177,32	1,29	191,59	1,33	189,51	1,33
	PDRB	12.494,87	100	13.145,85	100	13.744,17	100	14.376,28	100	14.261,47	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu dari Rp12.494,87 miliar pada tahun 2016 terus meningkat hingga menjadi Rp14.261,47 miliar pada tahun 2020. Secara absolut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kabupaten Karo sebesar Rp 1.766,6 miliar. Terdapat 3 (Tiga)

lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHK tahun 2020 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Perkembangan PDRB ADHB juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan PDRB ADHK. Data selengkapnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB ADHB Tahun 2016 sampai 2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010 Kabupaten Karo

No	Sektor	2016		2017		2018		2019		2020	
		(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%	(Milyar Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	9.208,08	55,04	9.925,92	54,95	10.411,29	54,17	10,964,80	53,27	11.268,55	53,72
2	Pertambangan & Penggalian	38,91	0,23	39,87	0,22	43,28	0,23	46,15	0,22	43,6	0,21
3	Industri Pengolahan	564,43	3,37	640,24	3,54	703,37	3,66	763,53	3,71	779,12	3,71
4	Pengadaan Listrik, Gas,	11,03	0,07	12,07	0,07	13,31	0,07	14,55	0,07	15,16	0,07
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,73	0,08	15,03	0,08	16,13	0,08	17,43	0,08	17,67	0,08
6	Konstruksi	1.192,63	7,13	1.321,07	7,31	1.436,74	7,47	1,569,10	7,62	1.558,6	7,43
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	1.737,06	10,38	1.898,08	10,51	2.019,26	10,51	2,212,37	10,75	2.217,78	10,57
8	Transportasi dan Pergudangan	774,64	4,63	797,64	4,42	874,10	4,55	948,56	4,61	948,64	4,52
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	434,60	2,60	459,19	2,54	495,50	2,58	540,50	2,63	537,68	2,56
10	Informasi dan Komunikasi	119,02	0,71	130,07	0,72	143,20	0,75	156,34	0,76	165,95	0,79
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	230,62	1,38	243,08	1,35	263,07	1,37	284,02	1,38	284,02	1,35
12	Real Estate	554,78	3,32	604,78	3,35	654,17	3,40	713,56	4,47	733,56	3,50
13	Jasa Perusahaan	32,91	0,20	36,00	0,20	39,42	0,21	42,83	0,21	42,37	0,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan	989,19	5,91	1.061,93	5,88	1.151,88	5,99	1,254,02	6,09	1.283,32	6,12
15	Jasa Pendidikan	392,02	2,34	413,37	2,29	448,94	2,34	500,37	2,43	510,59	2,43
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	216,35	1,29	227,56	1,26	248,51	1,29	270,65	1,31	279,72	1,33
17	Jasa Lainnya	218,46	1,31	238,41	1,32	258,72	1,35	285,93	1,39	287,88	1,37
	PDRB	16.728,42	100	18.064,32	100	19.220,88	100	20.584,73	100	20.974,57	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 16.782,42 miliar terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp 20.974,57 miliar. Dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terjadi peningkatan sebesar Rp 4.192,15 miliar. Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHB sama dengan PDRB ADHK mencakup 3 (Tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (Lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Karo tumbuh melambat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya hal ini antara lain diakibatkan oleh produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat. Beberapa komoditi yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2018 antara lain adalah belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk siam, mangga, manggis, markisa, pepaya dan pisang. Komoditi dimaksud bukanlah merupakan komoditi yang potensial di Kabupaten Karo. Selain itu, minat petani untuk berbudidaya komoditi tersebut sangat minim, petani cenderung beralih menanam komoditi lain yang mereka anggap lebih menguntungkan sehingga produksi komoditi tersebut setiap tahun mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,60 persen, mengalami akselerasi jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,55 persen. Akselerasi belum meningkat secara signifikan. Semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha industri pengolahan, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, disusul oleh penyediaan akomodasi dan makam minum. Selanjutnya pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB terkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi, hal ini berpengaruh terhadap permintaan dan harga komoditas sehingga merubah trend pertumbuhan

ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang terkontraksi, namun dari 17 lapangan usaha ada 5 lapangan usaha dengan pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 4,70 persen, pengadaan listrik dan gas sebesar 3,81 persen, pengadaan air, pengelola sampah, limbah sebesar 1,22 persen dan real estate sebesar 1,08 persen dan jasa pendidikan 0,02 sedangkan 5 lapangan usaha dengan terkontraksi terdalam adalah lapangan usaha pertambangan penggalan minus 0,7 persen, kontruksi minus 4,04 persen, jasa perusahaan minus sebesar 3,57 persen, transportasi dan pergudangan minus sebesar 3,44 persen dan industry pengolahan minus sebesar 2,76 persen. Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha dapat disajikan pada tabel berikut.

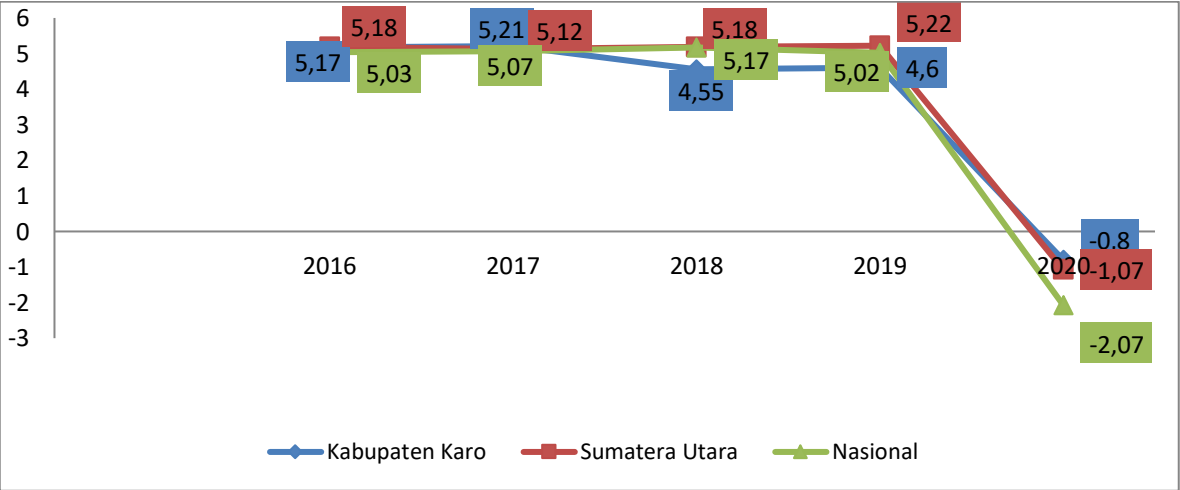
Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)
Tahun 2016-2020

No	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,51	5,44	2,32	1,98	-0,09
2	Pertambangan & Penggalan	4,63	2,59	7,28	7,38	-10,07
3	Industri Pengolahan	6,18	5,96	6,43	9,85	-2,76
4	Pengadaan Listrik, Gas,	2,19	2,59	7,06	7,34	3,81
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,14	2,41	7,10	7,53	1,22
6	Konstruksi	5,16	5,74	7,47	8,03	-4,04
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	8,31	6,87	7,86	6,91	-1,77
8	Transportasi dan Pergudangan	5,09	4,30	7,86	8,12	-3,44
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,02	5,46	7,76	8,23	-1,44
10	Informasi dan Komunikasi	6,52	5,25	7,71	8,22	4,70
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,66	-0,22	7,83	7,18	0,02
12	Real Estate	7,59	3,78	7,26	8,17	1,08
13	Jasa Perusahaan	4,17	5,92	7,08	7,82	-3,57
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	2,40	3,04	7,65	8,35	-0,60
15	Jasa Pendidikan	6,24	3,06	7,44	8,15	0,02
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,71	3,98	7,47	8,18	-0,03
17	Jasa Lainnya	5,00	4,96	7,61	8,05	-1,08
	PDRB	5,17	5,21	4,55	4,60	-0,80

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang tidak sama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo berakselerasi pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dan kembali melambat pada tahun 2018, hingga berakselerasi kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berakselerasi pada tahun 2016 dan kembali melambat pada tahun 2017, berakselerasi kembali pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara dan Nasional tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

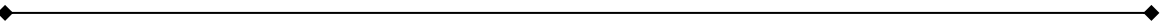
Grafik 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Karo, Sumut dan Indonesia
Tahun 2016-2020



Sumber : BPS, 2021 (diolah)

Dari grafik tersebut di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2020 sebesar minus 0,8 persen berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar minus 1,07 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,07 persen. Jika dicermati dari pola historisnya, pada periode PDRB tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dibanding Provinsi dan Nasional cenderung fluktuatif.

Selanjutnya, untuk melihat perbandingan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan kabupaten tetangga yang berada pada dataran tinggi bukit barisan Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel berikut.



Tabel 2.19
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Kabupaten tetangga
(Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten/Kota	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dairi	5,07	5,01	5,01	4,82	-0,94
2.	Karo	5,17	4,55	4,55	4,60	-0,80
3.	Pakpak Barat	5,97	5,85	5,85	5,87	-0,18
4.	Samosir	5,27	5,58	5,58	5,70	-0,59
5.	Simalungun	5,40	5,18	5,18	5,20	1,01
6.	Humbang Hasundutan	5,00	5,02	5,04	4,94	-0,13
7.	Tapanuli Utara	4,12	4,35	4,35	4,62	1,50
8.	Toba Samosir	4,76	4,96	4,96	4,85	-0,27

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara , 2021

Jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dengan kabupaten tetangga yang berada pada dataran tinggi Sumatera Utara, pada tahun 2019 dan 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo berada di bawah pertumbuhan ekonomi kabupaten tetangga. Hal ini lebih disebabkan karena beberapa komoditi hortikultura banyak yang gagal panen akibat dampak semburan erupsi gunung sinabung yang berkepanjangan dan dampak pandemi Covid-19.

Untuk melihat kontribusi masing-masing PDRB kabupaten terhadap pembentukan total PDRB kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara digunakan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), perbandingan masing-masing PDRB ADHB dan kontribusi masing-masing PDRB Kabupaten pada kawasan dataran tinggi bukit barisan Sumatera Utara terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.20
Perbandingan dan Peranan PDRB ADHB Beberapa Kabupaten Tetangga
(Dataran Tinggi) di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2020

No	Kabupaten	PDRB ADHB (jutaan rupiah)					Peranan terhadap PDRB Prov (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dairi	7.484.071,46	7.980.474,09	8 560 775,50	9 166 421,25	9.317,91	1,18	1,16	1,16	1,14	1,13
2.	Karo	16.728.423,25	18.064.319,94	19.359.018,39	20.584.725,88	20.974,57	2,65	2,61	2,61	2,55	2,55
3.	Pakpak Barat	917.383,76	999.871,46	1.086.960,92	1 178 215,25	1.211,35	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
4.	Samosir	3.442.515,66	3.751.630,67	4.085.202,85	4 434 721,24	4.542,85	0,54	0,54	0,54	0,55	0,55
5.	Simalungun	30.122.877,55	32.832.126,15	35.444.572,49	38 057 431,78	39.441,35	4,78	4,76	4,76	4,71	4,80
6.	Humbang Hasundutan	4.777.167,43	5.131.048,24	5.527.253,49	5 951 262,90	6.123,46	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74
7.	Tapanuli Utara	6.300.290,07	6.765.691,15	7.296.779,10	7 889 049,56	8.274,43	1,00	0,98	0,98	0,98	1,01
8.	Toba	6.123.907,62	6.635.270,67	7.161.585,79	7 676 887,58	7.8845,42	0,97	0,96	0,96	0,95	0,95

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara , 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat, jika dibandingkan dengan kabupaten Kawasan Dataran Tinggi Sumatera Utara, pada kurun waktu tahun 2016-2020 Kabupaten Karo berada di peringkat kedua setelah Kabupaten Simalungun yang memiliki peranan PDRB ADHB terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara. Peranan PDRB Kabupaten Karo terhadap pembentukan PDRB Provinsi Tahun 2020 sebesar 2,55% tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 2,55% pada tahun 2019.

• **PDRB per Kapita Kabupaten Karo**

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan. PDRB per kapita Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku dan harga konstan selama 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.21
PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

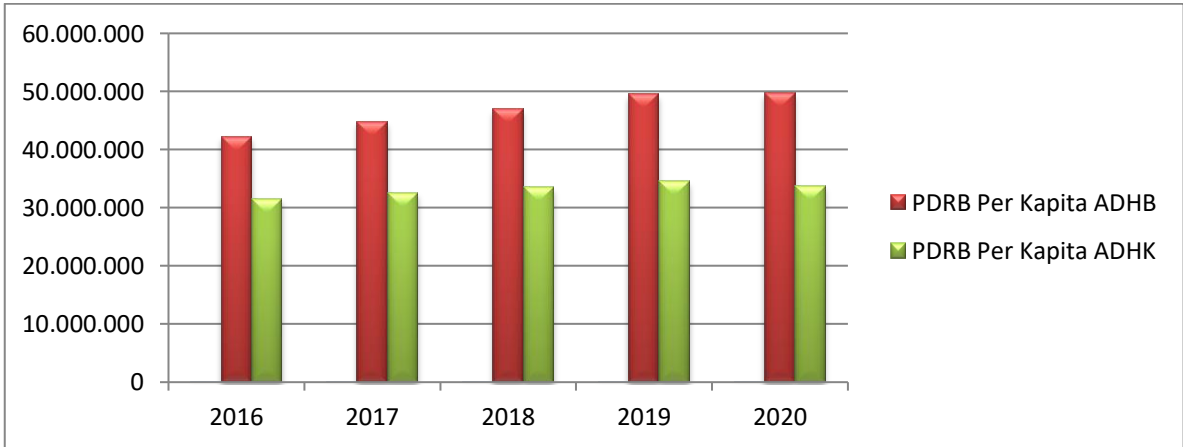
Tahun	ADH Berlaku (Rp)	ADH Konstan (RP)
2016	42.179.900	31.505.120
2017	44.801.600	32.603.230
2018	46.917.380	33.548.970
2019	49.497.030	34.568.500
2020	49.703.130	33.795.190

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp42.179.900 dan meningkat menjadi Rp49.703.130 pada tahun 2020 atau tumbuh sebesar 17,84 persen dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, maka selama periode 2016-2020 juga terjadi peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB Perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga konstan mencapai Rp33.795.190, mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhannya rata-rata sebesar 2,10 persen dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo. Selanjutnya peningkatan PDRB Kabupaten Karo harus dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Grafik 2.5
PDRB per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2021

Untuk melihat perbandingan PDRB per Kapita Kabupaten Karo dengan daerah tetangga yang berada pada dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut.

Tabel 2.22
PDRB per Kapita Kabupaten Dataran Tinggi
di Provinsi Sumatera Utara 2016-2020

No	Kabupaten	PDRB Perkapita (jutaan rupiah)									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
1.	Dairi	26.490.917,86	20.271.732,74	28.312.002,77	21.175.290,46	30.228.406,84	22.131.904,16	32.241.618,99	23.108.408,98	32.639.340	22.796.800
2.	Karo	42.179.900	31.505.120,00	44.801.600	32.603.230,05	46.917.380	33.548.970,00	49.497.030,10	34.568.500,00	49.703.135	33.795.196
3.	Pakpak Barat	19.798.591,51	15.474.460,42	21.191.349,83	16.119.206,71	22.589.017,13	16.729.545,36	24.077.148,30	17.416.968,84	24.379.166	17.122.646
4.	Samosir	27.655.311,47	21.171.504,34	29.989.293,81	22.197.192,88	32.469.660,87	23.301.473,13	35.143.763,63	24.556.541,89	35.852.360	24.310.851
5.	Simalungun	35.326.467,10	27.512.314,33	38.211.192,09	28.764.975,24	41.038.392,68	30.098.896,98	43.848.907,83	31.510.549,89	45.247.609	31.692.547
6.	Humbang Hasundutan	25.828.988,59	19.348.073,78	27.483.734,02	20.122.023,79	29.325.411,11	20.936.543,77	31.291.803,26	21.773.933,27	31.930.248	21.564.757
7.	Tapanuli Utara	21.312.628,59	17.151.461,02	22.718.451,43	17.731.975,77	24.332.248,80	18.374.588,91	26.140.944,69	29.966.805,00	27.246.495	19.267.812
8.	Toba	33.954.467,90	26.393.269,60	36.499.646,11	27.512.115,44	39.204.402,37	28.735.785,01	41.787.621,82	29.966.805,00	42.524.221	29.751.362
9.	Sumatera Utara	44.557.762,32	32.885.087,69	48.003.601,89	34.183.579,22	51.455.533,49	35.570.705,51	55.054.464,71	37.048.91, 92	55.176.052	36.300.554

Sumber : BPS Prov. Sumatera Utara, 2021

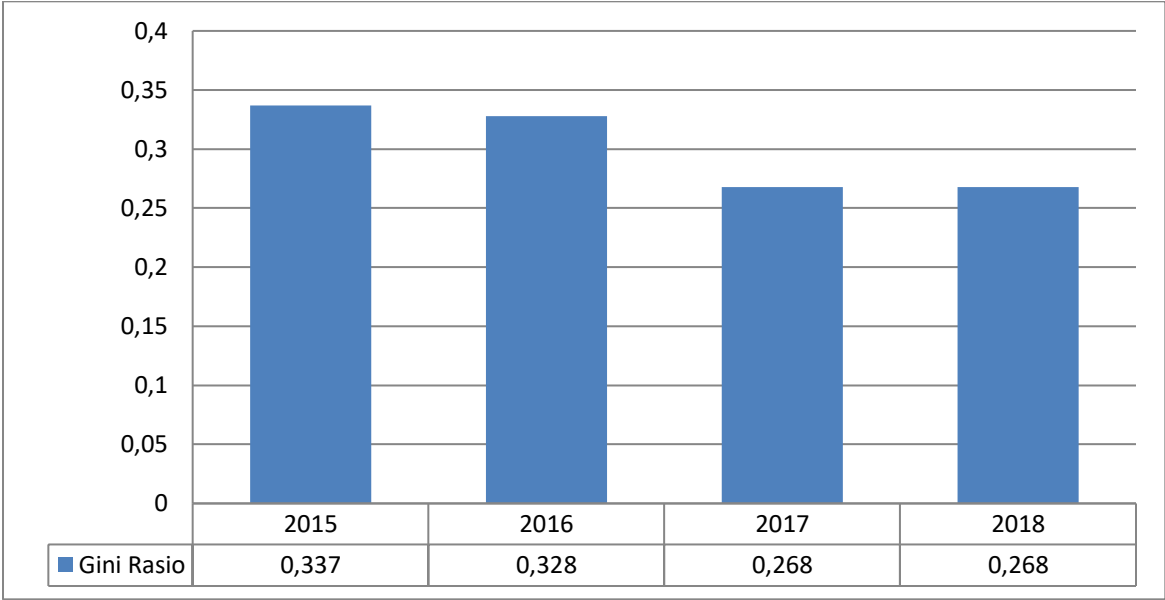
Jika dilihat dari perkembangan PDRB perkapita daerah yang berada di dataran tinggi Sumatera Utara, maka Kabupaten Karo pada kurun waktu tahun 2016-2020 memiliki pendapatan perkapita yang tertinggi dibanding kabupaten yang lain yang berada pada daerah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo lebih baik.

• **Indeks Gini**

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Bila gini ratio=0, ketimpangan pendapatan merata sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya sedangkan gini ratio=1 artinya ketimpangan pendapatan timpang sempurna atau pendapatan itu hanya diterima oleh satu orang atau satu kelompok saja. Semakin tinggi nilai *Gini Ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi (G<0,3, ketimpangan rendah; 0,3≤G≤0,5, ketimpangan sedang; G>0,5, ketimpangan tinggi). Koefisien Gini Kabupaten Karo pada tahun 2018 mencapai sebesar 0,268, tetap

dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,268. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karo berada pada kategori rendah. Untuk itu pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Grafik 2.6
Gini Rasio Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Sumatera Utara Tahun 2019

• **Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan**

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Persentase penduduk di atas garis kemiskinan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo setiap tahun meningkat walaupun secara perlahan, untuk 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	U r a i a n	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan (%)	90,19	90,03	91,31	91,77	91,30

Sumber: BPS Kab. Karo, 2021

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Karo tahun 2016-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 sebesar 90,19%, tahun 2017 menurun menjadi 90,03%, pada tahun 2018

naik menjadi 91,31%. Sedangkan pada tahun 2019 meningkat menjadi 91,77%, dan tahun 2020 menurun menjadi 91,30%. Penurunan angka tersebut diakibatkan adanya peningkatan persentase penduduk miskin, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang berdampak menurunnya derajat kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

Sedangkan untuk penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat dilihat dari persentase penduduk miskin. Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan dan kenaikan, 2016-2017 persentase kemiskinan mengalami kenaikan dimana tahun 2016 sebesar 9,68% meningkat menjadi 9,81% tahun 2016 kemudian kembali meningkat menjadi 9,97% tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 8,69% dan tahun 2019 terus menurun menjadi 8,23% sedangkab pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,70%. Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak pandemi *Covid-19*.

Perkembangan tingkat kemiskinan digambarkan pada grafik di bawah.

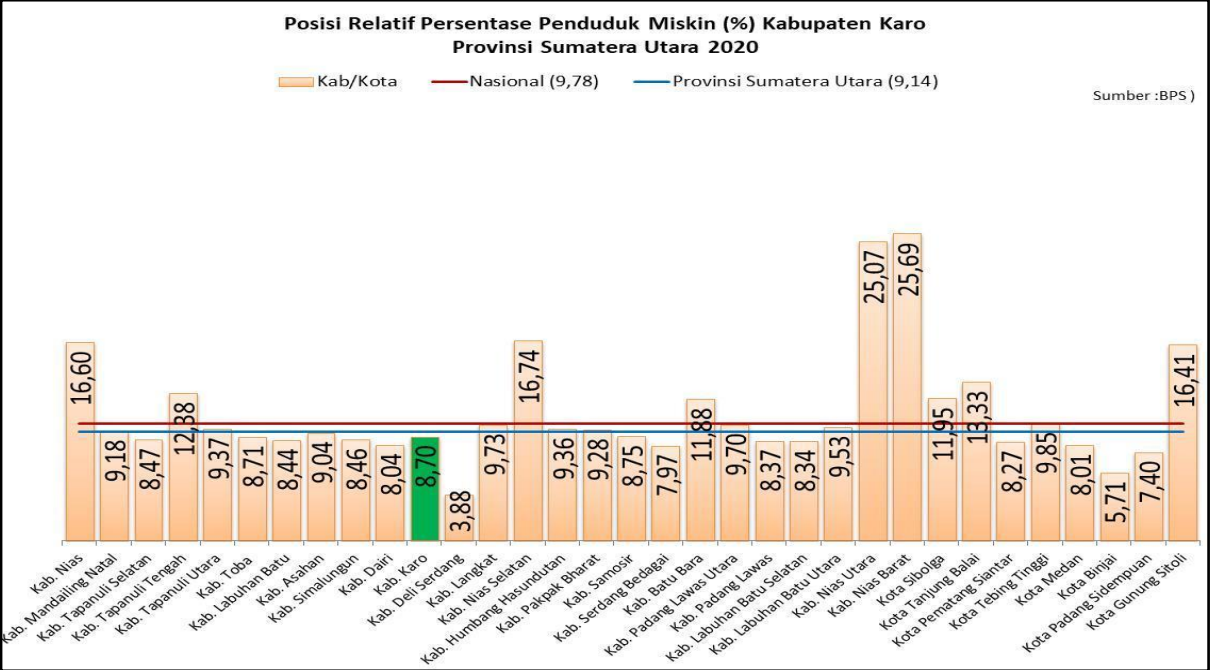
Grafik 2.7
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS Kab. Karo, 2021

Kondisi tingkat kemiskinan di Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebesar 8,70%, tingkat kemiskinan ini berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara dengan tingkat kemiskinan sebesar 9,14% dan Nasional sebesar 9,78%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Karo berada di urutan ke 13 (tiga belas) terendah diantara 33 (tiga puluh tiga) Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. Persentase tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Nias Barat sebesar 25,69% dan terendah berada di Kabupaten Deli Serdang sebesar 3,88%.

Grafik 2.8
Persentase Tingkat Kemiskinan Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020

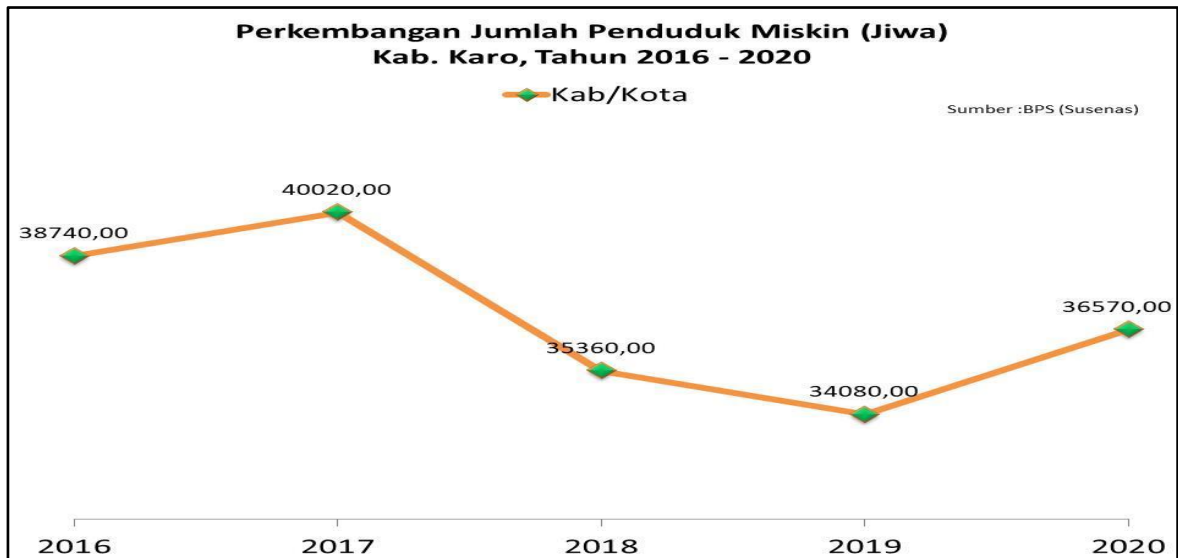


Sumber: BPS (Susenas)

Seiring dengan penurunan dan peningkatan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan. Pada tahun 2019 sebesar 34.080 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2020 karena menurunnya persentase kemiskinan menjadi 36.570 jiwa. Periode tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebanyak 40.020 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk miskin digambarkan pada grafik di bawah ini.

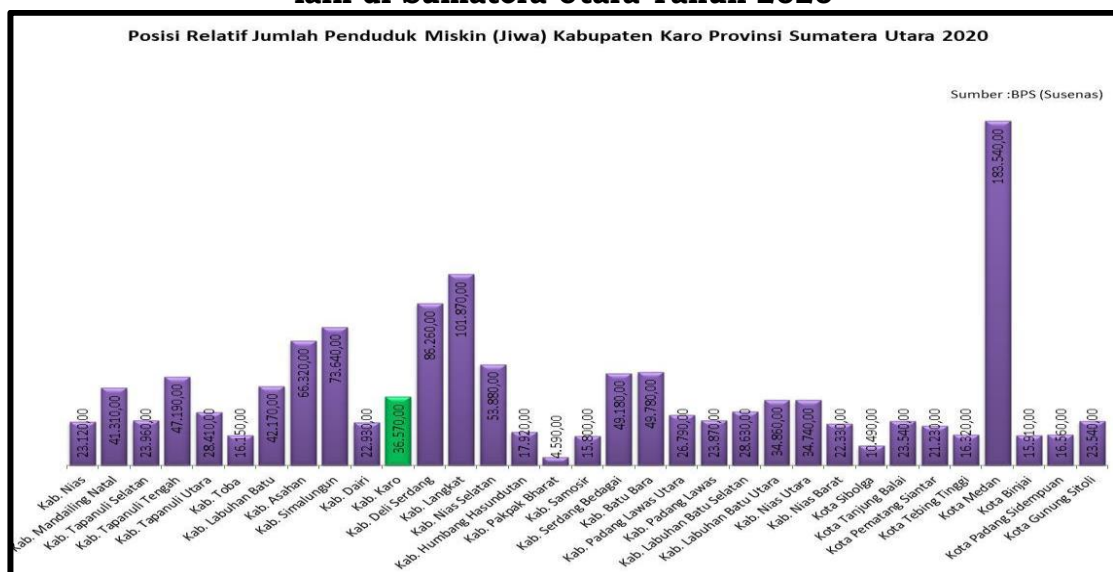
Grafik 2.9
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS (Susenas)

Berdasarkan distribusi penduduk, bahwa daerah perkotaan memiliki distribusi penduduk yang paling tinggi. Hal ini juga menyebabkan penduduk miskin paling banyak di daerah perkotaan, seperti Kabanjahe dan Berastagi. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan paling tinggi berada di Kecamatan Mardinding yang merupakan kecamatan dengan jarak paling jauh dari ibu kota kabupaten. Selain itu daerah ini juga memiliki kondisi topografi yang hanya cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan, dimana tanaman tersebut dapat memproduksi hanya sebanyak 2 (Dua) kali dalam setahun sehingga produktivitasnya lebih rendah dari daerah tanaman hortikultura.

Grafik 2.10
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Karo Dibandingkan Kabupaten/Kota
lain di Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber: BPS (Susenas)

Berdasarkan grafik tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 36.570 jiwa. Apabila jumlah tersebut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Utara, angka tersebut jauh lebih besar dengan jumlah penduduk miskin di Kota Medan sebanyak 183.540 jiwa dan sebaliknya lebih kecil dari jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pakpak Bharat sebanyak 4.590 jiwa.

• **Indeks Pembangunan Manusia**

Untuk melihat suatu negara maju, berkembang atau terbelakang dapat dilihat dari Indeks pembangunan manusia (IPM). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (Tiga) dimensi dasar yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak. Perkembangan IPM Kabupaten Karo tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

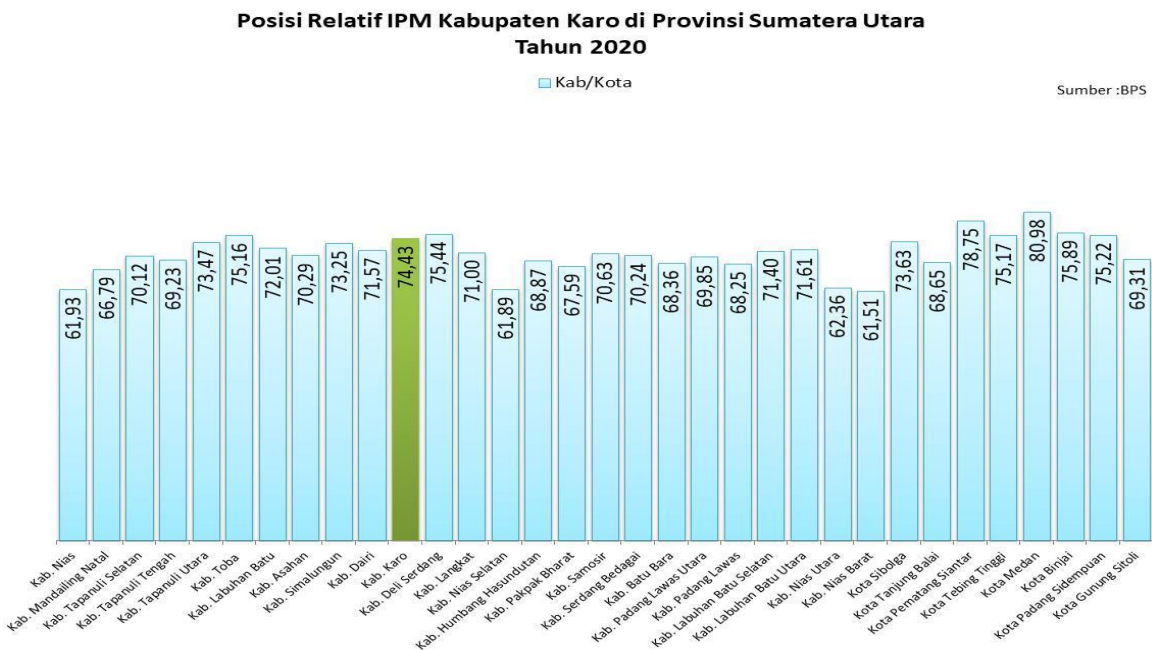
Tabel 2.24
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	IPM
2016	73,51
2017	73,53
2018	73,91
2019	74,25
2020	74,43

Sumber : BPS Kabupaten Karo, 2021

Dari data menunjukkan IPM Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 sebesar 73,51, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,53, pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,91, pada tahun 2019 meningkat menjadi 74,25 dan tahun 2020 meningkat menjadi 74,43. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Grafik 2.11
Posisi Relatif IPM Kabupaten Karo
Dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber: BPS

Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Karo dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, posisi IPM Kabupaten Karo berada di urutan ke 8 (delapan) terbaik diantara 33 (Tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 80,98, sedangkan paling rendah berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 61,51. Jika dibandingkan dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Karo, adapun IPM yang berada di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Deli Serdang mencapai 75,44. Sedangkan daerah sekawasan dataran tinggi yang memiliki IPM di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Toba yang memiliki IPM sebesar 75,16.

IPM Kabupaten Karo sebesar 75,16 berada di atas capaian IPM Provinsi Sumatera Utara dengan angka IPM sebesar 71,77. IPM Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 75,16 berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatkan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

b. Fokus Kesejahteraan Sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka

partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja. Berikut ini disajikan hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan masyarakat sebagai berikut.

• **Pendidikan**

Angka Melek Huruf

Defenisi Angka Melek Huruf menurut Badan Pusat Statistik yaitu proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya, tanpa harus mengerti apa yang dibaca/ditulisnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Angka Buta Huruf adalah proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya. Tingkat perkembangan angka melek huruf di Kabupaten Karo, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun keatas
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

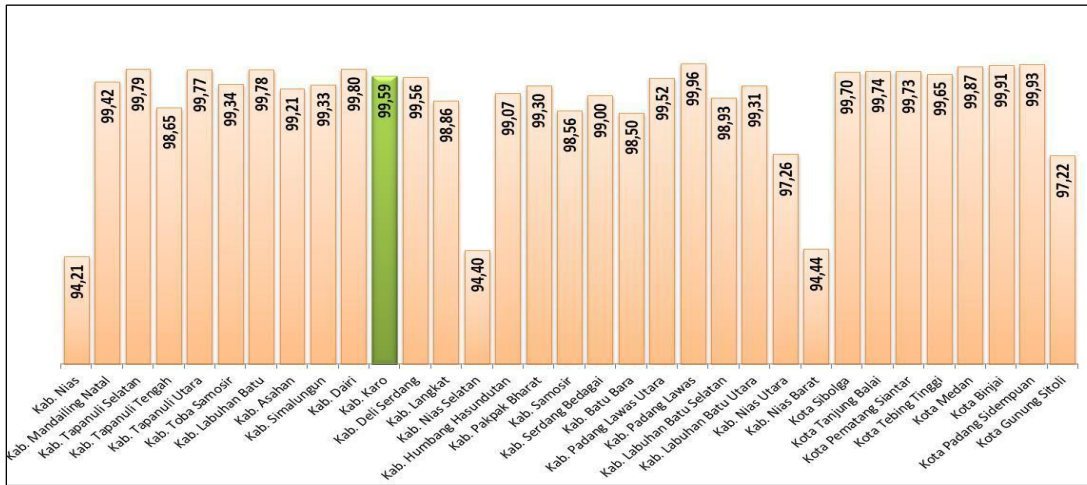
No	Uraian	Persentase (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka melek huruf	N/A	N/A	99,14	99,21	99,52

Sumber: BPS Kab. Karo, 2020

Perkembangan angka melek huruf dari tahun 2018-2020 di Kabupaten Karo cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar 99,14 persen, tahun 2019 menjadi 99,21 persen hingga pada tahun 2020 menjadi 99,53 persen. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi sebesar 99,16 persen (Sumber: Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2021), maka posisi Kabupaten Karo berada di atas atau lebih baik dari provinsi.

Angka melek huruf pada tahun 2020 sebesar 99,53 persen artinya masih terdapat 0,47 persen penduduk 15 tahun ke atas di Kabupaten Karo yang buta huruf. Salah satu penyebabnya selain masih kurangnya pembangunan di bidang pendidikan adalah penduduk usia lanjut yang lahir di saat pembangunan belum sebaik sekarang.

Grafik 2.12
Posisi Relatif Angka Melek Huruf Penduduk Umur 15 Tahun ke atas Sumatera Utara Tahun 2020



Sumber: BPS Sumatera Utara, 2021

Posisi relatif capaian angka melek huruf penduduk umur 10 tahun ke atas Sumatera Utara Tahun 2019, Kabupaten Karo berada diurutan ke 13 (tiga belas) tertinggi atau terbaik diantara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Untuk angka melek tertinggi berada di Padang Lawas sebesar 99,96 dan yang terendah berada di Kabupaten Nias sebesar 94,21.

Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Berdasarkan definisi BPS, Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 (enam) tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 (sembilan) tahun, tamat SMA selama 12 (dua belas) tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Sedangkan harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan masyarakat mulai dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari penduduk yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun ke atas.

Berikut disajikan grafik perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Karo pada tahun 2016-20120.

Tabel 2.26
Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

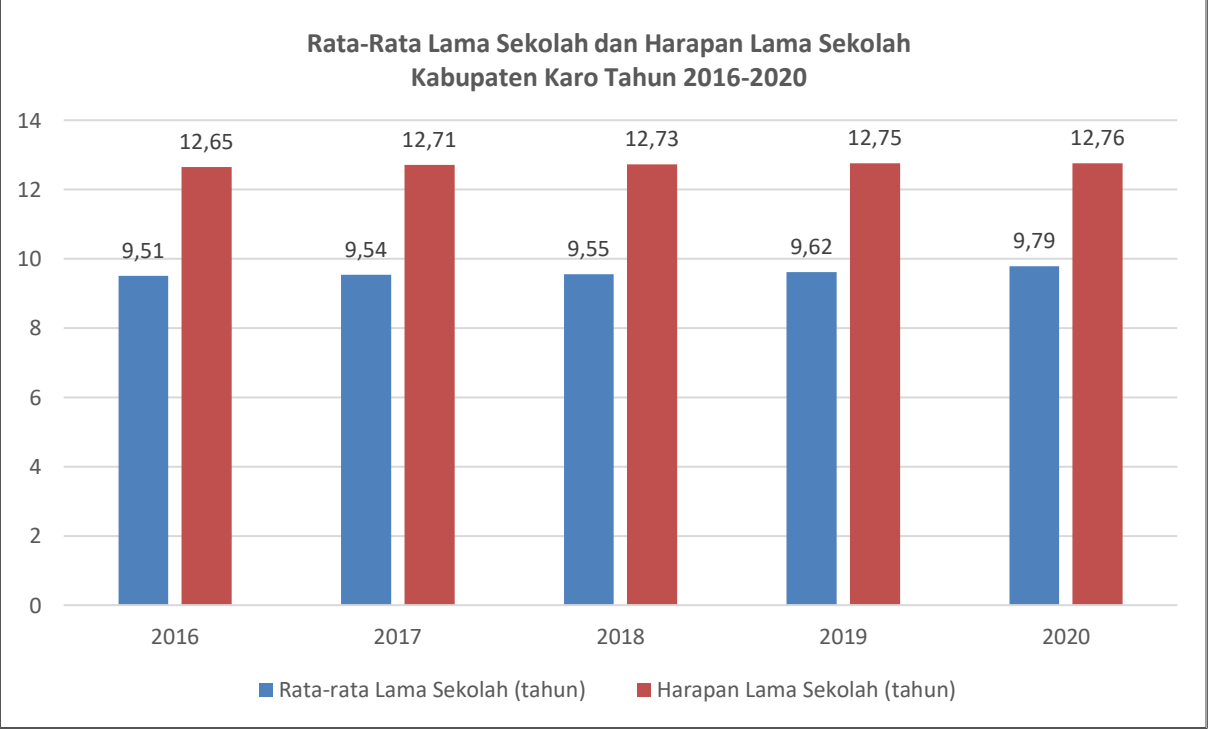
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,51	9,54	9,55	9,62	9,79
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,65	12,71	12,73	12,75	12,76

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Indikator rata-rata lama sekolah penduduk di Kabupaten Karo dari periode tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 9,51 tahun dan diakhir periode tahun 2020 menjadi 9,79 tahun. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 9,79 tahun berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Karo yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9,79 tahun atau hampir menamatkan kelas X.

Berikut disajikan grafik perkembangan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kabupaten Karo pada tahun 2016-2020.

Grafik 2.13
Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

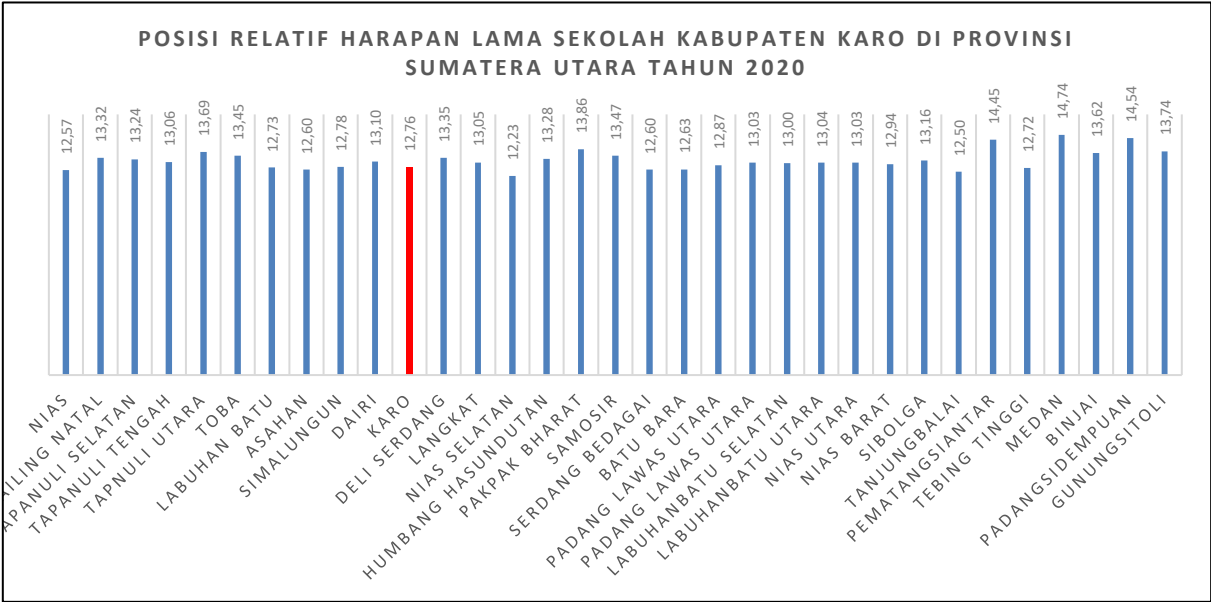


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Selaras dengan indikator rata-rata lama sekolah, indikator harapan lama sekolah juga mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020, yaitu

12,65 tahun di tahun 2016 dan 12,76 tahun di tahun 2020. Untuk indikator harapan lama sekolah pada tahun 2020 sebesar 12,76 dapat diartikan secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,76 tahun atau setara dengan Diploma I.

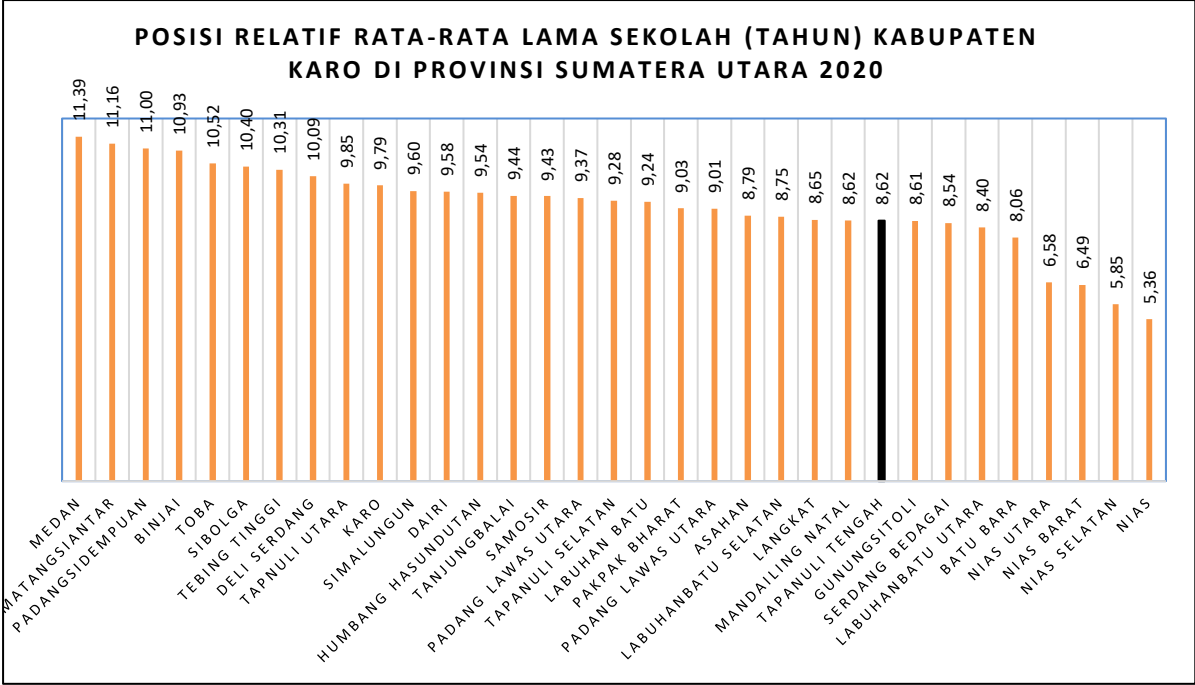
Grafik 2.14
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Posisi relatif harapan lama sekolah Kabupaten Karo tahun 2020 adalah 12,76 tahun, berada diurutan ke-25 (kedua puluh lima) dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian harapan lama sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 14,74 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 12,23 tahun.

Grafik 2.15
Posisi Relatif Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara 2020



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Angka relatif rata-rata lama sekolah Kabupaten Karo tahun 2020 adalah 9,79 tahun, berada di urutan ke-10 (kesepuluh) dari 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Capaian rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 11,39 tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Nias sebesar 5,36 tahun.

• **Kesehatan**

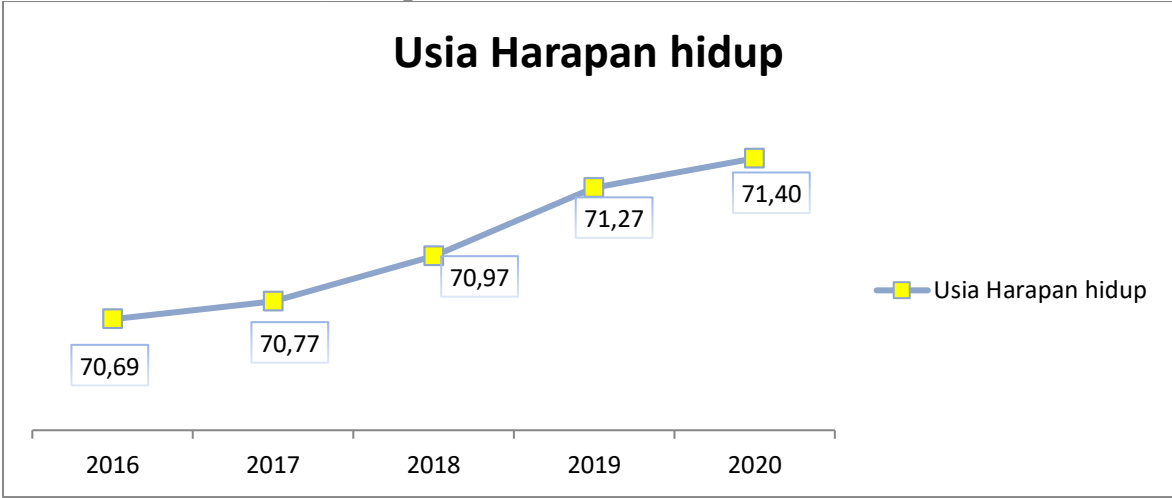
Indikator kesehatan adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Nilai indikator tersebut dapat memberikan petunjuk atau indikasi tentang keadaan keseluruhan atau populasi tertentu atau sekelompok orang.

Angka Harapan Hidup

Menurut Badan Pusat Statistik, Angka Harapan Hidup yaitu rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan

kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

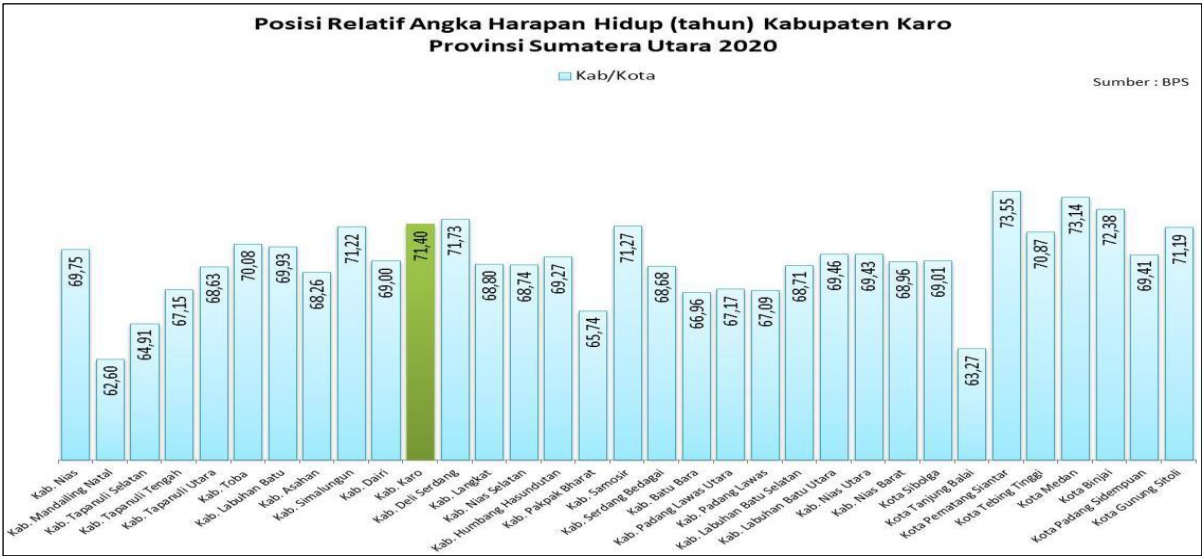
Grafik 2.16
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Kab. Karo

Angka usia harapan hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebesar 70,69 tahun, pada tahun 2017 meningkat menjadi 70,77 tahun, pada tahun 2018 meningkat menjadi 70,97 tahun, pada tahun 2019 menjadi 71,27 tahun dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 71,40 tahun.

Grafik 2.17
Posisi Relatif Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Karo
di Provinsi Sumatera Utara 2020



Sumber: BPS

Posisi relatif angka harapan hidup Kabupaten Karo tahun 2020 berada diurutan ke 5 (lima) paling tinggi atau terbaik diantara 33 (tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. Capaian rata-rata lama sekolah paling tinggi berada di Kota Pematang Siantar sebesar 73,55

tahun dan yang paling rendah berada di Kabupaten Mandailing Natal sebesar 62,60 tahun. Capaian Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 71,40 berada di atas atau lebih baik dari capaian Sumatera Utara dengan capaian sebesar 69,10 tahun.

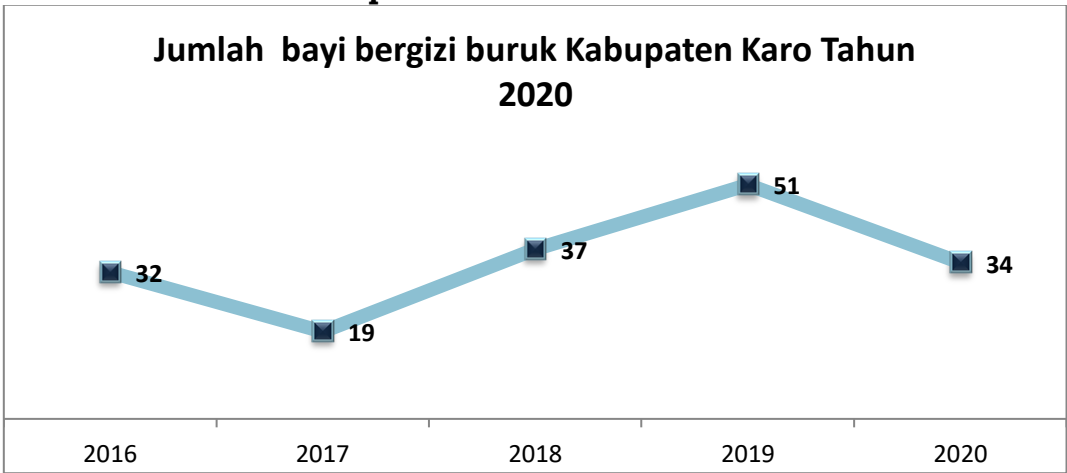
Bayi Bergizi Buruk (Malnutrisi)

Malnutrisi adalah kondisi gizi yang tidak seimbang. Ini berarti, malnutrisi tidak hanya mengacu pada kondisi kekurangan asupan makan (*Undernutrition*). Istilah malnutrisi juga bisa digunakan untuk menggambarkan orang yang makan dengan cukup, namun nutrisinya tidak seimbang (*Unbalanced diet*), serta orang yang mengalami kelebihan berat badan (*Overweight*).

Menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO), malnutrisi mencakup berbagai kondisi yang terkait dengan gizi. Beberapa diantaranya:

- a. Kekurangan gizi (*undernutrition*), contohnya pada kondisi *underweight* (terlalu kurus untuk usianya), *wasting* (terlalu kurus untuk tinggi badannya), serta *stunting* (terlalu pendek untuk usianya).
- b. Nutrisi yang tidak seimbang, contohnya kekurangan dan kelebihan mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral.
- c. Kelebihan berat badan dan obesitas.

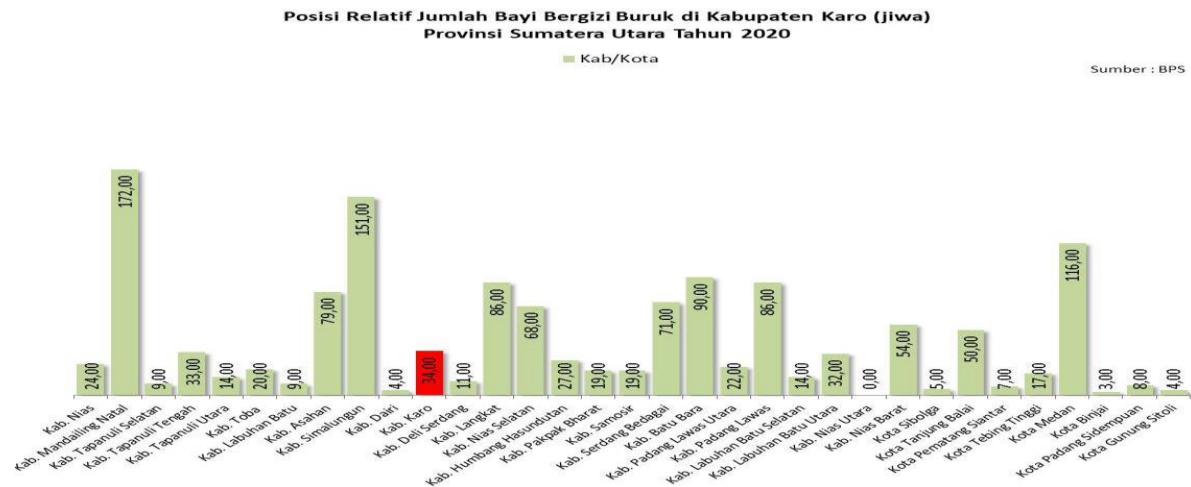
Grafik 2.18
Perkembangan Jumlah Bayi Bergizi Buruk
di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: BPS

Jumlah bayi bergizi buruk di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 rata-rata mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 bayi bergizi buruk di Kabupaten Karo berjumlah 32 jiwa, pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 19 jiwa. Pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 37 dan 51 jiwa sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 34 jiwa.

Grafik 2.19
Posisi Relatif Jumlah Bayi Bergizi Buruk (jiwa)
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara 2020



Sumber: BPS

Posisi relatif jumlah bayi bergizi buruk Kabupaten Karo tahun 2020 berada diurutan ke 12 (dua belas) tertinggi atau terburuk diantara 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara. Capaian jumlah bayi bergizi buruk paling tinggi berada di Kabupaten Mandailing Natal sebanyak 172 jiwa dan yang paling rendah berada di Kota Binjai sebanyak 3 jiwa.

c. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus seni budaya dan olahraga dapat diketahui dari pengelolaan kebudayaan dan olahraga dengan indikator meliputi jumlah grup kesenian, jumlah klub dan gedung olahraga. Tabel berikut ini menunjukkan perkembangan seni dan budaya dan olah raga Kabupaten Karo tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.27
Perkembangan Seni, Budaya dan Olahraga
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No	Capaian Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian/ 10.000 penduduk.	0,314	0,314	0,314	0,314	0,314
2	Jumlah gedung kesenian/ 10.000 penduduk.	0,026	0,026	0,026	0,026	0,026
3	Jumlah klub olahraga/ 10.000 penduduk.	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078	0,0078
4	Jumlah gedung olahraga/ 10.000 penduduk.	0	0	0	0	0

Sumber:

- Dinas Budaya dan Pariwisata Kab. Karo
 - Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo
- (data di atas adalah data yang terdaftar pada kedua dinas tersebut)

Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya di Kabupaten Karo ditujukan untuk mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global.

Perkembangan bidang seni dan budaya sangat erat kaitannya dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat terutama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab dan berkualitas. Kabupaten Karo yang terdiri dari 17 kecamatan dan 269 desa/kelurahan, memiliki berbagai adat istiadat serta kesenian yang menggambarkan dinamika yang ada di masyarakat, sekaligus sebagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan daerah.

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten Karo perlu mendapat perhatian jika dilihat dari jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk dari tahun 2016-2020 yang tidak mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,314. Sama halnya dengan ketersediaan gedung kesenian juga tidak mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020 sebesar 0,026.

Kondisi tersebut tentu membutuhkan sentuhan langsung dari pemerintah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan dalam bidang seni dan budaya, baik melalui regulasi maupun program dan kegiatan yang memicu perkembangan seni dan budaya daerah. Perkembangan seni dan budaya tersebut diharapkan dapat memberi efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Olahraga

Pembinaan keolahragaan diarahkan pada pengembangan olahraga dengan berbagai cabang olahraga yang sudah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sasaran pengembangan tersebut adalah untuk membentuk manusia yang sportif, tangguh dan sehat disamping untuk pengembangan prestasi.

Perkembangan Olahraga di Kabupaten Karo, dilihat dari jumlah klub olahraga per 10.000 penduduk pada tahun 2016-2020 cenderung stagnan sebesar 0,0078. Hal ini dikarenakan jumlah klub olahraga yang dibangun tidak mengalami peningkatan. Permasalahan lainnya bahwa

keberadaan klub olahraga tidak diiringi dengan pembangunan sarana olahraga, dimana Kabupaten Karo belum memiliki gedung olahraga.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Bidang Urusan Pendidikan

Bidang pendidikan berperan strategis bagi penguatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu melakukan transformasi perubahan peradaban ke arah yang lebih baik. Selain itu, dengan berbekal sumber daya manusia berkualitas akan mampu mengelola dengan baik sumber daya yang terbatas. Dengan demikian, kualitas sumber daya manusia masa depan ditentukan oleh keberhasilan bidang pendidikan.

Data mengenai pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting untuk melihat kualitas penduduk, tinggi rendahnya tingkat pendidikan di suatu daerah dikaitkan oleh beberapa indikator pendidikan sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal dan informal.

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu, yang terdapat di semua Gereja. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya. Sedangkan

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Tabel 2.28
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Siswa pada Jenjang TK/RA/Penitipan Anak (jiwa)	Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun (jiwa)	Pendidikan Anak Usia Dini (%)
2016	25.970	33.780	76,88
2017	27.443	33.544	81,81
2018	6.021	33.204	18,13
2019	5.798	33.544	17,28
2020	5.798	33.846	17,13

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas, pendidikan anak usia dini Kabupaten Karo cenderung bersifat fluktuatif. Tahun 2016 sebesar 76,88% mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 81,81%. Akan tetapi dari tahun 2018-2020 persentase PAUD Kabupaten Karo mengalami penurunan sampai pada angka 17,13% di tahun 2020. Capaian target tersebut tentunya tidak terlepas dari kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya terutama pada pendidikan anak usia dini.

2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) adalah untuk melihat partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan (berapa pun usianya) sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program pendidikan yang diselenggarakan. Angka Partisipasi Kasar tingkat SD/MI di Kabupaten Karo tahun 2016 sebesar 110,31% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 105,95%. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs tahun 2016 sebesar 88,41% dan tahun 2020 meningkat menjadi 91,69%.

Tabel 2.29
Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No .	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI (%)	110,31	105,51	107,03	107,80	106,58
2.	SMP/MTs (%)	88,41	84,96	88,67	89,81	90,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

Persentase nilai APK Kabupaten Karo pada jenjang SD/MI lebih

besar dari 100%. Hal ini disebabkan karena populasi murid pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak berusia di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Misalnya, pada tahun 2020 APK SD/MI sebesar 106,58% Artinya terdapat 6,58% penduduk yang tidak berusia 7-12 tahun tetapi bersekolah di SD/MI. Lain halnya dengan persentase nilai APK untuk jenjang SMP/MTs pada tahun 2020 yang tidak mencapai 100% yaitu sebesar 90,55%. Hal ini berarti bahwa masih ada penduduk usia 13-15 tahun yang ada di Kabupaten Karo tidak bersekolah di jenjang SMP/MTs.

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Jika persentase APM=100, berarti seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu. Persentase APM Kabupaten Karo pada tahun 2020 adalah sebesar 98,74%. Artinya, masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang SD/MI sebesar 1,26%. Angka APM Kabupaten Karo pada jenjang SMP/MTs sebesar 84,05%, yang artinya masih ada penduduk yang tidak sekolah tepat waktu pada jenjang tersebut sebesar 15,95%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Murni Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM SD/MI/Paket A	99,35	98,44	99,15	98,64	98,74
2.	APM SMP/MTs/Paket B	83,47	81,47	83,14	83,15	84,05

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

4. Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah di suatu jenjang pendidikan, misalnya angka putus sekolah SD menunjukkan persentase anak yang berhenti sekolah sebelum tamat SD yang dinyatakan dalam persen. Persentase Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.31
Angka Putus Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,44	0,35	0,25	0,02	0,02
2.	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,33	0,44	0,65	0,07	0,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Angka putus sekolah Kabupaten Karo di jenjang Pendidikan SD/MI ataupun SMP/MTs dari tahun 2016 sampai 2020 masih ada. Pada tahun 2020 angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 0,02 persen, sedangkan jenjang pendidikan SMP/MTs sebesar 0,04 persen. Secara umum, capaian kedua jenjang pendidikan ini cenderung fluktuatif dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi persentase angka ini tentu perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menekan angka putus sekolah.

5. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka kelulusan Kabupaten Karo pada jenjang pendidikan SD/MI menunjukkan peningkatan dari tahun 2016 sampai 2020, dan mencapai 100% pada akhir periode tahun tersebut.

Tabel 2.32
Angka Kelulusan Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI (%)	99,99	99,86	100	100	100
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs (%)	97,36	98,40	100	98,40	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Untuk jenjang pendidikan SMP/MTs periode 2016-2020, persentase angka kelulusan cenderung fluktuatif. Pada tahun 2019, terlihat bahwa masih terdapat 1,60% siswa pada jenjang pendidikan SPM/MTs yang tidak lulus. Akan tetapi menunjukkan persentase angka kelulusan yang baik (100%) di akhir periode pada tahun 2020.

6. Angka Melanjutkan Sekolah

Angka kelulusan berkaitan erat dengan angka melanjutkan sekolah karena siswa yang lulus tersebut akan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Untuk jenjang SD/MI tahun 2016-2020 angka

melanjutkan sekolah belum mencapai 100%, artinya masih ada yang tidak melanjutkan sekolah ke jenjang SMP/MTs.

Tabel 2.33
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	95,14	96,72	92,75	96,72	100
2	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	94,65	94,80	100	93,66	94,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Angka melanjutkan sekolah tingkat SD/MI ke SMP/MTs pada tahun 2016-2019 masih di bawah 100%, akan tetapi pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Artinya pada tahun 2020, semua siswa tingkat SD/MI melanjutkan sekolah ke SMP/MTs. Sedangkan angka melanjutkan sekolah tingkat SMP/MTs ke SMA/SMK/MA cenderung fluktuatif dan belum mencapai angka 100%. Artinya, setelah murid lulus dari SMP/MTs ada yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ataupun melanjutkan sekolah di luar Kabupaten Karo.

7. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan adalah sarana dan prasarana yang harus tersedia untuk melancarkan kegiatan pendidikan di sekolah. Sarana adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan untuk proses pendidikan di sekolah, meliputi gedung, ruang belajar/kelas, media belajar, meja dan kursi. Sarana pendidikan sebagai segala macam alat yang digunakan secara langsung dalam proses pendidikan sedangkan prasarana pendidikan adalah macam alat yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Fasilitas pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Karo tahun 2016-2020.

Tabel 2.34
Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sekolah SD/MI kondisi baik (%)	19,84	34,02	32,17	32,17	32,17
2.	Sekolah SMP/MTs kondisi baik (%)	82,15	23,07	24,65	24,65	24,65
3.	Sekolah SD/MI Memiliki ruang perpustakaan (%)	80,07	89,80	87,75	87,58	87,58
4.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang perpustakaan (%)	90,00	90,48	98,44	98,61	98,61
5.	Sekolah SMP/MTs Memiliki ruang laboratorium (%)	94,29	88,89	49,22	59,72	59,72
6.	Persentase Kecamatan yang memiliki TK Pembina (%)	23,53	23,53	23,53	23,53	23,53
7.	Persentase Kelurahan/desa yang memiliki lembaga PAUD Nonformal (%)	37,55	48,70	48,70		

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo 2021

Fasilitas Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah meliputi kondisi sekolah, adanya ruang perpustakaan dan laboratorium, persentase kecamatan yang memiliki TK Pembina serta persentase kelurahan/desa yang memiliki lembaga PAUD Nonformal. Secara keseluruhan sarana dan prasarana sekolah di Kabupaten Karo dalam kondisi baik belum mencapai 100%. Hal ini disebabkan masih memerlukan anggaran yang besar untuk pemeliharaan dan rehabilitasi sehingga kondisi menjadi lebih baik.

8. Rasio Ketersediaan Gedung Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan diperlukan ketersediaan infrastruktur pendidikan yakni ketersediaan gedung sekolah. Ketersediaan gedung sekolah harus sesuai dengan jumlah penduduk usia sekolah, ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) cenderung fluktuatif, dimana pada tahun 2016 sebesar 63,83% dan di akhir periode di tahun 2020 sebesar 63,76%.

Rasio ketersediaan gedung sekolah per penduduk usia sekolah Kabupaten Karo disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.35
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah gedung sekolah (gedung)	297	291	294	306	306
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (jiwa)	46.528	46.391	48.784	48.864	47.989
1.3	Rasio per 10.000 penduduk (%)	63,83	62,73	60,27	62,62	63,76
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah gedung sekolah (gedung)	70	64	64	72	72
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun (jiwa)	23.596	23.842	24.735	24.770	24.647
2.3	Rasio per 10.000 penduduk (%)	29,67	26,84	25,87	29,07	29,21

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021

Begitu juga untuk jenjang pendidikan SMP/MTs rasio ketersediaan gedung sekolah terhadap penduduk usia sekolah tahun 2016 sebesar 29,67% menurun di tahun 2017 menjadi 26,84%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga mencapai 29,21%.

9. Rasio Guru/Murid

Periode waktu 2016-2020, jumlah tenaga pendidikan dan peserta didik juga harus disesuaikan untuk menciptakan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI) rasio guru dan murid paling tinggi pada tahun 2020 yaitu 664,86 dan paling rendah pada tahun 2017 sebesar 575,77, tahun 2020 mencapai 664,86 artinya tersedia 664 orang guru untuk 10.000 orang siswa.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Karo paling tinggi pada tahun 2016 sebesar 836,14 sedangkan paling rendah pada tahun 2018 sebesar 636,74 sedangkan tahun 2020 mencapai 690,84 artinya bahwa pada tahun 2020 tersedia kurang lebih 690 orang guru untuk 10.000 orang siswa.

Tabel 2.36
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah Guru	3.145	2.679	2.701	2.992	3.057
1.2	Jumlah Murid	47.782	46.529	45.188	44.14	45.979
1.3	Rasio guru per 10.000 siswa	658,2	575,77	597,72	645,83	664,86
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah Guru	1.814	1.348	1.342	1.489	1.596
2.2	Jumlah Murid	21.695	21.04	21.076	22.763	23.102
2.3	Rasio guru per 10000 siswa	836,14	640,68	636,74	654,13	690,84

Sumber: BPS Kab. Karo, 2021 (diolah)

Penumpukan guru di daerah tertentu dan kekurangan guru di daerah terpencil dan perbatasan menjadi permasalahan pendidikan yang harus diperhatikan. Pemerataan dan penataan guru menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan rasio guru terhadap jumlah siswa yang proporsional di setiap daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas proses pembelajaran disekolah. Melalui regulasi yang sudah dibuat bahwa setiap guru yang ditempatkan harus memenuhi masa tugas selama 5 tahun untuk bisa bertugas ditempat lain. Begitu juga mengatasi guru yang berada di daerah terpencil dan perbatasan akan dibuat regulasi yang mengatur insentif khusus.

Pemerintah juga melakukan distribusi tenaga pendidikan di setiap kecamatan untuk jenjang pendidikan sekolah dasar (SD/MI). Pada tahun 2019 jumlah guru paling banyak berada di Kecamatan Kabanjahe yakni sebanyak 420 guru dengan jumlah murid 9.025 jiwa dan yang paling rendah di Kecamatan Merdeka sebanyak 59 guru dengan jumlah murid sebanyak 791 jiwa. Rasio jumlah guru dan murid paling tinggi berada di Kecamatan Juhar sebesar 908,42 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 465,37.

Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) jumlah guru paling banyak di Kecamatan Kabanjahe sebanyak 286 guru dengan jumlah murid 5.958 jiwa, sedangkan paling sedikit berada di Kecamatan Dolat Rayat sebanyak 13 guru dengan jumlah siswa 165 jiwa sedangkan di Kecamatan Merdeka belum memiliki gedung sekolah tingkat SMP sederajat.

Untuk rasio jumlah guru dan murid paling tinggi di Kecamatan Payung sebesar 1.124,03 dan terendah di Kecamatan Kabanjahe sebesar 482,03. Rasio jumlah guru/murid menurut kecamatan di Kabupaten Karo dapat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.37
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Per Kecamatan Kabupaten Karo Tahun 2020

No .	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	Mardingding	170	2.639	644,18	83	1.187	699,24
2	Laubaleng	160	2.487	643,34	53	886	598,19
3	Tigabinanga	192	2.523	760,99	96	1.441	666,20
4	Juhar	124	1.365	908,42	49	596	822,15
5	Munte	204	2.332	874,79	53	627	845,30
6	Kutabuluh	111	1.320	840,91	57	622	916,40
7	Payung	93	972	956,79	58	516	1.124,0 3
8	Tiganderket	136	1.504	904,26	42	650	646,15
9	Simpang Empat	134	1.666	804,32	75	824	910,19
10	Naman Teran	106	1.472	720,11	36	476	756,30
11	Merdeka	59	791	745,89	0	0	0
12	Kabanjahe	420	9.025	465,37	286	5.958	480,03
13	Berastagi	319	6.826	467,33	237	4.132	573,57
14	Tigapanah	243	3.118	779,35	114	1.427	798,88
15	Dolat Rayat	65	838	775,66	13	165	787,88
16	Merek	162	2.935	551,96	61	842	724,47
17	Barusjahe	193	2.325	830,11	103	1.193	863,37
	Jumlah	2891	44.140	654,96	1.416	21.576	656,28

Sumber: BPS, Karo Dalam Angka 2021 (diolah)

10. Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata

Rasio guru/murid per kelas rata-rata merupakan jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas dibagi dengan jumlah murid pendidikan dasar dalam 1.000 jumlah penduduk. Indikator rasio guru/murid per kelas rata-rata Kabupaten Karo dari tahun 2016-2020 terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Rasio Guru/Murid per Kelas Rata-rata Pendidikan Dasar
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio guru/murid per kelas rata-rata pendidikan dasar	17,5	15,5	19,0	16,5	15,5

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2021

Rasio guru/murid per kelas rata-rata di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 untuk pendidikan dasar cenderung fluktuatif. Nilai rasio pada tahun 2016 adalah sebesar 17,5 cenderung fluktuatif di tahun berikutnya dan pada tahun 2020 rasionya menjadi 15,5.

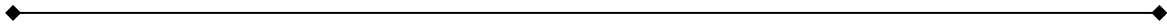
11. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/DIV

Persentasi tenaga pendidik dengan memenuhi kualifikasi S-1/D-IV di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 masih perlu ditingkatkan, hal ini terlihat dari persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S-1/D-IV tahun 2020 masih sebesar 89,47%. Untuk itu guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1/D-IV perlu ditingkatkan, terutama kepala sekolah yang memiliki sertifikat diklat kepala sekolah serta peningkatan kompetensinya. Persentase tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV tersebut dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.39
Persentasi Tenaga Pendidik S-1/D-IV
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru yang memenuhi S-1/D-IV	75,85	80,25	81,65	84,15	89,47
2	Kepala Sekolah yang memenuhi S-1/D-IV	95	90	90	86,39	91,18
3	Kepala Sekolah yang memiliki sertifikat Diklat Kepala Sekolah	0	0	7	44	44
4	Pengawas Sekolah yang memenuhi S-1/D-IV	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Karo, 2021



STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 2.40
Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Karo

No.	SPM	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	46,66	46,66
2	Pendidikan Dasar (SD)	100	94,74	94,74
3	Pendidikan Menengah (SMP)	100	85,31	85,31
4	Pendidikan Kesetaraan	100	100	100

Sumber: Dinas Pendidikan Kab. Karo, 2020

Permasalahan :

1. Lemahnya pemahaman aparat sekolah dalam memahami aturan serta keharusan penuntasan SPM bidang pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
2. Masih terbatasnya anggaran pendidikan yang tersedia sehingga masih sangat sulit menuntaskan SPM bidang pendidikan ini sesuai dengan amanah peraturan;
3. Anggaran untuk menuntaskan SPM ini hanya terfokus bersumber dari DAK Pendidikan;
4. Masih kurang akuratnya pendataan tentang penuntasan SPM bidang pendidikan di tingkat satuan pendidikan;
5. Kurangnya koordinasi antara pihak terkait dalam penuntasan SPM bidang pendidikan ini;
6. Anggaran pendidikan dalam rangka penuntasan SPM ini masih berfokus pada penyelesaian fisik sekolah, belum menyentuh kepada pembenahan kurikulum dan sumber daya manusia.

2.1.3.1.2. Bidang Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah investasi utama bagi pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Pembangunan kesehatan pada dasarnya adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, serta kemampuan setiap orang untuk dapat berperilaku hidup yang sehat untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu perencanaan pembangunan kesehatan yang sistematis, terarah, terpadu dan menyeluruh, serta dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor dan seluruh komponen bangsa dalam pelaksanaannya.

Pembangunan Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, supaya terwujud derajat kesehatan warga masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) yang produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial, yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

1. Angka Kematian Bayi dan Balita

Angka kematian bayi dan balita adalah jumlah bayi dan balita yang meninggal per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Angka kematian bayi dan balita berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup anak dan menggambarkan kondisi sosial, ekonomi serta lingkungan tempat anak-anak tinggal, termasuk pemeliharaan kesehatannya. Indikator ini juga berkaitan langsung dengan kehamilan dan pelayanan kesehatan pasca melahirkan.

Formula untuk menghitung Angka Kematian Bayi dan Balita adalah sebagai berikut:

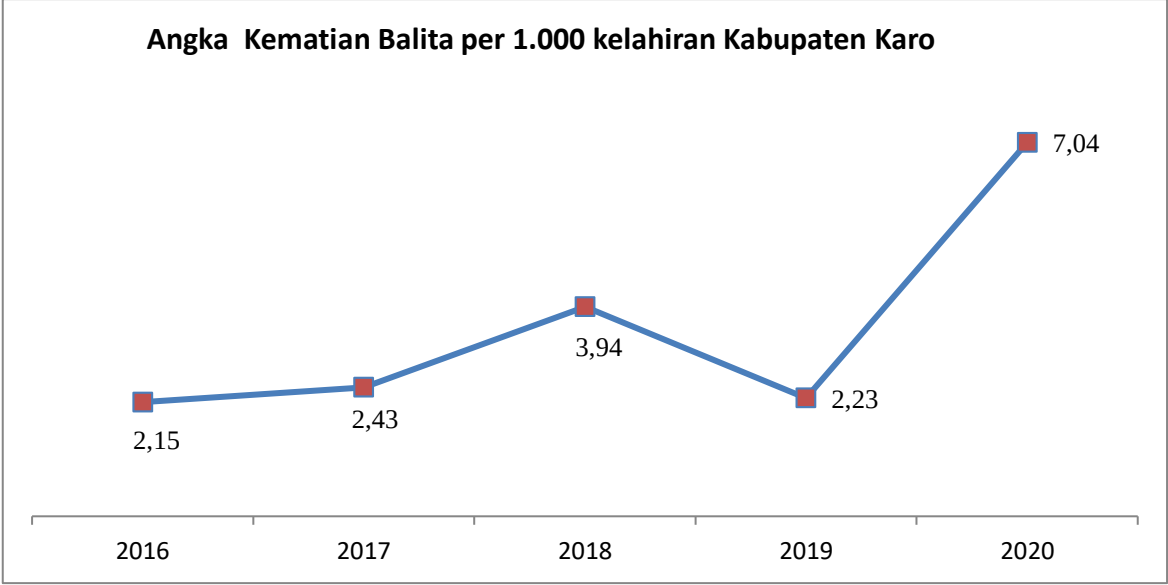
Angka Kematian Bayi = $\frac{\text{Jumlah kematian bayi dan Balita selama tahun tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1000$

Tabel 2.41
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita
Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Kematian Bayi dan balita	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran
2016	6.969	15	2,15
2017	6.572	16	2,43
2018	6.602	26	3,94
2019	6.725	15	2,23
2020	6.537	46	7,04

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

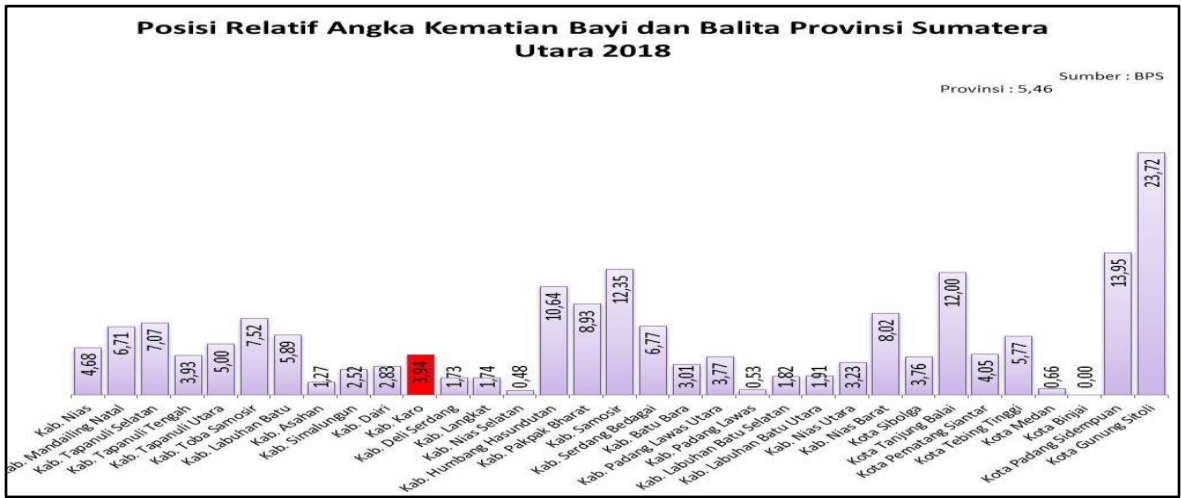
Grafik 2.20
Perkembangan Angka Kematian Bayi dan Balita
Kabupaten Karo per 1000 Kelahiran Hidup 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Perkembangan angka kematian bayi dan balita dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan akan tetapi perkembangannya cenderung meningkat. Pada tahun 2016 angka kematian bayi dan balita sebesar 2,15 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2017 meningkat menjadi 2,43 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2018 meningkat menjadi 3,94 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, tahun 2019 menurun menjadi 2,23 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup dan tahun 2020 meningkat menjadi 7,04 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup.

Grafik 2.21
Posisi Relatif Angka Kematian Bayi dan Balita
Kabupaten Karo di Sumatera Utara per 1000 Kelahiran Hidup 2018



Sumber: BPS

Capaian angka Kematian Bayi dan Balita di Kabupaten Karo sebesar 3,94 jiwa/per 1.000 kelahiran hidup, angka ini berada dibawah/lebih baik

dari capaian provinsi 5,46 per 1.000 kelahiran hidup atau berada di peringkat 17 (dua puluh) paling tinggi/buruk pada 33 kabupaten/kota Sumatera Utara. Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup di Sumatera Utara paling tinggi/buruk berada di Kabupaten Gunung Sitoli sebesar 23,72 per 1.000 kelahiran hidup dan terendah di Kabupaten Nias Selatan sebesar 0,48 per 1.000 kelahiran hidup.

2. Angka Kematian Ibu

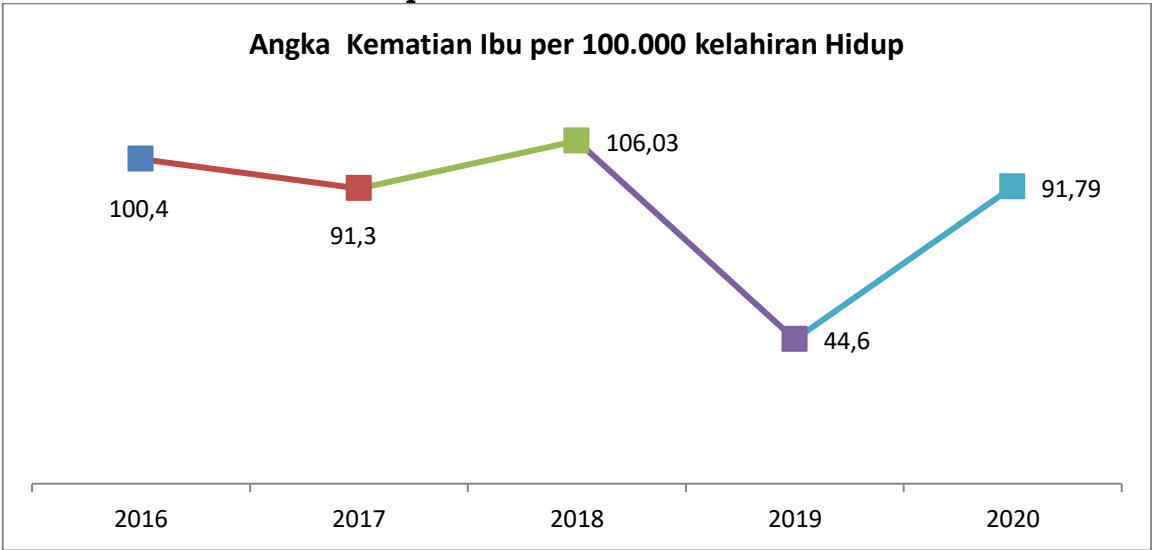
Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.42
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah kelahiran	Jumlah Ibu Kematian	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran Hidup
2016	6.969	7	100,4
2017	6.572	6	91,3
2018	6.602	7	106,03
2019	6.725	3	44,6
2020	6.537	6	91,79

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, 2021

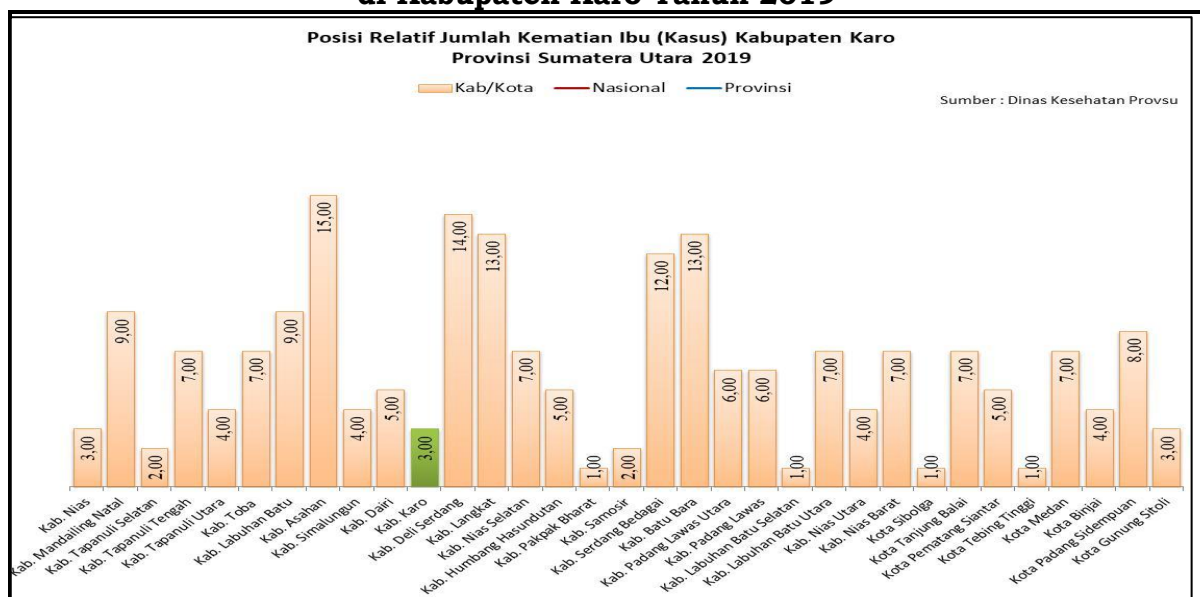
Grafik 2.22
Perkembangan Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Perkembangan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup tahun 2016-2019 di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dan penurunan. Angka kematian ibu pada tahun 2016 sebanyak 100,4 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus), pada tahun 2017 menurun menjadi 91,30 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus), tahun 2018 meningkat menjadi 106,03 per 100.000 kelahiran hidup (7 kasus), pada tahun 2019 menurun menjadi 44,6 per 100.000 kelahiran hidup (3 kasus), akan tetapi pada tahun 2020 meningkat menjadi 91,79 per 100.000 kelahiran hidup (6 kasus).

Grafik 2.23
Posisi Relatif Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Karo Tahun 2019



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2020

Pada tahun 2019 jumlah kematian ibu di Kabupaten Karo sebanyak 3 kasus. Posisi relatif Kabupaten Karo berada di posisi ke 7 (tujuh) kasus terendah di 33 Kabupaten/kota di Sumatera Utara. Kasus tertinggi berada di Kabupaten Asahan sebanyak 15 kasus dan terendah berada di Pakpak Bharat, Labuhan Batu Selatan, Sibolga dan Tebing Tinggi dengan jumlah kasus masing-masing sebanyak 1 kasus.

3. Rasio Posyandu per Satuan Balita

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Berikut disajikan rasio posyandu di Kabupaten Karo tahun 2016-2020.

Tabel 2.43
Rasio Jumlah Posyandu terhadap Jumlah Balita
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Posyandu	399	394	403	377	377
2	Jumlah Balita	42.380	43.882	43.260	42.954	42,954
3	Rasio Posyandu Per Jumlah Balita	9,41	8,98	9,32	8,78	8,84

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Jumlah posyandu di Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 377 posyandu dan jumlah balita sebanyak 424 jiwa. Dengan demikian rasio posyandu terhadap balita mencapai 8, hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu Kabupaten Karo melayani 8 balita.

4. Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu per Satuan Penduduk

Rasio pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kabupaten Karo tahun 2020 mencapai 1 : 101.249 artinya satu rumah sakit melayani 101.249 penduduk, idealnya satu rumah sakit melayani 100.000 penduduk. Kabupaten Karo dengan penduduk sebesar 404.998 jiwa dengan demikian rumah sakit sebanyak 4 (empat) belum dapat memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

Rasio Puskesmas mencapai 1 : 21.315 artinya satu puskesmas melayani melayani 21.315 penduduk, sedangkan rasio pustu mencapai 1 : 1.928 artinya 1 pustu melayani 1.928 penduduk. Bila dibandingkan dengan konsep wilayah kerja puskesmas dimana sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30.000 penduduk, dengan jumlah pelayanan puskesmas di Kabupaten Karo berada di bawah 30.000 penduduk hal ini diharapkan puskesmas dan pustu sudah dapat menjangkau penduduk sasaran di wilayah kerjanya.

Dari data tersebut dengan adanya puskesmas dan pustu di setiap kecamatan diharapkan pelayanan kesehatan dapat diakses semua penduduk di Kabupaten Karo. Berikut tabel rasio rumah sakit, puskesmas dan pustu per jumlah penduduk Kabupaten Karo.

Tabel 2.44
Rasio Rumah Sakit dan Rasio Puskesmas, Polindes, Pustu
per Jumlah Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Rumah sakit	5	5	4	5	4
Jumlah Puskesmas	19	19	19	19	19
Jumlah Pustu	321	230	161	211	210
Jumlah Penduduk	396.579	403.207	409.675	415.878	404.998
Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk	1 : 79315	1 : 80641	1 : 102418	1 : 83.176	1 : 101.249
Rasio Puskesmas Persatuan penduduk	1 : 20.872	1 : 21221	1 : 21561	1 : 21.888	1 : 21.315
Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	1 : 1.235	1 : 1.753	1 : 2.544	1 : 1.970	1 : 1.928

Sumber: BPS Kab. Karo, 2021

5. Rasio Dokter per satuan penduduk dan Rasio rasio tenaga medis per satuan penduduk

Ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor pendukung dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut pemerintah telah menyediakan tenaga kesehatan yang menyebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Karo. Adapun jumlah tenaga kesehatan pada tahun 2020 yaitu dokter umum ada sebanyak 96 orang, dokter spesialis sebanyak 46 orang, dokter gigi sebanyak 31 orang sehingga seluruh tenaga medis ada sebanyak 173 orang.

Berikut disajikan tabel rasio tenaga kesehatan di Kabupaten Karo tahun 2016-2020.

Tabel 2.45
Rasio Tenaga Kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Dokter Umum	65	91	91	104	96
Jumlah Dokter Spesialis	18	68	68	61	46
Jumlah Dokter Gigi	17	26	23	35	31
Jumlah Tenaga Medis	100	185	182	200	173
Jumlah Penduduk	396.598	354.242	409.675	415.878	404.998
Rasio Dokter Umum Persatuan Penduduk	1 : 6101	1 : 3892	1: 4501	1 : 3.998	1 : 4.218
Rasio Dokter Spesialis Persatuan Penduduk	1 : 22033	1 : 5209	1 : 6024	1 : 6.817	1 : 8.804
Rasio Dokter Gigi Persatuan Penduduk	1 :23329	1 : 13624	1 : 17.811	1 : 11.882	1 : 13.064
Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk	1 : 3965	1 : 1914	1 : 2.250	1 : 2.079	1 : 2.341

Sumber: BPS, Kab. Karo, 2020 (diolah)

6. Cakupan Anak yang Diimunisasi Campak

Program imunisasi merupakan salah satu upaya pencegahan terjangkitnya penyakit tertentu yaitu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi antara lain Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, Polio dan campak.

Setiap bayi (Usia 0-11 bulan) wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap salah satunya imunisasi campak. Vaksin campak adalah vaksin untuk mencegah penyakit campak, yang mulai diberikan pada anak usia 9 (sembilan) bulan.

Persentase imunisasi campak adalah perbandingan antara banyaknya anak berumur 1 tahun yang telah menerima minimal satu kali imunisasi campak terhadap jumlah anak berumur 1 tahun, dan dinyatakan dalam persentase. Anak berumur usia 1 (satu) tahun adalah anak usia 12-23 bulan.

Pada tahun 2016-2020 di Kabupaten Karo, jumlah anak yang diimunisasi campak pada tahun 2016 merupakan jumlah terbanyak sebanyak 6.877 anak, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.343 anak, tahun 2018 menurun menjadi 6.138 anak sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 7.017 anak dan tahun 2020 menurun menjadi 6.820 anak. Adapun perkembangannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.46
Persentase Anak Usia 1 Tahun yang Diimunisasi Campak
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak
2016	6.877
2017	6.343
2018	6.138
2019	7.017
2020	6.820

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

7. Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (*alveoli*) yang ditandai dengan batuk disertai napas cepat dan/atau kesukaran bernafas, ditargetkan 100% atau tidak ada kasus.

Tabel 2.47
Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penderita Pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja	Jumlah perkiraan penderita Pneumonia balita yang ditangani di suatu wilayah kerja	Cakupan Balita Pneumonia yang Ditangani
2016	N i h i l	986	-
2017	N i h i l	12.055	-
2018	N i h i l	12.250	-
2019	N i h i l	2.148	-
2020	N i h i l	4.130	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Kasus balita pneumonia di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 tidak ada penderita pneumonia balita yang ditangani dikarenakan belum ada laporan penemuan kasus pneumonia.

8. Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk

Tuberculosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Prevalensi Tuberculosis adalah banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) dibagi jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama

Untuk menentukan berhasil tidaknya penanggulangan TBC maka dibutuhkan indikator-indikator sebagai bahan evaluasi dan monitoring. WHO menetapkan tiga indikator TBC beserta targetnya yang harus dicapai oleh negara-negara dunia, yaitu:

- a. Menurunkan jumlah kematian TBC sebanyak 95% pada tahun 2035 dibandingkan kematian pada tahun 2016.
- b. Menurunkan insiden TBC sebanyak 90% pada tahun 2035 dibandingkan tahun 2016.
- c. Tidak ada keluarga pasien TBC yang terbebani pembiayaannya terkait pengobatan TBC pada tahun 2035.

Perkembangan tingkat prevalensi tuberculosis per 100.000 penduduk di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.48
Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 Penduduk
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Banyaknya kasus penderita TBF (Baru dan Lama)/jiwa	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Prevalensi Tuberculosis per 100.000 penduduk
2016	276	396.579	69,59
2017	876	403.207	217,25
2018	939	409.675	229,20
2019	858	415.878	206,31
2020	581	421,997	137,67

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Tingkat prevalensi *tuberculosis* di Kabupaten Karo dalam Tahun 2016-2020 mengalami tren yang berfluktuasi, pada tahun 2016 Tingkat prevalensi *tuberculosis* sebesar 69,59 per 100.000 penduduk, pada tahun 2017 sebanyak 217,25 per 100.000 penduduk, pada tahun 2018 merupakan capaian paling tinggi sebesar 229,20 per 100.000 penduduk, tahun 2019 menurun menjadi 206,31 per 100.000 penduduk dan pada tahun 2020 menurun menjadi 137,67 per 100.000 penduduk .

Sasaran nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang SDGs menetapkan target prevalensi TBC pada tahun 2019 menjadi 245 per 100.000 penduduk. Jika dilihat dari target SDGs maka prevalensi *tuberculosis* di Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 137,67 per 100.000 penduduk sudah memenuhi target SDGs.

Sedangkan di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan *Tuberculosis* menetapkan target program Penanggulangan TBC nasional yaitu eliminasi pada tahun 2035 dan Indonesia Bebas TBC Tahun 2050. Eliminasi TBC adalah tercapainya jumlah kasus TBC 1 per 100.000 penduduk pada tahun 2035.

a. Tingkat Kematian karena TBC per 100.000 Penduduk

Tingkat kematian karena TBC pada tahun 2016 sebanyak 1 kasus atau 0,252 kematian per 100.000 penduduk, tahun 2017 sebanyak 5 kasus atau 1,240 kematian per 100.000 penduduk dan pada tahun 2018 sebanyak 12 kasus atau 2,929 kematian per 100.000 penduduk, pada tahun 2019 sebanyak 20 kasus atau 4,809 kematian per 100.000

penduduk sedangkan tahun 2020 sebanyak 17 kasus atau 4,197 kematian per 100.000 penduduk.

Tabel 2.49
Tingkat Kematian Karena TBC Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasien TB yang meninggal	Jumlah Penduduk (jiwa)	Tingkat Kematian Karena TB per 100.000 Penduduk
2016	1	396.579	0,252
2017	5	403.207	1,240
2018	12	409.675	2,929
2019	20	415.878	4,809
2020	17	404.998	4,197

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

b. Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS

DOTS (*Directly Observed Treatment Succes Rate*) adalah strategi penyembuhan TB paru jangka pendek dengan pengawasan secara langsung. Pengobatan yang dilakukan kepada pasien prosedur untuk mendeteksi bakteri penyebab penyakit *tuberculosis* (TB BTA) melalui DOTS. Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dalam program DOTS selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasien TB BTA Paru yang mendapat pengobatan melalui DOTS			Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut	Proporsi Kasus TBC yang Terdeteksi dalam Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2016	214	303	517	631	81,93
2017	86	243	329	648	50,77
2018	170	635	805	655	114,19
2019	164	624	788	695	113,38
2020	182	369	551	755	72,98

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Proporsi kasus TBC yang terdeteksi dalam Program DOTS pada tahun 2016 sebanyak 631 pasien atau sebesar 81,93%, pada tahun 2017 sebanyak 648 pasien atau sebesar 97,36%, tahun 2018 sebanyak 655 pasien atau sebesar 114,19%, tahun 2019 sebanyak 695 pasien atau sebesar 125,56% sedangkan tahun 2020 sebanyak 755 pasien atau sebesar 72,98%.

c. Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS

Tabel 2.51
Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasien TB Paru BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS			Jumlah pasien baru TB paru yang diobati	Proporsi Kasus TBC yang Diobati dan Sembuh dalam Program DOTS (%)
	Positif (+)	Negatif (-)	Jumlah		
2016	292	54	346	356	97,46
2017	214	303	517	547	99,04
2018	173	494	667	679	98,23
2019	174	658	832	852	97,65
2020	190	636	826	858	96,27

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Proporsi Kasus TBC yang diobati dan sembuh dalam program DOTS tahun 2016 sebesar 97,46%, tahun 2017 sebesar 99,04% dan tahun 2018 sebesar 98,23% sedangkan tahun 2019 sebesar 97,65% dan tahun 2020 sebesar 96,27%.

9. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Demam Berdarah *Dengue* (DBD) adalah penyakit yang ditandai dengan gejala:

- a. Panas mendadak berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari tanpa sebab yang jelas
- b. Tanda-tanda perdarahan (sekurang-kurangnya uji *Torniquet* positif)
- c. Disertai/tanpa pembesaran hati (hepatomegali)
- d. Trombositopenia (Trombosit $\leq 100.000/\mu\text{l}$)
- e. Peningkatan hematokrit $\geq 20\%$

Tabel 2.52
Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penderita DBD yang yang ditangani sesuai SOP	Jumlah penderita DBD yang ditemukan	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)
2016	363	363	100
2017	38	38	100
2018	81	81	100
2019	131	131	100
2020	113	113	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Berdasarkan informasi tabel diatas, menyatakan bahwa Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD Kabupaten Karo tahun 2016-2020 mencapai 100%.

10. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit Diare

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare penduduk di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.53
Cakupan Penderita Diare yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah penderita diare yang datang dan ditangani di sarana kesehatan dan kader	Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk)	Cakupan Penderita Diare yang ditangani
2016	751	21.416	3,51
2017	6.921	127.615	5,42
2018	3.165	283.536	1,11
2019	3.946	11.229	35,14
2020	8.794	11.393	77,18

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

Diare adalah buang air besar lembek/cair bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering dari biasanya. Cakupan penderita diare yang ditangani tahun 2016 sebesar 3,51% tahun 2017 sebesar 5,42 dan tahun 2018 sebesar 1,11% sedangkan tahun 2019 meningkat menjadi 35,14% dan tahun 2020 kembali meningkat menjadi 77,18%.

11. Angka Kejadian Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan plasmodium yaitu makhluk hidup bersel satu yang termasuk ke dalam protozoa. Malaria ditularkan melalui gigitan nyamuk anopheles betina yang mengandung plasmodium di dalamnya. Plasmodium yang terbawa melalui gigitan nyamuk akan hidup dan berkembang biak dalam sel darah merah manusia. Penyakit ini menyerang semua kelompok umur baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang terkena malaria akan memiliki gejala demam, menggil, berkeringat, sakit kepala, mual atau muntah. Penderita yang menunjukkan gejala klinis harus menjalani tes laboratorium untuk mengkonfirmasi status malaria.

Angka kejadian malaria di Kabupaten Karo tahun 2016-2020, angka kejadian malaria hanya terdapat pada tahun 2016 yaitu sebanyak 54 kasus sedangkan pada tahun 2017 sampai 2020 tidak ada lagi ditemukan

angka kejadian malaria di Kabupaten Karo. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.54
Angka Kejadian Malaria Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun`	Jumlah penduduk yang menderita malaria
2016	54
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

12. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

K4 adalah kontak ibu hamil dengan tenaga kesehatan yang keempat atau lebih untuk mendapatkan pelayanan *Ante Care (ANC)* sesuai standar yang ditetapkan. Indikator kualitas capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dinilai dari cakupan kunjungan ibu hamil (K4). Indikator cakupan K4 memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. Cakupan K4 juga dapat menggambarkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 di Kabupaten Karo tertinggi pada tahun 2016 sebesar 77,05% sedangkan terendah di tahun 2017 sebesar 72,95%, tahun 2019 sebesar 74,90 dan tahun 2020 sebesar 73,23%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah ibu hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4	Jumlah sasaran ibu hamil	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 (%)
2016	7.455	9.675	77,05
2017	7.048	9.661	72,95
2018	7.290	9.591	76,00
2019	7.129	9.518	74,90
2020	6.919	9.448	73,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

13. Cakupan Pelayanan Nifas

Pelayanan pasca persalinan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Ibu nifas dan bayi baru lahir yang sehat dipulangkan

setelah 24 jam pasca melahirkan, sehingga sebelum pulang diharapkan ibu dan bayinya mendapat 1 kali pelayanan pasca persalinan (*Kemenkes*).

Pelayanan pasca persalinan terintegrasi dengan program-program lain yaitu dengan program gizi, penyakit menular, penyakit tidak menular, imunisasi, jiwa dan lain lain. Pelayanan pasca persalinan yang komprehensif adalah pelayanan pasca persalinan diberikan mulai dari anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang (termasuk laboratorium), pelayanan KB pasca persalinan, tata laksana kasus, KIE, dan rujukan bila diperlukan.

Tabel 2.56
Cakupan Pelayanan Nifas Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Peserta Ibu Nifas yang Telah Memperoleh 3 Kali Pelayanan Nifas Sesuai Standar (jiwa)	Jumlah ibu nifas (jiwa)	Cakupan Pelayanan Nifas (%)
2016	6.277	9.235	67,97
2017	5.823	9.222	63,14
2018	6.595	9.155	72,00
2019	6.160	9.086	67,79
2020	6.244	9.448	66,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di kabupaten/kota untuk Cakupan Pelayanan Nifas ditargetkan sebesar 90%. Di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 belum mencapai 90%, capaian tertinggi pada tahun 2018 hanya sebesar 72,00% sedangkan kondisi tahun 2020 hanya mencapai 66,08%.

14. Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani

Komplikasi neonatal dengan penyakit dan kelainan yang dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan, dan kematian. Neonatus dengan komplikasi seperti *asfiksia*, *ikterus*, *hipotermia*, *tetanus neonatorum*, infeksi/sepsis, trauma lahir, BBLR (Berat Badan Lahir Rendah < 2500 gr), sindroma gangguan pernafasan, kelainan *kongenital* (*Kemenkes*).

Tabel 2.57
Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani (kasus)	Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada (kasus)	Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani (%)
2016	76	1.319	5,76
2017	63	1.245	5,06
2018	94	1.235	7,61
2019	83	1.298	6,39
2020	126	1.288	9,78

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

Dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di kabupaten/kota untuk cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani ditargetkan sebesar 80%. Di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 belum mencapai 80%, capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 9,78% sedangkan terendah tahun 2017 hanya mencapai 5,06%.

15. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Pelayanan kesehatan (penjaringan) siswa dan setingkat merupakan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik kelas 1 SD atau MI yg dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama kader kesehatan sekolah minimal pemeriksaan status gizi (tinggi badan, berat badan), pemeriksaan gigi, tajam penglihatan dan pendengaran.

Dalam Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di kabupaten/kota untuk Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat ditargetkan sebesar 100%. Di Kabupaten Karo tahun 2017-2018 sudah mencapai 100% sedangkan tahun 2019 dan 2020 hanya mencapai 95,23% dan 98,76%. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.58
Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Murid SD dan Setingkat yang Diperiksa Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan atau Tenaga Terlatih	Jumlah Murid SD dan Setingkat Di Satu Wilayah Kerja Dalam Kurun Waktu yang Sama	Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat (%)
2016	7.728	8.119	95,18
2017	7.501	7.501	100
2018	6.969	6.969	100
2019	6.892	7.237	95,23
2020	6.507	6.589	98,76

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2021

STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN KESEHATAN

Tabel 2.59
Pencapaian SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Karo

No.	SPM	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	36,93	36,93
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	36,47	36,47
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	36,72	36,72
4	Persentase layanan kesehatan balita sesuai standart	100	58,09	58,09
5	Perentase anak usia pendidikan usia dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	13,67	13,67
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standart	100	30,99	30,99
7	Persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	18,61	18,61
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	100	21,21	21,21
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standart	100	26,34	26,34
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standart	100	48,55	48,55
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standart	100	14,46	14,46
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standart	100	5,41	5,41

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Karo, 2020

Permasalahan :

1. Penerapan sasaran oleh kementerian kesehatan yang tinggi, belum berjalannya sistem informasi kesehatan dan masih belum optimalnya upaya kesehatan dengan pendekatan keluarga;
2. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelayanan kesehatan balita secara rutin di Posyandu pasca mendapatkan imunisasi dasar dan masih kurangnya dukungan lintas sektoral dalam Kurangnya koodinasi lintas program puskesmas dalam pelaksanaan pelayanan usia sekolah;

-
3. Ketersediaan posbindu KIT masih terbatas pada 125 desa, kader posbindu masih kurang, kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di posbindu;
 4. Masih kurangnya partisipasi lansia laki-laki dalam program pelayanan lansia di puskesmas, pencatatan dan pelaporan pelayanan kesehatan lansia di puskesmas belum berjalan dengan baik;
 5. Pencatatan dan pelaporan kasus hipertensi di puskesmas belum berjalan dengan baik;
 6. Kurangnya pemeriksaan kesehatan secara rutin oleh masyarakat dalam upaya deteksi dini penyakit DM, ada penderita DM menggunakan pengobatan alternatif sehingga tidak tercatat dan dilaporkan;
 7. Petugas kesehatan jiwa puskesmas belum ada yang dilatih, belum ada dokter kesehatan jiwa di Rumah Sakit kabupaten Kurangnya kesadaran keluarga dan pasien terduga TBC untuk pemeriksaan diri;
 8. Belum ada pemetaan orang dengan resiko terinfeksi virus HIV. Kurangnya kesadaran orang dengan resiko terinfeksi virus HIV.

2.1.3.1.3. Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kewenangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 10 suburusan meliputi sumberdaya air, air minum, persampahan, air limbah, drainase, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang.

Pemerintah Kabupaten Karo berupaya untuk meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTH), meskipun demikian persentase penambahan luasan ruang terbuka hijau publik belum berhasil ditingkatkan sehingga diperlukan upaya yang lebih baik sehingga pengadaan RTH dapat terlaksana.

Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60
Capaian Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
2.1. Pekerjaan Umum						
1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	37,28%	61,06%	62,06%	63,36%	61,65%
2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,003072	0,003021	0,003143	0,003097	0,00293
3.	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4 (%)	0	0	0	0	0
4.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	71,38	73	73	73,58	73,58
5.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (%)	52	54	46,7	48	49,61
6.	Rasio jaringan irigasi (panjang saluran irigasi/luas lahan budidaya pertanian)	80	80	80	55	55
7.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	61,42	63,06	68	68,7	68,7
8.	Rasio Tempat Ibadah per satuan penduduk	0,00261	0,00256	0,00281	0,00275	0,00298
2.2. Penataan Ruang						
1.	Luasan RTH publik wilayah kota/kawasan perkotaan	20%	20%	20%	20%	20%
2.	Ketaatan terhadap RTRW (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3.	Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	0,11	0,10	0,10	0,10	0,1

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo, 2021

Pada suburusan jalan, proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu 37,28% menjadi 63,36%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2020. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh adanya 2 (dua) ruas jalan dalam kondisi baik yang kewenangannya dialihkan dari kewenangan kabupaten menjadi provinsi. Di sisi lain, pada suburusan sumber daya air menunjukkan rasio jaringan irigasi berada pada persentase 55%, bahkan terjadi penurunan persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik dari 54% pada tahun 2017 menjadi 46,7% pada tahun 2018, namun kembali berangsur meningkat dan pada tahun 2020 menjadi 49,61%. Sementara itu, untuk persentase rumah tinggal bersanitasi menunjukkan sedikit peningkatan dari 71,6% di tahun 2016 menjadi 73,58 % di tahun 2020. Untuk tingkatan penduduk berakses air minum, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun seperti dapat dilihat

pada tabel di atas, yaitu 60,63% tahun 2016 menjadi 68,7% pada tahun 2020. Namun demikian kondisi jaringan perpipaan yang sudah tua rentan sering terjadi kerusakan yang mengakibatkan tersendatnya pasokan air minum. Untuk itu diperlukan perhatian khusus sehingga pasokan dari sumber air dapat diterima masyarakat dengan baik.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti tertera pada tabel di bawah.

Tabel 2.61
Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase rumah tinggal bersanitasi (%)	71,38	73	73	73,58	73,58
2.	Persentase penduduk berakses air minum (%)	61,42	63,06	68	68,7	68,7

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karo

Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada dua yakni persentasi rumah tinggal bersanitasi dan persentasi penduduk berakses air minum. Akses sanitasi Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 71,38% tahun 2016 menjadi 73,58% tahun 2020. Hal ini masih lebih rendah dari target SPM Nasional yang seharusnya 100%. Hal serupa juga terjadi untuk akses air minum yang seharusnya 100%, sedangkan capaian Kabupaten Karo masih sekitar 68,7%. Capaian akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Karo masih di bawah SPM disebabkan beberapa hal antara lain kurangnya ketersediaan anggaran dan masalah non teknis seperti tidak tersedianya lahan.

2.1.3.1.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan system yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, peyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan

permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan system pembiayaan serta peran serta masyarakat.

Kewenangan urusan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 5 suburusan meliputi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, sarana prasarana dan utilitas (PSU), sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kawasan permukiman di Kabupaten Karo terdapat seluas 4.829,72 ha dengan jumlah penduduk mencapai 415.878 jiwa dan kepadatan 86 jiwa/ha.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) merupakan salah satu fokus dari urusan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) pada saat ini. Pengertian dan konsep Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni. Penilaian Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)/Kebutuhan Rumah RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

Jumlah rumah di wilayah Kabupaten Karo pada tahun 2020 sebanyak 97.013 unit, dan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 3.882 unit, atau mencapai 4,002%.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan penanganan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Karo sejak tahun 2017 sampai 2020 sebanyak 717 unit melalui kegiatan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni, dan Peningkatan Kualitas (PK) Rumah Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan

bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai berikut, yaitu: 1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman; 2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi; 3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat (batasan sarana dan prasarana ditetapkan dalam lingkup keciptakaryaannya), yaitu: a. Jalan Lingkungan, b. Drainase Lingkungan, c. Penyediaan Air Bersih/Minum, d. Pengelolaan Persampahan, e. Pengelolaan Air Limbah, f. Pengamanan Kebakaran dan g. Legalitas Lahan.

Karakteristik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Dalam mendukung upaya penanganan permukiman kumuh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyatakan bahwa terdapat dua bentuk penanganan permukiman kumuh yang dapat dilakukan, yaitu pencegahan dan peningkatan kualitas. Tindakan pencegahan ditujukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, yang dilaksanakan melalui: a. Pengawasan dan Pengendalian, b. Pemberdayaan Masyarakat. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain: 1. Pemugaran, 2. Peremajaan, 3. Permukiman Kembali.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karo telah melaksanakan penanganan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Karo sejak tahun 2016-2020 melalui Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Program Penanganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dan Program Kota Tanpa Kumuh. Luas yang sudah ditangani adalah seluas 132,5 ha.

Perkembangan capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.62
Capaian Indikator Pembangunan
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

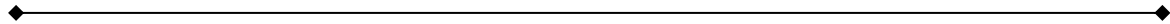
No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio rumah layak huni (%)	94,40	94,40	94,75	95,06	95,14
2	Rasio permukiman layak huni	0,93	0,95	0,98	0,99	0,99
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	94,40	94,40	94,75	95,06	95,14
4	Persentase pemukiman yang tertata (%)	93,42	95,06	97,86	98,97	99,49
5	Persentase lingkungan pemukiman kumuh (%)	6,67	4,94	2,80	1,03	0,51
6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan (%)	14,23	25,85	67,85	84,62	92,31
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	1,92	1,92	1,79	1,28	1,65
8	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU (%)	93,42	95,06	97,86	98,97	99,49

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2021

Rasio rumah layak huni meningkat dari 94,4% di tahun 2016 menjadi 95,14% di tahun 2020. Rasio permukiman layak huni meningkat dari 0,93 di tahun 2016 menjadi 0,99 di tahun 2020. Cakupan ketersediaan rumah layak huni meningkat dari 94,4% di tahun 2016 menjadi 95,14% di tahun 2020. Persentase pemukiman yang tertata di tahun 2016 yaitu 93,42% meningkat menjadi 99,49% di tahun 2020. Persentase lingkungan pemukiman kumuh di tahun 2016 yaitu 6,67% menurun menjadi 0,51%. Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan di tahun 2016 yaitu 14,23 % dan 92,31% di tahun 2020. Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan mengalami penurunan dari 1,92 di tahun 2016 menjadi 1,65 di tahun 2020. Cakupan Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU meningkat dari 93,42% di tahun 2016 menjadi 99,49% di tahun 2020.

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman seperti tertera pada tabel di bawah.



Tabel 2.63
Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	71,38	73	84,31	95,11	97,51
2.	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100	100	100

Sumber : Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karo, 2021

Dari tabel capaian SPM di atas dapat dilihat bahwa SPM untuk urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ada dua yakni persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyedeiia rumah yang layak huni. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni Kabupaten Karo mengalami kenaikan dari 71,38% tahun 2016 menjadi 97,51% tahun 2020. Hal ini masih lebih rendah dari target SPM Nasional yang seharusnya 100%. Akan tetapi, persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni yang seharusnya sudah 100% seperti target SPM.

2.1.3.1.5. Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Pembangunan
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)/orang	27	27	27	26	28
2	Persentase Penegakan PERDA	62,43	66,66	66,66	71,87	72,72
3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,17	0,65	0,65	0,65	0,02
4	Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	0,39	0,62	0,69	0,46	0,38

Sumber: -Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2021
- Satpol PP Kab. Karo, 2021

STANDAR PELAYANAN MINIMUM URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Tabel 2.65
Pencapaian SPM Urusan Trantibumlinmas Kabupaten Karo

No.	SPM	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	86,27	86,27
2	Pemeliharaann Kantrantibnas dan pencegahan tindak criminal	100	100	100
3	Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat	100	90	90

Sumber : Satpol PP Kab. Karo, 2021

Realisasi capaian SPM urusan Trantibumlinmas mencapai 100% pada kegiatan Pemeliharaan Kantrantibnas dan pencegahan tindak kriminal sedangkan kegiatan Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan realisasi sebesar 86,27% dan kegiatan Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat mencapai 90%.

Permasalahan :

- 1. Kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan daerah
- 2. Tidak ada perda dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman
- 3. Tidak ada perda dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman

2.1.3.1.6. Bidang Urusan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yakni seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya,

sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar, yang menjadi sasaran pembangunan di bidang sosial.

Adapun capaian pembangunan PMKS dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.66
Persentase Panti Sosial yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis	Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis
2016	60	-
2017	40	-
2018	0	0
2019	50	100
2020	20	85

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2021

Dari tabel di atas, kondisi PMKS yang diberdayakan melalui KUBE tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya yakni tahun 2014 Kabupaten Karo mendapat bantuan dari pemerintah pusat, untuk tahun selanjutnya kegiatan dimaksud dibiayai anggaran daerah yang terbatas anggarannya.

Tabel 2.67
Persentase Panti Sosial yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos	Jumlah panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos
2016	5	8
2017	6	8
2018	7	8
2019	7	8
2020	8	8

Sumber : Dinas Sosial Kab.Karo, 2021

Dari tabel di atas, dapat diketahui ketersediaan panti asuhan Kabupaten Karo pada tahun 2016 sebanyak 5 (lima) panti , tahun 2017 sebanyak 6 (enam) unit, tahun 2018 dan 2019 sebanyak 7 (tujuh) serta tahun 2020 sebanyak 8 (delapan) panti, melihat potensi PMKS yang berkembang ketersediaan panti yang dibutuhkan sebanyak 8 (delapan) unit sudah memenuhi dengan jumlah panti yang ada.

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

Tabel 2.68
Pencapaian Spm Urusan Sosial Kabupaten Karo

No.	SPM	Target 2020	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	80	75,48	75,48
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti	80	100	180
3	Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	80	3,68	3,68
4	Rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	80	8,21	8,21
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100	77,66	77,66

Sumber : Dinas Sosial Kab. Karo, 2021

Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial pada Tahun 2020 dengan capaian realisasi 100% yaitu pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar diluar panti sedangkan kegiatan lainnya hanya mencapai realisasi dibawah 100% dengan rincian : Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti (75,48%), Rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (3,68%), Rehabilitas sosial dasar tuna daksa khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (8,21%) dan Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten (77,66%).

Kegiatan dengan realisasi rendah dikarenakan kurangnya anggaran dan belum tertampungnya semua kegiatan yang ada pada layanan dasar dan kurangnya SDM dalam mencapai seluruh standar pelayanan minimal urusan sosial.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1 Bidang Urusan Tenaga Kerja

1. Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.69
Rasio Penduduk Bekerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio Penduduk yang bekerja dalam Angkatan Kerja (%)	-	98,66	98,50	98,91	90,54

Sumber: BPS, Kab. Karo, 2021

Rasio penduduk yang bekerja di Kabupaten Karo menunjukkan peningkatan setiap tahunnya hingga sampai tahun 2019 sebesar 98,91 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,97 persen. Hal ini disebabkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang sangat berdampak pada perekonomian di Kabupaten Karo yang ditandai dengan adanya perusahaan yang “merumahkan” sebagian karyawannya. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angkatan kerja untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja pada tahun 2020 adalah sebesar 9,46 persen.

Secara umum pada tahun 2020, jika dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja didominasi oleh sektor pertanian, yakni sebesar 64,46 persen. Hal ini tentu sangat diperlukan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja agar siap pakai untuk dapat bekerja sesuai dengan keterampilan juga sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu akses informasi pekerjaan bagi tenaga kerja juga sangat diperlukan. Untuk itu Kabupaten Karo tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas angkatan kerja, mengupayakan percepatan pertumbuhan lapangan kerja, serta memberikan perlindungan kepada pekerja.

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah angka yang menunjukkan rasio antara banyaknya angkatan kerja dibandingkan dengan penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sendiri merupakan suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode

survei. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

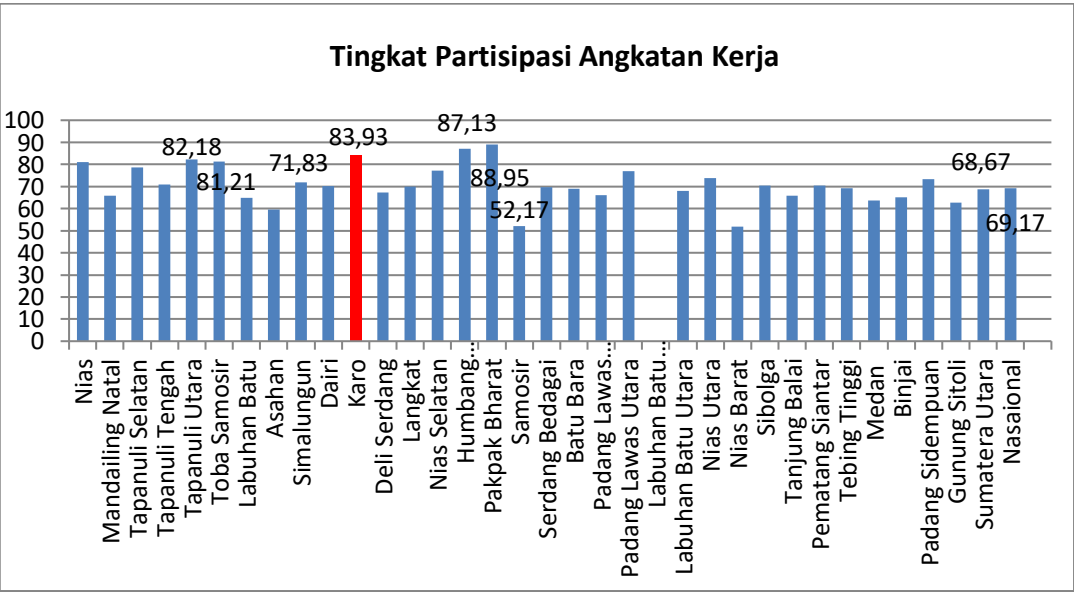
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	-	78,07	84,10	83,73	83,93

Sumber: Kabupaten Karo Dalam Angka, 2021

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja untuk Kabupaten Karo cenderung fluktuatif dari tahun 2017 sampai 2020. Tercatat pada tahun 2017 TPAK sebesar 78,07 persen, tahun 2018 meningkat menjadi 84,10 persen dan tahun 2019 menurun menjadi sebesar 83,73 persen. Pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 83,93 persen. Semakin meningkatnya angka TPAK merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia ekonomi aktif untuk mencari pekerjaan atau melakukan kegiatan ekonomi.

Untuk melihat perbandingan antara TPAK Kabupaten Karo dengan Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.24
Posisi Relatif TPAK Kab. Karo di Provinsi Sumatera Utara



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara, 2021

Jika dilihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, TPAK Kabupaten Karo berada pada peringkat ketiga setelah Humbang Hasundutan sebesar 87,13 persen dan Pakpak Barat yaitu sebesar 88,95 persen. Angka TPAK di bawah Kabupaten Karo diikuti oleh Tapanuli Utara sebesar 82,18 persen, Toba sebesar 81,21

persen, Simalungun sebesar 71,83 persen, Dairi sebesar 70,22 dan yang paling rendah adalah Samosir sebesar 52,17 persen. Jika dibandingkan TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia maka TPAK Kabupaten Karo masih berada di atas TPAK Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terbuka usia angkatan kerja terhadap jumlah penduduk angkatan kerja. Pengangguran yang dianggap paling serius untuk diatasi adalah pengangguran terbuka, yaitu angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang mencari/mempersiapkan pekerjaan. Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo termasuk pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.71
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

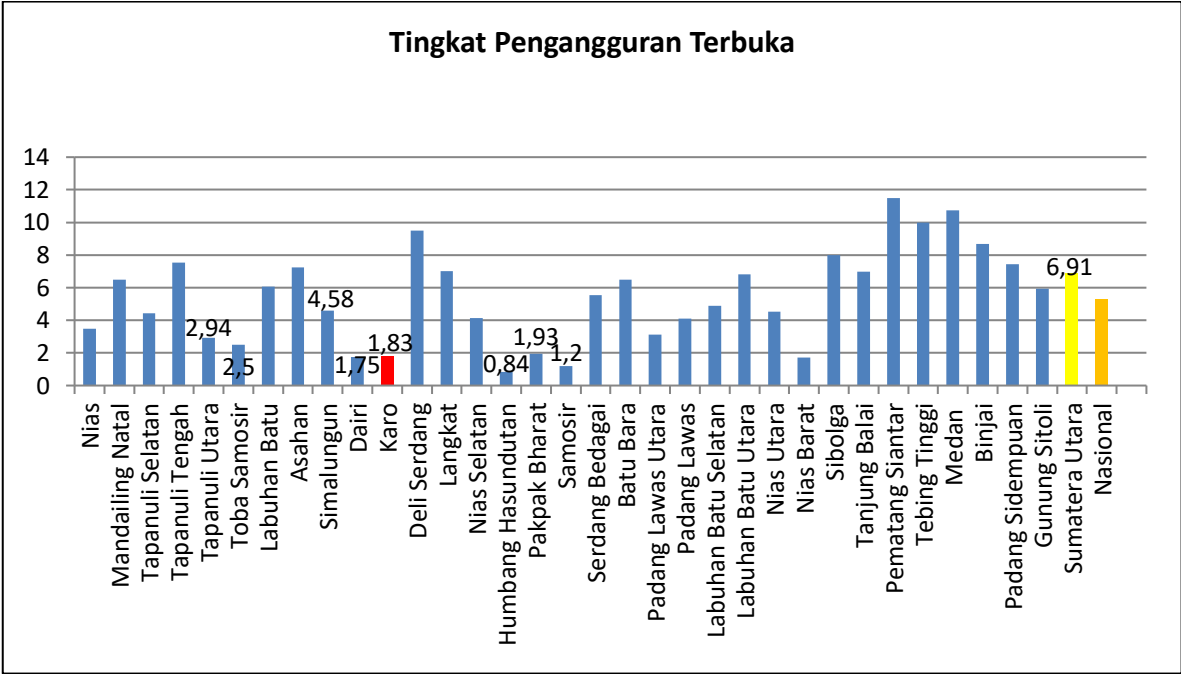
No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat pengangguran terbuka (%)	-	1,34	1,50	1,09	1,83

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2020 di Kabupaten Karo sebesar 1,83 persen. TPT tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,74 persen dari tahun 2019 yang disebabkan karena adanya pengaruh Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan adanya beberapa perusahaan yang “merumahkan” karyawannya. TPT di Kabupaten Karo tahun 2017 sebesar 1,34 persen, pada tahun 2018 meningkat menjadi 1,50 persen dan turun menjadi 1,09 persen pada tahun 2019.

Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.25
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara



Sumber : BPS, Sumatera Dalam Angka (Diolah)

Angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah angka Tingkat Pengangguran Terbuka Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen. Hal ini disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian, sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran ini sebaiknya dipertahankan atau ditekan dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi Kabupaten Karo yang lebih baik.

Jika dilihat Tingkat Pengangguran Terbuka di kawasan dataran tinggi Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Karo berada pada peringkat keempat dari angka TPT yang paling rendah. TPT yang paling rendah terdapat di Kabupaten Humbang Hasundutan sebesar 0,84 persen, diikuti Samosir sebesar 1,2 persen, Dairi sebesar 1,75 persen, Pakpak Barat sebesar 1,93 persen, Toba Samosir 2,5 persen, Tapanuli Utara sebesar 2,94 persen dan Simalungun sebesar 4,54 persen. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia, angka TPT Kabupaten Karo berada di bawah TPT Provinsi Sumatera Utara dan Indonesia.

2.1.3.2.2. Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator pembangunan daerah terkait pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo digambarkan melalui indikator partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan.

Tabel 2.72
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintahan (orang)
2016	4.332
2017	4.046
2018	4.053
2019	4.012
2020	3.846

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Adapun partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan periode 2016-2020 di Kabupaten Karo, paling tinggi pada tahun 2016 sebanyak 4.332 orang, sedangkan pada tahun 2017 menurun menjadi 4.046 orang. Tahun 2017 kembali menurun naik menjadi 4.053 orang, tahun 2018 menurun menjadi 4.012 orang dan tahun 2019 menurun menjadi 3.846 orang.

Tabel 2.73
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan DPRD
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kursi DPRD yang Diduduki Perempuan (orang)	Jumlah Total Kursi Keanggotaan DPRD (orang)	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR (%)
2016	7	35	20,00
2017	7	35	20,00
2018	7	35	20,00
2019	7	35	20,00
2020	10	35	28,57

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Tabel diatas menggambarkan partisipasi perempuan dalam politik dengan indikator proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR dari tahun 2016-2020 belum mencapai 30%, tetapi mulai tahun 2016 partisipasi perempuan dalam politik sudah mencapai 20% dan pada tahun 2020 sudah meningkat menjadi 28,57%.

Tabel 2.74
Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kekerasan dalam Rumah Tangga (kasus)	Jumlah Rumah Tangga (KK)	Rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga
2016	8	106.842	0,007
2017	9	106.842	0,008
2018	5	120.966	0,004
2019	2	120.966	0,002
2020	3	129.798	0.002

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

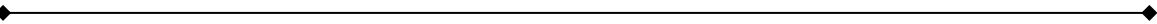
Indikator untuk perlindungan anak dan perempuan dapat dilihat melalui rasio Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Berdasarkan tabel diatas dapat diihat bahwa pada tahun 2016-2020 KDRT paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 0,008 dengan jumlah KDRT sebanyak 9 kasus, kemudiaan pada tahun 2016 sebesar 0,007 dengan jumlah KDRT 8 kasus, sedangkan pada tahun 2018 menjadi 0,004 dengan KDRT sebanyak 5 kasus, pada tahun 2019 menjadi 0,002 dengan KDRT sebanyak 2 kasus dan pada tahun 2020 juga sebesar 0,004 dengan KDRT sebanyak 3 kasus.

Tabel 2.75
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengaduan/Laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan Terpadu	Jumlah Laporan/Pengaduan yang Masuk ke Unit Pelayanan Terpadu	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Di Dalam Unit Pelayanan Terpadu (%)
2016	66	117	56,41
2017	59	59	100,00
2018	36	36	100,00
2019	57	57	100,00
2020	49	49	100,00

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Adapun indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu masih dalam kategori rendah pada tahun 2016 dimana capaian masih di bawah 60%. Akan tetapi pada tahun 2017-2020 sudah mencapai 100%. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.76
Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Korban Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Jumlah Korban yang Membutuhkan Bantuan Hukum	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan (%)
2016	66	66	100
2017	59	59	100
2018	36	36	100
2019	35	35	100
2020	30	30	100

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Karo, 2021

Berdasarkan informasi pada tabel diatas, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum tahun 2016-2020 sudah mencapai 100%. Artinya setiap korban kekerasan sudah bisa mendapat layanan hukum.

2.1.3.2.3. Bidang Urusan Pangan

Ketahanan pangan dapat diartikan sebagai kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga sekaligus kemampuan akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Ketersediaan pangan merupakan sub sistem ketahanan yang cukup penting. Pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama pada kelompok masyarakat rentan/miskin. Berbagai upaya dalam urusan ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemerataan distribusi pangan dengan harga terjangkau dan tercapainya pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang.

Masyarakat Kabupaten Karo masih sangat tergantung pada beras sebagai bahan pangan utama. Untuk itu, diversifikasi pangan perlu dilakukan untuk minimalisasi konsumsi beras dan juga berperan dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat sehingga nutrisi yang diterima oleh tubuh dapat bervariasi dan seimbang. Selain itu, pertumbuhan penduduk yang meningkat, perubahan iklim, dan kondisi geografis yang ekosistemnya tidak selalu sesuai untuk budidaya padi akan menimbulkan kerentanan dimasa yang akan datang. Untuk mengetahui data ketersediaan pangan di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.77
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan pangan utama (%)	74,70	85,70	100	111	105
2.	Ketersediaan energi dan protein (kkal/kap/hari)	2.014 energi, 77 protein	1.976 energi, 77 protein	2.404 energi, 68 protein	3.598 energi, 73.06 protein	9.941 energi, 216,69 protein
3.	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%)	60%	60%	60%	72%	90%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Karo, 2021

Tabel tersebut menunjukkan ketersediaan pangan utama di Kabupaten Karo terus meningkat. Pada tahun 2020 ketersediaan pangan utama mencapai angka surplus sebesar 105 persen. Hal ini tentu dapat mendukung ketahanan pangan di tingkat daerah maupun daerah sekitar Kabupaten Karo. Demikian juga dengan ketersediaan energi dan protein perkapita di Kabupaten Karo di tahun 2020 mengalami peningkatan, pada periode tahun 2018-2020 dikatakan baik hal ini berdasarkan hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X tahun 2012 yang merekomendasikan ketetapan angka penyediaan energi dan protein yaitu masing masing sebanyak 2.400 kkal dan 63 gram perkapita per hari. Selanjutnya, Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan juga terus mengalami peningkatan dimana tahun 2020 mencapai 90 persen, hal ini disebabkan karena jumlah sampel yang diawasi sudah semakin bertambah dari tahun sebelumnya.

Pembangunan urusan pangan perlu untuk terus ditingkatkan karena merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Selain itu, sesuai Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menetapkan tujuan kedua yaitu tanpa kelaparan dengan menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi,

serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, sehingga urusan pangan sangat membutuhkan sinergi dari berbagai sektor yang berkaitan.

2.1.3.2.4. Bidang Urusan Pertanahan

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan bidang pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 meliputi a.) penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten, b). penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah, c). penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam daerah kabupaten, d). penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam daerah kabupaten dan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam daerah kabupaten, e). penerbitan izin membuka tanah dan f). perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Pembangunan urusan pertanahan Kabupaten Karo ditunjukkan dengan indikator Lahan Pemerintah Daerah Bersertifikat, Jumlah konflik pertanahan milik Pemerintah Daerah, dan Pengurusan hak-hak atas tanah.

Tabel 2.78
Capaian Pembangunan Pertanahan Kabupaten karo Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Pemerintah Daerah Bersertifikat (bidang)	25	37	5	77	77
2	Jumlah konflik pertanahan milik Pemerintah Daerah (kasus)	-	-	1	3	3
3	Pengurusan hak-hak atas tanah menurut proyek (persil)	1914	3545	6410	4059	642
4	Penyelesaian izin lokasi (Jumlah rekomendasi ijin lokasi/Permohonan rekomendasi) (unit)	-	0/1	2/2	1/1	1/1

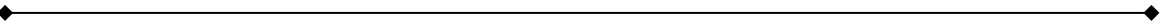
Sumber: BPS Kab. Karo dan BPKPAD Kab. Karo, 2021

2.1.3.2.4. Bidang Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 antara lain: menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan mewujudkan pembangunan

berkelanjutan. Sedangkan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Urusan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain : pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah Kabupaten/Kota, penyusunan Rencana Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Kabupaten/Kota, serta pengelolaan persampahan.

Pembangunan saat ini harus berdasarkan pembangunan berwawasan lingkungan yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sesuai dengan aturan tersebut telah ditentukan pilar pembangunan lingkungan sebagai upaya untuk mencapai pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan. Hal tersebut sangat dibutuhkan mengingat laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sehingga kebutuhan pembangunan akan permukiman/tempat tinggal, lahan produksi dan ruang untuk aktivitas perekonomian semakin bertambah. Hal ini tentu berdampak terhadap perilaku manusia terhadap alam seperti perambahan hutan untuk memperluas lahan produksi atau kegiatan rakyat yang berpotensi merusak atau mencemari lingkungan sehingga diperlukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk menjamin tercapainya keberlanjutan. Capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Karo dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dapat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 2.79
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air	Tidak ada	Tidak ada	100	80	80
5.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara (IKU)	Tidak ada	Tidak ada	96,08	99.83	87,88
6.	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Tidak ada	Tidak ada	70.72	56.17	49,308
7.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LHD yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	8,33	3,33	3,51	3,53	3,33
8	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
9	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	100%	100%	100%	100%	100%
10	Timbulan sampah yang ditangani	78.18	81.06	82.78	83.11	74,86
11	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada
12	Persentase cakupan area pelayanan	14.18%	14.39%	19,17%	24,24%	28,72%
13	Persentase jumlah sampah yang tertangani	78.18	81.06	82.78	83.11	92

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa indikator yang berhubungan dengan ketersediaan dokumen pengelolaan lingkungan hidup belum tercapai/tersedia. Hal ini perlu mendapat perhatian karena akan mengancam keberlanjutan lingkungan untuk masa yang akan datang. Jika dilihat dari data pada tahun 2020, hasil pengukuran Indeks

◆-----◆

Kualitas Udara mengalami penurunan 87,88 dari tahun sebelumnya 99,83 hal ini tergantung cuaca dan kondisi polusi saat pengambilan sampel. Untuk Indeks Kualitas Air menunjukkan angka 80 tetap dari tahun sebelumnya, sementara Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) menurun menjadi 49,308 dari tahun sebelumnya sebesar 56,17. Hasil pengukuran tersebut merupakan komponen untuk mengukur Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Dinamika perubahan angka tersebut dipengaruhi juga oleh perkembangan perhitungan IKLH yang terus mengalami perubahan sesuai kebutuhan dan kemampuan dari pemangku kepentingan sehingga pada tahun 2019 terdapat perhitungan dua komponen yg disempurnakan yaitu parameter Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Selanjutnya, Pengelolaan sampah di Kabupaten Karo sampai tahun 2020 belum dapat dikatakan baik, mengingat volume sampah yang tertangani pada tahun 2020 masih 74,86%, sebanyak 25,14% sampah yang belum ditangani. Disamping itu, TPA saat ini masih berstatus sewa sehingga belum bisa dilakukannya pengolahan sampah secara *sanitary landfill*. Hal ini merupakan salah satu kendala dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Karo. Namun setiap tahun pelayanan terhadap pengangkutan sampah mengalami peningkatan meskipun belum maksimal. Dukungan sarana dan prasarana masih terus dibutuhkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan. Untuk itu, permasalahan persampahan menjadi tanggung jawab seluruh aspek, bukan hanya pemerintah saja melainkan seluruh lapisan masyarakat.

2.1.3.2.5. Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kesadaran penduduk dalam melengkapi dokumen pribadi di Kabupaten Karo secara umum dapat dikategorikan mengalami peningkatan, walaupun di tahun 2016-2018 mengalami fluktuasi. Rasio bayi berakte kelahiran tahun 2016 mengalami penurunan sampai di tahun 2017 yaitu dari 47,15 menjadi 44,49. Selanjutnya rasio bayi berakte kelahiran tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2018-2020. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.80
Rasio Bayi Berakte Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah bayi berakte kelahiran	Jumlah bayi	Rasio Bayi Berakte Kelahiran
2016	3.286	6.969	47,15
2017	2.930	6.586	44,49
2018	3.391	6.637	51,09
2019	3.861	6.875	55,16
2020	6.362	6.855	92,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Rasio pasangan berakte nikah di Kabupaten Karo pada tahun 2016 menunjukkan capaian sebesar 11,68% dan tahun 2020 meningkat menjadi 41,69%. Walaupun pada periode tahun 2016-2020 tersebut mengalami fluktuasi. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.81
Rasio Pasangan Berakte Nikah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Pasangan Nikah Berakte Nikah	Jumlah Keseluruhan Pasangan Nikah	Rasio Pasangan Berakte Nikah
2016	10.542	90.289	11,68
2017	28.919	178.801	16,10
2018	39.159	250.535	15,64
2019	52.596	183.932	28,60
2020	76.681	183.932	41,69

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nasional berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 sudah dilakukan setiap tahunnya. Cakupan penerbitan KTP setiap tahunnya sudah dapat dikategorikan tinggi, pada tahun 2016 sebesar 90,00% dan tahun 2018 sebesar 96,74% dan tahun 2019 mencapai 97,80%, dan tahun 2020 mencapai 104,31%. Data selengkapnya terkait Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.82
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK (Sudah/Belum)
2016	Sudah
2017	Sudah
2018	Sudah
2019	Sudah
2020	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Tabel 2.83
Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan	Jumlah penduduk wajib KTP	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2016	241.092	267.880	90,00
2017	262.530	288163	91,10
2018	289.219	298.956	96,74
2019	296.888	303.551	97,80
2020	294.652	307.351	104,31

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

Cakupan penerbitan akta kelahiran cenderung meningkat setiap tahunnya antara tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 sebesar 45,65% tetapi tahun 2020 sebesar 47,44%. Informasi selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Penduduk Lahir Memperoleh Akta Kelahiran	Jumlah Kelahiran	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran
2016	3.286	6.969	47,15
2017	3.449	6.586	52,37
2018	3.458	6.637	52,10
2019	3.861	6.875	55,16
2020	3.254	6.855	47,44

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo, 2021

2.1.3.2.6. Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian indikator pembangunan daerah urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Karo Tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.85
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK (%)	45	50	50	70	70
2.	Jumlah PKK aktif	125	287	287	287	277
3.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	30	40	40	30	5

Sumber : -Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Karo, 2021
-Badan Kesbang dan Linmas Kab. Karo, 2021

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK pada tahun 2016 sebanyak 45% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70%. Sedangkan untuk jumlah PKK aktif pada tahun 2016 ada sebanyak 125 PKK dan tahun 2020 meningkat menjadi 277 PKK. Untuk indikator Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2016 sebesar 30 % sedangkan pada tahun 2020 menurun menjadi 5%.

2.1.3.2.7. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator yang harus dicapai dalam mewujudkan keluarga berencana yang sehat dan sejahtera di Kabupaten Karo antara lain:

Laju Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Laju Pertumbuhan penduduk Kabupaten Karo Tahun 2016-2020
2016	2,11
2017	2,17
2018	2,00
2019	1,89
2020	1,40

Sumber : BPS Kab. Karo, 2021

Laju pertumbuhan Kabupaten Karo tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan penurunan, tahun 2016 sebesar 2,11%, tahun 2017 meningkat menjadi 2,17%, tahun 2018 menurun menjadi 2%, tahun 2019

kembali menurun menjadi 1,89% dan tahun 2020 juga menurun menjadi 1,40%.

Jumlah Kerjasama Penyeleggaran Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal

Program yang dilakukan dalam pemerintah dalam mendukung program keluarga berencana yaitu salah satunya melalui kampung KB yang dilaksanakan mulai tahun 2016. Pelaksanaan program kampung KB bertujuan meningkatkan partisipasi keluarga, masyarakat, peran pemerintah, lembaga nonpemerintah serta swasta dalam melaksanakan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Tabel 2.87
Jumlah Kerjasama Penyeleggaran Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan (Kerjasama)
2016	9
2017	11
2018	20
2019	30
2020	34

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Untuk mensukseskan pengendalian penduduk dilakukan kerjasama pendidikan kependudukan. Pada tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) kerjasama dan tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) kerjasama, tahun 2018 meningkat menjadi 20 (dua puluh) kerjasama, tahun 2019 meningkat menjadi 30 (tiga puluh) kerjasama dan tahun 2020 meningkat menjadi 34 (tiga puluh empat) kerjasama.

Rasio Akseptor KB

Akseptor KB adalah anggota masyarakat yang mengikuti gerakan KB dengan melaksanakan penggunaan alat kontrasepsi. Akseptor KB menurut sasarannya terbagi menjadi 3 (tiga) fase yaitu fase menunda atau mencegah kehamilan, fase penjarangan kehamilan dan fase menghentikan atau mengakhiri kehamilan atau kesuburan.

Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan)

(Kurniawati, 2014). PUS yang menjadi peserta KB adalah pasangan usia subur yang suami/istrinya sedang memakai atau menggunakan salah satu alat atau cara kontrasepsi modern pada tahun pelaksanaan pendataan keluarga. (BKKBN, 2011).

Tabel 2.88
Rasio Akseptor KB Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	PUS	Jumlah Akseptor KB	Rasio Akseptor KB (%)
2016	63.905	49.264	77,09
2017	66.175	52.230	78,92
2018	73.320	54.080	73,75
2019	65.622	45.663	69,58
2020	67.053	47.173	70,35

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Rasio akseptor KB merupakan gambaran untuk melihat usia pasangan subur menggunakan salah satu cara atau kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Di Kabupaten Karo rasio akseptor KB hampir setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2016 sebesar 77,09%, meningkat pada tahun 2017 menjadi 78,92, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 73,75% dan pada tahun 2019 kembali menurun menjadi 69,58% sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 70,35%.

Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 tahun

Angka pemakaian kontrasepsi yang lazim disebut *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR) adalah persentase perempuan usia reproduktif yang menggunakan (atau yang pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi pada suatu waktu tertentu. CPR hampir selalu dilaporkan untuk wanita kawin atau wanita yang memiliki pasangan seksual. CPR dapat digunakan untuk mengukur pemakaian semua metode kontrasepsi, baik yang tradisional maupun modern, atau untuk mengukur pemakaian metode kontrasepsi modern saja.

Tabel 2.89
Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi Perempuan Menikah Usia 15-49 Tahun Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Peserta KB	Jumlah Pasangan Usia Subur	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR Bagi Perempuan Menikah Usia 15-49
2016	45.767	65.752	69,61
2017	52.230	66.175	78,92
2018	53.080	73.320	72,39
2019	45.663	65.622	64,67
2020	47.173	67.053	70,35

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Untuk pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun, pada tahun 2016 sebesar 69,61%, pada tahun 2017 mencapai 78,92% sedangkan pada tahun 2018 menurun menjadi 72,39% dan tahun 2019 kembali menurun menjadi 64,67% sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 70,35%.

Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*)

Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) di Kabupaten Karo cukup tinggi berada di atas 10%. Hal ini menjadi permasalahan salah satunya karena rendahnya rasio petugas KB dibanding wilayah yang harus dibina. Data selengkapnya terkait Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (*Unmet need*)
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>)	Jumlah PUS	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmet need</i>) (%)
2016	7.215	65.752	10,97
2017	6.897	66.175	10,42
2018	11.000	73.320	15,00
2019	11.745	65.622	17,89
2020	11.092	67.053	16,54

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Pada tahun 2016 *Unmet need* sebesar 10,97%, tahun 2017 menurun menjadi 10,42%, tahun 2018 meningkat menjadi 15%, tahun 2019 kembali meningkat menjadi 17,89 sedangkan tahun 2020 meningkat menjadi 16,54%.

Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Alat Kontrasepsi jangka panjang (MKJP) adalah alat kontrasepsi yang digunakan untuk menunda, menjarangkan kehamilan, serta menghentikan kesuburan yang digunakan dengan jangka panjang, yang meliputi IUD (*Intra Uterine Device*), *Implant* (susuk KB) dan kontap (Kontrasepsi mantap).

Tabel 2.91
Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah akseptor KB yang menggunakan MKJP	Jumlah akseptor KB	Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)
2016	21.796	49.322	44,19
2017	16.053	52.230	30,19
2018	12.003	53.080	22,61
2019	19.656	45.663	43,04
2020	11.092	67.053	16,54

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Persentase penggunaan kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kabupaten Karo juga masih rendah berada di bawah 50%. Tahun 2016 sebesar 44,19%, tahun 2017 menurun menjadi 30,19%, tahun 2018 menurun menjadi 22,61 dan tahun 2019 meningkat mencapai 43,04% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 16,54%.

Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi

Kelangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan lama pemakaian kontrasepsi yang berlangsung secara terus menerus. Tingkat kelangsungan pemakaian kontrasepsi digunakan untuk mengetahui kualitas pemakaian kontrasepsi yang dilihat dari lamanya pemakaian dan kontinuitas pemakaian (*Kariman, 2006*). Bagi pengelola program KB angka kelangsungan pemakaian kontrasepsi sangat penting artinya untuk perencanaan program. Apabila ingin mempertahankan atau meningkatkan prevalensi pemakai kontrasepsi pada suatu tingkat tertentu, maka dengan mengetahui angka kelangsungan pemakaian proporsi pasangan usia subur yang harus menjadi akseptor baru dalam satu tahun bisa diperkirakan. Dengan kata lain, angka ini dipakai untuk menetapkan target jumlah akseptor baru yang harus bisa diperoleh dalam satu tahun. Jadi kalau angka kelangsungan pemakaian bisa ditingkatkan, untuk mencapai prevalensi yang sama maka jumlah akseptor baru yang harus diperoleh dalam satu tahun bisa dikurangi.

Tabel 2.92
Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pasangan usia subur yang tidak lagi menggunakan kontrasepsi	Jumlah akseptor KB	Persentase Tingkat Keberlangsungan Pemakaian Kontrasepsi
2016	16.430	49.322	33,31
2017	13.945	52.230	26,69
2018	19.240	38.080	36,25
2019	19.959	45.663	43,70
2020	19.880	47.173	42,14

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi di Kabupaten Karo menunjukkan angka yang masih rendah dan mengalami peningkatan dan penurunan. Tahun 2016 hanya mencapai angka 33,31%, tahun 2017 menurun menjadi 26,69%, tahun 2018 meningkat menjadi 36,25%, tahun 2019 meningkat menjadi 43,70% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 42,14%.

Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB

PKB/PLKB merupakan petugas yang melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Tabel 2.93
Cakupan PKB/PLKB yang Didayagunakan Perangkat Daerah KB
Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah PKB dan PLKB yang didayagunakan (orang)	Jumlah PKB dan PLKB (orang)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB bidang pengendalian penduduk (%)
2016	27	27	100
2017	8	8	100
2018	7	7	100
2019	9	9	100
2020	8	8	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk di Kabupaten Karo tahun 2016-2020 menunjukkan angka 100% setiap tahunnya. Walaupun demikian yang menjadi permasalahan yakni jumlah PKB/PLKB yang sangat minim di Kabupaten Karo, tercatat jumlah PKB/PLKB pada tahun 2016 sebanyak 27 orang, tahun 2017 sebanyak 8 orang, tahun 2018 sebanyak 7 orang dan tahun 2019 sebanyak 9 orang sedangkan tahun 2020 menurun

menjadi 8 orang. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan wilayah kerja yang harus dilayani yakni sebanyak 259 desa dan 10 kelurahan, sehingga tugas PKB/PLKB dalam menjalankan kegiatan penyuluhan, pelayanan, evaluasi dan pengembangan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tidak maksimal di Kabupaten Karo.

Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan

Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) merupakan kader atau penggerak keluarga berencana yang berada di tingkat kelurahan dan desa.

Tabel 2.94
Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setiap Desa Kelurahan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah petugas pembantu Pembina KB desa (PPKBD)	Jumlah Desa/kelurahan	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) Setia Desa Kelurahan
2016	259	259	100
2017	269	269	100
2018	269	269	100
2019	269	269	100
2020	269	269	100

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Karo, 2021

Di Kabupaten Karo petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa kelurahan disediakan di setiap desa dan kelurahan dengan jumlah 269 orang atau dengan rasio 100% setiap tahunnya.

Perilaku Fertilitas

Fertilitas adalah suatu istilah yang dipergunakan dalam bidang demografi untuk menggambarkan jumlah anak yang benar-benar dilahirkan hidup (Pollard, 1989). Disamping istilah fertilitas ada juga istilah fekunditas (*fecundity*) sebagai petunjuk kepada kemampuan fisiologis dan biologis seorang perempuan untuk menghasilkan anak lahir hidup (Mantra, 2006). Fertilitas biasanya diukur sebagai frekuensi kelahiran yang terjadi di dalam sejumlah penduduk tertentu. Disatu pihak mungkin akan lebih wajar bila fertilitas dipandang sebagai jumlah kelahiran per orang atau per pasangan, selama masa kesuburan (Barcla, 1984).

Ukuran yang sering digunakan untuk melihat angka fertilitas yang umum digunakan adalah angka kelahiran total (*Total fertility Rate = TFR*) dan angka kelahiran menurut kelompok umur (*Age Specific Fertility Rate = ASFR*). TFR didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 perempuan yang hidup hingga akhir masa reproduksinya (BKKBN, 2006).

Di Kabupaten Karo data yang tersedia yakni TFR tahun 2010 sebesar 3.02 dan tahun 2016 sebesar 2,73. Artinya pada tahun 2010 setiap wanita di Kabupaten Karo memiliki anak kurang lebih 3 (tiga) orang anak dan tahun 2016 memiliki 2-3 orang anak.

2.1.3.2.8. Bidang Urusan Perhubungan

Urusan Perhubungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 4 suburusan meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), Pelayaran, Perkeretaapian, dan Penerbangan. Namun suburusan yang ditangani sesuai dengan karakteristik Kabupaten Karo hanya pada Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Transportasi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dan fasilitas yang digunakan untuk memindahkannya. Perpindahan/pergerakan manusia merupakan hal yang penting dipikirkan khususnya di daerah perkotan, sedangkan angkutan barang sangat penting untuk menunjang kehidupan perekonomian. Transportasi mempunyai karakteristik dan atribut yang menunjukkan arti dan fungsi spesifiknya. Fungsi utama adalah untuk menghubungkan manusia dengan tata guna lahan.

Sektor transportasi memiliki peran/fungsi sebagai motivator, penggerak terhadap sektor pembangunan perekonomian daerah dan sektor lainnya. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari subsistem transportasi darat mempunyai peranan yang strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi wilayah. Oleh karena itu untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar, perlu didukung ketersediaan jaringan dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan yang layak dan baik. Untuk mewujudkan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di atas, sangat perlu dan penting dilakukan terlebih dahulu perencanaan

sistem transportasi secara terarah dan terukur. Bentuk perencanaan tersebut antara lain: Rencana Induk Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Umum Jaringan Trayek Angkutan Penumpang dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Penyusunan Rencana Induk Tata Ruang Perhubungan, Rencana Umum Jaringan Lintas Angkutan Barang Dalam Kabupaten, Rencana Kebutuhan Terminal Penumpang dan Angkutan Barang, Rencana Induk Perparkiran, Rencana Induk Perlengkapan Jalan, Rencana Umum Keselamatan Lalu Lintas dan Rencana Operasional Angkutan Penumpang.

Ketersediaan prasarana dan sarana dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan memberikan kemudahan dalam distribusi barang atau jasa dari suatu daerah ke daerah lainnya. Selain itu, pertumbuhan kendaraan pribadi dan angkutan umum di Kabupaten Karo, harus diiringi dengan pembangunan sarana/perlengkapan jalan dan jembatan yang memadai, sehingga mobilisasi barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar.

Salah satu indikator di bidang berhubungan adalah pengujian berkala kendaraan bermotor (Uji KIR), pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atas keamanan dan kelayakan kendaraan angkutan umum. Pada tahun 2016, jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor di Kabupaten Karo sebanyak 5100 kendaraan, dan pada tahun 2020 jumlah pengujian berkala kendaraan bermotor sebanyak 2.024 kendaraan. Penurunan jumlah pengujian ini disebabkan pengujian kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan di Kabupaten Karo karena Kabupaten Karo belum memiliki gedung uji/alat uji yang memenuhi standard, sehingga sejak tahun 2019 kendaraan bermotor di Kabupaten Karo melaksanakan pengujian kendaraan bermotor ke Kabupaten Dairi.

Jumlah arus penumpang di wilayah Kabupaten Karo mengalami fluktuasi, pada tahun 2016 sebanyak 2.419.200 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 3.696.720 orang. Untuk jumlah pelabuhan tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016 hingga 2020 yakni hanya satu di Kecamatan Merek yang pada saat ini sedang direhabilitasi untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Selanjutnya untuk layanan angkutan darat sudah mencapai 100% yang artinya semua daerah di Kabupaten Karo telah dapat diakses dengan

angkutan darat meskipun masih ada daerah yang kondisi jalan masih rusak berat. Selengkapnya terkait indikator bidang perhubungan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Perkembangan capaian kinerja urusan perhubungan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.95
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (jiwa)	2.419.200	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720
2.	Rasio ijin trayek	0,000086	0,000010	0,000010	0,000010	0,0000087
3.	Jumlah uji kir angkutan umum dan barang (unit)	5.100	5.100	5.284	5.450	2.024
4.	Jumlah Pelabuhan laut/Udara/Terminal Bis (unit)	1	1	1	1	1
5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten) (%)	90,00	90,00	90,00	93,94	93,94
6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum (%)	32,07	32,07	28,45	26,35	73,01
7.	Pemasangan rambu-rambu (%)	6,25	6,25	45,34	51,06	70,33
8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,04322	0,04322	0,04100	0,04500	0,03780
9.	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum (jiwa)	6.677.290	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	365.607.214	2.419.200	3.675.672	3.668.685	3.696.720

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Karo, 2021

2.1.3.2.9. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Capaian Indikator dari sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo adalah:

Tabel 2.96
Capaian Indikator Sasaran dan Prioritas Urusan Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Karo 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks SPBE	n/a	n/a	n/a	n/a	1,9
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	86,99%	86,99%	86,62%	85,50%	85,50%
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	20%	20%	20%	40%	50%
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	20%	20%	20%	40%	50%
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	5%	5%	10%	10%	10%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo, 2021

Cakupan Layanan Telekomunikasi menurun dari tahun 2017 sampai tahun 2020 yang hanya mencapai 85,50%. Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dari 20% menjadi 50%. Proporsi rumah tangga dengan akses internet meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dari 20% menjadi 50%. Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dari 5% menjadi 10%.

2.1.3.2.10. Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menjelaskan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan berasaskan kekeluargaan. Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, penurunan kemiskinan, dan perluasan lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Indikator koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Karo mengalami peningkatan namun masih perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas untuk mendukung berkembangnya ekonomi rakyat. Untuk melihat perkembangan capaian terkait Koperasi dapat disajikan melalui tabel berikut.

Tabel 2.97
Jumlah Koperasi dan Koperasi Aktif Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Koperasi	458	460	258	252	252
2.	Jumlah Koperasi Aktif	265	268	170	158	158
3.	Persentasi koperasi aktif (%)	57,86	58,26	65,89	62,70	62,70

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Karo, 2021

Jika dilihat dari tabel di atas, pada tahun 2016 sampai dengan 2018 persentase koperasi aktif di Kabupaten Karo semakin meningkat. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 62,70 persen. Jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 57,86% sampai 2017 menjadi 58,26%. Sedangkan dari tahun 2017 sampai dengan 2019 jumlah koperasi aktif semakin menurun. Penurunan

tersebut merupakan dampak dari kebijakan pembubaran koperasi oleh pemerintah bagi koperasi yang tidak melaksanakan ketentuan sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Ketentuan tersebut antara lain, menghapus koperasi yang tidak melakukan Rapat Anggota selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan/atau tidak melaksanakan kegiatan usaha secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Jika dilihat dari data tabel tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat 37,70 persen koperasi yang tidak aktif sehingga masih perlu peningkatan lebih lanjut.

Demikian halnya dengan Usaha kecil dan Menengah (UKM) merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan dan/atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM. Indikator terkait UKM dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.98
Indikator Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	98,21	98,22	98,11	98,20	99,13
2.	Jumlah Usaha Mikro	4.058	4.078	4.057	4.286	9673
3.	Jumlah Usaha Kecil	600	600	613	613	613
4	Jumlah Usaha Menengah	85	85	90	90	90

Sumber: Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Karo, 2021

Jika dilihat dari data di atas, perkembangan jumlah UKM menunjukkan penurunan pada tahun 2018 dibanding tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 98,20 persen dan tahun 2020 meningkat kembali menjadi 99.13 persen. Dukungan terhadap UKM setiap tahun menjadi prioritas daerah namun perlu ditingkatkan lebih lanjut untuk menciptakan wirausaha baru melalui berbagai progam dan kegiatan yang inovatif dan kreatif. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah usaha di Kabupaten Karo didominasi oleh usaha kecil mikro. Setiap tahunnya mengalami peningkatan kecuali di tahun 2018 mengalami sedikit penurunan, hal ini disebabkan adanya letusan gunung Sinabung yang berdampak pada beberapa UKM. Pemerintah Kabupaten Karo terus berupaya untuk mendorong pelaku

usaha mikro untuk naik kelas dengan membuat strategi dan kebijakan antara lain dengan memperkuat kelembagaan UKM, peningkatan kualitas produk dan meningkatkan pemasaran hasil UKM.

2.1.3.2.11. Bidang Urusan Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menyebutkan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Penanaman Modal meliputi 4 (empat) sub urusan yaitu Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kerja Sama Penanaman Modal, Promosi Penanaman Modal dan Pelayanan Penanaman Modal.

Perkembangan jumlah investor di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya dari 61 investor pada Tahun 2016 bertambah menjadi 70 investor pada Tahun 2020. Apabila dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami peningkatan dari 38 investor pada Tahun 2016 bertambah menjadi 45 investor pada Tahun 2020. Namun, apabila dilihat dari perkembangan jumlah investor Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah investor mengalami penurunan dari 27 investor pada Tahun 2016 berkurang menjadi 25 investor pada Tahun 2020. Hal ini dikarenakan adanya perubahan status kepemilikan pada beberapa perusahaan PMA menjadi PMDN. Hal tersebut menunjukkan bahwa iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Karo masih perlu ditingkatkan. Perkembangan investor Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.99
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016 – 2020

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2016	Jumlah Investor	34	27	61
2017	Jumlah Investor	38	24	62
2018	Jumlah Investor	40	24	64
2019	Jumlah Investor	43	25	68
2020	Jumlah Investor	45	25	70

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Karo, 2021

Perkembangan nilai investasi di Kabupaten Karo cenderung meningkat setiap tahunnya baik nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Jika dilihat dari nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Karo, nilai investasi mengalami peningkatan dari Rp514.446.233.936,- pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp714.835.787.215,- pada Tahun 2020. Begitu juga, perkembangan nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami peningkatan dari Rp2.856.128.748.481,- pada Tahun 2016 meningkat menjadi Rp5.312.851.739.304,- pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai investasi Kabupaten Karo cukup baik. Perkembangan jumlah nilai investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016–2020 dapat dilihat seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Uraian	PMDN (Rp)	PMA (Rp)
2016	Nilai Investasi	514.446.233.936	2.856.128.748.481
2017	Nilai Investasi	589.920.583.936	3.780.418.748.481
2018	Nilai Investasi	605.179.583.936	5.306.862.036.304
2019	Nilai Investasi	706.085.787.235	5.312.851.739.304
2020	Nilai Investasi	714.835.787.215	5.312.851.739.304

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Provinsi Sumatera Utara, 2021

Peningkatan jumlah investor dan nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo juga memiliki pengaruh terhadap jumlah tenaga kerja dan rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Karo.

Tabel 2.101
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN (orang)	6.126	6.169	6.093	6.357	6.389
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	61	62	64	68	70
3	Rasio daya serap tenaga kerja (1/2*100%)	100,43	99,50	95,20	93,49	91,27

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Karo, 2021

Jika dilihat dari perkembangan tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo, jumlah tenaga kerja mengalami

peningkatan dari 6.126 orang pada tahun 2016 menjadi 6.389 orang pada tahun 2020. Namun, jika dilihat dari rasio daya serap tenaga kerja mengalami penurunan dari 100,43% pada tahun 2016 menurun menjadi 91,27% pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Karo yang telah memanfaatkan teknologi sehingga berpengaruh terhadap pengurangan jumlah tenaga kerja. Perkembangan Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Karo tahun 2016–2020 dapat dilihat seperti pada tabel di atas.

2.1.3.2.12 Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pelaksanaan pembangunan pada urusan pemuda diarahkan pada upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, kepemimpinan, kewirausahaan dan kecakapan hidup dikalangan pelajar dan pemuda. upaya ini dilakukan melalui peningkatan pemahaman pemuda dan pelajar terhadap agama, peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda, serta peningkatan peran organisasi pemuda dalam pembangunan dalam upaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang bermartabat, memiliki etika, produktif serta dapat berperan aktif sebagai motor dalam pembangunan, maka dilakukan berbagai fasilitasi kegiatan kepemudaan.

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pemuda melalui pembinaan dan fasilitasi organisasi pemuda. Periode tahun 2016-2020 Persentase organisasi pemuda yang aktif setiap tahunnya mencapai 100%.

Tabel 2.102
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	Jumlah seluruh organisasi pemuda	Persentase pemuda yang aktif
2016	32	32	100
2017	32	32	100
2018	32	32	100
2019	27	27	100
2020	28	28	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2021

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan urusan urusan keolahragaan diarahkan pada upaya pengembangan sistem pembinaan, permasalahan dan peningkatan prestasi olahraga yang sistematis, berkelanjutan, terpadu dan terarah. Strategi yang dilakukan adalah

melalui peningkatan penjangrian atlet berbakat usia dini, penyelenggaraan even olahraga bagi masyarakat, peningkatan jumlah atlet yang berprestasi, serta pembangunan/pengadaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kehidupan keolahragaan masyarakat secara bermartabat, memiliki etika serta menjunjung nilai-nilai sportifitas.

Peningkatan minat serta kualitas olahraga melalui pembinaan olahraga terhadap cabang olahraga yang terdaftar dengan cakupan sebesar 100% setiap tahunnya. Data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Cakupan Pembinaan Olahraga Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah cabang olahraga yang dibina	Jumlah seluruh cabang olahraga yang ada/terdaftar	Cakupan pembinaan olahraga (%)
2016	7	7	100
2017	7	7	100
2018	7	7	100
2019	7	7	100
2020	7	7	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2021

Data selengkapnya terkait jumlah atlet berprestasi di Kabupaten Karo 2016-2020, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.104
Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah atlet yang memenangi kejuaraan tingkat nasional dan internasional
2016	221
2017	215
2018	253
2019	247
2020	374

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Karo, 2021

Dengan adanya pembinaan dan fasilitasi minat dan bakat atlet olahraga, Kabupaten Karo memperoleh penghargaan pada beberapa kejuaran baik tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2016 terdapat atlet yang berprestasi sebanyak 221 atlet, tahun 2017 sebanyak 215 atlet dan tahun 2018 sebanyak 253 atlet. Sedangkan tahun 2019 jumlah atlet berprestasi sebanyak 247 atlet, artinya jika dilihat tren lima tahun cenderung meningkat kecuali pada tahun 2019 mengalami penurunan sebanyak 6 atlet yang berprestasi dibandingkan tahun 2018.

2.1.3.2.13. Bidang Urusan Statistik

Penyelenggaraan data statistik merupakan salah satu pengamalan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Dalam penyelenggaraan data statistik di Kabupaten Karo, dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun daerah namun Sistem data dan statistik yang terintegrasi belum tersedia hingga 2020.

Tabel 2.105
Sistem data dan Statistik yang Terintegrasi

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Dalam publikasi data statistik di Kabupaten Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo secara rutin menerbitkan Buku Kabupaten Karo Dalam Angka, Buku Produk Domestik Bruto (PDRB), Buku Kecamatan dalam Angka dan berbagai informasi statistik Kabupaten Karo yang dapat diakses melalui laman resmi Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo.

Tabel 2.106
Buku Kabupaten Dalam Angka dan PDRB

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku Kabupaten Karo Dalam Angka	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karo

Publikasi Kabupaten Karo Dalam Angka diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat berbagai informasi/indikator yang terkait dengan pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Karo.

Publikasi PDRB Kabupaten Karo diterbitkan secara rutin setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo yang memuat tinjauan mengenai perkembangan perekonomian Kabupaten Karo yang disajikan secara deskriptif melalui tabel PDRB atas dasar harga berlaku maupun konstan dalam bentuk nilai nominal dan persentase dan penjelasan PDRB menurut lapangan usaha.

2.1.3.1.14. Bidang Urusan Persandian

Sebagai Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Karo melakukan upaya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah yang bertujuan menciptakan harmonisasi dalam melaksanakan pengamanan informasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, meningkatkan komitmen, efektivitas, dan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi, dan memberikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

Pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah belum terlakasana karena belum adanya perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah yang meliputi meliputi pengamanan Informasi pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan kabupaten.

Tabel 2.107
Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi dalam
Komunikasi Perangkat Daerah

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentas Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	0	0	0	0

Untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang persandian di daerah diperlukan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Badan Siber dan Sandi Negara berwenang untuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Sampai

dengan tahun 2020, belum ada Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah.

2.1.3.2.15. Bidang Urusan Kebudayaan

Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditahun 2014 sebanyak 5 kali dan meningkat ditahun 2015 dan 2016 menjadi 7 kali dan 9 kali dan turun kembali di tahun 2017 dan 2018 menjadi 7 kali dan 6 kali. Penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak. Data perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2014 s/d 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

ebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditunjukkan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Salah satu indikator pembangunan daerah untuk urusan kebudayaan adalah penyelenggaraan festival seni dan budaya. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya ditahun 2016 menjadi 7 kali dan 9 kali dan turun kembali di

tahun 2017 dan 2018 menjadi 7 kali dan 6 kali, ditahun 2019 dan 2020 menjadi 7 kali Penyelenggaraan festival seni dan budaya tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Penyelenggaraan festival seni dan budaya harus tetap ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun melibatkan oleh pihak. Data perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.108
Indikator Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	9	7	6	7	7
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan (%)	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Karo, 2020

2.1.3.2.16. Bidang Urusan Perpustakaan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, dinyatakan bahwa:

- Perpustakaan adalah Institusi pengelola koleksi, karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, infromasi, dan rekreasi para pemustaka.
- Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam dalam berbagai bmedia yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
- Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Jenis Perpustakaan yang dibina oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo adalah perpustakaan umum kecamatan, perpustakaan desa/kelurahan, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus (rumah ibadah, lembaga/ instisusi).

Secara umum perpustakaan berfungsi sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat,

dan rekreasi. Untuk itu peran dan fungsi perpustakaan menentukan berkembangnya ilmu pengetahuan masyarakat. Beberapa indikator perpustakaan antara lain rasio perpustakaan persatuan penduduk yang diperoleh dari jumlah perpustakaan/ jumlah penduduk x 1000 dan hasil rasio menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat.

Salah satu indikator untuk melihat tingkat perkembangan kinerja perpustakaan di daerah adalah rasio perpustakaan per satuan penduduk. Indikator ini menunjukkan kapasitas perpustakaan untuk memfasilitasi kebutuhan membaca masyarakat. Di Kabupaten Karo pada rentang waktu tahun 2016-2020 jumlah perpustakaan cenderung meningkat, pada tahun 2017 pertambahan jumlah perpustakaan sebanyak 426 perpustakaan hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur dari Kantor Kearsipan perpustakaan dan dokumentasi menjadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga tugas pokok dan fungsi dinas bertambah. Data rasio perpustakaan persatuan penduduk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.109
Tabel Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah perpustakaan	Jumlah penduduk (org)	Rasio perpustakaan persatuan penduduk
2016	58	396.571	0,146
2017	484	403.207	1,215
2018	484	405.162	1,194
2019	487	415.878	1.171
2020	496	409.108	1.121

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karo, 2021

Dari tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah perpustakaan sebanyak 58 unit, pada tahun 2017-2018 meningkat menjadi 484 unit, pada tahun 2019 kembali meningkat menjadi 487 unit dan tahun 2020 meningkat menjadi 496. Peningkatan ini terjadi karena adanya penambahan perpustakaan di desa.

Untuk melihat minat masyarakat dalam berliteralisasi dapat dilihat dari jumlah kunjungan ke perpustakaan umum kabupaten. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Karo selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.110
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah kunjungan perpustakaan (org)	Jumlah populasi yang harus dilayani (penduduk)	Persentase Jumlah Kunjungan Terhadap Populasi yang Harus Dilayani (%)
2016	11.452	396.571	2,8
2017	19.025	403.207	4,8
2018	38.928	405.162	9,6
2019	34.258	415.878	8,2
2020	4.476	409.108	0,01

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karo, 2021

Jumlah pengunjung ke perpustakaan umum Kabupaten Karo pada tahun 2016 ada sebanyak 11.452, pada tahun pada tahun 2017 jumlah pengunjung mengalami peningkatan sebanyak 7.573 orang dan pada tahun 2018 sebanyak 19.903 orang dan pada tahun 2019 menurun 4.670 orang dan pada tahun 2020 yang berkunjung hanya sebanyak 4.476 orang. Salah satu faktor penyebab pertambahan pengunjung ini adalah adanya Mobil Perpustakaan Keliling sebanyak 5 (lima) unit, yang terbagi atas 3 (tiga) unit pada tahun 2017 dan 2 (dua) unit tahun 2018 dan dibukanya Unit Layanan Taman Mejuah Juah (*Openstage*) pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019-2020 pengunjung mengalami penurunan disebabkan karena minimnya dana operasional untuk mobil perpustakaan keliling. Sedangkan untuk tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan karena layanan perpustakaan hanya berlangsung dari bulan Januari-Maret dikarenakan pandemi *Covid-19*.

Tabel 2.111
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia
2016	5.908	12.358
2017	2.884	15.082
2018	3.199	17.497
2019	3.399	18.997
2020	3.399	18.997

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karo, 2021

Strategi yang ditetapkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan ke perpustakaan adalah meningkatkan koleksi judul dan jumlah eksemplar buku. Strategi ini diterjemahkan menjadi Program Prioritas Urusan Perpustakaan. Tahun 2017 jumlah koleksi judul buku menurun sebanyak 3.024 judul, hal ini disebabkan oleh penyiangan buku (penghapusan).

Tabel 2.112
Jumlah Pustakawan, Tenaga Teknis dan Penilai Memiliki Sertifikat
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat (org)	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai (org)
2016	3	423
2017	6	484
2018	6	508
2019	6	517
2020	6	517

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karo, 2021

Peningkatan pengelolaan perpustakaan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya pustakawan, tenaga teknis dan penilai. Sejak tahun 2016-2019 jumlah tenaga teknis meningkat setiap tahun. Pada tahun 2016 jumlahnya sebanyak 423 orang dan tahun 2019 menjadi 517 orang. Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan/peningkatan untuk tahun 2020. Jumlah pustakawan/tenaga teknis/penilai yang memiliki sertifikat masih minim, hal ini dikarenakan anggaran untuk mendukung kegiatan diklat tenaga teknis perpustakaan dan formasi sarjana perpustakaan belum memadai.

2.1.3.2.17. Bidang Urusan Kearsipan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Kearsipan adalah proses kegiatan pengaturan arsip mulai dari penciptaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan, dengan menggunakan sistem tertentu, dalam penyusunan, pemeliharaan arsip agar dapat di temukan kembali dengan cepat dan tepat serta mudah untuk pemusnahan arsip berdasarkan kriteria tertentu.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di buat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perserorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara.

Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Karo.

Pengelolaan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen.

Perkembangan pengelolaan arsip secara baku sejak tahun Tahun 2016 -2020 data selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.113
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku	Jumlah perangkat daerah
2016	29	58
2017	30	60
2018	40	60
2019	48	60
2020	50	60

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karo, 2021

Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku pada tahun 2016 sebanyak 29 perangkat daerah, tahun 2017 sebanyak 30 perangkat daerah, tahun 2018 sebanyak 40 perangkat daerah, tahun 2019 sebanyak 48 perangkat daerah dan tahun 2020 sebanyak 50 perangkat daerah.

Sumber Daya Manusia kearsipan yang selanjutnya disingkat SDM kearsipan adalah pejabat struktural di bidang kearsipan, arsiparis dan fungsional umum di bidang kearsipan. Kegiatan pembinaan kearsipan adalah kegiatan memberikan pengarahan, penguatan, dan pemberdayaan kepada pencipta arsip, lembaga kearsipan, dan sumber daya manusia kearsipan serta pemangku kepentingan lainnya.

Peningkatan SDM pengelola kearsipan senantiasa dilakukan hampir setiap tahunnya, karena belum semua SKPD dan desa menerapkan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka pengelolaan arsip secara baku pemerintah daerah melakukan pembinaan secara intensif melalui sosialisasi, penyuluhan, dan monitoring kearsipan di lingkungan pemerintahan.

Informasi selengkapnya terkait Peningkatan SDM pengelola kearsipan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.114
Persentase Perangkat Daerah Mengelola Arsip Secara Baku
Kabupaten Karo 2016-2020

Tahun	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang)	Jumlah Kegiatan
2016	0	0
2017	369	2
2018	290	1
2019	60	1
2020	215	1

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Karo, 2021

Kegiatan peningkatan SDM Pengelola Kearsipan pada tahun 2016 tidak dilaksanakan dikarenakan terbatasnya anggaran sedangkan Pada tahun 2017 dilaksanakan Bimtek Implementasi Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 terhadap 259 Kepala Desa dan 10 Kelurahan, dengan jumlah 269 orang dan Penyelenggaraan Sosialisasi Kearsipan di lingkungan instansi Pemerintah/Swasta, BUMD dan instansi vertikal berjumlah 100 orang. Kemudian pada tahun 2018 dilaksanakan kegiatan sosialisasi kearsipan di lingkungan pemerintahan desa/kelurahan sejumlah 269 orang dan pengelola arsip pada 17 (tujuh belas) kecamatan sejumlah 21 (dua puluh satu) orang. Pada tahun 2019 dilaksanakan penyusunan Pedoman Jadwal Retensi Arsip terhadap 60 (enam puluh) Perangkat Daerah. Hasil dari kegiatan tersebut adalah adanya peningkatan pengelolaan arsip secara baku. Pada tahun 2020 dilaksanakan pembinaan penyelamatan dan pelestarian arsip negara periode 2014-2019 ke 43 OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

2.1.3.3.1. Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Karo diharapkan akan terus meningkat, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya alam yang potensial untuk budidaya perikanan. Pemanfaatan tersebut antara lain didukung oleh ketersediaan irigasi yang memadai dan meningkatkan minat masyarakat. Capaian indikator urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.115
Capaian Indikator Pembangunan Daerah
Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Produksi Perikanan (%)	106,6	103	98,75	104,49	132,12
2	Konsumsi Ikan (%)	12,49	16,89	18,06	18,09	18,27
3	Cakupan bina kelompok nelayan	0	0	0	0	0
4	Produksi perikanan kelompok nelayan	75,98	78,64	81,54	63,49	66,9
5	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	75,98	78,64	81,54	63,49	66,9

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Karo, 2021

Budidaya Perikanan dilaksanakan di Kolam dan Keramba Jaring Apung (KJA). Produksi perikanan pada Tahun 2020 Produksi Perikanan meningkat sebesar 27,63 persen dari tahun sebelumnya, ini disebabkan karena tingginya produksi ikan dari kolam, tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 22,33% dan pada tahun 2018 juga menurun sebesar 8,8%. Penurunan produksi tersebut karena sesuai dengan Perpres 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya, Kabupaten Karo termasuk pada daerah zero KJA sehingga pembudidaya ikan KJA banyak yang tidak berbudidaya ikan lagi sehingga berdampak pada produksi perikanan yang juga menurun.

Selanjutnya, Tingkat capaian konsumsi ikan di Kabupaten Karo setiap tahun mengalami kenaikan dan diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya tingkat capaian konsumsi ikan semakin tinggi. Produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan pada tahun 2017 dan 2019. Hal ini disebabkan karena tingginya populasi ikan predator sehingga hasil penangkapan nelayan tidak maksimal. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis aman adalah perbandingan antara jumlah total hasil tangkapan dalam satu tahun terhadap jumlah tangkapan yang diperbolehkan dalam tahun yang sama. Untuk Kabupaten Karo proporsi tangkapan ikan dengan produksi perikanan memiliki nilai yang sama.

2.1.3.3.2. Bidang Urusan Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan disebutkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Pariwisata adalah keseluruhan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk mengatur, mengurus dan melayani kebutuhan wisatawan. Pariwisata merupakan sektor industri yang berpotensi untuk dikembangkan yang berkaitan dengan transportasi, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa lainnya seperti bank, asuransi dan keamanan. Pembangunan pariwisata akan berdampak pada bidang ketenagakerjaan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berkembang sekaligus meningkatkan perekonomian daerah. Pengembangan pariwisata tidak akan terlepas dari pembangunan di bidang lain, seperti pengembangan infrastruktur daerah dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah akan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomi, sosial dan budaya. Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, justru akan menimbulkan permasalahan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan meminimalisir dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu dilakukan secara komprehensif.

Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah tujuan wisata unggulan di Propinsi Sumatera Utara yang memiliki potensi tidak kalah baik dengan daerah tujuan wisata lainnya di Indonesia. Selain itu, Kabupaten Karo juga memiliki posisi yang strategis dalam pengembangan pariwisata daerah antara lain : memiliki letak geografis yang strategis, dimana sebahagian wilayah Kabupaten Karo merupakan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba, memiliki banyak potensi wisata terdiri dari wisata alam, wisata religi dan budaya, wisata kuliner dan wisata sejarah, memiliki potensi alam, udara yang bersih dan sejuk serta lingkungan yang masih terjaga kelestariannya.

Tabel 2.116
Capaian Indikator Pembangunan Urusan Pariwisata
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tamu Domestik	435.587	552.430	524.238	721.460	227.812
2.	Tamu Asing	437	5.887	6.014	6.066	0
Jumlah		436.024	558.317	530.252	727.526	227.812
Target Kunjungan		550.000	750.000	850.000	900.000	500.000
Kunjungan Wisata (%)		79,27	74,44	62,38	85,59	45,56
PAD Sektor pariwisata (%)		81,67	94,15	101,47	98,35	90,00

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karo, 2021

Seiring dengan perkembangan pariwisata di Kabupaten Karo yang tak lepas dari meningkatnya jumlah obyek wisata yang dipromosikan dan event wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo maupun pihak swasta. Jumlah kunjungan wisatawan domestik maupun asing ke Kabupaten Karo mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Berdasarkan capaian kunjungan wisatawan, jika dilihat dari target kunjungan wisatawan Kabupaten Karo tahun 2016-2020 masih belum tercapai dari target yang diharapkan yaitu sebesar 79,27% pada tahun 2016 dan menurun menjadi sebesar 45,56% pada tahun 2020. Jumlah kunjungan wisatawan domestik pada tahun 2016 sebanyak 370.412 orang, meningkat menjadi 721.460 orang pada tahun 2020. Begitu juga dengan jumlah kunjungan wisatawan asing cukup meningkat dari 752 orang tahun 2016 menjadi 6.066 orang tahun 2020. Meningkatnya kunjungan wisatawan juga berdampak positif terhadap kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Karo.

2.1.3.3.3. Bidang Urusan Pertanian

Sektor Pertanian merupakan bagian terpenting dalam perekonomian Kabupaten Karo. Peranan sektor ini terhadap PDRB Karo pada tahun 2020 sekitar 53,72 persen untuk harga berlaku. Selain itu, daya serap tenaga kerja juga dominan pada sektor pertanian. Potensi wilayah pada sektor pertanian di Kabupaten Karo sudah lama terkenal sebagai daerah pertanian khususnya sebagai salah satu penghasil hortikultura utama di Provinsi Sumatera Utara. Sebagian produksi hasil pertanian dari Kabupaten Karo dipasarkan ke provinsi lainnya bahkan juga dipasarkan hingga keluar Negeri. Kewenangan urusan pertanian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan sarana

pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian. Pertanian mencakup tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, dan peternakan.

Untuk melihat beberapa indikator terkait pertanian dapat disajikan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 2.117
Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya
Per Hektar Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar(kw/Ha) x 100%					
1.	Padi Sawah	56,56	59,33	59,07	63,46	67,55
2.	Padi Gogo	46,48	45,87	36,42	27,77	44,22
3.	Jagung	66,67	68,19	59,99	70,46	66,76
4.	Ubi Jalar	157,90	202,89	194,35	183,23	162,47

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa komoditi padi sawah dan padi gogo pada tahun 2020 produktivitasnya mengalami peningkatan, sementara Jagung dan ubi jalar terjadi penurunan. Penurunan produktivitas Jagung ini disebabkan karena cuaca tidak mendukung (ekstrim), ada beberapa varietas yang biasa digunakan petani tidak tersedia di pasar sehingga petani tidak menanam jagung dan adanya serangan OPT ulat grayak pada tahun tersebut, sedangkan penurunan produktivitas ubi jalar tahun 2018-2020 karena minat petani berkurang dalam berbudidaya disebabkan harga yang tidak stabil (murah), permintaan ekspor berkurang sehingga petani beralih ke komoditi lainnya.

Tanaman sayuran dan buah-buahan semusim merupakan tanaman yang banyak dibudidayakan di Kabupaten Karo. Tanaman yang merupakan komoditas unggulan di Sumatera Utara pada tahun 2020 antara lain kubis, cabai, kentang, tomat, wortel, petsai/sawi, terung, dan kembang kol. Tanaman unggulan tersebut dominan berasal dari Kabupaten Karo dan sebagian dari daerah dataran tinggi provinsi Sumatera Utara lainnya. Untuk melihat perkembangan komoditas tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.118
Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-Buahan Semusim (Ton)
di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Merah	5.132,30	5.039,00	3.846,40	6.040,90	8.217,00
2	Cabai Merah	38.012,50	50.724,00	54.704,10	55.183,70	70.482,00
3	Kentang	33.383,80	44.791,00	57.412,50	72.308,00	70.368,00
4	Kubis	92.550,50	98.325,00	94.970,30	147.860,20	134.718,00
5	Petsai	33.193,90	41.983,00	41.872,90	58.440,10	54.956,00
6	Tomat	62.364,70	64.777,00	71.728,00	81.693,20	131.931,00
7	Wortel	43.089,00	48.092,00	51.209,00	91.992,00	93.247,00
8	Kembang Kol	33.525,00	37.781,00	38.517,00	50.327,00	52.983,00

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 rata-rata setiap komoditi mengalami peningkatan produksi. Komoditi yang paling tinggi peningkatan produksi tersebut pada komoditi Tomat. Kabupaten Karo merupakan kontributor sayuran dan buah-buahan semusim yang paling dominan di Sumatera Utara, kontribusi kubis sebesar 67,35 persen, cabai 27,15 persen, kentang 60,88 persen, tomat 68,89 persen, wortel 96 persen, petsai 74,23 persen, kembang kol 94,46 persen terhadap total produksi Sumatera Utara.

Tabel 2.119
Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahunan (Ton)
di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jeruk	234.200	245.213	212.374	143.611	122.206
2	Salak	527	472	1.590	4.850	4.715
3	Nenas	405	804	1.233	1.179	962
4	Pisang	7.877	9.797	8.952	8.151	10.627
5	Durian	3.771	2.736	2.643	6.531	3.036
6	Mangga	410	681	460	1.200	1.932
7	Pepaya	1.465	1.088	464	179	460
8	Alpukat	2.764	2.326	2.675	3.519	3.507
9	Markisa	4.829	6.091	782	311	190

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Tanaman hias merupakan salah satu komoditas unggulan di Kabupaten Karo yang juga merupakan daerah sentra tanaman hias di Provinsi Sumatera Utara. Untuk melihat perkembangan tanaman hias dapat dilihat melalui tabel berikut.

Tabel 2.120
Produksi Tanaman Hias (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Krisan	8.559.379	8.227.929	10.146.369	7.769.941	4.389.300
2	Sedap Malam	1.606.000	316.000	491.500	459.900	312.600
3	Mawar	145.000	145.500	243.500	544.300	1.854.000
4	Gladiol	194.700	122.750	156.900	369.800	242.700
5	Gerbera	31.000	121.600	262.000	321.400	494.000
6	Anyelir	93.000	4.980	65.200	197.600	367.500

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa untuk tanaman hias yang paling tinggi produksinya setiap tahun adalah krisan. Kabupaten Karo merupakan kontributor tanaman hias yang paling dominan di Sumatera Utara, antara lain kontribusi anyelir sebesar 96,41%, gerbera sebesar 98,43%, gladiol sebesar 99,21%, mawar sebesar 97,48%, sedap malam sebesar 79,92%, krisan sebesar 99,93% terhadap total produksi Sumatera Utara.

Tabel 2.121
Produksi Tanaman Perkebunan (Ton) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Komoditi	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tembakau	153,38	275,71	417,57	254,12	518
2	Kakao	3.215,86	3.311	3.193,92	3.199,37	3.394
3	Kopi	7.486,00	8.777,02	13.279,74	13.442,17	7.901
4	Karet	72,6	72,6	72,6	73,0	76
5	Kelapa Sawit	4.311,80	5.233,27	6.049,75	6.049,75	6.541
6	Kelapa	751,16	794,73	833,54	833,54	1.238

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel dapat dilihat pada tahun 2020 komoditi tembakau mengalami peningkatan produksi lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Sedangkan komoditi kopi mengalami penurunan sebesar 5.541,17 ton

dari tahun sebelumnya karena banyak lahan kopi yang tidak diurus akibat harga yang murah. Kabupaten Karo juga merupakan salah satu sentra penghasil kopi di Sumatera Utara, komoditi kopi juga telah diolah menjadi bahan minuman dan sudah dipasarkan di dalam dan luar negeri.

Tabel 2.122
Jumlah Populasi Ternak (Ekor) di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Jenis Hewan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	10.843	11.089	11.249	11.474	11.876
2	Sapi Perah	319	359	772	995	3.337
3	Kerbau	1.318	1.332	1.398	1.423	2.008
4	Kuda	87	185	332	341	215
5	Kambing/Domba	12.534	12.591	13.187	15.632	14.117
6	Babi	24.049	26.449	36.793	28.132	23.126
7	Kelinci	3.320	1.369	1.649	1.853	7.307
8	Ayam Kampung	393.638	397.519	419.397	379.339	339.832
9	Itik	23.450	23.732	24.919	3.189	27.375

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat jenis hewan yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Karo yang dominan berbudidaya ayam kampung. Pada tahun 2020 jumlah budidaya ayam kampung sebesar 339.832 ekor menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 379.339 ekor.

Tabel 2.123
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kontribusi Sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB (%)	55,04	54,95	54,17	53,27	53,72
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB (%)	5,28	5,33	5,68	5,68	5,84
3	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)	4,68	24,01	11,35	11,54	5,84

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Karo, 2021

Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Karo pada kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun yaitu dari 55,04 persen menjadi 53,72 persen. Kontribusi sektor tersebut selalu menurun dikarenakan kontribusi sektor lain, khususnya industri pengolahan mengalami peningkatan. Namun demikian nilai produksi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mengalami peningkatan. Penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tidak mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan pada sektor pertanian, karena yang lebih penting adalah peningkatan nilai produksinya.

2.1.3.3.4. Bidang Urusan Kehutanan

Capaian indikator urusan Kehutanan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.124
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Kehutanan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Lahan Kritis (ha)	12.272,39	12.272,39	12.272,39	12.272,39	12.272,39
2.	Luas Reboisasi (ha)		50	5	25	0
3.	Luas Kawasan Hutan	103.282	103.282	103.282	103.282	126.782

Sumber : UPT KPH Wilayah XV Kabanjahe, BPS 2021

2.1.3.3.5. Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Dengan berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan perizinan pertambangan mineral dan batubara pada tataran pemerintah daerah kabupaten/kota diambil alih oleh pemerintah daerah provinsi yang merupakan wakil pemerintah pusat.

Capaian indikator urusan energi dan sumber daya mineral Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.125
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pertambangan tanpa ijin (%)	-	-	-	-	-
2	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB (%)	0,23	0,22	0,23	0,22	0,21

Dari tabel dilihat bahwa kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB total relatif kecil yaitu sebesar 0,21 persen. Hal ini dikarenakan tidak adanya kewenangan kabupaten/kota dalam hal perizinan pertambangan mineral dan batubara. Dalam undang-undang tersebut kewenangan Kabupaten/kota sebatas penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota. Sementara peraturan pemerintah yang mengatur tentang penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota belum terbit sehingga belum dapat terlaksana terkait penerbitan izin tersebut.

Untuk melihat persentase jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.126
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik
Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	86 %	71%	74%	76%	78%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2021

Pada tahun 2020 persentase jumlah rumah tangga pengguna listrik sebanyak 78% artinya masih terdapat 22% rumah tangga belum dialiri oleh listrik, hal tersebut diakibatkan antara lain karena masih terdapat desa yang berada pada kawasan hutan.

2.1.3.3.6. Bidang Urusan Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dijelaskan bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Dalam rangka usaha pengembangan urusan perdagangan, maka harus ada kesesuaian antara produk, kelancaran distribusi, sarana prasarana, informasi pasar dan pengembangan perdagangan daerah. Disamping menangani perdagangan antar wilayah regional maupun internasional, juga dituntut mampu menyediakan pasar tradisional yang mempunyai daya saing dan berkualitas.

Perdagangan di Kabupaten Karo diupayakan akan terus ditingkatkan untuk kesiapan dalam menghadapi persaingan perdagangan global. Perdagangan di Kabupaten Karo juga berperan penting dalam peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan sumber daya lokal serta mengembangkan usaha kecil, mikro dan koperasi.

Capaian indikator urusan Perdagangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.127
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 (miliar Rp)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ekspor (ADHB)	4.059,60	4.846,40	5.060,46	5.036,53	5.099,92
2	Impor (ADHB)	3.729,33	4.651,05	5.257,10	5.255,94	5.093,57
3	Ekspor Bersih	330,27	195,35	-196,64	-219,41	6,35

Sumber: BPS Karo, 2021

Total nilai ekspor Atas Dasar Harga Berlaku mulai tahun 2016 sampai tahun 2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai ekspor atas dasar harga berlaku sebesar 4.059,60 miliar rupiah pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.846,40 miliar rupiah meningkat kembali menjadi 5.060,46 miliar pada tahun 2018 dan turun menjadi 5.036,53 miliar pada tahun 2109, dan naik kembali menjadi 5.099,92 70,12 miliar rupiah pada tahun 2020.

Nilai ekspor bersih dari tahun 2016 sebesar 330,27 miliar rupiah turun menjadi 195,35 miliar rupiah turun menjadi -196,64 miliar rupiah turun kembali menjadi -219,41 miliar rupiah dan pada tahun 2020 naik menjadi 6,35 miliar. Untuk itu perlu perhatian dalam peningkatan lebih lanjut pada sektor perdagangan sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

2.1.3.3.7. Bidang Urusan Perindustrian

Sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dijelaskan bahwa industri merupakan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Industri Kecil Menengah (IKM) yang berkembang di Kabupaten Karo sebagian besar merupakan industri rumah tangga. Adapun cabang industri atau sentra industri yang berkembang di Kabupaten Karo antara lain: kerajinan, bahan bangunan, pangan, dan logam. IKM di Kabupaten Karo perlu ditingkatkan sejalan dengan potensi Kabupaten Karo di bidang pertanian dan sebagai daerah tujuan wisata sehingga dalam rangka menunjang sektor pariwisata dan pertanian maka sektor industri perlu mendapat prioritas. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB setiap tahun mengalami peningkatan namun jika dilihat kenaikan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB masih sangat rendah hal ini disebabkan karena karakter masyarakat yang masih mengarah di sektor pertanian.

Untuk melihat cakupan bina kelompok pengrajin mulai tahun 2016 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan namun pada tahun 2020 mengalami penurunan, jika dilihat persentase cakupan bina kelompok pengrajin masih sangat kecil hal ini disebabkan karena sektor industri di Kabupaten Karo didominasi oleh industri pengolahan. Cakupan bina kelompok pengrajin dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.128
Capaian Indikator pembangunan Daerah Urusan Perindustrian
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	2,04	8,00	11,54	13,21	12,75
2	Kontribusi sektor Industri pengolah terhadap PDRB	3,37	3,54	3,66	3,71	3,71

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo, 2021

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB pada tahun 2016 sebesar sebesar 3,37 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 3,54 persen, pada tahun 2018 kembali meningkat menjadi 3,66 persen,

pada tahun 2019 menjadi sebesar 3,71 persen dan tahun 2020 juga sebesar 3,71 persen. Kontribusi sektor industri pengolahan diharapkan semakin naik untuk pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk cakupan Bina Kelompok pengrajin pada tahun 2016 sebesar 2,04 persen, pada tahun 2017 meningkat menjadi 8,00 persen, meningkat kembali menjadi 11,54 pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 13,21 persen, dan turun pada tahun 2020 menjadi 12,75 persen. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian pemerintah terhadap kelompok pengrajin untuk mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah daerah.

2.1.3.4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1. Sekretariat Daerah

Salah satu unsur pemerintahan yang menopang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah berfungsi sangat strategis dalam melaksanakan pelayanan informasi, administrasi dan bahkan berbagai aspek fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian peranan dan fungsi serta kinerja Sekretaris Daerah begitu penting dan sangat strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan Daerah.

Capaian indikator sekretariat daerah Kabupaten Karo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.129
Capaian Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Kasus bantuan hukum yang tertangani	Kasus	1	4	3	5	4
2	Nilai Repormasi Birokrasi	Kategori		C	C		
3	Nilai hasil evaluasi SAKIP	Kategori		C	C		
4	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori		C	C		
6	Jumlah unsur rupabumi yang sudah dibakukan namanya	Unsur		2	2		
7	Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah						
	Media Massa	Media		30	28	31	22
	Media Elektronik	Media		10	18	15	30

Sumber: Sekretriati Daerah Kab. Karo, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa kasus bantuan hukum yang tertangani di kabupaten Karo pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) kasus dan tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) kasus. Nilai Reformasi Birokrasi, Nilai hasil evaluasi SAKIP serta Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Karo untuk tahun 2017 dan tahun 2018 masih rendah yaitu kategori C. Jumlah unsur rupa bumi yang sudah dibakukan namanya di Kabupaten Karo pada tahun 2017 dan 2018 adalah 2 (dua) unsur rupabumi. Jumlah media penyampaian informasi pembangunan daerah (media cetak) pada tahun 2017 sebanyak 30 (tiga puluh) media, dan tahun 2018 28 (dua puluh delapan) media, sedangkan untuk media elektronik pada pada tahun 2017 sebanyak 10 (sepuluh) media, dan tahun 2018 sebanyak 18 (delapan belas) media.

2.1.3.4.2. Sekretariat DPRD

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan dapat diukur melalui indikator kinerja. Periode tahun 2016-2020 indikator kinerja penunjang urusan Sekretariat Dewan dilaksanakan setiap tahunnya oleh Sekretariat Dewan Kabupaten Karo.

Tabel 2.130
Indikator Kinerja Penunjang Urusan Sekretariat Dewan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-Alat Kelengkapan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda, dan fungsi anggaran dalam dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran kedalam Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber Sekretariat Dewan Kab.Karo, 2021

2.1.3.5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.5.1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Perencanaan Pembangunan daerah dituangkan ke dalam dokumen perencanaan dan capaian indikator pembangunan daerah Urusan Penunjang Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.131
Capaian Indikator Pembangunan Daerah Urusan Penunjang
Perencanaan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD (%)	86	81,70	86,67	86,80	86,00
5	Konsistensi program RKPD ke dalam APBD (%)	87	90,20	92,87	92,90	92,90

Sumber: Bappeda Kabupaten Karo, 2020

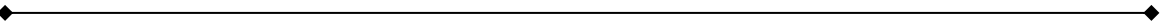
Dari tabel di atas terlihat bahwa dokumen perencanaan RPJPD belum ditetapkan melalui Perda sampai Tahun 2019. Perda RPJPD ditetapkan pada Tahun 2020, melalui Perda Nomor 01 Tahun 2020 tanggal 22 Mei 2020. Untuk capaian indikator tersedianya dokumen RPJMD dan RKPD melalui Perda dan Perkada telah tercapai dengan baik melalui Tahun 2016-2020. Selanjutnya Capaian Indikator Konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD sudah terlihat tren membaik dari

capaian tahun 2016 sebesar 86% menjadi 86,80% pada Tahun 2019, dan menurun di Tahun 2020 menjadi 86,00 %. Demikian juga terkait indikator konsistensi program RKPD ke dalam APBD terlihat tren membaik dari tahun 2016–2020.

2.1.3.5.2. Keuangan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka dalam pengelolaan keuangan daerah harus sesuai dengan prosedur, dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang salah satunya diwujudkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan daerah merupakan komponen yang paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.



Tabel 2.132
Capaian Indikator Urusan Keuangan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	SILPA	249.825.108.038,05	255.011.755.871,21	350.172.679.545,49	239.680.537.856,64	239.150.872.081,00
2.	Persentase SILPA/total belanja	16,20	16,77	25,05	15,66	15,50
3.	Perbandingan Belanja Langsung dengan belanja APBD	44%	47%	39%	37%	26.77%
4.	Perbandingan Belanja Tidak Langsung dengan belanja APBD	56%	53%	61%	63%	57,43%
5.	Persentase Belanja Pendidikan	34%	27%	28%	26%	20.84%
6.	Persentase Belanja Kesehatan	11%	11%	13%	13%	14.02%
7.	Penetapan APBD	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
8.	Opini BPK	DISCLAIMER	WDP	WDP	WTP	WTP
9.	Persentase Aset Tanah Yang Bersertifikat	14,37%	16,96%	17,31%	22,70%	31.89%
10.	Proporsi PAD terhadap pendapatan daerah	6,86	10,79	10,65	8,26	7.88
11.	Persentase pajak terhadap PAD	35,39	29,98	28,21	37,74	41.02

Sumber : BPKPAD Kabupaten Karo, 2021 (diolah)

Keuangan daerah mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Berkaitan dengan pengelolaan belanja daerah, kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari persentase SILPA dari total belanja daerah setiap tahunnya. Persentase SILPA Kabupaten Karo secara umum mengalami penurunan. Pada tahun 2016 besar persentase SILPA Kabupaten Karo sebesar 25,34%, kemudian menurun menjadi sebesar 16,20% pada Tahun 2016 dan meningkat lagi menjadi sebesar 16,77% pada Tahun 2017 dan sebesar 25,05% pada Tahun 2018. Hal ini disebabkan, adanya dana transfer yang masuk pada akhir tahun anggaran sehingga tidak dapat direalisasikan. Namun, persentase SILPA Kabupaten Karo kembali menurun menjadi sebesar 15,50% pada tahun 2020.

Proporsi perbandingan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo tahun 2016-2020 berada pada kisaran 26,77%-47% dan perbandingan Belanja Tidak Langsung terhadap total Belanja Daerah Kabupaten Karo pada tahun 2016-2020 berada pada kisaran 53%-63% Hal ini menunjukkan bahwa alokasi anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Karo lebih besar dari anggaran Belanja Langsung. Namun, apabila dilihat dari komponen anggaran pada Belanja Tidak Langsung didalamnya juga terdapat Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga sehingga alokasi anggaran

pada Belanja Tidak Langsung menjadi lebih besar dari Belanja Langsung Kabupaten Karo.

Selain itu, dilihat dari persentase belanja pendidikan Kabupaten Karo tahun 2016-2020, pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan pada kisaran 20.84%-34%. Hal ini telah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa alokasi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBD. Demikian halnya dengan persentase belanja kesehatan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020, alokasi anggaran kesehatan berada pada kisaran 11%-14,02%. Hal ini, pemerintah telah memenuhi ketentuan anggaran sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 bahwa alokasi anggaran kesehatan minimal 10% dari APBD.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal. Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan, disamping pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kabupaten Karo memantapkan komitmennya untuk mencapai *Good Governance* dalam pengelolaan pemerintahan. Kerja keras ini membuahkan hasil dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2020. Untuk opini BPK pada tahun 2016 Kabupaten Karo memperoleh opini *Disclaimer* dari BPK. Salah satu temuan menyebabkan opini tersebut, yakni karena adanya pelaksanaan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga senilai Rp183.264.400.000,- untuk pengungsi gunung Sinabung tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah Kabupaten Karo kembali memperoleh opini WDP dan pada tahun 2019 meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan pencapaian ini Pemerintah Kabupaten Karo berharap bisa menjadikan informasi yang ada dalam LKPD ini sebagai dasar pertimbangan dalam

setiap pengambilan keputusan, sehingga dari LKPD yang ada saat ini dapat dinilai kinerja Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan.

Secara umum, Aset tetap Pemerintah Kabupaten Karo sudah teregristrasi melalui aplikasi SIMDA BMD (Barang Milik Daerah) yang tercatat pada Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Karo yang terdiri dari inventaris asset tanah, asset peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan asset tetap lainnya. Namun, masih terdapat kendala dalam penatausahaan barang milik daerah khususnya pada asset tetap tanah yang belum memiliki sertifikat. Berdasarkan jumlah asset tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Karo sebanyak 1.427 bidang tanah, baru sekitar 180 aset tanah yang sudah bersertifikat atau sebesar 14,37% pada Tahun 2016 dan meningkat menjadi sebesar 324 aset tanah yang bersertifikat pada tahun 2020 atau sebesar 31,89%. Hal ini, dikarenakan perolehan kelengkapan dokumen dari pengguna barang belum dipenuhi untuk proses penerbitan sertifikat pada Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Karo.

2.1.3.5.3. Kepegawaian

Indikator pencapaian kinerja urusan kepegawaian salah satunya dapat dilihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Tahun 2016 total jabatan sebanyak 870 jabatan, sedangkan tahun 2017-2020 jumlah tersebut berkurang menjadi 837 jabatan. Tahun 2016-2020 tidak ada ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural. Selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.133
Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	Jumlah Total Jabatan	Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural
2016	0	870	0,00
2017	0	837	0
2018	0	837	0
2019	0	837	0
2020	0	837	0

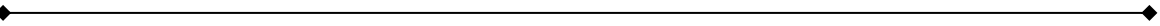
Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo, 2021

2.1.3.5.4. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Permendagri 17 tahun 2016, dalam rangka meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, serta berkesinambungan. Penelitian dan pengembangan atau kelitbangan terdiri dari kelitbangan utama yaitu penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan yang dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan, serta kelitbangan pendukung.

Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Badan Litbang dan Pemerintahan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pinjaman atau Hibah Luar Negeri (PHLN), dan sumber-sumber pembiayaan lain yang sah, sesuai peraturan perundang-undangan.

Program dan kegiatan pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo tahun 2016-2021 belum dimuat pada RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 karena pada proses penyusunan kelitbangan tersebut masih berada pada subbidang yang umumnya mengerjakan tupoksi perencanaan. Untuk produk kelitbangan selama ini dikerjakan pada program kegiatan yang bukan kelitbangan dan terpecar pada perangkat daerah, belum terpusat pada lembaga kelitbangan yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karo. Pelaksanaan kelitbangan di Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo sampai saat ini belum rutin dilakukan pemantauan dan evaluasi, sehingga belum dapat diketahui dengan pasti pemanfaatan hasil kelitbangan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Terkait penerapan dan kebijakan inovasi daerah yang diterapkan mulai diperhatikan sejak keikutsertaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karo pada *Innovative Government Award* (IGA) dari tahun 2018-2020, dimana predikat Kabupaten Karo juga meningkat dari “Kabupaten Kurang Inovatif” pada tahun 2018, menjadi “Kabupaten Inovatif” pada tahun 2019 dan terakhir pada tahun 2020 menjadi “Kabupaten Sangat Inovatif”. Penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi daerah yang diterapkan Kabupaten Karo tahun 2016-2020, seperti disajikan pada tabel berikut ini.



Tabel 2.134
Penerapan Inovasi Daerah dan Kebijakan Inovasi Daerah yang Diterapkan
Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
1	Penerapan Sida					
1.1	Jumlah perangkat daerah yang difasilitasi	0	0	6	60	60
1.2	Jumlah total perangkat daerah	60	60	60	60	60
2	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah (%)	0	0	10	100	100
2.1	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	1	0	6	62	33
2.2	Jumlah inovasi yang diusulkan	1	0	6	62	92
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Karo

Berdasarkan gambaran penerapan inovasi daerah dan kebijakan inovasi daerah yang diterapkan di atas dapat dilihat bahwa inovasi belum menjadi komitmen dan budaya pada semua perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Karo. Oleh karena itu, pada tahun 2019 ditetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun yang diharapkan dapat menumbuhkan terciptanya budaya inovasi pada instansi pemerintah di Kabupaten Karo.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

❖ Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi salah satunya dapat dilihat dari perkembangan tingkat pendapatan rata-rata masyarakat. Masyarakat yang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi, secara umum akan lebih sejahtera dibanding mereka yang pendapatannya lebih rendah. Sejalan dengan pendapatan, pengeluaran atau konsumsi masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Konsumsi Rumah tangga per Kapita di Kabupaten Karo disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.135
Pengeluaran RT per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016 – 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Per Kapita (Rp)	1.006.410	1.064.042	1.276.518	1.322.725	1.364.192

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2021

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, rata rata pengeluaran per kapita penduduk Kabupaten Karo tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita Kabupaten Karo sebesar Rp1.006.410,- meningkat menjadi sebesar Rp Rp1.064.042,- pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 pengeluaran per kapita Kabupaten Karo sebesar Rp1.276.518,- dan terus meningkat menjadi sebesar Rp1.322.725,- pada Tahun 2019 dan Rp1.364.192,- pada tahun 2020. Peningkatan pengeluaran konsumsi penduduk ini salah satunya juga dikarenakan adanya peningkatan upah gaji yang mereka terima, seperti adanya kenaikan gaji pegawai, upah buruh dan lain lain. Hal lain yang juga mendorong peningkatan konsumsi adanya peningkatan inflasi atas barang dan jasa, pada akhirnya memaksa penduduk untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

❖ **Pengeluaran Konsumsi Nonpangan Perkapita**

Pola pengeluaran seseorang merupakan salah satu alat ukur untuk melihat tinggi rendahnya tingkat kesejahteraannya. Semakin tinggi tingkat pendapatan atau kesejahteraan seseorang, maka proporsi pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan cenderung menurun, namun sebaliknya proporsi untuk nonpangan akan meningkat. Dalam memenuhi kebutuhan pangan terdapat batas tertentu kebutuhan manusia, namun sebaliknya untuk kebutuhan manusia akan barang nonpangan tidak ada batasnya.

Tabel 2.136
Pengeluaran Konsumsi Nonpangan per Kapita Kabupaten Karo Tahun 2016–2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengeluaran Konsumsi Nonpangan per Kapita	38.60	34.09	37.52	38.30	-

Sumber : BPS, Kab. Karo, 2021

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016 – 2020) pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kabupaten Karo untuk

kebutuhan non pangan proporsinya cukup fluktuatif setiap tahunnya yaitu dari sebesar 38,60% pada tahun 2016 menurun menjadi sebesar 34,09% pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 37,52% dan pada tahun 2019 sebesar 38,30%. Ini mengindikasikan, bahwa kesejahteraan masyarakat Kabupaten Karo semakin meningkat. Keadaan ini mungkin juga dikarenakan dapat dikendalikannya perubahan harga-harga barang yang tentunya sebanding pula dengan perkembangan pendapatan. Kondisi ini tercermin dari pola konsumsi penduduk seperti lebih besarnya proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pangan dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan nonpangan.

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Panjang Jalan

Kabupaten Karo memiliki luas wilayah 2.127,25 km² dan terbagi ke dalam 17 (tujuh belas) wilayah kecamatan. Untuk menghubungkan wilayah-wilayah tersebut telah tersedia jalan dengan total panjang 1.218,15 km (jalan kewenangan Kabupaten Karo). Dari jumlah tersebut sebagian besar jenis permukaannya aspal. Kondisi jalan di Kabupaten Karo pada tahun 2019 sebesar 63,36% dalam kondisi baik.

2. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Kabupaten Karo merupakan wilayah strategis dimana merupakan salah satu jalur transportasi yang menghubungkan beberapa kabupaten antara lain Kabupaten Simalungun, Dairi, Langkat, Deliserdang, Pakpak Barat serta juga merupakan jalur penghubung dari Ibukota Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Aceh Singkil dan Gayo Luwes Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Terdapat 1 (satu) terminal di wilayah Kabupaten Karo yang melayani transportasi dalam kota, pedesaan, maupun antar kota. Jumlah arus penumpang angkutan umum melalui terminal yang ada di Kabupaten Karo menunjukkan peningkatan dimana pada tahun 2016 sebanyak 3.411.274 orang meningkat menjadi 3.696.720 orang pada tahun 2019.

3. Luas Wilayah Industri

Sesuai dengan *Draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo, pengembangan kawasan peruntukan industri rumah tangga, industri kecil

dan menengah berada tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Karo. Sementara itu, untuk industri besar direncanakan untuk dikembangkan di Kecamatan Merek, Mardinding, Laubaleng, Tigabinanga, Berastagi. Luasan Kawasan industri yang dimaksud belum dapat ditentukan dimana masih diperlukan kajian dan pembahasan bersama *stakeholder* terkait.

4. Luas Wilayah Kebanjiran

Data mengenai luas wilayah yang mengalami banjir belum tersedia secara lengkap namun dapat dilihat beberapa daerah yang sering terkena banjir ada di Kecamatan Mardinding dan Laubaleng, beberapa titik di daerah perkotaan Kecamatan Kabanjahe, Berastagi dan Tigapanah.

5. Luas Wilayah Kekeringan

Kabupaten Karo sangat jarang mengalami kekeringan yang panjang. Namun kekeringan jangka pendek beberapa kali terjadi di Kecamatan Munte, Tigabinanga, Juhar, Lau Baleng dan Mardinding dengan luasan yang belum terdata.

6. Luas Wilayah Perkotaan

Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan *Draft* Ranperda RTRW Kabupaten Karo disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan berada di Kecamatan Kabanjahe, Berastagi, Tigabinanga dan Kutabuluh dimana luasannya belum ditetapkan.

7. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran/Rumah Makan

Jenis, kelas dan jumlah restoran/rumah makan yang ada di Kabupaten Karo belum terdata secara baik, namun dapat dilihat penambahan cukup signifikan berupa cafe yang banyak bertambah khususnya di Kecamatan Kabanjahe dan Berastagi.

8. Pelayanan Air Bersih

Persentase penduduk berakses air minum di Kabupaten Karo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 telah mencapai 87,83%. Namun demikian kontinuitas dari ketersediaan air minum dimaksud perlu ditingkatkan dimana sering terjadi kerusakan jaringan perpipaan yang mengakibatkan dalam waktu waktu tertentu ketersediaan air menjadi berkurang.

2.4.1. Fokus Iklim Investasi

Investasi merupakan salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang tercipta apabila didukung oleh iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi merupakan kondisi yang bersifat multi dimensi dan menjadi bahan pertimbangan bagi para investor dalam melakukan investasi. Peran pemerintah menjadi sangat penting dalam setiap proses penanaman modal, bahkan rekomendasi pemerintah merupakan syarat mutlak dalam penilaian kegiatan investasi di daerah dinyatakan layak. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi iklim investasi suatu daerah yaitu keamanan suatu daerah, regulasi yang mendukung iklim investasi, potensi sumber daya alam dan ketersediaan sumber daya manusia.

Keamanan suatu daerah dapat dilihat dari angka kriminalitas yang terjadi setiap tahun. Selain angka kriminalitas, kejadian unjuk rasa juga sangat berpengaruh terhadap faktor keamanan. Kegiatan unjuk rasa di Kabupaten Karo pada tahun 2016 menurun menjadi sebanyak 7 (tujuh) kegiatan unjuk rasa dan bertambah menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2017 dikarenakan suhu politik di Kabupaten Karo yang memanas. Selanjutnya, pada tahun 2018 kegiatan unjuk rasa menurun menjadi sebanyak 11 (sebelas) kegiatan demonstrasi dan kembali meningkat menjadi 13 (tiga belas) kegiatan demonstrasi pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah unjuk rasa menurun menjadi 7 (tujuh) kegiatan. Faktor keamanan menjadi salah satu pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya. Oleh karena itu, Pemerintah diharapkan memiliki berbagai strategi dalam menjaga kestabilan dan keamanan serta perlunya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum dan tokoh masyarakat dalam menjaga

keamanan dan ketertiban Kabupaten Karo. Jumlah unjuk rasa di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.137
Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah unjuk rasa	7	17	11	13	7

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat Kab. Karo, 2021

Selain angka kriminalitas dan unjuk rasa, iklim investasi yang baik dilihat dari salah satu kondisi yang mendukung terhadap pencapaian kinerja peningkatan investasi di daerah yaitu kemudahan dalam mengurus perijinan usaha dan regulasi yang mendukung iklim invetasi. Strategi Pemerintah Kabupaten Karo dalam meningkatkan daya saing daerah dari segi investasi adalah dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, potensi dan peluang investasi serta promosi investasi. Pemerintah Kabupaten Karo telah menerapkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu melalui sistem pelayanan perizinan secara online yaitu aplikasi perizinan SICANTIK dan OSS (*Online Single Submission*).

Terdapat beberapa jenis perizinan yang dilayani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo antara lain Izin Mendirikan Bangunan, Izin Reklame, SIUP, TDG, TDI, Izin Usaha Industri, Izin Bidang Kesehatan (Izin Praktek Dokter, Izin Kerja Perawat, Izin Praktek Bidan, Izin Mendirikan Rumah Sakit, dll), Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Bidang Pendidikan (Izin PAUD, Izin SD, Izin SMP, Izin Pendidikan Formal dan Nonformal, dll), Izin Bidang Usaha Pertanian (Izin Usaha Pertanian, Izin Usaha Benih Hortikultura, Izin Rumah Potong Hewan, dll), Izin Trayek, Izin Angkutan Orang dan Barang dan lainnya.

2.1.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Sumber daya manusia (SDM) merupakan orang-orang yang memiliki kemampuan dan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan mampu melakukan berbagai jenis pekerjaan dalam mencapai suatu tujuan. Dalam sumber daya manusia, yang diliput bukan terbatas kepada tenaga ahli, tenaga berpendidikan atau pun tenaga yang berpengalaman saja,

tetapi semua tenaga kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Mendapatkan SDM yang berkualitas tentunya merupakan impian dari suatu daerah, hal ini disebabkan karena SDM merupakan salah satu langkah awal yang sangat penting yang dapat digunakan untuk membangun dan memajukan suatu daerah. Adapun persentase menurut ijazah Diploma I, II, III, IV dan S1 Kabupaten Karo Tahun 2015-2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.138
Persentase Penduduk Menurut Ijazah Diploma I/II, III, IV dan S1 Keatas
Kabupaten Karo Tahun 2015-2019

Tahun	Diploma I/II	Diploma III	DIV/S1 Keatas
2019	0,52	0,93	5,07
2018	0,21	1,47	4,67
2017	0,69	2,34	4,84
2016	0,37	1,69	5,43
2015	0,85	2,01	3,93

Sumber: BPS Kab.Karo, 2020

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Hasil analisis rasio ketergantungan terlihat bahwa rasio ketergantungan semakin menurun dimana tahun 2020 sebesar 57,34%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 57,50% (tahun 2017) seperti disajikan tabel sebagai berikut.

Tabel 2.139
Rasio Ketergantungan Kabupaten Karo Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio ketergantungan	57,88	57,88	57,50	57,34	57,34

Sumber: BPS Kabupaten Karo, 2021

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 yang telah disusun berdasarkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Karo terpilih. Untuk itu, penting itu melihat realisasi pada periode sebelumnya untuk dapat melihat proyeksi pembangunan di masa depan (Tahun 2021-2026). Data terkait evaluasi terhadap capaian RPJMD pada periode 2016-2021 secara rinci disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.140
Predikat Kinerja Kegiatan dan Keuangan Tahun 2020
Pada masing-masing Perangkat Daerah

No.	Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	6
1	Dinas Pendidikan	98.2	46.5	Sangat Tinggi	Rendah
2	Dinas Kesehatan	72.4	76.1	Tinggi	Tinggi
3	Rumah Sakit Umum	86.6	75.7	Sangat tinggi	Tinggi
4	Akademi Bidan	15.3	15.3	Sangat rendah	Sangat Rendah
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49.9	97.1	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	51,2	23.7	Rendah	Sangat Rendah
7	Satuan Polisi Pamong Praja	97.4	95.9	Sangat tinggi	Sangat tinggi
8	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	94.2	100.0	Sangat tinggi	Sangat tinggi
9	Dinas Sosial	98.2	89.3	Sangat tinggi	Sangat tinggi
10	Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM	79.9	79.9	Tinggi	Tinggi
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	99.7	86.8	Sangat tinggi	Sangat tinggi
12	Dinas Ketahanan Pangan	81.9	81.9	Sangat tinggi	Sangat tinggi
13	Dinas Lingkungan Hidup	54	100.0	Rendah	Sangat tinggi
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	83.3	87.1	Tinggi	Sangat tinggi
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	70.5	67.8	Tinggi	Sedang
16	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB	68.7	38.8	Sedang	Sangat Rendah
17	Dinas Perhubungan	93.3	93.3	Sedang	Sangat Tinggi
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	99.4	99.4	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu	54.3	54.3	Rendah	Rendah
20	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	78.7	87.6	Tinggi	Sangat Tinggi

No.	Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	62.6	62.6	Sedang	Sedang
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	92.4	94.2	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
23	Dinas Perikanan	35.0	74.0	Rendah	Tinggi
24	Dinas Pertanian	67.5	67.5	Sedang	Sedang
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86.3	86.3	Sangat tinggi	Sangat tinggi
26	Sekretariat DPRD	58.0	79.8	Rendah	Tinggi
27	Bagian Pemerintahan Umum	85.1	96.7	Tinggi	Sangat Tinggi
28	Bagian Kemasyarakatan dan Bina Pemerintahan Desa/Kelurahan	95.7	46.3	Sangat tinggi	Rendah
29	Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia	98.1	97.4	Sangat tinggi	Sangat tinggi
30	Bagian Humas dan protocol	88.2	85.6	Sangat tinggi	Sangat tinggi
31	Bagian Administrasi Pembangunan	88.1	71.6	Sangat tinggi	Tinggi
32	Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam	71.9	53.2	Tinggi	Rendah
33	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	71.7	15.2	Tinggi	Sangat Rendah
34	Bagian Umum dan Perlengkapan	89.6	80.9	Sangat tinggi	Sangat Tinggi
35	Bagian Tata Usaha	98.9	94.1	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
36	Bagian Otonomi Daerah	90.8	57.5	Sangat Tinggi	Rendah
37	Bagian Organisasi	93.5	66.8	Sangat Tinggi	Sedang
38	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	69.6	79.6	Sedang	Tinggi
39	Kecamatan Kabanjahe	80.0	17.3	Tinggi	Sangat Rendah
40	Kecamatan Berastagi	56	69.0	Rendah	Sedang
41	Kecamatan Simpang Empat	80.0	89.9	Tinggi	Sangat tinggi
42	Kecamatan Payung	89.8	90.4	Sangat Tinggi	Sangat tinggi
43	Kecamatan Tiganderket	88.9	99.3	Sangat tinggi	Sangat tinggi
44	Kecamatan Munte	93.1	93.1	Sangat Tinggi	Sangat tinggi

No.	Perangkat Daerah	Rata-rata capaian kinerja (%)		Predikat Kinerja	
		K	Rp	K	Rp
45	Kecamatan Tigabinanga	88.9	69.0	Sangat Tinggi	Sedang
46	Kecamatan Juhar	88.9	84.5	Sangat Tinggi	Tinggi
47	Kecamatan Lau Baleng	84.1	96.1	Tinggi	Sangat Tinggi
48	Kecamatan Barusjahe	85.0	93.9	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
49	Kecamatan Tigapanah	43.0	87.2	Sangat rendah	Sangat Tinggi
50	Kecamatan Kutabuluh	98.6	98.6	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
51	Kecamatan Merek	80.0	91.4	Tinggi	Sangat Tinggi
52	Kecamatan Mardindingding	91.5	71.2	Sangat Tinggi	Tinggi
53	Kecamatan Merdeka	89	95.3	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
54	Kecamatan Naman Teran	88.9	83.9	Sangat Tinggi	Tinggi
55	Kecamatan Dolatrayat	94.5	100.0	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
56	Inspektorat Daerah	76.1	100.0	Tinggi	Sangat Tinggi
57	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	88.9	81.0	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
58	Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	73.3	73.3	Tinggi	Tinggi
59	Badan Kepegawaian	91.4	94.5	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
60	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	88.0	75.5	Sangat Tinggi	Tinggi

Sumber: laporan evaluasi hasil renja OPD tahun 2020

Berdasarkan Evaluasi Hasil RKPD Kabupaten Karo Triwulan IV Tahun 2020, rata-rata persentase capaian kinerja dan realisasi anggaran pada semua perangkat daerah adalah sebagai berikut:

Tingkat capaian kinerja adalah : 76,0 %

Realisasi Anggaran adalah : 90,9 %

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal dan kelemahan

yang tidak diatasi. Faktor-faktor yang menjadi peluang maupun yang menjadi faktor penghambat perlu ditelaah dan dianalisis lebih dalam.

Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah yang berhubungan dengan prioritas nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo, adalah sebagai berikut:

1. Analisa Isu dan Permasalahan Secara Nasional

Tahun 2021 adalah tahun pemulihan ekonomi setelah dihajar oleh pandemi virus korona jadi perencanaan pembangunan untuk tahun 2022 harus adaptif dengan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini. Adapun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2022 akan mengusung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Pondasi dari pemulihan ekonomi adalah pengendalian Covid-19. Di saat yang sama, percepatan belanja pemerintah, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, padat karya, serta mendorong belanja masyarakat perlu terus dilakukan.

Perencanaan pembangunan pada tahun 2022 akan difokuskan pada:

- Orientasi Belanja Modal
Infrastruktur Sosial (Rumah Sakit, Puskesmas, Fasilitas Kesehatan);
Infrastruktur Logistik (Jalan/Jembatan); Perumahan MBR (Rutilahu);
Penataan Kawasan Khusus (Alun-alun, Destinasi Wisata, Creative Center), serta Infrastruktur Lingkungan (Irigasi & Drainase).
- Dukungan Pemulihan Ekonomi Sektor Riil
Menjamin penyaluran dana kpd UMKM, perluasan padat karya, ketahanan pangan., dan meningkatkan stimulus belanja spt insentif sektor pariwisata, percepatan pengadaan barang dan jasa keperluan Covid-19
- Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

-
- Percepatan dan perluasan ETPD dalam rangka mendorong transformasi digital dan pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan mengoptimalkan penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak Covid-19.
- Penguatan Perlindungan Social
Memprioritaskan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja
 - Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk memastikan efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja pemerintah daerah yang didukung SIPD sehingga dapat menjadi bahan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah dan nasional
 - Pembiayaan Alternative
Menjaga keberlanjutan fiskal, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (pruden), akuntabel dan transparan, terutama dalam pengelolaan pembiayaan alternatif pembangunan daerah, termasuk salah satunya Pinjaman PEN Daerah
 - Kerjasama Antar Daerah
Pengembangan kolaborasi yang inovatif melalui kerja sama antardaerah diharapkan menghasilkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, mengatasi kesenjangan antarwilayah, dan menjaga kohesivitas wilayah
 - Evaluasi Hibah dan Bansos.
Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan feedback yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos.

2. Analisa Isu dan Permasalahan Provinsi Sumatera Utara

Isu dan permasalahan Provinsi Sumatera Utara diperoleh berdasarkan kajian terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Sumatera Utara. Permasalahan Pokok RKPD Provinsi Sumateraab Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- Belum meratanya pembangunan daerah;
- Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;

- Belum meratanya pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas wilayah yang berwawasan lingkungan;
- Belum meratanya kesejahteraan masyarakat;
- Belum optimalnya produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
- Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka isu strategis Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- peningkatan daya saing sumber daya manusia
- percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah
- optimalisasi penanggulangan kemiskinan
- reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan
- pengembangan & pemanfaatan potensi unggulan dan sumber daya daerah yang berkelanjutan.

3. Permasalahan Kabupaten Karo

Dalam dokumen Rancangan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 ini permasalahan daerah berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah .

Permasalahan Kabupaten Karo yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Belum terpenuhinya standar pelayanan pendidikan baik dari sisi Sarana, Prasarana, SDM dan Pelayanan.
- Belum terpenuhinya target capaian Standar Pelayanan Minimal kesehatan dan adanya Pandemi covid-19 yang berdampak pada menurunnya derajat kesehatan
- Data kemiskinan yang belum akurat dan target penurunan angka kemiskinan yang belum tercapai
- Laju pertumbuhan pendudukan masih perlu dikendalikan
- Dalam bidang database dan informasi kependudukan, masih belum adanya suatu sistem manajemen pengelolaan data dan informasi kependudukan terintegrasi, akurat, dipercaya dan mudah diakses dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuat administrasi kependudukan
- Belum terpenuhinya standar pelayanan perpustakaan dan

kearsipan

- Masih beratnya beban birokrasi dibanding pelayanan yang diberikan
- Akses air minum yang layak belum tercapai 100%
- Masih ada jalan dan jembatan yang kondisinya belum mantap
- Ketersediaan dan kualitas RTH belum optimal
- Ketersediaan dan kualitas pendukung SPBE masih belum optimal
- Ketersediaan dan keberfungsian drainase belum optimal
- Akses sanitasi yang layak belum 100%
- Kondisi saluran irigasi yang kurang baik
- Indeks risiko bencana masih tinggi
- Masih ada pemukiman kumuh dan rumah tidak layak huni
- Masih ada titik kemacetan dan belum tersedianya gedung uji
- Belum optimalnya pengelolaan budaya daerah
- Belum optimalnya Daya Saing Objek Wisata, Pemasaran, SDM Pariwisata dan Kemitraan yang Berkelanjutan serta Pengembangan Ekonomi Kreatif
- Belum optimalnya daya saing produk UMKM/IKM dan koperasi aktif;
- Belum optimalnya ketersediaan ketersediaan benih/bibit unggul, sarana prasarana dan SDM pertanian untuk mendukung produktivitas yang ber mutu;
- Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk
- Belum optimalnya Peningkatan Produksi Perikanan
- Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
- Belum optimalnya penciptaan iklim investasi yang kondusif
- Belum optimalnya pemanfaatan Energi dan Sumber daya mineral
- Belum optimalnya ekspor komoditas, perlindungan konsumen dan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan;
- Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan asset dan barang milik daerah serta potensi PAD belum tergali;
- Belum optimalnya kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru;

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah**- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pendidikan**

- a. Masih terdapatnya siswa yang tidak lulus SD, dan SMP, masih terdapatnya siswa yang tidak melanjutkan sekolah dari jenjang SD ke SMP, dan SMP ke SMA, serta masih adanya anak usia sekolah yang tidak mengikuti Pendidikan Dasar.
- b. Masih adanya bangunan dalam kondisi kurang baik pada jenjang sekolah SD, SMP. Hal ini disebabkan perawatan dan pemeliharaan yang kurang memadai serta sarana prasarana yang telah memiliki masa pakai lama.
- c. Belum adanya satu TK Pembina Negeri satu kecamatan.
- d. Belum terpenuhinya sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan, baik secara kuantitas maupun kualitas (terutama penguasaan terhadap Teknologi Informasi dan Komputer dalam pembelajaran). Masih belum meratanya pendidik dan tenaga kependidikan di setiap sekolah pada Kabupaten Karo, masih rendahnya manajemen kinerja pendidik dan tenaga kependidikan, mulai lunturnya loyalitas serta integritas dalam menjalankan profesinya sehingga mempengaruhi mutu kinerja dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada siswa, dan belum optimalnya mutu dan prestasi siswa, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Pandemi *covid-19* yang terjadi pada awal tahun 2021 di Indonesia, membawa dampak terhadap terhambatnya pembangunan kesehatan masyarakat, hal ini juga karena belum optimalnya system penanganan covid 19
- b. Rumah Sakit Umum Daerah saat ini masih berada di lahan bukan milik Pemerintah Kabupaten Karo dan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah baru masih terkendala.
- c. Masih kurangnya kelengkapan prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas sesuai standar

-
- d. Masih kurangnya kemampuan petugas Puskesmas dalam perencanaan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
 - e. Pelaksanaan program / kegiatan dan manajemen administrasi di Puskesmas belum optimal sehingga perlu pembinaan dan pendampingan.
 - f. Rendahnya tingkat kunjungan ke Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM).
 - g. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan kader Posbindu di desa dalam melaksanakan penyuluhan pada masyarakat
 - h. Fluktuasi jumlah kasus HIV setiap tahun dan masih rendahnya cakupan masyarakat untuk memeriksakan diri
 - i. Masih ditemukannya kasus DBD setiap tahun dan jumlahnya yang fluktuatif
 - j. Belum terlaksananya Sistem Informasi Kesehatan Daerah yang terintegrasi dengan baik
 - k. Masih terdapat sarana Puskesmas Pembantu dan rumah dinas tenaga kesehatan dalam keadaan rusak

Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Sosial

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum adanya Perda tentang ketentraman dan ketertiban umum dan Perda tentang penggunaan alat pemadam api ringan (APAR)
- b. Belum terpenuhinya standar kompetensi anggota Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
- c. Sarana dan prasarana Satpol PP dan pemadam kebakaran belum sesuai standar

- **Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar Bidang Sosial**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Bantuan Sosial belum sepenuhnya tepat sasaran dikarenakan perkembangan sosial ekonomi masyarakat sangat dinamis.
- b. Masih terdapat masyarakat korban bencana yang belum menerima bantuan dengan semestinya.

- c. Belum tepat sasaran dalam Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).
- d. Kurangnya koordinasi dengan pihak-pihak terkait (OPD) untuk penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan.
- e. Belum terpenuhinya layanan dasar bagi Penyandang disabilitas, lansia dan anak terlantar.
- f. Meningkatnya penyandang penyakit sosial dan Orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Karo.
- g. Tingginya angka penyandang / pemakai Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS di Kab.Karo.
- h. Kurangnya keterampilan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) tentang penanganan bencana

- **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan data, terdapat kasus kekerasan tahun 2018 sebanyak 36 kasus dan tahun 2019 sebanyak 57 kasus.
- b. Masih minimnya tempat bermain ramah anak, yang terealisasi masih sebanyak 2 unit yang berada di kabanjahe dan taman mejuah-juah Berastagi.
- c. Adanya kecenderungan peningkatan kenakalan anak, dimana pada tahun 2017 dari 59 kasus terdapat 33 kasus kenakalan anak, tahun 2018 terdiri 36 kasus terdapat 28 kasus kenakalan anak terdiri 36 kasus terdapat 28 kasus kenakalan anak dan pada tahun 2019 terdiri 59 kasus terdapat 10 kasus kenakalan anak

- **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kurangnya jumlah personil ASN yang berkompeten di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karo yang sangat diperlukan untuk melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan untuk masyarakat se Kabupaten Karo.

- b. Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Karo masih rendah dan perlu ditingkatkan untuk mencapai target nasional yang telah ditetapkan.
- c. Kurangnya ketersediaan peralatan perekaman dan pencetakan KTP-Elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA) dan blangko Kartu Identitas Anak (KIA).
- d. Pelayanan Kependudukan sudah dituntut untuk menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dan Pemanfaatan data kependudukan melalui perjanjian kerjasama (PKS) sedangkan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum sepenuhnya menggunakan teknologi informasi.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar BidangPemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam bidang administrasi dan teknis. Khususnya dalam menyusun perencanaan pembangunan desa dan penyusunan laporan terkait pengelolaan dana desa;
- b. Masih rendahnya upaya penggalian dan pengembangan potensi desa dalam kaitannya terhadap peningkatan ekonomi desa;
- c. Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Berencana

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Sangat kurangnya tenaga penyuluh KB lapangan (hanya 9 orang tenaga yang tersedia untuk cakupan 17 kecamatan/269 desa)
- b. Desa-desa yang menjadi daerah cakupan sasaran program kampung merupakan desa dengan tingkat kesejahteraan yang rendah dan masih memiliki infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum yang sangat tidak memadai
- c. Adanya peningkatan cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmet need*) setiap tahunnya, pada tahun 2017

sebesar 10,42%, tahun 2018 meningkat menjadi 15% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 17,89%

- **Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan dan olahraga**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum terpenuhinya Sarana prasana olahraga (belum tersedianya Gedung Olahraga.
- b. Maraknya kejahatan remaja dan pemuda, tingginya kasus pengguna dan pengedar narkoba di Kab. Karo
- c. Masih minimnya entrepreneur dari pemuda serta Kurangnya Pelatihan Wirausaha yang menarik bagi Pemuda
- d. Masih kurangnya tenaga keolahragaan yang tersertifikasi
- e. Masih Kurangnya pembinaan atlet secara berkesinambungan dan Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat

- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Target Pustakawan yang dilatih belum tercapai, kondisi saat ini belum ada aparatur yang menjadi pustakawan sehingga pengelolaan dan pelayanan perpustakaan tidak maksimal
- b. Gedung perpustakaan belum memenuhi standar perpustakaan nasional dan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan begitu juga
- c. Menurunnya persentase jumlah kunjungan terhadap populasi yang harus dilayani, pada tahun 2018 sebesar 9,6% dan tahun 2019 menurun menjadi 8,2 hal ini bisa dikarenakan kurangnya sarana dan Prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.

- **Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Bidang Kearsipan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Tidak ada penambahan sarana dan prasarana tahun 2019, sehingga kondisi sarana dan prasarana arsip saat ini belum memenuhi standar.

- **Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat Daerah**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

-
- a. Masih minimnya pengetahuan Aparatus Sipil Negara terkait administrasi pembangunan.
 - b. Masih kurangnya penyegaran dan rekreasi bagi ASN dalam meningkatkan semangat kerja.
 - c. Program pembangunan yang dilaksanakan baik fisik maupun non fisik belum termonitoring dengan baik.
 - d. Belum disiplinnya Perangkat Daerah dalam menyampaikan laporan progre pembangunan.
 - e. Rendahnya nilai evaluasi Lakip Kabupaten Karo.
 - f. Masih belum lengkapnya data nama jalan di Kabupaten Karo.
 - g. Beberapa penulisan nama desa yang tidak sesuai dengan kode dan data wilayah yang diterbitkan oleh Kemendagri sehingga bermasalah dalam pencairan Dana Desa.
 - h. Belum ada regulasi yang mengatur tentang pemberian nama jalan, fasilitas umum dan pemberian nomor bangunan di Kab. Karo.
 - i. Beberapa unsur rupabumi di Kab. Karo belum memiliki nama yang jelas.
 - j. Minimnya tenaga ahli pengadaan barang dan jasa.
 - k. Minimnya keahlian dan pengetahuan yang dimiliki POKJA (Kelompok Kerja) Pengadaan Barang dan Jasa.
 - l. Belum adanya server khusus untuk aplikasi pengadaan barang dan jasa.
- **Unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Pelayanan Administrasi Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD belum optimal.
- **Unsur penunjang urusan pemerintahan Bidang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Masih kurangnya kompetensi PNS terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga diperlukan penambahan pengetahuan dan/atau penguasaan ketrampilan di bidang tugas yang terkait dengan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

-
- b. Pelaksanaan Diklat kepemimpinan dan Prajabatan masih tergantung terhadap pihak/lembaga lainnya seperti BPSDM Propinsi, Lembaga Administrasi Negara dll.
 - c. Kebijakan dan sistem informasi kepegawaian dari Pemerintah Pusat masih sering berubah sehingga sinkron dengan perencanaan kepegawaian di daerah.
 - d. Belum sepenuhnya syarat minimal diklat 20 jam/tahun terpenuhi oleh setiap Apratur Sipil Negara (ASN) sehingga berpengaruh pada kompetensi ASN.
 - e. Belum tersedianya Rencana Induk Kepegawaian sehingga menyulitkan pemetaan kebutuhan ASN dari beberapa aspek seperti kebutuhan pengembangan karir, kebutuhan diklat, kebutuhan jumlah ASN dll.
- **Unsur Pengawas Inspektorat Daerah**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan di lapangan
 - b. Ketersediaan SDM auditor belum proposional baik dari jumlah personil maupun kualifikasi jenjang auditor
 - c. Dalam melakukan audit kinerja dan keuangan, masih ada temuan karena kurangnya pemahaman OPD terhadap peraturan yang baru
- **Urusan Wajib Pekerjaan Umum**
- Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Kondisi jaringan jalan mantap dan jembatan dalam kondisi baik belum memenuhi harapan serta ketersebarannya yang belum merata;
 - b. Akses air minum belum mencapai 100%;
 - c. Akses sanitasi belum mencapai dari 100%;
 - d. Kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pekerjaan umum masih kurang;
 - e. Perlunya peningkatan luas wilayah irigasi yang dipelihara;
 - f. Masih banyak saluran drainase tidak berfungsi secara optimal.
 - g. Masih banyak gedung milik Pemerintah yang belum memenuhi standard.

- **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Masih terdapat kawasan perumahan dan permukiman kumuh;
- b. Masih terdapat rumah tidak layak huni;
- c. Kurangnya ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum;
- b. Belum tersedianya lahan untuk pembangunan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- **Urusan Wajib Penataan Ruang**

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan ruangdiarahkan untuk mewujudkan visi penataan ruang: yaitu ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Aman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas kehidupannya, nyaman untuk menjalankan aktivitas dalam suasana yang tenang dan damai, produktif sehingga proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien, dan berkelanjutan dalam mempertahankan kualitas lingkungan fisik untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo yang telah disusun sampai saat ini belum ditetapkan menjadi produk hukum;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penataan ruang masih kurang;
- c. Pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan ruang belum optimal;
- d. Masih kurangnya Ruang Terbuka Hijau.

- **Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum memadainya ketersediaan data dan informasi yang valid, akurat dan up to date sehingga kekuatan data dan informasi dalam memproyeksikan arah pembangunan kedepan masih lemah;
- b. Perangkat Daerah belum menyadari arti penting dokumen perencanaan sehingga tahapan dan proses perencanaan tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

- c. Masih minimnya daya dukung hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam proses perencanaan pembangunan;
- d. Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dalam merumuskan tindak lanjut atau perencanaan kedepan.

- **Urusan Wajib Perhubungan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum tersedianya Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor dan Sarana prasarananya
- b. Belum adanya norma/kebijakan regulasi terkait bidang perhubungan (perparkiran, tarif retribusi, penertiban, belum ditetapkan regulasi kelas jalan di Kabupaten Karo, dll)
- c. Belum tersedianya Terminal Type C
- d. Masih terdapat kemacetan di beberapa lokasi.

- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum optimalnya sarana dan prasarana pengendalian dan pengelolaan lingkungan;
- b. Kualitas dan kuantitas petugas laboratorium masih kurang;
- c. Regulasi tentang pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang belum lengkap;
- d. Kualitas lingkungan yang cenderung mengalami degradasi;
- e. Pelayanan persampahan belum menjangkau pada semua masyarakat perkotaan dan belum tersedianya TPA;
- f. Penanganan air limbah rumah tangga/ domestik belum dilakukan secara terpadu;
- g. Kesadaran masyarakat dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup masih kurang;
- h. Belum tersedianya data lahan yang memenuhi syarat untuk RTH.

- **Urusan Wajib Pertanian**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Sertifikasi tanah pemerintah daerah dan tanah hak milik masih rendah;
- b. Pengelolaan sistem informasi pertanian belum optimal;

- **Urusan Wajib Kebencanaan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Kurang optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan.
- b. Data terkait penanganan bencana belum akurat
- c. Masih ada regulasi yang belum dibangun yakni :
- d. Pembentukan Forum pengurangan resiko bencana
- e. Masih ada Dokumen Penanganan bencana yang belum disusun (Dokumen KRB per jenis bencana)
- f. Masih ada wilayah terdampak yang belum tertangani
- g. Kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana masih rendah
- h. Sarana prasarana penanggulangan bencana belum lengkap, contoh Gudang, Truk Evakuasi
- i. Belum tersedianya dana yang siap pakai untuk bencana yang terjadi secara tiba tiba.

- **Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya;
- b. Masih adanya daerah yang belum terjangkau sarana dan prasarana KB;

- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga kerja**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Perluasan lapangan kerja belum sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja;
- b. Kualitas dan Daya Saing Calon Tenaga Kerja Belum Sesuai Kebutuhan Pasar;
- c. Sarana Prasarana Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Belum Sesuai dengan Perkembangan Kebutuhan Pasar Kerja;
- d. Sistem Informasi Ketenagakerjaan Belum Merata;
- e. Akibat pandemi Covid-19 berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan jumlah pengangguran sebagai akibat dari menurunnya aktivitas produksi.

- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

-
- a. Masih rendahnya kualitas SDM pengurus koperasi dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi;
 - b. Masih rendahnya akses pasar bagi produk-produk UKM;
 - c. Belum optimalnya kemitraan pelaku Usaha Mikro dengan dunia usaha;
 - d. Inovasi produk belum mampu mengimbangi kebutuhan pasar.
 - e. Banyak produk yang belum memenuhi legalitas izin usaha;
 - f. Koperasi yang ada masih bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam.
 - g. Melemahnya kinerja sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akibat pembatasan pergerakan masyarakat.
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal.**
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Belum tersedianya regulasi pendukung untuk kemudahan berusaha bagi investor;
 - b. Kurangnya pembinaan dan pengawasan penanaman modal;
 - c. Belum tersedianya data dan peta potensi investasi yang memiliki kajian studi;
 - d. Kurangnya pemenuhan komitmen, pemahaman dan minat masyarakat/stakeholder terhadap perijinan;
 - e. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam menyampaikan laporan kegiatan penanaman modalnya;
- **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan**
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Atraksi di Objek Wisata yang belum menarik kunjungan wisatawan;
 - b. Masih Rendahnya Minat Masyarakat Mengikuti Sanggar Kebudayaan;
 - c. Belum adanya cagar budaya yang terdaftar.
- **Urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri**
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan sehingga masih diperlukan pemeliharaan dan peningkatan kerukunan hidup antar suku, ras dan agama yang berkelanjutan.

-
- b. SDM Pengurus Ormas, LSM dan OKP masih perlu untuk ditingkatkan.
 - c. Masih ditemukannya beberapa kasus terkait dengan penyakit masyarakat (PEKAT).
 - **Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
 - a. Belum optimalnya kompetensi aparatur pemerintah sehingga perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan menempatkan jabatan sesuai kompetensinya;
 - b. Belum optimalnya kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
 - c. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
 - d. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PAD belum memadai termasuk petugas pajak;
 - e. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
 - f. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD seperti ASB, SSH, SBU, HSPK, TPP berbasis *Grade* Kinerja;
 - g. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;
 - **Urusan Wajib Pangan**
Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :
 - a. Rendahnya Diversifikasi Pangan
 - b. Masih terdapat penggunaan bahan kimia pada tanaman pangan dan bahan tambahan pangan;
 - c. Pengelolaan lumbung pangan lokal belum optimal;
 - d. Kurangnya kesadaran akan mutu dan keamanan pangan.
 - e. Pemenuhan ketersediaan, pasokan dan stabilitas harga pangan pada masa pandemi covid-19;
 - f. Wabah covid-10 yang berkepanjangan dapat secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat, sehingga perlu penciptaan

◆—————◆

sumber-sumber pangan dengan harga relatif murah dan terjangkau.

- **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur pemerintahan desa khususnya dalam mengelola dana desa;
- b. Masih rendahnya upaya pengembangan potensi desa;
- c. Masih rendahnya pemeliharaan pasca pembangunan sarana dan prasarana desa.

- **Urusan Wajib Statistik**

Permasalahan yang dihadapi pada urusan wajib statistic yaitu : belum optimalnya ketersediaan data statistik sehingga perlu dukungan untuk ketersediaan data-data statistik.

- **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

Kemajuan dibidang komunikasi dan informatika telah mendorong munculnya globalisasi dengan berbagai perspektifnya. Beberapa peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika adalah Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Implementasi SPBE Belum berjalan dengan optimal sesuai Perpres 95 Tahun 20
- b. Tata Kelola SPBE belum berjalan
- c. Manajemen Satu Data Pemkab Karo belum berjalan dengan Optimal sesuai Perpres 95 2018 dan Perpres 36 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- d. Komunikasi dan Informasi Publik belum terlaksana dengan optimal.
- e. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi (Kominikasi data) belum memadai untuk Kec. Mardinding, Kec. Lau Baleng, Kec. Juhar, Kec. Kutabuluh, Kec. Tigabinanga (Desa Kemkem) Sebagian Kec Merdeka.
- f. Blank Spot di Kec. Mardinding, Kec. Lau Baleng, Kec. Juhar, Kec. Kutabuluh, Kec. Tigabinanga (Desa Kemkem) Sebagian Kec Merdeka.

- **Urusan Wajib Perpustakaan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Prasarana gedung dan bangunan belum memenuhi standarisasi perpustakaan nasional;
- b. Kurangnya sarana dan Prasarana dalam mendukung minat baca masyarakat.

Urusan Pemerintahan Pilihan

- **Urusan Pilihan Pertanian**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum optimalnya SDM Penyuluh Pertanian/Petani dan penerapan Teknologi pertanian.
- b. Prasarana dan Sarana Pertanian yang belum memadai .
 - Meliputi ketersediaan benih/bibit komoditi unggulan masih terbatas
 - Irigasi, Jalan Usaha Tani dan Alsintan masih terbatas.
 - Perlunya inseminasi buatan dan Peranakan Omole (PO) , teknologi peternakan vaksin rabies dan obat-obatan serta rumah potong hewan.

- **Urusan Pilihan Kehutanan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Terjadinya kerusakan sumber daya alam seperti hutan, tanah, dan sumber daya air akibat bencana alam Gunung Sinabung;
- b. Fungsi kelembagaan kelompok tani kehutanan belum optimal;
- c. Akses petani kehutanan terhadap sumber permodalan masih kurang;
- d. Luas hutan rakyat semakin berkurang akibat kegiatan perambahan hutan;
- e. Luas lahan kritis masih cukup banyak.

- **Urusan Pilihan Energi Dan Sumberdaya Mineral**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Di beberapa daerah terpencil masih terdapat rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN;
- b. Potensi energi baru dan terbarukan belum dimanfaatkan secara optimal.

Urusan Pilihan Pariwisata

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

-
- a. Kreativitas, inovasi dan kompetensi daya saing ODTW masih kurang;
 - b. Belum optimalnya peningkatan SDM Pariwisata yang berkualitas dan profesional;
 - c. Kolaborasi dan sinergitas *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata belum optimal;
 - d. Belum optimalnya promosi/pemasaran pariwisata
 - e. Sarana dan Prasarana objek wisata belum optimal;

- **Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Rendahnya produksi dan produktivitas ikan yang disebabkan oleh sumberdaya alam yang potensial untuk budidaya perikanan belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan;
- c. Kurangnya SDM Tenaga Penyuluh Perikanan;
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana operasional BBI Lokal;
- e. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan Pembudidaya Ikan dalam berbudidaya ikan.
- f. Kurangnya ketersediaan ikan di perairan daratan;

Urusan Pilihan Perdagangan

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Daya Saing Komoditi/Produk Pertanian di Pasar Nasional dan Global Masih Rendah;
- b. Kurangnya Promosi Komoditi/Produk Unggulan di tingkat Nasional dan Internasional;
- c. Perlindungan konsumen belum optimal
- d. Kondisi sarana dan prasarana pasar tradisional kurang memadai;
- e. Belum adanya peraturan daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah;
- f. Belum optimalnya pembinaan terhadap pedagang yang berada di lingkungan pasar.

- **Urusan Pilihan Perindustrian**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi yaitu :

- a. Belum Adanya Dokumen Rencana Pengembangan Industri Kabupaten;
- b. Belum optimalnya fasilitas sentra IKM Kab. Karo;
- c. Belum optimalnya kualitas produk IKM yang kreatif dan inovatif;
- d. Belum adanya data IKM Kabupaten Karo pada aplikasi SIINAS (Sistem Informasi Industri Nasional).

- **Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan**

- a. Potensi PAD belum tergali secara optimal;
- b. Sarana dan Prasarana Pendukung Pemungutan PAD belum memadai termasuk petugas pajak;
- c. Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan dan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran, pengelolaan APBD;
- d. Belum terintegrasi alur kerja dan dokumen internal dan eksternal (dokumen data piutang);
- e. Masih diperlukan pengembangan dokumen pendukung penganggaran dan pelaksanaan APBD;
- f. Banyak aset daerah yang dokumen pendukung (alas hak) sehingga proses sertifikat terhambat;

Isu Strategis Kabupaten Karo

Isu strategis pembangunan daerah adalah seluruh sumber kekuatan daerah, baik yang efektif maupun potensial yang dimiliki dan didayagunakan dalam membangun Kabupaten Karo. Pembangunan daerah Kabupaten Karo ke depan diharapkan mampu berkembang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana potensi yang terkandung didalamnya. Berdasarkan pemetaan permasalahan diatas ditetapkan Isu Strategis Kabupaten Karo melalui desk, diskusi dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Perangkat Daerah yang telah dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum tuntasnya reformasi birokrasi di Kabupaten Karo bahkan terkesan melambat yang ditandai dari tidak adanya nilai Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2020, sehingga diperlukan perhatian khusus pada periode berikutnya. Walaupun Pemerintah Kabupaten Karo mendapatkan Opini Wajar Tanpa

Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 dan juga mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,25 tetapi nilai SAKIP yang menunjukkan tingkat Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karo masih pada level C.

2. Birokrasi yang handal dan berdaya saing harus memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga dalam setiap pelaksanaan administrasi pemerintahan memiliki tingkat pengendalian resiko yang tinggi dan diukur melalui tingkat maturitas SPIP. Pada tahun 2020 tingkat maturitas SPIP Kabupaten Karo masih pada level 2 sehingga perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
3. Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahunnya diukur melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Pemerintah Kabupaten Karo masih mendapatkan nilai 2,78 sehingga disimpulkan masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Kemandirian suatu daerah yang juga menunjukkan daya saing adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah yang mampu menopang pembangunan di daerah tanpa terlalu tergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah atasan. Pada tahun 2020 rasio Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan adalah 7,58% sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara optimal.
5. Dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Karo berada pada indeks 74,53. Nilai ini dinilai sudah baik dibandingkan daerah di kawasan Sumatera Utara. Namun jika dilihat kedalamnya masih banyak yang perlu dibenahi seperti bidang Pendidikan dimana Pemerintah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan Pendidikan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di Standar sarana Prasarana dan Standar Tenaga Kependidikan. Termasuk didalamnya adalah penguasaan IT oleh tenaga kependidikan sehingga diperlukan perhatian secara khusus kedepannya. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan pelestarian budaya daerah.
6. Di bidang kesehatan, jika dilihat dari Angka Harapan Hidup maka masyarakat Karo juga masih dalam kategori baik yaitu di angka 71,14.

Akan tetapi, jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Karo masih rendah sehingga perlu dilakukan pembenahan atau peningkatan kualitas kesehatan.

7. Laju pertumbuhan penduduk di angka 1,89 pada tahun 2020 perlu menjadi perhatian karena meningkatkan jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menjadi masalah besar dikemudian hari.
8. Pada saat ini 68,21 % penduduk Kabupaten Karo telah tertib administrasi kependudukan. Angka tersebut tentunya masih sangat rendah karena tertib administrasi kependudukan sangat penting untuk masyarakat itu sendiri juga bagi pemerintah dalam mengelola data kependudukan untuk kepentingan pembangunan.
9. Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo dipimpin oleh wanita, sama halnya juga di lembaga DPRD. Namun, dalam hal pembangunan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan seperti fasilitas publik dan lain-lain. Hal ini karena walaupun Pemerintah Kabupaten Karo telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya namun masih dalam predikat pratama yang artinya masih perlu pembenahan lebih lanjut.
10. Setiap tahun masih terdapat kekerasan pada anak sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang salah satunya adalah memperluas jejaring Perlindungan Anak pada setiap Desa.
11. Ketentraman dan Ketertiban serta Permasalahan Narkoba, Judi dan Penyakit Masyarakat lainnya masih menjadi ancaman bagi pembangunan manusia di Kabupaten Karo ditandai dari jumlah narapidana yang mayoritas adalah kasus narkoba.
12. Pada periode RPJMD sebelumnya ditargetkan angka kemiskinan Kabupaten Karo turun sampai dengan 6% tetapi pada tahun 2021 angka kemiskinan berada pada 8,7% walaupun sempat menyentuh angka 8,23%. Sehingga pada periode RPJMD ini strategi penanggulangan kemiskinan masih perlu perhatian serius dan salah satunya adalah pembenahan masalah data kemiskinan.
13. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa produktif lainnya. Jika dilihat dari kontribusi sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka setiap

tahun lapangan usaha yang memberi peran dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor tersebut juga merupakan sektor dominan yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Karo. Untuk itu, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya lokal perlu terus ditingkatkan sehingga membentuk struktur ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

14. Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan. Disamping itu masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Karo.
15. Dalam bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen, hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian sehingga tidak sulit mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran perlu terus ditekan dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatannya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi Kabupaten Karo yang lebih baik.
16. Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman harus didukung tingkat pelayanan persampahan, partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengolahan sampah secara sanitary landfill, kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.

-
17. Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi belum optimal.
 18. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman belum optimal
 19. Fasilitas Keselamatan dan Kenyamanan Lalu Lintas belum optimal
 20. Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi
 21. Risiko bencana masih tinggi

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian suatu daerah merupakan bagian integral dari sistem perekonomian nasional dan regional, yang saling berpengaruh antara satu dan lainnya. Perubahan perekonomian nasional akan berdampak pada perubahan perekonomian regional dan daerah atau sebaliknya. Perekonomian Kabupaten Karo yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia perkembangannya sangat dinamis menyesuaikan dengan apa yang terjadi baik di daerah, regional maupun nasional, bahkan internasional.

Arah kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah, serta permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana. Arah atau kondisi perekonomian nasional dan Provinsi Sumatera Utara di bidang ekonomi yang bersumber dari RKP (Nasional) dan RPJMN serta RKPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMD Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 memuat arah kebijakan nasional tahunan

demikian menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pembangunan pada tahun 2020 dihadapkan pada tantangan yang berat dengan adanya pandemi Covid-19. Perekonomian mengalami kontraksi, pengangguran terbuka dan angka kemiskinan juga mengalami peningkatan. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020 juga menunjukkan bahwa realisasi Prioritas Nasional (PN), terkait kinerja nilai tambah sektor riil, industrialisasi dan kesempatan kerja masih belum menunjukkan hasil yang optimal. Pemerintah sejak tahun 2020 telah melakukan berbagai upaya pengendalian Covid-19 melalui kebijakan pembatasan sosial, penguatan sistem *testing-tracing-treatment*, dan pemberian stimulus bagi masyarakat terdampak. Dalam mencapai *herd immunity*, pada tahun 2021 telah dimulai pemberian vaksin secara bertahap. Dampak pandemi Covid-19 masih mungkin berlanjut hingga tahun 2022, karena itu, berbagai bentuk intervensi pemerintah baik secara promotif, preventif, maupun kuratif, termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity* perlu dilanjutkan. Pandemi Covid-19 juga perlu dipandang sebagai momentum untuk penguatan sistem kesehatan nasional dengan meningkatkan keamanan dan ketahanan kesehatan.

Tahun 2022 akan menjadi tahun kunci bagi pemulihan ekonomi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, menjadi Negara berpendapatan tinggi sebelum tahun 2045. Pemulihan ekonomi diarahkan untuk memulihkan daya beli masyarakat dan dunia usaha untuk meningkatkan permintaan agregat. Upaya pemulihan juga dilakukan melalui diversifikasi ekonomi untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor-sektor yang terkena dampak besar dari covid-19 dan mendorong sektor lain yang berpotensi tumbuh lebih cepat. Di samping pemulihan ekonomi, peningkatan daya saing juga akan terus dilakukan melalui reformasi struktural. Agenda reformasi struktural akan mempercepat pemulihan dan membentuk perekonomian yang lebih kuat, inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan pemerintah diarahkan pada perbaikan secara fundamental dan menyeluruh untuk menyediakan fondasi yang kokoh

bagi kebangkitan ekonomi Indonesia. Peningkatan pertumbuhan ekonomi diharapkan bersumber dari investasi, ekspor dan industri pengolahan. Sektor jasa yang terkena dampak besar akibat pandemi Covid-19 akan mengalami akselerasi.

Mengacu kepada RPJMN Tahun 2020–2024, pembangunan nasional dilakukan dengan memperhatikan tujuh Agenda Pembangunan yang tetap dipertahankan menjadi PN pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengoptimalkan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun 2022 adalah (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (7) memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema RKP Tahun 2022 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Tahun 2020, kondisi pandemi Covid-19, strategi untuk keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah, serta konsistensi dengan arahan RPJMN Tahun 2020–2024. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 mengusung tema **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. Pembangunan nasional diarahkan pada 10 (sepuluh) fokus pembangunan yang meliputi:

1. Industri
2. Pariwisata
3. Ketahanan Pangan
4. UMKM
5. Infrastruktur
6. Transformasi Digital
7. Pembangunan Rendah Karbon
8. Reformasi Perlindungan Sosial
9. Reformasi Pendidikan dan Keterampilan
10. Reformasi Kesehatan

Secara rinci 10 (sepuluh) fokus pembangunan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Fokus pembangunan industri dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Industri pengolahan Non Migas 5,8-6,5%
 - b. Kontribusi PDB Industri Pengolahan Non Migas 17,97-17,99%
 - c. Nilai realisasi PMA dan PMDN Industri Pengolahan Rp 352,5
2. Fokus pembangunan pariwisata dilakukan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Jumlah Wisatawan Mancanegara 8,5-10,5 juta kunjungan
 - b. Peringkat Travel and Tourism Competitiveness Index 36-39
3. Fokus pembangunan ketahanan pangan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Skor Pola Pangan Harapan 92,8
 - b. Nilai Tukar Petani 102-104
 - c. Nilai Tukar Nelayan 102-105
 - d. Ketersediaan Beras 44 juta ton
 - e. Ketersediaan protein hewani 2,7 juta ton
 - f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian Rp. 54,3 juta/org/thn
4. Fokus pembangunan UMKM dilakukan untuk meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi nasional yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan Wirausaha 3%
 - b. Kontribusi UMKM terhadap PDB 63%
 - c. UMKM yang Mengakses Kredit Lembaga Keuangan Formal 20,9%
5. Fokus pembangunan infrastruktur dilakukan untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pembangunan 4.600 unit Rumah Susun, Bantuan Perumahan Swadaya 118.650 unit, dan Penyaluran FLPP sebanyak 200.000 unit.
 - b. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu: 10 lokasi
 - c. Panjang jalan tol baru: 400 km
 - d. Penambahan Debit Air Baku 5 m³/s
 - e. Pembangunan Akses Air Minum Perpipaan 2.000.000 SR

- f. Pembangunan akses sanitasi aman (sistem terpusat dan sistem setempat) 2.000.000 SR
 - g. Rehabilitasi Jaringan Irigasi 250 ribu Ha
 - h. Konsumsi listrik per kapita 1.268 kWh
6. Fokus transformasi digital dilakukan untuk Meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Masyarakat pengguna internet 79,20%
 - b. Kecamatan yang terjangkau Infrastruktur Jaringan Serat Optik kumulatif 42,85%
 - c. 72.500 SDM talenta digital
 - d. 12,4 juta *local champion* literasi digital
 - e. 27 Organisasi Tim Cepat Tanggap (CSIRT) yang Diregistrasi
 - f. 100 Lulusan Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber
7. Fokus pembangunan rendah karbon dilakukan untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK), yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Penurunan emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 26,87%
 - b. Penurunan intensitas Emisi GRK Nasional terhadap *Baseline* 21,54%
 - c. Porsi Bauran EBT dalam Energi Nasional 15,7%
 - d. Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT kumulatif 13,9 GW
8. Fokus reformasi perlindungan sosial dilakukan untuk mempercepat reformasi perlindungan sosial, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Tingkat kemiskinan 8,5-9%
 - b. Penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial 87%
 - c. Rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial 60%
 - d. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terbawah 110.7 Juta Penduduk
9. Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55%
 - b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6%
 - c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%

- d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasias Teknologi (PPBT)
 - e. 900 Paten Domestik
10. Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan *Covid-19* dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian:
- a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4%
 - b. Insidensi TB 231/100.000 penduduk
 - c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91%
 - d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71%
 - e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%
 - f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%
 - g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%
 - h. Sistem surveilans: terpadu, real-time, berbasis lab

Sementara itu, sasaran pembangunan RKP yang harus dicapai tahun 2022, antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0 %
2. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 6.24 - 5.52 %
3. Rasio Gini sebesar 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 26,8 – 27,1 %
6. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN sebesar 102-105
8. Tingkat Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,0 %

2. Arah Kebijakan Bidang Ekonomi Provinsi Sumatera Utara.

Kondisi perekonomian Nasional tersebut tentunya mempengaruhi perkembangan perekonomian di daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Utara. Sejalan dengan hal tersebut Tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah “**Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi Covid-19, menuju Sumatera Utara Bermartabat**”, dengan fokus pembangunan sebagai berikut:

- a. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha
- b. Peningkatan kualitas pendidikan
- c. Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat produktivitas
- d. Peningkatan kangkauan layanan kesehatan
- e. Peningkatan nilai tambah sektor agraris
- f. Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata
- g. Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik
- h. Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Arah kebijakan pengembangan wilayah Sumatera Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Mempercepat pemulihan industri, pariwisata, dan investasi pasca Pandemi Covid-19.
- b. Mewujudkan wilayah Sumatera menjadi pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional serta menjadi lumbung energi nasional dan lumbung pangan nasional.
- c. Mengoptimalkan pengembangan industri hilir berbasis komoditas unggulan, khususnya di wilayah Pesisir Timur Sumatera.
- d. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah Pesisir Barat Sumatera.
- e. Memperkuat kapasitas mitigasi dan penanganan bencana.

Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera Utara 2022

Pemantapan Pertumbuhan Investasi Ekonomi Skala Nasional dan Global pada Koridor Pertumbuhan

1. Mendorong operasionalisasi dan peningkatan investasi dengan memantapkan pasokan energi dan mengoptimalkan paket-paket insentif fiskal dan nonfiskal sesuai dengan potensi/tema pengembangan kawasan.
2. Meningkatkan kemudahan perizinan investasi dan perluasan kerja sama antardaerah dalam peningkatan daya saing daerah antara lain melalui forum kerja sama regional Wilayah Sumatera dan kerja sama regional antarnegara (IMT-GT)
3. Meningkatkan konektivitas antar kawasan pengembangan, kota-kota utama, dan pusat pelayanan untuk meningkatkan jangkauan layanan dan distribusi.

4. Meningkatkan upaya pemulihan ekonomi nasional dan pembentukan budaya hidup sehat menanggapi pandemi covid-19.

Berdasarkan realisasi capaian indikator makro tahun 2019 dan 2020 maka dapat diproyeksikan atau ditargetkan capaian indikator makro tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Target Indikator Makro
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

No	Indikator	Satuan					Target
			2019		2020		
			TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	71,12	71,74	71,67	71,77	72,57
2	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,63	8,43	8,75	8,40
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,5	5,41	5,45	6,91	6,72
4	Indeks Gini	Poin	0,325	0,317	0,32	0,316	0,311
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5.3	5,22	5.4	-1,07	5,20
6	Inflasi	Persen	2,95	2,33	2,9	1,96	3,00
7	PDRB Perkapita	Juta	55	37,05	56	36,31	39,18

3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Karo

Kondisi perekonomian daerah Kabupaten Karo dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi daerah, antara lain sebagai berikut:

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk tahun 2016-2020 cenderung meningkat setiap tahunnya, yaitu dari Rp12.494,87 miliar pada tahun 2016 terus meningkat hingga menjadi Rp14.261,47 miliar pada tahun 2020. Secara absolut dari tahun 2016 sampai dengan 2020 terdapat kenaikan nilai PDRB-ADHK Kabupaten Karo sebesar Rp 1.766,6 miliar. Terdapat 3 (Tiga) lapangan usaha yang memberi peran dominan terhadap PDRB ADHK tahun 2020 yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Perkembangan PDRB ADHB juga memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan PDRB ADHK. Berdasarkan harga berlaku, nilai PDRB Kabupaten Karo pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan perkembangan yang positif, yaitu pada tahun 2016 sebesar Rp 16.782,42 miliar terus meningkat hingga tahun 2020 menjadi sebesar Rp 20.974,57 miliar. Dalam kurun waktu 5 (Lima) tahun terjadi peningkatan sebesar Rp 4.192,15 miliar.

Kontribusi lapangan usaha utama terhadap PDRB ADHB sama dengan PDRB ADHK mencakup 3 (Tiga) sektor yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dan konstruksi.

Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dalam 5 (Lima) tahun terakhir laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018 perekonomian Kabupaten Karo tumbuh melambat jika dibandingkan dari tahun sebelumnya hal ini antara lain diakibatkan oleh produksi tanaman hortikultura tahunan mengalami pertumbuhan yang melambat. Beberapa komoditi yang mengalami penurunan produksi pada tahun 2018 antara lain adalah belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk siam, mangga, manggis, markisa, pepaya dan pisang. Komoditi dimaksud bukanlah merupakan komoditi yang potensial di Kabupaten Karo. Selain itu, minat petani untuk berbudidaya komoditi tersebut sangat minim, petani cenderung beralih menanam komoditi lain yang mereka anggap lebih menguntungkan sehingga produksi komoditi tersebut setiap tahun mengalami penurunan.

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,60 persen, mengalami akselerasi jika dibandingkan pertumbuhan tahun 2018 yang tumbuh sebesar 4,55 persen. Akselerasi belum meningkat secara signifikan. Semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang positif. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu lapangan usaha industri pengolahan, Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, disusul oleh penyediaan akomodasi dan makan minum. Selanjutnya pada tahun 2020, perekonomian Kabupaten Karo mengalami kontraksi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB berkontraksi minus 0.80 persen, penurunan pertumbuhan ini akibat pandemi *Covid-19* sehingga mengakibatkan penurunan yang signifikan terhadap aktivitas ekonomi, hal ini berpengaruh terhadap permintaan dan harga komoditas sehingga merubah trend pertumbuhan ekonomi. Hampir semua lapangan usaha mencatat pertumbuhan yang berkontraksi, namun dari 17 lapangan usaha ada 5 lapangan usaha dengan pertumbuhan positif yaitu lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 4,70 persen,

pengadaan listrik dan gas sebesar 3,81 persen, pengadaan air, pengelola sampah, limbah sebesar 1,22 persen dan real estate sebesar 1,08 persen dan jasa pendidikan 0,02 sedangkan 5 lapangan usaha dengan terkontraksi terdalam adalah lapangan usaha pertambangan penggalian minus 0,7 persen, kontruksi minus 4,04 persen, jasa perusahaan minus sebesar 3,57 persen, transportasi dan pergudangan minus sebesar 3,44 persen dan industry pengolahan minus sebesar 2,76 persen.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo memiliki pola pertumbuhan yang tidak sama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo berakselerasi pada tahun 2016 hingga tahun 2017 dan kembali melambat pada tahun 2018, hingga berakselerasi kembali pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami kontraksi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara berakselerasi pada tahun 2016 dan kembali melambat pada tahun 2017, berakselerasi kembali pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo tercatat pada tahun 2020 sebesar minus 0,8 persen berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara sebesar minus 1,07 persen dan laju pertumbuhan ekonomi nasional sebesar minus 2,07 persen. Jika dicermati dari pola historisnya, pada periode PDRB tahun 2016-2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo dibanding Provinsi dan Nasional cenderung fluktuatif.

PDRB per Kapita Kabupaten Karo

PDRB perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB perkapita dapat digunakan sebagai barometer bagi tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun data tersebut belum dapat sepenuhnya digunakan langsung dalam pengukuran pemerataan pendapatan.

PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Karo atas dasar harga berlaku pada tahun 2016 sebesar Rp42.179.900 dan meningkat menjadi Rp49.703.130 pada tahun 2020 atau tumbuh sebesar 17,84 persen dalam lima tahun terakhir. Sementara itu, jika dilihat dari perhitungan atas dasar harga konstan 2010, maka selama periode

2016-2020 juga terjadi peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB Perkapita Kabupaten Karo atas dasar harga konstan mencapai Rp33.795.190, mengalami kontraksi dari tahun sebelumnya akibat pandemi *Covid-19*. Pertumbuhannya rata-rata sebesar 2,10 persen dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Gambaran PDRB perkapita tersebut dapat diartikan bahwa tingkat kemakmuran masyarakat periode tahun 2016 sampai 2020 berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan cenderung meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara riil terjadi peningkatan kemampuan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Kabupaten Karo. Selanjutnya peningkatan PDRB Kabupaten Karo harus dibarengi dengan pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Indeks Gini

Koefisien Gini (Gini Ratio) merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Pada Tahun 2018 koefisien gini Kabupaten Karo mencapai sebesar 0,268, tetap dibandingkan capaian pada tahun 2017 sebesar 0,268. Hal ini dapat diartikan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Karo berada pada kategori rendah. Untuk itu pemerataan pembangunan perlu terus ditingkatkan dengan fokus pembangunan pada wilayah yang relatif tertinggal.

Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kabupaten Karo tahun 2015-2017 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2015 sebesar 90,32%, tahun 2016 menurun menjadi 90,19%, pada tahun 2017 menurun menjadi 90,03%. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat menjadi 91,31%, tahun 2019 kembali meningkat menjadi 91,77% dan tahun 2020 menurun menjadi 91,30%. Penurunan angka tersebut diakibatkan adanya peningkatan persentase penduduk miskin, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi *Covid-19* yang berdampak menurunnya derajat kesejahteraan masyarakat sehingga jumlah penduduk miskin meningkat.

Sedangkan untuk penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dapat dilihat dari persentase penduduk miskin.

Perkembangan persentase penduduk miskin di Kabupaten Karo dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan dan kenaikan, 2015-2017 persentase kemiskinan mengalami kenaikan dimana tahun 2015 sebesar 9,68% meningkat menjadi 9,81% tahun 2016 kemudian kembali meningkat menjadi 9,97% tahun 2017. Tetapi pada tahun 2018 menurun menjadi 8,69% dan tahun 2019 terus menurun menjadi 8,23% sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,70%. Peningkatan persentase kemiskinan terjadi akibat dampak bencana erupsi Gunung Sinabung yang merusak lahan dan tanaman pertanian sehingga produksi pertanian menjadi menurun yang berdampak pada penurunan pendapatan dan daya beli masyarakat serta dampak pandemi *Covid-19*.

Seiring dengan penurunan dan peningkatan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin juga mengalami perubahan. Pada tahun 2019 sebesar 34.080 jiwa kemudian meningkat pada tahun 2020 karena menurunnya persentase kemiskinan menjadi 36.570 jiwa. Periode tahun 2016-2020 jumlah penduduk miskin tertinggi terdapat pada tahun 2017 sebanyak 40.020 jiwa.

Berdasarkan distribusi penduduk, bahwa daerah perkotaan memiliki distribusi penduduk yang paling tinggi. Hal ini juga menyebabkan penduduk miskin paling banyak di daerah perkotaan, seperti Kabanjahe dan Berastagi. Sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan paling tinggi berada di Kecamatan Mardinding yang merupakan kecamatan dengan jarak paling jauh dari ibu kota kabupaten. Selain itu daerah ini juga memiliki kondisi topografi yang hanya cocok untuk tanaman pangan dan perkebunan, dimana tanaman tersebut dapat berproduksi hanya sebanyak 2 (Dua) kali dalam setahun sehingga produktivitasnya lebih rendah dari daerah tanaman hortikultura.

Indeks Pembangunan Manusia

IPM Kabupaten Karo Tahun 2016-2020 meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 sebesar 73,51, dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 73,53, pada tahun 2018 meningkat menjadi 73,91, pada tahun 2019 meningkat menjadi 74,25 dan tahun 2020 meningkat menjadi 74,43. Hal ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia

di Kabupaten Karo mengalami peningkatan baik dari pengetahuan, kesehatan maupun standar hidup layak.

Jika dilihat posisi relatif IPM Kabupaten Karo dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Utara, posisi IPM Kabupaten Karo berada di urutan ke 8 (delapan) terbaik diantara 33 (Tiga puluh tiga) kabupaten/kota di Sumatera Utara. IPM paling tinggi berada di Kota Medan sebesar 80,98, sedangkan paling rendah berada di Kabupaten Nias Selatan sebesar 61,51. Jika dibandingkan dengan daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Karo, adapun IPM yang berada di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Deli Serdang mencapai 75,44. Sedangkan daerah sekawasan dataran tinggi yang memiliki IPM di atas Kabupaten Karo yaitu Kabupaten Toba yang memiliki IPM sebesar 75,16.

IPM Kabupaten Karo sebesar 75,16 berada di atas capaian IPM Provinsi Sumatera Utara dengan angka IPM sebesar 71,77. IPM Kabupaten Karo tahun 2020 sebesar 75,16 berada pada IPM kategori sedang dan untuk menuju IPM tinggi di atas 80% pemerintah perlu kerja keras dan membuat strategi dalam meningkatkan kualitas 3 (tiga) dimensi dasar komponen IPM yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, standar hidup layak.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 bertepatan dengan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 yang belum ditetapkan sehingga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 640/16/SJ tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, mengamanatkan bahwa dalam rangka efektivitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP 2022.

Sesuai dengan hal tersebut, gambaran arah kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPJPD Kabupaten Karo tahun 2005-2025 antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan.
2. Penurunan Indeks Resiko Bencana Kabupaten Karo.
3. Mengimplementasikan arah kebijakan *Grand Design* Kependudukan Kabupaten Karo tahun 2019 - 2043.
4. Peningkatan taraf hidup masyarakat dan pengurangan angka kemiskinan.
5. Mempertahankan predikat kabupaten peduli HAM dengan peningkatan nilai yang masih belum maksimal.
6. Peningkatan kualitas pendidikan.
7. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
8. Meningkatkan Daya Saing Sektor Unggulan Daerah.
9. Meningkatkan Pembinaan Olahraga dan Kepemudaan, Sarana dan Prasarana dan Partisipasi pemuda dalam Pembangunan.
10. Peningkatan akses air minum dan sanitasi.
11. Peningkatan infrastuktur irigasi.
12. Penyusunan Perda Keruangan.
13. Peningkatan sistem drainase yang terintegrasi.
14. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
15. Peningkatan dan pencegahan permukiman kumuh.
16. Penataan dan Pengelolaan TPU.
17. Meningkatkan Peluang Kesempatan Kerja.
18. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan melalui peningkatan kualitas SDM serta pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.
19. Meningkatkan Kualitas Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan yang Berkelanjutan
20. Meningkatkan ketersediaan lahan untuk fasilitas pemerintah dan umum.
21. Meningkatkan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
22. Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan.
23. Peningkatan kompetensi Perangkat Desa.
24. Peningkatan Pendapatan Asli Desa.
25. Peningkatan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

26. Meningkatkan Penggunaan SPBE.
27. Meningkatkan akses layanan telepon dan internet.
28. Meningkatkan kualitas dan kuantitas investasi
29. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Perpustakaan serta Pelayanan Perpustakaan.
30. Peningkatan Kualitas Pengelolaan Kearsipan.
31. Peningkatan Mitigasi bencana lingkungan
32. Peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
33. Meningkatkan Kualitas Perdagangan.
34. Meningkatkan produksi Perikanan.
35. Penyediaan dokumen perencanaan pembangunan.
36. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
37. Meningkatkan Birokrasi yang Unggul dan Inovatif.
38. Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan.
39. Mengembangkan ekosistem inovasi.
40. Pembangunan ruas jalan baru.

Selanjutnya, sesuai dengan Visi misi kepala daerah terpilih dapat dirangkum sektor-sektor yang menjadi perhatian kedepan antara lain : Tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance), Pengembangan sumber daya manusia, sektor pertanian, perikanan, peternakan, agroindustri, pariwisata, olahraga, investasi, ekonomi kreatif, koperasi dan UMKM, pemerataan dan keseimbangan pembangunan, kualitas layanan pendidikan, kualitas layanan kesehatan, peningkatan PAD. Arah kebijakan terkait ekonomi yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Karo tahun 2021-2026 yang mempedomani visi dan Misi Bupati terpilih untuk tahun 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian/perikanan/ serta sektor-sektor unggulan lainnya berbasis potensi lokal;
2. Meningkatkan minat/keterampilan petani dalam Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu dan penerapan GAP secara berkelanjutan serta meningkatkan minat generasi muda pertanian;

3. Meningkatkan industri pengolahan hasil pertanian dan industri potensial lainnya yang berbasis agro;
4. Meningkatkan kompetensi /kapasitas pelaku, standarisasi dan legalitas/sertifikasi produk, pemasaran produk dan pemanfaatan teknologi bagi IKM, UMKM serta pemberdayaan koperasi aktif;
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan, perlindungan konsumen dan peningkatan kerjasama perdagangan dengan daerah lain;
6. Pembentukan BUMD/Perusda berbasis potensi lokal;
7. Pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif dan pemberian apresiasi bagi pelaku ekonomi kreatif;
8. Meningkatkan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan dan penguatan cadangan, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan diversifikasi pangan;
9. Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata dan pengembangan destinasi wisata potensial yang berkelanjutan, peningkatan kualitas dan kuantitas promosi/pemasaran, peningkatan Sinergitas/kolaborasi antarsektor/stakeholder pembangunan pariwisata, peningkatan SDM Pariwisata;
10. Penetapan legalitas budaya daerah, peningkatan SDM sektor budaya, peningkatan sarana dan prasarana pelestarian seni budaya serta pemanfaatan potensi seni budaya untuk mendukung pariwisata;
11. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelestarian atas budaya benda dan tak benda;
12. Peningkatan keterampilan/kompetensi masyarakat pencari kerja yang kreatif, inovatif dan produktif serta penyediaan informasi pasar kerja;
13. Penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan prosedur perijinan investasi dan usaha, pengembangan layanan perijinan bagi investor dan pengusaha, peningkatan akses pasar/promosi dan penyediaan peta peluang investasi daerah;
14. Mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber PAD, menggali serta mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dan sah, memantapkan sistem

- dan prosedur administrasi dalam pengelolaan PAD, mengoptimalkan evaluasi dan revisi secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah terkait PAD;
15. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi;
 16. Meningkatkan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman;
 17. Meningkatkan fasilitas keselamatan dan kenyamanan jalan;
 18. Meningkatkan pengelolaan, perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 19. Meningkatkan infrastruktur teknologi, informasi dan komunikasi;
 20. Menurunkan risiko bencana.

Perekonomian Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal Kabupaten Karo dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Karo sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 dalam konteks makro diharapkan masih mampu berkembang dan bertumbuh dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

Tantangan ke depan akan terus berlanjut, Pemulihan ekonomi akibat pandemic *Covid-19*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis, Meningkatkan pemerataan pembangunan ekonomi antar wilayah, meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif dan konstruktif, menyediakan infrastruktur yang memadai dan berkualitas, meningkatkan daya saing produk dan sumber daya manusia, melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan efisiensi kinerja ekonomi, meningkatkan peran lembaga pendidikan, dunia usaha dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi, menyediakan lapangan kerja bagi usia produktif dan

penanganan bencana yang lebih komprehensif merupakan hal-hal yang terus mendapat perhatian dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Karo merupakan daerah yang ditopang oleh sektor pertanian dan perdagangan, Sektor pertanian Kabupaten Karo didominasi oleh subsektor tanaman pangan, tanaman perkebunan dan hortikultura. Kabupaten Karo menjadi salah satu sentra komoditas subsektor tersebut di Sumatera Utara sehingga subsektor tersebut diharapkan akan terus mendapat perhatian pemerintah Kabupaten Karo melalui pemanfaatan teknologi pertanian, peningkatan SDM petani dan intensifikasi lahan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian, namun tantangan pembatasan aktivitas dapat memicu produk pertanian terhambat untuk dipasarkan yang mengakibatkan harga jual di tingkat petani.

Sesuai klasifikasi dari Bank Indonesia, jika dilihat dari ketimpangan antar wilayah di Sumatera Utara Mayoritas kabupaten/kota di Sumut masih berada dalam kategori daerah tertinggal dan daerah maju tapi tertekan, Kabupaten Karo termasuk di dalam daerah berkembang cepat. Untuk mengurangi ketimpangan ekonomi tersebut perlu terus dilakukan percepatan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki.

Dari sisi Sumber Daya Manusia, IPM Kabupaten Karo berada pada kategori tinggi namun komponen angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah masih perlu ditingkatkan untuk mendorong peningkatan IPM tersebut. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Karo relatif tinggi dan diikuti TPT yang rendah hal ini diperkirakan karena serapan tenaga kerja mayoritas bekerja di sektor pertanian, sehingga tidak menuntut latar belakang pendidikan tinggi dan bersifat informal. Untuk itu diperlukan peningkatan kualitas mutu SDM dengan jenjang yang lebih tinggi serta mengupayakan meningkatnya industri di daerah dengan kebutuhan skill yang tinggi. Disamping itu juga perlu dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pemerataan kualitas pendidikan serta pemberian keterampilan bagi anak didik maupun masyarakat miskin.

Terus mendorong investasi di Kabupaten Karo sebagai upaya untuk meningkatkan peran terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja maka diperlukan perbaikan iklim investasi secara berkesinambungan dimulai dari perbaikan infrastruktur, birokrasi dan koordinasi.

Pembangunan insfrastruktur juga mengalami pukulan akibat pandemi Covid 19. Hampir semua pembangunan insfrastruktur yang direncanakan dilaksanakan tahun 2020 terpaksa tertunda akibat realokasi anggaran untuk penanganan Covid 19. Oleh karenanya pada tahun 2022 pembangunan infrastruktur dimaksud harus tetap dipacu untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan juga untuk meningkatkan aksesibilitas barang dan jasa ke sentra produksi dan juga ke daerah wisata. Disisi lain hasil survey Bank Indonesia juga mengidentifikasi adanya keluhan wisatawan terhadap buruknya infrastruktur di Sumatera utara. Kondisi ini juga idealnya direspon oleh Kabupaten Karo sebagai salah satu destinasi pariwisata di Sumut untuk melakukan optimalisasi kualitas infrastruktur daerah.

Penilaian BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menjadi salah satu tolak ukur dalam kinerja birokrasi sehingga hal ini juga perlu untuk terus diperhatikan, sehingga dengan birokrasi yang baik akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Kabupaten Karo.

Untuk itu, Peningkatan pelayanan publik, penciptaan iklim yang kondusif serta peningkatan sarana prasarana yang mendukung investasi perlu terus dilanjutkan, kondisi ini perlu didukung pula dengan regulasi dan pemenuhan sarana prasarana pendukung dengan tetap berbasis pada potensi unggulan daerah dan optimalisasi Sumber Daya Alam yang berkelanjutan.

Pengembangan pariwisata juga menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo. Potensi maupun destinasi wisata sudah cukup banyak, namun masih diperlukan strategi pengembangan dan pengelolaan yang lebih baik untuk mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi baik domestik maupun asing. Hal ini didukung pula oleh kebijakan pemerintah pusat yang menetapkan kawasan Danau Toba sebagai salah satu Kawasan

Strategis Pariwisata Nasional, Kabupaten Karo merupakan bagian dari kawasan tersebut. *Hasil travel Sentiment Toward Sumut 2020* menyebutkan bahwa wisata alam paling diminati selama pandemi Covid-19, hal ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Karo yang memiliki keunggulan wisata alam. Penerapan protokol kesehatan dan sertifikasi CHSE (*Clean, Healthy, Safety dan Environment*) merupakan salah satu solusi untuk membangkitkan kembali industri pariwisata di tengah pandemi.

Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya. Pembangunan perdagangan juga penting dalam menciptakan dan mempertahankan stabilitas ekonomi. Untuk itu sektor unggulan di Kabupaten Karo perlu didukung oleh pembangunan perdagangan sehingga dapat memberikan efek yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Perekonomian Kabupaten Karo secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh fenomena-fenomena yang berkembang baik pada tatanan perkembangan lingkungan eksternal maupun internal. Perkembangan lingkungan internal perekonomian Kabupaten Karo dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian lokal Kabupaten Karo dan perkembangan lingkungan eksternal perekonomian Kabupaten Karo sangat dipengaruhi oleh kebijakan perekonomian regional Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Arah kebijakan ekonomi daerah untuk tahun 2022 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun 2020 dan awal tahun 2021, prospek serta tantangan perekonomian pada tahun 2021 dan 2022. Untuk itu, Kondisi ekonomi daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 dalam konteks makro diharapkan masih mampu berkembang dan bertumbuh dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2022 kondisi kesehatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 diprediksi membaik sehingga perekonomian Kabupaten Karo diperkirakan sudah mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi perekonomian berdasarkan kepada asumsi telah terdistribusinya

◆-----◆

vaksin Covid-19, meningkatnya aktivitas di beberapa sektor lapangan usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur dan digitalisasi.

Diharapkan pelaksanaan vaksinasi sebagai titik tolak pemulihan perekonomian. Selain vaksinasi, implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi. Melalui UU Cipta Kerja terkait peningkatan ekosistem investasi, pemberdayaan UMKM, kemudahan untuk berusaha, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Hal tersebut dapat menurunkan tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat pada akhirnya akan menjadi dasar pemulihan ekonomi daerah.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, pembagian pendapatan masyarakat yang merata, meningkatkan hubungan ekonomi antar daerah, serta mengusahakan terjadinya pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder atau tersier.

Adanya situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah serta didasarkan pada kondisi perekonomian daerah dan tantangan yang dihadapi pada masa mendatang maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi antara lain:

1. Melanjutkan sinergitas antara masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dengan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan ekonomi lokal yang potensial yang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan ketimpangan. Untuk itu salah satu upaya yang dilakukan dari sudut perencanaan adalah membangun skenario alternatif sumber pendanaan pembangunan dalam bentuk pengadministrasian program dan kegiatan yang tidak didanai melalui APBD Kabupaten Karo Tahun 2022;
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi potensial dan strategis;
3. Menyediakan infrastruktur secara merata, memadai dan berkualitas untuk menunjang pemerataan pertumbuhan wilayah dan distribusi ekonomi daerah termasuk di wilayah yang strategis;

4. Mendorong investasi yang berbasis sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan usaha;
6. Ektensifikasi dan intensifikasi lahan pertanian khususnya lahan pertanian yang selama ini tidak dipergunakan (lahan tidur);
7. Meningkatkan pertumbuhan nilai tambah yang bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas melalui pemanfaatan bibit unggul, teknologi tepat guna, meningkatkan aktivitas pasca panen melalui upaya mendorong dan pengembangan industri-industri mikro, kecil dan menengah serta UMKM pengolah hasil pertanian;
8. Mendorong peran lapangan usaha perdagangan, transportasi dan pergudangan serta jasa lainnya dengan upaya mendorong peningkatan nilai tambah di ketiga sektor tersebut;
9. Melakukan inovasi dan pemanfaatan ilmu teknologi pada aktivitas perekonomian dan pelayanan publik;
10. Melanjutkan reformasi birokrasi pelayanan publik serta penguatan regulasi yang dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan perekonomian daerah.

Selain itu, sesuai rekomendasi Bank Indonesia maka beberapa hal yang perlu diperhatikan Kabupaten Karo yaitu:

1. Sesuai hasil penelitian Komoditas, Produk, Jenis Usaha Unggulan (KPJU) kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara diidentifikasi 10 (sepuluh) jenis komoditi unggulan lintas sektor antara lain kopi, toko kelontong, cabai merah, perdagangan beras, rumah makan, anyaman bambu, angkutan desa, jagung, wisata alam dan bambu, hal ini perlu ditingkatkan sebagai penopang perekonomian Kabupaten Karo;
2. Perkembangan wisata kopi telah berkembang baik dari sisi hulu maupun di hilir. Wisata kopi di sisi hulu dikembangkan dengan optimalisasi keberadaan perkebunan kopi sebagai objek pariwisata, sementara itu pariwisata di sisi hilir mengoptimalkan perkembangan budaya minum kopi masyarakat setempat. Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah penghasil komoditas ekspor utama Kopi;

3. Kabupaten Karo merupakan salah satu daerah sekitar Danau Toba dan memiliki potensi pengembangan wisata pariwisata. Hasil *Travel Sentiment Toward Sumut 2020* menyebutkan wisata alam paling diminati selama pandemic Covid-19, hal ini menjadi peluang besar bagi Kabupaten Karo yang memiliki keunggulan wisata alam.
4. Kabupaten Karo sebagai penghasil pangan dan hortikultura dapat mengimplementasikan konsep kemitraan antara petani (Gapoktan) dan korporasi agar keuntungan serta produktivitas hasil meningkat;
5. Berdasarkan hasil kajian *Passenger Exit Survey* di Bandara Silangit, destinasi yang paling diminati di Kabupaten Karo adalah Air terjun Sipiso-piso. Keramahan warga dan keindahan alam menjadi kesan baik yang ditinggalkan. Namun kualitas infrastruktur, kebersihan, amenitas dan transportasi perlu terus ditingkatkan;
6. SDM berkualitas menjadi modal penting dalam pembangunan sehingga diperlukan upaya di berbagai bidang antara lain perbaikan infrastruktur, mutu pelajaran, standarisasi sekolah dan perangkat pengajar serta *link and match* pelajar dengan pelaku usaha;
7. Elektronifikasi berdampak pada peningkatan akses keuangan, kemandirian fiskal dan efisiensi ekonomi;
8. Perbaikan pada aspek birokrasi serta koordinasi pemerintah dan *stakeholders*;
9. Untuk meningkatkan investasi diperlukan kemudahan perizinan, sinkronisasi kebijakan dan inovasi di daerah.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Karo diharapkan akan mengalami peningkatan. Hal ini didukung kondisi perekonomian regional, nasional serta internasional yang diperkirakan membaik, stabilitas pemerintahan semakin terjaga dan orientasi pertumbuhan ekonomi nasional yang diarahkan pada pemulihan ekonomi pascapandemi *Covid-19*. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2022.

Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara membuat target Indikator Makro Kabupaten Karo untuk dukungan terhadap pencapaian target Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara, memperhatikan target tersebut dan melihat kondisi yang berkembang maka Kabupaten Karo menetapkan target makro sebagai berikut:

Tabel 3.2
Target Makro Kabupaten Karo Tahun 2022

No	Indikator	Satuan	Target
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	74,53
2	Persentase Kemiskinan	Persen	8,90
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,75
4	Indeks Gini	Poin	0,248
5	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,89
6	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,80
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,65
8	Pengeluaran Perkapita	Juta	12,654
9	LPE	Poin	4,70

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan yang diserahkan dan/atau ditugaskan, penyelenggara Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban dalam pengelolaan

keuangan Daerah meliputi: mengelola dana secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan menyinkronkan pencapaian sasaran program Daerah dalam APBD dengan program Pemerintah.

Kebijakan keuangan daerah dalam pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini diformulasikan sesuai dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Parameter Perencanaan Pembangunan Daerah. Keuangan Daerah berdasarkan kapasitas riil diformulasikan kedalam empat prioritas pendanaan yaitu :

1. Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Prioritas ini diarahkan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar perangkat daerah dalam menjalankan pelayanan dasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah.
2. Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam perkembangannya walaupun visi dan misi Kepala Daerah telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Karo harus tetap melihat kondisi terkini sehingga prioritas ini mengambil masukan dari kajian teknokratik perangkat daerah, hasil musrenbang desa dan kecamatan, pokok-pokok pikiran DPRD serta Direktfi Bupati yang melihat pengamatan langsung perkembangan permasalahan di lapangan.
3. Prioritas ketiga dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya. Prioritas ini untuk memenuhi kebutuhan lainnya khususnya arahan Pemerintah atasan dan terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal dan kebutuhan prioritas daerah lainnya.
4. Prioritas keempat dialokasikan untuk Pemerataan Pembangunan di Kecamatan. Prioritas ini pertama kali diterapkan pada tahun perencanaan 2021 sebagai jawaban atas keluhan ketimpangan pembangunan di dalam kondisi keterbatasan kapasitas riil keuangan daerah. Kebijakan ini akan memastikan setiap kecamatan mendapatkan dana pembangunan yang ditetapkan dan diputuskan bersama masyarakat pada saat musrenbang Kecamatan.

Dengan kebijakan tersebut diharapkan setiap dana yang ada dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran dan memperhatikan azas

pemerataan dan keadilan. Selaras dengan hal tersebut maka kebijakan keuangan daerah Kabupaten Karo untuk 2022 diarahkan pada:

- a. Meningkatkan penerimaan daerah untuk dapat menaikkan belanja daerah.
- b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran belanja daerah yang berkualitas yang dapat ditempuh melalui mempertajam pengalokasian anggaran agar lebih terarah dan tepat sasaran.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Dari pertumbuhan pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2015-2020 maka diproyeksi target pendapatan Kabupaten Karo Tahun 2022 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3
Realisasi/ Proyeksi Pendapatan
Kabupaten Karo Tahun 2022-2023

No.	Uraian	Realisasasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
1.	Pendapatan Daerah	1.424.075.254.493,91	1.267.968.330.965,96	1,535,350,518,852.00	1.448.718.509.839,38
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	117.683.657.832,91	100.334.824835,96	108,291,191,224.00	106.724.206.056,00
1.1.1.	Pajak Daerah	44.412.242.579,84	36.711.550.305,76	46,260,215,900.00	44.838.017.000,00
1.1.2.	Retribusi Daerah	9.955.878.435,00	7.587.660.501,00	13,046,195,900.00	10.970.740.000,00
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.429.190.829,00	2.526.770.335,00	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00
1.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	60.886.345.989,07	53.508.843.694,20	46,984,779,424.00	48.715.449.056,00
1.2.	Dana Perimbangan	977.630.358.355,00	861.506.117.288,00	1,113,773,030,329.00	1.059.100.597.151,38
1.2.1.	Dana Bagi Hasil/Bagi Hasil Bukan Pajak	13.402.130.354,00	18.588.604.257,00	16.995.426.000,00	16.994.939.000,00
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	758.968.872.000,00	687.569.658000,00	717.123.500.000,00	732.983.750.000,00
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	205.259.356.001,00	155.347.855.031,00	379,653,616,329.00	309.121.908.151,38
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	328.761.238.306,00	306.127.388.842,00	313.286.297.299,00	282.893.706.632,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	50.462.630.000,00	53.195.950.000,00	61.957.366.667,00	52.315.800.000,00
1.3.2	Dana Darurat				
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya ***)	81.474.267.106,00	39.957.933.084,00	32.168.633.632,00	32.168.633.632,00
1.3.4	Bantuan Keuangan Dari Daerah Provinsi Atau Pemerintah Daerah			0.00	0.00
1.3.5	Pendapatan Lainnya	196.824.341.200,00	212.973.505.758,00	219.160.297.000,00	198.409.273.000,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo

Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan terukur, rasional serta memiliki kepastian

hukum penerimaannya, sehingga dalam penyusunannya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun, anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Untuk mencapai pendapatan daerah sebagaimana yang diproyeksikan pada di atas, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada :

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui peningkatan kesadaran wajib pajak dan penagihan pajak terutang.
2. Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam perolehan dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
4. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
5. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
6. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

7. Meningkatkan pemanfaatan Teknologi Informasi, peningkatan kualitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah pada perangkat daerah penghasil.
8. Meningkatkan pemanfaatan aset daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah
9. Meningkatkan Inovasi Daerah sesuai amanat Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu yang menjadi kewenangan pemungutan Kabupaten/Kota untuk pajak daerah meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan BPHTB. Sedangkan untuk Retribusi Daerah terdiri dari kelompok Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini, masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan, khususnya dari dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan revitalisasi sumber – sumber obyek pajak dan peningkatan pengelolaan sumberdaya alam dengan mengindahkan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan.

Salah satu komponen penting yang berperan dalam pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karo meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk itu pada tahun 2022 kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain – lain PAD yang sah.

Untuk itu, beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain:

1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
2. Pelaksanaan optimalisasi penggalian potensi atas objek pajak/retribusi baru sesuai dengan peraturan perundangan dan pengembangan/pemanfaatan teknologi informasi dalam hal pengawasan dan atau penagihan atas pajak dan retribusi;
3. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
4. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi dibidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
5. Optimalisasi pemberdayaan asset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
6. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional sebagai upaya peningkatan fungsi dan peran Perangkat Daerah sebagai unit kerja penghasil dibidang pendapatan daerah;
7. Melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah penghasil.
8. Upaya ekstensifikasi pajak sebagaimana yang telah disampaikan, tampaknya tidak cukup hanya mengandalkan kondisi sarana prasarana yang ada seperti saat ini. Untuk itu, kedepan, prioritas pembangunan harus benar-benar fokus pada sektor-sektor yang mampu menarik investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
9. Dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat yang dalam hal ini tentunya harus dilakukan dengan tanpa mengesampingkan konsistensi dalam menekan ketimpangan pendapatan masyarakat sebagai bentuk upaya untuk menekan angka kemiskinan, serta tetap memperhatikan keseimbangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat.

Selain PAD, adapun kebijakan pendapatan yang akan dilakukan untuk meningkatkan Dana Perimbangan yang berupa dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Selanjutnya, strategi pencapaian Target Dana Perimbangan, dengan melakukan koordinasi rekonsiliasi data penerimaan secara terus menerus pajak pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam upaya peningkatan penerimaan dana perimbangan.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Secara umum, sesuai dengan ketentuan, kebijakan pengelolaan belanja daerah Kabupaten Karo pada tahun 2022 akan didasarkan pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil, dan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektif, berkeadilan yang diarahkan kepada layanan sosial dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum berwawasan lingkungan serta hak kedudukan Hukum, HAM dan Politik. Peningkatan proporsi belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan wajib terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar serta urusan pemerintahan pilihan. Selain itu, juga dialokasikan untuk membiayai Urusan Pemerintahan Penunjang. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan

dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Analisis standar belanja dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur belanja daerah Kabupaten Karo untuk tahun anggaran 2022 dikelompokkan menjadi:

1. Belanja operasi merupakan belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal merupakan belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin.
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung.
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. Belanja modal aset tidak berwujud
3. Belanja tidak terduga
4. Belanja Transfer yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan

Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan penjabaran untuk tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 dan lima tahun keempat RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025. Dari pertumbuhan realisasi belanja Kabupaten Karo dari Tahun 2015-2020, maka diproyeksikan

belanja Kabupaten Karo Tahun 2022-2023 seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.4
Realisasi/Proyeksi Belanja
Kabupaten Karo Tahun 2022-2023

No.	Uraian	Realisasasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
2.	Belanja Daerah	1.245.418.622.743,69	1.060.258.812.995,00	1,531,379,560,213.00	1.382.301.133.747,31
2.1.	Belanja operasi	1.048.869.105.654,15	906.605.677.815,00	948,514,455,125.00	948.055.532.249,00
2.1.1.	Belanja Pegawai	632.398.226.075,00	578.465.991.077,00	639,228,076,631.00	639.228.076.631,00
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	355.007.779.579,15	321.439.624.656,00	253.772.005.618,00	253.772.005.618,00
2.1.3.	Belanja Bunga			0.00	0.00
2.1.4.	Belanja Subsidi			0.00	0.00
2.1.5.	Belanja Hibah	61.463.100.000,00	6.700.062.082,00	53,774,722,876.00	53.315.800.000,00
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial			1.739.650.000,00	1.739.650.000,00
2.2.	Belanja Modal	196.427.858.443,54	131.636.983.833,00	301,117,984,513.00	153.005.877.498,31
2.3.	Belanja Tidak Terduga	121.658.646,00	22.016.151.347,00	2,000,000,000.00	2.000.000.000,00
2.4.	Belanja Transfer	285.050.677.639,00	271.799.084.520,00	279,747,120,575.00	279.239.724.000,00
2.4.1.	Belanja Bagi Hasil	5.346.089.304,00	3.448.243.062,00	5,231,412,775.00	5.910.974.000,00
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	279.704.588.355,00	268.350.841.458,00	274,515,707,800.00	273.328.750.000,00

**Jenis belanja merupakan asumsi karena karena Dokumen RKPD tidak sampai sub rincian belanja.*

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo

Khusus untuk kapasitas rill keuangan daerah akan digunakan sebagai alokasi anggaran untuk prioritas I, prioritas II dan prioritas III untuk pembangunan daerah tahun 2022.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2021-2026 sebagai berikut:

1. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang

- undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2022-2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
 3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Karo yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib nonpelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan dan pencapaian sasaran pembangunan; dan
 4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari SILPA tahun sebelumnya, hasil investasi (dana bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo. Berikut ini beberapa poin penting terkait dengan kebijakan pembiayaan daerah:

1. Pada struktur anggaran RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 tidak merencanakan adanya penerimaan Pembiayaan.

2. Tetapi dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat atau sumber lainnya.
3. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi : Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo, penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD, dan Dana Bergulir (Kredit Program).
4. Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
- Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Sejak Perpres ini diluncurkan kerjasama yang sebelumnya dikenal dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) selanjutnya disebut KPBU. Melalui alternatif skema pembiayaan ini, diharapkan terjadi percepatan dalam pembangunan di Kabupaten Karo, khususnya bidang infrastruktur publik.

Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2022-2023 Kabupaten Karo, tidak menganggarkan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, untuk jelasnya dapat dilihat berikut ini.

Tabel 3.5
Realisasi/ Proyeksi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Karo Tahun 2022-2023

No	Uraian	Realisasasi Tahun 2019	Realisasi Tahun 2020	Proyeksi Tahun 2022	Proyeksi Tahun 2023
3.	Pembiayaan Daerah	349.277.714.503,49	239.126.177.561,13	(3,970,958,639.00)	(15.000.000.000,00)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	350.172.679.545,49	239.655.843.336,13	0	0
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	894.965.042,00	529.665.775,00	3,970,958,639.00	15.000.000.000,00

Sumber: BPKPAD Kabupaten Karo

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana tahunan yang memberikan gambaran mengenai program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun ke depan. Indikator-indikator kinerja beserta target setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dituangkan dalam dokumen ini, sehingga pada akhir tahun pelaksanaan dapat diukur walaupun masih **bersifat indikatif**. Penyusunan RKPD ini mengacu pada kondisi pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2020 serta perkiraan pada tahun 2022 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Memenuhi ketentuan Pasal 75 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 maka penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, yang dijelaskan pada point 5 (lima) dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun

2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

4.1. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Visi

Visi RPJPD Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 merupakan rumusan umum yang menggambarkan kondisi daerah yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan jangka panjang, yakni dalam jangka waktu 2005-2025. Visi bukanlah mimpi atau serangkaian harapan semata, namun suatu komitmen dan upaya dalam merancang serta mengelola perubahan dan peluang, serta mengantisipasi tantangan masa depan untuk mencapai tujuan pembangunan 20 tahun ke depan. Visi harus didasarkan pada realita dan harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi pembangunan daerah dan masyarakat.

Visi Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi cita-cita bersama pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Oleh karena itu, visi dirumuskan, dibahas dan disepakati bersama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah karena merupakan dasar bagi para pemangku kepentingan dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Perumusan visi dilakukan untuk menindaklanjuti hasil analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah untuk menemukan perwujudan visi.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yang telah disepakati adalah:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN ADIL

Pilihan pada visi di atas didasarkan pada situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Karo serta komitmen yang kuat dari para pelaku pembangunan di daerah untuk merealisasikan integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas rencana pembangunan, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan.

Visi Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2005–2025 ini adalah landasan bagi tahap pembangunan menuju masyarakat adil dan

makmur dalam NegaraKesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan, keadilan, keamanan dan ketentraman yang ingin dicapai.

Tabel 4.1
Perumusan Visi

No.	Perwujudan Visi	Pokok-Pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Maju	Standar Hidup Relatif Tinggi	Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju, Mandiri dan Adil
		Teknologi Tinggi	
		Ekonomi yang merata	
		Perkapita tinggi	
2.	Mandiri	Mampu	
		Tahan	
		Merdeka	
3.	Adil	Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat	
		Tidak ada diskriminasi	
		Kesempatan yang sama	

Terkait visi Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 yaitu: Terwujudnya Masyarakat Karo yang Maju, Mandiri dan Adil Tahun 2025 memiliki peran terhadap perwujudan visi Nasional Tahun 2025, yaitu: Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur, serta visi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025, yaitu: Terwujudnya masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan di dalam Kebhinekaan

4.1.2. Misi

Misi merupakan rumusan umum tentang upaya atau pilihan jalan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan daerah. Perwujudan visi melalui misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi. Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan dalam rangka membantu menggambarkan visi secara lebih jelas dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapainya. Misi

dalam RPJPD harus mampu menaungi tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun.

Perumusan misi merupakan suatu upaya dalam rangka menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah untuk mengembangkan program-program prioritas dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif, efisiensi dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, perlu disusun pendefinisian visi terlebih dahulu menjadi pokok-pokok visi. Pokok-pokok visi disusun dengan memperhatikan pemangku kepentingan yang menjadi pelaku dan terkena dampak pelaksanaan pembangunan.

Adapun misi pembangunan daerah Kabupaten Karo tahun 2005-2025 untuk mewujudkan Kabupaten Karo yang maju, mandiri dan adil adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

Mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, antara lain: keterbukaan, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi, menjunjung tinggi supremasi hukum, dan membuka partisipasi masyarakat yang dapat menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu diperlukan langkah-langkah kebijakan yang terarah pada perubahan kelembagaan dan sistem ketatalaksanaan; kualitas sumber daya manusia aparatur; dan sistem pengawasan dan pemeriksaan yang efektif.

Mewujudkan pemerintahan yang profesional sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala sisi sesuai dengan porsi objek, bersifat terus-menerus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta jangka waktu penyelesaian pekerjaan yang relatif singkat. Untuk mempertahankan kehidupan dan kedinamisan organisasi mau tidak mau harus adaptif terhadap perubahan organisasi. Birokrasi yang mampu bersaing di masa mendatang adalah birokrasi yang memiliki sumber daya manusia berbasis pengetahuan dengan berbagai keterampilan dan keahlian.

◆

Mewujudkan pelayanan publik dan pelayanan aparatur pemerintahan yang responsif dan berkualitas sesuai harapan masyarakat, juga merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan kondisi seperti ini, kualitas pelayanan publik harus ditingkatkan, khususnya pelayanan yang paling dasar. Peran serta masyarakat perlu ditingkatkan untuk meningkatkan relevansi kebijakan dengan aspirasi masyarakat dan untuk percepatan pembudayaan pertanggungjawaban kinerja.

2. Membangun sistem dan koordinasi yang mantap dalam upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penanggulangan bencana pada hakikatnya merupakan upaya kemanusiaan untuk melindungi dan menyelamatkan manusia sebagai sumber daya pembangunan dari ancaman bencana. Disamping itu, penanggulangan bencana juga merupakan upaya kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk memulihkan dan mengembalikan kerugian harta benda, kerusakan sarana dan prasarana serta memulihkan kehidupan dan penghidupan masyarakat. Untuk itu, perlu membangun sistem dan koordinasi yang mantap. Dengan adanya sistem dan koordinasi yang mantap, usaha penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat selesai pada waktunya, sertasemua lembaga yang terkait dapat memberikan sumbangan usahanya secara maksimal dalam rangkap pencapaian tujuan akhir.

3. Memberdayakan potensi sumber daya lokal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Memberdayakan potensi sumber daya lokal merupakan salah satu program pengentasan kemiskinan dan penanganan pengangguran yang ditekankan pada sektor riil berbasis potensi aktual kawasan.

Memberdayakan potensi sumber daya lokal berarti menekankan pada upaya pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku dalam jaringan kerja produksi sampai dengan jasa pelayanan dan upaya-upaya inovasi pengembangannya dalam bentuk: upaya penggalian sumber daya potensial, pengembangan industri, perdagangan, jasa serta investasi lainnya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. **Memberdayakan potensi sumber daya lokal** diarahkan kepada pola pengembangan dan pengelolaan sumberdaya yang meliputi energi, sumber daya dan mineral yang ada di Kabupaten Karo yang spesifik yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan. Pemberdayaan potensi sumberdaya lokal berorientasikan pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana umum secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah

Ketersediaan sarana dan prasarana umum adalah komponen yang sangat menentukan daya saing wilayah Kabupaten Karo. Ketersediaan sarana dan prasarana umum akan meningkatkan tingkat pengembalian investasi sehingga minat berinvestasi dapat ditingkatkan dan direalisasikan secara lebih baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, integratif dan komprehensif, maka komponen biaya dari usaha baru maupun usaha yang telah berdiri dapat diturunkan sehingga daya saing produk/jasa yang dihasilkan dapat ditingkatkan. Bagi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana umum merupakan faktor vital dalam peningkatan kenyamanan hidup.

5. Membangun dan meningkatkan kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat dalam lingkup pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, keluarga berencana dan pengentasan kemiskinan

Misi ini diharapkan dapat mencapai:

Terwujudnya kualitas kehidupan pemuda dan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik didukung dengan kualitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan.

Terwujudnya kualitas manajemen pelayanan kependudukan dan keluarga kecil yang berkualitas serta adanya distribusi alokasi penduduk yang seimbang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Terwujudnya pembangunan bidang ketenagakerjaan, perluasan lapangan kerja, penempatan tenaga kerja, peningkatan kesempatan kerja produktif, dalam rangka mengurangi penganggur dan setengah penganggur, baik di perdesaan maupun perkotaan serta

peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Disamping itu, harus diciptakan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja dan pengusaha serta perlindungan tenaga kerja. Tabel 4.4 menjelaskan Sinkronisasi Misi Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo dengan Misi Jangka Panjang Nasional dan Provinsi Sumatera Utara.

Selain itu, sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, maka Visi dan Misi Kepala terpilih adalah :

Visi Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 adalah **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KARO YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING BERBASIS PARIWISATA DAN PERTANIAN MENUJU MASYARAKAT MAKMUR DAN SEJAHTERA”** dengan memperhatikan capaian pembangunan sebelumnya peluang dan tantangan di masa mendatang maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Karo yaitu:

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*) melalui Reformasi Birokrasi sampai ke Tingkat Desa, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Pemerintahan;
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Berbasis Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Pertanian, Perikanan, Peternakan, Agroindustri dan Penerapan Pola Sistem Pertanian Terpadu;
4. Membangun Struktur Industri Pariwisata yang Berbasis Alam, Agrowisata, Ekowisata dan Adat serta Nilai-Nilai Budaya Karo;
5. Mewujudkan Generasi Muda yang Berkualitas dan Masyarakat Olahraga yang Berprestasi;
6. Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Kemudahan Pelayanan Perizinan;
7. Peningkatan Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi Kreatif sehingga Mampu Menciptakan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Baru;

-
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Seluruh Kekuatan Ekonomi Daerah dan Desa, Terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi. Membangun, Mengembangkan Pasar bagi Produk Lokal;
 9. Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan secara Berkelanjutan untuk Mengurangi Kesenjangan Antarawilayah dengan Tetap Memperhatikan Aspek Lingkungan Hidup dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara Rasional, Efektif dan Efisien;
 10. Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan Baik Pendidikan Dasar dan Menengah 9 (Sembilan) Tahun, Pendidikan Informal maupun Nonformal;
 11. Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Dasar dan Daya Dukung Pelayanan Kesehatan; dan
 12. Penggalan dan Optimalisasi Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD, termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Suatu prioritas pembangunan tahun rencana pada dasarnya adalah gambaran prioritas tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah dengan tahun rencana serta dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan aktual secara global, nasional maupun provinsi.

4.2.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2022

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2022 (RPJMN 2020-2024): **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”**. maka sasaran tahun 2022 dengan target Pertumbuhan Menguat dengan stabilitas makro terjaga yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,4 – 6,0

Untuk pertama kalinya Proyek Prioritas Strategis (Major Project) pada RPJMN 2020-2024 menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP, beberapa Major Project yang mendukung langsung Tema RKP

2021 akan diprioritaskan antara lain:

- a. 10 Destinasi Pariwisata Prioritas : Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
- b. Sistem Kesehatan Nasional
- c. Food Estate
- d. Peningkatan Peran UMKM
- e. Energi Terbarukan
- f. Kawasan Industri di luar Jawa dan 31 Smelter
- g. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
- h. Ibu Kota Negara
- i. Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu
- j. Reformasi Pendidikan Keterampilan

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2022 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Selanjutnya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional dijabarkan ke dalam Program Prioritas yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang

perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT
 2. Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
 3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan Pengentasan Kemiskinan
 4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan
 5. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi;
 6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi;
 7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
 8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
2. Prioritas Nasional 2: Mengembangkan Wilayah Untuk Pulau Kalimantan Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera; Penguatan Infrastruktur Kawasan Tertinggal dan Ketahanan Bencana
 2. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali,
 3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan;
 4. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi;
 5. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku;
 6. Pembangunan Wilayah Pulau Papua.
3. Prioritas Nasional 3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas Dan Berdaya Saing. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Program Prioritas :

1. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan;

-
2. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial;
 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
 4. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas;
 5. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda
 6. Mengentaskan Kemiskinan; (g) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing.
4. Prioritas Nasional 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
- Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Program Prioritas :
1. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Peningkatan Kuantitas, Kualitas dan Aksesibilitas Air
 2. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan
 3. Memperkuat Moderasi Beragama;
 4. Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas
5. Prioritas Nasional 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar. Dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Program Prioritas :
1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 2. Infrastruktur Ekonomi;
 3. Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan;
 4. Energi dan Ketenagalistrikan;
 5. Transformasi Digital.
6. Prioritas Nasional 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim, dalam rangka mendukung prioritas nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- Program Prioritas :
1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 3. Pembangunan Rendah Karbon.
7. Prioritas Nasional 7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik, dalam rangka mendukung prioritas

nasional tersebut maka program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Konsolidasi Demokrasi;
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
3. Penegakan Hukum Nasional;
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi;
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dengan sasaran pembangunan 2020-2024

1. Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 6,0
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 5,5 – 6,2 persen
3. Indeks Gini 0,376 – 0,378
4. Indeks Pembangunan Manusia 73,44 – 73,48
5. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%) 26,8 – 27,1
6. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) 102-104
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) 102-105
8. Tingkat Kemiskinan 8,5 – 9,0persen

4.2.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata
6. Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
7. Peningkatan Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
8. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

- 1. Good Governance (tata kelola pemerintahan) yang baik,** yaitu pengelolaan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat;

2. Integrity (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;

3. Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

4. Pemerataan pembangunan yang berkeadilan, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

Sejalan dengan Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, maka prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 adalah :

1. Prioritas Pembangunan Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha
 - a. Revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada dan penambahan jumlah BLK milik Pemprovsu berdasarkan wilayah/zona.

-
- b. Pembinaan dan peningkatan kualitas Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) sebagai upaya untuk peningkatan kesempatan kerja.
 - c. Peningkatan Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan penyediaan Instruktur Lembaga Pelatihan Kerja.
 - d. Penyusunan program dan kegiatan yang fokus pada upaya mendorong pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui tumbuhnya wirausaha-wirausaha baru.
 - e. Penyusunan program dan kegiatan yang fokus pada peningkatan promosi dan kemudahan perizinan sebagai upaya mendorong tumbuhnya investasi dan wirausahawan baru.
 - f. Pengembangan Pusat Inovasi dan Industri Kreatif serta UMKM Center berdasarkan wilayah/zona.
 - g. Merumuskan prakiraan kebutuhan tenaga kerja dari segi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja pada setiap sektor usaha.
 - h. Mengembangkan/merevitalisasi aplikasi digital sebagai media untuk informasi pelatihan dan penempatan tenaga kerja (bursa tenaga kerja).
2. Prioritas Pembangunan Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan
- a. Kualitas Pendidikan menjadi masalah pokok, penyebab utama yaitu rendahnya kualitas guru (Tenaga kependidikan, Distribusi Guru, Rendahnya siswa berprestasi serta sarana dan prasarana yang kurang memadai);
 - b. Program terobosan melalui Program Digitalisasi Sekolah merupakan terobosan baru yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mempermudah proses belajar mengajar serta dapat mengikuti perkembangan Zaman 4.0 melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
 - c. Pola kebijakan distribusi dan alokasi anggaran pendidikan perlu lebih dititikberatkan pada faktor tingkat urgensinya dan emergensinya;

-
- d. Peningkatan Peran Badan Perpustakaan dan Arsip daerah Provinsi Sumatera Utara dalam mendongkrak minat baca siswa melalui program pengembangan perpustakaan sekolah
 - e. Adanya Usulan perubahan IKU daerah pada sektor Pendidikan yang berorientasi pada revitalisasi SMK yang bisa memenuhi kebutuhan kerja berdasarkan potensi daerah;
 - f. Usulan Penambahan Program Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akan direncanakan dilaksanakan Tahun 2021 serta mempunyai peluang untuk memberikan kontribusi melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui jasa layanan dan pelatihan;
 - g. Meningkatkan alih profesi guru PNS mejadi tenaga administrasi serta Pendistribusian guru sesuai kebutuhan.
3. Prioritas Pembangunan Infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan
- a. Sosialisasi dan sinkronisasi terhadap perubahan kebijakan dan penyesuaian sistem lelang agar proses pelaksanaan tender tidak memakan waktu yang lebih lama.
 - b. Penyesuaian waktu kerja terhadap perubahan iklim/fluktuasi kondisi alam ketika pelaksanaan program/kegiatan sehingga realisasi kinerja bisa mencapai apa yang diharapkan.
 - c. Percepatan dan efisiensi waktu pada tahap proses pembangunan, tahap lelang ataupun rembuk warga untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan warga.
 - d. Sinkronisasi dan koordinasi kerjasama lintas sektoral dalam mengatasi permasalahan infrastruktur, sehingga mendukung peningkatan pencapaian target program terutama pada program-program yang membutuhkan kerjasama lintas sektoral pada bidang infrastruktur.
 - e. Identifikasi terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki efisiensi dan efektivitas tinggi dalam mencapai target program dalam mendukung pencapaian target program serta memperkuat sinergisme antara perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi program/kegiatan.

-
- f. Koordinasi antar kabupaten/kota dengan Provinsi maupun Pusat agar terjadi sinergisme antara kebijakan, perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program/kegiatan, untuk menghindari fragmentasi kegiatan-kegiatan sehingga terbentuk koordinasi yang mantap antar pemerintah, lintas sektor dan program dalam mencapai indikator yang ditetapkan.
 - g. Pengkajian terhadap efektivitas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan setiap tahunnya agar tidak terjadi pengulangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang kurang memberikan daya ungkit yang bermakna terhadap pencapaian indikator kinerja yang ditetapkan.
4. Prioritas Pembangunan Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas
- a. Sinkronisasi IKU Provinsi terhadap IKK OPD sebagai pelaksana program.
 - b. Revisi terhadap target capaian pada setiap OPD baik yang optimis maupun yang pesimis dalam menetapkan target capaian kinerja.
 - c. Revisi terhadap IKK yang kurang mendukung IKU Provinsi, baik itu mengganti atau membuang IKK yang kurang mendukung. Hal ini akan terjadi penghematan biaya yang cukup besar dan biaya tersebut dapat diguakan untuk membiaya program kegiatan yang lebih mengena ke masyarakat dan sesuai dengan IKU Provinsi.
 - d. Masing-masing OPD terkait harus membuat IKK yang dapat mendukung Prioritas Pembangunan Pelayanan Kesehatan yang termasuk IKU Provinsi.
5. Prioritas Pembangunan Peningkatan daya saing melalui sektor agraris
- Sektor Agraris harus dilaksanakan melalui Peningkatan Daya saing Sektor Agraris
 - a. Meningkatkan ketersediaan pangan local (Peningkatan Produktivitas):
 - 1. Perbaikan Teknologi Budidaya dan Penerapan GAP melalui sekolah lapang dan pendampingan;

-
2. Penyediaan benih/bibit unggul (bersertifikat) melalui Pengembangan bibit unggul, Pengadaan bibit unggul dan Riset inovasi budidaya. Perluasan areal melalui Penyediaan/Pembukaan Lahan Baru/ Pemanfaatan Lahan Tidur/Marginal;
 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pertanian; dan
 4. Penetapan cluster pertanaman
- b. Pemanfaatan Pangan Lokal Sebagai Sumber Karbohidrat melalui edukasi dan promosi, dilakukan melalui edukasi masyarakat, sehingga akan tumbuh kesadaran bahwa pangan lokal dapat menggantikan beras dan terigu untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi:
1. Menyelenggarakan webinar/talkshow (aspek kesehatan, ekonomi, sosial);
 2. Menyediakan bahan edukasi untuk anak sekolah dan masyarakat;
 3. Event outdoor;
 4. Kampanye melalui media sosial, televisi, ruang publik, pembentukan culinary system/culture;
 5. Menyediakan produk pangan lokal kepada masyarakat
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan local. Menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan antara lain melalui:
1. Penerapan teknologi pasca panen dan pengolahan;
 2. Pengembangan sistem penyimpanan dan manajemen stok;
 3. Pengembangan industri pangan lokal berbasis UMKM dan industri besar.
6. Prioritas Pembangunan Peningkatan daya saing melalui sektor pariwisata
- Sektor Pariwisata harus dilaksanakan melalui :
- a. Pembangunan sinergisitas dengan organisasi perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi wisata.

-
- b. Revitalisasi amenitas kawasan wisata dengan konsep CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability). Pemerintah Provinsi bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan sosialisasi dan sertifikasi CHSE bagi pelaku dan industri yang bergerak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sertanya membangun fasilitas-fasilitas yang mendukung CHSE di tempat-tempat wisata dengan jumlah yang cukup.
 - c. Peningkatan pelestarian budaya dan atraksi untuk memajukan kebudayaan di Sumatera Utara.
 - d. Peningkatan atraksi wisata religi dan ekowisata di Sumatera Utara.
 - e. Pengembangan Pemasaran Digital Marketing untuk meningkatkan citra pariwisata Sumatera Utara.
 - f. Peningkatan industri pariwisata untuk perekonomian yang berdampak pada penambahan lapangan pekerjaan dan kualitas hidup.
 - g. Mewujudkan pengelolaan pariwisata berkelanjutan untuk pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup serta meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.
 - 7. Prioritas Pelayanan Sosial Kemasyarakatan dan Olahraga
 - a. Dukungan pembangunan dan renovasi pada rumah ibadah pada 33 kab/kota;
 - b. Peningkatan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal (spm) pada seluruh (23) panti lansia, disabilitas dan anak yang menjadi kewenangan provinsi sumatera utara;
 - c. Pembangunan gedung olahraga pada 4 (empat) kabupaten/kota dan peningkatan fasilitas olahraga (peralatan) pada 33 kabupaten/kota se-sumatera utara;
 - d. Pembangunan gedung dan pusat olahraga terintegrasi khusus atlet paralympic dengan disabilitas (integrated national paralympic training center) provinsi sumatera utara.
 - 8. Prioritas Pembangunan Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

- a. *Good Governance* (tata kelola pemerintahan) yang baik, yaitu pengelolaan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
- b. *Integrity* (integritas), yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
- c. *Quality and Accountability* (mutu dan akuntabilitas), yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka ditentukan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 yakni :

“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat Pasca Pandemi Covid -19, Menuju Sumatera Utara Bermartabat”.

4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2022

Agar pembangunan yang dilaksanakan dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan yang tidak lain merupakan kesepakatan dari seluruh pelaku pembangunan, maka perlu ditentukan prioritas pembangunan secara cermat berdasarkan kebutuhan dan tingkat daya dukung kemampuan daerah. Prioritas pembangunan tersebut diharapkan mampu menjawab isu strategis dan dalam rangka mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan daerah. Untuk maksud tersebut maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di wilayah Kabupaten Karo. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan dijadikan

salah satu input bagi pengambilan kebijakan, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2022, kebijakan pembangunan provinsi tahun 2022, amanat standar pelayanan minimal, pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemic Covid 19 di Kabupaten Karo khususnya.

Dalam rangka efektifitas penyusunan RKPD Tahun 2022 bagi daerah yang melaksanakan pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan program kepala daerah terpilih hasil pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, serta memperhatikan RKP Tahun 2022.

Berdasarkan pemasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2020, perkiraan tahun 2020 dan permasalahan pembangunan yang akan dihadapi tahun 2021, serta setelah dilakukan uji publik melalui Konsultasi Publik dan mempertimbangkan masukan pada Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah juga mempertimbangkan fenomena Kejadian Luar Biasa kondisi sosial dan ekonomi akibat pandemi COVID-19 maka Tema Pembangunan Kabupaten Karo pada RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 adalah “**PEMULIHAN EKONOMI MASYARAKAT DAMPAK PANDEMI COVID-19**”, dengan unsur-unsur pokok yang terkandung di dalamnya dan merupakan prioritas pembangunan Kabupaten Karo Tahun 2022 yaitu:

1. Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;
2. Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Ketahanan Bencana yang berkelanjutan;
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Adapun fokus prioritas, program dan kegiatan pada tahun 2022 sebagai instrumen mewujudkan program pembangunan daerah tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi

Fokus:

- a. Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Desa
 - 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Penataan Organisasi
 - Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 2) Program Penyelenggaraan pengawasan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Internal
 - Pengawasan keuangan Pemerintah Daerah
 - 3) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - 4) Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa
 - 5) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - Administrasi Tata Pemerintahan
 - Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 6) Program Pembinaan Perpustakaan
 - Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah Kab. Kota
 - Pengembangan Bahan Pustaka
 - 7) Program Kepegawaian Daerah
 - Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN
 - Pengembangan Kompetensi ASN
 - Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat
- b. Pengelolaan Budaya Daerah

-
- 1) Program Pengembangan Kesenian Tradisional
 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
 - 2) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - c. Peningkatan Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah
 - 1) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah
 - d. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - 1) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - e. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Budaya Karo
 - 1) Program Pengelolaan Pendidikan
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Penambahan Ruang Kelas Baru
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
 - Penambahan Ruang Kelas Baru
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

-
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
- Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana.
- 3) Program Pendaftaran penduduk
- Pelayanan pendaftaran penduduk
 - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran penduduk
- 4) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota
 - sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- 5) Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- 6) Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan
- Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

- Pemenuhan HAK Setiap Pemuda yang Meliputi :
Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan
- 7) Program pengembangan Kapasitas daya saing Keolahragaan
 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota
- f. Menekan Angka Kemiskinan Kabupaten Karo
 - 1) Program Rehabilitasi Sosial
 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten /Kota

II. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Ketahanan Bencana yang berkelanjutan.

Fokus :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi
 - 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Bendung Irigasi
 - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
 - 2) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

-
- Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman
- 3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan
 - Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - 4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
 - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - 5) Program Penataan Bangunan Gedung
 - Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
 - Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
 - 6) Program Penyelenggaraan Jalan
 - Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
 - Pembangunan Jalan
 - pelebaran Jalan Menuju Standar
 - Rekonstruksi Jalan
 - Rehabilitasi Jalan
 - Pemeliharaan Rutin Jalan
 - Pembangunan Jembatan
 - Rehabilitasi Jembatan

b. Peningkatan SPBE

1) Program Aplikasi Informatika

- Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
 - Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas
 - Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

c. Peningkatan ketahanan bencana

1) Program Penanggulangan Bencana

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota

d. Peningkatan kualitas pemukiman kumuh dan ketersediaan Rumah Layak Huni

1) Program Pengembangan Perumahan

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana
 - Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
 - Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
 - Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

-
- Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
 - Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota
 - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
- Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
 - Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , Utilitas Umum Perumahan
- e. Peningkatan Rasio Konektivitas dan Kinerja Lalu Lintas Kabupaten.
1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
 - Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian berkala kendaraan Bermotor

-
- Penerebitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kab/Kota
 - f. Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan
 - 1) Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada masyarakat.
 - 2) Program Pengelolaan Persampahan
 - Pengelolaan Sampah
 - Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan.
 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - 3) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya
 - Pengelolaan Sampah
 - Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah.
 - Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan
 - g. Peningkatan Pemanfaatan Energi dan Sumber Daya Mineral
 - 1) Program Pengelolaan Energi Baru dan Terbarukan
 - Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Dalam Daerah Kabupaten/Kota

III. Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Fokus :

Meningkatkan daya saing daerah berbasis pada sektor unggulan yang berkelanjutan

a. Daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif.

1) Program Pemasaran Pariwisata

- Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

2) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

3) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

b. Peningkatan Daya Saing Produk UMKM/IKM Dan Koperasi Aktif

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah Keanggotaannya dalam daerah Kabupaten/Kota.

-
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 2) Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian
 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang wilayah Keanggotaan dalam daerah Kabupaten/Kota.
 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.
 - 3) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotannya dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi.
 - 4) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan, dan Koordinasi dengan para Pemangku Kepentingan.
 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro.
 - 5) Program Pengembangan UMKM
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil
 - Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi.
 - 6) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
 - Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.

c. Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi.
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.
- Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman.
- Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota lain.
 - Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain.

2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian

- Pembangunan Prasarana Pertanian
 - Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani.
 - Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.
 - Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan.
 - Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.

3) Program Penyuluhan Pertanian

- Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa.
 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa.

-
- 4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
- Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- d. Peningkatan Produksi Perikanan
- 1) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan
- 1) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- 2) Program Pengembangan Ekspor
- Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada Satu Daerah/Kota
 - Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Kabupaten/Kota
- f. Peningkatan Kompetensi pencari kerja dan penciptaan wirausaha baru
- 1) Program Pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja
- Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi
 - Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
- g. Peningkatan Investasi
- 1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

-
- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota
 - Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - 2) Program Pelayanan Penanaman Modal
 - Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 - 3) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
 - Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
 - h. Peningkatan Kualitas Konsumsi, Mutu dan Keamanan Pangan
 - 1) Program Pengawasan Keamanan Pangan
 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
 - Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
 - i. Pembentukan BUMD
 - 1) Program Perekonomian dan Pembangunan
 - Pelaksanaan Kebijakan Pendirian BUMD
 - Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD

Di bawah disajikan matrikulasi keterkaitan antara isu strategis dengan prioritas pembangunan Kabupaten Karo.

Tabel 4.2
Matrikulasi Keterkaitan Antara Isu Strategis Dengan Prioritas
Pembangunan Kabupaten Karo

No	Isu Strategis	Prioritas
1	Belum tuntasnya reformasi birokrasi di Kabupaten Karo bahkan terkesan melambat yang ditandai dari tidak adanya nilai Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN dan RB pada Tahun 2020, sehingga diperlukan perhatian khusus pada periode berikutnya. Walaupun Pemerintah Kabupaten Karo mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Tahun 2020 dan juga mendapatkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 81,25 tetapi nilai SAKIP yang menunjukkan tingkat Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Karo masih pada level C.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
2	Birokrasi yang handal dan berdaya saing harus memiliki sistem pengendalian intern yang kuat sehingga dalam setiap pelaksanaan administrasi pemerintahan memiliki tingkat pengendalian resiko yang tinggi dan diukur melalui tingkat maturitas SPIP. Pada tahun 2020 tingkat maturitas SPIP Kabupaten Karo masih pada level 2 sehingga perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
3	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah setiap tahunnya diukur melalui Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Pemerintah Kabupaten Karo masih mendapatkan nilai 2,78 sehingga disimpulkan masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
4	Kemandirian suatu daerah yang juga menunjukkan daya saing adalah tingkat Pendapatan Asli Daerah yang mampu	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi

	menopang pembangunan di daerah tanpa terlalu tergantung pada Dana Transfer dari Pemerintah atasan. Pada tahun 2020 rasio Pendapatan Asli Daerah dengan total Pendapatan adalah 7,58% sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini tentunya membutuhkan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah secara optimal.	
5	Dalam bidang pembangunan Sumber Daya Manusia yang dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia Pemerintah Kabupaten Karo berada pada indeks 74,53. Nilai ini dinilai sudah baik dibandingkan daerah di kawasan Sumatera Utara. Namun jika dilihat kedalamnya masih banyak yang perlu dibenahi seperti bidang Pendidikan dimana Pemerintah Kabupaten Karo dalam penyelenggaraan Pendidikan belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) khususnya di Standar sarana Prasarana dan Standar Tenaga Kependidikan. Termasuk didalamnya adalah penguasaan IT oleh tenaga kependidikan sehingga diperlukan perhatian secara khusus kedepannya. Peningkatan potensi ancaman budaya asing terhadap budaya lokal mengharuskan pemerintah daerah meningkatkan pelestarian budaya daerah.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
6	Di bidang kesehatan, jika dilihat dari Angka Harapan Hidup maka masyarakat Karo juga masih dalam kategori baik yaitu di angka 71,14. Akan tetapi, jika dilihat dari cakupan pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan Standar Pelayanan Minimal maka pelayanan kesehatan di Kabupaten Karo masih rendah sehingga perlu dilakukan pembenahan atau peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
7	Laju pertumbuhan penduduk di angka 1,89 pada tahun 2020 perlu menjadi perhatian karena meningkatkan jumlah penduduk yang tidak terkontrol akan menjadi masalah besar dikemudian hari.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi

8	Pada saat ini 68,21 % penduduk Kabupaten Karo telah tertib administrasi kependudukan. Angka tersebut tentunya masih sangat rendah karena tertib administasi kependudukan sangat penting untuk masyarakat itu sendiri juga bagi pemerintah dalam mengelola data kependudukan untuk kepentingan pembangunan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
9	Saat ini Pemerintah Kabupaten Karo dipimpin oleh wanita, sama halnya juga di lembaga DPRD. Namun, dalam hal pembangunan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan seperti fasilitas publik dan lain-lain. Hal ini karena walaupun Pemerintah Kabupaten Karo telah menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya namun masih dalam predikat pratama yang artinya masih perlu pembenahan lebih lanjut.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
10	Setiap tahun masih terdapat kekerasan pada anak sehingga diperlukan tindakan pencegahan yang salah satunya adalah memperluas jejaring Perlindungan Anak pada setiap Desa.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
11	Ketentraman dan Ketertiban serta Permasalahan Narkoba, Judi dan Penyakit Masyarakat lainnya masih menjadi ancaman bagi pembangunan manusia di Kabupaten Karo ditandai dari jumlah narapidana yang mayoritas adalah kasus narkoba.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi
12	Pada periode RPJMD sebelumnya ditargetkan angka kemiskinan Kabupaten Karo turun sampai dengan 6% tetapi pada tahun 2021 angka kemiskinan berada pada 8,7% walaupun sempat menyentuh angka 8,23%. Sehingga pada periode RPJMD ini strategi penanggulangan kemiskinan masih perlu perhatian serius dan salah satunya adalah pembenahan masalah data kemiskinan.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi

13	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan hasil pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa produktif lainnya. Jika dilihat dari kontribusi sektor dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maka setiap tahun lapangan usaha yang memberi peran dominan yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan. Sektor tersebut juga merupakan sektor dominan yang menyerap tenaga kerja di Kabupaten Karo. Untuk itu, nilai tambah ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya lokal perlu terus ditingkatkan sehingga membentuk struktur ekonomi yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
14	Investasi merupakan salah satu kekuatan penting dalam meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja baru sehingga diharapkan akan mengurangi beban pengangguran dan kemiskinan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi perlu terus dilakukan perbaikan iklim investasi dalam pelayanan publik di bidang perijinan. Disamping itu masuknya investor ke daerah, tentu saja sangat tergantung dari kondisi keamanan dan politik daerah. Sehingga diperlukan kondisi keamanan dan politik yang stabil sebagai modal penting dalam menarik minat investasi ke Kabupaten Karo.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
15	Dalam bidang ketenagakerjaan, Tingkat Pengangguran di Kabupaten Karo merupakan pengangguran dalam skala kecil jika dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara. Jika dicermati TPT di Kabupaten Karo cenderung berada di bawah 10 persen, hal ini antara lain disebabkan karena sebagian besar penduduk Kabupaten Karo bekerja pada sektor pertanian sehingga tidak sulit	Peningkatan Ekonomi Masyarakat

	mendapat pekerjaan walaupun hanya sebagai pekerja keluarga. Tingkat pengangguran perlu terus ditekan dengan meningkatkan keterampilan/pendidikan, meningkatkan kewirausahaan, memperluas lapangan kerja sehingga pekerja tidak dibayar/keluarga pada sektor pertanian dapat meningkatkan pendapatannya yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan/kondisi ekonomi Kabupaten Karo yang lebih baik.	
16	Penyelenggaraan urusan lingkungan hidup perlu terus ditingkatkan dalam rangka menjamin terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan. Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan nyaman harus didukung tingkat pelayanan persampahan, partisipasi masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah, penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengolahan sampah secara sanitary landfill, kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
17	Ketersediaan dan kondisi infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi belum optimal.	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Berkelanjutan
18	Ketersediaan dan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman belum optimal	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Berkelanjutan
19	Fasilitas Keselamatan dan Kenyamanan Lalu Lintas belum optimal	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Berkelanjutan
20	Belum optimalnya ketersediaan dan penggunaan Infrastruktur Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Berkelanjutan
21	Risiko bencana masih tinggi	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Berkelanjutan

Terkait sinergitas nasional, Provinsi dan Kabupaten Karo maka dibawah ini disajikan Program/Kegiatan Daerah yang mendukung

Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan Major Project Membangun Desa Menata Kota (MDMK) .

Tabel 4.3
Program/Kegiatan Daerah yang mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara dengan Major Project Membangun Desa Menata Kota (MDMK)

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
PRIORITAS 01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi	890.512.614	Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.156.000.000	Dinas PUPR
PRIORITAS 05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	200.000.000	DPRKPP
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	50.000.000	DPRKPP
			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	419.881.249	DPRKPP
			Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200.000.000	DPRKPP
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	DPRKPP			
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program	100.000.000	DPRKPP			

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Kabupaten/Kota		
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	940.000.000	DPRKPP
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.234.849.959	DPRKPP
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , Utilitas Umum Perumahan	732.000.000	DPRKPP
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	DINAS PUPR
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.000.000.000	DINAS PUPR
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000	DINAS PUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	50.000.000	DINAS PUPR
			Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	200.000.000	DINAS PUPR
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	800.000.000	DINAS PUPR
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000	DINAS PUPR
			Pembangunan Jalan	6.581.072.994	DINAS PUPR
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	12.497.598.258	DINAS PUPR
			Rekonstruksi Jalan	1.012.751.216	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jalan	2.652.763.936	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Berkala Jalan	800.000.000	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	3.984.251.089	DINAS PUPR
			Pembangunan Jembatan	50.000.000	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jembatan	250.000.000	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	50.000.000	DINAS PUPR
TOTAL PAGU				53.701.681.315	

Lebih lanjut, fokus diatas dilaksanakan dalam rangka menjawab isu strategis Kabupaten Karo tahun 2022 dan sebagai upaya untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat dari dampak COVID-19, pemulihan kondisi ekonomi dan kesehatan tidak lepas dari berbagai sektor yang memiliki peran sangat besar. Oleh karenanya pemulihan tersebut juga difokuskan pada: Peningkatan penanganan kesehatan, Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas pada sentra-sentra penghasil komoditas dan ke daerah wisata, Pembangunan sumber daya manusia, penguatan infrastruktur telekomunikasi, peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha akan pembangunan berwawasan lingkungan, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Seperti telah di jelaskan pada bab sebelumnya yaitu situasi keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah maka usaha-usaha yang dilakukan dalam pemantapan ekonomi akan terus dilakukan.

Prioritas pembangunan yang ditetapkan harus sinergis dengan prioritas nasional dan propinsi. Hal ini dimaksudkan untuk pencapaian

tujuan, sasaran dan target pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Keterkaitan prioritas dimaksud terlihat seperti tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.4
Sinkronisasi Prioritas Nasional, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Karo Tahun 2022

No.	Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022	Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2022
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN			
1.	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Daya Saing Sektor Agraris dan Pariwisata	Peningkatan Ekonomi Masyarakat
2.	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Ketahanan Bencana yang berkelanjutan
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT			
3.	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan	Peningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi;
4.	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Penyediaan Layanan Kesehatan yang Berkualitas	
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYANAN			
6.	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	Pembangunan Infrastruktur yang baik dan Berwawasan Lingkungan	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Ketahanan Bencana yang berkelanjutan
7.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim		Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur serta Ketahanan Bencana yang berkelanjutan

Penjelasan tentang program dan target capaian untuk setiap indikator dari Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5.
Program dan Target Capaian untuk Setiap Indikator dari Sasaran dan
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2022

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah dan Desa	Indeks Persepsi Pelayanan Publik	83,00	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Semua Perangkat Daerah
			Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	CC	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Sekretariat Daerah
			Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	Program Penyelenggaraan pengawasan	Inspektorat
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKAD
			Persentase Perangkat Desa yang dilatih	20,00%	Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMD
		Meningkatnya daya saing birokrasi Kabupaten Karo	Skor LPPD	2,88	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
			Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	21,36	Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Indeks Profesionalisme ASN	55 Poin	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Angka Melek Huruf	99.53%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Rata-rata lama sekolah	9.89%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Standar Pendidikan Nasional	Level 3	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Penguasaan TIK Oleh Pendidik	20.00%	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
			Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	21.36	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	71.65	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kualitas masyarakat, kepemudaan, olahraga serta menekan penyakit masyarakat (Judi dan Narkoba)	Indeks Pembangunan Gender	96,35%	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	DP3AP2KB
			Persentase Penegakan PERDA	73,19%	Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja
			Pengetahuan Masyarakat, remaja dan Anak sekolah atas bahaya Narkoba	100.00%	Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Serta Pariwisata

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
			Jumlah prestasi olahraga	14	Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Serta Pariwisata
			Persentase Kemiskinan	8,90	Program pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Serta Pariwisata
		Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Asli Daerah	Rp. 104.715.231.925,-	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
2.	Peningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Berkelanjutan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi	Persentase kondisi saluran irigasi dalam kondisi baik	50,11 %	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUPR
			Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	74,08%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPR
			Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	61%	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	DPUPR
			Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	62%	Program Penataan Bangunan Gedung	DPUPR
			Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	63%	Program Penyelenggaraan Jalan	DPUPR
			Persentase penduduk berakses air minum layak	68,702 %	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	DPUPR

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
					Penyediaan Air Minum	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	25,09 %	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPRKPP
			Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	55 %	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	DPRKPP
		Meningkatnya Rasio Konektivitas dan kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio Konektivitas Kabupaten	93,94	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perhubungan
			Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	0,35	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Perhubungan
			Indeks SPBE	2,2	Program Aplikasi Informatika	Dinas Kominfo
			Indeks Resiko Bencana Kab. Karo	110	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
		Meningkatnya pengelolaan, perlindungan dan pelestarian Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Hasil pengukuran index kualitas air	90 nilai	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Dinas Lingkungan Hidup
			Hasil pengukuran index kualitas udara	90		
			Hasil pengukuran tutupan lahan	50		

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
			Luas RTH publik di wilayah kota/kawasan perkotaan	25 persen	Program pengelolaan keanekaragaman hayati(kehati)	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Dinas PUPR
			Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	75 persen	Program pengelolaan persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
3.	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya aktivitas perekonomian berbasis sektor unggulan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan	Persentase Peningkatan PDRB	3 persen	Porgram Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Pengembangan UMKM	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian Perdagangan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Nilai Ekspor	5399,92 Milyar	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program pengembangan ekspor	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
			Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	1000 pelaku	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya kualitas konsumsi, mutu dan Keamanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (%)	87,5 persen	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Meningkatnya Jumlah dan Lama Kunjungan Wisatawan	Jumlah Kunjungan Wisatawan	600.000 orang	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
			Lama Kunjungan	1.1 hari	Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Meningkatnya Pengelolaan Budaya Daerah	Jumlah Benda dan Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	10 Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
			Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

No.	Prioritas	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Program	Perangkat Daerah
		Meningkatnya Kompetensi Pencari Kerja dan Penciptaan Wirausaha Baru	Jumlah Wirausaha Baru	50 wirausaha	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	70 persen	Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas KetenagakerjaanK operasi Usaha Kecil dan Menengah
		Menigkatnya Investasi	Nilai investasi	6,24 T	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
			Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	1.200 izin	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Inovasi Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD dilakukan berbasis pada e-Planning dan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka Pemerintah Kabupaten Karo mulai beralih menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada SIPD, perencanaan dan penganggaran atau Sistem Informasi Pembangunan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah sudah terintegrasi. Jadi mulai Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Karo sudah menggunakan sipd.kemendagri.go.id sampai penetapan mulai dengan pengentrian RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

Inovasi Daerah Lainnya

Ada beberapa inovasi daerah yang mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Karo Tahun 2022, yaitu:

1. **Judul inovasi:** pelayanan penertiban rekomendasi ijin usaha
penjelasan judul inovasi: menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat penerbitan ijin usaha koperasi
program: pelayanan ijin usaha simpan pinjam
kegiatan: penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/kota
sub kegiatan: fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ kota
indicator: jumlah rekomendasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam ksp/usp
target: 6 rekomendasi
pagu: Rp. 60.000.000,-
2. **Judul inovasi:** pelayanan penertiban rekomendasi ijin usaha
penjelasan judul inovasi: menerbitkan rekomendasi sebagai salah satu syarat penerbitan ijin usaha koperasi
program: pelayanan ijin usaha simpan pinjam
kegiatan: penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/kota
sub kegiatan: fasilitasi pemenuhan ijin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/ kota
indicator: jumlah rekomendasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam ksp/usp
target: 6 rekomendasi
pagu: Rp. 60.000.000,-

3. **Judul inovasi:** Panggilan darurat karo Siaga 112

Penjelasan judul inovasi: Panggilan Darurat Karo Siaga 112 merupakan Layanan bagi masyarakat Kabupaten Karo untuk menginformasikan kondisi Kejadian Darurat atau Kebencanaan yang perlu untuk ditindaklanjuti oleh Petugas dari OPD Pemkab. Karo yang ditugaskan.

Program: PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

Kegiatan: Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan: Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

Indikator: Government Chief Information Officer (GCIO)

Target: 1 Kegiatan

Pagu: Rp. 325.186.125

4. **Judul inovasi:** Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)

Penjelasan judul inovasi: Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang disingkat BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Rumah yang direhab merupakan rumah sederhana dengan biaya rendah tapi sudah layak huni.

Program: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Kegiatan: Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Sub Kegiatan: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Indikator: Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Target: 100 Unit

Pagu: Rp. 2.000.000.000

5. **Judul inovasi:** Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB)

Penjelasan judul inovasi: Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat Pusdalops PB adalah unsur pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan

sistem informasi dan teknologi komunikasi penanggulangan bencana di Kabupaten Karo

Program: Program Penanggulangan Bencana

Kegiatan: Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan: Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Indikator: Jumlah Warga Negara yang mendapat layanan pusdalops dan sarana serta prasarana kesiapsiagaan bencana

Target: 1 Paket

Pendanaan:

- Pembuatan media informasi berupa Website, media sosial dan pelatihan SDM BPBD Kab. Karo dalam mengoperasikan Pusdalops bekerja sama dengan UVN Veteran Yokyakarta.
- Penyediaan sarana prasarana (Komputer, Server, Alat komunikasi dan hardware lainnya) dibantu oleh BNPB.

6. **Judul inovasi:** Geografi Informasi Sistem Jaringan Jalan

Penjelasan judul inovasi: Penyediaan data mengenai kondisi jaringan jalan se- Kabupaten Karo dengan menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Program: Program Penyelenggaraan Jalan

Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan

Indikator: Dokumen laporan monitoring, evaluasi dan pelaporan

Target: 1 Sistem

Pagu: Rp. 200.000.000

7. **Judul inovasi:** GerCep Dinas Perhubungan Kabupaten Karo

Penjelasan judul inovasi: Pengadaan Rambu Elektronik (Vidiotron) di beberapa titik yang bertujuan sebagai pemberitahuan kepada pengguna jalan (jalan penghubung dari tanah Karo -Medan, dan Tanah Karo-Siantar) jika terjadi kemacetan lalu lintas atau kejadian yang menghambat perjalanan agar bisa diinformasikan lebih cepat (termasuk jalan alternatif yang digunakan) agar menanggulangi kemacetan yang lebih lama dan Panjang.

Program: Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)

Kegiatan: Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan: Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.

Indikator: Rambu elektronik Vidiotron

Target: 1 Kegiatan

Pagu: Rp. 1.000.000.000

8. **Judul inovasi:** Peningkatan Produksi Kentang dengan cara bertingkat menggunakan Mulsa Plastik

Penjelasan judul inovasi: Kabupaten karo sebagai Kabupaten dimana sebagai penyuplai produk Hortikultura baik Dalam dan Luar Negeri. Salah satu komoditi Unggulannya adalah Komoditi Kentang. Untuk meningkatkan produksi kentang tersebut, diperlukan berbagai upaya strategis serta berbagai macam Inovasi. Inovasi yang akan dilakukan antara lain adalah Produksi Kentang dengan cara Bertingkat menggunakan Mulsa Plastik. Melalui Inovasi ini dapat menghasilkan Benih Kentang dan juga Kentang untuk Konsumsi. Sehingga melalui Inovasi ini, dapat meningkatkan produksi benih dan produksi kentang konsumsinya.

Program: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarna Pertanian

Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten Karo

Sub Kegiatan: Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman

Indikator: Jumlah Komoditi

Target: 1 Komoditi Kentang

Pagu: Rp. 232.000.000

9. **Judul :** Inovasi SIPERANI (Siap Perizinan Antar Jemput Izin)

Penjelasan Judul : Pelayanan publik kini telah menjadi isu sentral dalam pembangunan, Pelayanan yang berkualitas dan bermutu tinggi menjadi perhatian utama dari organisasi pemerintah. Keterbukaan Informasi, jika dikaitkan dengan aktivitas pelayanan, ikut mendorong masyarakat semakin sadar

tentang hak dan kewajibannya. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo menyadari pentingnya peningkatan pelayanan publik melalui gagasan, ide, ataupun inovasi. Dalam hal ini Dpm-Pptsp memiliki sebuah Inovasi yang akan dilakukan yaitu SI PERANI (Siap Perizinan Antar Jemput Izin). Melalui inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah pelayanan perizinan dan Non perizinan secara terpadu serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya memiliki dokumen legalitas

Program : Pelayanan Penanaman Modal

Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dan

Sub Kegiatan : Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Non Perizinan Penanaman Modal

Indikator : Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal
Target Izin

Pagu : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah)

Pemerintah Kabupaten Karo mengikuti *Innovative Government Award* (IGA) mulai tahun 2018. Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2018 hanya mengusulkan 6 (enam) inovasi dengan nilai 100 predikat “kurang inovatif”. Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Karo kembali mengusulkan sehingga jumlah inovasi yang diusulkan pada IGA menjadi 64 (enam puluh empat) inovasi dengan nilai 630 predikat “inovatif” serta tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Karo mendapatkan nilai 3390 dengan predikat 3319 dengan jumlah inovasi yang diusulkan sebanyak 49 (empat puluh sembilan), untuk mempertahankan dan meningkatkan menjadi Kabupaten Terinovatif maka setiap perangkat daerah harus memenuhi amanat Peraturan Bupati Karo Nomor 30 Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Inovasi Satu Instansi Pemerintah Setiap Tahun.

Disamping itu, seluruh perangkat daerah, bagian, kecamatan dan puskesmas diwajibkan melaksanakan inovasi minimal satu setiap tahunnya sesuai dengan amanat Peraturan Bupati Karo Nomor 30

Tahun 2019 tentang Gerakan Satu Instansi Pemerintah Satu Inovasi Setiap Tahun sekaligus untuk membudayakan inovasi di Pemerintah Kabupaten Karo. Inovasi dapat dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan yang sudah ada anggarannya tetapi dapat juga kegiatan lain yang tidak tersedia anggarannya karena tidak membutuhkan anggaran atau bersumber dana lain (bukan APBD Kabupaten Karo Tahun 2022).

BAB V**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah merupakan beberapa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang di dalam implementasinya adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengkondisikan suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi keberhasilan program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Hal ini terkait dengan fungsi pemerintah yakni stabilisasi, distribusi dan alokasi. Dengan demikian akan sangat bergantung pada bagaimana pemerintah daerah mampu membuat dan menyusun program dan kegiatan berdasarkan perkiraan jumlah dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

Dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan kapasitas riil terlebih dahulu dilakukan penelaahan terhadap seluruh aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dapat dilihat melalui hasil musrenbang RKPD maupun yang disampaikan melalui Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

Setelah dilakukan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang masuk ke Bappeda di peroleh kesimpulan bahwa keseluruhan usulan kegiatan menjadi 3 (tiga) kluster yaitu:

- a. Usulan Bersifat Infrastruktur
- b. Usulan Terkait Bidang Kesehatan
- c. Usulan Terkait Bidang Pendidikan dan Kebencanaan

Hasil penelaahan usulan masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD beserta keseluruhan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karo sesuai dengan kapasitas riil terlampir di Lampiran II Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022 ini.

Diharapkan dimasa mendatang, Pemerintah Kabupaten Karo lebih mampu menyusun rencana program dan kegiatan yang tidak semata-mata bergantung pada jumlah anggaran yang berasal dari pemerintah pusat, akan tetapi pendanaan lebih banyak dibiayai oleh pihak ketiga maupun masyarakat sendiri.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Karo terlampir di Lampiran II Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022 ini.

Program dan kegiatan Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2022 juga dapat dilihat pada table 5.1 dibawah ini disertai dengan pagu Indikatif Anggaran.

Table 5.1
Program dan kegiatan Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2022

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp)
DINAS PENDIDIKAN	7.924.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	7.924.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	4.489.000.000
Penambahan Ruang Kelas Baru	2.400.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	450.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	230.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.009.000.000
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3.385.000.000
Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	600.000.000
Penambahan Ruang Kelas Baru	421.000.000
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	765.000.000
Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	360.000.000
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	230.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.009.000.000
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000
DINAS KESEHATAN	910.000.000
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	910.000.000
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	860.000.000
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	350.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	410.000.000
Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100.000.000

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana	50.000.000
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	15.333.699.687
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	200.000.000
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	2.110.557.665
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.110.557.665
Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	800.000.000
Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	1.000.000.000
Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	310.557.665
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.726.553.876
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.726.553.876
Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1.243.157.876
Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	483.396.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	11.296.588.146
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	11.296.588.146
Pembangunan Jalan	6.581.072.994
Rekonstruksi Jalan	1.012.751.216
Rehabilitasi Jalan	2.652.763.936
Pemeliharaan Berkala Jalan	800.000.000
Rehabilitasi Jembatan	250.000.000
BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	8.065.159.902
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	8.065.159.902
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.119.881.249
Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.119.881.249
Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	200.000.000
Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	50.000.000
Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	419.881.249
Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200.000.000
Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000

Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000
Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	6.945.278.653
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	6.945.278.653
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	6.213.278.653
Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , Utilitas Umum Perumahan	732.000.000
DINAS PERINDRUSTERIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SERTA TENAGAKERJA	120.000.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	120.000.000
Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	120.000.000
Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	120.000.000
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	50.000.000
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	50.000.000
Peyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	50.000.000
Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Bantuan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Satunan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	492.850.000
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	82.850.000
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	82.850.000
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	82.850.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	410.000.000
Pengelolaan Sampah	410.000.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	410.000.000
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUANB DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	1.779.894.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.779.894.000
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	102.544.000
Penggunaan Media Masa Cetak, Elektronik dan Media Linnya sesuai Kearifan Budaya Lokas dalam Pencitraan Program KKBPK	102.544.000

Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.291.200.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.291.200.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	386.150.000
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	46.950.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	139.200.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	200.000.000
DINAS PERHUBUNGAN	300.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	300.000.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	300.000.000
Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	300.000.000
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	100.000.000
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	100.000.000
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.000.000
DINAS PERINDRUSTERIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL SERTA TENAGAKERJA	1.014.531.342
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100.000.000
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100.000.000
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Kewenangan Kabupaten / Kota	100.000.000
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN	140.000.000
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	140.000.000
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	140.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100.000.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	100.000.000
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	100.000.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100.000.000
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100.000.000

Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	574.531.342
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	574.531.342
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi	574.531.342
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	520.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	400.000.000
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	200.000.000
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	200.000.000
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	200.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	120.000.000
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120.000.000
Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	120.000.000
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	201.344.820
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	201.344.820
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	201.344.820
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	201.344.820
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	4.032.819.796
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.823.218.557
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.823.218.557
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.823.218.557
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	1.155.536.637
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.155.536.637
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.155.536.637
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	54.064.602
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	54.064.602
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	54.064.602

DINAS PERTANIAN	4.161.000.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.497.700.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	619.000.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	165.000.000
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	454.000.000
Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	1.074.454.069
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	374.454.069
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	700.000.000
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	804.245.931
Pengadaan Benih Bibit/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	804.245.931
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	1.463.300.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	1.463.300.000
Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	600.000.000
Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	600.000.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	213.300.000
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	50.000.000
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	200.000.000
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	200.000.000
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	200.000.000
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	274.112.804
PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	274.112.804
Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.112.804
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.112.804
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	490.000.000
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	340.000.000
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	340.000.000
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	340.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	150.000.000
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	150.000.000

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	744.054.853
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	744.054.853
Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	744.054.853
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	449.054.853
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	295.000.000
TOTAL	Rp. 46.513.467.204

Selain itu Dukungan Program dan Kegiatan Prioritas RKPD Kabupaten Karo terhadap Prioritas Nasional dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022, dapat di lihat pada table 5.2 dibawah ini.

Table 5.2

Program dan Kegiatan Prioritas Kabupaten Karo Tahun 2022 yang mendukung Prioritas Nasional dan Provinsi

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
PRIORITAS 01 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Insfrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota	Penyediaan Infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya	75.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	65.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	70.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Kelautan Dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi	165.000.000	Dinas Pertanian
			Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	4.540.000.000	Dinas Pertanian
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	374.454.069	Dinas Pertanian
			Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	700.000.000	Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan ternak yang sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih Bibit/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	804.245.931	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	75.000.000	Dinas Pertanian
		Pembangunan Prasana Pertanian	Pembangunan , Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	600.000.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	600.000.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	213.300.000	Dinas Pertanian
			Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	50.000.000	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	672.799.920	Dinas Pertanian

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	75.000.000	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	200.000.000	Dinas Pertanian
	Program Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	300.000.000	Dinas Pertanian
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	200.000.000	Dinas Pertanian
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Bendung Irigasi	890.512.614	Dinas PUPR
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	7.200.000.000	Dinas PUPR
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	3.156.000.000	Dinas PUPR

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	200.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	150.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	50.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	118.300.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	264.722.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	196.600.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	120.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	8.986.552.557	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.155.536.637	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	865.760.765	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	80.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Berdasarkan Klaster Kompetensi	120.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Hubungan Industrial	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Beroperasi dalam 1 (Satu) Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	30.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	70.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	70.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	140.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten / Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil Dan Usaha Mikro (Umkm)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.200.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengembangan Umkm	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM Serta Desain Dan Teknologi	574.531.342	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	340.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	328.974.400	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.927.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	175.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
	Program Pengembangan Ekspor	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pameran Dagang Nasional	90.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pameran Dagang Lokal	90.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
	Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	95.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	70.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	150.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	449.054.853	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	295.000.000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
PRIORITAS 03 - Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	1.009.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	230.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.009.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	230.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	72.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	136.485.239	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	Dinas Pendidikan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	20.000.000	Dinas Pendidikan
	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	10.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	2.400.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	300.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	760.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	400.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	440.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	220.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	400.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	80.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	110.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	450.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	223.514.761	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	10.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	400.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	30.263.366.667	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	40.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	600.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	421.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	300.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	760.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	820.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	593.400.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	2.206.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	220.000.000	Dinas Pendidikan
			Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	500.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	200.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	200.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah	80.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	300.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	765.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Perlengkapan belajar peserta Didik	992.800.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	7.000.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	70.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	20.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	360.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	530.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	31.694.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	20.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	110.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	110.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	75.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	75.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	10.450.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	20.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	20.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengelolaan Dana BOP PAUD	3.500.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	80.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	120.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	80.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan	100.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan	30.000.000	Dinas Pendidikan

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	600.000.000	Dinas Pendidikan
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	20.000.000	Dinas Pendidikan
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	75.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Pemenuhan HAK Setiap Pemuda yang Meliputi : Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	60.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	150.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten / Kota	60.000.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
PRIORITAS 04 - Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	727.621.250	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	220.490.360	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	210.344.820	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	230.659.422	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1.594.209.411	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
			Pelaksanaan Koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan didaerah.	160.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	145.000.000	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
PRIORITAS 05 - Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar					
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana	200.000.000	DPRKPP
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Kota	50.000.000	DPRKPP
			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	419.881.249	DPRKPP
			Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200.000.000	DPRKPP

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	DPRKPP
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	50.000.000	DPRKPP
			Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000	DPRKPP
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	940.000.000	DPRKPP
Urusan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	8.234.849.959	DPRKPP

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , Utilitas Umum Perumahan	732.000.000	DPRKPP
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	100.000.000	DINAS PUPR
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	2.000.000.000	DINAS PUPR
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	100.000.000	DINAS PUPR
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	50.000.000	DINAS PUPR
			Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan	200.000.000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	100.000.000	DINAS PUPR
			Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan	800.000.000	DINAS PUPR
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	200.000.000	DINAS PUPR
			Pembangunan Jalan	6.581.072.994	DINAS PUPR
			Pelebaran Jalan Menuju Standar	12.497.598.258	DINAS PUPR
			Rekonstruksi Jalan	1.012.751.216	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jalan	2.652.763.936	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Berkala Jalan	800.000.000	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Rutin Jalan	3.984.251.089	DINAS PUPR
			Pembangunan Jembatan	50.000.000	DINAS PUPR
			Rehabilitasi Jembatan	250.000.000	DINAS PUPR
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	50.000.000	DINAS PUPR

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	419.228.000	DINAS KOMINFO
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Publik	209.400.000	DINAS KOMINFO
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	15.429.550	DINAS KOMINFO
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	17.341.120	DINAS KOMINFO
	Program Aplikasi Informatika	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	476.038.500	DINAS KOMINFO

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	100.000.000	DINAS KOMINFO
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	484.468.019	DINAS KOMINFO
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	325.186.125	DINAS KOMINFO
PRIORITAS 06 - Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					
Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	20.253.570	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha / Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	144.211.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.742.993.607	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	39.997.153	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	530.000.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	82.850.000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	274.112.804	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Urusan Ketertiban Dan Keamanan	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi(KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	100.000.000	BPBD
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	100.000.000	BPBD
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	50.000.000	BPBD
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	200.000.000	BPBD
			Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100.000.000	BPBD
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	50.000.000	BPBD

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
PRIORITAS 07 - Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					
Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	152.022.000	SEKRETARIAT DAERAH
			Fasilitasi Bantuan Hukum	175.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
			Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	25.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	125.000.000	SEKRETARIAT DAERAH
Unsur Penunjang Urusan Perencanaan	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Pelaksanaan Konsultasi Publik	36.487.039	BAPPEDA LITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	42.950.000	BAPPEDA LITBANG
			Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	143.167.731	BAPPEDA LITBANG

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	798.000.000	BAPPEDA LITBANG
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	209.190.915	BAPPEDA LITBANG
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	203.588.680	BAPPEDA LITBANG
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang Pemerintahan	22.000.000	BAPPEDA LITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	180.000.000	BAPPEDA LITBANG

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	316.504.899	BAPPEDA LITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	26.000.000	BAPPEDA LITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	108.475.805	BAPPEDA LITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	BAPPEDA LITBANG
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	50.000.000	BAPPEDA LITBANG

BIDANG URUSAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU KEGIATAN (Rp)	KET
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	50.000.000	BAPPEDA LITBANG
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	67.164.490	BAPPEDA LITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100.885.510	BAPPEDA LITBANG
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	50.000.000	BAPPEDA LITBANG
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	50.000.000	BAPPEDA LITBANG
TOTAL PAGU				Rp.	200.260.802.236

BAB VI**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci pada akhir tahun perencanaan.

Adapun indikator kinerja dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan disajikan pada tabel 6.1 dan 6.2 di bawah ini.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2022

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	Pertumbuhan PDRB	%	4,60	5,00
2	PDRB per kapita	ADHB	49.709.130	56.166.378
		ADHK	33.795.190	35.470.268
3	Indeks Gini		0,3879	0,3879
4	Angka melek huruf	%	99,5	99,6
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	9,5	9,5
5	Angka usia harapan hidup	Angka	71,65	71,75
6	Persentase balita gizi buruk	%	3	3
	Prevalensi balita gizi kurang	%	5	5
7	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja	%	0,04	0,04
8	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	%	84,5	84,5
	Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	%	25	25
9	Persentase PAD terhadap pendapatan	%	7,58	7,74
10	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP
	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	persen	87,5	89
11	Penguatan cadangan pangan	ton	20	20
12	Penanganan daerah rawan pangan	persen	1	1
	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB	%	52,91	52,65
13	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB,	tdi	tdi	tdi
14	Produksi sektor pertanian	Juta	11.712.951	12.298.598,11
	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	%	5,81	5,78
15	Produksi sektor perkebunan	Satuan	1.318.028	1.383.930
16	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Persen	14,01	14,71
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	persen	10,58	10,59
17	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	persen	3,75	3,78
18	Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor Industri	persen	0,00	0,00
	Pertumbuhan Industri	persen	0,19	0,20
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	ribu	1.469.630	1.375.069
2	Nilai tukar petani	n/a	n/a	n/a
3	Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	%	38,4	38,5
4	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	persen	0,00071	0,00071
5	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin	1200	1200
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	Pendidikan			
1.1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	17,7	20
1.2.	Angka partisipasi kasar	%	89	90
1.4.1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	83	85
1.4.2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	83	83,4
1.5.1.	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	82,0	83
1.5.2.	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	70,7	72
1.6.	Angka Putus Sekolah:			
1.6.3.	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	%	0,21	0,21

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
1.7.	Angka Kelulusan:			
1.7.1.	Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	%	100	100
1.7.2.	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	%	100	100
1.7.3.	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA			
1.8.	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1.	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	99	99
1.8.2.	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	98	98
1.9.	Fasilitas Pendidikan:			
1.9.1.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	40	45
1.9.2.	Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	%	55	60
1.10.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	39	39
1.12.	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	730	730
1.14.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	%	0,03	
1.19.	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87	87,5
2	Kesehatan			
2.1.	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	6,7	6,7
2.2.	Angka kelangsungan hidup bayi	n/a	n/a	n/a
2.3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	10	10
2.4.	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	per 1.000 KH	5	5
2.5.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	per 100.000 KH	90	90
2.6.	Rasio posyandu per 1000 balita	Rasio	8,8	9
2.7.	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk	Rasio	0,45	0,42
2.8.	Rasio Poliklinik per 1.000 penduduk	Rasio	0,14	0,14
2.9.	Rasio Pustu per 1.000 Penduduk	Rasio	0,5	0,5
2.10.	Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk	Rasio	0,01	0,01
2.11.	Rasio dokter umum per 1000 penduduk	Rasio	0,24	0,24
2.12.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	Rasio	12,35	12,35
2.13.	Rasio Dokter Gigi per 1.000 penduduk	Rasio	0,08	0,08
2.14.	Rasio tenaga medis per 1000 penduduk	Rasio	0,44	0,45
2.15.	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	30	40
2.16.	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	75	80
2.17.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	96	96
2.18.	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100
2.19.	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	n/a	n/a	n/a
2.20.	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	80	80
2.21.	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	orang	2	2
2.22.	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	10	10
2.23.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	73	75
2.24.	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	190	190
2.25.	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	per 100.000 penduduk	4	4
2.26.	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	75	75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
2.27.	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	90	90
2.28.	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100
2.29.	Penderita diare yang ditangani	%	78	78
2.30.	Angka kejadian Malaria	n/a	0	0
2.31.	Tingkat kematian akibat malaria	orang	0	0
2.32.	Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida	%	0	0
2.33.	Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat	%	0	0
2.34.	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,5	0,5
2.35.	Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir	n/a	n/a	n/a
2.36.	Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS	n/a	n/a	n/a
2.37.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	n/a	n/a	n/a
2.38.	Cakupan kunjungan bayi	%	82	84
2.39.	Cakupan puskesmas	%	111,8	111,8
2.40.	Cakupan pembantu puskesmas	%	79,2	79,6
2.41.	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	76	78
2.42.	Cakupan pelayanan nifas	%	75	78
2.43.	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	20	30
2.44.	Cakupan pelayanan anak balita	%	75	78
2.45.	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	%	100	100
2.46.	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	%	85	90
2.47.	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	%	n/a	n/a
2.48.	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	%	80	80
2.49.	Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100
2.50.	Cakupan pelayanan ibu hamil sesuai standar	%	76	78
2.51.	Cakupan pelayanan ibu bersalin sesuai standar	%	76	78
2.52.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai standar	%	76	78
2.53.	Cakupan pelayanan Kesehatan anak balita sesuai standar	%	75	78
2.54.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	%	85	90
2.55.	Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	55	60
2.56.	Persentase Warga Negara Usia 60 tahun keatas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	%	55	60
2.57.	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	25	30
2.58.	Persentase Penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	65
2.59.	Persentase Penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	40	42
2.60.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	55	60
2.61.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	40	45
2.62.	Persentase sarana Puskesmas sesuai standar	%	79	89

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
2.63.	Persentase prasarana Puskesmas sesuai standar	%	42	53
2.64	Persentase Puskesmas dengan kelengkapan alat kesehatan sesuai standar	%	36,84	42,11
2.65.	Persentase sarana puskesmas pembantu sesuai standar	%	69	71
2.66.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	%	81	83
2.67.	Persentase balita stunting	%	30	28
2.68.	Cakupan Vaksinasi Covid-19	%	70	90
2.69.	Persentase Desa/Kelurahan melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat dan Stop Buang Air Besar sembarangan	%	75	80
2.70.	Persentase Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
2.71.	Cakupan masyarakat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	%	73	74
2.72.	Persentase Puskesmas terakreditasi	%	100	100
2.73.	Persentase Rumah Sakit terakreditasi	%	80	80
2.74.	Persentase Puskesmas melaksanakan sistem informasi pelayanan kesehatan secara elektronik	%	26,3	52,6
2.75.	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	%	100	100
2.76.	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIK	%	100	100
2.77.	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	42	63
2.78.	Persentase tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	10	20
2.79.	Persentase sarana dan produk farmasi dan makanan minuman memenuhi persyaratan	%	65	66
2.80	Persentase sarana kefarmasian yang diawasi	%	90	92
2.81	Persentase sarana produksi makanan yang diawasi	%	90	92
2.82	Persentase makanan jajanan yang diawasi	%	63	66
2.83	Persentase post market produk makanan minuman yang diawasi	%		
2.84	Persentase Desa/Kelurahan melaksanakan pembudayaan Germas	%	14	28
2.85	Persentase Posyandu aktif	%	100	100
3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
3.1.	Pekerjaan Umum:			
3.1.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	63,00	65
3.1.2.	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,195	0,198
3.1.4.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	63,00	65
3.1.5.	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	0,35	0,35
3.1.7.	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	74,08	74,58
3.1.9.	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	61	62
3.1.10.	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	%	1,19	1,06
3.1.11.	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	15	15
3.1.12.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,11	50,61
3.1.13.	Rasio Jaringan Irigasi		408.917/144775	408.917/144775
3.1.14.	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	70,702	72,702
3.1.15.	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	%	34,300	34,400
3.1.16.	Persentase areal kawasan kumuh	n/a	n/a	n/a
3.1.17.	Persentase penanganan sampah	%	75	76
3.1.18.	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	n/a	n/a	n/a
3.1.19.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		2,98	2,98
3.2. Penataan Ruang:				
3.2.1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	n/a	n/a	n/a
3.2.2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	%	25	26
3.2.3.	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	n/a	n/a	n/a
3.2.4.	Ruang publik yang berubah peruntukannya	n/a	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
3.2.5.	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara terhadap luas daratan	n/a	n/a	n/a
3.2.6.	Ketaatan terhadap RTRW	%	75	76
3.2.7.	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	Orang	50	0
3.2.8.	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	%	62	64
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			
4.1.	Rasio rumah layak huni	%	96,21	96,43
4.2.	Rasio permukiman layak huni	Ha	97,09	97,90
4.3.	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	3,79	3,57
4.4.	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0	0,00	0,00
4.5.	Persentase pemukiman yang tertata	Ha	97,09	97,90
4.6.	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	Ha	2,98	2,24
4.7.	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	%	20,00	40,00
4.8.	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	n/a	n/a	n/a
4.9.	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	Ha	97,09	97,90
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
5.1.	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	Orang	570	570
5.1.1.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	n/a	n/a	n/a
5.1.2.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	0,0212	0,0247
5.1.3.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) (pada kec. Kabanjahe, simpang Empat, Tigapanah, Berastagi) (menit)	Kejadian	15	10
5.1.4.	Persentase Penegakan PERDA			
5.2.	Sub Urusan Bencana			
5.2.1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	500	1100
5.2.2.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	500	1800
5.2.3.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	144	250
6	Sosial			
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	50,00%	53,85%
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	50,00%	53,85%
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	61,89%	62,08%
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	13%	18%
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	100%	100%
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100%	100%
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100%	100%
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100%	100%
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	16,98%	18,15%
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja			
1.3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	64	66
1.4.	Keselamatan dan perlindungan	%	WEWENANG PROVINSI	
1.5.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	%	93	93,5
1.7.	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	WEWENANG PROVINSI		
1.8.	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan			
1.9.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	40	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
1.10.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	%	50	50
1.11.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	%	20	20
1.12.	Rasio lulusan S1/S2/S3	%	15	15
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
2.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	3,67%	3,72%
2.2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%	28,57	28,57
2.3.	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	96,33%	96,28%
2.4.	Rasio KDRT	%	0,01	0,01
2.5.	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%	0	0
2.6.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	80	80
2.7.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100
2.8.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100	100
2.9.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	75	75
2.10.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	80	80
2.11.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	50	50
2.12.	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	50	50
2.13.	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%	100	100
2.14.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	%	n/a	n/a
2.15.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	%	n/a	n/a
2.16.	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	%	n/a	n/a
2.17.	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	%	n/a	n/a
2.18.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	%	n/a	n/a
2.19.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector nonpertanian	%	n/a	n/a
2.20.	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	%	70	70
3	Pangan			
3.1.	Ketersediaan pangan utama	ton	111232,45	112789,71
3.2.	Ketersediaan energi dan protein perkapita	Kkal/kap/hari	Energi = 2400	Energi = 2400
3.3.4.	Regulasi ketahanan pangan	gr/hari	Protein =63,77	Protein =63,77
4	Pertanahan			
4.1.	Persentase luas lahan bersertifikat	Ha	2,50	3,60
4.2.	Penyelesaian kasus tanah Negara	kasus	1,00	1,00
4.3.	Penyelesaian izin lokasi	lokasi	2,00	2,00
5	Lingkungan Hidup			
5.28.	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	ada	ada	ada
5.29.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	nilai	90	90
5.30.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	nilai	90	95
5.31.	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	nilai	50	55
5.32.	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	6%	9%
5.40.	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	kali	13	13
5.41.	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada
5.42.	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.	%	100	100
5.43.	Timbulan sampah yang ditangani	%	80	82
5.44.	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	ton	30	50

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
5.45.	Persentase cakupan area pelayanan	%	30	32
5.46.	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	80	82
5.47.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	nilai	0	71
5.48.	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	n/a	n/a	n/a
5.49.	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	n/a	n/a	n/a
5.50.	Jumlah rekomendasi izin tempat penyimpanan sementara limbah B3	jumlah izin		10
6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				
6.1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	%	100%	100%
6.2.	Rasio bayi berakte kelahiran	%	97%	97%
6.3.	Rasio pasangan berakte nikah	%	80%	100%
6.4.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada
6.5.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah
6.6.	Kepemilikan KTP (%)	%	100%	100%
6.7.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk (%)	%	60%	70%
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
7.1.	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	n/a	n/a	n/a
7.2.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	%	2%	3%
7.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	%	94	94
7.4.	Jumlah LSM aktif	LSM	0	0
7.5.	LPM Berprestasi	LPM	1	2
7.6.	Persentase PKK aktif	%	100	100
7.7.	Persentase Posyandu aktif	%	100	100
7.8.	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	-	5	5
7.9.	Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat	n/a	n/a	n/a
7.10.	Jumlah BUMDes	BUMDes	169	190
7.11.	Jumlah Desa Berprestasi	Desa	1	2
8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
8.1.	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)		1,10	1,07
8.2.	Total Fertility Rate (TFR)		2,25	2,22
8.3.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	%	50	55
8.4.	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	%	60	70
8.5.	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	n/a	n/a	n/a
8.6.	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	n/a	n/a	n/a
8.7.	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kelompok	10	15
8.8.	Rata-rata jumlah anak per keluarga		3	3
8.9.	Ratio Akseptor KB	%	9,99	10,09
8.10.	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	74,09	75,96
8.11.	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	n/a	n/a	n/a
8.12.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	n/a	n/a	n/a
8.13.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	%	14,52	13,5
8.14.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	32,12	33
8.15.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	38,9	37,37
8.16.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	orang	581	690
8.17.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	orang	500	590

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
8.18.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	orang	445	540
8.19.	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	n/a	n/a	n/a
8.20.	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	n/a	n/a	n/a
8.21.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	%	100	100
8.22.	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	orang	50	100
8.23.	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		269	269
8.24.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	%	100	100
8.25.	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	n/a	n/a	n/a
8.26.	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	n/a	n/a	n/a
8.27.	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	n/a	n/a	n/a
8.28.	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	n/a	n/a	n/a
8.29.	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	%	68	73
8.30.	Rata-rata usia kawin pertama wanita	n/a	n/a	n/a
8.31.	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	n/a	n/a	n/a
9 Perhubungan				
9.1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum	orang	3.881.556	4.075.634
9.2.	Rasio ijin trayek	%	0,0000769	0,0000769
9.3.	Jumlah uji kir angkutan umum	unit	2673	5346
9.4.	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	buah	3	3
9.5.	Persentase layanan angkutan darat (dalam kabupaten)	%	100	100
9.6.	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	50	0
9.7.	Pemasangan Rambu-rambu	%	65	66
9.8.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,03830	0,03830
9.9.	Jumlah orang yang terangkut angkutan umum	Orang	3.881.556	4.075.634
9.10.	Jumlah orang/barang melalui dermaga/ terminal per tahun	orang	3.881.556	4.075.634
10 Komunikasi dan Informatika				
10.1.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	0	0
10.2.	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	87	87
10.3.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	60	65
10.4.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	%	60	65
10.5.	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	%	12	14
10.6.	Jumlah surat kabar nasional/lokal	eks	30	30
10.7.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	buah	7	7
10.8.	Website milik pemerintah daerah	ada/tidak	ada	ada
11 Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah				
11.1.	Persentase koperasi aktif	%	63	64
11.2.	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	%	91	92
11.3.	Persentase BPR/LKM aktif	n/a	n/a	n/a
11.4.	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99	99
12 Penanaman Modal				
12.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	investor	77	81
12.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp. (dalam triliun)	6,07	6,11
12.3.	Rasio daya serap tenaga kerja	persen	83,75	80,36
12.4.	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	persen	0,65	0,65
13 Kepemudaan dan Olah Raga				
13.1.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	Organisasi	24	25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
13.2.	Persentase wirausaha muda	Kegiatan	15	15
13.3.	Cakupan pembinaan olahraga	Kegiatan	26	27
13.4.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Kegiatan	69	89
13.5.	Cakupan pembinaan atlet muda	Kegiatan	200	300
13.6.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	374	400
13.7.	Jumlah prestasi olahraga	Cabor	14	16
14	Statistik			
14.1.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	ada/tidak	ada	ada
14.2.	Buku "kabupaten dalam angka"	ada/tidak	ada	ada
14.3.	Buku "PDRB"	ada/tidak	ada	ada
15	Persandian			
15.1.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	2	6
16	Kebudayaan			
16.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Kali	5	7
16.2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Cagar Budaya	0	2
16.3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya Budaya	15	10
16.4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar Budaya	0	0
17	Perpustakaan			
17.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	0,1	0,12
17.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	%	0,2	0,21
17.3.	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	%	1,22	1,23
17.4.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang	40000	43000
17.5.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	buah	7000	8000
17.6.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	%	0,03	0,04
18	Kearsipan			
18.1.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Dokumen	83,33%	87,50%
18.2.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	Kegiatan	2	2
Layanan Urusan Pilihan				
1	Pariwisata			
1.1.	Kunjungan wisata	Persentase	37,97	41,77
		Orang	600.000	660.000
1.2.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1,5	1,5
1.3.	PAD sektor pariwisata	Persentase	29,82	32,23
2	Pertanian			
2.1.	Kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap PDRB (%)	%	52,91	52,65
2.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a
2.3.	Produktivitas palawija per hektar	Kw/Ha	67,61	67,94
2.3.	Kontribusi sektor perkebunan Tahunan terhadap PDRB (%)	%	5,81	5,78
2.4.	Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	n/a	n/a	n/a
2.5.	Produktivitas padi per hektar	Kw/Ha	59,48	59,77
2.6.	Produktivitas palawija per hektar	Kw/Ha	67,61	67,94
2.7.	Cakupan bina kelompok petani	%	6,13	6,44
4	Energi dan Sumber Daya Mineral			
4.1.	Persentase rumah tangga pengguna listrik	Bukan wewenang DLH sesuai dengan UU nomor 23 tahun 2014		
4.2.	Rasio ketersediaan daya listrik			
4.3.	Persentase pertambangan tanpa ijin			
4.4.	Jumlah pengusaha yang memiliki izin pemanfaatan langsung panas bumi	pengusaha		
5	Perdagangan			
5.1.	Ekspor Bersih Perdagangan		86292,6	86292,6
6	Perindustrian			
6.1.	Cakupan bina kelompok pengrajin	persen	12,98	13,24
8	Kelautan dan Perikanan			
8.1.	Produksi perikanan	%	90	78
8.2.	Konsumsi ikan	%	94,58	96,9
8.3.	Cakupan bina kelompok nelayan	%	10	20
8.4.	Produksi perikanan kelompok nelayan	%	68,23	69,59
8.5.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	%	68,23	69,59
8.6.	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	tdi (Kab. Karo tidak memiliki laut)		
8.7.	Nilai tukar nelayan	%		
8.8.	Cakupan bina kelompok Pembudidaya Ikan	%	10,9	22
Penunjang Urusan				

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
1	Perencanaan Pembangunan			
1.1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada
1.2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Dokumen	Ada	Ada
1.3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Dokumen	Ada	Ada
1.4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Dokumen	Ada	Ada
1.5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100
1.6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	100	100
1.7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Dokumen	Ada	Ada
2	Keuangan			
2.1.	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-	WTP	WTP
2.2.	Persentase SILPA	%	13,26	11,934
2.3.	Persentase SILPA terhadap APBD	%	13,26	11,934
2.4.	Persentase program yang tidak terlaksana	%	0	0
2.5.	Persentase kegiatan yang tidak terlaksana	%	0	0
2.6.	Persentase belanja pendidikan (20%)	%	20	20
2.7.	Persentase belanja kesehatan (10%)	%	10	10
2.8.	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	%	Tdi	Tdi
2.9.	Proporsi belanja operasi terhadap total Belanja Daerah	%	69,41	69,56
2.10.	Proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah	%	9,97	9,78
2.11.	Proporsi Belanja Pemenuhan Aparatur terhadap total Belanja Daerah	%	46,78	46,68
2.12.	Proporsi Belanja Tidak Terduga terhadap total Belanja Daerah	%	0,15	0,15
2.13.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	%	20,47	20,51
2.14.	Penetapan APBD	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan			
3.1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	jam	14	15
3.2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	11	13
3.3.	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	2,23%	2,79%
3.4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		36	36
3.5.	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah		323	323
3.6.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		5200	5300
3.7.	Jumlah Aparatur yang melakukan Pelanggaran Disiplin Aparatur	ASN	19	18
4	Penelitian dan pengembangan			
4.1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan.	%	100	100
4.2.	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	%	100	100
	Penerapan SIDA:			
4.3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	100	100
4.4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100
5	Pengawasan			
5.1.	Persentase tindak lanjut temuan	%	97	98
5.2.	Persentase pelanggaran pegawai	% ^	0,0345%	0,0172%
5.3.	Jumlah temuan BPK	Jumlah Temuan	10	8
6	Sekretariat Dewan			
6.1.	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ADA/TIDAK	ADA	ADA
6.2.	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ADA/TIDAK	ADA	ADA

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
6.3.	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ADA/TIDAK	ADA	ADA

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	CC	B
	Indeks Persepsi Pelayanan Publik	Indeks	83	86
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Indeks	CC	B
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP
	Indeks Profesionalisme ASN	%	55	60
	Skor LPPD	Poin	2,88	2,98
2	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	74,53	74,63
	Angka Melek Huruf	%	99,53	99,56
	Rata-rata lama sekolah	tahun	9,89	10,16
	Standar Pendidikan Nasional	level	Level 3	Level 4
	Penguasaan TIK oleh pendidik	%	20	30
	Indeks Aktivitas Literasi Membaca Masyarakat (Alibaca)	indeks	21,36	22,71
	Angka Harapan Hidup	tahun	71,65	71,75
	Indeks Pembangunan Gender	%	96,35	96,40
	Persentase Penegakan PERDA	%	73,19	73,83
	Pengetahuan masyarakat, remaja dan anak sekolah atas bahaya narkoba	%	100	100
	Jumlah prestasi olahraga	cabang olahraga	14	16
	Persentase Kemiskinan	persen	8,90	8,85
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,70	5,00
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	1,75	1,70
	Nilai Investasi	triliun	6,07	6,11
	Peningkatan Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	59,4759	59,7732795
	Peningkatan Produktivitas tanaman hortikultura	Kw/Ha	258,25	259,55
	Peningkatan Produktivitas tanaman perkebunan	kg/ha/thn	1116,17	1121,75
	Produksi sektor pertanian	Ton	1936466,16	1946148,491
	Produksi Sektor Perkebunan	Ton	17446,8	17534,034
	Produksi daging	ton/tahun	3481,45	3655,52
	Persentasi koperasi aktif (%)	persen	63	64
	Jumlah produk UMKM/IKM yang inovatif	produk	5	5
	Jumlah UMKM Naik kelas	persen	0,39	0,44

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
	Jumlah pemasaran Produk UMKM secara digital	pelaku	100	100
	pertumbuhan Industri	persen	0,19	0,2
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang	600000	650000
	Lama Kunjungan Wisatawan	hari	1,1	1,1
	Produksi Perikanan (%)	persen	90	78
	Nilai ekspor	miliar	5399,92	5699
	Jumlah pasar yang tertib ukur	pasar	1	2
	Jumlah pasar yang terkelola dengan baik	pasar	1	2
	BUMD/Perusda	BUMD	0	1
	Ketersediaan energi dan Protein (kkal/kap/hari)	kkal/kap/hari, gr/hari	Energi = 2400, Protein =63,77	Energi = 2400, Protein =63,77
	Skor Pola Pangan Harapan (%)	persen	87,5	89
	Pengawasan dan Pembinaan Keamanan pangan (%)	persen	10	20
	Jumlah sertifikasi produk pangan (komoditi)	komoditi	2	2
	Jumlah Wirausaha Baru	wirausaha	50	50
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	persen	70	75
	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan	izin	1200	1200
4	Indeks Daya Saing Infrastruktur (IDSI)	indeks	3,2	3,3
	Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	indeks	2,2	2,5
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Predikat	Baik	Baik
	Indeks Risiko Bencana	indeks	110	109
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik,	%	63	65
	Persentase rumah tinggal bersanitasi layak	%	74,08	74,58
	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	68,702	68,704
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	50,11	50,61
	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat:	%	61	62
	Gedung Pemerintahan yang layak dan baik	%	62	64
	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah/provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	60	65
	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	25,09	46,59
	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	55	60

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN 2022	PROYEKSI TARGET TAHUN 2023
	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	45	50
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas air	nilai	90	90
	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas udara	nilai	90	95
	Hasil Pengukuran tutupan lahan	nilai	50	55
	Luasan RTH publik di wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	25	26
	Ketaatan terhadap RTRW.	%	75	76
	Persentase jumlah sampah yang tertangani (di wilayah pelayanan)	%	75	76
	Rasio Konektivitas Kabupaten	%	93,94	95
	Kinerja Lalu Lintas Kabupaten	Rasio	0,35	0,3
	Indeks SPBE	Indeks	2,2	2,5
	Indeks Risiko bencana	Indeks	110	109

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 dan belum ditetapkannya RPJMD Kabupaten Karo Tahun 2022-2026 maka penyusunan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022 merujuk Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 untuk disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Karo sebagai pedoman menyusun RAPBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan:

1. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), RKPD ini disusun dengan pendekatan dalam penganggaran keuangan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. RKPD Tahun 2022 tidak hanya memuat kegiatan-kegiatan dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan publik, tetapi juga memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
3. RKPD telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD yang telah diverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sesuai dengan prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah serta rencana kerja program/kegiatan telah tertuang ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
4. Perangkat Daerah dan seluruh *stakeholders* pembangunan termasuk masyarakat luas dan dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKPD Tahun 2022 dengan sebaik-baiknya.

5. Agar dapat dicapai sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan Provinsi maupun dari APBN maka setiap Perangkat Daerah agar menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2022 dengan memperhatikan RKPD Kabupaten Karo Tahun 2022.
6. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat dan dunia usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan yang direncanakan melalui program-program pembangunan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga dapat bertindak sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan kegiatan-kegiatan/program-program pembangunan. Guna tercipta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berkewajiban untuk melakukan pemantauan terhadap penjabaran dan sinergitas RKPD tahun 2022 ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan Kebijakan Umum Anggaran APBD tahun 2022 serta prioritas dan pagu indikatif PD Tahun 2022. Keberhasilan pembangunan daerah selain ditentukan oleh kualitas produk perencanaan, juga sangat ditentukan oleh sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin para pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam mengimplementasikan rencana. Dengan demikian pelaksanaan pembangunan diharapkan mampu menjawab dan mengurangi permasalahan yang ada, dan memanfaatkan serta mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki, yang semuanya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan didukung stabilitas keamanan yang semakin mantap.

BUPATI KARO,



CORY SRIWATY SEBAYANG



LAMPIRAN I
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN KARO
TAHUN 2020

DAFTAR HALAMAN EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	HALAMAN
1	DINAS PENDIDIKAN	1
2	DINAS KESEHATAN	4
3	RUMAH SAKIT UMUM KABANJAHE	7
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	10
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	13
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	15
8	DINAS SOSIAL	18
9	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM	21
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	25
11	DINAS KETAHANAN PANGAN	29
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	36
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	37
15	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	39
16	DINAS PERHUBUNGAN	41
17	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	47
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	48
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	51
20	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	55
21	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	57
22	DINAS PERIKANAN	60
23	DINAS PERTANIAN	62
24	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	65
25	SEKRETARIAT DPRD	68
26	BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM	69
27	BAGIAN KEMASYARAKATAN DAN BINA PEMERINTAH DESA	72
28	BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	73
29	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	74
30	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	75
31	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SDA	76
32	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	77
33	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	79
34	BAGIAN TATA USAHA	80
35	BAGIAN OTONOMI DAERAH	81
36	BAGIAN ORGANISASI	82
37	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	83
38	INSPEKTORAT DAERAH	84
39	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	85
40	BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	90
41	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	93
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	95
43	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	99
44	KECAMATAN MERDEKA	101
45	KECAMATAN JUHAR	102
46	KECAMATAN KABANJAHE	104
47	KECAMATAN BERASTAGI	106
48	KECAMATAN TIGABINANGA	108
49	KECAMATAN NAMAN TERAN	110
50	KECAMATAN MEREK	112
51	KECAMATAN KUTABULUH	113
52	KECAMATAN TIGAPANAH	115
53	KECAMATAN MUNTHE	118
54	KECAMATAN BARUSJAHE	121
55	KECAMATAN MARDINDING	123
56	KECAMATAN PAYUNG	125
57	KECAMATAN DOLATRAYAT	127
58	KECAMATAN TIGANDERKET	128
59	KECAMATAN LAU BALENG	130

EVALUASI TERHADAP HASIL RKPD KABUPATEN KARO TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2020

No	Sas ara n	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/ Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD perangkat daerah s/d Renja tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi (2020)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.		
												K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1				DINAS PENDIDIKAN		99.079	132.269.771.663	33.257	179.248.697.704	16.990	79.669.854.267	1	0	249	1.197.366.604	1.330	19.669.547.155	15.105,44	19.184.854.130	16.686	40.051.767.889	98	50	49.943	219.300.465.593	50	166	Dinas Pendidikan				
		1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	11.001	14.820.422.983	2.355	8.238.480.979	20	5.802.880.000	-	-	249	1.197.366.604	269	1.302.154.529	1.525,28	3.265.179.889	2043	5.764.701.022	10.215	99	4398	14.003.182.001	40	94	Dinas Pendidikan			
		1	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	60	556.830.000	35	129.114.405	12	61.800.000	0,0	0	5	18.153.404	4,71	15.695.729	1,85	25.344.089	12	59.193.222	100	96	47	188.307.627	78	34	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang/ bulan	545	3.294.432.000	286	1.073.320.000	120	500.520.000	0,0	0	18	49.530.000	17,59	49.530.000	84,82	360.460.000	120	459.520.000	100	92	406	1.532.840.000	74	47	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang/ bulan	18	213.240.000	7	63.690.000	36	44.260.000	0,0	0	1	10.935.000	2,13	18.225.000	-	0,41	14.580.000	3	43.740.000	8	99	10	107.430.000	57	50	Dinas Pendidikan
		1	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	405	289.481.250	134	131.980.000	50	50.640.000	0,0	0		-	-	-	10,00	47.490.000	10	47.490.000	20	94	144	179.470.000	36	62	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	440	1.873.604.330	170	666.700.000	60	225.800.000	0,0	0			24,96	29.450.000	19,04	195.991.500	44	225.441.500	73	100	214	892.141.500	49	48	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis	14	748.765.920	6	301.545.140	2	108.500.000	0,0	0		-	-	-	6,00	136.438.900	6	136.438.900	300	126	12	437.984.040	86	58	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jenis	150	1.178.510.000	90	290.800.000	16	120.000.000							36,00	94.500.000	36	94.500.000	225	79	126	385.300.000	84	33	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	bh	3	30.000.000	50	9.000.000	0							6,00	11.400.000	6	11.400.000	0	0	56	20.400.000	1867	68	Dinas Pendidikan		
		1	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman	kotak	4.000	127.650.000	1.247	39.491.000	120	6.000.000							242,00	7.530.000	242	7.530.000	202	126	1489	47.021.000	37	37	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Orang/Hari/ Kali	2.600	1.501.405.726	245	468.950.434	600	165.420.000	0,0	0	75	17.883.200	59,14	14.193.800	258,35	153.745.400	392	185.822.400	65	112	637	654.772.834	24	44	Dinas Pendidikan	
		1	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang/ bulan	2.766	5.006.503.757	86	5.063.890.000	600	4.519.940.000	0,0	0	150	1.100.865.000	160,24	1.175.060.000	861,63	2.217.700.000	1172	4.493.625.000	195	99	1258	9.557.515.000	45	191	Dinas Pendidikan	
		1	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	93	5.523.433.915	98	1.626.546.683	7	317.935.843	-	-	-	-	-	-	-	20,00	430.321.314	20	430.321.314	286	135	118	2.056.867.997	127	37	Dinas Pendidikan		
		1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	15	2.944.681.746	21	1.077.726.020	2	177.935.843	0,0	0		-	-	-	18,00	352.660.000	18	352.660.000	900	198	39	1.430.386.020	260	49	Dinas Pendidikan	
		1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya Peralatan Gedung Kantor	unit	72	2.174.752.169	73	461.942.800	3	75.000.000								0	-	0	0	73	461.942.800	102	21	Dinas Pendidikan		
		1	02	02	18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	3	104.000.000	4	86.877.863	1	15.000.000							1,00	37.761.314	1	37.761.314	100	252	5	124.639.177	167	120	Dinas Pendidikan	
		1	01	02	16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	3	300.000.000	0		-	1	50.000.000						1,00	39.900.000	1	39.900.000	100	80	1	39.900.000	33	13	Dinas Pendidikan	
		1	01	02	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	%	181	140.153.000		175.899.500	20	80.000.000	-	-	-	-	-	-	118,00	77.050.000	118	77.050.000	590	96	118	252.949.500	65	180	Dinas Pendidikan		
		1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	181	140.153.000	390	175.899.500	100	80.000.000							118,00	77.050.000	118	77.050.000	118	96	508	252.949.500	281	180	Dinas Pendidikan	
		1	01	04	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		%	17.000	1.379.063.465	6.619	138.740.100	20	50.000.000	-	-	-	-	930	13.282.700	2.570,21	50.282.700	3500	63.565.400	17.500	127	10119	202.305.500	60	15	Dinas Pendidikan		
		1	01	05	02	Pelaksanaan penilaian dan penetapan angka kredit jabatan fungsional guru/pengawas/penilik	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas dan Penilik	orang/ kali	17.000	1.379.063.465	6.619	138.740.100	3500	50.000.000	0,0	0			929,79	13.282.700	2.570,21	50.282.700	3500	63.565.400	100	127	10119	202.305.500	60	15	Dinas Pendidikan	
		1	01	15	15	Program Pendidikan Anak Usia Dini		%	895	1.602.500.000	235	401.425.518	15	521.256.000	0	0	0	0	0	19.225.370	15,76	507.305.950	16	526.531.320	107	101	251	927.956.838	28	58	Dinas Pendidikan	
		1	01	15	23	Pembangunan ruang kelas baru	Bertambahnya RKB	ruang	2	387.830.000	0		-	0								0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Pendidikan		
		1	01	15	29	Diklat Tutor dan Penyelenggara PAUD Formal dan Nonformal	Meningkatnya kompetensi tutor dan penyelenggara Paud	orang	250	257.500.000	0		-	0	0,0	0						0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Pendidikan		
		1	01	15	30	Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya insentif tutor	orang	50	50.000.000	0		-	0								0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Pendidikan		
		1	01	15	35	Apresiasi GTK PAUD dan Dikmas Berprestasi dan Berdedikasi	Terlaksananya pengadanan Alat Permainan Edukatif (APE) PAUD	kegiatan	9	430.000.000	37	31.814.540	0		0,0	0						0	-	0	0	37	31.814.540	413	7	Dinas Pendidikan		
		1	01	15	36	Pembinaan dan Pelaksanaan Akreditasi Lembaga PAUD	Meningkatnya pemahaman Lembaga terhadap akreditasi	orang	166	30.000.000	0		-	0								0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Pendidikan		

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18									
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		1	01	15	57	Lomba Kreativitas Taman Kanak-kanak	Terlaksananya lomba taman Kanak-kanak	orang	400	135.000.000	195	61.739.978	0		0,0	0			0	-	0	0	195	61.739.978	49	46	Dinas Pendidikan					
			1	01	15	58	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD/TK	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas PAUD/TK	ruang	6	330.000.000	2	110.382.500	1	80.984.000	0,0	0	0,24	19.225.370	0,76	61.746.110	1	80.971.480	100	100	3	191.353.980	49	58	Dinas Pendidikan		
			1	01	15	60	Peningkatan sarana prasarana perlengkapan pendidikan	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	paket	5	170.000.000	1	193.455.000	4	122.922.000	0,0	0			4,00	122.685.000	4	122.685.000	100	100	5	316.140.000	100	186	Dinas Pendidikan		
			1	01	15	61	Pengadaan buku bagi lembaga PAUD	Tersedianya buku bagi lembaga PAUD	paket	5	50.000.000	0	4.033.500	1	10.450.000	0,0	0			1,00	10.364.900	1	10.364.900	100	99	1	14.398.400	27	29	Dinas Pendidikan		
			1	01	15	70	Penyediaan Bantuan Operasional PAUD	Terlaksananya pemberian bantuan lembaga PAUD	lembaga	4	150.000.000	0	-	9	306.900.000					10,00	312.509.940	10	312.509.940	111	102	10	312.509.940	250	208	Dinas Pendidikan		
			1	01	16		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		%	64.047	104.872.857.300	21.557	165.612.219.602	16.521	72.012.880.326	1	0	0	0	131	18.299.812.255	8.553,44	14.267.079.284	8685	32.566.891.539	53	45	30242	198.179.111.141	47	189	Dinas Pendidikan
			1	01	16	39	Pembangunan/Penambahan Ruang Kelas Baru SD/SMP Sekolah	Bertambahnya Ruang Kelas Baru SD/SMP	ruang	28	5.659.964.600	48	9.071.237.200	35	1.229.055.000	0,0	0		1,00	251.553.700	4,00	972.071.000	5	1.223.624.700	14	100	53	10.294.861.900	189	182	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	41	Pembangunan Laboratorium / Ruang Praktikum Sekolah	Meningkatnya jumlah Laboratorium/Ruang Praktikum SMP	ruang	5	2.100.000.000	3	1.129.923.600	10	2.291.333.000	0,0	0		1,92	439.063.750	1,08	1.755.942.463	3	2.195.006.213	30	96	6	3.324.929.813	120	158	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	43	Pembangunan Perpustakaan	Meningkatnya jumlah perpustakaan SD/SMP	ruang	5	1.980.000.000	0	-	3	399.298.000	0,0	0		0,75	99.743.000	0,25	298.948.000	1	398.691.000	33	100	1	398.691.000	20	20	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	45	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa	Tersedianya alat praktek dan peraga siswa	paket	35	1.750.000.000	30	1.105.493.240	255	2.500.820.000	0,0	0		0,17	1.680.000	94,83	2.448.474.280	95	2.450.154.280	37	98	125	3.555.647.520	357	203	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	47	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Meningkatnya perlengkapan sekolah	paket	29	1.450.000.000	0	-	133	1.257.568.000	0,0	0		0,77	7.250.000	27,23	1.247.516.216	28	1.254.766.216	21	100	28	1.254.766.216	97	87	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	48	Peningkatan/pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan	paket	11	2.200.000.000	25	4.442.715.100	31	5.996.009.731	0,0	0		9,12	1.764.377.440	14,88	4.078.299.400	24	5.842.676.840	77	97	49	10.285.391.940	448	468	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	49	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Meningkatnya mutu ruang kelas sekolah S/SMP	ruang	45	3.328.500.000	167	14.590.312.100	167	3.481.589.000	0,0	0	50,98	1.062.890.900	-	24,98	2.413.936.400	26	3.476.827.300	16	100	193	18.067.139.400	429	543	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	53	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket A setara SD	Terselenggaranya Kegiatan Belajar Mengajar Paket A	kegiatan	120	120.000.000	80	44.986.000	0					-		-	0	-	0	0	80	44.986.000	67	37	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	54	Penyelenggaraan Kelompok Belajar Paket B setara SMP	Terselenggaranya Porses Belajar Mengajar Paket B	kegiatan	180	270.000.000	120	150.300.000	0					-		-	0	-	0	0	120	150.300.000	67	56	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	57	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Tingkat Kabupaten Karo	siswa	2.692	1.825.000.000	723	215.972.357	0		0,0	0			-	-	0	-	0	0	723	215.972.357	27	12	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	58	Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/Berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpia Sains, lomba seni siswa, olimpiade olah raga dan pemilihan siswa teladan/berprestasi tingkat SD sederajat	siswa	2.285	1.313.750.000	978	424.540.308	0		0,0	0			-	-	0	-	0	0	978	424.540.308	43	32	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	59	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Dasar	meningkatnya pemahaman atas pengelolaan DAK	sekolah	300	300.000.000	194	330.804.940	0		0,0	0			-	-	0	-	0	0	194	330.804.940	65	110	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	60	Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	Terselenggaranya Ujian Akhir Sekolah Tingkat Sekolah Dasar	siswa	24.000	1.372.500.000	14.540	765.988.599	0		0,0	0			-	-	0	-	0	0	14540	765.988.599	61	56	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	61	Pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu dan berprestasi Tingkat Sekolah Dasar	tersedianya beasiswa bagi siswa	siswa	4.400	1.980.000.000	1.000	472.370.000	800	299.973.000	0,0	0			-	800,00	299.973.000	800	299.973.000	100	100	1800	772.343.000	41	39	Dinas Pendidikan	
			1	01	16	62	Pembekalan Proktor UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer)	Proktor memahami tugas penyelenggaraan UNBK	orang	325	650.000.000	0	-	65	36.999.805	1,0	0			63,59	36.199.805	0,41	-	65	36.199.805	100	98	65	36.199.805	20	6	Dinas Pendidikan
			1	01	16	65	Pengadaan komputer beserta perlengkapan UNBK	Terlaksananya UNBK	buah	5	2.000.000.000	583	4.395.430.000	0		0,0	0			-	-	0	-	0	0	583	4.395.430.000	11660	220	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	70	Penyelenggaraan Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade O2SN Kabupaten Karo Tingkat Sekolah Menengah Pertama	siswa	1.930	1.051.000.000	677	168.694.088	0		0,0	0			-	-	0	-	0	0	677	168.694.088	35	16	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	71	Penyelenggaraan Olimpiade Sains, Lomba Seni Siswa, Olimpiade Olahraga dan Pemilihan Siswa Teladan/Berprestasi Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terselenggaranya Olimpiade Sains, Lomba Seni siswa, Olimpiade Olahraga dan pemilihan siswa Teladan/Berprestasi Tingkat SMP Sederajat	orang	1.000	875.000.000	113	93.338.100	213	22.269.000					213,00	22.269.000	213	22.269.000	100	100	326	115.607.100	33	13	Dinas Pendidikan		
			1	01	16	74	Penyelenggaraan Lomba Adiwiyata Tingkat Sekolah Menengah Pertama	Terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih tingkat sekolah Menengah Pertama	sekolah	1.475	788.250.000	0	-	0						-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Pendidikan		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18														
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
	1	01	16	75	Sosialisasi Penggunaan DAK bagi Sekolah Menengah Pertama	Meningkatnya pemahaman atas pengelolaan DAK	orang	150	150.000.000	20	13.963.395	0	0,0	0	-	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	79	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS Serta Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP	terlaksananya pemberian bantuan operasional sekolah (BOS) jenjang sd/mi/sdlb dan smp/mts serta pesantren salafiah dan satuanpendidikan non-islam setara sd dan smp	sekolah	200	1.200.000.000	105	1.804.999.755	10	315.550.000	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	103	Penyelenggaraan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Terselenggaranya Dana Bantuan Operasional Sekolah	bulan	5	74.353.804.200	313	134.505.180.120	12	54.932.741.126	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	108	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SMP	Terselenggarannya Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS2N SMP	orang	741	300.000.000	0	-	0	0,0	0	-	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	114	Pemberian beasiswa bagi keluarga kurang mampu	Tersedianya beasiswa bagi siswa Sekolah	orang	2.459	2.300.000.000	1.500	859.999.800	612	308.999.800	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	115	Penyelenggaraan UASBN Tingkat SMP	Terselenggaranya UASBN Tingkat SMP	orang	20.840	1.020.000.000	0	-	7000	59.216.545	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	116	Pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTS	Terlaksananya Ujian Nasional SMP/MTs	orang	180	-	0	-	7000	53.741.485	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	117	Olimpiade Sains SMP	Terselenggaranya Olimpiade Sains SMP	orang	630	195.053.100	386	97.208.100	210	56.771.834	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	16	120	Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang SMP	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Jenjang SMP	sekolah	0	-	0	-	0	-	-	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	15		Program Pendidikan Non Formal		%	8	970.000.000	13	2.149.448.000	5	494.403.066	0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	15	05	Penyediaan sarana prasarana pendidikan Non Formal	Meningkatnya sarana prasarana pendidikan non formal	paket	1	300.000.000	12	1.979.948.000	0	-	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	15	15	Penyelenggaraan Kesetaraan dan Keksakaan	Terselenggaranya Kesetaraan dan Keksakaan	paket	2	220.000.000	1	169.500.000	1	200.000.000	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	15	16	Bantuan Operasional SKB Karo	Beroperasinya SKB Karo	paket	5	450.000.000	0	-	4	294.403.066			Dinas Pendidikan														
	1	01	20		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		%	5.045	2.717.190.000	1.777	780.676.266	281	312.272.380	0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	20	01	Penyediaan Bantuan Operasional bagi tim sertifikasi guru	Terlaksananya kegiatan tim sertifikasi guru	tahun	4.800	656.500.000	1.652	135.271.400	1	57.272.380	0,3	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	20	22	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah	orang/kali	120	1.560.690.000	45	370.945.216	200	105.000.000	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	20	23	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	orang	125	500.000.000	80	274.459.650	80	150.000.000	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	19		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		%	809	244.151.000	603	125.261.056	101	78.226.652	0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	19	19	Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	Meningkatnya fungsi dan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah	kegiatan	1	10.000.000	1	4.943.215	0		0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	19	30	Pengadaan Sarana dan Prasarana IT	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT untuk Dinas Pendidikan dan Sekolah	paket	5	45.000.000	2	48.900.000	0		0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	19	31	Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan	Terselenggaranya Kajian Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan serta Kualitas Manajemen Pendidikan	paket	1	15.000.000	0	-	0		0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	19	34	Forum OPD bidang Pendidikan	Forum OPD Bidang Pendidikan	paket	2	56.051.000	0	-	1	58.226.652	0,0	0	Dinas Pendidikan														
	1	01	19	09	Monitoring , evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring ,evaluasi dan pelaporan	sekolah	800	118.100.000	600	71.417.841	100	20.000.000			Dinas Pendidikan														
	1	01	19	35	Pembinaan kelembagaan sekolah dan manajemen sekolah persiapan akreditasi sekolah	Meningkatnya Pemahaman Kelembagaan Sekolah dan Manajemen Sekolah Akreditasi Sekolah	orang	0	-	0	-	0		0,0	0	Dinas Pendidikan														
Total							99.079	132.269.771.663	33.257	179.248.697.704	16.990	79.669.854.267	1	0	249	1.197.366.604	1.330	19.669.547.155	15.105,44	19.184.854.130	16686	40.051.767.889	98	50	49943	219.300.465.593	50	166	Dinas Pendidikan	
Rata - rata capaian kinerja (%)																								98,21	50,27			50,41	165,80	Dinas Pendidikan
Predikat Kinerja																								Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Tinggi	Dinas Pendidikan

		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
Dinas Kesehatan									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
									1.307.222.013.876		104.080.507.800		67.581.658.925		-		-		8.173.321.478		7.681.674.765		35.590.738.640		51.445.734.883		72		68		155.526.242.683		44		76	
1	02	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	5.061.065.672	20	2.786.911.912	1.851.518.307		-	-	212.970.000		390.853.356		1.104.376.362		-	1.708.199.718		108	91	20	18.495.183.461		49	21	Dinas Kesehatan				
		02	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	60	400.836.276	36	79.213.221	12	58.934.000	-	-	-	-	6	22.735.716	6,00	16.881.787	12	39.617.503	100	67	48	118.830.724		80	30	Dinas Kesehatan				
		02	1	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	70	47.450.000	42	25.237.745	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	25.237.745		60	53	Dinas Kesehatan					
		02	1	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang bulan	60	3.786.666.965	36	1.813.186.000	12	538.624.600	-	-	-	-	-	-	12,00	532.800.000	12	532.800.000	100	99	48	2.345.986.000		80	62	Dinas Kesehatan				
		02	1	01	08	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			
		02	1	01	***	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	60	-	32	95.876.900	6	41.493.640	-	-	-	-	5	23.759.000	5,00	16.301.000	10	40.060.000	167	97	42	-	70	-	-	Dinas Kesehatan				
		02	1	01	***	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	156	429.606.176	31	56.960.950	7	17.765.960	-	-	-	-	3	6.225.000	4,00	9.340.675	7	15.565.675	100	88	38	72.526.625		24	17	Dinas Kesehatan				
		02	1	01	***	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			
		02	1	01	***	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	15	-	4	197.967.120	5	107.346.107	-	-	-	-	-	5,00	104.908.000	5	104.908.000	100	98	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			
		02	1	01	***	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	-	-	7	23.265.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			
		02	1	01	***	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	75	396.506.255	10	14.400.000	3	7.200.000	-	-	-	-	-	3,00	7.200.000	3	7.200.000	100	100	13	21.600.000		17	5	Dinas Kesehatan					
		02	1	01	***	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Terlaksananya rapat -rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah/dalam daerah	orang hari kali	500	-	115	480.804.976	30	113.134.000	-	-	-	-	20	51.643.640	10,00	53.934.900	30	105.578.540	100	93	145	586.383.516		29	-	Dinas Kesehatan				
		02	1	01	***	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Terlaksananya pembayaran honorarium	bulan	36	-	-	-	12	967.020.000	-	-	3	212.970.000	3	286.490.000	6,00	363.010.000	12	862.470.000	100	89	12	862.470.000		33	-	Dinas Kesehatan				
2	02	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur			88.095.750	-	365.939.320	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	365.939.320		11	172	Dinas Kesehatan				
					Pengadaan Peralatan Kesehatan	Terlaksananya Pengadaan Peralatan Kesehatan				-	-										-												Dinas Kesehatan			
		02	1	02	***	Pembanguna gedung kantor Dinas Kesehatan	Terpeliharanya gedung kantor	unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan			
		02	1	02	***	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	5		1	214.798.200									-												Dinas Kesehatan			
		02	1	02	***	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	204	88.095.750	22	151.141.120	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	151.141.120		11	172	Dinas Kesehatan				
					Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional				-	-										-												Dinas Kesehatan			
		02	1	02	***	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/Dinas	unit			-	-									-												Dinas Kesehatan			
3	02	1	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur			-	-	124.992.000										120.900.000		120.900.000										Dinas Kesehatan			
		02	1	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	1.150		-	-	186	124.992.000						186,00	120.900.000								-				Dinas Kesehatan			
4	02	1	18		Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Tersedianya Obat Dan Perbekalan Kesehatan			721.725.819.934		8.849.141.863	5.190.203.595		-	-	-		1.655.839.350		3.440.087.198		-	5.095.926.548		67	143	-	13.945.068.411		58	-	Dinas Kesehatan				
		02	1	15	01	Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan		orang kali	*****		397.780	3.246.970.566	335.800	4.942.754.595		-	*****	1.546.971.700	235.800,00	3.321.981.698	335.800	4.868.953.398	100	99					-			Dinas Kesehatan				
		02	1	15	02	Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan			1.944		267	373.330.352									-												Dinas Kesehatan			
		02	1	18	08	Penyediaan Obat dan Perbekalan Habis Pakai	Adanya Obat dan Perbekalan Kesehatan	orang	656.340	721.725.819.934	328.170	4.922.550.477		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	238	328.170	106.051.011.333		50	-	Dinas Kesehatan					
		02	1	15	09	Distribusi Obat dan E-Logistik	Terlaksananya Distribusi Obat dan E-Logistik	puskesmas	57	-	19	306.290.468	19	247.449.000	-	-	-	108.867.650	19,00	118.105.500	19	226.973.150	100	92	38	533.263.618		67	-	Dinas Kesehatan						
5	02	1	16		Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Adanya Upaya Kesehatan Masyarakat			405.268.635.116		66.596.278.397	43.575.237.473		-	-	7.960.351.478		3.960.013.259		17.337.485.981		-	29.257.850.718		100	48	-	95.854.129.115		65	97	Dinas Kesehatan				
		02	1	16		Penyediaan jasa pelayanan pasien	Tersedianya jasa pelayanan pasien	bulan			-	-										-											Dinas Kesehatan			
		02	1	16	***	Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan (BOK)	Terlaksananya Operasional Kesehatan Kabupaten	bulan	72	316.457.184.818	36		-	19	13.065.618.000	-	-	-	-	3.153.777.884	19,00	6.703.904.667	19	9.857.682.551	100	-	55	7.528.490.600		76	-	Dinas Kesehatan				

		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		02	1	16	###	Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	Terselenggaranya penyehatan lingkungan	puskesmas	95		38	28.650.000	19	2.150.000.000	-	-	-	-	-	-	19,00	2.106.478.000	19	2.106.478.000	100	98	57	2.135.128.000	60	-			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Adanya laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	puskesmas	95		38	258.265.000	19	49.050.000	-	-	-	-	-	-	19,00	49.050.000	19	49.050.000	100	100							Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Terjaminnya pelayanan kesehatan masyarakat kurang mampu	orang	36.831	-	16.296	4.469.590.000	13.148	3.682.440.000	-	-	6.574	2.053.212.000	740	195.636.000	5.834,00	1.208.862.857	13.148	3.457.710.857	100	-	29.444	7.927.300.857	80	-			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Pelayanan Asuransi Kesehatan (BPJS)	Tersedianya Asuransi Kesehatan Bagi Masyarakat	bulan	60	-	36	32.376.153.585	19	16.351.284.723	-	-	-	5.907.139.478	-	-	19,00	3.082.886.722	19	8.990.026.200	100	55	55	41.366.179.785	92	-			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Penyusunan Profil Kesehatan	Tersusunnya profil kesehatan	eks	210	42.887.590.000	90	34.188.000	35	4.299.500	-	-	-	-	-	35,00	4.064.475	35	4.064.475	100	-	125	8.624.530.745	60	-			Dinas Kesehatan		
		02	1	16	###	Penjaringan kesehatan anak sekolah	Terjaringnya kesehatan anak sekolah	puskesmas	95	40.315.939.875	19	9.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9.250.000	20	0			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Pelayanan pasien umum	Tersedianya jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas dan satelitnya	bulan	60	2.571.650.125	36	2.189.932.090	12	1.250.000.000	-	-	-	-	-	-	12,00	1.025.325.000	12	1.025.325.000	100	82	48	3.215.257.090	80	125			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Pelayanan asuransi Kesehatan (Jampersal)	Terlayannya jaminan pelayanan persalinan di puskesmas dan jaringannya	bulan	60	-	36	4.059.602.345	19	1.426.676.000	-	-	-	-	7	575.387.900	12,00	735.688.088	19	1.311.075.988	100	92	55	5.370.678.333	92	-			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM	kelompok PTM	95	-	54	29.345.322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	29.345.322	-	-			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	BOK Kabupaten		bulan	60	3.036.270.298	36	23.141.302.055	19	5.539.629.250	-	-	-	-	-	35.211.475	19,00	2.415.818.172	19	2.451.029.647	100	44	55	25.592.331.702	92	843			Dinas Kesehatan	
		02	1	16	###	Dukungan manajemen BOK Kabupaten dan Jampersal		puskesmas	57	-	-	-	19	56.240.000	-	-	-	-	-	-	19,00	5.408.000	19	5.408.000	100	10	19	5.408.000	-	-			Dinas Kesehatan	
		02	1	16		Penelitian dan kajian masalah kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan kajian masalah kesehatan				-	-			-	-																	Dinas Kesehatan	
6		02	1	17		Program Pengawasan Obat dan Makanan.	Meningkatnya Pengawasan Obat Dan Makanan			1.825.451.157		48.372.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.372.000	48	4			Dinas Kesehatan	
		02	1	17	02	Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.	Terlaksananya Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan, Obat dan Bahan Berbahaya	sampel sarana	450	648.078.442	300	48.369.000			-	-					-	-	-	-	-	-	300	48.369.000	67	7			Dinas Kesehatan	
		02	1	17	06	Pencegahan dan Penanggulangan Bahan Narkotika	Terlaksananya Pemeriksaan Bahan Narkotika pada Masyarakat	orang	12.000	1.177.372.715	3.463	3.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.463	3.000	29	0			Dinas Kesehatan	
7		02	1	18		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Meningkatnya Pengembangan Obat Asli Indonesia			120.348.838.149		51.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.700.000	39	0			Dinas Kesehatan	
		02	1	18	07	Pengawasan dan Pengembangan Obat Asli Indonesia	Terlaksananya pengawasan dan pengembangan Obat Tradisional	peracik obat tradisional	500	120.348.838.149	196	51.700.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196	51.700.000	39	0			Dinas Kesehatan	
8		02	1	19		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.	Meningkatnya Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat.			10.309.575.000		203.923.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203.923.100	44	2			Dinas Kesehatan	
		02	1	19	01	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	Tersedianya media promosi dan jumlah RT ber PHBS	jenis media, RT	50		45.500.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Dinas Kesehatan	
		02	1	19	08	Revitalisasi Posyandu	Terlaksananya revitalisasi posyandu	Posyandu	2.000	10.309.575.000	1.200	158.423.100			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.200	158.423.100	60	2			Dinas Kesehatan	
9		02	1	20		Program Perbaikan Gizi Masyarakat.	Meningkatnya Perbaikan Gizi Masyarakat			20.777.571.873		715.025.282	-	544.177.000	-	-	-	-	-	-	543.903.418	-	543.903.418	50	98	-	1.258.928.700	72	185			Dinas Kesehatan		
		02	1	20	02	Pemberian makanan tambahan dan vitamin	Tersedianya makanan tambahan dan vitamin untuk balita gizi kurang dan gizi buruk	orang			-	-			-	-																		Dinas Kesehatan
		02	1	20	03	Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vit.A dan Kekurangan Zat Mikro lainnya	Terlaksananya penanggulangan masalah kekurangan gizi	puskesmas	95	20.484.662.773	57	175.757.000	19	4.775.000	-	-	-	-	-	19,00	4.625.000	19	4.625.000	100	97	76	180.382.000	80	1			Dinas Kesehatan		
		02	1	20	09	Penurunan Stunting	Tersedianya obat gizi	puskesmas	95	292.909.100	57	539.268.282	43.259	539.402.000	-	-	-	-	-	3,00	539.278.418	3	539.278.418	0	100	60	1.078.546.700	63	368			Dinas Kesehatan		
10		02	1	22		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.	Meningkatnya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular			9.934.312.460		2.834.404.911	-	6.146.104.750	-	-	-	-	180.700.000		5.064.833.839	-	5.245.533.839	100	66			59	61			Dinas Kesehatan		
		02	1	22	04	Pelayanan Vaksinasi Bagi BALITA dan Anak Sekolah.	Adanya Pelayanan Vaksinasi bagi BALITA dan Anak Sekolah	puskesmas	95		57	44.595.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Dinas Kesehatan	
		02	1	22	06	Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik	Terlaksananya Pencegahan penyakit endemik/epidemik	masyarakat			-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							Dinas Kesehatan	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18										
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
		02	1	22	09	Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Terlaksananya Surveilans Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	Puskesmas	95		57	26.675.000	19	5.053.200.000	-	-	-	-	19,00	4.416.060.000	19	4.416.060.000	100	87	76	4.442.735.000	-	-	Dinas Kesehatan		
		02	1	22	***	Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS	Terlaksananya Penjaringan kasus HIV/AIDS	orang	2.880	2.896.703.300	583	113.117.200			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583	672.660.684	20	69	Dinas Kesehatan		
		02	1	22	***	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD dan Malaria	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit DBD	lokasi	130	841.135.800	82	126.903.000	19	50.000.000	-	-	-	-	19,00	50.000.000	19	50.000.000	100	100	101	176.903.000	78	21	Dinas Kesehatan		
		02	1	22	***	Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM)	Desa yang Melaksanakan Posbindu PTM		100	1.027.783.750	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	247.878.842	-	24	Dinas Kesehatan		
		02	1	22	***	Pencegahan dan penanggulangan Tuberculosis	Terlaksananya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tuberculosis	orang	2.500	1.027.783.750	1.470	131.695.575	19	150.005.000	-	-	-	-	19,00	116.183.267	19	116.183.267	100	77	1.489	247.878.842	60	24	Dinas Kesehatan		
		02	1	22	***	Pengendalian Penyakit	Pengadaan alat dan bahan pengendalian penyakit	Puskesmas	95	4.140.905.860	57	2.391.419.136	19	892.899.750	-	-	-	-	180.700.000	19,00	482.590.572	19	663.290.572	100	-	76	5.307.524.671	80	106	Dinas Kesehatan	
11		02	1	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya Standarisasi Pelayanan Kesehatan			4.140.905.860		4.210.838.131		1.325.698.800	-	-	-	-	19.868.800		1.076.817.740	-	1.096.686.540	172	63	-	5.307.524.671	61	106	Dinas Kesehatan	
		02	1	23	03	Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Terlaksananya Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan	Puskesmas	19		19	22.750.000																		Dinas Kesehatan	
		02	1	23	06	Pengembangan Inovasi Pelayanan Kesehatan	Terlaksananya Inovasi Pelayanan Kesehatan	inovasi			-	-																		Dinas Kesehatan	
		02	1	23	07	Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya Akreditasi Puskesmas	puskesmas	57	1.531.308.415	16	3.994.638.331	5	498.450.000	-	-	-	-	19,00	321.451.000	19	321.451.000	380	-	35	805.492.740	61	159	Dinas Kesehatan		
		02	1	23	08	Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Pengawasan Sarana Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rs/kali	20	1.050.934.420	9	76.666.000	5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	76.666.000	45	7	Dinas Kesehatan	
		02	1	23	09	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan	puskesmas	57	480.373.995	38	33.470.000	14	717.500.000	-	-	-	-	5,00	695.356.740	5	695.356.740	36	97	43	728.826.740	75	152	Dinas Kesehatan		
		02	1	23	***	Pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum	Terlaksananya pengembangan Puskesmas Badan Layanan Umum	puskesmas	38		-	-																		Dinas Kesehatan	
		02	1	23	***	Pengawasan dan monitoring sarana pelayanan kesehatan swasta	Terlaksananya pengawasan sarana kesehatan swasta		-	539.144.515					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.277.600	-	-	Dinas Kesehatan	
		02	1	23	***	Facilitasi Pasca Akreditasi Puskesmas	Terlaksananya pendampingan Pasca Akreditasi Puskesmas	Puskesmas	19		3	13.640.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13.640.000	-	-	Dinas Kesehatan	
		02	1	23	***	Pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional kesehatan	Terlaksananya uji kompetensi bagi jabatan fungsional kesehatan	orang		539.144.515					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan	
		02	1	23	***	Forum OPD Bidang Kesehatan	Terlaksananya Forum OPD Bidang Kesehatan	kali	4	-	1	15.768.800	1	21.268.800	-	-	-	-	1	19.868.800	-	-	1	19.868.800	100	93	2	35.637.600	-	-	Dinas Kesehatan
		02	1	23	***	Kalibrasi alat kesehatan	Terlaksananya Kalibrasi alat kesehatan	puskesmas	57			53.905.000	19	88.480.000			-		19,00	60.010.000		60.010.000								Dinas Kesehatan	
12		02	1	25		Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya			5.192.060.055		17.093.776.984		8.818.952.000	-	-	-	-	1.474.400.000		6.897.709.102	-	8.372.109.102	100	144	-	19.842.554.490	23	347	Dinas Kesehatan	
		02	1	25	02	Pembangunan Puskesmas Pembantu	Terbangunnya sarana gedung Puskesmas Pembantu	unit			-	-					-													Dinas Kesehatan	
		02	1	25	03	Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas	Tersedianya Alat Kesehatan Puskesmas	jenis			-	-																		Dinas Kesehatan	
		02	1	25	04	Pengadaan Puskesmas Keliling	Tersedianya Puskesmas keliling dan Ambulans	unit	38	871.180.063	17	6.834.714.997	6	2.574.824.592	-	-	-	4	1.474.400.000	2,00	1.090.000.000	6	2.564.400.000	100	100	23	9.399.114.997	61	1.079	Dinas Kesehatan	
		02	1	25	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	Tersedianya Peralatan Puskesmas.	jenis	88	329.562.748	3	663.388.539	2	997.800.001	-	-	-	-	2,00	962.825.138	2	962.825.138	100	96	5	1.626.213.677	6	493	Dinas Kesehatan		
		02	1	25	08	Pembangunan Baru Puskesmas		unit			2	2.005.152.122					-													Dinas Kesehatan	
		02	1	25	***	Peneliharaan rutin/Berkala sarana dan prasarana Puskesmas	Terehabilitasinya sarana dan prasarana Puskesmas	unit	58	1.720.117.871	1	2.288.755.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2.288.755.000	2	133	Dinas Kesehatan	
		02	1	25	***	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu	unit	30		18	1.735.615.800																		Dinas Kesehatan	

2	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18												
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
	02	1	25	###	Renovasi/Rehabilitasi Puskesmas	Terpeliharanya sarana dan prasarana Puskesmas.	unit	10	3	339.172.800																					
	02	1	25	###	pembanguna Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	Adanya Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)	unit	1	1	257.585.000																					
	02	1	25	###	Peningkatan fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita akibat dampak asap rokok	Terlaksananya pengadaan peralatan kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan bagi penderita akibat	jenis	24	2.271.199.373	7	691.685.175	-	-	-	-	-	-	7	691.685.175	29	30										
	02	1	25	###	Penyediaan Alat Kesehatan/penunjang di Puskesmas	Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas	set	60	-	12	991.901.677	36	5.246.327.407	-	-	-	36,00	4.844.883.964	-	4.844.883.964	-	92	12	5.836.785.641	20	-					
	02	1	25	###	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kesehatan dan Para medis	Terawatnya Rumah Dinas Medis dan Paramedis	unit	100		13	696.985.600																				
	02	1	25	###	Pengadaan Peralatan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan di Puskesmas			11	588.820.274																					
13	02	1	26		Program Kemiteraan Peningkatan pelayanan Kesehatan	Meningkatnya kemiteraan Peningkatan pelayanan Kesehatan			-		139.923.900		-	-	-	-	-	-													
	02	1	26	05	Kemiteraan peningkatan kualitas Dokter dan Para Medis	Jumlah tenaga kesehatan yang teregistrasi	orang	665		74	139.923.900			-																	
	02	1	26	06	Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih	orang		-		-																				
14	02	1	30		Program Peningkatan pelayanan Kesehatan Lansia	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Lansia		212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	02	1	30	01	Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan	puskesmas	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
15	02	1	32		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.	Meningkatnya Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak		100	2.549.682.850		184.272.000		4.775.000	-	-	-	-	4.625.000	-	4.625.000	100	97	-	188.897.000	47	11					
	02	1	32	05	Penanganan Komplikasi Obstetri dan Neonatal	Terlaksananya penanganan komplikasi kebidanan dan neonatal	puskesmas	95	426.129.100	38	93.407.000	19		-	-	-		-	-	-	-	-	38	93.407.000	40	22					
	02	1	32	09	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan Anak	puskesmas	95	1.683.075.000	38	60.060.000	19	4.775.000	-	-	-	19,00	4.625.000	19	4.625.000	100	97	57	64.685.000	60	4					
	02	1	32	###	Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan KB	Terlaksananya peningkatan pelayanan KB	puskesmas	95	440.478.750	38	30.805.000	19		-	-	-		-	-	-	-	-	38	30.805.000	40	7					
Jumlah								1.307.222.013.876		104.080.507.800		67.581.658.925		-	8.173.321.478		7.681.674.765		35.590.738.640		51.445.734.883	72	68	72	155.526.242.683	44	76				
Rata - rata capaian kinerja (%)																72	68	72	155.526.242.683	44	76										
Predikat Kinerja																72	68					Sangat Rendah	tinggi								
																sedang	sedang														
RUMAH SAKIT UMUM KABANGAJHE										225.287.523.570		30.238.802.593		45.177.504.714		11.807.787.153		3.343.242.174		12.718.586.215		17.837.409.702		34.204.344.648	87	77		55.529.603.128	39	26	RSU
1	1	02	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	20.899.093.635	20	5.412.153.303		4.179.818.727		703.624.050		399.111.865		912.470.311		2.436.477.465		3.954.739.580	67	83	45	7.759.243.883	50	40	RSU	
	1	02	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Output : Terlaksananya jasa surat menyurat	buah	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU			
	1	02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Output : Tersedianya rekening jasa komunikasi, air dan listrik	bln	60	2.022.060.000	12	356.562.282	12	404.412.000	3	92.815.849	3	96.333.095	3	62.269.892	3,00	119.288.953	12	370.707.789	100	92	24	727.270.071	40	36	RSU	
	1	02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Output : Terlaksananya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas/operasional	unit	40	50.000.000	7	4.380.000	13	10.000.000	-	1	800.000	1	430.000	1,00	2.000.000	3	3.230.000	23	32	10	7.610.000	25	15	RSU		
	1	02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Output : Terlaksananya Administrasi Perkantoran	jabatan	130	1.475.941.300		127.595.000	144	295.188.260	36	16.845.000	36	13.334.130	36	62.710.000	36,00	186.579.130	144	279.468.260	100	95	100	407.063.260	100	28	RSU	
	1	02	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Output : Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bln	60	3.031.440.425	240	603.392.720	240	606.288.085	60	96.684.000	60	1.349.735	60	199.936.000	60,00	308.160.000	240	606.129.735	100	100	100	1.209.522.455	100	40	RSU	
	1	02	01	###	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Output : Tersedianya alat tulis kantor	jenis	250	313.821.860		-	52	62.764.372	-	-	-	35	34.995.540		14.036.236	35	49.031.776	67	78	35	49.031.776	14	16	RSU		
	1	02	01	###	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Output : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	37	64.762.550	2	14.952.550	2	12.952.510	1	2.800.000	1	2.023.000	1	250.000		6.227.000	1	11.300.000	50	87	3	26.252.550	8	41	RSU	
	1	02	01	###	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output : Tersedianya komponen instalasi listrik penerang bangunan kantor	jenis	150	222.981.200	31	120.759.751	19	44.596.240	-	-	-	11	17.967.200		26.626.690	11	44.593.890	58	100	42	165.353.641	28	74	RSU		
	1	02	01	###	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Output : Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	bln	60	47.500.000	5	9.500.000	5	9.500.000	1	1.550.000	1	775.000	1	2.325.000		4.650.000	3	9.300.000	60	98	8	18.800.000	13	40	RSU	
	1	02	01	###	Penyediaan Makanan dan minuman	Output : Tersedianya penambah daya tahan tubuh pegawai jaga malam	bln	60	786.550.000	8.100	387.990.000	19.425	157.310.000	4.856	52.965.000	-		9.712,00	104.265.000	14.568	157.230.000	75	100	100	545.220.000	100	69	RSU			

					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18												
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
		1	02	01	***	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah/Dalam Daerah	Output : Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	bln	60	226.195.000	14	86.507.000	24	45.239.000	-	-	2	600.000	-	15.885.000	2	16.485.000	8	36	16	102.992.000	27	46	RSU		
		1	02	01	***	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Output : Tersedianya honorarium pendukung administrasi/ teknis perkantoran	org	575	12.657.841.300	1.476	2.092.865.000	1.620	2.531.568.260	405	522.004.000	405	348.860.000	405	526.249.130	405,00	1.010.150.000	1.620	2.407.263.130	100	95	100	4.500.128.130	100	36	RSU
	2	1	02	02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				5.434.001.135		341.104.242		1.086.800.227	-	10.776.050		31.370.000		67.607.441		757.898.409		867.651.900	100	83	24	1.208.756.142	96	28	RSU
		1	02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Tersedianya kendaraan dinas	unit	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU		
		1	02	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	jenis	240	1.005.809.300	3	-	12	201.161.860	-	-	11	5.555.000	1,00	194.587.160	12	200.142.160	100	99	15	200.142.160	6	-	RSU		
		1	02	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Output : Tersedianya peralatan kantor	jenis	155	655.001.500	1	17.800.000	8	131.000.300	-	-	3	15.385.000	5,00	87.890.000	8	103.275.000	100	79	9	121.075.000	6	-	RSU		
		1	02	02	***	Pengadaan Mebeleur	Output :Tersedianya membeleur kantor	unit	250	648.705.335	67	70.170.000	16	129.741.067	-	-	-	-	16,00	116.347.000	16	116.347.000	100	90	83	186.517.000	33	-	RSU		
		1	02	02	***	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Output :Terpeliharanya rumah dinas	unit	2	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU		
		1	02	02	***	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Output :Tersedianya pemeliharaan rutin Gedung kantor	unit	5	2.150.000.000	1	98.335.229	2	430.000.000	-	-	-	-	2,00	290.828.000	2	290.828.000	100	68	3	389.163.229	60	18	RSU		
		1	02	02	***	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Output : Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	40	591.235.000	8	74.421.263	13	118.247.000	1	2.209.100	3	22.855.000	3	24.556.141	6,00	39.887.000	13	89.507.241	100	76	21	163.928.504	53	28	RSU
		1	02	02	***	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Output : Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	jenis	60	383.250.000	22	80.377.750	42	76.650.000	5	8.566.950	5	8.515.000	15	22.111.300	17,00	28.359.249	42	67.552.499	100	88	64	147.930.249	107	39	RSU
	3	1	02	03		Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				24.000.000		165.150.000		-	-	-			12.728.000		94.952.244		-	-	-	52	165.150.000	3	-	RSU	
		1	02	03	02	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Output : Tersedianya mesin absensi	unit	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU		
		1	02	03	03	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya	Output : Tersedianya pakaian Dinas lapangan beserta perlengkapannya	stel	1.775	-	367	165.150.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	367	165.150.000	21	-	RSU		
		1	02	03	04	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Output : Tersedianya pakaian kerja lapangan	stel	-	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU		
	4	1	02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	RSU		
		1	02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Output :Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi PNS	org	350	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU		
	5	1	02	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan						-	-	-	-	-						-	-	-	-	-	-	-	RSU		
		1	02	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Output :Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	dok	15	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU		
	6	1	02	16		Program : Upaya Kesehatan Masyarakat				2.619.471.515		322.244.771		523.894.303		5.849.500		3.312.000		12.728.000		94.952.244		116.841.744	64	36	14	439.086.515	34	23	RSU
		1	02	16	***	Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana	Output : Tersedianya Pelayanan kepada pengungsi korban bencana	bln	60	39.301.515	-	12	7.860.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU	
		1	02	16	***	Penanganan Mayat Tidak Dikenal	Output : Tertaksananya Penguburan Mayat Tidak dikenal	org	60	90.000.000	12	18.000.000	12	18.000.000	1	1.500.000	-	4	6.000.000	3,00	4.500.000	8	12.000.000	67	67	20	30.000.000	33	33	RSU	
		1	02	16	***	Pelayanan Pasien Umum	Output : Tersedianya Pelayanan kepada pasien umum	bln	60	1.250.000.000	12	134.740.963	12	250.000.000	1	4.349.500	2	3.312.000	3	2.408.000	3,00	2.202.000	9	12.271.500	75	5	21	147.012.463	35	12	RSU
		1	02	16	***	Pelayanan Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	Output : Tersedianya Pelayanan Kepada Pasien Terlantar dan Tidak Mampu	-	-	-	12	169.503.808	12	248.034.000	-	-	-	3	4.320.000	3,00	88.250.244	6	92.570.244	50	37	-	262.074.052	-	-	RSU	
	7	1	02	23		Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan				7.000.000.000		-		1.400.000.000	-	-		4.414.362.493		7.837.581.592		1.246.207.600	100	89	0	1.246.207.600	20	18	RSU		
		1	02	23	01	Penyusunan standar pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Standar	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU	
		1	02	23	03	Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Pembangunan dan Pemuktahiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	jenis	5	7.000.000.000	-	1	1.400.000.000	-	-	-	-	-	1,00	1.246.207.600	1	1.246.207.600	100	89	1	1.246.207.600	20	18	RSU		
		1	02	23	05	Penyusunan Standar Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	Output : Terlaksananya Analisis Belanja Pelayanan Kesehatan	dok	3	158.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RSU	

2	3	4				5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																									
		03	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	14910	70.208.650.000	5793	36.349.310.227	4.045	12.533.747.733	598	2.711.172.921	1.114	3.047.599.490	19	2.361.104.201	1.859,23	3.980.591.053	3.590	12.100.467.665	95,77	93,99	1.059	48.466.002.152	101	88	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buah	1850	9.600.000	350	1.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	350	1.800.000	18,9	0,2	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,SIDA dan Listrik	bln	60	42.530.538.610	24	27.507.008.414	12	9.456.713.683	3	2.317.672.921	3	2.330.770.250	3	2.310.269.401	3,00	2.313.103.503	12	9.271.816.075	100	98,04	36	36.778.824.489	60,0	86,5	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	org bln	1075	1.618.063.394	437	542.435.000	102	349.807.300	-	-	6,77	23.780.000	-	-	93,23	319.745.000	100	343.525.000	98	98,20	537	885.960.000	50,0	54,8	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	200	116.329.400	65	73.393.000	16	8.937.000	-	-	-	-	-	-	16,00	8.740.100	16	8.740.100	100	97,80	81	82.133.100	40,5	70,6	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	jenis	215	384.950.045	70	258.853.800	34	104.982.634	-	-	2	26.048.000	16	50.834.800	16,00	25.908.300	34	102.791.100	100	97,91	104	361.644.900	48,4	93,9	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	10	87.323.416	4	52.249.710	2	10.230.650	-	-	1	4.227.500	-	-	1,00	6.000.000	2	10.227.500	100	99,97	6	62.477.210	60,0	71,5	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	136	16.218.471	26	19.136.560	35	1.344.457	-	-	-	-	-	-	35,00	1.342.700	35,00	1.342.700	100	99,87	61	20.479.260	44,9	126,3	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	25	804.443.100	139	1.030.299.230	33	280.910.960	-	-	5	14.462.000,00	-	-	28,00	239.759.000	33	254.221.000	100	90,50	172	1.284.520.230	688,0	159,7	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	unit	95	35.341.742	36	27.285.660	4	45.938.753	-	-	1	4.174.600	-	-	3,00	40.820.450	4	44.995.050	100	97,95	40	72.280.710	42,1	204,5	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bh	895	84.375.000	412	49.912.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	412	49.912.000	46,0	59,2	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	org hr kali	4470	2.971.271.426	1762	1.392.643.403	903	354.572.996	-	-	300	118.030.140	-	-	279,00	109.272.000	579	227.302.140	64	64,11	2.341	1.619.945.543	52,4	54,5	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	org bln	14910	9.947.152.284	5793	5.410.517.710	2904	1.920.309.300	595	393.500.000	795	526.107.000,00	-	-	1.385,00	915.900.000	2.775	1.835.507.000	96	95,58	8.568	7.246.024.710	57,5	72,8	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	meningkatnya disiplin Aparatur	stel	115	335.444.720		187.775.000	115	77.280.000	-	-	-	-	-	-	115,00	77.280.000	115,00	77.280.000	100	100,00	115	265.055.000	100,0	79,0	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Meningkatnya Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	333	132.312.200.000		50.094.496.577	18	9.260.243.000		1	571.972.950	5	2.472.168.909	12,00	5.957.813.638	18	9.001.955.497	100	97	32	58.552.474.574	40	25	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	24	10	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	paket	233	218.570.000.000	75	46.571.155.277	18	9.260.243.000	-	-	1	571.972.950	5	2.472.168.909	12,00	5.957.813.638	18	9.001.955.497	100	97	93	55.573.110.774	39,91	25,4	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	24	21	Penyusunan data base sistem jaringan irigasi			1	97.801.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	97.801.000	0,00	0,0	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	24	26	Peningkatan Jaringan Irigasi	Ha	100	116.774.000.000	2	2.881.562.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.881.562.800	2,00	2,47	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		35.409.580.000		14.093.128.021		3.281.077.444		70	101.109.920	46	67.023.592	132,00	2.966.175.932	248	3.134.309.444	99	96,58	811	13.512.780.507	45	102	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	jenis	1790	2.535.195.960	728	1.547.429.021	3	2.682.149.740					3,00	2.550.020.000	3	2.550.020.000	100	95,07	731	4.097.449.021	40,84	161,62	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1790	2.535.195.960	728	1.547.429.021	1	240.000.000					1,00	231.000.000	1	231.000.000	100	96,25	729	1.778.429.021	40,73	70,15	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	1790	2.535.195.960	728	1.547.429.021	249	358.927.704		70	101.109.920	46	67.023.592	128,00	185.155.932	244	353.289.444	98	98,43	972	1.900.718.465	54,30	74,97	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	02	42	Rehabilitasi sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor		12	11.830.000.000	7	5.736.184.000	-								-	-	-	-	7	5.736.184.000	58,33	48,49	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	16	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong		31.136.010.000		23.229.077.265		3.600.000.000		0,1	199.867.345	0	599.377.216	491,88	2.770.003.870	492	3.569.248.431	99	99	3.782	22.208.407.431	39	19	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	16	01	Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong		5	1.750.000.000	-	-	-								-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	16	03	Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong	m	#####	165.777.600.000	7070	14.275.589.000	500	1.100.000.000					491,00	1.080.200.000	491,00	1.080.200.000	98,20	98	7.561	15.355.789.000	70,64	9,26	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	16	05	Rehabilitasi saluran drainase/ gorong-gorong	km	7	14.252.000.000	2	4.363.570.000	1,3	2.500.000.000		0,1	199.867.345	0,31	599.377.216	0,88	1.689.803.870	1,3	2.489.048.431	100	100	3	6.852.618.431	47,14	48,08	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	25	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	Meningkatnya Penyediaan dan Pengelolaan air baku		915.765.000		1.253.985.000				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4.065.868.310	18	27	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	25	01	Penyediaan Lahan Prasarana Air Minum	Lokasi	11	6.541.600.000		2.811.883.310									-	-	-	-	-	-	2.811.883.310			Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	25	04	Pembangunan Sumur-Sumur air Tanah		17	4.640.000.000	3	1.253.985.000	-								-	-	-	-	3	1.253.985.000	17,65	27,03	Dinas PUPR Kab. Karo		

		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		03	01	27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Meningkatnya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		40.120.063.200		22.502.639.936	-						-	-			-	-	-	-	-	-	2	2.691.370.500	6	14	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	27	01	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	54,04	152.344.389.520	7	1.640.385.500	-										-	-	-	-	7	1.640.385.500	12,95	1,08	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	27	02	Penyediaan Prasarana dan Sarana Air Limbah		Paket				6	-									-	-	-	-	-	-			Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	27	10	Perencanaan Teknis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		19	2.578.800.000	1	1.050.985.000	-										-	-	-	-	1	1.050.985.000	5,26	40,75	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	27	16	Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum		Paket			-											-	-	-	-	-	-	0	0	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	15	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jalan dan Jembatan		716.877.852.230		255.980.998.121		15.850.000.000			18	2.500.000.000	-	-	15,72	13.043.131.524	34	15.543.131.524	99	99	79	270.823.413.145	51	25	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	15	03	Pembangunan Jalan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa	km	1396,58	1.396.580.000.000	120	244.859.881.317	16,1	13.350.000.000				15,72	13.043.131.524	15,72	13.043.131.524	97,64	98	135	257.903.012.841	9,70	18,47	Dinas PUPR Kab. Karo			
		03	01	15	06	Pembangunan Jembatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Produksi Pertanian, Pariwisata, Barang dan Jasa	m	25	35.060.800.000	5	10.336.855.304	18	2.500.000.000	18	2.500.000.000					18	2.500.000.000	100	100	23	12.836.855.304	92,00	36,61	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	15	06	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	Kegiatan pada Bidang Bina Marga dapat Dievaluasi dan Dimonitoring	Paket	1	435.000.000	-	83.545.000	1	-								-	-	-	-	-	83.545.000	0,00	19,21	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	18	Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		99.643.886.800		49.263.048.320		4.546.998.142			1,07	1.055.628.125	1	1.194.657.625	1,84	1.819.123.375	4	4.278.009.625	94	94,08	35	52.214.222.945	12	24	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	18	03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Memperthahankan Kualitas Pelayanan Transportasi Hasil Pertanian, Pariwisata, Barang/ Jasa	km	299,9	221.339.200.000	30,50	47.936.213.320	4,6	4.546.998.142	0,2	208.600.500	1,07	1.055.628.125	1,21	1.194.657.625	1,84	1.819.123.375	4	4.278.009.625	94	94	35	52.214.222.945	11,61	23,59	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	20	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan			305.255.000		49.500.000		-										-	-	-	-						
		03	01	22	Program Pembangunan Sistem Informasi /Data Base Jalan dan Jembatan			4.712.800.000				-											-	-	-	-					
		03	01	23	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan			6.105.100.000		2.901.999.383		-											-	-	-	-					
		03	01	28	Program Pengendalian Banjir			3.052.550.000				-											-	-	-	-					
		03	01	29	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Csat. Tumbuh	Terlaksananya Pengembangan/peningkatan infrastruktur		-		8.061.312.252		2.145.000.000	-		0,82	293.747.353	1	465.673.087	3,83	1.369.094.948	6	2.128.515.388	99	99,23	6	3.807.467.640	-	-	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	29	02	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur	kegiatan	0		1.678.952.252	6	2.145.000.000	-		0,8	293.747.353	1,30	465.673.087	3,83	1.369.094.948	5,95	2.128.515.388	99	99	6	3.807.467.640	0,00	0,00	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	30	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan			24.420.400.000		10.361.175.300													-	-	-	-	-	1.243.000.000	-	-	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	01	30	03	Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Pedesaan		Paket			1.243.000.000												-	-	-	-	1.243.000.000	0,00	0,00	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	04	16	Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan		9.768.160.000		6.514.418.719		19.999.755			-	19.332.715	-	-	-	-	-	1	19.332.715	100	97	2	6.187.065.834	25	29	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	04	16	03	Facilitasi Kerjasama dan Bina Konstruksi dengan Dunia Usaha/ Lembaga		Kegiatan	5	7.500.000.000													-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	04	16	26	Karya Bakti Tentara Nasional Indonesia (TNI)	Terbangunnya Infrastruktur Pedesaan	Kecamatan	4	7.188.000.000	3	6.167.733.119	-										-	-	-	-	3	6.167.733.119	75	85,81	Dinas PUPR Kab. Karo
		03	04	16	28	Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah	Terselenggaranya forum perangkat daerah/ lintas perangkat daerah	Kegiatan	0	-		19.999.755	-		1	19.332.715						1	19.332.715	100	97	1	19.332.715	0	0,00	Dinas PUPR Kab. Karo	
		03	01	17	Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Terlaksananya Turap/ Talud/ Bronjong		40.898.064.900		11.330.950.000		3.350.000.000			-	-	-	-	3,00	3.337.413.350	3	3.337.413.350	100	99,62	17	20.444.508.347	213	157	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	17	03	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	Terjaganya Kondisi Jalan dari Bencana Longsor	m3	8	13.052.000.000	14	17.107.094.997	3	3.350.000.000					3,00	3.337.413.350	3,00	3.337.413.350	100	99,62	17	20.444.508.347	213	156,64	Dinas PUPR Kab. Karo		
		03	01	31	Program Pengembangan dan Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum dan Taman	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan lampu penerangan jalan umum dan taman		3.052.550.000		603.217.699		1.510.215.457			0,01	20.650.000	0	265.020.000	7,68	1.156.592.000	8	1.442.262.000	79	95,50	8	1.442.262.000	18	1.803	Dinas PUPR Kab. Karo		

1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
			03	01	31	02	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan instalasi listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perlengkapan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jaringan listrik lampu penerangan jalan umum dan taman serta perengkapannya	unit	1		80.000.000	-	-	10	1.510.215.457		0,01	20.650.000	0,18	265.020.000	7,68	1.156.592.000	7,87	1.442.262.000	79	96	8	1.442.262.000	18,03	1802,83	Dinas PUPR Kab. Karo	
			03	01	33		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang				335.780.500		186.986.705		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	-	-	-	-	Dinas PUPR Kab. Karo	
			03	01	33	09	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan, Serta Pengendalian Ruang	Kegiatan	15		4.913.040.000		186.986.705	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00	0,00	Dinas PUPR Kab. Karo	
			03	01	34		Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang		15		9.768.160.000	48	6.854.343.990	12	286.305.790		0,25	5.953.000	-	-	9,00	226.342.200	9	232.295.200	77	81,14	57	3.635.753.290	4	0,05	Dinas PUPR Kab. Karo	
			03	01	34	09	Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan, Pemanfaatan serta Pengendalian Ruang	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan, Serta Pengendalian Ruang	Bulan	15		78.266.500.000	48	3.403.458.090	12	286.305.790	-	0,25	5.953.000	-	-	9,00	226.342.200	9	232.295.200	77	81,14	57	3.635.753.290	381,67%	5%	Dinas PUPR Kab. Karo	
			03	01	36		Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		24		78.266.500.000		6.634.161.685		634.940.177		3,52	186.293.400	1	35.000.000	4,65	245.890.421	11	568.094.421	90	89,47	23	7.202.256.106	227	16,21	Dinas PUPR Kab. Karo	
			03	01	36	01	Penataan dan Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	Terlaksananya penataan dan pemeliharaan taman kawasan perkotaan	Bulan	10		44.426.240.000	12	6.634.161.685	12	634.940.177	2	100.910.600	4	186.293.400	1	35.000.000	4,65	245.890.421	11	568.094.421	90	89	23	7.202.256.106	227,40	16,21	Dinas PUPR Kab. Karo
			08	01	15		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Perumahan					6.105.100.000																			Dinas PUPR Kab. Karo		
Jumlah										15.397	1.313.749.872.349		506.452.524.200	9.098	57.095.807.498	1.198	5.731.856.942	2.418	12.956.709.106	128	12.558.945.059		36.949.452.311	4.539	55.432.315.260	50	97,09	6.029	516.761.907.781	3.146	6.131		
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																																	
I			04	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																										
1			04	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	bh	550		5.700.000	550	4.800.000	550	5.400.000	-	137	786.000	200	786.000			337	1.572.000	61,27	29,11	337	6.372.000	61,27	111,79	Dinas Perkim	
2			04	01	01	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bln	12		20.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	-	6	4.639.250	3	1.929.000			9	6.568.250	75,00	32,84	9	21.568.250	75,00	107,84	Dinas Perkim	
3			04	01	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Komputer, Laptop dan Printer	unit	17		10.740.000	17	9.800.000	17	9.800.000	-	4	2.080.000	4	1.880.000			8	3.960.000	47,06	40,41	8	13.760.000	47,06	128,12	Dinas Perkim	
4			04	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1		13.000.000	1	10.000.000	1	13.000.000	-		1	612.000			1	612.000	100,00	4,71	1	10.612.000	100,00	81,63	Dinas Perkim		
5			04	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	bln	12		391.460.000	12	391.460.000	12	400.000.000	-	5	8.400.000		12.760.000			5	21.160.000	41,67	5,29	5	412.620.000	41,67	105,41	Dinas Perkim	
6			04	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	37		32.000.000	37	30.000.000	37	34.100.000	-	9	8.349.510	9	8.213.620			18	16.563.130	48,65	48,57	18	46.563.130	48,65	145,51	Dinas Perkim	
7			04	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis	4		18.175.500	4	18.175.500	4	18.175.500	-	1	3.380.375	4	2.414.635			5	5.795.010	125,00	31,88	5	23.970.510	125,00	131,88	Dinas Perkim	
8			04	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	5		8.000.000	5	5.000.000	5	10.000.000	-		-	5	1.352.600			5	1.352.600	100,00	13,53	5	6.352.600	100,00	79,41	Dinas Perkim	
9			04	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Pengengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	1		20.000.000	1	47.500.000	1	50.000.000	-			-			0	-	-	-	0	47.500.000	-	237,50	Dinas Perkim		
10			04	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	20		15.000.000	20	8.228.450	20	10.000.000	-	10	3.188.230		-		10	3.188.230	50,00	31,88	10	11.416.680	50,00	76,11	Dinas Perkim		
11			04	01	01	15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	36		3.600.000	36	3.600.000	36	3.600.000	-	10	1.025.000		-		10	1.025.000	27,78	28,47	10	4.625.000	27,78	128,47	Dinas Perkim		
12			04	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	oh	445		405.684.000	445	405.684.000	445	500.000.000	-	45	21.342.300	55	33.665.900			100	55.008.200	22,47	11,00	100	460.692.200	22,47	113,56	Dinas Perkim	
13			04	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	bln	216		200.000.000	216	195.800.000	216	200.000.000	-	108	134.690.000	50	62.285.000			158	196.975.000	73,15	98,49	158	392.775.000	73,15	196,39	Dinas Perkim	
II			04	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																										
1			04	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	buah	60		20.000.000	60	70.000.000	60	100.000.000	-	60	14.940.000		-		60	14.940.000	100,00	14,94	60	84.940.000	100,00	424,70	Dinas Perkim		
III			04	01	03		Program Disiplin Aparatur																0										
1			04	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Penampilan dan Semangat Kerja serta Etika Pegawai Makin Baik dan Meningkat	org	72		55.000.000	72	35.000.000	72	45.000.000	-	72	32.400.000		-		72	32.400.000	100,00	72,00	72	67.400.000	100,00	122,55	Dinas Perkim		
IV			04	01	20		Program Pengelolaan Areal Pemakaman																										
1			04	01	20	06	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemakaman	paket	7		715.000.000			7	650.000.000	-		-	4	643.691.860			4	643.691.860	57,14	99,03	4	643.691.860	57,14	90,03	Dinas Perkim	

1		2		3			4	5	6	7	8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
K		Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
2		04	01	22	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemakaman	bulan	12	770.000.000	12	500.000.000	12	700.000.000		-		12	11.933.860			12	11.933.860	100,00	1,70	12	511.933.860	100,00	66,48	Dinas Perkim		
IV		04	01	21		Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman																0										
1		04	01	21	04	Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Tersusunnya Dokumen Menganai Pengembangan Infrastruktur	dok	1	100.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000		-						0	-	-	-	0	300.000.000	-	300,00	Dinas Perkim		
2		04	01	21	06	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Terlaksananya Peningkatan Prasarana dan Sarana Utilitas Perumahan	paket	35	15.000.000.000	35	9.000.000.000	35	10.000.000.000		-		-	21	3.490.910.000		21	3.490.910.000	60,00	34,91	21	12.490.910.000	60,00	83,27	Dinas Perkim		
3		04	01	21	07	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan	Terlaksanya Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan	bulan	12	600.000.000	12	1.000.000.000	12	200.000.000		-		-	12	79.908.350		12	79.908.350	100,00	39,95	12	1.079.908.350	100,00	179,98	Dinas Perkim		
V		04	01	22		Program Penaganan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh																0										
1		04	01	22	02	Peningkatan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Penanganan Rumah Tidak Layak Huni	unit	177	3.515.272.200	177	759.000.000	177	3.195.702.000		-			43	245.000.000		43	245.000.000	24,29	7,67	43	1.004.000.000	24,29	28,56	Dinas Perkim		
VI		04	01	25		Program Peyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan																										
1		04	01	25	01	Facilitas Peyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Terfasilitasinya Peyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	kasus	1	220.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000		-		-				0	-	-	-	0	200.000.000	-	90,91	Dinas Perkim		
VII		04	01	16		Program Kerjasama Pembangunan																0										
1		04	01	16	27	Pembinaan Administrasi Proyek, Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat (KOTAKU, PANSIMAS, SANIMAS)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Layak Huni, Air Limbah dan Air Bersih	keg	3	800.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000		-		-				0	-	-	-	0	400.000.000	-	50,00	Dinas Perkim		
Jumlah										22.938.631.700		13.409.047.950		17.014.777.500			235.220.665		4.597.342.825			890,0	4.832.563.490				18.241.611.440					
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA									76.788	42.820.302.095	41.977	29.989.892.508	1.208	9.587.428.501	-	1.034.091.000	12	1.765.139.593	46	1.784.831.370	1.119,00	4.614.287.287	1177	9.198.349.250	97	96	43154	39.188.241.758	56	92	Satpol PP	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									8.488	23.197.138.945	4.549	18.297.462.675	739	7.427.842.227	-	1.034.091.000	12	1.672.442.498	46	1.722.482.620	656,00	2.800.867.792	714	7.229.883.910	97	97	5263	25.527.346.585	62	110	Satpol PP	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat									buah	3100	21.154.172	2.150	10.200.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2150	10.200.000	69	48	Satpol PP			
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik									bulan	60	154.459.030	24	26.079.834	12	28.056.000		3.511.000		2.763.000	12,00	8.076.500	12	14.350.500	100	51	36	40.430.334	60	26	Satpol PP		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional									unit	238	63.509.524	24	47.307.000	24	49.793.087		-	-		12,00	33.000.000	12	33.000.000	50	66	36	80.307.000	15	126	Satpol PP		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan									orang	161	442.827.323	24	196.875.000	12	209.005.730		-	-	-	11,00	152.620.000	11	152.620.000	92	73	35	349.495.000	22	79	Satpol PP		
Penyediaan Jasa Kebersihan kantor									orang	5	64.469.856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja									unit	86	88.310.272	25	21.830.000	20	14.000.000		-	-		20,00	14.000.000	20	14.000.000	100	100	45	35.830.000	52	41	Satpol PP		
Penyediaan Alat tulis Kantor									jenis	300	200.753.390	132	200.635.669	59	70.672.663			44	24.050.420	12,00	46.621.191	56	70.671.611	95	100	188	271.307.280	63	135	Satpol PP		
Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengandaan									jenis	48	116.372.791	9	35.503.950	3	16.672.832			2	3.614.200	1,00	13.058.632	3	16.672.832	100	100	12	52.176.782	25	45	Satpol PP		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor									buah	252	60.440.490	12	23.635.025	8	12.405.360				8,00	12.405.360	8	12.405.360	100	100	20	36.040.385	8	60	Satpol PP			
Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor									buah	78	330.185.200	32	296.185.200	1	34.009.218				2,00	34.000.000	2	34.000.000	200	100	34	330.185.200	44	100	Satpol PP			
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan									buah	25	40.293.660	-	-	-	-						0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
Penyediaan jasa Jaga Malam kantor									orang	5	80.587.320	-	-	-	-						0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									jenis	80	129.906.085	46	59.333.200	26	31.663.909				26,00	31.663.909	26	31.663.909	100	100	72	90.997.109	90	70	Satpol PP			
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah									OH	1500	637.076.343	1.163	1.047.804.797	264	197.773.428		12	38.296.498		7.285.000	244,00	129.822.200	256	175.403.698	97	89	1419	1.223.208.495	95	192	Satpol PP	
Penyediaan Jasa Tenaga pendukung Administrasi Teknis Perkantoran									Orang	1535	20.008.018.849	899	16.278.073.000	307	6.745.790.000		1.034.091.000		1.630.635.000		1.684.770.000	305,00	2.307.600.000	305	6.657.096.000	99	99	1204	22.935.169.000	78	115	Satpol PP
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Alat Keamanan									unit	19	161.174.640	9	54.000.000	3	18.000.000				3,00	18.000.000	3	18.000.000	100	100	12	72.000.000	63	45	Satpol PP			

2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14=(9+10+11+12)					15=13/8x100%					16=(7+13)					17=15/6x100%					18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
										K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp.					K					Rp				

2		3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
						Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	kali	2.049		214.899.520	2.039	162.500.000	15	37.500.000			-	-			10,00	17.500.000	10	17.500.000	67	47	2049	180.000.000	100	84	Satpol PP		
						Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri Dan Kejaksaan	Terlaksananya Kerjasama Pengembangan Kemampuan, Aparatur Polisi Pamong Praja Dengan TNI / Polri Dan Kejaksaan	kali	60		52.250.000	-	-	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP		
						Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan Kabupaten Karo	Terlaksananya Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintahan Kabupaten Karo	kali	450		1.671.292.402	364	760.159.810	12	97.572.095		15.750.000	-	-			12,00	81.822.095	12	97.572.095	100	100	376	857.731.905	84	51	Satpol PP		
						Operasi Kasih Sayang	Terlaksananya Operasi Kasih Sayang	kali	215		174.780.346	100	150.376.270	16	24.404.076		-	-					16,00	24.404.076	16	24.404.076	100	100	116	174.780.346	54	100	Satpol PP	
						Latihan Bela Diri	Terlaksananya Latihan Bela Diri	Keg	1		80.750.000	-	-	-	-		-	-					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP		
						Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar	Terlaksananya Penyegaran Anggota Satpol PP dan Damkar	keg	5		845.812.795	1	247.122.000	-	-							-	0	-	0	0	1	247.122.000	20	29	Satpol PP			
						HUT Satpol PP	Terlaksananya HUT Satpol PP	Keg	3		333.420.750	-	-	-	-								0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		200		307.843.562	82	246.376.270	12	36.376.270	-	-	-	-	-	-	12,00	36.376.270	12	36.376.270	100	100	94	282.752.540	47	92	Satpol PP		
						Penertiban Penyakit Masyarakat	Terlaksananya Penertiban tempat Hiburan Malam dan Kemaksiatan	kali	200		307.843.562	82	246.376.270	12	36.376.270		-	-			12,00	36.376.270	12	36.376.270	100	100	94	282.752.540	47	92	Satpol PP			
						Program Pendidikan Kedisnasan	Meningkatnya Pengetahuan Pendidik PNS		2		40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
						Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Penyidik PNS	orang	2		40.000.000	-	-	-	-							-	0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
						Program Penguatan Kelembagaan	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan		27		335.780.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
						Study Banding Keluar Daerah	Terlaksananya Study Banding Keluar Daerah	kali	3		28.975.500	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
						Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	Terlaksananya Penyusunan Bahan Kebijakan Produk Hukum Satpol PP	buah	3		34.100.000	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
						MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Polri	Terlaksananya MOU Antara Satpol PP Dengan Kejaksaan, Pengadilan Dan Polri	buah	3		31.000.000	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
						Sosialisasi Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah	keg	4		60.000.000	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
						Diklat PPNS	Terlaksananya Diklat PPNS	orang	6		94.705.000	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
						Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Diklat Kompetensi Polisi Pamong Praja	orang	8		87.000.000	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
						Program Pendidikan Politik Masyarakat	Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat		379		1.526.275.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP			
						Penyuluhan Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyuluhan Kepada Masyarakat	kali	200		793.663.000	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
						Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	Terbinanya Organisasi Kemasyarakatan (Orkemas)	kali	179		732.612.000	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Satpol PP				
JUMLAH									76.788	42.820.302.095	41.977	29.989.892.508	1.208	9.587.428.501	-	1.034.091.000	12	1.765.139.593	46	1.784.831.370	1.119,00	4.614.287.287	1177	9.198.349.250	97,43	95,94	43154	39.188.241.758	56,20	91,52	Satpol PP			
									Rata - rata capaian kinerja (%)																		Sangat Tinggi			Sangat Tinggi		Sedang	Sangat Tinggi	Satpol PP
									Predikat Kinerja																									
						BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			71.638	94.088.278.091	604	626.361.002	173	998.480.288	1	98.740.000	30	142.637.209	1	197.980.000	131,00	521.223.083	163	960.580.292	94	96	767	1.586.941.294	1	2	Kesbang			
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			58.535	24.572.202.517	451	304.979.402	136	848.408.288	1	98.740.000	30	142.637.209	1	197.980.000	94,00	376.983.083	126	816.340.292	93	96	577	1.121.319.694	1	5	Kesbang			
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya penerangan kantor	bln	60		139.768.000	12	2.677.523	12	18.000.000		5.437.775	5			4,00	5.279.655	9	10.717.430	75	60	21	13.394.953	35	10	Kesbang			
						Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	unit	39		391.460.000	16		25.000.000								24.497.000	0	24.497.000	# DIV/0	98	16	24.497.000	41	6	Kesbang			
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan kantor	org/bln	240		687.792.128	14	5.930.000	12	96.806.000		7.150.000	6			6,00	83.886.000	12	91.036.000	100	94	26	96.966.000	11	14	Kesbang			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
				Penyediaan jasa kebersihan	Terperuhinya kebutuhan petugas kebersihan peralatan kerja	org/bln		90.660.000	3	4.860.000	1	14.908.650		6.075.000		1,00	8.505.000	1	14.580.000	100	98	4	19.440.000	# DIV/0!	21	Kesbang			
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpilihnnya peralatan kantor	unit	62	127.100.000	211		20	3.259.657				20,00	2.707.000	20	2.707.000	100	83	231	2.707.000	373	2	Kesbang			
				Penyediaan alat tulis kantor	Terpeliharanya alat tulis	jenis	200	217.096.336	12	13.223.916	55	22.294.306		10	2.555.735		40,00	15.598.733	50	18.154.468	91	81	62	31.378.384	31	14	Kesbang		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	57.250	118.921.900	3	2.231.800	6	22.950.675				4,00	14.127.395	4	14.127.395	67	62	7	16.359.195	0	14	Kesbang			
				Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya penerangan kantor	bh	250	63.156.840	3		-	-						0	-	# DIV/0!	# DIV/0!	3	-	1	0	Kesbang			
				Penyediaan peralatan rumah tangga	Terperuhinya peralatan dan mendukung pekerjaan	bh	80	76.100.000	1	761.263	-	-						0	-	# DIV/0!	# DIV/0!	1	761.263	1	1	Kesbang			
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan untuk mendapatkan informasi	bh	10	37.900.000	2	1.250.000	12	1.800.000		600.000		12,00	1.200.000	12	1.800.000	100	100	14	3.050.000	140	8	Kesbang			
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya kegiatan untuk rapat-rapat koordinasi dan ksultasi dalam dan luar daerah	org/hr/kali	60	2.169.924.433	140	76.064.900	12	46.449.000		6	21.828.699		6,00	23.202.300	12	45.030.999	100	97	152	121.095.899	253	6	Kesbang		
				Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran	Tersedianya honorarium dan kesejahteraan bagi pegawai PNS dan Non PNS	org/bln	284	20.452.322.880	34	197.980.000	6	596.940.000	1	98.740.000	3	98.990.000	1	197.980.000	1,00	197.980.000	6	593.690.000	100	99	40	791.670.000	14	4	Kesbang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			1.543	20.582.171.179	106	34.188.000	1	50.400.000	-	-	-	-	1,00	49.056.000	1	49.056.000	100	97	107	83.244.000	7	0	Kesbang		
				Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ oprasional pemadam kebakaran	unit	16	11.287.281.069										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor pemadam kebakaran	set	50	950.588.000	20									0	-	0	0	20	-	40	0	Kesbang			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terperuhinya kendaraan dinas/ oprasional siap kerja	unit	251	2.489.957.800	7									0	-	0	0	7	-	3	0	Kesbang			
				Rehabilitasi Sedang Berat Kendaraan Dinas/ oprasional	Terperuhinya kendaraan dinas/ oprasional siap kerja	unit	21	1.835.130.600										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor	terperuhinya pemeliharaan gedung kantor	unit	6	1.400.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	terperuhinya pemeliharaan gedung kantor	unit	32	750.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pengadaan Mebeluer	Terperuhinya peralatan kantor	unit	350	245.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pengadaan mesin /kartu absensi					1									0	-	0	0	1	-	# DIV/0!	# DIV/0!	Kesbang			
																		0	-	0	0	0	-	# DIV/0!	# DIV/0!	Kesbang			
				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	272	667.790.800	78	34.188.000	1	50.400.000				1,00	49.056.000	1	49.056.000	100	97	79	83.244.000	29	12	Kesbang			
				Pengadaan pakaian batik	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	57	161.150.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pengadaan Training dan sepatu olah raga	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	272	299.861.010										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pengadaan pakaian kerja lapangan	Tersedianya pakaian seragam dan atribut	stel	215	485.411.900										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pengadaan mesin /kartu absensi	Tersedianya mesin /kartu absensi	unit	1	10.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			1.088	35.186.414.940	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pelatihan Anggota UPTD barisan pencegah pemadam kebakaran (BP2K)	Terlaksananya pelatihan anggota pemadam	org	80	250.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Sosialisasi Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisai Pencegahan Kebakaran	org	850	193.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Pembangunan Pos Jaga/ Ronda	Terlaksananya pembangunan Pos/ Jaga Ronda di 17 kecamatan	unit	4	600.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	Tersedianya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran	unit	54	345.000.000										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			
				Sosialisasi pengawasan tentang orang asing	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi pengawasan tentang orang asing	org	100	33.798.414.940										0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang			

1	2	3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Mass			150	1.675.947.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi BP2K	Tersedianya alat komunikasi anggota BP2K	unit	150	1.675.947.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal			776	3.511.501.120	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	20	-	3	0	Kesbang
						Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya kegiatan Penanganan Konflik Sosial	org	300	1.996.226.000				-									0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Kerjasama Pengendalian Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Instansi Terkait	Adanya kerjasama pengendalian kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait	org	300	680.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Koordinasi Pembinaan Komunitas Intelijen Daerah	Terlaksananya kegiatan Komunitas Intelijen Daerah Kabupaten Karo	org	100	585.275.120	20												0	-	0	0	20	-	20	0	Kesbang
						Forum koordinasi pimpinan daerah (Forkofmda) dan forum koordinasi pimpinan Kecamatan	Terlaksananya forum koordinasi pimpinan daerah (Forkofmda) dan forum koordinasi pimpinan Kecamatan	org	1	150.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Peningkatan SDM dalam rangka kewaspadaan dini daerah	Meningkatnya SDM tim kewaspadaan dini di daerah	org	75	100.000.000				-									0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			5.650	2.532.363.505	-	36.067.400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	36.067.400	0	1	Kesbang
						Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara	org	650	470.062.539													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Dialog Lintas Agama Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Dialog Lintas Agama Tingkat Kecamatan	org	3.400	905.977.300				-									0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Terlaksananya kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	org	440	482.557.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	Terlaksananya kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial	org	480	278.213.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	org	240	163.053.666													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Seminar Kerukunan Umat Beragama	Terlaksananya kegiatan Seminar Kerukunan Umat Beragama	org	340	132.500.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Gerakan Nasional Revolusi Mental	Terlaksananya GNRM	org	100	100.000.000		36.067.400		-									0	-	0	0	0	36.067.400	0	36	Kesbang
						Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			169	584.096.367	3	224.708.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	3	224.708.200	2	38	Kesbang
						Studi banding forum-forum strategis Kab. Karo	Terlaksananya studi banding forum-forum strategis Kab. Karo	org	16	60.000.000		210.988.200		-									0	-	0	0	0	210.988.200	0	352	Kesbang
						Rapat koordinasi pembinaan forum pengembangan wawasan kebangsaan	Terlaksananya apat koordinasi pembinaan forum pengembangan wawasan kebangsaan	org	60	50.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Penyediaan Bantuan Operasioal Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Tersedianya Bantuan Operasioal Forum-Forum Pengembangan Wawasan Kebangsaan	forum	15	364.096.367	3	13.720.000		-									0	-	0	0	3	13.720.000	20	4	Kesbang
						Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebagnsaan	Terlaksananya Seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebagnsaan	forum	3	20.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Terciptanya kerukunan umat beragama	org	75	60.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang
						Forum pembinaan kebangsaan (FPK)	Terlaksananya FPK	org		30.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18											
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
						Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)		1.855	1.804.185.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	-	0										
						Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya kegiatan Penyuluhanpencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	org	1.700	83.733.500						0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang							
						Peningkatan kapasitas satgas P4GN	Terlaksananya kegiatan Peningkatan kapasitas satgas P4GN	keg	5	1.620.451.500						0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang							
						Sekretariat Satuan tugas pemberantasan, pencegahan, penyalagunaan peredaran gelap narkotika (P4GN) Kab.Karo	Terbentuknya Satuan tugas pemberantasan, pencegahan, penyalagunaan peredaran gelap narkotika	org	150	100.000.000						0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang							
						Program Pemberdayaan Masyarakat Menjaga Ketertiban dan Keamanan		1.578	1.894.134.642	16	17.612.000	24	66.448.000	-	-	-	-	24,00	63.456.000	24	63.456.000	100	95	40	81.068.000	3	4	Kesbang			
						Pelatihan Linmas Desa/Kabupaten	Tersedianya anggota Linmas yang terididik dan terlatih	org	1.200	519.265.000						0	-	0	0	0	0	-	0	0	Kesbang						
						Sosialisasi Perkuatan SAT Linmas Desa (3 Kecamatan)	Meningkatnya pemahaman Desa	org	150	396.500.000						0	-	0	0	0	0	-	0	0	Kesbang						
						Program Pendidikan Politik Masyarakat		114	494.184.821	8	8.806.000	12	33.224.000	-	-	-	-	12,00	31.728.000	12	31.728.000	100	95	20	40.534.000	18	8	Kesbang			
						Pembekalan untuk Pengurus Parpol	Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik	org	48	20.000.000						0	-	0	0	0	0	-	0	0	Kesbang						
						Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik	Terpantaunya Administrasi Keuangan Parpol	org	25	95.000.000	8	1.536.000	-			0	-	0	0	8	1.536.000	32	2	Kesbang							
						Penelitian Dokumen dan Penelitian Lapangan Orkemas	Terpenuhihya persyaratan pendaftaran Orkemas	org	6	205.000.000						0	-	0	0	0	-	0	0	Kesbang							
						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Termonitornya perkembangan politik di Kabupaten Karo	org	35	164.184.821		7.270.000	12	33.224.000		12,00	31.728.000	12	31.728.000	100	95	12	38.998.000	34	24	Kesbang					
						Facilitasi pendidikan politik masyarakat			10.000.000							0	-	0	0	0	0	-	0	0	Kesbang						
						Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		180	1.251.077.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	Kesbang						
						Facilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Bertambahnya pemahaman tentang Undang-Undang Politik	org	80	984.877.000						0	-	0	0	0	0	-	0	0	Kesbang						
						Sosialisasi dan Publikasi gerakan memilih pada Pemilu/Pilpres dan Pilkada	Terciptanya pemahaman masyarakat tentang makna Pemilu yang tuber dan jurtli	org	100	266.200.000		-				0	-	0	0	0	0	-	0	0	Kesbang						
								71.638	94.088.278.091	604	626.361.002	173	998.480.288	1	98.740.000	30	142.637.209	1	197.980.000	131,00	521.223.083	163	960.580.292	94	96	767	1.586.941.294	1	2	Kesbang	
								Rata - rata capaian kinerja (%)																					Kesbang		
								Predikat Kinerja																						Kesbang	
																													Kesbang		
						Dinas Sosial Kab.Karo			18.401.269.300		6.358.993.815		1.749.867.303		59.198.554		118.246.647		129.054.480		1.256.258.581		1.562.758.262	98	90		7.168.887.606	52	63		
1		06	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.063	3.376.657.396	1.495	2.292.160.190	269	552.988.987	16	53.014.596	22	73.661.688	39	63.286.480	176,00	289.808.510	253	479.771.274	91	87	1.688	2.366.769.491	114	101	Dinsos
		06	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air, dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bln	60	87.000.000	48	60.804.166	12	18.600.000	2	2.634.496	3	3.915.388	3	2.990.280	3,00	4.568.810	11	14.108.974	92	76	59	74.913.140	98	86	Dinsos
		06	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional	Unit	48	195.146.017	37	47.745.000	4	7.600.000	0	0	0	0	0	1,00	2.500.000	1	2.500.000	25	33	38	50.245.000	79	26	Dinsos	
		06	01	01	07	Penyediaan Jasa Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	org	75	525.825.000	50	286.680.000	10	126.343.000					10,00	126.343.000	10	126.343.000	100	100		7.861.027	-	-	Dinsos		
		06	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bln	60	45.000.000	48	46.380.000	12	14.918.950	2	2.430.000	2	2.430.000	3	3.645.000	5,00	6.075.000	12	14.580.000	100	98	60	60.960.000	100	135	Dinsos
		06	01	01	09	Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	120	86.997.175	36	37.660.000	27	6.800.000	-	-	-	-	-	27,00	6.800.000	27	6.800.000	100	100	63	44.460.000	53	51	Dinsos	
		06	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bln	60	215.229.195	48	156.914.000	44	22.745.747	-	-	-	-	-	44,00	22.736.600	44	22.736.600	100	100	92	179.650.600	153	83	Dinsos	
		06	01	01	***	Penyedian Barang Cetakn dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakn Dan Penggandaan	bln	60	83.880.000	48	78.722.650	12	7.043.240	-	-	-	-	-	12,00	7.011.300	12	7.011.300	100	100	60	85.733.950	100	102	Dinsos	
		06	01	01	12	Penyedian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	160	8.278.210	128	9.343.400	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	128	9.343.400	80	113	Dinsos		

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
2		06	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	52	154.833.000	52	193.266.000	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	52	193.266.000	100	125	Dinsos	
		06	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	jenis	100	40.208.799	92	25.158.100	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	92	25.158.100	92	63	Dinsos	
		06	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	10	23.000.000	8	10.800.000	2	1.800.000	-	-	450.000	-	-	2,00	1.350.000	2	1.800.000	100	100	10	12.600.000	100	55	Dinsos	
		06	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	kali	1.219	1.460.000.000	872	1.107.686.874	134	164.300.150	10	25.180.100	15	39.036.300	30	16.171.200	67,00	44.113.800	122	124.501.400	91	76	994	1.232.188.274	82	84	Dinsos
		06	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	Orang	39	451.260.000	28	231.000.000	12	182.837.900	2	22.770.000	2	27.830.000	3	40.480.000	5,00	68.310.000	12	159.390.000	100	87	40	390.390.000	103	87	Dinsos
2		06	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		50	1.133.435.199	19	556.987.112	6	116.218.700	5	6.183.958	5	11.454.959	5	17.318.000	6,00	61.679.330	6	96.636.247	100	80	20	538.277.309	44	59	
		06	01	02	22	Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	unit	5	216.195.199	4	96.169.450	1	19.176.600	0	0	0	0	0	1,00	19.176.600	1	19.176.600	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos
		06	01	02	24	Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas kantor	Unit	45	917.240.000	15	460.817.662	5	97.042.100	5	6.183.958	5	11.454.959	5	17.318.000	5,00	42.502.730	5	77.459.647	100	80	20	538.277.309	44	59	Dinsos
3		06	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		202	289.000.000	140	126.306.800	30	16.950.000	-	-	-	-	-	30,00	16.950.000	30	16.950.000	-	-	169	131.256.800	85	49	Dinsos	
		06	01	03	01	Pengadaan Mesin /Kartu Absensi	Adanya mesin absensi	unit	2	19.000.000	1	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos
		06	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stiel	200	270.000.000	139	114.306.800	30	16.950.000	0	0	0	0	0	30,00	16.950.000	30	16.950.000	-	-	169	131.256.800	85	49	Dinsos	
4		06	01	15		Program Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Meningkatnya Pemberdayaan Fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		69	3.471.563.825	14	569.220.950	2	219.707.350	-	-	-	-	-	2,00	191.754.621	2	191.754.621	-	-	16	760.975.571	187	137		
		06	01	15	05	Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Kesejahteraan penyandang PMKS	kegt	4	1.645.000.000	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos
		06	01	15	06	Penyusunan Data base penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Terlaksananya Kegiatan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	bln	60	445.000.000	12	40.090.000	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	-	-	12	40.090.000	20	9	Dinsos		
		06	01	15	07	Verifikasi dan Validasi Data Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	kegt	2	1.200.000.000	1	452.777.950	1	142.854.350	-	-	-	0	0	1,00	122.279.621	1	122.279.621	-	-	2	575.057.571	100	48	Dinsos	
		06	01	15	08	Operasional penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Operasional Penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial	kegt	3	181.563.825	1	76.353.000	1	76.853.000	-	-	-	0	0	1,00	69.475.000	1	69.475.000	-	-	2	145.828.000	67	80	Dinsos	
5		06	01	16		Program Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		19	2.728.675.000	8	649.684.440	1	85.396.750	-	-	2	1.900.000	1	3.900.000	1,00	78.885.900	1	84.685.900	100	99	9	734.370.340	90	30	
		06	01	16	05	Pelayanan Psikososial Bagi PMKS di Trauma Centre termasuk bagi korban Bencana	Terlaksananya Pelayanan Psikososial bagi Korban Bencana	Keg.	9	1.500.000.000	0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos
		06	01	16	09	Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan upaya-upaya Penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan	Keg.	5	486.950.000	4	292.038.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	292.038.000	80	60	Dinsos	
		06	01	16	10	Penangan Masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Terlaksananya Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Keg.	5	741.725.000	4	357.646.440	1	85.396.750	0	0	1	1.900.000	1	3.900.000	1,00	78.885.900	1	84.685.900	100	99	5	442.332.340	100	-	Dinsos
6		06	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan		65	3.186.422.100	49	1.017.043.032	12	274.920.000	-	-	3	31.230.000	3	31.230.000	6,00	198.760.000	12	261.220.000	100	95	61	1.278.263.032	100	41	
		06	01	17	03	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada Veteran Kabupaten Karo	Keg.	5	151.980.000	1	48.381.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	48.381.000	-	-	-	Dinsos

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
		06	01	17	26	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman	bln	60	3.034.442.100	48	968.662.032	12	274.920.000	0	0	3	31.230.000	3	31.230.000	6,00	198.760.000	12	261.220.000	100	95	60	1.229.882.032	100	41	Dinsos
	7	06	01	18		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Meningkatnya Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma		354	1.216.517.300	131	209.462.900	171	301.953.966	-	-	-	-	-	-	2,00	274.393.500	2	274.393.500	100	90	133	483.856.400	50	156	
		06	01	18	01	Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	Terlaksananya Kegiatan Pendayagunaan Penyandang Cacat	Org	200	428.100.000	70	55.103.200	1	51.266.266	0	0	0	0	0	0	1,00	46.176.500	1	46.176.500	100	90	71	101.279.700	-	-	Dinsos
		06	01	18	04	Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan trauma	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma	org	150	600.000.000	60	88.632.900	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	60	88.632.900	-	-	Dinsos	
		06	01	18	04	Pendayagunaan Penyandang Cacat dan eks Trauma	TerlaksananyaPendayagunaan Penyandang Cacat dan eks Trauma	kegt	4	188.417.300	1	65.726.800	170	250.687.700	0	0	0	0	0	1,00	228.217.000	1	228.217.000	-	-	2	293.943.800	50	156	Dinsos	
8		06	01	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		278	2.015.986.480	94	630.534.773	87	128.396.000	-	-	-	-	-	-	87,00	127.646.000	87	127.646.000	-	-	181	758.180.773	61	40	
		06	01	21	02	Penimngkatan Kelembagaan Keluarga	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	kel	30	400.000.000	12	97.615.323	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	12	97.615.323	40	24	Dinsos	
		06	01	21	05	Pembinaan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Adanya Usaha Ekonomi Produktif bagi Karang Taruna	kel	48	715.898.400	28	249.802.400	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	28	249.802.400	58	35	Dinsos	
		06	01	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	: Meningkatkan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial.	Org	85	255.000.000	34	91.200.000	87	128.396.000	-	-	-	-	0	0	87,00	127.646.000	87	127.646.000	-	-	121	218.846.000	142	86	Dinsos
		06	01	21	07	Peningkatan Kerlompok Usaha Bersama (KUBE)	Terlaksananya Peningkatan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	kel	85	245.088.080	2	41.520.000	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	2	41.520.000	2	17	Dinsos	
		06	01	21	02	Peningkatan Jenjang Kerjasama Pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Peningkatan Jejaring Kerjasama pelaku-pelaku usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat	kel	30	400.000.000	18	150.397.050	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	18	150.397.050	60	38	Dinsos	
9		06	01	21		Program Peningkatan Penanggulangan narkoba,PMS termasuk HIV/AIDS	Meningkatnya Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS		5	428.472.000	1	57.536.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57.536.450	20	13		
		06	01	21	01	Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pembinaan Anak dan Remaja Tentang Bahaya HIV/AIDS dan NAPZA	keg	5	428.472.000	1	57.536.450	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	1	57.536.450	20	13	Dinsos	
10		06	01	20		Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)	Meningkatnya Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial Lainnya)		250	554.540.000	140	250.057.168	40	53.335.550	-	-	-	-	12	13.320.000	13,00	16.380.720	25	29.700.720	-	-	50	59.401.440	33	23	
		06	01	20	04	Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Terlaksananya Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	org	150	254.540.000	120	191.815.793	30	53.335.550	0	0	0	0	12	13.320.000	13,00	16.380.720	25	29.700.720	-	-	50	59.401.440	33	23	Dinsos
		06	01	20	05	Pendidikan dan Pelatihan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	Outcome :Meningkatnya Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial Output : Terlaksananya Pendidikan dan Keterampilan berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	org	100	300.000.000	20	58.241.375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dinsos
11		06	01	22		Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		5	750.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		06	01	22	06	Peningkatan Ketampilan Taruna Siaga bencana	Terlaksananya Peningkatan Ketampilan Taruna Siaga Bencana	keg	5	750.000.000	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinsos
12		06	01	15		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH		48	2.800.000.000	21	1.110.084.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1.110.084.000	44	40	Dinsos	

1	2	3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18						
			06	01	15	***	Operasional dan Monitoring Pendistribusian Beras untuk Rumah Tangga Miskin	Adanya Laporan Operasional dan Monitoring Pendistribusian Beras Bagi Rakyat Miskin	bulan	48	2.800.000.000	21	1.110.084.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	Dinsos					
Jumlah										3.355	18.401.269.300	2.091	6.358.993.815	618	1.749.867.303	21	59.198.554	32	118.246.647	60	129.054.480	323,00	1.256.258.581	418	1.562.758.262	98	90	3.010	7.168.887.606	52	63	Dinsos						
Rata - rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat Kinerja																																						
							DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI DAN UKM																															
							Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				579.633.773		516.487.468		67.820.391																	Dinas Koperasi					
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	60	140.400.000	12	12.180.000	12	12.150.000	3	2.195.920	3	2.320.716	3	2.274.260	3,00	2.126.730	12	8.917.626	100	73	24	21.097.626	40	15	Dinas Koperasi						
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	Unit	25	502.500.000	0	-	0	0	0	0	-			1,00	2.893.000	1	2.893.000	0	0	1	2.893.000	4	1	Dinas Koperasi							
							Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang Bulan	1.020	494.254.400	142	19.560.000	48	19.560.000	2	3.060.000	16	6.120.000	8	3.060.000	124,00	124.153.500	150	136.393.500	313	697	292	155.953.500	29	32	Dinas Koperasi						
							Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang Bulan	60	89.000.000	12	14.736.000	12	14.728.500	2	2.430.000	4	4.860.000		6,00	7.290.000	12	14.580.000	100	99	24	29.316.000	40	33	Dinas Koperasi							
							Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kantor	Unit	75	58.900.000	14	9.940.000	10	7.100.000	2	1.420.000	2	1.420.000	3	2.150.000	3,00	2.110.000	10	7.100.000	100	100	24	17.040.000	32	29	Dinas Koperasi						
							Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	220	316.552.286	40	38.277.573	47	55.024.054	9	9.993.621	43	9.993.000	0	8.907.500	-	18.831.300	52	47.725.421	111	87	92	86.002.994	42	27	Dinas Koperasi						
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	50	355.295.800	6	19.419.500	7	15.559.479	2	4.177.400	5	4.677.400		5.330.920	-	4.784.600	7	18.970.320	100	122	13	38.389.820	26	11	Dinas Koperasi						
							Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	Buah	250	19.911.000	80	2.181.800	43	2.399.635	10	594.900	10	597.300		23,00		1.207.600	43	2.399.800	100	100	123	4.581.600	49	23	Dinas Koperasi						
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	70	630.000.000	11	30.000.000	0	0	0	0	0	-		6,00	59.305.000	6	59.305.000	0	0	17	89.305.000	24	14	Dinas Koperasi							
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	137	36.630.600	24	8.006.900	24	8.037.800	6	2.059.750	25	2.059.750		2.058.600	-	1.637.100	31	7.815.200	129	97	55	15.822.100	40	43	Dinas Koperasi						
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Buah	2.880	25.000.000	360	3.600.000	0	0	0	0	0	-		-	-	0	-	0	0	360	3.600.000	13	14	Dinas Koperasi							
							Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	Orang Kali Hari	1.500	1.494.824.000	400	247.192.000	165	207.390.000	30	14.058.800	36	15.277.000	40	19.154.500	59,00	88.547.700	165	137.038.000	100	66	565	384.230.000	38	26	Dinas Koperasi						
							Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi /teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Orang Bulan	696	2.266.000.000	120	174.540.000	132	174.538.000	22	27.830.000	43	56.920.000	39	29.095.000	28,00	60.175.000	132	174.020.000	100	100	252	348.560.000	36	15	Dinas Koperasi						
							Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur				75.000.000		-		0						606.133.500		606.133.500		0		681.133.500		38	Dinas Koperasi							
							Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	3	540.000.000	0	-	0	0	0	0	0			3,00	528.985.000	3	528.985.000	0	0	3	528.985.000	100	98	Dinas Koperasi							
							Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Unit	60	270.000.000	2	25.000.000	0	0	0	0	0			8,00	45.090.000	2	45.090.000	0	0	4	70.090.000	7	26	Dinas Koperasi							
							Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	5	300.000.000	1	50.000.000	0	0	0	0	0			1,00	32.058.500	1	32.058.500	0	0	2	82.058.500	40	27	Dinas Koperasi							
							Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	30	1.041.133.600	0	-	0	0	0	0	0			-	-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi							
							Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur				16.650.000		0		0						19.488.000		19.488.000		0		36.138.000		8	Dinas Koperasi							
							Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/ Kartu Absensi	Unit	1	10.000.000	-		0	0	0	0	0			-	-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi							
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	175	150.000.000	60	16.650.000		0	0	0	0			29,00	19.488.000	29	19.488.000	0	0	89	36.138.000	51	24	Dinas Koperasi							
							Pengadaan Pakaian Khusus Hari - hari Tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	175	187.202.450	0	-	0	0	0	0	0			-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi							
							Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja				818.115.855		664.997.840		0								-	0		818.115.855		17	Dinas Koperasi								
							Penyusunan Database Tenaga Kerja Daerah	Tersedianya Database Tenaga Kerja Daerah	Dokumen	5	385.000.000	0	-	0	0	0	0	0			-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi							
							Pembangunan Balai Latihan Kerja	Terlaksananya Pembangunan Balai Latihan Kerja dan Peningkatan Sarana Prasarana Balai Latihan Kerja	Unit	3	1.200.000.000	1	798.115.655	1	664.997.840	0	0				-	0	-	0	0	1	798.115.655	33	67	Dinas Koperasi								
							Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Diklat Keterampilan Bagi Pencari Kerja	Orang	150	990.000.000	0	-	0	0	0	0	0			-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18				
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
				Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	5	720.000.000	1	20.000.200	0	0	0	0	-	0	0	1	20.000.200	20	3	Dinas Koperasi			
				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja			409.033.400	-	0				247.346.100	247.346.100	0		656.379.500		13	Dinas Koperasi				
				Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	Kali	5	570.000.000	0	-	0	0	0	0	1,00	135.638.000	1	135.638.000	0	0	1	135.638.000	20	24	Dinas Koperasi
				Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan	Terlaksananya Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan Bagi Pencari Kerja	Orang	200	1.800.000.000	45	210.092.400	0	0	0	0	-	-	0	0	45	210.092.400	23	12	Dinas Koperasi		
				Penyiapan Tenaga Kerja Siap Pakai	Tersedianya Tenaga Kerja Siap Pakai	Orang	210	2.100.000.000	30	198.941.000	0	0	0	0	32,00	111.708.100	32	111.708.100	0	0	62	310.649.100	30	15	Dinas Koperasi
				Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan	Orang	100	495.000.000	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi		
				Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Meningkatnya Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			129.245.700		50.000.044	0			10.020.000	10.020.000		0		139.265.700		5	Dinas Koperasi			
				Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Penyelesaian Hubungan Industrial	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial	Lembaga	100	495.000.000	1	48.048.000	0	0	0	0	-	0	0	1	48.048.000	1	10	Dinas Koperasi			
				Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Terlindungnya Pekerja Melalui Upah Minimum Kabupaten dan Jamsostek	Kali	5	900.000.000	0	-	1	50.000.044	0	0	1,00	10.020.000	1	10.020.000	0	0	1	10.020.000	20	1	Dinas Koperasi
				Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan Undang - undang Tentang Ketenagakerjaan	Kali	5	525.000.000	1	81.197.700	0	0	0	0	-	0	-	0	0	1	81.197.700	20	15	Dinas Koperasi	
				Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Terlaksananya Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Hukum Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Perusahaan	100	525.000.000	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Pemantauan Kinerja Lembaga Penyuluh Tenaga Kerja	Terpantaunya Kinerja Lembaga Penyuluh Tenaga Kerja	Lembaga	100	690.000.000	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif	Meningkatnya Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif			50.722.800		80.000.584	0			77.851.600	77.851.600	19		128.574.400		6	Dinas Koperasi				
				Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Orang Kali	370	477.690.000	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Mikro	Usaha Mikro	370	405.363.800	100	50.722.800	130	80.000.584	0	0	34,00	77.851.600	34	77.851.600	26	97	134	128.574.400	36	32	Dinas Koperasi
				Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Kecil Menengah	Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Tentang UKM	Orang	320	208.845.000	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Usaha Mikro	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Mikro	Dokumen	4	417.690.000	0	-	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
				Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah			344.459.000		557.894.380	0			365.466.400	333.508.800	21		677.967.800		11	Dinas Koperasi				
				Fasilitasi Peningkatan Komitmen Usaha Bagi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Peningkatan Komitmen Usaha Bagi Usaha Mikro	Usaha Mikro	250	366.306.000	90	45.983.700	100	89.999.920	0	0	70,00	70.000.400	70	70.000.400	70	78	160	115.984.100	64	32	Dinas Koperasi
				Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pelatihan Kewirausahaan	Orang Kali	640	488.408.000	150	158.946.300	38	150.000.049	0	0	34,00	263.508.400	34	263.508.400	89	176	184	422.454.700	29	86	Dinas Koperasi
				Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD	Orang Kali	800	672.112.500	150	59.596.500	100	80.018.176	0	0	-	-	0	0	150	59.596.500	19	9	Dinas Koperasi		
				Sosialisasi Hak Atas Kekayaan Intelektual Kepada Usaha Mikro	Terlaksananya Hak Atas Kekayaan Intelektual pada Usaha Mikro	Usaha Mikro	410	452.911.250	0	-	0	0	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi		

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
					Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM	Terlaksananya Pelatihan Pengelolaan Usaha Bagi Pelaku UKM	Usaha Mikro	0		65	79.932.500	0	0	0	0					-	-	0	-	0	0	65	79.932.500	0	0	Dinas Koperasi	
					Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Peningkatan Kerjasama di Bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual	Usaha Mikro	4	344.810.000	0	-	30	88.199.956	0	0					-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
					Fasilitasi Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Terfasilitasinya Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi	Usaha Mikro	20	431.012.500	0	-	0	0	0	0					-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
					Pelatihan Pengolahan Keuangan Bagi Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pendidikan Keuangan Bagi Pengurus/ Anggota Koperasi	Orang	600	469.189.900	0	-	30	78.357.779	0	0					-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
					Revitalisasi Pasar Rakyat	Adanya Pengembangan Pasar Rakyat	Pasar	5	3.105.100.000	0	-	0	0	0	0					-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
					Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Terfasilitasinya Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Usaha Mikro	250	427.357.000	0	-	0	0	0	0					-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
					Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengelola, Juru Buku dan Bendahara Koperasi	Orang	410	866.080.300	0	-	0	0	0	0					-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
					Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Pengawasan Perkoperasian Bagi Pengurus Koperasi	Koperasi	410	866.080.300	0	-	0	0	0	0					-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi	
					Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan Bagi Pelaku Usaha Mikro	Usaha Mikro	-		0	-	30	71.318.500	0	0					-	31.957.600	0	31.957.600	0	0	0	31.957.600	0	0	Dinas Koperasi	
					Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Meningkatnya Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah				264.886.100		700.016.727		0							349.900.000		349.900.000		22		614.786.100		7	Dinas Koperasi	
					Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Terlaksananya Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	Orang	370	595.930.400	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
					Pengembangan Klaster Bisnis	Terlaksananya Pengembangan Klaster Bisnis	Klaster	7	598.469.600	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
					Pemantauan Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Terpantaunya Pengelolaan Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi dan Usaha Mikro	500	915.765.000	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
					Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Terlaksananya Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Usaha Mikro	80	915.765.000	15	100.000.000	15	199.999.975	0	0					20,00	349.900.000	20	349.900.000	133	175	35	449.900.000	44	49	Dinas Koperasi	
					Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro	Terseleenggaranya Promosi Produk Usaha Mikro	Pameran	15	2.136.785.000	2	164.886.100	1	200.000.102	0	0					-	0	-	0	0	2	164.886.100	13	8	Dinas Koperasi		
					e - Commerce Produk Usaha Mikro	Tersedianya Aplikasi Berbasis e - Commerce dan Pengelolaannya	Aplikasi	2	125.000.000	0	-	1	300.016.650	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
					Koordinasi Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Terlaksananya Penggunaan Dana Pemerintah Bagi Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi dan Usaha Mikro	500	6.500.000.000	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
					Pengembangan dan Pemasaran Usaha Koperasi	Berkembangnya Pemasaran Usaha Koperasi	Koperasi	25	2.136.785.000	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
					Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Koperasi				582.145.500		737.795.115		0							530.070.100		267.317.500		31.449.118		849.463.000		5	Dinas Koperasi	
					Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Koperasi	Terlaksananya Peringatan HUT Koperasi	Orang	4.000	940.000.000	800	204.023.700	600	139.959.289	0	0					-	0	-	0	0	800	204.023.700	20	22	Dinas Koperasi		
					Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Terlaksananya Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Orang Kali	250	773.588.375	80	19.018.300	0	0	0	0					-	0	-	0	0	80	19.018.300	32	2	Dinas Koperasi		
					Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Adanya Koperasi Berprestasi	Koperasi	1.125	427.357.000	-	-	225	53.392.018	0	0					225,00	209.026.400	225	209.026.400	450	418.052.800	225	209.026.400	20	49	Dinas Koperasi	
					Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	Koperasi	230	203.512.877	-	-	3	43.081.057	0	0					-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi		

2		3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Adanya Penerapan Teknologi Sederhana/ Modern pada Jenis Usaha Koperasi	Koperasi	25		2.500.000.000	-		5	150.000.251	0	0					3,00	58.291.100	3	58.291.100	6	116.582.200	3	58.291.100	12	2	Dinas Koperasi	
						Penyebaran Model - model Pola Pengembangan Koperasi	Tersedianya Bahan Bacaan (SOP) Pengelolaan Koperasi	Eks	20		221.025.250	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Dokumen	20		418.174.247	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Pembentukan Klinik Koperasi dan Usaha Mikro	Terbentuknya dan Beroperasinya Klinik Koperasi dan Usaha Mikro	Klinik	5		497.322.443	1		51.036.000	0	0	0	0					-	0	-	0	0	1	51.036.000	20	10	Dinas Koperasi	
						Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Usaha Simpan Pinjam	Koperasi	190		667.725.714	-	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Penyusunan Buku Pola Pengembangan Koperasi	Tersebarnya Buku Pola Pengembangan Koperasi Melalui Bahan Bacaan (SOP) Pengelolaan Koperasi	Eks	500		414.422.344	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Terlaksananya Kegiatan Pemasarakatan Perkoperasian melalui Hari Koperasi	Orang	0		-	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Peningkatan Permodalan Koperasi	Meningkatnya Permodalan Koperasi	Koperasi	150		1.604.560.000	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Peningkatan Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha	Meningkatnya Produktivitas Koperasi/ Sentra Usaha	Koperasi	125		457.882.500	0	-	0	0	0	0					-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Kab.Karo	Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Kab.Karo	Orang	0		-	30		94.770.400	0	0	0	0					-	0	-	0	0	30	94.770.400	0	0	Dinas Koperasi	
						Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Tersedianya Tenaga Pendamping Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	OB	0		-	10		86.000.000	0	0	0	0					-	0	-	0	0	10	86.000.000	0	0	Dinas Koperasi	
						Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Fungsi Pendidikan dan Pelatihan Bagi Koperasi dan UMKM	Kali	0		-	3		32.506.000	0	0	0	0					-	0	-	0	0	3	32.506.000	0	0	Dinas Koperasi	
						Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Kab.Karo	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Kab.Karo	Orang	0		-	30		94.791.100	0	0	0	0						0	-	0	0	30	94.791.100	0	0	Dinas Koperasi	
						Koordinasi Pendampingan Pendidikan dan Pelatihan Koperasi dan UMKM	Terlaksananya Pelatihan Akuntansi Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Kab.Karo	Orang Bulan	0		-	0	-	10	69.329.000	0	0	5	30.500.000	15,00	45.484.200	20	75.984.200	200	110	20	75.984.200	0	0	Dinas Koperasi			
						Pelatihan Manajemen Koperasi																-	54.232.300										
						Pelatihan Vacasional Bagi Koperasi dan Usaha Mikro																34,00	84.576.800										
						Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Koperasi Sektor Riil																34,00	78.459.300										
						Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Dan Anggota Koperasi	Terlaksananya Pelatihan Perkoperasian Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Dan Anggota Koperasi	Orang	0		-	0	-	95	179.023.500	0	0						0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Koperasi		
						Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Kab. Karo	Terlaksananya Pelatihan Penilaian Kesehatan Koperasi Bagi Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi Kab. Karo	Orang	0		-	0	-	35	103.010.000	0	0	34	78.459.300			34	78.459.300	97	76	34	78.459.300	0	0	Dinas Koperasi			
						JUMLAH					53.371.631.436			5.960.150.483		6.097.896.848		67.820.391		104.245.166		-	2.579.337.230		2.528.723.367	-	31.449.299	-	5.798.615.495	-	132	#VALUE!	
						DINAS PEMBERDAYAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					5.533.186.270			6.849.679.456		1.037.788.728		27.597.405		71.694.637		58.862.338		222.720.853		901.029.735	100	60		7.750.709.191	64	278	
1						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran				2.413.312.851			1.304.706.825		381.292.701		27.597.405	50	71.039.547		57.812.338	237,00	182.328.400		338.777.690	99	89	3.039	1.643.484.515	59	118	DPPA
						Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	3.150		16.483.770	1.800		8.100.000	-	-	-	-		-		-		-	-	-	-	1.800	8.100.000	57	49	DPPA	

2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	60		94.936.417	36	28.382.349	12	13.440.000	3	2.048.750	3	2.251.850	1	583.950	5,00	5.427.550	12	10.312.100	100	77	48	38.694.449	80	41	DPPA			
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	60					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	34		30.525.500	5	5.288.450	3	2.000.000	-	-	-	-	-	-	3,00	1.222.250	3	1.222.250	100	61	8	6.510.700	24	21	DPPA			
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	872		406.385.982	300	171.490.000	112	99.838.650	-	-	-	-	-	-	112,00	87.910.000	112	87.910.000	100	88	412	259.400.000	47	64	DPPA			
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60		78.847.367	36	59.566.453	12	21.609.668	2	2.430.000	2	10.067.822	2	3.645.000	6,00	4.860.000	12	21.002.822	100	97	48	80.569.275	80	102	DPPA			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	150		162.814.592	75	128.462.076	35	42.195.920	-	-	10	15.353.978	25	23.839.880	-	-	35	39.193.858	100	93	110	167.655.934	73	103	DPPA			
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis	35		54.945.900	24	35.655.440	7	10.197.310	7	5.108.655	7	2.409.900	7	2.678.655	-	-	7	10.197.210	100	100	31	45.852.650	89	83	DPPA			
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	205		7.936.630	57	27.939.450	8	2.757.070	-	-	4	1.397.217	4	1.359.853	-	-	8	2.757.070	100	100	65	30.696.520	32	387	DPPA			
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	5		6.044.049	3	3.480.000	1	1.320.000	-	-	-	660.000	-	1,00	660.000	1	1.320.000	100	100	4	4.800.000	80	79	DPPA				
					Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Penyediaan makanan dan minuman	org/kali	300		6.961.500				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	459		1.262.077.084	205	579.722.607	86	78.698.383	-	-		11.838.780		-	80,00	46.228.600	80	58.067.380	93	74	285	637.789.987	62	51	DPPA			
					penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	360		278.392.560	132	234.480.000	84	109.235.700	16	18.010.000	24	27.060.000	14	25.705.000	30,00	36.020.000	84	106.795.000	100	98	216	341.275.000	60	123	DPPA			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	bln	48		6.961.500	12	22.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	22.140.000	25	318	DPPA			
2					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur				996.918.974		1.294.345.250		17.528.950	-	-		655.090	3	1.050.000	3,00	10.692.453	3	12.397.543	100	71	3	1.306.742.793	59	169	DPPA			
					Pembangunan Gedung Kantor	Adanya gedung kantor	unit	10		-	-	-											-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Pengadaan Kendaraan Dinas/oprasional	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas/oprasional	unit	20		46.410.000														-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit/set	30		213.678.500	9	423.879.500	-	-	-	-							-	-	-	-	9	423.879.500	30	198	DPPA			
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	Unit	4		11.581.634													-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Pengadaan Meubeleur	Adanya Mebeleur	unit	194		122.102.000	18	227.370.000	-	-	-	-							-	-	-	-	18	227.370.000	9	186	DPPA			
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5		138.678.833	2	221.591.750		-									-	-	-	-	2	221.591.750	40	160	DPPA			
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	34		245.991.677	10	125.757.000	3	17.528.950	-	3	655.090	3	1.050.000	3,00	10.692.453	3	12.397.543	100	71	13	138.154.543	38	56	DPPA				
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	12		16.846.830	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Penyediaan sarana dan prasarana Kantor	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	unit	30		122.102.000	53	295.747.000	-	-	-	-							-	-	-	-	53	295.747.000	177	242	DPPA			
					Survei pengadaan tanah untuk perkantoran	Terlaksananya Survei pengadaan tanah untuk perkantoran	survai	20		30.525.500	-	-	-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	unit	120		6.620.000			-	-	-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Pengadaan sarana transportasi petugas P2TP2A	Tersedianya sarana transportasi petugas P2TP2A	unit	15		33.100.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
					Pembangunan gedung P2TP2A dan Rumah aman	Pembangunan gedung P2TP2A dan Rumah aman	unit	8		9.282.000													-	-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA		
3					Program Peningkatan Disiplin Aparatur					187.365.519		101.968.000	34	33.575.475	-	-						29.700.000	-	29.700.000	159	44	-	131.668.000	85	125	DPPA			
					Pengadaan mesin/kartu absensi	Adanya mesin/kartu absensi	unit	1		4.370.000	1	8.000.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8.000.000	100	183	DPPA			
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	338		182.995.519	180	93.968.000	34	33.575.475	-	-	-	-	-	-	29.700.000	54	29.700.000	159	88	234	123.668.000	69	68	DPPA				
4					Pogram keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Meningkatnya keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan				167.563.871		777.603.923		-	-	-							-	-	-	-	777.603.923	62	872	DPPA				

2				3				4				5				6		7				8				9				10				11				12				13				14=(9+10+11+12)				15=13/8x100%				16=(7+13)				17=15/6x100%				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																K		Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Peringatan Hari Disabilitas	Terlaksananya Peringatan Hari Disabilitas	kegiatan	3	9.930.000	-				-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo	Terlaksananya Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Kabupaten Karo	dokumen	4	64.780.250	1	52.225.400			-	-							-	-	-	-	1	52.225.400	25	81	DPPA
					Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo	Terlaksananya Pelatihan Dan Penguatan focal Point PUG Kabupaten Karo	orang	300	96.400.509	70	112.297.000			-	-							-	-	-	-	70	112.297.000	23	116	DPPA
					Peringatan Hari Ibu	Terlaksananya Peringatan Hari Ibu	kali	4	44.772.500	2	207.560.512			-	-	-	-					-	-	-	-	2	207.560.512	50	464	DPPA
					Peringatan Hari kartini	Terlaksananya Peringatan Hari Kartini	kali	3	6.620.000	1	57.048.080	-		-	-	-	-					-	-	-	-	1	57.048.080	33	862	DPPA
					Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak hak Anak	Tersedianya Advokasi Pemenuhan dan Perlindungan Hak - hak Anak	orang	180	8.275.000					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA)	Terlaksananya Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual anak (GN-AKSA)	orang	450	16.550.000	420	68.276.250	275	148.698.808	-	-					360,00	133.158.660	360	133.158.660	1	1	780	201.434.910	173	1.217	DPPA
					Perlindungan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus	Tersedianya sarana dan prasarana kantor	orang	160	23.205.000	-	-			-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Penyusunan Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG	Tersusunnya Berbagai Kebijakan dalam Rangka Penguatan Kelembagaan PUG	orang	150	14.895.000					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Perlindungan Hak Sipil Anak	Terlaksananya Perlindungan Hak Sipil Anak	kecamatan	17	32.487.000					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	Tersedianya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	PATBM / desa	246	60.333.000	8	175.878.243	4	120.211.953	-	-					4,00	111.342.453	4	111.342.453	100	93	12	287.220.696	5	476	DPPA
					Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	Tersedianya Sosialisasi/Advokasi Peraturan/Kebijakan Tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	orang	200	10.500.000					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Pembentukan Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo	Terbentuknya Gugus Tugas Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo	orang	150	19.860.000					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Pengembangan Kota Layak Anak	Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	kali	4	34.807.500			-		-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Penyusunan Profil Anak	Tersusunnya Profil Anak	Dokumen	2	10.500.000		-			-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Ramah Anak	sekolah	19	37.128.000	10	54.300.665	-		-	-	-						-	-	-	-	10	54.300.665	53	146	DPPA
					Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Puskesmas Ramah Anak	puskesmas	19	37.128.000	4	47.893.570			-	-							-	-	-	-	4	47.893.570	21	129	DPPA
					Pelatihan Sekolah Ramah Anak bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Terbentuknya Sekolah Ramah Anak	orang	240	34.807.500					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Puskesmas Ramah Anak bagi Petugas Kesehatan	orang	240	34.807.500					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak	Terlaksananya Pengembangan Bakat dan Ketrampilan Anak	orang	120	32.487.000		108.786.790			-	-							-	-	-	-	-	108.786.790	-	335	DPPA
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Ramah Anak	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ramah Anak	jenis	40	32.487.000	10	396.174.000	-		-	-	-						-	-	-	-	10	396.174.000	25	1.219	DPPA
					Facilitasi dan pembentukan PATBM	Tersedianya PATBM	desa	30	37.128.000					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Biaya operasional forum anak	Tersedianya biaya operasional forum anak	bulan	48	18.564.000					-	-							-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	Terlaksananya Pelatihan Konvensi Hak Anak bagi Tenaga Pendidik dan Kesehatan	orang	400	110.440.326	160	297.487.100			-	-							-	-	-	-	160	297.487.100	40	269	DPPA
					Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA)	Terlaksananya Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak	orang	150	10.240.000	150	50.165.200	-		-	-							-	-	-	-	150	50.165.200	100	490	DPPA

					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
			3		Peringatan Hari Anak	Terlaksananya Peringatan Hari Anak	kali	4	8.000.000	1	157.876.295			-	-							-	-	-	-	1	157.876.295	25	1.973	DPPA	
6					Program Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	Meningkatnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan			237.134.905	391.214.390			-									-	-	-	-	-	391.214.390	20	406	DPPA	
					Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	Terlaksananya Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban KDRT	orang	60	10.500.000															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Adanya sistem perlindungan bagi perempuan	sistem	3	6.300.000															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	Terlaksananya sosialisasi/advokasi kebijakan Penghapusan Buta Aksara Perempuan (PBAP)	orang	100	4.200.000															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Terlaksananya Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	orang	80	5.642.984															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelporan KDRT	Sosialisasi Sistem Pencatatan Dan Pelporan KDRT	orang/kali	150	20.500.000	-	-													-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Penyusunan Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	Tersusunnya Profil Perlindungan Perempuan Lansia dan Cacat	dokumen	3	10.250.000																-	-	-	-	-	-	DPPA
					Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	Terlaksananya Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap tindak Kekerasan	kasus	30	10.250.000															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Monitoring,Evaluasi dan Pelaporan	Adanya Laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	laporan	5	14.939.070	2	36.435.190													-	-	2	36.435.190				DPPA
					Pembentukan Pusat Pelayananan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Terbentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)	unit	-																-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)	Terlaksananya Penanganan Dan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak pada Pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A)	kasus	250	63.550.000	25	118.518.300													-	25	118.518.300	10	186	DPPA		
					Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)	Terlaksananya Pembentukan dan Pembinaan Desa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT)	desa	18	17.662.100	6	110.835.200													-	6	110.835.200	33	628	DPPA		
					Penyusunan PERDA TPPO	Adanya PERDA TPPO	dokumen	4	23.250.000															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Desa PKDRT	kecamatan	17	31.131.941	3	125.425.700													-	-	3	125.425.700	18	403	DPPA	
					Pembinaan dan pemberdayaan perempuan pengungsi korban erupsi gunung sinabung dalam peningkatan ekonomi keluarga	Terlaksananya kegiatan peningkatan ekonomi keluarga pengungsi sinabung (kursus)	posko	5	5.456.310															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Fasilitasi satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan	Terfasilitasinya satgas penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di pedesaan	bulan	48	9.502.500															-	-	-	-	-	-	-	DPPA
					Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan	Terfasilitasinya Upaya Perlindungan Terhadap Tindak Kekerasan	orang	225	4.000.000					-										-	-	-	-	-	-	-	DPPA
7					Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatkan Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			464.700.065	384.790.795			-	-	-									-	-	-	-	384.790.795	67	290	DPPA
					Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	orang/kali	460	23.205.000															-	-	-	-	-	-	-	DPPA

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18				
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
					Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender	orang/kali	240	46.410.000													-	-	-	-	-	-	-	-	DPPA				
					Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Terlaksananya Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	orang/kali	250	76.116.700	250	147.947.735											-	-	-	-	250	147.947.735	100	194	DPPA				
					Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	Terlaksananya Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	orang/kali	240	46.410.000	151	139.730.446	-	-									-	-	-	-	151	139.730.446	63	301	DPPA				
					Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	Terlaksananya Penguatan Fungsi dan Tanggung Jawab Orang Tua,Keluarga dan Masyarakat dalam Proses Pengasuhan dan Perlindungan Anak (Good Parenting Skill)	orang	400	131.743.365	150	97.112.614											-	-	-	-	150	97.112.614	38	74	DPPA				
					Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Mengenai Fenomena Pornografi dan Bahayanya Serta Pencegahan dan Penanganannya	orang	400	23.205.000															-	-	-	-	-	-	DPPA				
					Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA	Terlaksananya Pembekalan PUG bagi TOGA TOMA	kecamatan	17	71.200.000															-	-	-	-	-	-	DPPA				
					Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta	Terlaksananya Sosialisasi Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak bagi Instansi Pemerintah dan Swasta	orang	240	46.410.000		-											-	-	-	-	-	139.730.446	-	301	DPPA				
8					Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			20.379.000		12.364.240		-									-	-	-	-	-	12.364.240	100	61	DPPA				
					Pelayanan dan Perlindungan Sosial,Hukum Bagi Korban Eksploitasi,Perdagangan Perempuan dan Anak	Terlaksananya Pelayanan dan Perlindungan Sosial,Hukum Bagi Korban Eksploitasi,Perdagangan Perempuan dan Anak	orang	40	20.379.000	40	12.364.240											-	-	-	-	40	12.364.240	100	61	DPPA				
Jumlah										5.533.186.270		6.849.679.456		1.037.788.728	-	27.597.405		71.694.637		58.862.338	240,00	222.720.853		901.029.735	100	60		7.750.709.191	64	140				
														Rata - rata capaian kinerja (%)														100	60			64	140	
														Predikat Kinerja														Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat tinggi	

					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	10	117.020.000			18	8.375.374			15	2.985.197				24.494.451			0	0	-	18	0	0	Ketahanan Pangan		
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Meningkatnya koordinasi dengan stakeholder	orang	125	1.371.808.901	25	996.447.963	25	191.623.450				28.817.047				65.948.100			0	49			0		Ketahanan Pangan		
					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Kegiatan terlaksana dengan baik	Orang	15	308.314.700	2	30.575.276	2	31.017.300			2	8.247.300	2	12.650.000	1,00	10.120.000			0	100	61.592.576	2	20	100	Ketahanan Pangan		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Kegiatan terlaksana dengan baik	unit	7	8.776.500		4.163.730										2.400.000			0	0	4.163.730	-	47	0	Ketahanan Pangan		
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur															25.422.000			0	0	-		0		Ketahanan Pangan			
					Pengadaan Kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	Tersedianya kendaraan dinas	unit	26	600.000.000														0	0								
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional (roda 4 dan roda 2)	Terpeliharanya Kenderaandinas/operasional	unit	29	88.630.400		92.145.260									25.422.000			0	0	92.145.260		104			Ketahanan Pangan		
					Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	4	175.530.000														0	0	-	-	0			Ketahanan Pangan		
					Pengadaan Meubleur	Tersedianya Meubleur	Unit	60	225.000.000		118.001.298												0	0	118.001.298		52			Ketahanan Pangan		
					Program Peningkatan disiplin Aparatur															15.456.000			0	0	-	-	0			Ketahanan Pangan		
					Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas Beserta perlengkapannya	stel	202	41.930.100		36.575.000										15.456.000			0	0							
					Pengadaan pakaianolahraga beserta perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dinas Beserta perlengkapannya	stel	25	25.000.000	25	10.250.000												-	0	0	10.250.000	-	41	0	Ketahanan Pangan		
					Pengadaan Mesin/kartu absensi	Tersedianya Mesin/kartu absensi	unit	4	20.000.000		9.565.000												0	0	9.565.000	-	48	0		Ketahanan Pangan		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																-		0	0	-		0			Ketahanan Pangan		
					Rapat Kordinasi	Terlaksananya Rapat POSKO	kali	48	100.000.000														0	0								
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan																-		0	0	-		0			Ketahanan Pangan		
					Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan	Meningkatkan regulasi ketahanan pangan	perbub	5	54.100.000														0	0								
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)															471.853.276			0	0	-		0			Ketahanan Pangan		
					Penyusunan dan Penggandaan Buku Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	Bahan Kebijakan untuk Program Instansi terkait	exp	500	50.000.000														0	0								
					Pengembangan Lumbung Pangan	Terbangunnya lumbung pangan desa	unit	5	700.000.000														0	0	-		0			Ketahanan Pangan		
					Penyusunan Buku Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	Tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	exp	200	370.500.000		53.900.000												0	0	53.900.000		15					
					Penyusunan Bahan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	Tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	exp	200	436.300.000		44.284.428												0	0	44.284.428		10					
					Pengembangan Sistim Informasi Pasokan harga dan Akses Pangan	tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	website	1	300.000.000	1	120.490.680												-	0	0	120.490.680		40				
					Pembangunan Sistem Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan	Tersedianya informasi pasokan harga dan akses pangan	1 website	1	140.000.000		70.614.000												0	0	70.614.000	-	50	0		Ketahanan Pangan		
					Penyusunan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan	kecamatan	17	80.000.000		5.100.000	17	69.686.600								41.201.949			0	0	5.100.000	17	6				
					Peningkatan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Masyarakat	Meningkatkan sumber daya manusia dan petani/masyarakat tentang rawan pangan dan pengembangan konsumsi pangan	kecamatan	17	165.000.000		28.310.000												0	0	28.310.000	-	17					
					Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	terawasinya keamanan pangan	komoditi	25	150.000.000		104.247.550												0	0	104.247.550		69					

2				3				4				5				6		7				8				9				10				11				12				13				14=(9+10+11+12)				15=13/8x100%				16=(7+13)				17=15/6x100%				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																K		Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.				K				Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
					Lembaga Distribusi Pangan	Terlaksananya Lembaga Distribusi Pangan	gapoktan	6		929.000.000								-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan						
					Pengembang usaha pangan masyarakat (PUPM)	Terlaksananya Pengembangan usaha pangan masyarakat (PUPM)	gapoktan	6		310.000.000								-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan						
					Rapat Dewan Ketahanan Pangan	Terlaksananya Rapat Dewan Ketahanan Pangan	kali	6		315.000.000	4		110.397.500	2		46.591.670			17.594.970	17.594.970	0	0	127.992.470	2	41	50	Ketahanan Pangan				
					Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Daerah	Terlaksananya Pembangunan Gudang Cadangan Pangan Daerah	unit	1		500.000.000									-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan					
					Program Mutu dan Keamanan Pangan														171.189.497		0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan				
					Pembinaan mutu dan keamanan pangan	Terlaksananya Pembinaan mutu dan keamanan pangan	kecamatan	6		175.000.000			10		100.000.000				85.943.105	85.943.105	0	0									
					Gelar Pangan Sehat Kantin Sekolah	Terlaksananya Gelar Pangan Sehat Kantin Sekolah	sekolah	30		100.000.000									-	0	0	-	-	0	0	Ketahanan Pangan					
					Pemberian Stimulan percontohan pengembangan kebun sekolah	Terlaksananya Pemberian Stimulan percontohan pengembangan kebun sekolah	sekolah	30		75.000.000									-	0	0	-	-	0		Ketahanan Pangan					
					Pengenalan menu B2SA pada anak usia dini	Terlaksananya Pengenalan menu B2SA pada anak usia dini	sekolah	30		100.000.000									-	0	0	-	-	0		Ketahanan Pangan					
					Pengembangan Sertifikasi dan Pengawasan Batas maksimum Residu (BMR) pada Produk Pangan Segar	Terlaksananya Pengembangan sertifikasi dan pengawasan batas maksimum residu (BMR) pada produk Pangan segar	Kecamatan	9		678.000.000	6		169.703.370	20		232.758.922			85.246.392	85.246.392	0	0	254.949.762	20	38		Ketahanan Pangan				
					Sosialisasi Keamanan Produk Pangan Segar	Terlaksananya Sosialisasi Keamanan Produk Pangan Segar	kali	6		100.000.000									-	0	0	-	-	0		Ketahanan Pangan					
					Pembinaan dan pengembangan rumah kemas untuk keamanan pangan	Terlaksananya Pembinaan dan pengembangan rumah kemas untuk keamanan pangan	kali	6		50.000.000									-	0	0	-	-	0		Ketahanan Pangan					
					JUMLAH														913.781.024												
					DINAS LINGKUNGAN HIDUP																										
					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																										
					Bidang Urusan Lingkungan Hidup					15.146.918.405									8.765.871.077												
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran													2.936.490.276	3.242.996.725			18.743.133.352								
					Penyediaan Jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	5.850		36.150.000	2450		11.250.000	0		-	2	2.303.004		0	2.303.004	0	0	2.450	13.553.004	42	37	DLH			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60		351.998.400	36		126.161.564	12		54.000.000	3	7.915.245	3,00	16.732.521	6	24.647.766	1	0	42	150.809.330	70	43	DLH		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	unit	282		35.784.998.262	106		12.248.157.633	52		5.384.070.919	2	198.408.400	5,00	2.230.202.479	7	2.428.610.879	0	0	113	14.676.768.512	40	0	DLH		
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya honorarium administrasi keuangan	orang bulan	181		1.800.230.820	55		512.400.000	180		87.120.000			131,00	178.140.000	131	178.140.000	1	2	186	690.540.000	103	38	DLH		
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	20		257.229.600	66		104.210.000	48		43.899.397	3	4.860.000	2	2.430.000	20,00	12.150.000	25	19.440.000	1	0	91	123.650.000	455	48	DLH
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	190		137.625.000	83		45.774.600	21		11.500.000			10,00	5.980.000	10	5.980.000	0	1	93	51.754.600	49	38	DLH		
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	jenis	185		366.581.890	111		173.991.335	37		57.470.461			31,00	36.223.400	31	36.223.400	1	1	142	210.214.735	77	57	DLH		
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	45		232.550.225	26		116.194.000	9		41.224.722		1	586.800	7,00	104.817.000	8	105.403.800	1	3	34	221.597.800	76	95	DLH	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	25		114.000.000	24		141.550.000	0		0			2,00	29.800.000	2	29.800.000	0	0	26	171.350.000	104	150	DLH		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah tangga	buah	1.248		37.410.798	261		19.618.850	20		6.184.911			15,00	4.426.100	15	4.426.100	1	1	276	24.044.950	22	64	DLH		
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	20		24.369.120			8.300.000	0		0				0	-	0	0	0	8.300.000	0	34	DLH			
					Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	orang hari kali	3.482		2.866.771.460	1341		1.082.548.645	600		330.779.758		14	9.333.000	377,00	185.193.776	391	194.526.776	1	1	1.732	1.277.075.421	50	45	DLH	
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	orang bulan	125		1.712.607.600	293		909.980.000	300		329.400.000	3	53.130.000	30	27.540.000	127,00	132.825.000	160	213.495.000	1	1	453	1.123.475.000	362	66	DLH
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							0			0					28.941.000	0	-									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18								
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	2	300.000.000								0	0	DLH								
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	55.000.000								0	0	DLH								
				Pemeliharaan Rutin/berkala gedung kantor	gedung	2	60.000.000					1,00	28.941.000		0	0	DLH								
				Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	gedung	1	60.500.000								0	0	DLH								
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit	1	200.000.000	1	205.670.500					0	0	1	205.670.500	100	103	DLH					
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur Negara			0					34.580.000	34.580.000											
				Pengadaan Mesin Kartu Absensi	unit	1	10.000.000	1	10.000.000							1	10.000.000	100	100	DLH					
				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	537	287.321.600	199	140.415.000				34.580.000	0	34.580.000		199	174.995.000	37	61	DLH				
				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan				13.402.584.505				5.334.445.678	0	6.776.043.161						DLH				
				Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	bulan	60	10.771.587.614	36	5.200.540.823	12	580.700.042		4,00	127.843.232	4	127.843.232		40	5.328.384.055	67	49	DLH			
				Kerjasama Pengelolaan Sampah	bulan	60	67.650.631.260	36	22.370.158.853	12	10.900.522.363	3	1.441.597.483		3,00	3.223.660.446	6	4.665.257.929	1	0	42	27.035.416.782	70	40	DLH
				Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	unit	1.180	37.411.822.038	445	6.654.207.160	224	1.921.362.100			1.982.942.000	0	1.982.942.000		445	8.637.149.160	38	23	DLH			
				Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan																				
				Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam Geologi	orang	300	154.590.000	150	74.590.000								150	74.590.000	50	48	DLH				
				Sosialisasi Good Mining Practice (GMP)	orang	100	52.401.000	30	22.401.000								30	22.401.000	30	43	DLH				
				Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Air Tanah	ranperda	1	50.000.000										0	-	0	0	DLH				
				Pembinaan dan penyuluhan pajak mineral bukan logam dan mineral dan air tanah	org kali	400	161.000.000										0	-	0	0	DLH				
				Pemetaan indikasi sebaran bahan galian dan peta geologi per kecamatan	dokumen	3	191.000.000										0	-	0	0	DLH				
				Penyelidikan gerakan tanah ambias	dokumen	2	352.000.000										0	-	0	0	DLH				
				Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan	Meningkatnya Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan			1.400.000.000						165.576.400	0	165.576.400					DLH				
				Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor dan kelengkapannya	unit	37	244.907.184	65	420.641.812					10,00	76.861.400	10	76.861.400		75	497.503.212	203	203	DLH		
				Pengadaan dan Pemasangan Meteran Air Sumur Bor	unit	40	305.800.000										0	-	0	0	DLH				
				Pemetaan Akuifer Air Tanah	peta	2	50.000.000	1	98.065.000				1,00	88.715.000	1	88.715.000		2	186.780.000	100	374	DLH			
				Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah	peta	7	161.526.621	3	142.400.000						0	-		3	142.400.000	43	88	DLH			
				Pemetaan cekungan air tanah	peta	2	18.891.000										0	-	0	0	DLH				
				Kajian batu karbonat	paket	1	15.000.000										0	-	0	0	DLH				
				Penyusunan perda tentang pemanfaatan langsung panas bumi	perda	1	15.000.000										0	-	0	0	DLH				

2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14=(9+10+11+12)					15=13/8x100%					16=(7+13)					17=15/6x100%					18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

2		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengendalian dan pencemaran lingkungan hidup							136.999.200								202.907.448		61.930.000							DLH	
					Koordinasi penilaian kota sehat/adipura	terlaksananya koordinasi penilaian kota sehat/adipura	kali	8	619.297.594	2	34.455.000										0	-		2	34.455.000	25	6			DLH	
					Pemantauan Kualitas Lingkungan	terpantau kualitas lingkungan	laporan	12	1.027.168.655	4	679.364.963	2	61.999.200							1,00	61.930.000	1	61.930.000		5	741.294.963	42	72			DLH
					Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Lingkungan Hidup	Terawasinya pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup	laporan	10	291.100.000	5	18.995.650													5	18.995.650	50	7			DLH	
					Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan	Terlaksananya pengembangan produksi ramah lingkungan	jenis	3	1.342.346.855	1	68.847.000													1	68.847.000	33	5			DLH	
					Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Tersusunnya kebijakan pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	perda	3	692.831.345	1	210.069.700													1	210.069.700	33	30			DLH	
					Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Terlaksananya KLHS untuk RPJMD Kabupaten Karo 2020-2025	dokumen	2	300.000.000			1	75.000.000							1,00	140.977.448			0	-	0	0			DLH	
					Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengendalian Lingkungan Hidup	Terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup	kali	52	1.716.381.767	17	587.671.861										0	-		17	587.671.861	33	34			DLH	
					Penyusunan DED (Detail Engineering Design) TPA Kecamatan Merek	Tersusunnya DED TPA Kec. Merek	dokumen	1	50.000.000	1	49.654.000													1	49.654.000	100	99			DLH	
					Peningkatan sarana prasarana lingkungan hidup	Terciptanya sarana prasarana lingkungan hidup	unit	1	789.979.000															0	-	0	0			DLH	
					Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan lingkungan	perusahaan	120	315.311.450															0	-	0	0			DLH	
					Penyusunan rencana aksi adaptasi perubahan iklim	Adanya dokumen rencana aksi adaptasi perusahaan iklim	dokumen	1	15.199.800															0	-	0	0			DLH	
					Penyusunan perda pengelolaan dan pengolahan sampah	Adanya Perda Pengelolaan sampah	perda	1	109.800.200															0	-	0	0			DLH	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	parameter teruji	1	200.000.000															0	-	0	0			DLH	
					Pengadaan Alat-alat ukur dan bahan laboratorium lingkungan	tersedianya alat ukur dan bahan laboratorium lingkungan	jenis	135	575.000.000															0	-	0	0			DLH	
					Sosialisasi Proper terhadap perusahaan	Terlaksananya Sosialisasi Proper terhadap perusahaan	orang	100	50.000.000															0	-	0	0			DLH	
					Pengkajian Dampak Lingkungan	Terlaksananya kajian dampak lingkungan	kajian	9	425.000.000	1	49.700.000										0	-		1	49.700.000	11	12			DLH	
					Penyusunan Dokumen Lingkungan Sektor Air Minum		dokumen	2	100.000.000	1	49.700.000										0	-		1	49.700.000	50	50			DLH	
					Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya perlindungan dan konservasi SDA						0									45.170.275	1	45.170.275							DLH	
					Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	Terlaksananya konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air	lokasi	15	1.226.250.000	8	860.787.470									1,00	45.170.275	1	45.170.275		9	905.957.745	60	74			DLH
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup						194.210.500									6.880.000		6.880.000								
					Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan	Tersedianya Data dan Informasi Lingkungan	dokumen	13	190.000.000	2	79.070.000													2	79.070.000	15	42			DLH	
					Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Terlaksananya Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	dokumen	2	315.060.000															0	-	0	0			DLH	
					Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD)	Tersusunnya Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah	dokumen	1	100.000.000	0	-										0	-		0	-	0	0			DLH	
					Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	Tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	dokumen	4	435.000.000															0	-	0	0			DLH	

2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14=(9+10+11+12)					15=13/8x100%					16=(7+13)					17=15/6x100%					18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18																																																																																																													
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.																																																																																																															
		2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan				3.507	4.282.811.249	359	3.008.044.935	197	1.301.373.458	-		-	2	615.378.530	8	86.035.600	13,00	573.352.184	23	1.274.766.314	12	98	382	4.282.811.249	11	100	Disdukcapil																																																																																																													
		2	06	15	07	Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	Terlaksananya peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan	unit	55	678.022.132	27	397.699.095	12	144.825.837	-	-	-	-	6	79.032.000	6,00	201.291.037	12	280.323.037	100	194	39	678.022.132	71	100	Disdukcapil																																																																																																																
		2	06	15	***	Sosialisasi kebijakan kependudukan	Tersedianya informasi tentang kependudukan	org	3432	1.447.387.352	279	1.305.172.920	182	203.432.506	-	-	-	-	-	4,00	142.214.432	4	142.214.432	2	70	283	1.447.387.352	8	100	Disdukcapil																																																																																																																	
		2	06	15	***	Pelayanan administrasi kependudukan terpadu	Tersedianya blanko dan terlaksananya pelayanan keiling	org	20	2.157.401.765	53	1.305.172.920	3	953.115.115	-	-	2	615.378.530	2	7.003.600	3,00	229.846.715	7	852.228.845	233	89	60	2.157.401.765	300	100	Disdukcapil																																																																																																																
JUMLAH									6.342	9.332.104.638	1.753	5.572.141.710	796	2.274.886.923	44	63.660.000	68	710.868.530	198	277.796.359	353,00	1.137.538.480	663	2.189.863.369	83	96	2416	7.762.005.079	38	83	Disdukcapil																																																																																																																
									Rata - rata capaian kinerja (%)																		83,29		96,26				38,10		83,18																																																																																																												
									Predikat Kinerja																		Tinggi		Sangat Tinggi				Sangat Rendah		Tinggi																																																																																																												
									DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									40.214.782.575									12.144.031.882									2.771.096.533									70.065.428									200.984.513									161.897.863									1.446.159.638									1.879.107.442									70									96									-									14.023.139.324									63									54								
1						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan administrasi Perkantoran		6.097.644.400	2.473.159.981	1.739.509.701	46.484.961	96.660.490	86.361.330	687.489.893	916.996.674	98	88	3.390.156.655	91	118																																																																																																																										
						Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Buah	3.000	11.880.000	2.000	5.940.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	5.940.000	67	50	DPMD																																																																																																												
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Bulan	72	102.000.000	48	44.463.599	12	18.600.000	2	2.309.961	3	3.357.030	4	4.437.230	3,00	3.345.476	12	13.449.697	100	72	60	57.913.296	83	57	DPMD																																																																																																																
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	22	24.960.000	5	8.591.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8.591.000	23	34	DPMD																																																																																																													
						Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi	Orang Bulan	1.296	805.860.000	654	225.865.000	4	160.408.500	-	-	1	7.728.500	1	2.960.000	2,00	148.280.000	4	158.968.500	100	99	658	384.833.500	51	48	DPMD																																																																																																																
						Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Orang Bulan	72	68.400.000	48	37.380.000	12	14.908.500	2	2.430.000	3	3.966.100	4	4.860.000	3,00	3.645.000	12	14.901.100	100	100	60	52.281.100	83	76	DPMD																																																																																																																
						Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	Unit	48	60.000.000	71	44.980.000	5	9.000.000	-	-	-	2	3.000.000	3,00	6.000.000	5	9.000.000	100	100	76	53.980.000	158	90	DPMD																																																																																																																	
						Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Jenis	180	345.244.400	117	164.034.865	30	45.699.015	-	-	9	9.629.910	11	10.403.500	10,00	25.239.865	30	45.273.275	100	99	147	209.308.140	82	61	DPMD																																																																																																																
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	Jenis	30	189.000.000	20	76.794.531	4	12.742.500	-	-	2	5.720.500	-	2,00	6.602.000	4	12.322.500	100	97	24	89.117.031	80	47	DPMD																																																																																																																	
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah	80	27.000.000	50	10.812.800	20	1.992.400	-	-	-	-	-	20,00	1.992.400	20	1.992.400	100	100	70	12.805.200	88	47	DPMD																																																																																																																	
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Buah	120	660.000.000	58	307.935.000	15	271.250.626	-	-	-	-	-	15,00	258.250.626	15	258.250.626	100	95	73	566.185.626	61	86	DPMD																																																																																																																	
						Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya penyediaan peralatan rumah tangga	Buah	120	12.500.000	80	10.672.950	24	64.033.650	-	-	-	-	-	24,00	63.347.242	24	63.347.242	100	99	104	74.020.192	87	592	DPMD																																																																																																																	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan perundang undangan	Buah	576	54.000.000	384	28.720.000	96	21.000.000	-	-	34	2.680.000	30	2.320.000	32,00	13.040.000	96	18.040.000	100	86	480	46.760.000	83	87	DPMD																																																																																																																
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Orang Hari	1.980	3.150.000.000	959	1.124.980.236	144	142.395.400	-	-	57	35.115.600	28	16.635.600	59,00	73.495.700	144	125.246.900	100	88	1.103	1.250.227.136	56	40	DPMD																																																																																																																
						Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang Bulan	576	586.800.000	429	381.990.000	132	977.479.110	33	41.745.000	22	28.462.850	36	41.745.000	15,00	84.251.584	106	196.204.434	80	20	535	578.194.434	93	99	DPMD																																																																																																																
2						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		1.117.138.175	292.944.565	224.061.749	-	-	-	-	-	-	-	5,00	203.951.704		203.951.704	-	-		496.896.269	85	49																																																																																																																			
						Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Adanya Kendaraan Dinas /Operasional	Unit	1	450.000.000	1	22.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22.700.000	100	5	DPMD																																																																																																													
						Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	18	442.000.000	6	164.235.565	4	174.061.749	-	-	-	-	-	4,00	153.951.704	4	153.951.704	-	-	10	318.187.269	56	72	DPMD																																																																																																																	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	2	225.138.175	1	106.009.000	1	50.000.000	-	-	-	-	-	1,00	50.000.000	1	50.000.000	-	-	2	156.009.000	100	69	DPMD																																																																																																																	
3						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		260.000.000	145.056.850	19.210.000	-	-	-	-	-	-	-	-	19.210.000		19.210.000	100	100		164.266.850	84	86																																																																																																																			
						Pengadaan Mesin /Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	Unit	1	10.000.000	1	11.107.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.107.750	100	111	DPMD																																																																																																														
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapanya	Adanya Pakaian Dinas beserta perlengkapanya	Stel	508	250.000.000	308	133.949.100	34	19.210.000	-	-	-	-	-	34,00	19.210.000	34	19.210.000	100	100	342	153.159.100	67	61	DPMD																																																																																																																	
4						Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan		7.550.000.000	2.180.544.748	28.232.427	-	-	-	28.232.427	-	-	-	-	-	-	-	28.232.427	-	100		2.208.777.175	53	65																																																																																																																		
						Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa sesuai peraturan perundang-undangan	Desa	259	5.800.000.000	17	570.473.500	11	28.232.427	-	-	-	28.232.427	-	-	-	-	-	28.232.427	-	100	17	598.705.927	7	10	Kab.Karo																																																																																																																

4						5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Fasilitasi, pembinaan dan monitoring penggunaan Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	adanya informasi dan pelaksanaan dan pelaporan alokasi Dana Desa, Dana Desa serta Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Desa	518	690.000.000	518	1.065.062.818	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	1.065.062.818	100	154	Kab.Karo	
					Fasilitasi dan Pembinaan implementasi Undang-Undang tentang Desa	adanya informasi tentang pelaksanaan undang-undang tentang Desa	Orang	1.554	640.000.000	777	433.348.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	777	433.348.200	50	68	Kab.Karo	
					Sosialisasi Pengisian Keanggotaan BPD	Terlaksananya Pengisian Sosialisasi BPD	Desa	259	420.000.000	145	111.660.230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145	111.660.230	56	27	Kab.Karo	
5					Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Meningkatnya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan			4.330.000.000		740.184.100		35.579.800	-	-	-	-	-	-	17,00	35.219.800		35.219.800	100	99		775.403.900	38	20			
					Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Adanya laporan pelaksanaan Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha Milik Desa	Orang	1.454	1.260.000.000	300	222.363.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300	222.363.200	21	18	Kab.Karo	
					Jambore TTG tingkat Provinsi dan TTG tingkat Nasional	Peserta jambore TTG tingkat provinsi dan TTG tingkat nasional	Orang	84	1.290.000.000	34	431.337.600	17	35.579.800	-	-	-	-	-	-	17,00	35.219.800	17	35.219.800	100	99	51	466.557.400	61	36	Kab.Karo		
					Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan dan Pelaporan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan	Terlaksananya pembinaan pengelolaan dana simpan pinjam di desa	Kelompok	1.836	1.780.000.000	612	86.483.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	86.483.300	33	5	Kab.Karo		
					Pembinaan Pengelolaan Dana Simpan Pinjam																							-	-		-	-
6					Program Peningkatan Partisipad Masyarakat Dalam Membangun Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa			2.160.000.000		645.053.220		45.017.200	-	-	-	-	-	12.118.700	-	30.876.400		42.995.100	29	96		688.048.320	72	32			
					Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Terselenggaranya BBGRM	Desa	102	2.160.000.000	68	645.053.220	17	45.017.200	-	-	-	-	5	12.118.700	-	30.876.400	5	42.995.100	29	96	73	688.048.320	72	32	DPMD		
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa			10.080.000.000		3.320.668.478		418.829.580	-	18.620.467		58.053.400		34.739.400		285.114.889		396.528.156	100	95		3.717.196.634	49	32			
					Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang pengelolaan keuangan desa	Orang	1.354	1.270.000.000	535	690.298.450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	535	690.298.450	40	54	Kab.Karo		
					Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelatihan aparatur pemerintah desa dibidang manajemen pemerintahan desa	Orang	1.295	3.250.000.000	518	658.013.740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	518	658.013.740	40	20	Kab.Karo		
					Pelatihan BPD	Terlaksananya Pelatihan BPD	Orang	518	1.300.000.000	288	51.928.850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	51.928.850	56	4	Kab.Karo		
					Fasilitasi, Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan Keuangan Desa	Terpantaunya pelaksanaan dan pengelolaan keuangan desa	Orang	4.662	3.000.000.000	3.108	1.880.620.388	777	418.829.580	-	18.620.467	80	58.053.400	525	34.739.400	172,00	285.114.889	777	396.528.156	100	95	3.885	2.277.148.544	83	76	Kab.Karo		
					Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa	Sinkronnya dokumen perencanaan pembangunan desa	Desa	1.036	1.260.000.000	259	39.807.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	259	39.807.050	25	3	DPMD		
7					Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan	Meningkatnya peran perempuan di pedesaan			8.620.000.000		2.346.419.940		260.656.076	-	4.960.000		18.038.196		28.678.433		184.296.952		235.973.581	66	92		2.582.393.521	52	23			
					Pelatihan Perempuan dipedesaan dalam Bidang Usaha Ekonomi Produktif	Terlaksananya pelatihan perempuan dipedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	Orang	225	1.200.000.000	96	143.972.050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96	143.972.050	43	12	Kab.Karo		
					Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	Orang	6.432	1.200.000.000	3.216	158.088.150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.216	158.088.150	50	13	Kab.Karo		
					Usaha Peningkatan pendapatan keluarga (UP2K)	Adanya Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K)	Kelompok	777	1.420.000.000	140	118.122.900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	118.122.900	18	8	Kab.Karo		
					Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Dana operasionalisasi penggerak PKK	Orang	9.600	3.600.000.000	6.240	1.598.673.800	1.600	199.171.776	-	4.960.000	180	18.038.196	272	24.668.133	1.148,00	129.186.952	1.600	176.853.281	100	89	7.840	1.775.527.081	82	49	Kab.Karo		
					Operasionalisasi Dharma Wanita Persatuan (DWP)	Dana operasionalisasi Persatuan (DWP)	Orang	5.256	1.200.000.000	3.323	327.563.040	876	61.484.300	-	-	-	-	57	4.010.300	215,00	55.110.000	272	59.120.300	31	96	3.595	386.683.340	68	32	Kab.Karo		
JUMLAH										40.214.782.575		12.144.031.882		2.771.096.533		70.065.428		200.984.513		161.897.863		1.446.159.638		1.879.107.442		70	96	14.023.139.324		63	54	
										Rata - rata capaian kinerja (%)																70	96			63	54	
										Predikat Kinerja																Sedang	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah	
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB										175.291.147.114		5.536.639.643		6.918.650.483		55.826.451		65.840.934		413.666.494		2.147.159.304		2.682.493.183		69	64	5.243.319.113		41	43	DPPKB
1		1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100	1.896.913.249		591.166.625		357.827.258		54.476.284		38.356.726		33.745.898		163.930.344		290.509.252		69	86	878.525.877		71	49	DPPKB	
		1	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Buah	1.750	8.761.500	645	3.150.000												-								DPPKB	

3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan	60	69.990.000	20	8.897.490	12	10.920.000	3	2.173.284	6	1.499.976	8	1.885.898	12,00	2.655.884	12	8.215.042	100	75	32	17.112.532	53	24			DPPKB	
		1	01	01	03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Unit	44	49.410.000													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan dinas operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	23	46.100.000	3	4.010.506	4	6.000.000							3,00	3.897.500	3	3.897.500	75	65	6	7.908.006	26	17			DPPKB	
		1	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang bulan	36	356.952.700	20	105.502.600	12	135.135.000	3	1.545.000	5	1.030.000	8	1.545.000		97.570.000		101.690.000	-	75	20	207.192.600	56	58			DPPKB	
		1	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang bulan	5	70.991.600	2	26.690.000	12	17.307.000	3	2.850.000	5	1.900.000	7	2.850.000	12,00	9.611.160	12	17.211.160	100	99	14	43.901.160	280	62			DPPKB	
		1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	145	76.028.445	50	31.981.327	32	5.923.063			25	5.616.750			25,00	297.000	25	5.913.750	78	100	75	37.895.077	52	50			DPPKB	
		1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jenis	33	30.603.750	7	9.092.400	3	1.387.500	1	1.237.500					1,00	150.000	1	1.387.500	33	100	8	10.479.900	24	34			DPPKB	
		1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Buah	119	5.321.404	8	2.889.000															8	2.889.000	7	54			DPPKB	
		1	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Buah	5	6.372.000	2	1.700.000	1	1.200.000					-		1,00	1.200.000	1	1.200.000	100	100	3	2.900.000	60	46			DPPKB	
		1	01	01	17	Penyediaan Makanan Dan Minuman	Tersedianya Makanan Dan Minuman		225	11.171.250													-			-	-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	01	01	18	Rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang hari kali	434	718.954.600	52	279.353.302	80	69.508.695	12	19.205.500	16	10.000.000		-	25,00	11.928.800	25	41.134.300	31	59	77	320.487.602	18	45			DPPKB	
		1	01	01	19	penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Orang bulan	35	446.256.000	13	117.900.000	8	110.446.000	8	27.465.000	8	18.310.000	8	27.465.000	8,00	36.620.000	8	109.860.000	100	99	21	227.760.000	60	51			DPPKB	
2		1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Saran Dan Prasarana Aparatur		100	4.987.841.020		170.947.900		776.973.688		1.350.167		-		3.472.677		751.179.817		756.002.661	100	69		926.950.561	78	54				
		1	01	02	03	Pembangunan Gedung Kantor	Adanya gedung kantor	Unit	9	2.067.970.600													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	12	02	05	Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	1	1.050.000.000			1	750.000.000							1,00	745.768.000	1	745.768.000	100	99	1	745.768.000	100	71			DPPKB	
		1	01	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	Unit/set	24	290.359.500													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	01	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	-	5	261.441.640													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	01	02	10	Pengadaan Meubeler	Adanya Mebeleur	Unit	153	318.833.250													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	01	02	22	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	41	621.835.000	1	111.325.000															1	111.325.000	2	18			DPPKB	
		1	01	02	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	24	362.085.730	9	59.622.900	4	26.973.688	2	1.350.167		-	3	3.472.677	4,00	5.411.817	4	10.234.661	100	38	13	69.857.561	54	19			DPPKB	
		1	01	02	28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	Unit	9	15.315.300													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB
3		1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparaturn		100	114.130.000		50.000.000	31	20.832.000		-		-		-		20.831.997		20.831.997	100	100		70.831.997	22	79				
		1	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	275	104.130.000	89	40.050.000	31	20.832.000							31,00	20.831.997	31	20.831.997	100	100	120	60.881.997	44	58			DPPKB	
		1	12	15		Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Katu Absensi	Unit	100	10.000.000	1	9.950.000											-		-		1	9.950.000	1	100			DPPKB	
4		1	12	18	05	Program Keluarga Berencana	Meningkatnya Pelayanan Keluarga Berencana		300	164.539.194.095		4.480.756.698		5.757.677.537		-		22.144.208		376.447.919		1.211.217.146		1.609.809.273	75	64		6.090.565.971	47	61			DPPKB	
		1	12	15	07	Pembinaan keluarga berencana	Terbinainya Keluarga Berencana	Keluarga	19	4.467.962.495													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	12	15	08	Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana	Unit	510	5.884.458.000	3	1.418.690.000	3	848.438.000					1	284.550.000	3,00	529.650.000	3	814.200.000	100	96	6	2.232.890.000	1	38			DPPKB	
																						245.100.000				-	-	-	-	-	-		DPPKB	
		1	12	15	09	Penyelenggaraan Bhakti Sosial Terpadu TNI-KB-KES	Terselenggaranya Bhakti Sosial terpadu TNI-KB-KES	Orang Kali	525	246.920.100	150	52.820.000	150	59.851.045									-	-	-	150	52.820.000	29	21			DPPKB		
		1	12	15	10	Penyelenggaraan Hari Keluarga	Terselenggaranya Hari Keluarga	Org Kali	867	389.476.500	650	179.624.700	150										-	-		650	179.624.700	75	46			DPPKB		
		1	12	15	11	Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES	Adanya Pelayanan Terpadu IBI-KB-KES	Orang	385	194.874.200	185	73.346.324	75	23.544.208		75	22.144.208	-	-	-	-	-	-	22.144.208	-	94	185	95.490.532	48	49			DPPKB	
		1	12	15	12	Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES	Adanya Pelayanan Terpadu PKK-KB-KES	Orang	545	211.681.600	70	41.501.600	75	29.973.596							75,00	16.390.346	75	16.390.346	100	55	145	57.891.946	27	27			DPPKB	
		1	12	15	13	Rapat Kerja Daerah Kabupaten	Adanya Rapat Kerja Daerah Kabupaten	Orang	275	170.377.200														-			-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	12	15	14	Pembinaan Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah dan Swasta	Terbinanya Terhadap Petugas Pencatatan Klinik Keluarga Berencana Pemerintah Dan Swasta	Orang	393	101.038.300			120	18.394.688									-	-		-	-	-	-	-	-	-		DPPKB
		1	12	15	15	Sarasehan Pendataan Keluarga	Adanya Pendataan Keluarga	Orang	3	158.392.800													-		-		-	-	-	-	-	-		DPPKB

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		1	12	15	16	Sosialisasi penyusunan laporan kependudukan dan KB	Terlaksananya Sosialisasi Penyusunan Laporan Kependudukan Dan KB	Dokumen	744	186.425.490													-		-	-	-			DPPKB			
		1	12	15	***	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB Melalui Mupen dan Moyan	Adanya Pelayanan KB dengan operasional Moyan Mupen	Orang /Kali	8	269.392.350													-		-	-	-			DPPKB			
		1	12	15	***	Pembuatan Profil Kependudukan dan KB	Adanya Profil Kependudukan dan KB	Dokumen	20	133.961.050													-		-	-	-			DPPKB			
		1	12	15	30	Pembentukan Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan	Terbentuknya Forum Pertemuan Koalisi Kependudukan	Kecamatan	20	113.797.000													-		-	-	-			DPPKB			
		1	12	15	34	Pembinaan Kader Kelompok Tribina	Terbinanya Kader Kelompok Tribina	Kelompok	60	520.282.620	23	1.436.427.600	17										-	-		23	1.436.427.600	38	276	DPPKB			
		1	12	15	35	Penyuluhan Keluarga Sejahtera	Terlaksananya Penyuluhan Keluarga Sejahtera	Kelompok	382	224.470.000			17										-	-		-	-	-			DPPKB		
		1	12	15	***	Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB	Terselenggaranya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Penggerakan KB	Orang	16	150.193.623.890	2	1.026.121.300	17	4.777.476.000			17	91.897.919	17,00	420.076.800	17	511.974.719	100	11	19	1.538.096.019	119	1		DPPKB			
		1	12	15	***	Pembentukan Dan Pembinaan Kampung KB	Terselenggaranya Pembentukan Kampung KB	Kecamatan	83	846.683.000	32	252.225.174	17										-	-		32	252.225.174	39	30		DPPKB		
		1	12	15	***	Pelatihan Dan Penyusunan Laporan Kependudukan berbasis WEB	Terlaksananya Pelatihan penyusunan laporan berbasis WEB	Desa	124	88.012.500													-		-	-	-				DPPKB		
		1	12	15	***	Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD Sub PPKBD)	Terselenggaranya Pemberian Insentif bagi Kader KB (PPKBD dan Sub PPKBD)	Orang	2.490	137.365.000													-		-	-	-				DPPKB		
	5	1	12	16		Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Meningkatnya Program Kesehatan Reproduksi Remaja	orang	100	1.142.538.450		199.425.520		-		-			-				-		-	-	199.425.520	61	27		DPPKB		
		1	12	16	01	Advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR)	Terfasilitasinya Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	Orang	875	391.732.650													-		-	-	-				DPPKB		
		1	12	16	05	Gebyar Genre	Terlaksananya Gebyar Genre	Kecamatan	1.069	750.805.800	652	199.425.520	150										-	-		652	199.425.520	61	27		DPPKB		
	6	1	12	17		Program Pelayanan Kontrasepsi	Meningkatnya Program Pelayanan Kontrasepsi		100	634.000.000		-		-		-	-		-				-		-	-	-	-			DPPKB		
		1	12	17	02	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Adanya Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	Orang	1.150	634.000.000													-		-	-	-	-			DPPKB		
	7	1	12	18		Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri		100	273.460.000							-						-		-	-	-				DPPKB		
		1	12	18	02	Pengelolaan dan pemutakhiran data program KB	Terkelolanya Data Program KB	Dokumen	4	273.460.000													-		-	-	-				DPPKB		
	8	1	12	20		Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR	Meningkatnya Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR		100	579.140.000		44.342.900		5.340.000		-		5.340.000		-			5.340.000	70	100	13	49.682.900	3	18		DPPKB		
		1	12	16	03	Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Terbentuknya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Kelompok	413	278.990.000	6	44.342.900	10	5.340.000		10	5.340.000	10		-	10,00		-	7	5.340.000	70	100	13	49.682.900	3	18		DPPKB
		1	12	20	04	Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja	Terlaksananya Pelatihan Konselor Sebaya bagi Remaja	Orang	900	300.150.000													-		-	-	-				DPPKB		
	9	1	12	21		Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/ AIDS	Meningkatnya Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/ AIDS		100	243.803.300													-		-	-	-	7	14		DPPKB		
		1	12	21	01	Penyuluhan Penanggulangan Narkoba PMS termasuk HIV/ AIDS	Tersebarluaskannya Informasi Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Kec	73	243.803.300	5	34.958.300	17										-	-		5	34.958.300	7	14		DPPKB		
	10	1	12	23		Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya Bahan Pengembangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak		100	413.750.000													-		-	-	-				DPPKB		
		1	12	23	01	Pengumpulan Bahan Informasi tentang pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Tersedianya Bahan Pengembangan Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Orang	510	413.750.000													-		-	-	-				DPPKB		
	11	1	12	24		Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Meningkatnya Pengembangan Model Operasional BKB- Posyandu-PADU		100	248.250.000													-		-	-	-				DPPKB		
		1	12	24	01	Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Terlatihnya Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Masyarakat	Kajian	3	248.250.000													-		-	-	-				DPPKB		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
12	1	19	17		100		218.127.000			-							
	1	19	17														
				</													

					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		2	09	15	Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Meningkatnya Kualitas Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan		3.514.725.301		938.730.152		6.490.000		-		-		-		6.490.000	1	6.490.000	100,00	100,00		945.220.152						
		2	09	15	01	Perencanaan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Terencanakan Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan / Lancarnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	dokumen	5	1.300.000.000	4	658.933.000		-											4	658.933.000	80,00	50,69				
		2	09	15	02	Penyusunan norma, kebijakan, standar dan prosedur bidang perhubungan	Tersusunnya Normar, Kebijakan, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan / Tersedianya Norma, Kebijakan , Standar dan Prosedur Bidang Perhubunagn	dokumen	2	250.000.000	0	-													0	-	0,00	0,00				
		2	09	15	03	Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Terselenggaranya Koordinasi Dalam Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan / Meningkatnya Koordinasi dengan pemangku kepentingan	dokumen	5	50.000.000	0	-													0	-	0,00	0,00				
		2	09	15	04	Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan	Terselenggaran kebijakan di bidang perhubungan / Tersosialisasinya Kebijakan di Bidang Perhubungan	orang	100	100.000.000	0	-													0	-	0,00	0,00				
		2	09	15	xx	Sosialisasi kebijakan,norma standart dan prosedur bidang perhubungan	Terlaksananya Sosialisasi kebijakan,norma standart dan prosedur bidang perhubungan	kali	4	120.000.000	0	-													0	-	0,00	0,00				
		2	09	15	07	Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	Terlaksananya Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat / Meningkatnya Pengelolaan Terminal Angkutan Darat	unit	2	100.000.000	0	-													0	-	0,00	0,00				
		2	09	15	08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terselenggaranya Monitoring , evaluasi dan pelaporan / Tersedianya Data , Pelaporan	dokumen	4	120.000.000	3	28.685.000	1	6.490.000					1,00	6.490.000	1	6.490.000	100,00	100,00	4	35.175.000	100,00	29,31				
		2	09	15	09	Penyusunan Database /LHR	Tersusunnya Database /LHR	dokumen	3	300.000.000	1	71.200.000	0	-											1	71.200.000	33,33	23,73				
		2	09	15	10	Penyusunan Sistem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo	Tersusunnya Sistem Informasi Perhubungan Kabupaten Karo	sistem	2	200.000.000	1	28.380.000		-											1	28.380.000	50,00	14,19				
		2	09	15	12	Penyusunan Studi kelayakan dan DED	Terlaksanya Studi kelayakan dan DED	dokumen	5	774.725.301	1	151.532.152		-											1	151.532.152	20,00	19,56				
		2	09	15	13	Penyusunan dokumen lahan parkir	Tersusunnya dokumen lahan parkir	dokumen	2	200.000.000		-															-					
					Pembangunan Gedung Balai Pengujian	Terbangunnya Gedung Balai Pengujian	unit	1			0	-																				
		2	09	16	Program Rehabilitas Dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		439.567.200																			-		0,00			
		2	09	16	04	Rehabilitasi / Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal / Pelabuhan / Terminal / Pelabuhan Dalam Kadaan Baik	unit	1	189.567.200																	-	0,00	0,00			
		2	09	16	05	Rehabilitasi/ Pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas, pagar pengaman jalan,APILL,LRJU dan halte bus	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan, Rambu - Rambu Lalu Lintas, Pagar Pengaman Jalan , APILL, ARJU dan Halte Bus / Rambu - Rambu Lalu Lintas , Pagar Pengaman Jalan , APILL, ARJU dan Halte Bus dalam Kadaan Baik	jenis	5	200.000.000																	-	0,00	0,00			

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		2	09	16	06	Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Terlaksanya Rehabilitasi/ Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	unit	1	50.000.000																	-	0,00	0,00		
		2	09	17		Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Meningkatnya Pelayanan Angkutan			2.164.484.754	0	1.774.340.614	191.010.000			16.950.000		54.930.000		113.040.000		184.920.000		96,81	0	1.959.260.614			90,52		
		2	09	17	01	Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudi Untuk Keselamatan Penumpang	Terselenggaranya Penyuluhan Bagi Para Supir / Juru Mudik Untuk Keselamatan Penumpang / Meningkatkan Pengetahuan Supir / Juru Mudi Tentang Keselamatan	orang	80	90.000.000	50	69.979.736														50	69.979.736	62,50	77,76		
		2	09	17	02	Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	Terlaksanya Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan	kegiatan	4	40.000.000	1	12.763.700															1	12.763.700	25,00	31,91	
		2	09	17	03	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	Terselenggaranyan Kegiatan Temu Wicara Pengelola Angkutan Umum Guna Meningkatkan Keselamatan Penumpang / Meningkatkan Koordinas dengan Pengelola Angkutan Umum	orang	30	20.000.000	0	-															0	-	0,00	0,00	
		2	09	17	04	Kegiatan Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang	Terselenggaraanya Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselematan Penumpang / Tersedianya Barang Uji Kelayakan Sarana Transportasi Guna Keselamatan Penumpang (KIR)	jenis barang kir	18	300.000.000	18	254.012.500			-												18	254.012.500	100,00	84,67	
		2	09	17	05	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Terselenggaranya Pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya / Meningkatnya Displin Angkutan umum di Jalan Raya	bln	60	624.484.754	36	729.773.021	12	191.010.000	3	16.950.000	5	54.930.000		113.040.000	8	184.920.000	66,67	96,81	44	914.693.021	73,33	146,47			
		2	09	17	06	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Terlaksannya Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	kegiatan	2	5.000.000	0	-															0	-	0,00	0,00	
		2	09	17	07	Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	Terlaksanya Kegiatan Pengawasan peralatan keamanan dalam keadaan darurat dan perlengkapan pertolongan pertama	unit	1	5.000.000	0	-															0	-	0,00	0,00	
		2	09	17	08	Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	Terlaksannya Kegiatan penciptaan disiplin dan pemeliharaan kebersihan di lingkungan terminal	kegiatan	2	5.000.000	0	-															0	-	0,00	0,00	
		2	09	17	10	Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat Dan Murah	Terciptanya Pelayanan Cepat, Tepat dan Murah / Meningkatnya Kualitas pelayanan	jenis	25	400.000.000	20	352.436.777															20	352.436.777	80,00	88,11	
		2	09	17	11	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Terlaksanya Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	Dokumen	2	5.000.000	0	-															0	-	0,00	0,00	
		2	09	17	14	Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas Dan Angkutan	Terselenggaranya Sosialisasi / Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan / Meningkatnya Pengetahuan Pengguna Jalan Tentang Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	orang	100	200.000.000	50	147.744.000															50	147.744.000	50,00	73,87	

2						3						4						5						6		7						8						9						10						11						12						13						14=(9+10+11+12)						15=13/8x100%						16=(7+13)						17=15/6x100%						18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

[illegible]

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18						
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
		2.10	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		483.806.425							0													
				02	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/operasional	unit	12	-	0	-				0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	Dinas Kominfo						
				09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Adanya peralatan gedung kantor	unit	16	84.389.250						0		0,00	0,00	0	-	0,00	Dinas Kominfo						
				24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	12	290.917.175	5	89.956.350	1	-		1,00	8.196.550	100,00	0,00	6	98.152.900	50,00	33,74	Dinas Kominfo					
				26	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya Perengkapan gedung kantor	unit	13	31.500.000	12	15.500.000				0	-	0,00	0,00	12	15.500.000	92,31	49,21	Dinas Kominfo					
				28	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	15	77.000.000		30.030.000				0	-	0,00	0,00	0	30.030.000	0,00	39,00	Dinas Kominfo					
		2.10	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		181.321.470							0													
				01	Pengadaan Kartu/Mesin Absensi	Adanya Kartu/Mesin Absensi	unit		1	9.000.000					0		0,00	0,00			0,00	0,00						
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stell	311	181.321.470	220	88.245.000	45	30.240.000		45,00	29.250.000	45	29.250.000	100,00	96,73	265	117.495.000	85,21	64,80	Dinas Kominfo			
		2.10	01	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas sumber daya Aparatur		152.627.500							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	Dinas Kominfo						
				02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya Sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	310	152.627.500	0	-				0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	Dinas Kominfo						
		2.10	01	15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	Meningkatnya pengembangan komunikasi,informasi dan media massa		1.919.495.944							0													
				02	Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi	tower	58	338.000.000						0		0,00	0,00										
				09	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan Komunikasi	Terpeliharanya alat studio dan Komunikasi	unit	40	229.237.884	0	56.400.000				0	-	0,00	0,00	0	56.400.000	0,00	24,60	Dinas Kominfo					
				10	Penyediaan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Tersedianya Layanan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik	orang	10	194.849.460	10	115.927.700				0	-	0,00	0,00	10	115.927.700	100,00	59,50	Dinas Kominfo					
				24	Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo	Adanya Pembuatan Audio Visual Potensi Regional Kab. Karo	keping	400	97.908.600	300	30.500.000				0	-	0,00	0,00	300	30.500.000	75,00	31,15	Dinas Kominfo					
				33	Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi	Adanya pemeliharaan jaringan	tower	96	1.028.000.000	32	524.877.000				0	-	0,00	0,00	32	524.877.000	33,33	51,06	Dinas Kominfo					
					Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Koordinasi Jaringan Komunikasi Sandi Daerah (Jarkomsanda) Pemerintah Kab. Karo	orang	40	31.500.000	0	-				0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	Dinas Kominfo						
					Pemeliharaan dan pengembangan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	Adanya pemeliharaan Jaringan Teknologi Komunikasi dan Informasi	tower	48	-	48	775.930.000	32	252.778.515	32	151.671.000	29.330.000	71.584.000	32	252.585.000	100,00	99,92	80	1.028.515.000	166,67	0,00	Dinas Kominfo		
					Pengadaan dan Peningkatan Akses Internet	Jumlah Mbps	Mbps	150		150	644.258.620				0	-	0,00	0,00	150	644.258.620	100,00	0,00	Dinas Kominfo					
		2.10	01	17	Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informasi	Meningkatnya SDM bidang komunikasi dan informasi		127.898.793							0	-												
				01	Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	Adanya Pelatihan SDM dlm bidang komunikasi dan Informasi	orang	105	83.904.843	0	-				0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	Dinas Kominfo						
				04	Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	Adanya Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat	orang	150	43.993.950	100	44.845.000				0	-	0,00	0,00	100	44.845.000	66,67	101,93	Dinas Kominfo					
				08	Pelatihan SDM e-government	Adanya Pelatihan SDM e-government	orang	10		10	51.240.000				0	-	0,00	0,00	10	51.240.000	100,00	0,00	Dinas Kominfo					
		2.10	01	18	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Meningkatnya kerjasama informasi dengan Mass Media		1.934.834.396							0													
				01	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	Tersebarluaskannya Informasi Pembangunan Daerah	Jenis	10	989.313.396	10	940.853.500	3	83.758.780	2	4.575.000	1	18.737.000	21.157.500	39.152.000	3	83.621.500	100,00	99,84	13	1.024.475.000	130,00	103,55	Dinas Kominfo
				02	Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	Adanya Pertunjukan Rakyat (Drama) ke Desa-Desa	pertunjukan	55	632.400.000	40	264.600.000	2	15.000.000	2	15.000.000					2	15.000.000	100,00	100,00	42	279.600.000	76,36	44,21	Dinas Kominfo
				03	Pengawasan dan Pengendalian Warnet	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Warnet	warnet	318	313.121.000	250	82.270.000				0	-	0,00	0,00	250	82.270.000	78,62	26,27	Dinas Kominfo					

2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
		2.10	01	19			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		1.242.387.850																0									
				07	Penyediaan e-government	Tersedianya implementasi e-government	aplikasi	3	203.500.000	4	276.326.150												0	-	0,00	0,00	4	276.326.150	133,33	135,79		Dinas Kominfo	
					Pengembangan e-government	Terlaksananya pengembangan e-government	aplikasi	3	736.500.000	3	3.474.543.000	1	98.410.796			1	20.000.000			78.350.000	1	98.350.000	100,00	99,94	4	3.572.893.000	133,33	485,12		Dinas Kominfo			
				08	Implementasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Adanya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	sistem	1	302.387.850	1	136.740.000	0	-										0	-	0,00	0,00	1	136.740.000	100,00	45,22		Dinas Kominfo	
				09	Pengadaan Sistem Keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	Adanya sistem keamanan Jaringan Informasi dan Komunikasi	unit			63	308.050.000	3	51.000.000			3	50.700.000				3	50.700.000	100,00	99,41	66	358.750.000	0,00	0,00		Dinas Kominfo			
		2.10	01	19	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi		915.765.000															0										
					e-Lapor	Adanya sistem e-lapor	sistem	1	915.765.000														0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Dinas Kominfo	
		2.10	01	19	Program Pengembangan Data/Informasi	Meningkatnya Pengembangan Data/Informasi		915.765.000															0										
					Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu	Terlaksananya pengoperasian SIAK secara terpadu	kegiatan	1	915.765.000														0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Dinas Kominfo	
Jumlah								15.376.348.504	13.307.478.635	2.641.543.541	181.742.152	737.379.752	469.403.680	73,00	1.235.916.949	2.624.442.533	15.922.921.168	64,26	53,04														
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																																	
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																																	
Bidang Urusan Penanaman Modal								1.454.517.694,00																									
								826.226.424																									

		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	unit	38	500.000.000	2	105.034.840	0	0	0	0	0	-	0	-	1,00	38.417.400	1	38.417.400	0	0	3	143.452.240	8	29	DPM PPTSP
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	1	310.000.000	1	9.981.200	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	1	9.981.200	100	3	DPM PPTSP
					Program peningkatan disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			206.770.500												54.336.000							0	0	
					Pengadaan Mesin/Kartu Adanya Mesin/Kartu Atel	Adanya Mesin/Kartu Atel	unit	1	15.000.000	1	9.800.000	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	9.800.000	100	65	DPM PPTSP
					Pengadaan pakaian dinas Adanya Pakaian Dinas Atel	Adanya Pakaian Dinas Atel	stel	270	110.770.500	162	74.750.000	-	0	0	0	0	-	0	-	49,00	54.336.000	49	54.336.000	0	0	211	129.086.000	78	117	DPM PPTSP
					Pengadaan Pakaian Khusus Adanya Pakaian Khusus Atel	Adanya Pakaian Khusus Atel	stel	180	81.000.000	86	42.180.000	-	0	0	0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	86	42.180.000	48	52	DPM PPTSP
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur			430.102.000												-							0	0	
					Pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis aparatur	orang kali	55	430.102.000	34	214.831.622	10	60.000.001		0	0	-	0	-	-	-	0	-	0	0	34	214.831.622	62	50	DPM PPTSP
					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya Promosi dan Kerjasama Investasi			3.295.640.500												-							0	0	
					Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Terlaksananya koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	kali	6	900.000.000	3	156.912.264	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	0	-	0	0	3	156.912.264	50	17	DPM PPTSP
					Penyelenggaraan Pameran Investasi	Terlaksananya Pameran Investasi	kali	12	900.640.500	5	239.667.519	1	46.735.085	0	0		0	-	-	-	-	0	-	0	0	5	239.667.519	42	27	DPM PPTSP
					Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Terlaksananya Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	kali	60	1.000.000.000	24	470.827.943	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	24	470.827.943	40	47	DPM PPTSP
					Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan, Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha	kali	2	150.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	DPM PPTSP
					Pembinaan dan Pengawasan FMA/PMDN di Kabupaten Karo	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan FMA/PMDN di Kabupaten Karo	kali	4	345.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	DPM PPTSP
					Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Iklim Investasi dan Realisasi Investasi			4.787.365.800		0										-							0	0	
					Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	Tersusunnya Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal	dokumen	2	2.462.365.800	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	DPM PPTSP
					Penyusunan Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Tersusunnya Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	sistem	4	800.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	DPM PPTSP
					Koordinasi Pengendalian Perizinan	Terlaksananya Koordinasi Pengendalian Perizinan	kali	2	200.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	DPM PPTSP
					Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Sistem Informasi Penanaman Modal di Daerah	kali	4	325.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	DPM PPTSP
					Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal	dokumen	2	1.000.000.000	1	146.740.000	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	1	146.740.000	50	15	DPM PPTSP
					Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah	Meningkatnya Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah			3.386.650.000												266.187.000							0	0	DPM PPTSP
					Penyusunan Data base pelayanan perijinan	Tersusunnya Data base pelayanan perijinan	data base	4	600.000.000	1	75.000.000	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	1	75.000.000	25	13	DPM PPTSP
					Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pelayanan Perizinan Secara On-Line	sistem	5	600.000.000	3	937.500.729	1	100.000.000	0	0	0	0	-	-	1,00	99.064.000	1	99.064.000	1	1	4	1.036.564.729	80	173	DPM PPTSP
					Pemetaan Data Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten Karo	Tersedianya data potensi dan peluang investasi Kabupaten Karo	dokumen	3	300.000.000	0	-	1	295.000.000	0	0	0	0	0	-	1,00	167.123.000	1	167.123.000	0	0	1	167.123.000	33	56	DPM PPTSP
					Penyusunan Standar Kebijakan Pelayanan Perizinan	Tersusunnya Standar Pelayanan Perizinan	dokumen	6	600.000.000	3	83.007.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	3	83.007.000	50	14	DPM PPTSP
					Penyusunan Statistik Investasi Daerah	Tersusunnya Statistik Investasi Daerah	dokumen	3	586.650.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	DPM PPTSP
					Penyusunan Data base Potensi Investasi Kab. Karo	Tersusunnya Data base Potensi Investasi Kab. Karo	dokumen	4	700.000.000	2	98.615.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	0	2	98.615.000	50	14	DPM PPTSP

2				3				4				5				6		7				8				9				10				11				12				13				14=(9+10+11+12)				15=13/8x100%				16=(7+13)				17=15/6x100%				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

1	2	3				4		5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah		85	10.397.000	-	4.610.000	12	3.500.000	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	0	3.000.000	-	86	0	7.610.000	0,0	73,2	Diapora
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kerja	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kerja di lapangan bola samura	unit		25	33.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Penyediaan jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan perlengkapan dan peralatan kerja	unit		25	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	Tersedianya pemeliharaan perbaikan peralatan kerja	unit		25	27.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan luar daerah	Terselenggaranya perjalanan daerah di dalam dan luar daerah	org/hr/kl		60	888.900.000	12	540.489.203	12	147.208.750	6	2.130.000	-	26.854.497	-	5.201.400	-	45.026.000	6	79.211.897	50	54	18	619.701.100	30,0	69,7	Diapora
						Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	org/bln		37	474.600.000	5	189.300.000	12	91.233.580	6	15.180.000	6	25.300.000		18.975.000		31.425.000	12	90.880.000	100	100	17	280.180.000	45,9	59,0	Diapora
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kualitas Sarana dan Prasarana Aparatur			174	9.953.479.700	5	-	4	147.051.000	-	-	-	-	-	-	3,00	111.122.250	3	111.122.250							Diapora
						Pembangunan gedung kantor	Tersedianya gedung kantor	unit		5	6.892.928.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya rutin/berkala gedung kantor	unit		35	257.523.000	-	-	1	55.000.000	-	-	-	-	-	-	-	54.566.000	0	54.566.000	-	-	0	54.566.000	0,0	21,2	Diapora
						Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit		35	116.985.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	# VALUE!	2,9	# VALUE!	Diapora
						Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	unit		35	185.291.000	3	-	3	92.051.000	-	-	-	-	-	-	3,00	56.556.250	3	56.556.250	-	-	6	56.556.250	17,1	30,5	Diapora
						Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya transportasi kendaraan roda empat/dua	unit		9	1.474.625.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	11,1	0,0	Diapora
						Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit		8	117.456.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	unit		20	171.373.374	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebeleur kantor	unit		22	242.297.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Pemeliharaan rutin/berkala gedung olahraga beserta lapangan	Terpeliharanya gedung olahraga beserta lapangan	unit		5	495.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya			452	332.358.200	-	108.823.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Diapora
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel		224	130.406.700	-	59.433.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	# DIV/0!	# DIV/0!	0	59.433.000	0,0	45,6	Diapora
						Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	stel		224	139.351.500	-	49.390.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	# DIV/0!	# DIV/0!	0	49.390.000	0,0	35,4	Diapora
						Pengadaan mesin absensi pegawai	Tersedianya mesin absensi pegawai	unit		4	62.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Program Pengembangan dan Koverasian Kebijakan Pemuda	Terwujudnya Koverasian Kebijakan Kepemudaan			457	7.745.363.226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						Diapora
						Pendataan Potensi Kepemudaan	Tersedianya buku potensi kepemudaan	dokumen		4	684.087.813	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemuda	Terpantaunya pelaksanaan pembangunan kepemudaan di Kab. Karo	17 kee		4	709.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Penelitian dan Pengkajian kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan	Penelitian dan Pengkajian kebijakan-kebijakan Pembangunan Kepemudaan	dokumen		4	709.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth	Terlaksananya Pengembangan sistem informasi manajemen kepemudaan berbasis E-Youth	dokumen		4	709.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora
						Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Terlaksananya kegiatan peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepemudaan	org/kl		400	709.187.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora

3					4	5	6	7		8		9		10		11	12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda	Terusunnya Penyusunan Pedoman Komunikasi, Informasi, Edukasi, dan Advokasi tentang Kepemimpinan pemuda	dokumen	4	596.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Penyusunan Rancangan Pola Kemitraan Antar Pemuda dan Masyarakat	Terlaksananya design rancangan pola kemitraan pemuda dan masyarakat	bh	5	841.455.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	Terlaksananya Perluasan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Bidang Kepemudaan	dokumen	4	1.208.125.100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Perumusan Kebijakan Kewirausahaan bagi Pemuda	Terperincinya sistem kebijakan kewirausahaan pemuda	dokumen	4	800.703.125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	kali/thn	12	504.492.188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Penyusunan profil kepemudaan dan olahraga	Adanya profil Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Karo	dokumen	12	273.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya keikutsertaan pemuda dalam pembangunan		15.975	12.489.909.738	1.273	2.252.003.453	750	297.830.000	-	-	-	-	-	-	-	750,00	288.196.000	750	288.196.000						Dispora	
					Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan	OKP	185	1.342.365.273	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	37	-	20,0	0,0	Dispora	
					Seleksi dan Pembinaan Peserta Paskibraka	Terpilihnya Anggota Paskibraka Tk. Nasional/Provinsi dan Kabupaten	ORG	360	3.942.565.903	72	1.667.284.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	72	1.667.284.953	20,0	42,3	Dispora	
					Fasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan	Terpilihnya peserta BPAP utusan Kab. Karo	org	11510	688.307.500	10	-	250	81.500.000	-	-	-	-	-	-	-	250,00	80.176.000	250	80.176.000	100	-	260	-	2,3	0,0	Dispora
					Fasilitasi Pekan Temu Wicara Organisasi Pemuda	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	org	400	323.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	Terlaksananya penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba Dikalangan Generasi Muda	org	2100	922.863.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Dispora	
					Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	Adanya Lomba Kreasi dan Karya Tulis Ilmiah Dikalangan Pemuda	org	400	936.914.063	100	173.202.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	100	173.202.000	25,0	18,5	Dispora	
					Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	org	202	489.682.000	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	50	-	24,8	0,0	Dispora	
					Pameran Prestasi Hasil karya Pemuda	Adanya pameran prestasi hasil karya pemuda	org	400	684.000.000	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	200	-	50,0	0,0	Dispora	
					Pembuatan buletin olahraga	Adanya buletin olahraga Kab. Karo	bh	400	443.850.000	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	800	-	200,0	0,0	Dispora	
					Pengembangan wawasan kepemudaan	Terlaksananya pengembangan wawasan kepemudaan	kl	6	1.091.762.000	3	128.316.500	500	216.330.000	-	-	-	-	-	-	-	500,00	208.020.000	500	208.020.000	100	96	503	336.336.500	8383,3	30,8	Dispora
					Pentas seni pemuda	Terlaksananya pentas seni pemuda	kl	6	870.187.500	1	172.092.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	172.092.000	16,7	19,8	Dispora	
					Pemerksa Kabupaten/ Kota Layak Pemuda	Terlaksananya Pemerksa Kabupaten/Kota Layak Pemuda	KL	6	754.162.500	-	111.108.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	111.108.000	0,0	14,7	Dispora	
					Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Meningkatnya Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		475	1.634.585.500	50	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-								Dispora
					Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda	Terlaksananya kewirausahaan bagi pemuda	orang	475	1.634.585.500	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	50	-	10,5	0,0	Dispora	
					Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Tersosialisasinya program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba		2.500	1.153.056.550	100	42.430.000	500	140.032.300	-	-	-	-	-	-	-	500,00	138.800.000	500	138.800.000						Dispora	
					Pemberian penyuluhan terhadap bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo	Terlaksananya penyuluhan bahaya Narkoba bagi pemuda di 17 kecamatan di Kab. Karo	org/kl/17 kec	2500	1.153.056.550	100	42.430.000	500	140.032.300	-	-	-	-	-	-	-	500,00	138.800.000	500	138.800.000	-	99	600	181.230.000	24,0	15,7	Dispora
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga		350	22.539.430.344	529	3.666.125.064	10	796.000.000	-	-	-	-	-	-	-	10,00	792.256.000	10	792.256.000						Dispora	
					Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	Terlaksananya peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga	unit	4	5.602.465.670	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	16	-	400,0	0,0	Dispora	

2					3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
						Peningkatan pembangunan sarana dan prasnara olahraga tingkat kecamatan	Tersedianya sarana dan prasarana olahraga di 17 kecamatan	unit	80	5.901.955.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpantaunya pembangunan sarana dan prasarana olahraga	org/kl	68	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Revitalisasi stadion olahraga samura Kab. Karo	Tersedianya Stadion Olahraga di Kab. Karo	unit	5	2.300.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	-	-	20,0	0,0	Dispora
						Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terlaksananya kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan Iptek dalam Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga	unit	5	2.177.489.914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya kegiatan Monev se kab. Karo	org	89	292.105.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kab. Karo	unit	5	2.970.246.591	1	1.939.801.500	10	796.000.000	-	-	-	-	-	-	10,00	792.256.000	10	792.256.000	100	100	11	2.732.057.500	220,0	92,0	Dispora	
						Pengadaan alat olahraga	Tersedianya alat-alat olahraga di kecamatan	bh	89	802.615.000	510	193.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	510	193.300.000	573,0	24,1	Dispora	
						Pengadaan Gedung Gelanggang Olahraga	Adanya gedung gelanggang olahraga	unit	5	2.292.553.169	1	1.533.023.564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	1	1.533.023.564	20,0	66,9	Dispora	
						Program Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Permayarakatan Olahraga		46.794	28.133.789.624	1.953	4.206.761.414	447	100.560.000	-	-	-	-	-	-	100,00	22.600.000	100	22.600.000							Dispora	
						Pembibitan dan Pembinaan olahragawan berbakat	Adanya olahragawan berbakat	org	218,00%	1.372.078.250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Pembinaan/Cabang olahraga prestasi di tingkat daerah (yang berkembang di masyarakat exp. Atletik, Catur, Beladiri, Wushu, Gulat, Karateka, Taekwondo, Pencak Silat)	Terbinanya Cabor Prestasi Tingkat Daerah	Jenis	17	1.840.657.055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat)	Terlaksananya kegiatan Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (Olahraga yang berkembang di masyarakat : senam, Volly, Futsal, Hockey, basket, Engkrang, Motocross)	org	29000	1.392.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Penyelenggaraan kompetisi olahraga	Terselenggaranya kompetisi olahraga	org	9800	3.471.537.630	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	266	-	-	2,7	0,0	Dispora
						Permasalahan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat	Terselenggaranya senam massal di Kab. Karo	org	4000	2.473.476.000	-	-	347	77.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	Adanya penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi	org	1385	3.017.741.000	319	1.211.387.700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	319	1.211.387.700	23,0	40,1	Dispora	
						Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	Terlaksananya Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK olahraga sebagai pendorong peningkatan prestasi olahraga	jenis	4	1.400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	Terlaksananya Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat	org	400	2.413.713.488	783	645.742.127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	783	645.742.127	195,8	26,8	Dispora	
						Pengembangan olahraga rekreasi	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi	unit/ bh	2	2.167.936.000	360	509.641.200	100	22.600.000	-	-	-	-	-	-	100,00	22.600.000	100	22.600.000	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga	Terlaksananya Peningkatan jaminan kesejahteraan bagi masa depan atlet, pelatih dan teknisi olahraga	org	140	2.232.550.626	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	Terlaksananya Peningkatan jumlah dan kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi, dan teknisi olahraga	org	400	900.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora
						Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	cabor	12	1.287.130.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	0,0	0,0	Dispora

2					3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
														K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
										Peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen organisasi olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah	org	940	1.217.128.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora				
										Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan event-event olahraga di dalam dan di luar daerah (Kab/Prov/Nasional/Internasional)	Terselenggaranya event-event olahraga di dalam dan di luar daerah	org	680	2.097.541.075	225	1.839.990.387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	# DIV/0!	-	225	1.839.990.387	33,1	87,7	Diapora					
										Pendataan dan Pembuatan Sinopsis Olahraga Tradisional	Adanya Sinopsis Olahraga Tradisional Kab. Karo	cabor	12	850.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora					
										Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga	Meningkatnya kebijakan dan manajemen olahraga		1.316	4.022.966.870	17		30	50.431.500	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	49.915.800	30	49.915.800						Diapora					
										Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Organisasi dan Tenaga Keolahragaan	org	50000%	2.053.773.670	-	-	30	50.431.500	-	-	-	-	-	-	-	-	30,00	49.915.800	30	49.915.800	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora				
										Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	Terlaksananya Pengembangan perencanaan olahraga terpadu	org	200	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora					
										Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	Terlaksananya kegiatan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan olahraga	kali	68	450.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora					
										Pembinaan manajemen organisasi olahraga	Terlaksananya Pembinaan manajemen organisasi olahraga	jenis	400	474.193.200	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	17	-	4,3	0,0	Diapora					
										Pengkajian kebijakan-pembangunan olahraga	Terlaksananya kegiatan Pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan olahraga	dokumen	68	280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora					
										Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan	Lap	80	315.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0,0	0,0	Diapora					
JUMLAH														71.714	91.572.594.320	4.530	11.754.151.094	1.903	2.088.885.613	18	41.480.000	14	92.104.497	8	34.566.400	1.458,00	1.662.412.850	1.498	1.830.563.747	79	88	6,028	13.584.714.841	8,4	14,8	Diapora					
Rata - rata capaian kinerja (%)																														78,72	87,63			8,41	14,83	Diapora					
Predikat Kinerja																															Tinggi	Tinggi					Sangat Rendah	Sangat Rendah	Diapora		
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA																			-	17.183.335.000	-	-	-	-	-	-	-	7.224.139.197	-	6.255.044.047	-	-	-	-	6.255.044.047	-	-	4	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
										Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran			8.040.180.799																							Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	lembar	3.900	17.700.000	100	1.200.000													-	-		100	1.200.000	3	7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	96	1.099.933.600	10	148.103.487	12	38.194.000	3	8.709.140	3	8.709.140	3	19.216.430		13.783.670	9	50.418.380	1	1	19	198.521.867	20	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
										Penyediaan Jasa pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	48.000	26.340.000	6	15.200.000	6	14.390.000										-	-	0	0	6	15.200.000	0	58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	38	41.411.000	-	-												-	-	-	-	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
										Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	48	816.930.000	20	214.809.000	8	33.967.000										-	141.570.000	0	4	20	356.379.000	42	44	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
										Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	30	287.718.000	5	122.480.000	5	17.000.000	3	7.290.000	3	7.290.000	3	145.800.000		13.365.000	9	173.745.000	2	10	14	296.225.000	47	103	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
										Perbaikan Jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	64	29.540.000	43	4.992.000	10	2.500.000										1	3.700.000		3	44	11.792.000	69	40	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
										Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	222	109.376.650	73	92.353.180	48	46.787.000										10	9.990.245		9.999.530	10	19.989.775	0	0	83	112.342.955	37	103	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
										Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis	42	1.235.119.500	17	197.394.442	2	45.783.000										1	13.698.250		32.754.770	1	46.453.020	1	1	18	243.847.462	43	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	72	20.453.600	14	15.775.960	7	5.500.000										7	5.480.210		-	7	5.480.210	1	1	21	21.256.170	29	104	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

3					4	5	6	K	7 Rp.	K	8 Rp.	K	9 Rp.	K	10 Rp.	K	11 Rp.	K	12 Rp.	K	13 Rp.	14=(9+10+11+12) Rp		15=13/8x100%		16=(7+13) Rp		17=15/6x100%		18
					Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	jenis	8	113.000.000	3	15.183.800	3	14.390.000					7	35.450.000		463.029.262	7	498.479.262	2	35	10	513.663.062	125	455	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	unit	144	37.869.000	39	22.956.872	26	3.960.000					27	5.005.322		-	27	5.005.322	1	1	66	27.962.194	46	74	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	27	33.300.000	4	11.980.000	2	7.000.000								-	-	0	0	4	11.980.000	15	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang	252	1.768.985.449	44	557.845.502	40	400.000.000			25	87.869.032	6	12.013.400		100.032.918	31	199.915.350	1	0	75	757.760.852	30	43	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang	226	2.007.504.000	72	2.858.180.000	48	728.640.000	42	106.990.000	42	138.615.000	42	182.355.000		191.460.000	126	619.420.000	3	1	198	3.477.600.000	88	173	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyediaan Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan	Tersedianya Jasa Sewa Gedung Dan Kendaraan	unit	6	300.000.000	2	219.187.575	1	55.000.000			1	45.456.125				-	1	45.456.125	1	1	3	264.643.700	50	88	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Penyediaan jasa konsultansi perencanaan dan pengawasan	Tersedianya Jasa konsultansi perencanaan gedung kantor	paket	1	95.000.000	1	95.000.000										-	-			1	95.000.000	100	100	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				851.727.472	-	-									35.094.328	-	35.094.328			-	35.094.328		4	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pembangunan Gedung Kantor	adanya gedung kantor	unit	1	1.000.000.000				2.065.000.000									-	-					0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Perngadaan perlengkapan gedung kantor	tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	1	120.000.000	5	22.099.800										-	-			5	22.099.800	500	18	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pengadaan mebeleur	adanya meubeler	unit	5	123.337.592	-	-	3	150.000.000								-	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pengadaan peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	unit	3	300.000.000	7	58.536.000										-	-			7	58.536.000	233	20	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	terpeliharanya rutin/berkala gedung kantor	unit	1	30.000.000	1	29.775.000										-	-			1	29.775.000	100	99	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	30	278.389.880	1	10.920.000									35.094.328	-	35.094.328			1	46.014.328	3	17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			305.255.000											24.860.000	-	24.860.000			-	24.860.000			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	adanya pakaiandinas beserta perlengkapannya	stell	363	176.250.000	111	86.223.250	55	24.750.000							24.860.000	-	24.860.000	0	1	111	111.083.250	31	63	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pengadaan Pakaian Kera Lapangan	adanya pakaian kerja lapangan	stell	80	67.005.000	16	6.674.400										-	-			16	6.674.400	20	10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	stell	99	62.000.000	55	22.550.000										-	-			55	22.550.000	56	36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Program Pengembangan Nilai Budaya	Meningkatnya Pengembangan Nilai Budaya			305.255.000	-	-										-	-	-	-	-	-			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pelestarian Dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Terlaksananya pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	jenis	6	305.255.000	2	272.988.240	1	171.700.000									-	-	0	0	2	272.988.240	33	89	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya			1.711.030.678	-	-									155.269.181	-	155.269.181			-	155.269.181			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Penampilan Kesenian Karo	Adanya Penampilan Kesenian Karo	kali	132	550.030.678	21	678.951.584	20	220.000.000			2	20.290.570	1	5.602.000		6.732.076	3	32.624.646	0	0	24	711.576.230	18	129	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
					Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo	Adanya Pelatihan Tari Dan Perkolong-Kolong Karo	orang	200	75.000.000	65	495.142.878	50	179.000.000								-	-	0	0	65	495.142.878	33	660	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	Adanya Pelatihan Perangkat Kesenian Karo	ORANG	120	331.000.000	32	150.490.888	30	110.000.000							148.537.105		148.537.105	0	1	32	299.027.993	27	90	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
					Penyusunan Dokumen sejarah dan Purbakala	tersusunnya dokumen sejarah dan purbakala	dokumen	2	155.000.000	-	-										-	-			-	-	0	0	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	

3						4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18				
1	2	3	4	5	6	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal	terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah	orang	120	300.000.000		50	60.000.000				-	-	0	0	0	0			
					Penyuluhan Budaya Karo	Terlaksananya penyuluhan budaya Karo	kegiatan	4	300.000.000	-	-					-	-		-	0	0			
					Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata			37.398.051.443	-	-					294.120.000	-	294.120.000		-	294.120.000			
					Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	Terlaksananya Promosi Pariwisata Nusantara Di Dalam Dan Di Luar Negeri	kali	5	8.447.826.300	1	62.283.800	1	100.000.000			-	-	0	0	1	62.283.800	20	1	
					Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Pemasaran Pariwisata	jumlah org	otang	2	99.000.000	1	30.610.000					-	-		1	30.610.000	50	31		
					Penyelenggaraan Pesta Budaya Mejuah-Juah	Terselenggaranya Pesta Budaya Mejuah-Juah	kali	6	9.346.772.800	1	500.000.000					-	-		1	500.000.000	17	5		
					Penyelenggaraan Festival Bunga Dan Buah	Terselenggaranya Pesta Pesona Bunga Dan Buah	kali	6	11.084.452.343	2	3.272.549.896	1	600.000.000			-	-	0	0	2	3.272.549.896	33	30	
					Penyelenggaraan Even Wisata Daerah	Terselenggaranya event wisata daerah	even	4	1.875.000.000	1	847.306.900	1	300.000.000			53.120.000	-	53.120.000	0	0	1	900.426.900	25	48
					Pelaksanaan promosi pariwisata pada festival Danau Toba	Terlaksananya promosi pada FDT	kali	6	1.480.000.000	2	1.034.458.000	1	150.000.000			-	-	0	0	2	1.034.458.000	33	70	
					Pelaksanaan Promosi Pariwisata Pada PRSU	terlaksananya promosi pariwisata	kali	1	1.800.000.000	2	1.736.648.141	1	150.000.000	1	242.161.334	-	1	242.161.334	1	2	3	1.978.809.475	300	110
					Penyediaan media promosi kab.karo	tersedianya media promosi kab.karo	jenis	16	3.265.000.000	-	124.567.300	2	250.000.000			241.000.000	-	241.000.000	0	1	-	365.567.300	0	11
					Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Destinasi Pariwisata			93.852.865.868	-	-					4.367.555.291	-	4.367.555.291		-	4.367.555.291			
					Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan	tertatanya destinasi pariwisata unggulan	objek	14	71.284.304.174	5	12.683.034.660	2	10.592.360.000			4.316.347.000	-	4.316.347.000	0	0	5	16.999.381.660	36	24
					Pembuatan ruang ganti/dan atau Toilet	adanya ruang ganti/dan atau toilet	unit	2	600.000.000	-	-					-	-		-	-	0	0		
					Pemasangan Lampu Taman	adanya lampu taman	unit	20	1.000.000.000	-	-					-	-		-	-	0	0		
					Pembangunan Kios Cendera Mata	adanya kios cendera mata	unit	10	1.000.000.000	12	3.132.000.000					-	-		12	3.132.000.000	120	313		
					Pembangunan Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	adanya Plaza Pusat Jajanan/Kuliner	unit	12	1.200.000.000	12	3.968.419.600					-	-		12	3.968.419.600	100	331		
					Pembangunan Toilet	adanya toilet	unit	2	600.000.000	2	1.100.004.934					-	-		2	1.100.004.934	100	183		
					Pembangunan Tempat Ibadah	adanya tempat ibadah	unit	2	1.000.000.000	-	-					-	-		-	-	0	0		
					Penataan lansekap	adanya penataan lansekap	paket	1	2.000.000.000	-	-					-	-		-	-	0	0		
					Pengadaan Papan Petunjuk	adanya papan petunjuk	paket	1	1.000.000.000	1	198.000.000					-	-		1	198.000.000	100	20		
					Pembangunan tempat parkir	adanya tempat parkir	unit	5.000	6.000.000.000	-	-					-	-		-	-	0	0		
					Pembangunan Menara Pandang	adanya menara pandang	unit	1	1.000.000.000	-	-					-	-		-	-	0	0		
					Pemeliharaan Obyek Wisata Alam	Terpeliharanya objek wisata alam	objek	10	4.395.000.000	3	177.414.000	4	177.414.000			-	-	0	0	3	177.414.000	30	4	

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
					Sosialisasi Sadar Wisata	Terlaksananya sosialisasi sadar wisata	orang	600	300	671.463.931	200	150.000.000				51.208.291	-	51.208.291	0	0	300	722.672.222	50	34	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
					Pengembangan desa wisata berbasis budaya	terlaksananya Pengembangan desa wisata berbasis budaya	dokmen	2	2	673.561.694	200.000.000					-	-			2	200.000.000	100	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
					Program Pengembangan Kemitraan	Meningkatnya Pengembangan Kemitraan		17.178.515.000	-	-						1.378.145.247	-	1.378.145.247			-	1.378.145.247			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata						
					Pengembangan SDM dan profesionalisme d bidang pariwisata	Terlaksananya pengembangan sdm dan profesionalisme di bidang pariwisata	orang	600	401	2.107.346.085	200	180.000.000		1	85.155.250		409.661.150	1	494.816.400	0	3	402	2.602.162.485	67	21	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata					
					Fasilitasi Pembentukan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya	Terbentuknya Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata Dan Budaya	rakor	49	1	2.580.125.000	39.883.379							-		1	39.883.379	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata							
					Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Kemitraan Pariwisata	Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata	rakor	11	6	2.200.000.000	96.716.800	5	140.000.000		1	25.600.000		968.484.097	1	994.084.097	0	7	7	1.090.800.897	64	50	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata				
					DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN			36.865		44.507.967.000	26.511	5.540.451.606	497	663.318.449	57	70.560.000	106	141.580.554	42	56.301.034	254,00	356.505.507	459	624.947.095	92	94	26.970	6.165.398.701	73	14	Dinas Kearsipan
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		6.525		4.292.567.000	12.548	1.880.736.301	450	564.929.677	57	70.560.000	104	114.982.554	42	56.301.034	212,00	285.563.757	415	527.407.345	92	93	12963	2.408.143.646	199	56	Dinas Kearsipan
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1.200		14.600.000	790	3.150.000		-	-	-				0	-	0	0	790	3.150.000	66	22	Dinas Kearsipan			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60		354.900.000	36	102.786.296	12	62.674.730	-		6	18.907.030	3	9.981.034	3,00	18.318.252	12	47.206.316	100	75	48	149.992.612	80	42	Dinas Kearsipan
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas / Operasional	unit	25		9.860.000	10	5.990.083	5	5.000.000	-		-		5,00	4.799.000	5	4.799.000	100	96	15	10.789.083	60	109	Dinas Kearsipan		
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	129		424.000.000	121	128.410.000	12	66.839.996	-		-		12,00	66.744.000	12	66.744.000	100	100	133	195.154.000	103	46	Dinas Kearsipan		
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60		72.000.000	25	37.380.000	12	14.687.638	-		6	7.290.000	1	1.215.000	5,00	4.860.000	12	13.365.000	100	91	37	50.745.000	62	70	Dinas Kearsipan
					Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor	unit	100		213.327.000	39	12.760.000	16	-	-	-				0	-	0	0	39	12.760.000	39	6	Dinas Kearsipan			
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	358		223.500.000	172	119.552.300	46	33.826.534	-		14	9.390.000	14	9.390.000	17,00	5.656.300	45	24.436.300	98	72	217	143.988.600	61	64	Dinas Kearsipan
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	28		33.140.000	4	10.576.900	2	4.528.872	-		1	932.000		1,00	3.553.000	2	4.485.000	100	99	6	15.061.900	21	45	Dinas Kearsipan	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	buah	30		662.000.000	56	370.670.000		-	-	-				0	-	0	0	56	370.670.000	187	56	Dinas Kearsipan			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	unit	25		209.600.000	-	52.200.000	1	30.422.007	-		-		1,00	23.687.005	1	23.687.005	100	78	1	75.887.005	4	36	Dinas Kearsipan		
					Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	unit	10		159.000.000	35	6.369.425		-	-	-				0	-	0	0	35	6.369.425	350	4	Dinas Kearsipan			
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	50		52.640.000	9.082	13.861.000	4	4.640.000	-		-		4,00	4.194.000	4	4.194.000	100	90	9086	18.055.000	18172	34	Dinas Kearsipan		
					Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat	kotak	1.600		84.000.000	-	-		-	-	-				0	-	# DIV/0!	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan			
					Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedinasan	orang kali hari	1.450		1.015.000.000	1.324	427.659.897	124	48.000.000	-		20	11.998.524	5	8.100.000	84,00	27.240.000	109	47.338.524	88	99	1433	474.998.421	99	47	Dinas Kearsipan
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	orang bulan	1.400		765.000.000	854	589.370.400	216	294.309.900	57	70.560.000	57	66.465.000	19	27.615.000	80,00	126.512.200	213	291.152.200	99	99	1067	880.522.600	76	115	Dinas Kearsipan
										-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan			
					Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		1.153		5.617.000.000	53	1.355.037.920	5	76.353.772	-	-	2	26.598.000	-	3,00	48.906.750	5	75.504.750	100	99	58	1.430.542.670	5	25	Dinas Kearsipan	
					Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	11		2.685.000.000	6	945.670.020		-	-					0	-	# DIV/0!	0	6	945.670.020	55	35	Dinas Kearsipan			
					Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	Unit	307		652.000.000	35	216.797.000		-	-	-				0	-	# DIV/0!	0	35	216.797.000	11	33	Dinas Kearsipan			
					Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	4		650.000.000	-	-		-	-					0	-	# DIV/0!	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan			
					Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas	Terpeliharanya Kendaraan dinas/ Operasional	unit	27		570.000.000	12	192.570.900	5	76.353.772	-	-	2	26.598.000		3,00	48.906.750	5	75.504.750	100	99	17	268.075.650	63	47	Dinas Kearsipan	

1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Rehabilitasi Sedang berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor	unit	4	370.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Tembok /Pagar	Tersedianya Tembok /Pagar	meter	800	690.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		375	216.400.000	164	94.425.000	42	22.035.000	-	-	-	-	-	-	39,00	22.035.000	39	22.035.000	93	100	203	116.460.000	54	54	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Mesin /Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Akartu Absensi	unit	3	30.000.000	1	9.000.000			-	-							0	-	0	0	1	9.000.000	33	30	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	Stel	186	93.200.000	101	53.730.000	42	22.035.000	-	-					39,00	22.035.000	39	22.035.000	93	100	140	75.765.000	75	81	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	Stel	186	93.200.000	62	31.695.000			-	-							0	-	0	0	62	31.695.000	33	34	Dinas Kearsipan
										-	-											0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.200	1.265.000.000	268	119.654.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	268	119.654.000	22	9	Dinas Kearsipan
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	orang	750	845.000.000	268	119.654.000			-	-							0	-	0	0	268	119.654.000	36	14	Dinas Kearsipan
					Sosialisasi Peraturan Perundang -undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang undangan	orang	450	420.000.000	-	-	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		14.657	7.035.000.000	9.031	955.598.107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	9031	955.598.107	62	14	Dinas Kearsipan
					Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	Terlaksananya Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar	orang	200	100.000.000	-	-	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pengembangan Minat dan budaya baca	Terlaksananya Pengembangan Minat Budaya Baca	orang	200	100.000.000	-	-	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat	Terlaksananya Supervisi Pembinaan dan Stimulasi pada perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah	perpustakaan	100	50.000.000	-	-	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Penyediaan Bantuan Pengembangan dan Minat Baca di Daerah	Tersedianya Bantuan Pengembangan Minat Baca di Daerah	buku	1.500	770.000.000	-	-			-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Penyediaan bahan pustaka Perpustakaan Umum Daerah	Tersedianya Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	buku		965.000.000	6.987	395.813.465			-	-							0	-	0	0	6987	395.813.465	0	41	Dinas Kearsipan
					Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	orang	200	450.000.000	140	104.705.150	-	-	-	-							0	-	0	0	140	104.705.150	70	23	Dinas Kearsipan
					Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Perpustakaan	orang kali hari	260	735.000.000	-	-	-	-	-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Publikasi dan Promosi Perpustakaan	Terlaksananya Publikasi dan Promosi Perpustakaan	jenis	17	190.000.000	-	97.695.750			-	-							0	-	0	0	0	97.695.750	0	51	Dinas Kearsipan
					Penyelenggaraan Wisata Baca Siswa Berprestasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Wisata Baca siswa Berprestasi	siswa	950	645.000.000	170	81.403.174			-	-							0	-	0	0	170	81.403.174	18	13	Dinas Kearsipan
					Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Kreativitas Siswa	siswa	1.650	1.075.000.000	234	76.756.900			-	-							0	-	0	0	234	76.756.900	14	7	Dinas Kearsipan
					Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan	Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Standar Pelayanan Perpustakaan	perpustakaan	400	100.000.000	-	-			-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan terbaik	Terlaksananya Penyelenggaraan Lomba Perpustakaan Terbaik	perpustakaan	180	330.000.000	-	-			-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Bahan Perpustakaan	Tersedianya Bahan Perpustakaan	Buku	4.500	900.000.000	-	-			-	-							0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pengembangan Koleksi Perpustakaan	Tersedianya Pengembangan Koleksi Perpustakaan	buku	4.500	625.000.000	1.500	199.223.668			-	-							0	-	0	0	1500	199.223.668	33	32	Dinas Kearsipan

1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Program Pengembangan sistem Perpustakaan	Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan		20	2.045.000.000	5	98.600.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	5	98.600.000	25	5	Dinas Kearsipan
					Pembangunan data base Otomasi Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan data base otomasi Perpustakaan	sistem	5	1.045.000.000	2	48.800.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2	48.800.000	40	5	Dinas Kearsipan
					Perluasan Pengembangan berbasis/Teknologi	Terciptanya pengembangan Perpustakaan berbasis Teknologi	sistem	5	850.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Perangkat TIK	Tersedianya Perangkat TIK	unit	10	150.000.000	3	49.800.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	3	49.800.000	30	33	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan sarana dan prasarana Perpustakaan	Meningkatkan sarana dan Prasarana Perpustakaan		3.509	20.325.000.000	12	744.480.678	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	12	744.480.678	0	4	Dinas Kearsipan
					Pengadaan sarana dan prasarana ruang baca anak, remaja dan umum	Tersedianya sarana dan prasarana ruang baca anak remaja dan umum	unit	1	365.000.000	1	39.822.000			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	39.822.000	100	11	Dinas Kearsipan
					Pengadaan Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan lainnya	Tersedianya Perabot Kerja, Penyimpanan dan Perlengkapan lainnya	unit	100	2.000.000.000	11	704.658.678			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	11	704.658.678	11	35	Dinas Kearsipan
					Pemeliharaan dan Pelestarian bahan Pustaka	Terpeliharanya Bahan Pustaka	buku	3.400	480.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pembangunan Perpustakaan Ruang Terbuka Hijau	Terbangunnya Perpustakaan ruang Terbuka Hijau	unit	4	480.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	Terlaksananya Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan	unit	2	15.000.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan	Terlaksananya Rehabilitas Gedung Layanan Perpustakaan	unit	2	2.000.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan	Meningkatkan Peningkatan Kualitas SDM Perpustakaan		8	270.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pendidikan dan Pelatihan Pustakawan	Terlaksananya Diklat Pustakawan	orang	8	270.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
										-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip	Meningkatkan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip		8.712	1.892.000.000	4.040	42.866.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	4040	42.866.000	46	2	Dinas Kearsipan
					Pendataan dan Penataan Dokumen Arsip Daerah	Tertatanya Dokumen/Arsip Daerah	dokumen	3.000	180.000.000	4.000	19.424.200			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	4000	19.424.200	133	11	Dinas Kearsipan
					Pengadaan sarana, Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	Tersedianya Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip	unit	1	512.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Penduplikatan dokumen/arsip daerah dalam bentuk informatika	Terlaksananya Penduplikatan/arsip daerah dalam bentuk informatika	dokumen	1.000	250.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pembangunan sistem keamanan Penyimpanan	Tersedianya sistem keamanan Penyimpanan	sistem	1	110.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pengumpulan Data Arsip	Terkumpulnya data arsip	dukumen	4.000	220.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pembuatan JRA ke setiao OPD	terlaksananya sosialisasi pembuatan JRA Arsip	orang	710	620.000.000	40	23.441.800			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	40	23.441.800	6	4	Dinas Kearsipan
					Program Perbaikan sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatkan Perbaikan sistem administrasi kearsipan		4	360.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pembangunan Sistem informasi Arsip	Terbangunnya Pembangunan Sistem Informasi Arsip	sistem	4	360.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Meningkatknya Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi		692	825.000.000	390	249.053.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	390	249.053.600	56	30	Dinas Kearsipan
					Penyediaan sarana Layanan Informasi Arsip	Tersedianya Sarana Layanan Informasi Arsip	unit	2	175.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan instansi pemerintah swasta	Terlaksananya Sosialisasi /Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi pemerintah swasta	orang	690	650.000.000	390	249.053.600			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	390	249.053.600	57	38	Dinas Kearsipan
					Program Peningkatan Kualitas SDM Kearsipan	Meningkatkan Kualitas SDM Kearsipan		10	365.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
					Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Arsiparis	orang	10	365.000.000	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Kearsipan
									44.507.967.000																					Dinas Kearsipan
Jumlah								36.865	44.507.967.000	26.511	5.540.451.606	497	663.318.449	57	70.560.000	106	141.580.554	42	56.301.034	254,00	356.505.507	459	624.947.095	92	94	26970	6.165.398.701	73	14	Dinas Kearsipan
Rata - rata capaian kinerja (%)																								92,35	94,22			73,16	13,85	Dinas Kearsipan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Predikat Kinerja																	

	2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
3.05				Pengadaan Benih/ Calon Induk Unggul dan Pakan	Tersedianya benih / calon induk unggul dan pakan	Kg	58	700.000.000	120	124.080.000	0	0	0	0					0	-	0	0	120	124.080.000	207	18			
3.05				Penyediaan induk/ benih calon induk unggul dan pakan induk	Adanya induk /benih calon induk unggul dan pakan induk	Kg	45	600.000.000	0	-	120	124.999.960	0	0	0		120	64.790.000		0	-	0	0	-	-	0	0		
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan UPTD BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan UPTD BBI Lokal	Unit	16	2.600.000.000	5	820.728.000	0	0	0	0					0	-	0	0	5	820.728.000	31	32			
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana penunjang BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi prasarana penunjang BBI Lokal	Unit	6	475.000.000			2	159.999.929	0	0	0		1	143.044.000		0	-	0	0	-	-	0	0	Dinas Perikanan	
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi Prasarana Pendukung BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi prasarana pendukung BBI Lokal	Unit	4	415.000.000	1	64.906.000	0	0	0	0	1	7.106.000				0	-	0	0	1	64.906.000	25	16		
3.05				Pengadaan Sarana Pendukung BBI Lokal	Tersedianya sarana pendukung BBI Lokal	Unit	7	715.000.000			0	0	0	0					0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Pengadaan Prasarana Penunjang BBI Lokal	Tersedianya prasarana penunjang BBI Lokal	Unit	4	620.000.000			0	0	0	0					0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pengaman BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pengaman BBI Lokal	Unit	2	150.000.000			0	0	0	0	0				0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penerapan CPIB dan biosecurity BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana penerapan CPIB dan biosecurity BBI Lokal	Unit	6	110.000.000			0	0	0	0	0				0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelengkap BBI Lokal	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pelengkap BBI Lokal	Unit	6	170.000.000			0	0							0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi Kolam budidaya ikan air tawar	Terlaksananya pembangunan / rehabilitasi kolam budidaya air tawar	Unit	35	5.265.000.000			0	0							0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Pembangunan/ Rehabilitasi Kolam Unit Perbenihan Rakyat	Jumlah unit kolam UPKR yang di bangun/rehab	Unit	13	2.150.000.000			0	0							0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	%	100												-										
3.05				Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Adanya pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	kelompok	15	360.000.000			0	0	0	0	0				0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Restocking benih ikan di Pesisir Umum Daratan	Terlaksananya restocking benih ikan di PUD	ekor	500.000	570.000.000	175.000	110.100.300	0	0	0	0					0	-	0	0	175.000	110.100.300	35	19			
3.05				Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Tersedianya sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan)	Unit	26	530.000.000			0	0	0	0					0	-	0	0	-	-	0	0			
3.05				Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Meningkatnya sistem penyuluhan perikanan	%	100											20.481.500											
3.05				Pelatihan Kelompok Pembudidaya Ikan	Terlaksananya pelatihan kelompok pembudidaya ikan	Orang	600	310.000.000	260	155.990.335	20	42.645.428	0	0	0					0	-	0	0	260	155.990.335	43	50		
3.05				Pengadaan Alat Penunjang Penyuluhan	Adanya alat penunjang penyuluhan	Jenis	20	80.000.000	5	18.968.000	0	0	0	0					0	-	0	0	5	18.968.000	25	24			
3.05				Dempond (Demonstrasi Pond) Budidaya Ikan Lele pada Kolam Terpal	Terlaksananya pembangunan budidaya ikan lele pada kolam terpal	Unit	19	245.000.000	12	168.572.400	5	62.669.316	0	0	0			2,00	20.481.500	8	20.481.500	160	33	20	189.053.900	105	77		
3.05				Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Terlaksananya gerakan memasyarakatkan makan ikan (gemarikan)	kali	4	315.000.000	2	106.625.485	350	57.030.680	0	0	0					1	-	0	0	3	106.625.485	75	34		
JUMLAH								27.003.638.000		4.197.257.673		1.189.850.210		59.878.139		96.533.804				492.890.802		810.199.904	35	47		5.007.457.577	30	#DIV/0!	
DINAS PERTANIAN												13.163.405.322		-						7.850.359.944									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran															426.854.435		509.463.842		1.869.820.243										
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	426.075.000	36	203.072.532	12	204.000.000	3	11.523.314	6	9.775.069	-	10.139.842	3,00	17.836.729	12	49.274.954	100	24	48	252.347.486	80	59	Dinas Pertanian

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12				13				14=(9+10+11+12)				15=13/8x100%				16=(7+13)				17=15/6x100%				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				Pembinaan Desa Percontohan	Terlaksananya Pembinaan Desa Percontohan	Desa	20	678.100.697	16	136.794.300	1	40.000.000	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Terlaksananya Pengawasan Pupuk dan Pestisida	Kecamatan	68	696.500.000	51	358.003.900	17	40.000.000	-	0	0	9.240.000	Dinas Pertanian
				Pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alaintan (UPJA)	Terlaksananya Pengembangan UPJA	UPJA	120	675.650.000	20	44.199.050	10	37.701.610	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pembangunan/ Perbaikan Jalan Pertanian (JUT & Jalan Pertanian)	Terlaksananya Pengembangan Jalan Pertanian	paket/meter	59.000	13.998.114.917	43.135	10.234.506.858	1	400.000.000	-	0	0	3.900.000	Dinas Pertanian
				Rehabilitasi Lahan Pertanian	Terlaksananya Rehabilitasi Lahan Pertanian	Ha	7.047	6.743.393.888	1834	1.755.427.175	531	546.154.010	-	0	0	531,00	Dinas Pertanian
				Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Kopi dan Kakao	Unit	42	672.853.500	49	669.842.270	1	297.471.000	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Komoditi	1	150.000.000	2	147.791.475	1	150.000.000	-	-	-	118.558.000	Dinas Pertanian
				Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Tanaman Hortikultura	Unit	14	1.101.555.628	1	10.500.000	5	87.895.650	-	0	0	5,00	Dinas Pertanian
				Optimasi Lahan Sawah	Terlaksananya Optimasi Lahan Sawah	Ha	1.500	1.986.000.000	65	156.117.500	-	-	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pelepasan dan Pemurnian Varietas Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pelepasan Varietas Tanaman Hortikultura	Komoditi	5	662.000.000	1	178.755.486	0	-	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Forum OPD	Terlaksananya Forum OPD	pertemuan	3	133.496.300	1	30.046.300	1	8.920.800	1	0	0	3.160.800	Dinas Pertanian
				Program Pengembangan Data dan Informasi										0	0	-	
				Pembuatan Data Base Lahan dan Air	Tersedianya Data Base Lahan dan Air	database	3	315.000.000	2	97.899.720	2	99.999.720	0	0	0	2,00	Dinas Pertanian
				Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Action Plan dan Pemetaan Pengembangan Kawasan Pertanian	Dokumen	2	154.650.000	2	150.000.000	-	0	-	0	-	-	150000000
				Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan									0	-	23.291.120	
				Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	Terlaksananya Pameran Hasil Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)	kali	30	1.249.621.797	11	283.251.927	6	350.000.000	1	0	0	1	Dinas Pertanian
				Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan	Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan									0	-	301.263.800	
				Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Terlaksananya Sekolah Lapang Komoditi Unggulan	Kelompok	39	965.000.000	11	135.327.080	5	50.000.000	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Hortikultura	Ha	3.528	3.815.923.081	1250	1.398.850.000	92	100000000	-	0	0	278,00	Dinas Pertanian
				Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Pengendalian OPT pada Tanaman Perkebunan	ha	3.400	2.155.000.000	850	755.528.950	278	709.304.769	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pembinaan Penangkar Benih/bibit Tanaman Pangan	Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Pangan	Penangkar	12	1.636.533.050	7	797.981.723	2	318.810.000	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pembinaan Penangkar Benih /bibit Tanaman Hortikultura	Terbinanya Penangkar Benih Tanaman Kentang dan Krisan	Penangkar	17	1.691.419.438	10	438.192.750	2	150.000.000	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pembinaan Penangkar Bibit Tanaman Perkebunan	Terbinanya Penangkar Bibit Tanaman Kakao	Penangkar	9	596.500.000	5	187.558.475	0	-	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Pengelolaan sistem Penyediaan dan pengawasan Alat mesin Pertanian	Terlaksananya Pengelolaan sistem dan Penyediaan dan pengawasan Alat mesin Pertanian	Unit	53	646.500.000	2	114.986.500	-	-	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura	Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Hortikultura	Komoditi	8	132.750.000	2	21.749.432	-	-	-	0	0	-	Dinas Pertanian
				Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan	Terlaksananya Uji Adaptasi Tanaman Perkebunan	Komoditi	8	132.750.000	2	22.219.900	0	-	-	0	0	-	Dinas Pertanian

2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14=(9+10+11+12)					15=13/8x100%					16=(7+13)					17=15/6x100%					18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
					Program Peningkatan PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	Meningkatnya penerapan teknologi peternakan (IB)										-				3.180.000											
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	Tersedianya sarana dan prasarana teknologi peternakan tepat guna (IB)	jenis	15	990.625.750	9	370.642.300	3	70.000.000	-	0	0	-	-	44.120.000	-	3.180.000	-	47.300.000	0	68	9	417.942.300	60	42	Dinas Pertanian	
					Program Peningkatan KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER (KESMAVET) DAN PASCA PANEN	Meningkatnya kesehatan masyarakat veteriner											-				29.719.000										
					Pengawasan Penerapan Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH)	Terlaksananya pemeriksaan ternak sebelum dan sesudah dipotong	Kecamatan	85	405.655.000	51	60.500.000	17	50.000.000	-	0	0	-	-	16.870.000	300,00	29.719.000	300	46.589.000	1.765	93	351	107.089.000	413	26	Dinas Pertanian	
					Program PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan											-				-										
					Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Pertanian	Penyusunan Sistem Informasi/Database Potensi Peternakan	sistem	1	60.500.000			-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-	0	0	Dinas Pertanian	
					Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian	Terlaksananya Penyusunan Peraturan Daerah Sektor Pertanian	Perda	5	599.267.160	-	12.065.000	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	12.065.000	0	2	Dinas Pertanian	
					JUMLAH			151.603.496.904		58.533.866.480		13.163.405.322		286.141.700		1.012.868.870				7.850.359.944		9.752.125.641				68.285.992.121					
					Urusan Pilihan Perdagangan																										
					Dinas Perindustrian dan Perdagangan									185.500.750		359.326.387		332.205.730		5.905.580.466	-	6.169.900.278	-	-	-	-	35.702.330.863	-	-	-	
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									185.500.750		359.326.387		332.205.730		1.241.630.987		2.417.233.778					8.948.094.790				
					Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Tersedianya jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Bulan	60	939.246.154	12	48.481.301	12	37.740.000	-	-	3	4.335.131	-	7.933.230	12,00	5.666.801	15	17.935.162	125	48	27	66.416.463	0	0	Disperindag	
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ operasional	Bulan	93	939.246.154	-	7.554.280	-	-	-	0	-	-	-	8,00	6.327.000	8	6.327.000	0	0		8	13.881.280	0	0	Disperindag	
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	Orang	972	939.246.154	69	272.990.000	108	66.588.650	-	-	0	-	-	-	134,00	210.528.650	134	210.528.650	124	316	203	483.518.650	0	1	Disperindag	
					Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa Kebersihan Kantor	bulan	60	939.246.154	9	37.380.000	9	14.908.650	-	-	4	3.645.000	-	4.860.000	5,00	6.075.000	9	14.580.000	100	98	18	51.960.000	0	0	Disperindag	
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	Unit	72	939.246.154	23	22.240.000	5	3.570.000	-	-	0	-	-	-	5,00	3.570.000	5	3.570.000	100	100	28	25.810.000	0	0	Disperindag	
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	211	939.246.154	42	298.569.924	41	39.461.892		0	-	-	-	-	41,00	41.122.491	41	339.692.415	100	861	83	638.262.339	0	1	Disperindag	
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	45	939.246.154	13	550.798.990	13	111.135.650	-	-	0	-	-	-	13,00	111.135.650	13	111.135.650	100	100		26	661.934.640	1	1	Disperindag
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jenis	250	939.246.154	148	12.272.810	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0		148	12.272.810	1	0	Disperindag	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terselenggaranya kegiatan kantor	Unit	56	939.246.154	-	253.674.841	-	-	-	0	-	-	-	36,00	143.905.000	36	143.905.000	0	0	36	397.579.841	1	0	Disperindag		
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	107	939.246.154	-	106.169.697	-	-	-	0	-	-	-	8,00	3.103.096	8	3.103.096	0	0		8	109.272.793	0	0	Disperindag	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	3.280	939.246.154	25	11.724.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0		25	11.724.000	0	0	Disperindag	
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Dana Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Orang	2.400	939.246.154	591	1.927.450.883	362	302.887.500	-	-	220	32.803.650	-	1.026,00	279.439.999	1.246	312.243.649	344	103	1.837	2.239.694.532	1	2	Disperindag		
					Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi / teknis perkantoran	Orang	2.088	939.246.152	996	2.981.554.286	935	1.183.432.300	156	185.500.750	268	318.542.606	-	319.412.500	352,00	430.757.300	776	1.254.213.156	83	106	1.772	4.235.767.442	1	5	Disperindag	
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									-	0	-	-	-		196.639.500		196.639.500					1.313.319.044			Disperindag	
					Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas	Unit	3	-	-	463.091.624	-	-		0	-	-	-	-	-	-	-	0	0		463.091.624			Disperindag		
					Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Pengadaan Mebeleur	Unit	40	732.612.000	-	171.978.423	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	171.978.423	0	0	Disperindag		
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Unit	1	732.612.000		297.753.044	-	-	-	0	-	-	-	1,00	166.000.000	1	166.000.000	0	0	1	463.753.044	1	1	Disperindag		
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Unit	28	732.612.000	-	183.856.453	-	-	-	0	-	-	-	8,00	30.639.500	8	30.639.500	0	0	8	214.495.953	0	0	Disperindag		
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur									-	0	-	-	-		86.559.000		86.559.000				408.097.999			Disperindag		

		2	3	4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terpenuhihya Pakaian dinas sesuai Peraturan Disiplin	Stel	780	30.525.500	131	311.589.000	-	-	-	0	-	-	-	129,00	86.559.000	129	86.559.000	0	0	260	398.148.000	0	13	Disperindag	
					Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Stel	520	30.525.500	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pengadaan Mesin Kartu Absensi	Tersedianya Mesin Kartu Absensi	Unit	4	30.525.500	-	9.949.999	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	9.949.999	0	0	Disperindag		
					Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif				-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag	
					Sosialisasi Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Tersedianya Kebijakan Tentang Usaha Mikro	Usaha Mikro	55	1.573.096.721	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan									0	-	-	-	-	126.055.000						1.987.787.150			Disperindag		
					Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Toko	-	366.306.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Operasionalisasi dan Pengembangan Metrologi Legal Ukur, Takar, Timbang dan Pengawasan (UUTP)	Meningkatnya keamanan perdagangan dalam aspek kemetrologian	kegiatan	5	366.306.000	-	450.949.592	2	70.000.000	-	1	14.430.767	-	-	1,00	51.176.000	2	65.606.767	100	94	2	516.556.359	0	1	Disperindag	
					Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Ranperda Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang	Peraturan	5	366.306.000	-	49.221.192	-	-	-	0	-	-	-	1,00	27.134.000	1	27.134.000	0	0	1	76.355.192	0	0	Disperindag	
					Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Terib Ukur	Terlaksananya Sosialisasi Metrologi Legal Untuk Pasar Terib Ukur	Orang	600	366.306.000	48	176.244.549	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	48	176.244.549	0	0	Disperindag		
					Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai Rokok Kepada Masyarakat	Terlaksananya Penyampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cukai Rokok Kepada Masyarakat												100,00	47.745.000											
					Penyediaan Sarana dalam Mendukung Pembentukan Unit metrologi legal	Tersedianya sarana dalam mendukung Pembentukan Unit Metrologi Legal	Unit	3	366.306.000	1	1.218.631.050	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	1	1.218.631.050	0	3	Disperindag		
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor										0	-	-	-	-	-	-	-	-		49.850.000			Disperindag		
					Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	Terlaksananya Koordinasi Program Pengembangan Ekspor Dengan Instansi Terkait/Asosiasi/Pengusaha	Kali	30	57.387.940	-	49.850.000	12	70.000.000	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	49.850.000	0	1	Disperindag		
					Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Terlaksananya Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	Informasi	2	57.387.940	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan	Terlaksananya Data Base Informasi Potensi Unggulan	Data Base	5	57.387.940	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Membangun Jejaring dengan Elsporir	Terbangunya Jejaring dengan Eksportir	Jejaring	100	57.387.940	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pengembangan Ekspor dengan Instansi terkait/ Asosiasi dan Pengusaha	TerlaksananyaEkspor dengan Instansi terkait/ Asosiasi dan Pengusaha	Kali	40	57.387.940	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri									0	-	-	-	-	62.500.000		62.500.000				9.210.387.864			Disperindag		
					Pembangunan sarana distribusi perdagangan/ Revitalisasi Pasar Rakyat	Tersedianya sarana distribusi perdagangan	pasar	4	1.288.854.444	1	9.054.922.095	1	3.500.000.000	-	0	-	-	-	1,00	62.500.000	1	62.500.000	100	2	2	9.117.422.095	1	7	Disperindag	
					peningkatan sarana dan prasarana sistem resi gudang	Meningkatnya kualitas gudang SRG	Unit	4	1.288.854.444	-	39.772.300	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	39.772.300	0	0	Disperindag	
					Revitalisasi pasar tradisional se-Kab. Karo	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Tradisional Se-Kab Karo	pasar	-	1.288.854.448	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Monitoring Harga Sembilan Bahan Pokok	Terlaksananya Monitoring Harga sembilan bahan Pokok	Kecamatan	17	1.288.854.444	6	53.193.469	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	6	53.193.469	0	0	Disperindag		
					Pengembangan kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan	Terlaksananya kelembagaan dan Kerjasama Kemitraan	Kerjasama	150	1.288.854.444	-	-	5	100.000.000	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Terlaksananya Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri	Orang	200	1.288.854.444	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		

2					3					4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
					Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar	2	1.288.854.444	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait Pasar Rakyat dan Toko Modern	Ranperda	1	1.288.854.444	-	-	1	25.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	Terbangunnya Revitalisasi Pasar Rakyat Khusus Tipe D	Pasar	3	1.288.854.444	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan				-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-				-			Disperindag			
					Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Terlaksananya Penyuluhan Peningkatan Disiplin Pedagang Kakilima dan Asongan	Orang	6	167.890.250	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi				-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				111.294.300						Disperindag			
					Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Terciptanya Penguatan Kemampuan Industri Berbasis Teknologi	Orang	3	702.086.500	-	111.294.300	20	97.800.000	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	111.294.300	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah				-	-				-	0	-	-	-	-	-	-	785.227.979										3.061.360.897						Disperindag			
					Pembinaan Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan-Pelatihan	Orang	240	126.201.864	-	154.659.884	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	154.659.884	0	1	-	-	0	1	Disperindag			
					Pembinaan Industri Rumah Tangga pada Desa Binaan PKK	Terlaksananya Pembinaan Industri Rumah Tangga pada Desa Binaan PKK	Orang	220	126.201.864	38	148.623.196	20	67.429.105	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	38	148.623.196	0	1	-	-	0	1	Disperindag			
					Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Kerajinan Budaya	Orang	350	126.201.864	-	131.738.670	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	131.738.670	0	1	-	-	0	1	Disperindag			
					Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Pameran	3	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional	Terlaksananya Pameran/Promosi IKM pada Tingkat Nasional	Pameran	8	126.201.864	2	354.660.100	2	140.000.000	-	1	5.804.240	-	-	-	-	-	1	5.804.240	50	4	3	360.464.340	0	3	-	-	0	3	-	-	0	3	Disperindag			
					Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pembinaan Industri Kecil dan Menengah	IKM	50	126.201.864	10	34.017.330	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	10	34.017.330	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Produk Kerajinan	Orang	220	126.201.864	14	201.377.430	20	73.108.915	-	0	-	-	-	-	-	40,00	261.718.698	40	261.718.698	200	358	54	463.096.128	0	4	-	-	0	4	-	-	0	4	Disperindag		
					Pameran / Promosi pada tingkat Regional dan Lokal	Terlaksananya Pameran / Promosi Pada Tingkat Regional dan Lokal	Pameran	6	126.201.864	2	441.145.700	3	288.200.000	-	0	-	-	-	-	-	2,00	10.830.386	2	10.830.386	67	4	4	451.976.086	1	4	-	-	0	4	-	-	0	4	Disperindag		
					Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Produk Pertanian	Orang	130	126.201.864	38	804.106.368	60	712.091.350	-	0	-	-	-	-	-	80,00	468.278.895	80	468.278.895	133	66	118	1.272.385.263	1	10	-	-	0	10	-	-	0	10	Disperindag		
					Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keterampilan Kerajinan Rumah Tangga	Orang	150	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Mejuah-juah	Pameran	4	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Mengikuti Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Bunga dan Buah	Pameran	4	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Mengikuti Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Gelyar Kerajinan Daerah	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada Pesta Gelyar Kerajinan Daerah	Pameran	4	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Mengikuti Pameran/ Promosi IKM pada tingkat Nasional	Terlaksananya Pameran/ Promosi IKM pada tingkat Nasional	Pameran	4	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Pelatihan dan Bantuan Mesin / Peralatan Kemasan Produk IKM	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin / Peralatan Kemasan Produk IKM	Orang	80	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			
					Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerjasama Kemitraan Industri Mikro, Kecil dan Menengah dengan Swasta	Kerjasama	50	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag			

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		
					Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya Pemberian Kemudahan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah	IKM	30	126.201.864	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara	Terlaksananya Pameran / Promosi IKM pada Gebyar Kerajinan Daerah Sumatera Utara	Pameran	4	126.201.861	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan Sertifikasi IKM	Terlaksananya Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah dalam Penggunaan Standarisasi dan Sertifikasi IKM	IKM	40	126.201.864	-	15	80.670.630	-	-	0	-	-	-	10,00	44.400.000	10	44.400.000	67	55	10	44.400.000	0	0	Disperindag		
					Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri					-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag	
					Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	Terlaksananya Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	IKM	20	457.882.500	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Fasilitasi Perluasan Penerapan Standar Industri	Terlaksananya Fasilitas Perluasan Penerapan Standar Industri	kegiatan	2	457.882.500	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Program Penataan Struktur Industri					-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag	
					Pendataan Industri Kecil Menengah dan Besar	Meningkatnya database industri kecil menengah dan besar	Data	4	189.258.100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten	Orang	4	189.258.100	-	20	200.000.000	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Penyusunan Kebijakan terkait dan Industri Penunjang IKM	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan terkait dan Industri Penunjang IKM	Kebijakan	2	189.258.100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Penyediaan Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	Terlaksananya Sarana Informasi yang dapat di Akses Masyarakat	Sarana	2	189.258.100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah, dan Besar	Terlaksananya Pemutakhiran Data Industri Kecil, Menengah, dan Besar	Laporan	2	189.258.100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Usaha Industri	Laporan	2	189.258.100	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Terlaksananya Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah	Bulan	12	189.258.100	-	12	79.839.927	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Program Pengembangan Sentra- Sentra Industri Potensial					-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.800.000	-	-	-	Disperindag		
					Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Terlaksananya Operasional dan Perawatan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Sentra	2	2.320.500.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pembangunan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri Hortikaro/ Sentra IKM	Sentra	2	2.320.500.000	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM	Terlaksananya Penyusunan DED Pembangunan Sentra IKM	Dokumen	1	-	1	96.800.000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	96.800.000	0	0	Disperindag		
					Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan					-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3.406.968.000	3.406.968.000	-	-	-	-	10.515.338.819	-	-	-	Disperindag	
					Pembangunan Saranan dan prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan	Pembangunan Saranan dan prasarana Pasar Kecamatan/ Perdesaan Produksi Hasil Pertanian/ Perkebunan	pasar	5	1.819.319.800	-	-	-	-	-	0	-	-	-	7,00	3.406.968.000	7	3.406.968.000	0	0	7	3.406.968.000	1	2	Disperindag		
					Pembangunan Pasar Tradisional	TerlaksananyaPembangunan Pasar Tradisional	pasar	2	1.819.319.800	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisional	Pembuatan Jalan Lingkar di Pasar Tradisional	pasar	2	1.819.319.800	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		
					Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional	Pembuatan Tapal Batas dan Penyusunan Masterplan Pasar Tradisional	tahun	2	1.819.319.800	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0	0	Disperindag		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe	Pengadaan Lahan Pasar Kabanjahe	Kali	2	1.819.319.800	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Penyusunan Studi Kelayakan Pasar	Penyusunan Studi Kelayakan Pasar	Dokumen	2	1.819.319.800	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Pembuatan Detail Desain Pasar	Pembuatan Detail Desain Pasar	pasar	2	1.819.319.800	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Penyusunan Studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo	Penyusunan Studi Kelayakan Pembuatan Pra DED Pasar Induk Kabupaten Karo	pasar	2	1.819.319.800	-	-	-	-	-	-	-	Disperindag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana pasar dan pedesaan produksi hasil perkebunan	Terpeliharanya sarana dan prasarana sekab karo	Unit	24	1.819.319.800	-	6.095.764.819	-	-	-	-	-	Disperindag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Revitalisasi seluruh Pasar Rakyat / Pasar tradisional se-Kab Karo	Terlaksananya revitalisasi seluruh pasar Rakyat / Pasar Tradisional Se-kab Karo	tahun	24	1.819.319.800	1	1.012.606.000	-	-	-	-	-	Disperindag																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					Jumlah				58.133.450.784		28.648.657.599		7.263.864.569		185.500.750		379.561.394																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18															
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.															
			26	Pemeliharaan rutin/berkala Perengkapan gedung kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan rutin / berkala Perengkapan Gedung Kantor	jenis	6	1.221.695.878	14	37.203.750	1	41.097.000	-	-	-	1	3.909.700		7.000.000	1	10.909.700	100	27	15	48.113.450	250	4	Set. DPRD			
			28	Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD				
			41	Rehabilitasi Sedang / Berat Rumah Dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang /Berat Rumah Dinas	unit	3	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
			42	Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	unit	4	1.676.250.643	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
3		4	01	4	03	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur			1.824	1.983.683.331	1.080	1.226.055.500	217	335.024.000	-	-	-	-	217,00	318.899.000	217	318.899.000	100	95	1297	1.544.954.500	71	78	Set. DPRD		
					01	Pengadaan Mesin / Kartu Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	10.000.000	1	9.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	9.950.000	100	100	Set. DPRD			
					02	pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Adanya Pakaian Dinas dan Perengkapannya	stel	1.823	1.973.683.331	1.079	1.216.105.500	217	335.024.000	-	-	-	-	217,00	318.899.000	217	318.899.000	100	95	1296	1.535.004.500	71	78	Set. DPRD		
4		4	01	4	04	Program Fasilitas PNS			45	895.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
					05	Pelantikan KDH/WKDH/Anggota DPRD	Adanya Pelantikan Anggota DPRD	orang	45	895.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
5		4	01	4	05	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur			358	4.297.332.710	158	1.160.017.989	38	309.832.000	6	47.715.600	-	-	-	-	-	6	47.715.600	16	15	164	1.207.733.589	46	28	Set. DPRD	
					01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	orang	14	256.317.614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
					02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali / 100 orang	2	571.898.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
					03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis implementasi dan Peraturan Perundang-Undangan	kali / orang	342	3.469.116.692	158	1.160.017.989	38	309.832.000	6	47.715.600	-	-	-	-	6	47.715.600	16	15	164	1.207.733.589	48	35	Set. DPRD		
6		4	01	4	15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			9.489	42.520.918.405	670	12.024.630.468	1.074	7.807.636.010	1	1.033.755.795	72	1.135.742.152	132	495.995.000	227,00	2.397.332.948	432	5.062.825.895	40	65	1102	17.087.456.363	12	40	Set. DPRD
					01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	Adanya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Perda	61	14.454.901.987	10	3.811.096.719	10	5.000.197.375	1	1.033.755.795	-	843.962.152	4	-	2,00	1.462.886.748	7	3.340.604.695	70	67	17	7.151.701.414	28	49	Set. DPRD
					02	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat	Terlaksananya Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama dan Masyarakat	kali / 500 Orang	10	541.250.672	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
					03	rapat-rapat kelengkapan Dewan	Terlaksananya Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan	kali	900	2.414.750.000	150	131.100.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	150	131.100.000	17	5	Set. DPRD			
					04	Rapat-rapat Paripurna	Terlaksananya Rapat-rapat Paripurna	kali	190	841.394.824	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
					05	kegiatan resees	Terlaksananya Kegiatan Reses	kali	18	5.202.934.318	1	333.156.000	3	680.957.825	-	-	1	207.830.000	1	166.086.000	1,00	103.945.000	3	477.861.000	100	70	4	811.017.000	22	16	Set. DPRD
					06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam daerah	Teraksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah	Kali/Orang	300	1.039.661.431	130	121.050.000	925	268.922.750	-	-	71	21.950.000	77	31.500.000	161,00	67.350.000	309	120.800.000	33	45	439	241.850.000	146	23	Set. DPRD
					07	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Kali/Orang	324	7.247.048.263	153	2.493.849.300	50	367.000.000	-	-	-	50	298.409.000	-	-	50	298.409.000	100	81	203	2.792.258.300	63	39	Set. DPRD	
					08	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi dan Peraturan Perundang-Undangan	kali / orang	7.200	571.898.404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD		
					09	Kunjungan kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keluar daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah	Kali/Orang	300	8.797.078.506	167	4.929.036.449	49	1.264.795.000	-	-	-	62.000.000	-	49,00	679.151.200	49	741.151.200	100	59	216	5.670.187.649	72	64	Set. DPRD	
					11	Pelantikan Anggota DPRD	Terlaksananya Pelantikan Anggota DPRD	orang	46	710.000.000	35	85.342.000	2	15.763.060	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	35	85.342.000	76	12	Set. DPRD		
					12	Kegiatan Medical Check Up	Terlaksananya Kegiatan Medical Check Up	Kali/Orang	140	700.000.000	24	120.000.000	35	210.000.000	-	-	-	-	-	14,00	84.000.000	14	84.000.000	40	40	38	204.000.000	27	29	Set. DPRD	
7		4	01	4	27	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD			
					01	Penyediaan Website	Tersedianya Website	Sistem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Set. DPRD		
Jumlah						137.841	131.683.177.769	53.339	61.715.543.060	22.539	25.649.098.248	7	1.081.471.395	4.527	3.607.983.414	2.834	6.193.702.057	5.703,00	9.590.262.476	13071	20.473.419.342	58	80	66410	82.188.962.402	48	62	Set. DPRD			
Rata - rata capaian kinerja (%)																											57,99	79,82			Set. DPRD
Predikat Kinerja																											Rendah	Tinggi			Set. DPRD
																											Sangat Rendah	Rendah			Set. DPRD

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18								
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.									
		1	1	5	3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	5	500.000.000	1	-	-	-	-	0	-	0	0	1	-	20	0	Bag. Pemdes							
		1	1	5	2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kali	5	500.000.000	2	597.205.350	-	-	-	0	-	0	0	2	597.205.350	40	119	Bag. Pemdes							
		4	1	21		Program Penataan Peraturan-undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan-undangan		15	1.400.000.000	12	346.457.301	3	92.269.000	-	-	2	15.513.000	1,00	20.281.000	3	35.794.000	100	39	15	382.251.301	100	27	Bag. Pemdes		
		4	1	21	11	Penyusunan Produk Hukum	Tersedianya Produk Hukum Daerah	Buah	15	1.400.000.000	12	346.457.301	3	92.269.000	-	-	2	15.513.000	1,00	20.281.000	3	35.794.000	100	39	15	382.251.301	100	27	Bag. Pemdes		
		2	7	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		15	360.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Pemdes		
		2	7	18	4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali	15	360.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Pemdes		
		4	1	22		Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Meningkatnya Penataan Daerah Otonomi Baru		20	910.000.000	1	79.443.700	2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	79.443.700	5	9	Bag. Pemdes		
		4	1	22	1	Facilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	Terlaksananya Facilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Desa	Desa	20	910.000.000	1	79.443.700	2	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	79.443.700	5	9	Bag. Pemdes		
		1	3	32		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatnya Perencanaan Tata Ruang		25	250.000.000	-	-	1	29.937.020	-	-	-	-	-	1,00	15.306.900	1	15.306.900	100	51	1	15.306.900	4	6	Bag. Pemdes	
		1	3	32	-	Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Terlaksananya Penetapan dan Pengawasan Batas Desa	Desa	25	250.000.000	-	-	1	29.937.020	-	-	-	-	-	1,00	15.306.900	1	15.306.900	100	51	1	15.306.900	4	6	Bag. Pemdes	
JUMLAH									495	4.715.000.000	273	1.620.751.004	46	132.995.474	11	3.435.940	11	3.067.020	12	17.508.770	10,00	37.587.594	44	61.599.324	96	46	317	1.682.350.328	64	36	Bag. Pemdes
Rata - rata capaian kinerja (%)																							95,65	46,32			64,04	35,68	Bag. Pemdes		
Predikat Kinerja																									Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sedang	Sangat Rendah	Bag. Pemdes	
						BAGIAN HUKUM DAN HAM			26.965	16.182.595.606	2.675	1.256.086.195	106	431.434.318	-	-	39	15.134.650	3	2.631.750	62,00	402.511.500	104	420.277.900	98	97	2779	1.676.364.095	10	10	Bag. Hukum
		01	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.816	1.143.198.698	429	216.931.795	43	23.283.757	-	-	39	15.134.650	3	2.631.750	-	5.442.500	42	23.208.900	98	100	471	240.140.695	17	21	Bag. Hukum
		01	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1.200	5.850.000	250	1.140.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	250	1.140.000	21	19	Bag. Hukum		
		01	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	144.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Hukum		
		01	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	62	55.859.600	25	17.730.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	25	17.730.000	40	32	Bag. Hukum		
		01	03	01	###	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	220	186.854.267	128	53.222.495	39	15.202.491	-	-	39	15.134.650	-	-	-	39	15.134.650	100	100	167	68.357.145	76	37	Bag. Hukum	
		01	03	01	###	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	30	148.771.331	9	35.475.100	4	8.081.266	-	-	-	-	3	2.631.750	-	5.442.500	3	8.074.250	75	100	12	43.549.350	40	29	Bag. Hukum
		01	03	01	###	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	9	196.880.500	7	80.170.300	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	7	80.170.300	78	41	Bag. Hukum		
		01	03	01	###	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UI-an	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UI-an	buah	435	99.728.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Hukum		
		01	03	01		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	org hr kl	800	305.255.000	10	29.193.900	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	10	29.193.900	1	10	Bag. Hukum		
		01	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		40	206.373.000	21	107.714.750	2	35.000.000	-	-	-	-	2,00	32.050.000	2	32.050.000	100	92	23	139.764.750	58	68	Bag. Hukum		
		01	03	02	###	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	141.112.250	1	23.858.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	23.858.000	20	17	Bag. Hukum		
		01	03	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	5	23.100.000	4	41.533.000	2	35.000.000	-	-	-	-	2,00	32.050.000	2	32.050.000	100	92	6	73.583.000	120	319	Bag. Hukum		
		01	03	02		Pengadaan Mebeleur	Tersedianya meubeleur	buah	8	22.660.750	16	42.323.750	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	16	42.323.750	200	187	Bag. Hukum		
		01	03	02		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Terpeliharanya Mebeleur	buah	22	19.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Hukum		
		01	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.085	3.012.358.000	593	248.419.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	593	248.419.000	55	8	Bag. Hukum		
		01	03	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orgkali	700	1.066.700.000	593	248.419.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	593	248.419.000	85	23	Bag. Hukum		
		01	03	05		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orgkali	375	978.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Hukum		
		01	03	05		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Formal	orgkali	10	967.408.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Hukum		

		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		01	03	19	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Meningkatnya penanganan pengaduan masyarakat		25	655.092.900	13	299.903.750	3	205.606.221	-	-	-	-	-	-	3,00	204.575.000	3	204.575.000	100	99	16	504.478.750	64	77	Bag. Hukum	
		01	03	19	01	Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	perkara	25	655.092.900	13	299.903.750	3	205.606.221	-	-	-	-	-	3,00	204.575.000	3	204.575.000	100	99	16	504.478.750	64	77	Bag. Hukum	
		01	03	21	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-undangan		22.999	11.165.573.008	1.619	383.116.900	58	167.544.340	-	-	-	-	-	-	57,00	160.444.000	57	160.444.000	98	96	1676	543.560.900	7	5	Bag. Hukum	
		01	03	05	Publikasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Publikasi Peraturan Perundang-undangan	peraturan	20.520	572.000.000	16		50	29.172.060	-	-	-	-	-	-	50,00	29.169.000	50	29.169.000	100	100	66	29.169.000	0	5	Bag. Hukum	
		01	03	15	Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Terlaksananya Pengkajian dan Evaluasi Produk Hukum Daerah	Keputusan MoU Perjanjian	2.250	395.000.000	1.559	19.451.200		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	1559	19.451.200	69	5	Bag. Hukum		
		01	03	16	Penyusunan Program Pembentukan Perda (Propemperda)	Tersusunnya Program Pembentukan Perda (Propemperda)	keputusan	5	350.000.000	4	28.070.000	1	41.030.000	-	-	-	-	-	-	1,00	39.450.000	1	39.450.000	100	96	5	67.520.000	100	19	Bag. Hukum	
		01	03	11	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	peraturan	54	5.900.621.008	-	-	1	45.550.000	-	-	-	-	-	-	1,00	43.300.000	1	43.300.000	100	95	1	43.300.000	2	1	Bag. Hukum	
		01	03	17	Pembahasan Ranperda di DPRD	Terlaksananya pembahasan Ranperda di DPRD	perda	105	902.500.000	20	15.362.500		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	20	15.362.500	19	2	Bag. Hukum		
		01	03	18	Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu	Terlaksananya Fasilitasi Penyuluhan Hukum Terpadu	kec	20	789.052.000	10	228.735.000		-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	10	228.735.000	50	29	Bag. Hukum		
		01	03	19	Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan RANHAM	laporan	40	1.128.200.000	10	91.498.200	5	51.792.280	-	-	-	-	-	-	5,00	48.525.000	5	48.525.000	100	94	15	140.023.200	38	12	Bag. Hukum	
		01	03	20	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	TersedianyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	sistem	5	1.128.200.000	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	Bag. Hukum		
JUMLAH								26.965	16.182.595.606	2.675	1.256.086.195	106	431.434.318	-	-	39	15.134.650	3	2.631.750	62,00	402.511.500	104	420.277.900	98	97	2779	1.676.364.095	10	10	Bag. Hukum	
Rata - rata capaian kinerja (%)																															Bag. Hukum
Predikat Kinerja																															Bag. Hukum
BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL								7.813	8.688.083.600	18.506	1.577.431.508	9.866	1.315.291.823	4	5.099.500	2.576	160.380.000	2.768	228.789.153	3.356,00	731.103.425	8704	1.125.372.078	88	86	27210	2.702.803.586	348	31	Bag. Humas	
		4	03	01	BA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.526	3.868.365.550	7.198	705.243.805	951	209.991.823	4	5.099.500	252	35.250.000	290	71.349.153	381,00	61.161.200	927	172.859.853	97	82	8125	878.103.658	230	23	Bag. Humas
		4	03	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	240	1.391.000	126	396.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	126	396.000	53	28	Bag. Humas		
		4	03	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	60	74.000.000	36	9.564.855	12	7.200.000	2	1.051.000	-	4	1.729.483	6,00	3.227.500	12	6.007.983	100	83	48	15.572.838	80	21	Bag. Humas	
		4	03	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	25	15.100.000	4	1.784.250	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	4	1.784.250	16	12	Bag. Humas		
		4	03	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	43	40.733.200	25	10.060.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	25	10.060.000	58	25	Bag. Humas		
		4	03	01	###	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	160	123.707.630	111	53.689.350	44	29.951.823	-	-	-	44	29.889.670	-	44	29.889.670	100	100	155	83.579.020	97	68	Bag. Humas		
		4	03	01	###	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	35	175.211.320	13	45.030.350	5	24.640.000	2	4.048.500	-	2	8.250.000	3,00	11.003.700	7	23.302.200	140	95	20	68.332.550	57	39	Bag. Humas	
		4	03	01	###	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	10	33.314.100	6	46.725.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	6	46.725.000	60	140	Bag. Humas		
		4	03	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	18	39.055.500	11	4.454.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	11	4.454.000	61	11	Bag. Humas		
		4	03	01	###	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	2.880	443.472.000	6.866	533.540.000	890	148.200.000	-	252	35.250.000	240	31.480.000	372,00	46.930.000	864	113.660.000	97	77	7730	647.200.000	268	146	Bag. Humas	
		4	03	01	###	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Peserta pada Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang kali	55	2.922.380.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	0	-	0	0	Bag. Humas		
		4	03	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur		234	1.181.632.650	134	137.849.203	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	134	137.849.203	57	12	Bag. Humas		
		4	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/ operasional	unit	1	324.980.650	1	32.339.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	1	32.339.000	100	10	Bag. Humas		
		4	03	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	unit	8	69.500.000	4	8.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	4	8.000.000	50	12	Bag. Humas		
		4	03	02	###	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	25	739.792.000	9	86.290.203	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	9	86.290.203	36	12	Bag. Humas		
		4	03	02	###	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	200	47.360.000	120	11.220.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	120	11.220.000	60	24	Bag. Humas		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
		4	03	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	55	48.055.000	16	6.400.000	-	-	-	-	0	-	0	0											
		4	03	03	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Tersedianya pakaian kerja lapangan	stel	55	48.055.000	16	6.400.000	-	-	-	0	-	0	0											
		4	03	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	3	547.505.400	7	46.786.900	1	100.574.270	-	-	1,00	79.974.705	100	80											
		4	03	05	Pendidikan dan pelatihan formal	Terciptanya pegawai terampil tentang keprotokolan	kali	3	547.505.400	7	46.786.900	1	100.574.270	-	-	1,00	79.974.705	100	80										
		4	03		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan	-	120.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0											
		4	03	02	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	dokumen	-	120.000.000	-	-	-	-	-	0	-	0	0											
		4	03		Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya lomba jurnalistik bagi insan pers	300	190.000.000	27	2	262.575.730	-	-	-	2,00	223.587.520	100	85											
		4	03	01	Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers	Adanya Pelatihan Jurnalistik bagi Insan Pers	orang kali	100	70.000.000	-	1	216.870.730	-	-	1,00	177.889.520	100	82											
		4	03	02	Lomba Jurnalistik Bagi Insan Pers	Adanya Lomba jurnalistik bagi insan pers	orang kali	200	120.000.000	27	1	45.705.000	-	-	1,00	45.698.000	100	100											
		4	03	18	Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa	Meningkatnya Kerjasama Informasi dan Media Massa	3.695	2.732.525.000	11.124	681.151.600	8.912	742.150.000	-	-	2.324	125.130.000	2.478	157.440.000	2.972,00	366.380.000	7774	648.950.000	87	87	18898	1.330.101.600	511	49	
		4	03	18	02	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Adanya Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan	kali			1	65.000.000	-	-	-	1,00	65.000.000	100	100	1	65.000.000	0	0						
		4	03	18	***	Penyebarluasan Informasi melalui Spanduk	Tersedianya Penyebarluasan Informasi Melalui Spanduk, Balho, dan Himbauan	kali	305	359.375.000	23	167.535.000	12	100.760.000	-	1	9.000.000	5	17.460.000	7,00	58.680.000	13	85.140.000	108	84	36	252.675.000	12	70
		4	03	18	***	Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers	Adanya Penyebarluasan Informasi melalui Konferensi Pers	orang kali	900	81.900.000	79	11.790.000	100	9.800.000	-	-	50	4.900.000	1,00	4.880.000	51	9.780.000	51	100	130	21.570.000	14	26	
		4	03	18	***	Penyebarluasan Informasi melalui Iklan Media Massa	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui Iklan media massa	kali	15	500.000.000	16	152.976.600	10	100.000.000	-	-	3	15.000.000	7,00	69.800.000	10	84.800.000	100	85	26	237.776.600	173	48	
		4	03	18	***	Penyebarluasan Informasi melalui Pers Release	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Melalui pers release	kali	2.475	1.791.250.000	11.006	348.850.000	8.789	466.590.000	-	2.323	116.130.000	2.420	120.080.000	2.956,00	168.020.000	7699	404.230.000	88	87	18705	753.080.000	756	42
JUMLAH					7.813	8.688.083.600	18.506	1.577.431.508	9.866	1.315.291.823	4	5.099.500	2.576	160.380.000	2.768	228.789.153	3.356,00	731.103.425	8704	1.125.372.078	88	86	27210	2.702.803.586	348	31			
Rata - rata capaian kinerja (%)																				88,22	85,56			348,27	31,11				
Predikat Kinerja																					Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah			
					BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN		1.682	3.958.752.231	732	686.546.505	59	82.038.429	5	4.328.750	45	20.560.349	-	-	2,00	51.705.750	52	76.594.849	88	93	784	763.141.354	47	19	
		4	1	3	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.324	543.926.108	549	206.062.289	58	40.038.429	5	4.328.750	45	20.560.349	-	-	1,00	9.705.750	51	34.594.849	88	86	600	240.657.138	45	44	
			3	1	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	875	4.950.000	350	1.980.000	-	-	-	-	-	0	-	0	0	350	1.980.000	40	40				
			3	1	02	Penyediaan Jasa Komunikasi/ Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Internet	bulan	36	35.400.000	24	18.000.000	12	9.600.000	3	1.968.750	2	1.293.000	-	-	5	7.933.500	42	83	29	25.933.500	81	73	
			3	1	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	unit	13	10.650.000	4	2.118.000	-	5.429.000	-	-	-	1,00	2.115.000	1	2.115.000	0	39	5	4.233.000	38	40		
			3	1	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	56	41.160.000	14	14.990.000	4	2.840.000	-	2	1.400.000	-	-	2	2.800.000	50	99	16	17.790.000	29	43		
			3	1	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	196	134.470.618	117	64.416.189	40	16.658.029	-	-	40	16.467.349	-	-	40	16.467.349	100	99	157	80.883.538	80	60	
			3	1	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	jenis	15	89.135.290	8	33.541.900	2	5.511.400	2	2.360.000	1	1.400.000	-	-	-	3	5.279.000	150	96	11	38.820.900	73	44
			3	1	11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	24	198.660.200	8	68.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	8	68.000.000	33	34		
			3	1	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	buah	109	29.500.000	24	3.016.200	-	-	-	-	-	0	-	0	0	24	3.016.200	22	10				
		4	1	2	01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55	172.276.200	18	36.553.600	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	18	36.553.600	33	21			
			2	1	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	35.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0			
			2	1	***	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	unit	54	136.676.200	18	36.553.600	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	18	36.553.600	33	27			
			2	1	***	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	10	251.958.556	4	68.722.450	1	25.000.000	-	-	-	1,00	18.514.800	1	18.514.800	0	0	5	87.237.250	50	35		
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		330	1.754.375.200	160	232.330.595	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	160	232.330.595	48	13			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18																									
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																										
				Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	hari	6	185.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang/kali	320	1.309.375.200	160	232.330.595	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik	Terlaksananya Bimbingan Teknis Inovasi Pelayanan Publik	hari	4	260.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah			23	1.257.002.172	4	69.866.968	-	-	-	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Penyusunan Petunjuk Teknis (JUKNIS) Administrasi Pembangunan	Tersusunnya Petunjuk Teknis (JUKNIS) Administrasi Pembangunan	dokumen	3	120.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			7	538.501.086	2	34.933.484	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Paoran Capaian Kinerja	laporan	4	358.501.086	2	34.933.484	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran	laporan	3	180.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Program Penataan Peraturan Perundang-undangan			3	30.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	peraturan	3	30.000.000	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Adbang																									
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH			5	799.673.637	3	176.666.537	1	42.000.000	-	-	1,00	42.000.000	Bag. Adbang																									
				Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan	laporan	5	799.673.637	3	176.666.537	1	42.000.000	-	-	1,00	42.000.000	Bag. Adbang																									
				JUMLAH			1.682	3.958.752.231	732	686.546.505	59	82.038.429	5	4.328.750	45	20.560.349	-	Bag. Adbang																								
										Rata - rata capaian kinerja (%)																																
										Predikat Kinerja																																
																		Bag. Adbang																								
										Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam										1.201	6.246.653.865	608	2.092.878.962	57	115.752.708	3	-	3	3.465.400	-	-	35,00	58.079.388	41	61.544.788	72	53	649	2.154.423.750	54	34	Bag. Perekonomian
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran		1.131	420.801.365	589	281.934.270	52	39.211.365	3	-	3	3.465.400	-	-	35,00	24.447.488	41	27.912.888	79	71	630	309.847.158	56	74	Bag. Perekonomian													
				1. Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	750	16.550.000	450	2.565.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	450	2.565.000	60	15	Bag. Perekonomian															
				2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya kelancaran tugas rutin melalui jasa komunikasi	bulan	60	35.300.000	24	24.455.450	12	6.000.000	3	-	3	1.461.000	-	-	3,00	2.948.000	9	4.409.000	75	73	33	28.864.450	55	82	Bag. Perekonomian													
				3. Penyediaan jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	tahun	5	23.000.000	2	-	-	5.030.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2	-	40	0	Bag. Perekonomian															
				4. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	7	9.500.000	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian															
				5. Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	250	145.611.365	87	86.777.400	40	21.192.615	-	-	-	2.004.400	-	-	32,00	15.399.488	32	17.403.888	80	82	119	104.181.288	48	72	Bag. Perekonomian													
				6. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan	Terpenuhihnya barang cetakan dan penggandaan/	jenis	10	64.000.000	4	57.990.000	-	6.988.750	-	-	-	-	-	-	6.100.000	0	6.100.000	0	87	4	64.090.000	40	100	Bag. Perekonomian														
				7. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	24	107.000.000	12	96.106.420	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	12	96.106.420	50	90	Bag. Perekonomian															
				8. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	25	19.840.000	10	14.040.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	10	14.040.000	40	71	Bag. Perekonomian															
													0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian															
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Aparatur		16	551.214.000	3	58.230.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	3	58.230.000	19	11	Bag. Perekonomian															
				1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Adanya Kendaraan Dinas Oprasional	unit	3	450.000.000	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian														

				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
				2. Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Oprasional	unit	13		101.214.000	3	58.230.000					-	-	-				0	-	0	0	3	58.230.000	23	58	Bag. Perekonomian
				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya iklim Investasi dan realisasi investasi		5		200.000.000	2	146.716.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2	146.716.500	40	73	Bag. Perekonomian
				1. Pemantauan, pembinaan dan pengawasan Pelaksanaan Lembaga Keuangan Mikro	Terlaksananya Pemantauan pelaksanaan dan pembinaan Lembaga Keuangan Mikro	laporan	5		200.000.000	2	146.716.500							-				0	-	0	0	2	146.716.500	40	73	Bag. Perekonomian
																						0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian
				Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan dan Mengembangkan Pengelolaan Keuangan Daerah		10		1.374.950.500	4	904.047.592	2	44.313.343	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16.068.000	0	36	4	920.115.592	40	67	Bag. Perekonomian
				1. Pengendalian Inflasi Daerah	Terkendalinya Inflasi Daerah	laporan	5		459.950.500	2	344.828.500	1	14.620.000	-	-	-	-	-	-	11.508.000	0	11.508.000	0	79	2	356.336.500	40	77	Bag. Perekonomian	
				2. Penatausahaan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya pengelolaan dan Pembinaan BUMD	laporan	5		915.000.000	2	559.219.092	1	29.693.343	-	-	-	-	-	-	4.560.000	0	4.560.000	0	15	2	563.779.092	40	62	Bag. Perekonomian	
																					0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Mengendalikan Pelaksanaan Kebijakan KDH		19		2.254.688.000	7	615.623.000	3	32.228.000	-	-	-	-	-	-	17.563.900	0	17.563.900	0	54	7	633.186.900	37	28	Bag. Perekonomian	
				Monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg di Kabupaten Karo	Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan Gas LPG 3 Kg	laporan	5		470.345.000	2	200.000.000	1	11.343.000	-	-	-	-	-	-	9.154.900	0	9.154.900	0	81	2	209.154.900	40	44	Bag. Perekonomian	
				Monitoring/Pengawasan bahan bakar Minyak Tertentu dan BBM Khusus Penugasan	Adanya laporan pelaksanaan monitoring/Pengawasan peredaran bahan bakar	laporan	4		200.000.000	1	100.000.000	1	10.295.000	-	-	-	-	-	-	4.249.000	0	4.249.000	0	41	1	104.249.000	25	52	Bag. Perekonomian	
				Monitoring/ Pengawasan dan sosialisasi distribusi Pupuk bersubsidi dan Pestisida	Adalanya laporan pelaksanaan monitoring/pengawasan dan sosialisasi distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida	laporan	5		481.395.000	2	158.000.000	1	10.590.000	-	-	-	-	-	-	4.160.000	0	4.160.000	0	39	2	162.160.000	40	34	Bag. Perekonomian	
				Monitoring Pendistribusian Rastra dan BPNT	Adanya laporan operasionalisasi dan monitoring pendistribusian Rastra dan BPNT	laporan	5		1.102.948.000	2	157.623.000			-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2	157.623.000	40	14	Bag. Perekonomian	
																					0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
				Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan		4		400.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
				Pembinaan dan Pengawasan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terkendalinya Energi dan Sumber Daya Mineral	laporan	4		400.000.000	-	-	-	-								0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
																					0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan pemasaran Pariwisata		4		210.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
				Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung Pariwisata	laporan	4		210.000.000	-	-	-	-								0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
																					0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
				Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang-Undangan		4		290.000.000	2	73.267.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	2	73.267.000	50	25	Bag. Perekonomian	
				Penyusunan Produk Hukum daerah	Adanya Produk Hukum Daerah	peraturan	4		290.000.000	2	73.267.000										0	-	0	0	2	73.267.000	50	25	Bag. Perekonomian	
																					0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian	
				Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan komperhensif usaha kecil Menengah	Berkembangnya Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		4		270.000.000	1	13.060.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	13.060.600	25	5	Bag. Perekonomian	
				Fasilitas Pengembangan Sarana hasil Produksi	Terfasilitasinya Pengembangan sarana dan Promosi hasil Produksi	laporan	4		270.000.000	1	13.060.600										0	-	0	0	1	13.060.600	25	5	Bag. Perekonomian	
																					0	-	0	0	0	-	# DIV/0!	# DIV/0!	Bag. Perekonomian	

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18						
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
						Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah	Berkembangnya Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah			4	275.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian							
						Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya koordinasi pemanfaatan fasilitas Pemerintah untuk Usaha kecil dan menengah dan koperasi	laporan		4	275.000.000	-	-											0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Perekonomian								
						JUMLAH				1.201	6.246.653.865	608	2.092.878.962	57	115.752.708	3	-	3	3.465.400	-	-	35,00	58.079.388	41	61.544.788	72	53	649	2.154.423.750	54	34	Bag. Perekonomian								
														Rata - rata capaian kinerja (%)																				71,93	53,17			54	34,49	Bag. Perekonomian
														Predikat Kinerja																								54	Sangat rendah	Bag. Perekonomian
						BAGIAN ADMINISTRASI		KESEJAHTERAAN RAKYAT				1.502	14.139.448.000	223	864.713.300	46	1.038.070.084	29	57.234.000	1	74.075.000	2	32.992.800	1,00	3.174.500	33	167.476.300	72	16	256	1.032.189.600	17	7	Bag. Kesra						
						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%		1.254	378.500.000	208	23.583.850	30	17.277.104	28	12.764.000	-	-	1	-	1,00	3.174.500	30	15.938.500	100	92	238	39.522.350	19	10	Bag. Kesra								
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah		875	4.500.000	175	900.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	175	900.000	20	20	Bag. Kesra								
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Perizinan Kendaraan Dinas	unit		9	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit		56	28.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis		171	106.000.000	31	15.251.850	28	10.611.604	26	9.989.000	-	-	-	-	-	-	-	26	9.989.000	93	94	57	25.240.850	33	24	Bag. Kesra							
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis		10	65.000.000	2	7.432.000	2	6.665.500	2	2.775.000	-	-	1	-	1,00	3.174.500	4	5.949.500	200	89	6	13.381.500	60	21	Bag. Kesra								
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit		13	148.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kali		120	18.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%		12	256.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Roda dua dan Roda Empat	unit		12	256.560.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Meningkatnya Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	%		8	306.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Terlaksananya Peningkatan Keimanan Dan Ketaqwaan Kepemudaan	kali		8	306.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%		13	690.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rekreasi	Terlaksananya Peningkatan Kesehatan Jasmani Dan Rekreasi	kali		13	690.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra								
						Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat	%		91	5.627.914.000	15	841.129.450	16	1.020.792.980	1	44.470.000	1	74.075.000	1	32.992.800	-	-	-	3	151.537.800	19	15	18	992.667.250	20	18	Bag. Kesra							
						Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Terlaksananya peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	kali		23	2.925.125.000	5	410.843.100	7	647.050.000	-	-	1	74.075.000	-	-	-	-	1	74.075.000	14	11	6	484.918.100	26	17	Bag. Kesra								
						Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali		6	1.170.000.000	1	273.275.550	1	251.955.980	-	-	-	-	1	32.992.800	-	-	-	1	32.992.800	100	13	2	306.268.350	33	26	Bag. Kesra							
						Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anti Narkoba)	kali		6	110.000.000	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	-	17	0	Bag. Kesra								
						Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan)	kali		6	130.000.000	1	16.201.300	1	18.021.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	16.201.300	17	12	Bag. Kesra								
						Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Sumpah Pemuda)	kali		6	120.000.000	1	14.701.300	1	16.901.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	14.701.300	17	12	Bag. Kesra								
						Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olahraga Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Olah Raga Nasional)	kali		6	110.000.000	1	10.021.300	1	13.331.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	10.021.300	17	9	Bag. Kesra								

2		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Pendidikan Nasional)	kali	6	110.000.000	1	9.716.700	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	9.716.700	17	9	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kesaktian Pancasila)	kali	6	110.000.000	1	10.077.600	1	14.151.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	10.077.600	17	9	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Kebangkitan Nasional)	kali	6	130.000.000	1	15.246.700	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	15.246.700	17	12	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Nusantara)	kali	8	179.000.000	1	39.846.500	1	13.713.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1	39.846.500	13	22	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Anak)	kali	6	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Kesra	
					Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hari Legiun Veteran Republik Indonesia)	kali	6	358.789.000	1	41.199.400	1	45.670.000	1	44.470.000	-	-	-	-	-	-	1	44.470.000	100	97	2	85.669.400	33	24	Bag. Kesra	
JUMLAH							1.502	14.139.448.000	223	864.713.300	46	1.038.070.084	29	57.234.000	1	74.075.000	2	32.992.800	1.00	3.174.500	33	167.476.300	72	16	256	1.032.189.600	17	7	Bag. Kesra		
Rata - rata capaian kinerja (%)										Predikat Kinerja																					

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
				Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan operasional lapangan	unit	600	440.000.000	300	88.000.000			0	-	0	0	300	88.000.000	50	20	Bag. Umum								
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	unit	15	2.036.380.000	9	1.229.367.400	3	455.000.000	69.789.060	3,00	317.629.640	3	387.418.700	100	85	12	1.616.786.100	80	79	Bag. Umum					
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	unit	5	340.000.000	3	93.496.900	1	115.000.000		1,00	80.775.200	1	80.775.200	100	70	4	174.272.100	80	51	Bag. Umum					
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	5	2.161.725.000	3	1.143.936.400	1	640.000.000	152.525.690	1,00	404.457.550	1	556.983.240	100	87	4	1.700.919.640	80	79	Bag. Umum					
				Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	unit	20	878.000.000	12	267.199.067	4	328.360.000	138.938.858	4,00	109.285.638	4	248.224.496	100	76	16	515.423.563	80	59	Bag. Umum					
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	135	3.250.000.000	56	499.919.285	17	532.306.400		17,00	219.756.317	17	219.756.317	100	41	73	719.675.602	54	22	Bag. Umum					
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya perlengkapan rumah jabatan/ dinas	unit	15	120.000.000	6	-	3	150.000.000		10.434.600	3,00	49.405.080	3	59.839.680	100	40	9	59.839.680	60	50	Bag. Umum				
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor	unit	5	1.090.000.000	3	236.629.504	1	368.000.000		28.242.800	1,00	225.986.064	1	254.228.864	100	69	4	490.858.368	80	45	Bag. Umum				
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas	Terpeliharanya peralatan rumah jabatan/ dinas	unit	15	348.000.000	9	97.521.040						0	-	0	0	9	97.521.040	60	28	Bag. Umum					
				Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	unit	5	500.000.000	2	44.019.250						0	-	0	0	2	44.019.250	40	9	Bag. Umum					
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan	Terpeliharanya rumah jabatan	tahun	5	1.100.000.000	2	635.469.300						0	-	0	0	2	635.469.300	40	58	Bag. Umum					
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit	2	600.000.000								0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Umum					
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Mobil Jabatan	Terpeliharanya mobil jabatan	unit	10	400.000.000								0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Umum					
				Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	25	1.000.000.000								0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Umum					
				Program Peningkatan Disiplin Aparatur			1.600	974.800.000	840	655.215.600	160	184.400.000	-	-	-	-	160,00	184.308.200	160	184.308.200	100	100	1000	839.523.800	63	86	Bag. Umum		
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	1.600	974.800.000	840	655.215.600	160	184.400.000		160,00	184.308.200	160	184.308.200	100	100	1000	839.523.800	63	86	Bag. Umum					
				Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah			360	2.120.000.000	87	579.546.488	72	280.750.000	-	-	4	88.665.000	-	40,00	37.464.000	44	126.129.000	61	45	131	705.675.488	36	33	Bag. Umum	
				Dialog/ Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/ Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan	Terlaksananya dialog/ audiensi dengan tokoh tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan	bulan	60	250.000.000	24	453.096.000	12	193.750.000		4	88.665.000		11.250.000	4	99.915.000	33	52	28	553.011.000	47	221	Bag. Umum			
				Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat negara/ departemen/ lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri	Terlaksananya Kunjungan Kerja pejabat negara	bulan	60	430.000.000	13	33.763.500	12	7.000.000				0	-	0	0	13	33.763.500	22	8	Bag. Umum					
				Rapat Koordinasi Unsur Muspida	Terlaksananya Rapat Koordinasi Unsur Muspida	bulan	60	350.000.000	12		12					0	-	0	0	12	-	20	0	Bag. Umum					
				Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintahan Daerah	Terlaksananya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah	bulan	60	200.000.000	12	8.451.300	12	30.000.000			9.321.000	0	9.321.000	0	31	12	17.772.300	20	9	Bag. Umum					
				Kunjungan Kerja Inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja/ inspeksi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	bulan	60	440.000.000	14	51.571.688	12	40.000.000			9.333.000	0	9.333.000	0	23	14	60.904.688	23	14	Bag. Umum					
				Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lainnya	Terlaksananya koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya	bulan	60	450.000.000	12	32.664.000	12	10.000.000			7.560.000	0	7.560.000	0	76	12	40.224.000	20	9	Bag. Umum					
JUMLAH						262.184	58.140.418.400	183.521	30.916.186.871	5.636	8.398.584.002	-	-	519	1.082.933.223	1.718	1.559.909.860	2.811,00	4.155.675.960	5048	6.798.519.043	90	81	188569	37.714.705.914	72	65	Bag. Umum	
					Rata - rata capaian kinerja (%)														89,57	80,95		71,92	64,87	Bag. Umum					
					Predikat Kinerja																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sedang	Sedang	Bag. Umum
BAGIAN TATA USAHA						3.841	4.188.573.425	745	1.554.805.230	735	762.410.800	-	53.130.000	-	53.810.230	97	166.751.100	630,00	443.448.420	727	717.139.750	99	94	1.472	2.271.944.980	38	54	Bag. TU	
				Program Pelayanan administrasi	Terlaksananya Administrasi		3.826	3.985.355.425	730	1.461.162.630	735	762.410.800	-	53.130.000	-	53.810.230	97	166.751.100	630,00	443.448.420	727	717.139.750	99	94	1457	2.178.302.380	38	55	Bag. TU
				Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Buah	3.000	435.000.000	600	229.727.431	600	63.000.000	0		990.000	-	31.092.200	600,00	25.292.800	600	57.375.000	100	91	1200	287.102.431	40	66	Bag. TU	
				Penyediaan jasa komunikasi, ada dan listrik	Tersedianya jasa Komunikasi, SDA dan listrik	Bulan	72	60.000.000	12	27.174.955	12	12.000.000	0	-	2.515.500	-	4.957.500	12,00	2.442.000	12	9.915.000	100	83	24	37.089.955	33	62	Bag. TU	

[illegible]

1	2	3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					Penyusunan Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan	Tersusunnya buku Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan	dokumen	10	60.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Penyebarluasan Informasi LPPD	Terlaksananya penyebarluasan Informasi LPPD	sistem	1	60.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Penyediaan dan Pengembangan LPPD	Tersedianya LPPD	kali	1	70.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD	Terlaksananya Bimbingan teknis LPPD	kali	1	188.867.100	1	188.867.100											0	-	0	0	1	188.867.100	100	100	Bag. Otda			
					Program Pelayanan Kedisnasan KDH/WKDH			28	500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	Terfasilitasinya Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara /Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Luar Negeri	kali	15	220.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Facilitasi Asosiasi Pemerintah Kabupaten	Terfasilitasi nya Asosiasi Pemerintah Kabupaten	kali	1	60.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	kali	12	220.000.000	-												0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Program Penataan Peraturan Perundang-Undanan			5	675.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya Produk Hukum Daerah	peraturan	2	75.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	kali	3	600.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
																						0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Program Penataan Daerah Otonomi Baru			5	1.130.054.500	2	397.237.460	2	673.413.900	1	631.784.800	-	-	-	-	1,00	23.230.910	2	655.015.710	100	97	4	1.052.253.170	80	93	Bag. Otda			
																						0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Facilitasi Penyiapan Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	Tersedianya Data dan Informasi Pendukung Proses Pemekaran Daerah	kali	1	75.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya Seminar Penetapan Hari Jadi Kabupaten Karo	kali	1	120.509.500	1	372.692.460	1	641.544.900	1	631.784.800							1	631.784.800	100	98	2	1.004.477.260	200	834	Bag. Otda			
					Peringatan Hari Otonomi Daerah	Terlaksananya Peringatan Hari Otonomi Daerah	kali	1	60.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Peringatan Hari jadi Kabupaten Karo	Terlaksananya Peringatan Hari jadi Kabupaten Karo	kali	1	850.000.000													0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Otda			
					Facilitasi Kerjasama Daerah	TerFasilitasinya Kerjasama Daerah	tahun	1	24.545.000	1	24.545.000	1	31.869.000							1,00	23.230.910	1	23.230.910	100	73	2	47.775.910	200	195	Bag. Otda			
JUMLAH								633	3.197.071.600	363	838.427.742	130	859.584.074	1	631.784.800	-	-	-	20.471.074	117,00	170.168.696	118	822.424.570	91	96	481	1.660.852.312	76	52	Bag. Otda			
Rata - rata capaian kinerja (%)																																	
Predikat Kinerja																																	
BAGIAN ORGANISASI								1	200.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	#DIV/0!	#DIV/0!	0	-	0	0	Bag. Organisasi				
		4	01.3	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			732	242.015.159	677	267.987.945	59	20.870.877	-	-	42	11.840.893	5	3.237.800	8,00	5.112.000	55	20.190.693	93	97	732	288.178.638	100	119	Bag. Organisasi			
			4	01.3	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa surat menyurat	lembar	450	1.215.000	440	2.370.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	440	2.370.000	98	195	Bag. Organisasi			
				4	01.3	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	36.000.000	12	13.621.721	12	7.200.000	-	-	2	1.397.813	4	2.388.000	5,00	3.012.000	11	6.797.813	92	94	23	20.419.534	192	57	Bag. Organisasi
					4	01.3	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	unit	10	9.600.000	10	6.000.000	3	2.150.000	-	-	-	3,00	2.100.000	3	2.100.000	100	98	13	8.100.000	130	84	Bag. Organisasi		
					4	01.3	01	###	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	150	42.000.000	127	54.726.954	36	8.772.585	-	-	36	8.691.080	-	36	8.691.080	100	99	163	63.418.034	109	151	Bag. Organisasi		
					4	01.3	01	###	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jenis	10	38.640.000	10	21.320.050	8	2.748.292	-	-	4	1.752.000	1	849.800	5	2.601.800	63	95	15	23.921.850	150	62	Bag. Organisasi	
									Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	17	36.765.500	17	151.552.520	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	17	151.552.520	100	412	Bag. Organisasi			
									Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jenis	75	38.016.000	55	8.196.700	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	55	8.196.700	73	22	Bag. Organisasi			
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1	32.678.659	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Bag. Organisasi			
									Penyediaan jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	7	7.100.000	6	10.200.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	6	10.200.000	86	144	Bag. Organisasi			
			4	01.3	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		12	1.362.296.220	10	78.605.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	10	78.605.000	83	6	Bag. Organisasi			

			3		4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18											
							K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.										
		4	01.3	02	###	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	Unit	10	720.495.985	10	78.605.000	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Unit	1	636.600.235	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Organisasi										
		4	01.3	02		Pemeliharaan rutin kendaraan bermotor	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	Unit	1	5.200.000	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Organisasi										
		4	01.3	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		177	470.000.000	75	231.495.879	-	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal	2	40.000.000								0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Bimbingan teknis Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimtek peraturan perundang undangan	orang	75	210.000.000	75	231.495.879					0	-	0	0	Bag. Organisasi										
		4	01.3	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang undangan	orang	100	220.000.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
		4	01.3	21		Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		81	1.290.000.000	48	150.642.011	2	50.320.604	-	-	-	2,00	44.414.000	2	44.414.000	Bag. Organisasi										
						Pembinaan dan Evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi Perangkat Daerah Kabupaten Karo	Laporan	-	-	1	26.751.896				1,00	23.966.000	1	23.966.000	0	0	Bag. Organisasi									
						Evaluasi UPTD/ B Lingkup Pemerintah Kabupaten Karo	Terlaksananya evaluasi UPTD/ B lingkup Pemerintah Kabupaten Karo	Laporan	15	200.000.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
		4	01.3	21	###	Penyusunan Produk Hukum Daerah	Tersusunnya produk hukum daerah	Laporan	4	400.000.000	1	37.317.140	1	23.568.708		1,00	20.448.000	1	20.448.000	100	87	Bag. Organisasi									
						Penyusunan Standar Operasional prosedur Administrasi pemerintahan	Tersusunnya standar operasional prosedur administrasi pemerintahan	Laporan	46	320.000.000	46	71.607.000					0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Penyusunan Penerapan Standar Pelayanan Minimal	Tersusunnya standar pelayanan minimal	Laporan	15	300.000.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan di Bidang Ketatalaksanaan	Terlaksananya monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang ketatalaksanaan	Laporan	1	70.000.000	1	41.717.871					0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		55	119.790.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Penyusunan Evaluasi Penerapan Perbup Pakaian Dinas PNS dan Perbup Tata Naskah Dinas	Tersusunnya evaluasi penerapan Perbup Pakaian Dinas PNS dan Perbup Tata Naskah Dinas	Laporan	1	39.790.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Pengukuran IKM SKPD	Terlaksananya pengukuran IKM SKPD	Laporan	4	20.000.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Pengkajian/ Rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Melaksanakan Tugas Wewenang dan Kewajibannya	Terlaksananya pengkajian/ rekomendasi Staf Ahli bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah	Laporan	4	20.000.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Pelaksanaan dan Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo	Terlaksananya evaluasi roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Karo	Laporan	46	40.000.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	128.171.952	2	110.553.728	1	74.245.532	-	-	1	28.285.000	-	4.280.000	-	32.565.000	100	44	3	143.118.728	300	112	Bag. Organisasi			
						Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Laporan	1	128.171.952	2	110.553.728	1	74.245.532		1	28.285.000	4.280.000		1	32.565.000	100	44	3	143.118.728	300	112	Bag. Organisasi			
						Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		2	425.920.000	1	35.773.210	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	Bag. Organisasi									
						Penyusunan dan Penetapan Formasi Jabatan Fungsional dan ABK	Tersusunnya formasi jabatan fungsional dan ABK	Laporan	1	225.920.000	1	35.773.210					0	-	0	0	Bag. Organisasi										
						Penyusunan Instrumen analisis jabatan ASN	Tersusunnya instrumen analisis jabatan ASN	Laporan	1	200.000.000							0	-	0	0	Bag. Organisasi										
JUMLAH									1.060	4.038.193.331	813	875.057.773	62	145.437.013	-	-	43	40.125.893	5	7.517.800	10,00	49.526.000	58	97.169.693	94	67	871	972.227.466	82	24	Bag. Organisasi
Rata - rata capaian kinerja (%)																							93,55	66,81			82,17	24,08	Bag. Organisasi		

1	2	3	4			5	6	K	7	K	8	K	9	K	10	K	11	K	12	K	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18				
							Predikat Kinerja																				Sangat Tinggi	Sedang			Tinggi	Sangat Rendah	Bag. Organisasi	

		3			4	5	6	K	7 Rp.	K	8 Rp.	K	9 Rp.	K	10 Rp.	K	11 Rp.	K	12 Rp.	K	13 Rp.	14=(9+10+11+12) K Rp		15=13/8x100% K Rp		16=(7+13) K Rp		17=15/6x100% K Rp		18
					Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 OB	4	25.708.750	2	13.215.000	1	20.567.000	2	1.215.000		10.075.000		3.645.000	1,00	5.632.000	3	20.567.000	300	100	5	33.782.000	125	131	Inspektorat
					Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	10 unit	50	7.090.000	50	7.090.000	20	21.000.000		0					20,00	21.000.000	20	21.000.000	100	100	70	28.090.000	140	396	Inspektorat
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Penyediaan Alat Tulis Kantor	20 jenis	45	26.363.000	48	26.363.000	45	46.525.369		0	20	20.710.000			25,00	25.814.800	45	46.524.800	100	100	93	72.887.800	207	276	Inspektorat
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	2 jenis	20	10.457.400	20	10.457.400	10	14.624.200		0	2	4.038.700			8,00	10.585.500	10	14.624.200	100	100	30	25.081.600	150	240	Inspektorat
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	2 jenis	4	2.250.000	4	2.160.000	2	1.800.000		0	1	900.000		300.000	1,00	600.000	2	1.800.000	100	100	6	3.960.000	150	176	Inspektorat
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TersedianyaPenyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3 unit	3				3	154.555.800						3,00	152.900.000	3	152.900.000	100	99	3	152.900.000	100	# DIV/0!	Inspektorat	
					Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	288	10.542.000	200	10.542.000	100	4.800.000		0				100,00	4.800.000	100	4.800.000	100	100	300	15.342.000	104	146	Inspektorat	
					Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	15 orang, hari, kali	60	200.681.550	60	89.999.762	30	160.545.240	4	0	10	48.224.950		11.041.900	10,00	61.037.000	24	120.303.850	80	75	84	210.303.612	140	105	Inspektorat
					Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	Tersedianya Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Perkantoran	9 OB	12	182.775.000	12	94.800.000	7	146.220.000	3	8.855.000		44.275.000		37.950.000	4,00	52.587.586	7	143.667.586	100	98	19	238.467.586	158	130	Inspektorat
					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			-	-	-	-	5	178.804.000	-	-	-	-	-	-	5,00	178.753.000	5	178.753.000	100	100	5	178.753.000	0	0	Inspektorat
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya engadaan Peralatan Gedung Kantor						1	97.500.000						1,00	97.500.000	1	97.500.000	100	100	1	97.500.000	0	0	Inspektorat	
					Pemeriharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	Tersedianya Pemeriharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional						4	81.304.000						4,00	81.253.000	4	81.253.000	100	100	4	81.253.000	0	0	Inspektorat	
					Program Peningkatan Disiplin Aparatur			-	-	-	-	86	24.700.000	-	-	-	-	-	-	-	24.700.000	0	24.700.000	0	100	0	24.700.000	0	0	Inspektorat
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya						86	24.700.000							24.700.000	0	24.700.000	0	100	0	24.700.000	0	0	Inspektorat	
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		80	21.781.250	80	9.256.000	40	17425000	0	0	0	0	0	-	40,00	17.230.000	40	17.230.000	100	99	120	26.486.000	150	122	Inspektorat
					Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	Meningkatnya Operasionalisasi Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	44 persen	80	21.781.250	80	9.256.000	40	17.425.000		0				40,00	17.230.000	40	17.230.000	100	99	120	26.486.000	150	122	Inspektorat	
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH		138	1.810.383.762	149	1.515.131.312	113	1.789.489.350	29	158.908.500	21	63.714.950	1	452.774.950	58,00	630.004.000	109	1.305.402.400	96	73	258	2.820.533.712	187	156	Inspektorat
					Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	Meningkatnya Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	3 kasus	30	45.390.000	27	45.390.000	30	12.920.000	15	7.420.000	15	5.040.000			300.000	30	12.760.000	100	99	57	58.150.000	190	128	Inspektorat	
					Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Meningkatnya Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	2 kali	40	458.178.750	40	162.926.300	20	366.543.000	5	38.442.200	5	52.749.200		37.409.300	8,00	188.292.500	18	316.893.200	90	86	58	479.819.500	145	105	Inspektorat
					Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Meningkatnya Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	4 kali	8	104.614.312	8	104.614.312	4	35.070.000	1	13.074.300	1	5.925.750	1	15.257.350			3	34.257.400	75	98	11	138.871.712	138	133	Inspektorat
					Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	Meningkatnya Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	1 laporan	2	4.410.000	2	4.410.000	1	0		0					0	-	0	0	0	2	4.410.000	100	100	Inspektorat	
					Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD	Terlaksananya Pemeriksaan reguler terhadap seluruh SKPD	32 LHA	58	1.107.554.300	72	1.107.554.300	58	1.204.914.000	8	99.972.000		-		400.108.300	50,00	321.461.500	58	821.541.800	100	68	130	1.929.096.100	224	174	Inspektorat
					Tim Saber Pungli	Terlaksananya Tim Saber Pungli	3 kali	0	90.236.400	0	90.236.400	0	170.042.350		0					119.950.000	0	119.950.000	0	71	0	210.186.400	# DIV/0!	233	Inspektorat	
					Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	TerlaksananyaProgram peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan		30	139.100.729	30	139.100.729	20	95421600	0	0	0	0	0	-	20,00	90.703.000	20	90.703.000	100	95	50	229.803.729	167	165	Inspektorat

3						4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18							
						Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	4 orang	30	139.100.729	30	139.100.729	20	95.421.600	0					20,00	90.703.000	20	90.703.000	100	95	50	229.803.729	167	165	Inspektorat								
JUMLAH									1005	4.533.944.132	938	3.698.983.123	762	4.896.793.469	70	330.224.463	75	264.740.312	2	959.161.572	433.00	2.316.480.991	580	3.870.607.338	76	79	1518	7.569.590.461	151	167	Inspektorat							
Rata - rata capaian kinerja (%)																																						
Predikat Kinerja																																						
						BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																																
		4	03	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			5.939.864.369		3.039.585.471		785.927.947		122.510.990		29.624.738		108.045.435		474.764.368		734.945.488				3.774.530.959				Bappeda						
		4	03	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	lembar	1.299	21.935.800	716	4.719.000	12	1.500.000	3	750.000	0	0	7	750.000	2,00	-	12	1.500.000	100	100	728	6.219.000	47	28	Bappeda							
		4	03	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	bulan	60	172.648.000	36	40.335.820	12	24.000.000	3	3.406.000	3	1.100.500	3	5.802.047	3,00	3.301.500	12	13.610.047	100	57	48	53.945.867	80	31	Bappeda							
		4	03	01	03	Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	51	88.500.000	27	36.069.400	8	15.510.000	0	0	0	0	-	8,00	12.155.000	8	12.155.000	100	78	35	48.224.400	69	54	Bappeda								
		4	03	01	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	92	22.155.000		7.861.027	12	7.800.000	0	0	0	0	-	12,00	4.274.085	0	4.274.085	100	55	0	12.135.112	0	0	Bappeda								
		4	03	01	05	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang	24	1.060.400.000	69	237.274.720	15	173.357.150	1	1.120.000	3	4.740.000	4	9.540.000	7,00	154.508.158	15	169.908.158	100	100	84	407.182.878	350	38	Bappeda							
		4	03	01	06	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	bulan	12	56.538.000	21	37.518.280	12	14.930.340	3	3.645.000	3	1.215.000	3	4.860.000	3,00	5.141.465	12	14.861.465	100	100	33	52.379.745	275	93	Bappeda							
		4	03	01	07	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	48	256.460.000	88	141.932.829	55	39.439.800	10	8.634.383	30	4.029.238	10	11.746.839	5,00	12.706.580	55	37.117.040	100	94	143	179.049.869	298	70	Bappeda							
		4	03	01	08	Penyediaan Barang dan Cetakn Dan Penggandaan	Tersedianya Barang Dan Cetakn Dan Penggandaan	jenis	30	221.114.000	19	1.776.500	16	26.209.632	3	4.239.011	0	0	4	2.124.355	9,00	16.305.500	16	22.668.866	100	86	35	24.445.366	117	11	Bappeda							
		4	03	01	09	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jenis	30	62.250.533	5	496.500	3	993.628	0	0	0	0	-	3,00	831.664	3	831.664	100	84	8	1.328.164	27	2	Bappeda								
		4	03	01	10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	63	405.600.270	9	416.581.200	5	84.169.763		0	0	0	0	-	5,00	82.720.000	5	82.720.000	100	98	14	499.301.200	22	123	Bappeda							
		4	03	01	11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	unit	35	234.086.800	43	15.792.660	20	12.259.994	8	4.935.684	0	0	5	4.800.465	5,00	1.500.000	18	11.236.149	90	92	61	27.028.809	174	12	Bappeda							
		4	03	01	12	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	jenis	13	89.360.245	31	19.190.000		0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	31	19.190.000	238	21	Bappeda								
		4	03	01	13	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	kali	135	85.000.000	23	4.224.000		0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	23	4.224.000	17	5	Bappeda								
		4	03	01	14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang	12	2.676.225.721	22	1.856.500.225	12	294.258.000	3	73.010.912	1	10.950.000	5	40.237.500	3,00	148.430.416	12	272.628.828	100	93	34	2.129.129.053	283	80	Bappeda							
		4	03	01	15	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang	8	287.590.000	19	219.313.310	6	91.499.640	1	22.770.000	2	7.590.000	2	28.184.186	1,00	32.890.000	6	91.434.186	100	100	25	310.747.496	313	108	Bappeda							
		4	03	01	16	Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Gedung Kantor	unit	1	200.000.000	0	-				0	0	0	0	-	-	0	-		0		-	0	0	Bappeda								
		4	03	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur			485.241.934		281.445.000		94.696.344		0	0	0	-	-	81.568.616	0	81.568.616				281.445.000			Bappeda								
		4	03	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/ Operasional	0	0	-	0	-				0	0	0	-	-	0	-		0		0		0	0	Bappeda								
		4	03	02	06	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	1	115.000.000	1	214.800.000				0	0	0	-	-	0	-	0	0	1	214.800.000	100	187	Bappeda									
		4	03	02	07	Pengadaan Mebeleur	Adanya Pengadaan Mebeleur	unit	35	175.173.049	7	66.645.000				0	0	0	-	-	0	-	0	0	7	66.645.000	20	38	Bappeda									
					22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor	0	0	-	0	-				0	0	0	-	-	0	-					0	0	Bappeda									
		4	03	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	unit	3	195.068.885	0	-	12	94.696.344		0	0	0	-	-	81.568.616	0	81.568.616					0	0	Bappeda								
		4	03	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			223.629.813		90.943.000		26.208.000		0	0	0	-	-	25.350.000	0	25.350.000			0	116.293.000	0	52	Bappeda								
		4	03	03	1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin absensi	unit	1	10.000.000	0	-				0	0	0	-	-	0	-								Bappeda								
		4	03	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stell	471	213.629.813	139	90.943.000	39	26.208.000		0	0	0	-	-	25.350.000	0	25.350.000	0	0	139	116.293.000	30	54	Bappeda								
		4	03	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				671.561.000		53.408.050		0		0	0	0	-	-	0	-				53.408.050	0	0	Bappeda									
		4	03	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	600	300.000.000		53.408.050				0	0	0	-	-	0	-				53.408.050	0	0	Bappeda									

		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
		4	03	06	xx			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
		4	03	06	xx	Pelatihan E-Planning	Terlaksananya Pelatihan E-Planning	orang	60		244.100.000	0	-			0	0	0	-			0	-					0	0	Bappeda		
		4	03	06	xx	Sosialisasi Penerapan E-Planning	Terlaksananya Sosialisasi Penerapan E-Planning	0	0		-	0	-			0	0	0	-			0	-					0	0	Bappeda		
		4	03	06		Aanalisis Pengaruh TPP Terhadap Kinerja Pegawai	Terlaksananya Analisis Pengaruh TPP Terhadap Kinerja Pegawai	dokumen	1		41.051.000	0	-			0	0	0	-			0	-					0	0	Bappeda		
		4	03	06		Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah	orang	250		86.410.000	0	-			0	0	0	-			0	-					0	0	Bappeda		
		4	06	15		Program Pengembangan Data/Informasi					9.157.650.000		1.323.390.561		354.075.444		23.542.379		7.258.142		23.254.000		185.986.054		240.040.575			1.563.431.136		Bappeda		
		4	06	15	06	Penyusunan Profil Daerah	Tersusunnya Profil Daerah	dokumen	1		550.000.000	0	-										-							Bappeda		
		4	06	15	06	Publikasi Kabupaten Karo dalam Angka	Tersedianya Buku Kabupaten Karo Dalam Angka	buku	750		660.000.000	2	49.874.500	1	0	0	0	0	-			0	-	0	0	2	49.874.500	0	8	Bappeda		
		4	06	15		Publikasi Buku Inflasi	Jumlah Dokumen	dokumen	1		33.000.000	0	-			0	0	0	-				-					0	0	Bappeda		
		4	06	15	8	Penyusunan Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Tersedianya Dokumen Analisa IPM	dokumen	1		73.500.000	0	-			0	0	0	-				-					0	0	Bappeda		
		4	06	15		Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terlaksananya Publikasi Analisa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	0	0		33.000.000	0	-			0	0	0	-				-					0	0	Bappeda		
		4	06	15	09	Publikasi Kecamatan Dalam Angka	Tersedianya Buku Kecamatan Dalam Angka	dokumen	85		1.063.000.000	51	84.524.050	17	0	0	0	0	-			0	-	0	0	51	84.524.050	60	8	Bappeda		
		4	06	15	10	Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra)	Tersedianya dokumen Inkesra	0	0		57.000.000	0	8.400.000			0	0	0	0	-			-		0	8.400.000	0	0	Bappeda			
		4	06	15		Penyusunan Data Terpilah gender dan anak	Jumlah Dokumen	0	0		1.066.000.000	0	-			0	0	0	0	-			-				0	0	Bappeda			
		4	06	15	11	Publikasi Buku PDRB	Tersedianya Buku PDRB	dokumen	1		668.000.000	2	31.970.000	1	0	0	0	0	-			0	-	0	0	2	31.970.000	200	5	Bappeda		
		4	06	15	15	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Adanya Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	dokumen	1		530.000.000	2	137.251.710	1	98.093.334	0	3.604.000	0	1.568.142	0	-	1,00	80.237.854	1	85.409.996	100	87	3	222.661.706	300	42	Bappeda
		4	06	15	26	Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning)	Diterapkannya dan diupdatenya Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang Terintegrasi (e-planning)	sistem	1		3.615.000.000	2	1.011.370.301	1	255.982.110	0	19.938.379	0	5.690.000	0	23.254.000	1,00	105.748.200	1	154.630.579	100	60	3	1.166.000.880	300	32	Bappeda
		4	06	15		Kajian Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA	Terlaksananya Kajian Strategi Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Mencerdaskan Siswa SD, SMP dan SMA	kajian	1		100.000.000	0	-			0	0	0	-				-				0	0	Bappeda			
		4	06	15		Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat	Terlaksananya Kajian Pengelolaan Sampah yang tepat	kajian	1		396.150.000	0	-			0		0	0	-			-				0	0	Bappeda			
		4	06	15		Kajian Sistem Transportasi Perkotaan	Terlaksananya Kajian Sistem Transportasi Perkotaan	kajian	1		196.500.000	0	-			0	0	0	-			-					0	0	Bappeda			
		4	06	15		Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	Terlaksananya Pengukuran Indeks Inovasi Daerah	dokumen	1		100.000.000	0	-			0	0	0	-			-					0	0	Bappeda			
		4	06	15		Penyusunan Indikator Sosial Masyarakat	Tersusunnya Indikator Sosial Masyarakat	dokumen	1		16.500.000	0	-					0	-			-					0	0	Bappeda			
		4	03	16		Program Kerjasama Pembangunan	Meningkatnya Kerjasama Pembangunan				4.273.570.000		2.164.237.005		217.281.170		14.039.749		9.585.100		75.953.475		99.578.324				1.963.494.962		Bappeda			
		4	03	16	06	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Kawasan Danau Toba	bulan	60		611.270.000	0	300.320.367			0	0	0	-			-		0	300.320.367	0	0	Bappeda				
		4	03	16	10	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	rakor	27		727.000.000	27	697.697.180	3	101.994.950	0	0	0	1	1.325.000	2,00	12.109.050	3	13.434.050	100	13	30	711.131.230	111	98	Bappeda	
		4	03	16		Penyusunan Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan	Tersusunnya Grand Design Pembangunan Wilayah Kecamatan	dokumen	2		145.000.000	0	-			0	0	0	-			-					0	0	Bappeda			
		4	03	16	18	Pembinaan Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan/Sanitasi	Terbinanya Administrasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan /Sanitasi	bulan	72		863.000.000	34	276.126.027	12	66.619.380	3	7.818.781	0	0	6	7.211.100	3,00	32.003.425	12	47.033.306	100	71	46	323.159.333	64	37	Bappeda
		4	03	16	19	Pembinaan Administrasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbinanya Administrasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	bulan	60		512.000.000	24	90.937.526	12	48.666.840	3	6.220.968	0	0	6	1.049.000	3,00	31.841.000	12	39.110.968	100	80	36	130.048.494	60	25	Bappeda

				3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
		4	03	16	20	Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi		Tersedianya Rencana Aksi Pangan dan Gizi		rakor	60	50.000.000		40.258.700													-				40.258.700	0	0	Bappeda			
		4	03	16	21	Forum Corporate Social Responsibility (CSR)		Terlaksananya Forum Corporate Social Responsibility (CSR)				120.000.000		40.206.700						0	0						-				40.206.700	0	0	Bappeda			
		4	03	16	22	Koordinasi Kerjasama Pengembangan Kakao		Jumlah Rapat Koordinasi		rakor	12	430.000.000		53.643.350							0	0						-				53.643.350	0	0	Bappeda		
		4	03	16	23	Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau		rakor	36	180.000.000		37.798.496							0	0						-				37.798.496	0	0	Bappeda		
		4	03	16	24	Pembinaan Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		Terbinanya Administrasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)		bulan	24	126.000.000		142.361.750							0	0						-				142.361.750	0	0	Bappeda		
		4	03	16	25	Pembinaan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP)		Tersusunnya		dokumen	1	50.000.000		292.710.000							0	0						-				292.710.000	0	0	Bappeda		
		4	03	16		Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah		Terlaksananya Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Produk Unggulan Daerah		tahun	1	40.000.000									0	0						-				0	0	Bappeda			
		4	03	16	28	Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah		Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan Daerah		dokumen	1	269.300.000		192.176.909		2				0	0	0	0				0	-	0	0	2	192.176.909		200	71	Bappeda	
		4	03	16		Belanja Hibah Aktivi Sharing Program PAMSIMAS III		Terlaksananya Kegiatan Program PAMSIMAS		desa	3	50.000.000		0		-					0	0						-							Bappeda		
		4	03	16		Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabanjahe-Berastagi		Terlaksananya Studi Kelayakan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkar Luar Perkotaan Kabanjahe-Berastagi		dokumen	1	50.000.000		0		-					0	0						-				0	0	Bappeda			
		4	03	16		Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkungan		Tersusunnya Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan lingkungan		dokumen	1	50.000.000		0		-					0	0						-				0	0	Bappeda			
		4	03	18		Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		Meningkatnya Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh				90.891.695		0						0	0	0	0				-				90.891.695	0	0	Bappeda			
		4	03	18	06	Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Tongging		Tersusunnya Master Plan Kawasan Wisata Tongging		dokumen	1			90.891.695							0	0						-				90.891.695	0	0	Bappeda		
		4	03	20		Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Perencanaan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah				1.332.336.730		291.199.398						0		0					-				189.607.750			Bappeda			
		4	03	20	01	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana		Terciptanya Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana		orang	3	660.056.740		101.591.648		8				0	0	0	0				0	-	0	0	8	101.591.648		267	15	Bappeda	
		4	03	20	2	Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah		kali	17	162.295.814		41.318.250							0	0						-				41.318.250	0	0	Bappeda		
		4	03	20	3	Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah		Terlaksananya Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah		orang	450	509.984.176		148.289.500							0	0						-				148.289.500	0	0	Bappeda		
		4	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah				7.808.573.681		2.909.987.576			1.913.763.166		140.902.665	147.289.638		45.129.978		1.231.175.522		1.566.057.803					3.258.094.006			Bappeda			
		4	03	21	08	Penyusunan RKPD		Tersusunnya RKPD		dokumen	3	347.824.384		2		494.698.068	1	319.037.150	0	41.326.262	0	41.326.262	1	3.571.550	-	212.535.163	1	298.759.237	100	94	3	793.457.305		100	228	Bappeda	
		4	03	21	09	Penyelenggaraan Musrenbang RKPD		Terselenggaranya Musrenbang RKPD		Orang/Skali	1250	700.229.198		1.000		373.198.592	270	53.000.345	0		0	270	51.295.476	0	-	-	270	51.295.476	100	97	1.270	424.494.068		102	61	Bappeda	
		4	03	21	12	Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPU)		Terlaksananya Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPU)		dokumen	1	354.381.872		2		156.072.454	85	123.577.680	0		0	0	30.714.000	85	1.316.250	-	72.069.265	85	104.099.515	100	84	87	260.171.969		8.700	73	Bappeda
		4	03	21	14	Penyelenggaraan Forum SKPD		Terselenggaranya Forum SKPD		orang	800	407.415.560		2		175.442.305	200	28.355.884	200	21.495.884	0	0	0	0	6.500.000	-	-	200	27.995.884	100	99	202	203.438.189		25	50	Bappeda
		4	03	21	15	Penyelenggaraan Konsultasi Publik		Terselenggaranya Konsultasi Publik		orang	1000	350.000.000		780		92.692.630	200	25.099.483	200	23.997.263	0	0	0	-	-	-	200	23.997.263	100	96	980	116.689.893		98	33	Bappeda	
		4	03	21	19	Penyusunan Perubahan RKPD		Tersusunnya Perubahan RKPD		dokumen	3	240.000.000		2		326.894.860	1	145.346.085	0		0	0	0	-	1,00	135.974.371	1	135.974.371	100	94	3	462.869.231		100	193	Bappeda	

2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
									K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K	
		4	03	21	20	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian dan Evaluasi	dokumen	5		326.000.000	3	82.925.710	1	18.091.370	0	5.851.845	0	0	0	0	-	1,00	10.277.100	1	16.128.945	100	89	4	99.054.655	80	30	Bappeda	
		4	03	21	23	Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	Terselenggaranya Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	aplikasi	1		736.927.167	4	204.589.880	1	65.046.560	0	5.722.173	0	0	0	0	-	1,00	51.927.900	1	57.650.073	100	89	5	262.239.953	500	36	Bappeda	
		4	03	21	24	Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan	dokumen	1		180.000.000	0	-	85	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0	0	0	0	0	-	0	0	Bappeda	
		4	03	21	32	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	rakor	12		1.068.530.000	24	211.147.757	12	303.472.790	3	8.343.000	3	2.645.000	3	12.848.000	3,00	214.841.573	12	238.677.573	100	79	36	449.825.330	300	42	Bappeda		
		4	03	21		Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Pengembangan Sistem Inovasi Daerah	dokumen	2		450.000.000	3	211.528.900			0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	3	211.528.900	150	47	Bappeda			
		4	03	21	33	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	Terlaksananya Penguatan Sistem Inovasi Daerah	dokumen	4		650.000.000	0	-	1	303.328.998	0	10.621.281	0	0	0	0	1.476.000	1,00	127.159.748	1	139.257.029	100	46	1	139.257.029	25	21	Bappeda	
		4	03	21	34	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	rakor	12		150.000.000	21	138.578.072	12	29.406.991	3	4.871.047	3	20.938.900	3	1.083.000	3,00	-	12	26.892.947	100	91	33	165.471.019	275	110	Bappeda		
		4	03	21	35	Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya	rakor	12		50.000.000	24	312.733.928	12	93.955.450	3	15.833.910	3	370.000	3	7.415.178	3,00	52.243.864	12	77.422.952	100	82	36	390.156.880	300	780	Bappeda		
		4	03	21	36	Koordinasi Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan bidang Penelitian dan Pengembangan	kali	36		150.000.000	12	9.798.580	12	18.954.000	3	2.840.000	3	0	3	5.737.000	3,00	7.652.380	12	16.229.380	100	86	24	26.027.960	67	17	Bappeda		
		4	03	21	37	Penyusunan Rancangan Perubahan RPJMD	Tersusunnya Rancangan Perubahan RPJMD	dokumen	3		440.000.000	1	71.990.220	1	387.090.380	0	0	0	0	0	5.183.000	1,00	346.494.158	1	351.677.158	100	91	2	423.667.378	67	96	Bappeda		
		4	03	21	38	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen	dokumen	3		495.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			
		4	3	21	39	Pelaksanaan Penguatan SIDA					47.695.620												-					47.695.620	0	0	Bappeda			
		4	03	21	40	Penghargaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penghargaan Pembangunan Daerah	kali	2		300.000.000	-											-						0	0	Bappeda			
		4	03	21	42	Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo	Tersusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Kabupaten Karo	dokumen	1		100.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			
		4	03	21	43	Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan	orang kali	150		100.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			
		4	03	21	44	Penyusunan Vision Karo	Tersusunnya Dokumen Karo Vision	dokumen	1		120.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			
		4	03	21	45	Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	Terlaksananya Lomba Kreatif dan Inovasi Daerah Kabupaten Karo	inovasi	180		150.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			
		4	03	21	46	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelitbangan Kabupaten Karo	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Kelitbangan Kabupaten Karo	laporan	3		150.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			
		4	03	22		Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Ekonomi				813.000.000		274.055.400		0								-				274.055.400	0	0	Bappeda				
		4	03	22	01	Penyusunan Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	Tersusunnya Masterplan Pembangunan Ekonomi Daerah	dokumen	1		150.000.000		274.055.400										-					274.055.400	0	0	Bappeda			
		4	03	22		Penyusunan Masterplan Pembangunan Pertanian	Tersusunnya Masterplan Pembangunan Pertanian	dokumen	1		150.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			
		4	03	22		Penyusunan Grand Design Pengendalian Kependudukan	Tersusunnya Grand Design Pengendalian Kependudukan	dokumen	1		150.000.000	0	-										-						0	0	Bappeda			

1	2	3				4	5	6	K	7	Rp.	K	8	Rp.	K	9	Rp.	K	10	Rp.	K	11	Rp.	K	12	Rp.	K	13	Rp.	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
		4	03	22	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	100%			488.408.000					0																					0	0	Bappeda	
		4	03	22	Penyusunan Peta Analisis Lokasi Pertanian	Tersusunnya Peta Analisis Lokasi Pertanian	dokumen	3		320.408.000	0		-																							0	0	Bappeda	
		4	03	22	Fasilitasi Dan Kerjasama Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Rapat Koordinasi	bulan	24		168.000.000	0		-																						0	0	Bappeda		
		4	03	23	Program Perencanaan Sosial Budaya	Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya				77.942.600					0																			591.413.250	0	0	Bappeda		
		4	03	23	01	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	Koordinasi Penyusunan Masterplan Pendidikan	rakor	12		-				280.250.700																			280.250.700	0	0	Bappeda		
		4	03	23	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	Meningkatnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	dokumen	1		30.942.600																									0	0	Bappeda		
		4	03	23	06	Penyusunan Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Budaya	Tersusunnya Masterplan Pelestarian dan Pengembangan Budaya	dokumen	1		-				278.849.200																			278.849.200	0	0	Bappeda		
		4	03	23	07	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	Tersedianya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan	dokumen	1		47.000.000				32.313.350																			32.313.350	0	0	Bappeda		
		4	03	26	Program Perencanaan Sosial Budaya	Meningkatnya Perencanaan Sosial Budaya				-					492.433.500																				492.433.500	0	0	Bappeda	
		4	03	26	01	Penyusunan Road Map SIDA	Tersusunnya Road Map SIDA	dokumen	1		-				248.919.150																			248.919.150	0	0	Bappeda		
		4	03	26	04	Penyusunan Rencana Induk Kelitbangan	Tersusunnya Rencana Induk Kelitbangan	dokumen	1		-				243.514.350																			243.514.350	0	0	Bappeda		
		4	03	27	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan				554.655.007					76.823.400																				76.823.400	0	0	Bappeda	
		4	03	27	01	Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	Terlaksananya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	dokumen	1		80.000.000				76.823.400																			76.823.400	0	0	Bappeda		
		4	03	27		Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	Terlaksananya Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender	bulan	60		474.655.007																								0	0	Bappeda		
		4	03	28	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				355.000.000					51.546.650																				51.546.650	0	0	Bappeda	
		4	03	28	01	Pelaksanaan PUG	Terlaksananya PUG	rakor	48		355.000.000				51.546.650																				51.546.650	0	0	Bappeda	
					Jumlah					32.181.433.134				11.731.359.956		3.391.952.071			300.995.783		184.172.518		186.014.513		2.074.798.035		2.747.540.806			81			12.777.468.758	180	38	Bappeda			
					BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH																					2.612.442.807													
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																																		
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa rekening telepon, air dan listrik	bulan	72		250.000.000	48		42.125.922	12	22.800.000	2	3.918.380	3	3.796.010					3,00	3.808.110	8	11.522.500	67	51		56	53.648.422	78	21	BPKPAD				
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kerja	unit	220		240.198.802	41		8.970.000	23	32.193.800									4,00	1.450.000	4	1.450.000	17	5		45	10.420.000	20	4	BPKPAD				
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	106		136.276.244	55		9.308.690	-	-								9,00	4.947.750	9	4.947.750	0	0		64	14.256.440	60	10	BPKPAD					
					Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi dan keuangan	orang	1.080		1.905.437.550	107		289.225.000	6	60.600.000								14,00	247.155.000	14	247.155.000	233	408		121	536.380.000	11	28	BPKPAD					
					Penyediaan alat kebersihan kantor	Tersedianya peralatan kebersihan gedung kantor	jenis	107		144.419.580	78		49.394.014	21	15.578.037			16	12.091.176				9,00	14.832.323	25	26.923.499	119	173		103	76.317.513	96	53	BPKPAD					
					Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	jenis	371		1.041.391.612	277		421.016.146	46	97.789.782			34	69.865.707					34	69.865.707	74	71		311	490.881.853	84	47	BPKPAD						
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	120		961.581.612	51		383.458.650	9	128.702.808			9	69.527.040	0,5	11.384.100	0,50	14.267.100	10	95.178.240	111	74		61	478.636.890	51	50	BPKPAD						
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	78		2.358.778.615	499		545.145.400	7	12.724.132					6	28.627.371		6	28.627.371	86	225		505	573.772.771	647	24	BPKPAD							
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah tangga	buah	60		270.000.000	7		31.055.000	-	-								-	-	# DIV/0!	# DIV/0!		7		31.055.000	12	12	BPKPAD						
					Penyediaan Makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman	kotak	2.020		185.198.802	267		41.727.000	-	-								-	-	0	0		267		41.727.000	13	23	BPKPAD						
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OH	600		3.182.633.628	198		1.274.722.784	565	383.065.000	64	76.558.870	7,0	3.779.000	48		22.670.000	232,00	73.970.200	351	176.978.070	62	46		549	1.451.700.854	92	46	BPKPAD					

2				3				4				5				6		7				8		9				10		11		12				13		14=(9+10+11+12)				15=13/8x100%				16=(7+13)				17=15/6x100%				18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.				K		Rp.			

2					3					4		5		6		7			8		9			10		11		12			13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)			17=15/6x100%		18
										K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		
					Peningkatan Manajemen Aset /Barang Daerah	Terlaksananya peningkatan manajemen aset/ barang daerah	sertifikat, dokumen	120	2.889.960.064	147	1.104.651.804	200	177.859.543			3.540.000	77	42.693.880		334.369.444	77	380.603.324	39	214		224	1.485.255.128	187	51	BPKPAD												
					Peningkatan Manajemen Kas Daerah	Terlaksananya peningkatan pengelolaan kas daerah	dokumen, laporan	4	1.100.000.000	6.984	192.240.375	7.000	39.999.958	494		663,0	895	38.746.770		77.772.294	2.052	116.519.064	29	291		9.036	308.759.439	225.900	28	BPKPAD												
					Bimbingan Teknis pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya bimtek pengelolaan keuangan daerah	orang	600	750.000.000	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	orang	240	1.169.956.987	17	165.057.000	120	50.000.000			8,0	34.000.000	6	25.500.000		186.500.000	14	246.000.000	12	492		31	411.057.000	13	35	BPKPAD											
					Evaluasi Kinerja Keuangan	Adanya evaluasi kinerja keuangan	pertemuan	60	350.000.000			150	29.999.080			100,0	9.745.000				100	9.745.000				100	9.745.000			BPKPAD												
					Sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah	Terlaksananya sosialisasi implementasi sistem informasi keuangan daerah	orang	600	500.000.000	-	-	150	20.030.280								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Bimbingan teknis tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan	Terlaksananya bimtek tentang implementasi akuntansi berbasis akrual keuangan	orang	250	285.000.000	49	96.827.660	-	-								-	-	0	0		49	96.827.660	20	34	BPKPAD												
					Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan daerah	Tersusunnya sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	dokumen	5	250.000.000	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Terlaksananya Pengendalian dan pelaporan berkala dana transfer pemerintah pusat dan pemerintah daerah	OH	90	450.000.000	12	79.315.626	12	69.340.713			6,0	4.020.000	3	29.827.594		114.224.856	9	148.072.450	75	214		21	227.388.076	23	51	BPKPAD											
					Peningkatan pengelolaan aset /barang daerah/sertifikasi	Meningkatnya pengelolaan aset/barang daerah/sertifikasi	kali	6	1.512.700.990	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Penyusunan Peraturan Daerah tentang pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda tentang pengelolaan BMD	peraturan	-	-	72	17.466.120	-	-								-	-	0	0		72	17.466.120	0	0	BPKPAD												
					Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Perda tentang Pedoman pengelolaan BMD	peraturan	-	-	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Pembuatan Plank Tanah Milik Pemerintah daerah	Adanya plank tanah milik Pemerintah Kab.Karo	plank	250	780.000.000	100		-	-	-							-	-	0	0		100	-	40	0	BPKPAD												
					Penyusunan ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya ranperda tentang pedoman penyusunan dan penelaahan RKA dan DPA SKPD	peraturan	2	200.000.000	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Penyusunan Ranperbup tentang Jukesunlak RKA dan DPA SKPD	Tersusunnya ranperbup tentang Jukesunlak RKA dan DPA SKPD	peraturan	6	700.000.000	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Penyusunan Peraturan Bupati tentang pengelolaan BMD	Tersusunnya peraturan bupati tentang pengelolaan BMD	peraturan	1	375.000.000	17	88.463.480	-	-								-	-	0	0		17	88.463.480	1.700	24	BPKPAD												
					Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah	Terselenggaranya Perencanaan Pemindahtanganan Barang Milik daerah	dokumen	-	-	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting)	Terlaksananya penerapan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (e-budgeting)	dokumen	-	-	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Sosialisasi pengelolaan BMD	Terlaksananya sosialisasi BMD	org	745	400.000.000	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Sosialisasi Barang Milik desa	Terlaksananya sosialisasi Barang Milik desa	orang	2785	1.266.936.000	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Penyusunan peraturan bupati tentang pengelolaan barang milik desa	Tersusunnya perbup tentang pengelolaan barang milik desa	peraturan	6	750.000.000	1		-	-	-							-	-	0	0		1	-	17	0	BPKPAD												
					Sosialisasi Pedoman pelaksanaan APBD	Terlaksananya Sosialisasi Pedoman penyusunan APBD	orang	600	404.694.308	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												
					Rapat koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	Terlaksananya Rapat koordinasi bulanan tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah	orang	900	160.000.000	-	-	-	-								-	-	0	0		-	-	0	0	BPKPAD												

3					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
					Penyusunan ranperbub tentang mekanisme penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017	Terusunnya Ranperbup tentang mekanisme penyaluran dana desa, ADD dan DBH Pajak TA. 2017	peraturan	6	825.000.000	2	60.652.150	-	-									-	-	0	0	2	60.652.150	33	7	BPKPAD
					Sosialisasi Implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting)	Terlaksananya sosialisasi Implementasi aplikasi perencanaan dan penganggaran (e-budgeting)	orang	240	270.000.000	2	228.647.880	-	-									-	-	0	0	2	228.647.880	1	85	BPKPAD
					Bimtek Penyusunan RAPBD	Terlaksananya Bimtek Penyusunan RAPBD	orang	900	500.000.000	-	-	-	-									-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
					Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber PAD	Terlaksananya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD	WP, WP	1.580	1.669.134.728	656	288.161.355	300	58.859.555			300	23.000.171		1.200.000	300	24.200.171	100	41	956	312.361.526	61	19	BPKPAD		
					Penyusunan Peraturan Bupati tentang TPTGR	Terusunnya naskah Peraturan Bupati tentang TPTGR	peraturan	6	375.000.000	60	-	-	-									-	-	0	0	60	-	1.000	0	BPKPAD
					Penyusunan Perda tentang TPTGR terhadap bukan bendahara	Terusunnya perda tentang TPTGR terhadap bukan bendahara	peraturan	-	-	138	13.603.150	-	-									-	-	0	0	138	13.603.150	0	0	BPKPAD
					Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan	Terlaksananya Sosialisasi PBB Perkotaan dan Pedesaan	orang	3000	521.560.000	-	-	-	-									-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
					Penerbitan dan Penyampaian SPPT, DHKP, dan STTS PBB-P2	Tersampaikannya SPPT, DHKP dan STTS PBB P2	WP	828.000	1.371.076.233	#####	812.450.702	140.000	225.929.692			####	48.782.582		25.350.000		102.736.500	140.000	176.869.082	100	78	100.561.483	989.319.784	12.145	72	BPKPAD
					Pemeliharaan Basis Data PBB-P2	Terpeliharanya basis data dan PBB-P2	Kec	17	880.688.320	16	763.481.125	5	177.220.308			5	50.564.792		16.150.000	5	66.714.792	100	38	21	830.195.917	124	94	BPKPAD		
					Pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya pendataan objek pajak daerah dan retribusi daerah	kec	102	399.150.000	-	-	-	-									-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
					Pengadaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah	Adanya sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah	unit	-	-	-	-	-	-									-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
					Pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah	Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana untuk peningkatan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pendapatan Asli Daerah	unit	10	255.500.000	11	4.500.000	-	-									-	-	0	0	11	4.500.000	110	2	BPKPAD
					Pemukhtahiran Zona Nilai Tanah PBB-P2	Terlaksananya Pemukhtahiran Zona Nilai Tanah PBB-P2	kecamatan	60	800.000.000	-	-	-	-									-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
					Penyusunan Roadmap Optimalisasi PAD	Terusunnya Roadmap Optimalisasi PAD	dokumen	5	640.000.000	1	89.458.036	-	-									-	-	0	0	1	89.458.036	20	14	BPKPAD
					Pengembangan Sistem Aplikasi PBB-P2	Adanya aplikasi pembayaran PBB on line	aplikasi	3	600.000.000	-	-	-	-									-	-	0	0	-	-	0	0	BPKPAD
					Penyusunan Sistem dan Informasi Pajak dan Retribusi Daerah	Adanya sistem dan informasi pajak dan retribusi daerah	aplikasi	5	586.679.217	1	94.613.210	-	-									-	-	0	0	1	94.613.210	20	16	BPKPAD
					JUMLAH				63.326.456.432		15.787.827.417		2.906.386.081		172.468.950		491.461.444				2.612.442.807		3.852.890.683				19.626.598.130			
					BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH			31.197	25.534.114.659	8.892	5.203.641.195	2.227	4.218.515.609	109	704.951.900	169	240.811.394	654	179.129.008	1.103.00	2.862.565.321	2.035	3.987.457.623	91	95	10.927	9.191.098.818	35	36	BKD
		1	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		9.445	3.688.806.188	2.731	1.427.383.102	389	488.916.815	37	27.935.900	169	104.308.988	73	55.655.918	107,00	256.400.352	386	444.301.158	99	91	3117	1.871.684.260	33	51	BKD
		1	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	2.220	12.585.000	991	5.682.000										0	-	0	0	991	5.682.000	45	45	BKD	
		1	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	93.587.458	36	50.148.494	12	18.000.000	3	4.319.700	2	2.921.900	4	5.780.650	3,00	4.256.550	12	17.278.800	100	96	48	67.427.294	80	72	BKD
		1	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	20	21.200.000	6	2.550.220	1	1.300.000								0	-	0	0	6	2.550.220	30	12	BKD	
		1	01	01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	org bln	998	686.000.000	421	185.700.000	120	135.310.832		44	3.440.000	22	1.720.000	54,00	118.185.000	120	123.345.000	100	91	541	309.045.000	54	45	BKD	
		1	01	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	org bln	60	68.940.000	36	40.015.603	12	15.884.812	2	2.430.000	2	3.129.500	4	5.454.000	4,00	4.860.000	12	15.873.500	100	100	48	55.889.103	80	81	BKD
		1	01	01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Perbaikan Peralatan Kerja	unit	120	110.000.000	17	7.127.500	3	2.150.000				2	828.000			2	828.000	67	39	19	7.955.500	16	7	BKD	
		1	01	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	255	247.760.730	149	129.203.886	49	29.300.893		48	26.253.950					48	26.253.950	98	90	197	155.457.836	77	63	BKD	
		1	01	01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	30	168.000.000	15	89.799.760	3	14.790.318		3	2.880.365		4.778.268		6.681.402	3	14.340.035	100	97	18	104.139.795	60	62	BKD	
		1	01	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	unit	54	410.183.000	10	92.619.250	11	50.413.000						11,00	46.360.000	11	46.360.000	100	92	21	138.979.250	39	34	BKD	

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
			1	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	3.170	74.750.000	24	2.800.120				0	-	0	0	24	2.800.120	1	4	BKD								
			1	01	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	kotak	1.000	25.800.000	171	6.403.000				0	-	0	0	171	6.403.000	17	25	BKD								
			1	01	01	18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	org/hr/kl	1.330	1.475.000.000	773	725.473.269	142	176.095.500	26	13.596.200	67	61.888.273	26	18.120.000	23,00	60.877.400	142	154.481.873	100	88	915	879.955.142	69	60	BKD	
			1	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	org bulan	128	295.000.000	82	89.860.000	36	45.671.460	6	7.590.000	3	3.795.000	15	18.975.000	12,00	15.180.000	36	45.540.000	100	100	118	135.400.000	92	46	BKD	
			1	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		90	2.529.119.000	9	118.863.428	1	32.312.848	-	-	-	-	-	1,00	30.030.368	1	30.030.368	100	93	10	148.893.796	11	6	BKD		
			1	01	02	01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	4	1.435.000.000	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			1	01	02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	20	316.871.294	2	13.350.000									0	-	0	0	2	13.350.000	10	4	4	4	BKD	
			1	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	40	347.287.000	1	50.000.000									0	-	0	0	1	50.000.000	3	14	3	14	BKD	
			1	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional	unit	23	322.960.706	6	55.513.428	1	32.312.848						1,00	30.030.368	1	30.030.368	100	93	7	85.543.796	30	26	30	26	BKD
			1	01	02	44	Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional	unit	3	107.000.000	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			1	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		243	389.595.000	46	23.316.000	27	18.144.000	-	-	-	-	-	-	27,00	17.550.000	27	17.550.000	100	97	73	40.866.000	30	10	BKD	
			1	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Adanya Pakaian dinas beserta kelengkapannya	stel	150	130.115.000	46	23.316.000	27	18.144.000						27,00	17.550.000	27	17.550.000	100	97	73	40.866.000	49	31	49	31	BKD
			1	01	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	stel	90	95.000.000	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			1	01	03		Sayembara Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Tersedianya Motiv/Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	motif	3	164.480.000	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			1	01	04		Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS	Meningkatnya Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS		91	549.001.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			1	01	04	03	Pemindahan Tugas PNS	Adanya Dana Pemindahan Tugas PNS	orang	91	549.001.118	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			1	01	05		Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur		1.020	1.027.526.000	415	631.917.660	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	415	631.917.660	41	61	41	61	BKD	
			1	01	05	02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	orang kali	400	367.146.000	81	65.569.900									0	-	0	0	81	65.569.900	20	18	20	18	BKD	
			07	1	05	03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	orang kali	620	660.380.000	334	566.347.760									0	-	0	0	334	566.347.760	54	86	54	86	BKD	
			4	06	15		Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya pendidikan kedinasan		136	385.682.165	38	44.247.970	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	38	44.247.970	28	11	28	11	BKD	
			4	06	15	01	Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan teknis	orang	136	385.682.165	38	44.247.970									0	-	0	0	38	44.247.970	28	11	28	11	BKD	
			1	01	16		Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur		1.645	7.275.410.500	389	1.081.432.319	369	3.070.470.000	71	660.016.000	-	-	-	-	278,00	2.349.264.000	349	3.009.280.000	95	98	738	4.090.712.319	45	56	BKD	
			4	06	16	08	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah	orang	600	2.773.735.500	170	420.220.000	369	3.070.470.000	71	660.016.000				278,00	2.349.264.000	349	3.009.280.000	95	98	519	3.429.500.000	87	124	87	124	BKD
			4	06	16		Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	orang	205	2.500.000.000	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			4	06	16	10	Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah	orang	660	1.511.675.000	219	661.212.319									0	-	0	0	219	661.212.319	33	44	33	44	BKD	
			4	06	16		Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS Daerah	orang	180	490.000.000	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			1	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur Pemerintah Desa		20	69.615.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			4	06	18		Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa	Terlaksananya Diklat Peningkatan Kompetensi Sekretaris Desa	orang	20	69.615.000	-	-									0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	BKD	
			4	06	15		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		18.507	9.619.359.688	5.264	1.876.480.716	1.441	608.671.946	1	17.000.000	-	136.502.406	581	123.473.090	690,00	209.320.601	1272	486.296.097	88	80	6536	2.362.776.813	35	25	BKD	

1	2	3	4			5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		4	06	15	Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS	Tersusunnya Rencana Pembinaan Karir PNS	dokumen	6	428.222.808	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	02 Seleksi Penerimaan Calon PNS	Adanya Penerimaan Calon PNS	orang kali	900	1.255.000.000	318	278.990.383	250	286.534.314	-	117.262.406	-	94.613.090	235,00	41.847.741	235	253.723.237	94	89	553	532.713.620	61	42	BKD		
		4	06	15	03 Penempatan PNS	Adanya Penempatan PNS	orang kali	1.500	330.636.880	358	95.386.370	100	4.950.000	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	358	95.386.370	24	29	BKD	
		4	06	15	Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Adanya Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	orang	380	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Seleksi Penerimaan Aparatur Sipil Negara	Adanya Penerimaan Aparatur Sipil Negara	orang	790	635.000.000	-	80.009.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	80.009.800	0	13	BKD	
		4	06	15	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Adanya Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	sistem	4	240.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	08 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	Adanya Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi	orang	332	437.000.000	146	206.840.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	146	206.840.000	44	47	BKD	
		4	06	15	Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	Adanya Penanganan Kasus-kasus pelanggaran Disiplin PNS	kasus	60	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	Adanya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	19	280.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	Adanya Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN	orang	400	175.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Ijazah	Terselenggaranya Ujian Penyesuaian Ijazah	orang	275	190.000.000	117	99.859.680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	117	99.859.680	43	53	BKD	
		4	06	15	Seleksi Penerimaan Pegawai honoror menjadi calon PNS	Adanya Penerimaan Pegawai honoror menjadi calon PNS	orang	480	185.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	19 Penataan Administrasi Kepangkatan PNS	Tertatanya Administrasi Kepangkatan PNS	orang	5.000	415.000.000	3.029	219.152.270	1.000	21.934.172	-	2.240.000	581	3.360.000	410,00	8.844.690	991	14.444.690	99	66	4020	233.596.960	80	56	BKD		
		4	06	15	20 Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	Terlaksananya Seleksi Terbuka Pimpinan Tinggi Pratama	orang kali	290	1.457.500.000	107	392.424.975	90	193.122.000	-	-	-	-	45,00	116.128.170	45	116.128.170	50	60	152	508.553.145	52	35	BKD		
		4	06	15	Pembekalan PNS Purna Bakti	Terlaksananya Pembekalan PNS Menjelang Pensiun	orang kali	300	230.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Pengangkatan Sumpah Janji PNS	Terselenggaranya Pengangkatan Sumpah Janji PNS	orang kali	700	145.000.000	1.028	77.188.130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	1028	77.188.130	147	53	BKD	
		4	06	15	Penyesuaian Jabatan Fungsional	Adanya Penyesuaian Jabatan Fungsional	orang	6.000	100.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penyusunan daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo	Tersusunnya daftar urut kepangkatan dan buku profil pegawai di lingkungan Pemkab Karo	buku	5	132.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Pelaksanaan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Analisa Jabatan PNS	dokumen	2	125.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi	Tersusunnya Roadmap Reformasi Birokrasi	dokumen	3	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penyusunan Standar Kompetensi	Tersusunnya Standar Kompetensi	dokumen	4	180.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Bimtek Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Terlaksananya Bimtek Analisa Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	orang	140	105.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penyusunan Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja	Tersusunnya Rancangan Regulasi Tingkat Kinerja Berdasarkan Analisa Beban Kerja	dokumen	3	190.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Pelaksanaan Orientasi bagi CPNS baru	Terlaksananya Orientasi bagi CPNS baru	orang	340	120.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penyusunan Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional	Tersusunnya Rancangan Regulasi Jabatan Fungsional	dokumen	4	215.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penilaian Potensi dan Kompetensi JPT dan Administrator	Terlaksananya Penilaian Potensi dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	orang kali	132	859.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
		4	06	15	Penyelenggaraan Ujian Dinas	Terselenggaranya Ujian Dinas	orang	430	215.000.000	159	66.021.658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	159	66.021.658	37	31	BKD	
		4	06	15	Penyediaan Aplikasi e-performance	Adanya Aplikasi Penilaian Kinerja PNS	sistem	1	380.000.000	2	360.607.450	1	102.131.460	1	17.000.000	-	17.000.000	-	25.500.000	-	42.500.000	1	102.000.000	100	100	3	462.607.450	300	122	BKD
		4	06	15	Penyusunan Perbup untuk tenaga kesehatan, pendidik dan Kependidikan	Tersusunnya Perbup untuk tenaga kesehatan, Pendidik dan Kependidikan	dokumen	7	115.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0	BKD	
																				0	-	0	0	0	-	0	0	BKD		
Total								31.197	25.534.114.659	8.892	5.203.641.195	2.227	4.218.515.609	109	704.951.900	169	240.811.394	654	179.129.008	1.103,00	2.862.565.321	2035	3.987.457.623	91	95	10927	9.191.098.818	35	36	BKD
Rata - rata capaian kinerja (%)																						91,38	94,52			35,03	36,00	BKD		

1		2		3		4		5		6		K		7		Rp.		K		8		Rp.		K		9		Rp.		K		10		Rp.		K		11		Rp.		K		12		Rp.		13		14=(9+10+11+12)		K		Rp.		15=13/8x100%		K		Rp.		16=(7+13)		K		Rp.		17=15/6x100%		K		Rp.		18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

3					4	5	6	7			8			9			10			11			12			13			14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18																									
V.		1	04	18	Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	Tercapainya perbaikan perumahan penduduk akibat bencana alam/ sosial		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.																										
									29.034.000.000																																																					
1		1	04	18	01	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Alam	Jumlah unit rumah yang direhabilitasi	Unit	581	29.034.000.000	0			0			0			0			0				0			0							BPBD Kab. Karo																									
Rata-rata capaian kinerja (%)																														-	-																															
Predikat Kinerja																														Sangat Rendah	Sangat Rendah																															
VI.		1	06	25	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah rawan bencana			1.328.200.000																																																					
1		1	06	25	01	Koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi penyusunan profile daerah rawan bencana	Orang	50	664.100.000	0			0			0			0			0				0			0								BPBD Kab. Karo																								
2		1	06	25	02	Koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi pembangunan daerah rawan bencana	Orang	50	664.100.000	0			0			0			0			0				0			0								BPBD Kab. Karo																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														-	-																															
Predikat Kinerja																														Sangat Rendah	Sangat Rendah																															
VII.		1	13	16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			1.856.528.927																																																					
1		1	13	16	10	Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa yang ditangani	Masalah	2	1.856.528.927	0			0			0			0			0				0			0								BPBD Kab. Karo																								
Rata-rata capaian kinerja (%)																														-	-																															
Predikat Kinerja																														Sangat Rendah	Sangat Rendah																															
VIII.		1	19	22	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Meningkatnya pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam			49.705.256.303	4.997.851.538	100%	1.995.705.763																																																		
1		1	19	22	01	Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi Bencana Alam	Jumlah media informasi potensi bencana alam yang disebarluaskan	Media	25	986.150.000	5	23.612.500	0		-	-				0			-			0			-				5	23.612.500	20,00	2,39	BPBD Kab. Karo																									
2		1	19	22	02	Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam	Jumlah tempat penampungan sementara bagi penduduk yang dievakuasi dan korban bencana alam	Unit	3	4.965.000.000	0			0			0			0			-			0			-			0			-		BPBD Kab. Karo																									
3		1	19	22	03	Pengadaan Sarana dan Prasarana Evakuasi Penduduk dari Ancaman/ Korban Bencana Alam	Jumlah sarana prasarana evakuasi penduduk	Unit	4	2.784.600.000	0			0			0			0			-			0			-			0			-		BPBD Kab. Karo																									
4		1	19	22	04	Pengadaan Logistik dan Obat-obatan bagi Penduduk di Tempat Penampungan Sementara	Jumlah jenis logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara	Jenis	15	10.949.375.094	2	2.233.850.600	0		-	0			0			-			0			-			0		2	2.233.850.600	13,33	20,40	BPBD Kab. Karo																									
5		1	19	22	05	Sosialisasi Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah orang yang disosialisasi penanggulangan bencana alam	Orang	11000	3.094.623.500	9014	898.564.829	0		-	0			0			-			0			-			0		9014	898.564.829	81,95	29,04	BPBD Kab. Karo																									
6		1	19	22	06	Peningkatan Keterampilan Taruna Slaga Bencana	Jumlah taruna yang dilatih	Orang	100	641.134.000	50	280.893.500	0		-	0			0			-			0			-			0		50	280.893.500	50,00	43,81	BPBD Kab. Karo																									
7		1	19	22	07	Sosialisasi dan Pembinaan Kesiapan Masyarakat (Simulasi) dalam Menghadapi Bencana Alam	Jumlah orang yang dilatih simulasi menghadapi bencana alam	Orang	5000	1.891.530.000	0		150		7.827.000,00	0		150			0			-		150		7.827.000	100	100,00	150		7.827.000	3,00	0,41	BPBD Kab. Karo																										
8		1	19	22	08	Pengelolaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengungsi	Jumlah aplikasi yang dikelola	Aplikasi	2	352.737.500	2	24.000.000	0		-	0			0			-			0			-			0		2	24.000.000	100,00	6,80	BPBD Kab. Karo																									
9		1	19	22	09	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Alam	Jumlah Jenis Sarana yang diadakan	Jenis	50	774.119.000	19	181.253.000	0		-	0			0			-			0			-			0		19	181.253.000	38,00	23,41	BPBD Kab. Karo																									
10		1	19	22	10	Sosialisasi Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Tanggap Darurat	Jumlah orang yang disosialisasi peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam tanggap darurat	Orang	200	464.100.000	0			0			0			0			-			0			-			0			-		BPBD Kab. Karo																									

2					3					4					5					6					7					8					9					10					11					12					13					14=(9+10+11+12)					15=13/8x100%					16=(7+13)					17=15/6x100%					18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

4					5		6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
1	2	3					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
7		1	19	24	07	Pembangunan dan Perbaikan Infrastruktur serta Lingkungan Pasca Bencana	Jumlah jenis infrastruktur dan lingkungan yang dibangun/diperbaiki	Jenis	4	2.586.400.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
8		1	19	24	08	Pemulihan trauma psikologis korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang dipulihkan trauma psikologinya	orang	100	192.890.250	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
9		1	19	24	09	Pembekalan Keterampilan masyarakat korban bencana	Jumlah masyarakat korban bencana yang dibekali Keterampilan	orang	100	385.780.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
10		1	19	24	10	Facilitasi dan Stimulasi bagi Korban yang Terdampak Bencana	Jumlah Jenis bantuan bagi korban yang terdampak bencana	Jenis	1	4.775.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo	
11		1	19	24	11	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penanganan Pasca Bencana	Jumlah dokumen movev	Dokumen	5	520.974.000	2	186.261.100	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	2	186.261.100	40,00	35,75	BPBD Kab. Karo
12		1	19	24	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	12	85.250.100.000	12	65.367.644.732	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	-	12	65.367.644.732	100	76,68	BPBD Kab. Karo dan Instansi Terkait
13		1	19	24	13	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Hunian Tetap serta Pemulihan Ekonomi Korban Bencana Alam lanjutan Tahap II	Jumlah jenis sarana prasarana yang disediakan	Jenis	7	507.588.799.625	2	63.771.416.962	5	97.946.996.967	0	-	1	24.835.529.756	2	16.710.511.076	1,00	31.718.901.562	4	73.264.942.394	80,00	74,80	6	137.036.359.356	85,71	27,00	BPBD Kab. Karo dan Instansi Terkait		
Rata-rata capaian kinerja (%)																							80,00	74,80					33,30	26,39			
Predikat Kinerja																							Tinggi	Sedang					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
x.		1	19	24		Program Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan	Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan					296.363.000	0%	756.642.051		-		-		-		539.173.410		539.173.410	50,00	71,26		835.536.410	20,00	29,64			
1		1	19	24	12	Gerakan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah jenis pencegahan kebakaran hutan dan lahan	Jenis	5	-	1	296.363.000	1	637.242.051	0	-	0	-	0	-	1,00	539.173.410	1	539.173.410	100	84,61	2	835.536.410	40,00	37,01	BPBD Kab. Karo dan Instansi Terkait		
2		1	19	24	13	Pemadaman Langsung	Jumah pemadaman kebakaran hutan dan lahan	Kali Pemadaman	20	-	0	-	10	119.400.000	0	-	0	-	0	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	BPBD Kab. Karo dan Instansi Terkait	
Rata-rata capaian kinerja (%)																							50,00	71,26					20,00	29,64			
Predikat Kinerja																							Sangat Rendah	Sedang					Sangat Rendah	Sangat Rendah			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									892.501.266.145	-	147.408.600.611		101.983.272.544		87.300.000		25.125.555.696		16.912.742.705		34.822.923.459		76.948.521.860				224.257.287.471						
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S.D PROGRAM 10)																							87,97	75,45					33,68	25,13			
KECAMATAN SIMPANG EMPAT																																	
		4	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.366.663.416	875.477.027	591	285.140.530	49	23.897.986	43	15.240.000	51	26.057.480	246,00	186.732.832	389	251.928.298	53	56	2.575	1.127.405.325	78	81				
		4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	1083	5.572.000	690	3.300.000	0	0								0	-	0,00	0,00	690	3.300.000	63,71	59,22				
		4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik	bulan	60	50.300.000	12	9.600.000	12	14.000.000		4	2.800.000					4	2.800.000	33,33	20,00	16	12.400.000	26,67	24,65				
		4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/Operasional	unit	9	8.620.000	2	1.718.500	1	2.000.000						1,00	1.993.500	1	1.993.500	0,00	0,00	3	3.712.000	33,33	43,06				
		4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	456	208.950.000	193	94.470.000	96	60.508.650						84,00	55.648.650	84	55.648.650	0,88	91,97	277	150.118.650	60,75	71,84				
		4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	57.720.000	36	31.980.000	12	14.908.650	2	2.430.000	2	2.430.000	2	2.430.000	6,00	7.618.650	12	14.908.650	100,00	100,00	48	46.888.650	80,00	81,23			
		4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya Jasa perbaikan Peralatan kerja	unit	17	17.585.000	20	10.400.000	6	4.400.000						6,00	4.400.000	6	4.400.000	0,00	0,00	26	14.800.000	152,94	84,16				
		4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	210	77.483.392	172	48.106.027	39	18.647.333	26	4.456.946				39,00	14.104.164	65	18.561.110	166,67	99,54	237	66.667.137	112,86	86,04				
		4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	24	68.406.024	13	22.239.500	3	5.783.540	2	4.283.540				1,00	1.500.000	3	5.783.540	100,00	100,00	16	28.023.040	66,67	40,97				
		4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	59	17.840.000	50	7.387.960	3	2.410.480				3	2.410.480			3	2.410.480	100,00	100,00	53	9.798.440	89,83	54,92				
		4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	35	208.650.000	30	224.078.400	4	52.641.588						4,00	45.600.000	4	45.600.000	0,00	0,00	34	269.678.400	97,14	129,25				
		4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedian peralatan rumah tangga	buah	80	22.045.000	79	47.467.346	17	15.539.045	11	2.607.500				6,00	12.144.568	17	14.752.068	100,00	94,94	96	62.219.414	120,00	282,24				
		4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	50	16.292.000	12	1.440.000	0	0								0	-	0,00	0,00	12	1.440.000	24,00	8,84				

					4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya arapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang hari kali	1673	394.800.000	709	214.469.294	350	32.923.944	33	4.950.000	34	6.037.000	75,00	12.706.000	142	23.693.000	40,57	71,96	851	238.162.294	50,87	60,32				
		4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi /teknis perkantoran	orang bulan	192	212.400.000	168	158.820.000	48	61.377.300	8	10.120.000	4	5.060.000	12	15.180.000	24,00	31.017.300	48	61.377.300	100,00	100,00	216	220.197.300	112,50	103,67		
		4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		460.480.913	0	215.070.600	5	49.390.540	0	0	0	0	-	5,00	44.349.320	5	44.349.320	0	0	24	259.419.920	16	120			
		4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya mebeleur	unit	50	21.000.000	15	110.979.000	4	12.081.370					4,00	12.080.000	4	12.080.000	0,00	0,00	19	123.059.000	38,00	586,00				
		4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	236.773.640	2	59.091.600	1	37.309.170					1,00	32.269.320	1	32.269.320	0,00	0,00	3	91.360.920	30,00	38,59				
		4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya Rumah Dinas	unit		24.844.873	0	-	0	0									-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	46.662.400	1	45.000.000											-	0,00	0,00	1	45.000.000	20,00	96,44			
		4	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas	unit	5	126.200.000	0	-											-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		4	01	02	27	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	10	5.000.000	1	-	0	0									0	-	0,00	0,00	1	-	10,00	0,00		
		4	01	03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		253.850.058	0	64.341.200	28	20.160.000	0	0	0	0	-	25,00	18.816.000	25	18.816.000	0	0	125	83.157.200	141	15			
1		4	01	03	01	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya Mesin Absensi	unit	1	-	1	9.000.000	0	0								0	-	0,00	0,00	1	9.000.000	100,00	0,00			
2		4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Perlengkapannya	stel	150	253.850.058	99	55.341.200	28	20.160.000						25,00	18.816.000	25	18.816.000	0,00	0,00	124	74.157.200	82,67	29,21			
		4	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah	100%		111.277.658	0	39.961.450	1	15.199.430	1	15.199.430	0	0	0	-	-	-	1	15.199.430	100	100	4	55.160.880	50	50		
1		4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	8	111.277.658	3	39.961.450	1	15.199.430	1	15.199.430							1	15.199.430	100,00	100,00	4	55.160.880	50,00	49,57		
		1	05	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	100%		73.670.242	0	93.563.600	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	3	93.563.600	60	127		
1		1	05	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	kali	5	73.670.242	3	93.563.600	1	0									0	-	0,00	0,00	3	93.563.600	60,00	127,00		
		1	03	18		Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan Dalam Kodisi Baik	100%		88.646.052	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0			
		1	03	18	03	Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Reabilitas/Pemeliharaan Jalan	km	10	88.646.052	0	-	0	0									-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		2	06	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	100%		339.744.405	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0			
1		2	06	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	sistem	5	129.948.000	0	-	0	0										-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
2		2	06	15	05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	kali	168	209.796.405	0	-	0	0										-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		2	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Kekayaan Budaya	100%		221.615.130	0	42.850.000	2	11.709.715	1	11.709.175	0	0	0	-	-	-	1	11.709.175	50	100	2	54.559.175	15	25		
1		2	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	kali	13	221.615.130	1	42.850.000	2	11.709.715	1	11.709.175							1	11.709.175	50,00	100,00	2	54.559.175	15,38	24,62		
		2	13	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	100%		236.389.472	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0			
1		2	13	16	07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	kali	10	236.389.472	0	-	0	0										-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		2	13	20		Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	100%		61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0			
1		2	13	20	13	Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	10	61.051.000	0	-	0	0										-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		
		4	1	25		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	100%		61.051.000	0	56.300.000	10	10.800.000	0	0	3	5.400.000	0	-	3,00	5.400.000	6	10.800.000	30	50	30	67.100.000	25	110		
1		4	1	25	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	60	30.525.500	24	56.300.000	10	10.800.000,00			3	5.400.000			3,00	5.400.000	6	10.800.000	60,00	100,00	30	67.100.000	50,00	219,82		

		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1		4	1	25	02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Adanya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	5	30.525.500	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		1	05	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Terlaksananya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%		61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0			
		1	05	20	09	Penertiban Penyakit Masyarakat	Terlaksananya Penertiban Penyakit Masyarakat	kali	30	-	0	-														-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
1		1	05	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	kali	50	61.051.000	0	-	0	0												-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			
		1	05	20		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	100%		61.051.000	0	5.010.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	1	5.010.000	20	8		
		1	05	20		Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	kali	5	61.051.000	1	5.010.000														-	0,00	0,00	1	5.010.000	20,00	8,21			
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									0	3.396.541.346		1.392.573.877		392.400.215	51	50.806.591	46	20.640.000	51	26.057.480	279,00	255.298.152	427	352.802.223	233	306	2.764	1.745.376.100	388	527					
KECAMATAN MERDEKA																																			
		4	01	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.663.006.953		743.443.015	1.131	317.896.109	85	43.456.347	15	16.966.975	137	40.146.221	746,00	198.877.943	983	299.447.486	86	70	3.131	1.042.890.501	140	78					
1		4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1152	6.715.610	530	2.910.000	250	0											0	-	0,00	0,00	530	2.910.000	46,01	43,33			
2		4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	134.312.200	36	21.499.970	12	19.200.000	3	3.850.461,00	3	4.696.975	3	2.720.031	1,00	3.866.318	10	15.133.785	83,33	78,82	46	36.633.755	76,67	27,28					
3						Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	6.715.610	4	2.112.500	1	2.000.000						1,00	1.933.500	1	1.933.500	0,00	0,00	5	4.046.000	50,00	60,25						
4		4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	480	322.349.280	228	94.803.500	96	65.557.790	12	3.525.000,00	4	2.350.000	4	1.175.000	72,00	58.507.790	92	65.557.790	95,83	100,00	320	160.361.290	66,67	49,75					
5		4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	64.469.856	48	47.160.000	24	29.488.650	6	7.290.000,00	4	4.860.000	4	4.860.000	10,00	12.478.650	24	29.488.650	100,00	100,00	72	76.648.650	120,00	118,89					
6		4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	13	26.862.440	10	6.040.000	10	3.750.000			10	3.750.000		10	3.750.000	100,00	100,00	20	9.790.000	153,85	36,44								
7		4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	225	133.526.776	89	53.268.120	33	13.355.040	32	5.997.550,00			33	6.157.490	1,00	1.200.000	66	13.355.040	200,00	100,00	155	66.623.160	68,89	49,89					
8		4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	jenis	25	53.724.880	11	27.670.250	2	4.450.000	1	1.600.000,00			1	1.600.000	1,00	1.250.000	3	4.450.000	150,00	100,00	14	32.120.250	56,00	59,79					
9		4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	buah	60	8.058.732	88	4.827.490	12	4.308.690	12	4.308.690,00					12	4.308.690	100,00	100,00	100	9.136.180	166,67	113,37							
10		4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	30	167.890.250	15	151.186.600	5	63.924.993						5,00	63.290.385	5	63.290.385	0,00	0,00	20	214.476.985	66,67	127,75						
11		4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	78	11.416.537	110	14.683.200	12	16.294.646	12	3.294.646,00				1,00	13.000.000	13	16.294.646	108,33	100,00	123	30.977.846	157,69	271,34						
12		4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	60	15.110.123	36	4.935.000	480	2.160.000						480,00	2.160.000	480	2.160.000	0,00	0,00	516	7.095.000	860,00	46,96						
13		4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	1673	335.780.500	844	205.937.885	157	56.389.000						76	12.293.700	154,00	30.414.000	230	42.707.700	146,50	75,74	1.074	248.645.585	64,20	74,05				
14		4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	180	335.780.500	96	90.408.500	36	31.017.300	6	7.590.000,00	4	5.060.000	6	7.590.000	20,00	10.777.300	36	31.017.300	100,00	100,00	132	121.425.800	73,33	36,16					
15		4	01	01	21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	unit	5	40.293.660	3	16.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000					1	6.000.000	100,00	100,00	4	22.000.000	80,00	54,60							
		4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			708.940.085		233.998.370	2	49.207.336	0	0		0	-	-		48.973.336	2	48.973.336	20	20	72	282.971.706	54	40					
1		1	01	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional	Tersedianya kenderaan dinas operasional	unit	5	201.468.300	0	-												0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
2		4	01	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	unit	50	100.734.150	60	56.930.000												0	-	0,00	0,00	60	56.930.000	120,00	56,52				
3		4	01	03	16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	5	134.312.200	2	121.411.000	1	20.000.000						1,00	19.766.000	1	19.766.000	100,00	98,83	3	141.177.000	60,00	105,11						
4		4	01	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	235.046.350	8	55.657.370	1	29.207.336						1,00	29.207.336	1	29.207.336	0,00	0,00	9	84.864.706	90,00	36,11						
5		4	01	02		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Dinas/Operasional	unit	10	37.379.085	0	-											0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
		4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			157.145.274		41.177.000	21	14.112.000	0%	0	0	0	-	-		13.440.000	20	13.440.000	0	0	90	54.617.000	130	15					

		4			5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
						K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			
1		4	01	03	01	Pengadaan Mesin Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	-	1	9.000.000		0						0	-	0,00	0,00	1	9.000.000	100,00	0,00				
2		4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	150	157.145.274	69	32.177.000	21	14.112.000				20,00	13.440.000	20	13.440.000	0,00	0,00	89	45.617.000	59,33	29,03				
		4	01	03		Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan			88.646.052	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	1	-	10	0				
1		4	01	03	01	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkan sistem Administrasi Kependudukan (membangun ,Updating dan Pemeliharaan)	sistem	5	88.646.052	1	-								0	-	0,00	0,00	1	-	20,00	0,00				
2		4	01	03	02	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	250	-	0	-								0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00				
		2	16	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya			134.312.200		37.450.000	1	13.900.000	1	13.900.000	0	0	0	-	-	1	13.900.000	100	100	3	51.350.000	23	38		
1		2	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	kali	13	134.312.200	2	37.450.000	1	13.900.000	1	13.900.000,00				1	13.900.000	100,00	100,00	3	51.350.000	23,08	38,23				
						Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan			67.156.100	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
1						Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	250	67.156.100	0	-							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
						Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			335.780.500	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
1						Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	10	335.780.500	0	-							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
		1	06	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan			47.009.270		61.839.200	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	#DIV/0!	0	2	61.839.200	40	132			
1		1	06	17	4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	47.009.270	2	61.839.200	0	0					0	-	# DIV/0!	0,00	2	61.839.200	40,00	131,55					
		1	06	20		Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik			201.468.300	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
1		1	06	20	1	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitas /Pemeliharaan Jalan	km	10	201.468.300	0	-							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
		1	06	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			134.312.200	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
1		1	06	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	250	134.312.200	0	-							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
		1	06	20		Peningkatan Pelayanan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			335.780.500		4.700.000	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	10	4.700.000	10	1			
1		1	06	20	1	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	100	335.780.500	10	4.700.000							0	-	0,00	0,00	10	4.700.000	10,00	1,40					
		1	06	20		Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan			94.018.540	-	0	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0				
1		1	06	20	1	Pembentukan dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	kali	5	94.018.540	0	-							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
		4	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah			56.881.217		35.900.000	200	12.300.000	200	12.300.000	0	0	0	-	-	200	12.300.000	100	100	525	48.200.000	105	85		
1		4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	orang kali	500	56.881.217	325	35.900.000	200	12.300.000	200	12.300.000				200	12.300.000	100,00	100,00	525	48.200.000	105,00	84,74				
		4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan			141.027.810		67.200.000	6	7.200.000	6	7.200.000	0	0	0	-	-	6	7.200.000	100	100	52	74.400.000	87	106		
1		4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60	70.513.905	46	67.200.000	6	7.200.000	6	7.200.000				6	7.200.000	100,00	100,00	52	74.400.000	86,67	105,51				
2		4	01	23	2	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	5	70.513.905	0	-							0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM										4.165.485.001		1.225.707.585		414.615.445	292	76.856.347	15	16.966.975	137	40.146.221	746,00	261.291.279	1.212	395.260.822	#DIV/0!	390	3.886	1.620.968.407	590	493	

2				3				4				5				6		7				8				9				10				11				12				13				14=(9+10+11+12)				15=13/8x100%				16=(7+13)				17=15/6x100%				18																																															
				KECAMATAN JUHAR																																																																																																									
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran				1.193.286.990				0				664.043.124				522				352.757.009				32				24.050.000				27				20.050.000				124				50.986.059				390,00				203.190.950				573				298.277.009				93				49				3.289				962.320.133				338				58				Kec. Juhar													
				Penyediaan jasa surat menyurat				Tersedianya jasa surat menyurat				bh				12				9.700.000				475				3.750.000				0				0				0																0				-				0,00				0,00				475				3.750.000				3958,33				38,66																									
				Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik				bln				12				5.000.000				0				-				12				18.000.000				0				-								0				-				0,00				0,00				0				-				0,00				0,00																													
				Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional				Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional				unit				10				9.500.000				3				3.232.000				1				2.000.000				0				-								1,00				2.000.000				1				2.000.000				0,00				0,00				4				5.232.000				40,00				55,07																					
				Penyediaan jasa administrasi keuangan				Tersedianya jasa administrasi keuangan				ob				300				191.587.755				138				75.250.000				36				41.520.000				0				-								36,00				30.480.000				36				30.480.000				100,00				73,41				174				105.730.000				58,00				55,19																					
				Penyediaan jasa kebersihan kantor				Tersedianya jasa kebersihan kantor				ob				60				65.880.246				32				48.312.100				12				14.728.650				2				2.400.000				2				2.400.000				4				4.800.000				4,00				5.128.650				12				14.728.650				100,00				100,00				44				63.040.750				73,33				95,69									
				Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja				Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja				unit				37				18.000.000				4				-				7				4.100.000				0				-												0				-				0,00				0,00				4				-				10,81				0,00																									
				Penyediaan alat tulis kantor				Tersedianya alat tulis kantor				jns				151				78.796.792				115				44.969.824				39				18.325.659				20				9.000.000								36				9.325.659				3,00				5.025.000				59				23.350.659				151,28				127,42				174				68.320.483				115,23				86,70													
				Penyediaan barang cetak dan penggandaan				Tersedianya barang cetak dan penggandaan				jenis				16				32.148.000				9				17.450.000				3				6.525.000				0				-				3				1.500.000								3				1.500.000				100,00				22,99				12				18.950.000				75,00				58,95																					
				Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor				Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor				buah				250				24.000.000				0				-				10				6.171.600				0				-								48				6.171.600				48				6.171.600				480,00				100,00				48				6.171.600				19,20				25,72																					
				Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor				unit				20				153.346.197				14				75.000.000				6				83.000.000				0				-								6,00				83.000.000				6				83.000.000				0,00				0,00				20				158.000.000				100,00				103,03																					
				Penyediaan peralatan rumah tangga				Tersedianya peralatan rumah tangga				jenis				96				47.788.000				27				5.422.200				16				17.208.800				0				-				12				3.500.000				13				3.708.800				3,00				10.000.000				28				17.208.800				175,00				100,00				55				22.631.000				57,29				47,36									
				Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan				bh				1800				13.040.000				1.070				6.474.000				1				2.100.000				0				-								1,00				2.100.000				1				2.100.000				0,00				0,00				1.071				8.574.000				59,50				65,75																					
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah				ohk				1471				280.500.000				589				200.283.000				319				62.520.000				0				-								3				1.680.000				316,00				39.500.000				319				41.180.000				100,00				65,87				908				241.463.000				61,73				86,08													
				Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran				Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran				ob				300				264.000.000				240				183.900.000				60				76.557.300				10				12.650.000				10				12.650.000				20				25.300.000				20,00				25.957.300				60				76.557.300				100,00				100,00				300				260.457.300				100,00				98,66									
				6 9 18				Penataan Administrasi Kependudukan				Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan				%				100				61.051.000				0				-				0				0				0				0				0				-				-				-				0				-				0				0				0				-				0				0				Kec. Juhar									
				6 9 15 3				Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)				sistem				5				44.951.000				0				-				0				0				0				0								0				-				0,00				0,00				0				-				0,00				0,00				Kec. Juhar																									
				6 9 15 5				Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan				Keg				3				16.100.000				0				-				0				0				0				0								0				-				0,00				0,00				0				-				0,00				0,00																													
				1 9 23				Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan				Meningkatnya pelayanan kecamatan				%				100				61.051.000				0				68.050.000				12				10.350.000				0				0				0				0				3				10.350.000				-				-				3				10.350.000				13				50				39				78.400.000				33				109				Kec. Juhar	
				1 9 23 01				Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan				kali				60				36.051.000				36				68.050.000				12				10.350.000				0				-								3				10.350.000				25,00				100,00				39				78.400.000				65,00				217,47				Kec. Juhar																									
				1 9 23 02				Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan				sistem				5				25.000.000																0				-																				0,00				0,00								0,00				0,00																																	
2				4 9 2				Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur				%				100				482.483.000				0				80.250.000				7				52.861.350				0				0				0				0				0				-				7,00				52.790.000				7				52.790.000				0				0				14				133.040.000				11				20				Kec. Juhar					
				4 9 02 06				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional				unit				3				121.000.000				0				-				-				-				0				0								0				-				0,00				0,00				0				-				0,00				0,00																													
				1 9 02 10				Pengadaan meubelair				unit				290				152.457.305				4				21.000.000				6				17.061.350				0				-								6,00				16.990.000				6				16.990.000				0,00				0,00				10				37.990.000				3,45				24,92																					
				4 9 02 18				Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional				unit				10				171.000.000				3				59.250.000				1				35.800.000				0				0								1,00				35.800.000				1				35.800.000				0,00				0,00				4				95.050.000				40,00				55,58																					
				4 9 02 40				Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor				unit				5				38.025.695				0				-				0				0				0				0								0				-				0,00				0,00				0				-				0,00				0,00																													
				4 9 3				Program Peningkatan Disiplin Aparatur				%				100				223.629.813				0				73.230.000				26				17.472.000				0				0				0				0				-				26,00				17.472.000				26				17.472.000				0				0				207				90.702.000				56				44				Kec. Juhar									
				4 9 03 01				Pengadaan mesin/ kartu absensi				unit				1				10.000.000				1				9.000.000				0				-				0				0								0				-				0,00				0,00				1				9.000.000				100,00				90,00																													
				4 9 03 02				Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya				stel				298				193.629.813				180				64.230.000				26				17472000				0				0								26,00				17.472.000				26				17.472.000				0,00				0,00				206				81.702.000				69,13				42,19																					

		2			3			4			5			6		7			8			9			10			11			12			13			14=(9+10+11+12)			15=13/8x100%			16=(7+13)			17=15/6x100%			18		
				4	9	03	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan				keg	2	20.000.000				0	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	-	0	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00								
				4	9	03		Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Desa dalam Membangun Desa				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Desa dalam membangun Desa				%	100	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	-	0	0	0	-	0	0	Kec. Juhar							
				4	9	03	01	Pembinaan kelompok Masyarakat Pembangunan Desa				Terbinanya kelompok masyarakat Pembangunan Desa				Kegiatan	15	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00											
3				3	9	18		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial				Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Sosial				%	100	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Kec. Juhar										
				3	9	18	03	Peningkatan Peran Aktif masyarakat dunia usaha				terlaksananya peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha				org	250	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00														
				7	9	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa				Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				%	100	80.102.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0											
				7	9	18	00	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa				Terlaksananya Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa				keg	5	30.525.500				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00											
4				7	9	18	04	Monitoring Evaluasi Ranperdes				Terseleenggaranya monitoring ranperdes				ok	5	19.051.000				0	-	0	-	0		0	0		0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00	Kec. Juhar										
				7	9	18	07	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				Terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan				keg	6	30.525.500				0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00												
				5	9	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan				Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan				%	100	140.291.699				0		49.220.000	20		0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	#DIV/0!	3	49.220.000	60	35	Kec. Juhar					
				5	9	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)				Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)				kali	5	140.291.699				3		49.220.000	20		0	0	-	0	-	0,00	# DIV/0!	3	49.220.000	60,00	35,08														
				5	9	19		Program Peningkatan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban Masyarakat				Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan				%	100	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Kec. Juhar										
				5	9	19	04	Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				Terlaksananya Pembentukan Dan Pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat				kegiatan	5	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00												
				5	9	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PERKAT)				Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PERKAT)				%	100	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Kec. Juhar										
				5	9	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba				Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba				keg	5	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00												
				13	9	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan				Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan				%	100	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Kec. Juhar										
				13	9	16	07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan				Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan				keg	5	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00												
				13	9	17		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				Meningkatnya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				%	100	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00		-	0,00	0,00	Kec. Juhar											
				13	9	17	01	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan				Terpeliharanya jalan dan jembatan				km	8	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00												
				13	9	20		Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga				Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga				%	100	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	0	0	0	-	0	0	Kec. Juhar										
				13	9	20	14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat				Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat				Keg	5	61.051.000				0	-	0	-	0	0	0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00												
				13	9	20		Program Pemberdayaan PKK				Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasarakatan Olahraga				%	100					0	-	0	-	1		0	0	0	-	0	-	0,00	0,00		-	0,00	0,00												
				13	9	20	14	Pengembangan Program PKK				Terlaksananya Pengembangan program PKK				thn	1					0	-	0	-	0		0	0	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00												
				16	9	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya				Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya				%	100	61.051.000				0		20.000.000	1		12.500.000	0,00	12.500.000		0	-		12.500.000	5	100		32.500.000	13	53											
				16	9	16	06	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata				Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata				Keg	15	61.051.000				1		20.000.000	20		12.500.000	1	12.500.000		1	12.500.000	5,00	100,00	2		32.500.000	13,33	53,23												
				3	9	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah				Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah				%	100	110.639.675				0		44.585.000	21		29.595.000	0	0	1	10.345.000	0	-	0	-	1	10.345.000	3	17	4	54.930.000	40	25								
				3	9	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan				Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan				kali	5	110.639.675				3		44.585.000	20		29.595.000	0	-	1	10.345.000		1	10.345.000	5,00	34,96	4		54.930.000	80,00	49,65										

		3				4	5	6	K		7		K		8		K		9		K		10		K		11		K		12		K		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
												Rp.				Rp.							Rp.																						
			3	9	21	17	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5			0		1	0	0																0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00					
							Jumlah					2.840.943.177	0		999.378.124	610	475.535.359	32	36.550.000		30.395.000		61.336.059		273.452.950		401.734.009	111	#DIV/0!							1.401.112.133	513	321							
							KECAMATAN KABANJAE																																						
1.		4	01	01			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100 %	4.699.261.905	0	2.333.781.751	1.672	921.225.738	125	96.455.300	2	164.643.250		147.175.450	946,00	497.528.664	1.433	905.802.664	57	317	15.916	3.239.584.415	4	1	0													
		4	01	01	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	950	4.230.834	670	5.160.000	0	0	0	0		0	-		0	-	0,00	0,00	670	5.160.000	0,71	1,22	Kec. Kabanjahe															
		4	01	01	02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	17.863.523	36	20.711.025	12	9.000.000	2	1.386.000	2	1.386.000	4	2.772.000	4,00	2.772.000	12	8.316.000	100,00	0,00	48	29.027.025	0,80	1,62	Kec. Kabanjahe													
		4	01	01	06		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	unit	30	18.132.147	12	4.221.098	6	4.800.000	0	0		0	-	6,00	4.651.264	6	4.651.264	0,00	51,68	18	8.872.362	0,60	0,49	Kec. Kabanjahe														
		4	01	01	07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	480	277.824.786	218	114.935.000	108	115.184.300	0	0		0	-	72,00	103.150.000	72	103.150.000	66,67	0,00	290	218.085.000	0,60	0,78	Kec. Kabanjahe														
		4	01	01	08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	orang bulan	60	56.411.124	32	34.337.500	12	14.908.650	2	2.430.000	0	3.645.000	3	3.645.000	4,00	5.180.250	9	14.900.250	75,00	12,94	41	49.237.750	0,68	0,87	Kec. Kabanjahe													
		4	01	01	09		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	31	15.311.591	10	12.040.000	8	7.140.000	0	0		1.410.000	0	-	6,00	5.690.000	6	7.100.000	75,00	47,62	16	19.140.000	0,52	1,25	Kec. Kabanjahe													
		4	01	01	10		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	160	291.470.274	7.821	205.096.218	32	90.013.241	5	4.929.300		17.570.750	0	-	17,00	67.388.000	22	89.888.050	68,75	1258,94	7.843	294.984.268	49,02	1,01	Kec. Kabanjahe													
		4	01	01	11		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	jenis	37	141.605.352	12	70.790.000	8	21.304.000	0	0		9.066.500	0	-	4,00	12.237.500	4	21.304.000	50,00	23,67	16	92.094.000	0,43	0,65	Kec. Kabanjahe													
		4	01	01	12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	315	50.870.746	101	6.152.630	75	2.747.250	0	0		30	1.715.000	45,00	1.032.250	75	2.747.250	100,00	12,90	176	8.899.880	0,56	0,17	Kec. Kabanjahe														
		4	01	01	13		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Unit	46	379.191.210	19	242.341.000	2	29.000.000	0	0		0	-	2,00	29.000.000	2	29.000.000	0,00	1055,60	21	271.341.000	0,46	0,72	Kec. Kabanjahe														
		4	01	01	14		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	buah	2750	188.037.080	1.178	33.261.100	600	26.547.600	0	0		135	3.498.450	465,00	23.049.150	600	26.547.600	100,00	0,00	1.778	59.808.700	0,65	0,32	Kec. Kabanjahe														
		4	01	01	15		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	3690	16.117.464	1.342	12.600.000	0	0	0	0		0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	1.342	12.600.000	0,36	0,78	Kec. Kabanjahe														
		4	01	01	18		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	2516	413.580.842	956	249.496.180	113	29.000.447	0	0		14	3.980.000	89,00	22.638.000	103	26.618.000	91,15	0,00	1.059	276.114.180	0,42	0,67	Kec. Kabanjahe														
		4	01	01	19		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang bulan	3480	2.828.614.932	2.076	1.322.640.000	696	571.580.250	116	87.710.000		131.565.000	174	131.565.000	232,00	220.740.250	522	571.580.250	75,00	1970,94	2.598	1.894.220.250	0,75	0,67	Kec. Kabanjahe													
2		4	01	02			Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		1	1.239.332.247	0	134.541.000	10	109.109.000	0	0	0	0	-	10,00	108.939.000	10	108.939.000	0	0	101	243.480.000	0	0	Kec. Kabanjahe														
		4	01	02	10		Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	150	487.553.286	78	83.951.000	3	10.080.000	0	0		0	-	3,00	10.050.000	3	10.050.000	0,00	0,00	81	94.001.000	0,54	0,19	Kec. Kabanjahe														
		4	01	02	22		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	unit	5	335.780.500	-	1	20.000.000	0	0		0	-	1,00	19.860.000	1	19.860.000	0,00	0,00	1	19.860.000	0,20	0,06	Kec. Kabanjahe															
		4	01	02	10		Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	46	415.998.461	13	50.590.000	6	79.029.000	0	0		0	-	6,00	79.029.000	6	79.029.000	0,00	0,00	19	129.619.000	0,41	0,31	Kec. Kabanjahe														
3		4	01	03			Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100 %	602.725.998	0	83.012.000	56	33.048.000	0	0	0	0	-	55,00	32.436.000	55	32.436.000	0	0	281	115.448.000	0	0	Kec. Kabanjahe														
		4	01	03	01		Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya Mesin/ Kartu Absensi	unit	1	10.000.000	0	-	0	0	0	0		0	-		0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00			Kec. Kabanjahe											
		4	01	03	02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	345	340.725.499	174	53.632.000	56	33.048.000	0	0		0	-	55,00	32.436.000	55	32.436.000	0,00	0,00	229	86.068.000	0,66	0,25	Kec. Kabanjahe														
		4	01	03	02		Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	stel	280	252.000.499	52	29.380.000	0	0	0	0		0	-		0	-	0,00	0,00	52	29.380.000	0,19	0,12	Kec. Kabanjahe															
4		2	16	16			Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		100 %	61.051.000	0	28.296.110	5	15.628.284	0	0	0	0	-	15.353.900	-	-	4	15.353.900	80	98	6	43.650.010	1	1	Kec. Kabanjahe													
		2	16	16	06		Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jumlah even kebudayaan yang dilaksanakan	jenis	11	61.051.000	2	28.296.110	5	15.628.284	0	0		4	15.353.900		4	15.353.900	80,00	98,24	6	43.650.010	0,55	0,71	Kec. Kabanjahe															
8		2	13	20			Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		100 %	61.051.000	0	89.778.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	3	89.778.000	1	1	Kec. Kabanjahe														
		2	13	20	14		Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	jenis	5	61.051.000	3	89.778.000	0	0	0	0		0	-		0	-	0,00	0,00	3	89.778.000	0,60	1,47	Kec. Kabanjahe															
6		1	05	17			Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan wawasan Kebangsaan		100 %	97.544.235	0	150.656.040	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	3	150.656.040	1	2	Kec. Kabanjahe														
		1	05	17	04		Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	97.544.235	3	150.656.040	0	0	0	0		0	-		0	-	0,00	0,00	3	150.656.040	0,60	1,54	Kec. Kabanjahe															
7		1	05	20			Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKATI)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKATI)		100 %	167.890.250	0	74.455.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	660	74.455.000	1	0	Kec. Kabanjahe														

		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	05	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba																								Kec. Kabanjahe	
	8	1	22	19		Peningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan		100 %		307.697.040	0	11.200.000	100	11.450.000	0	0	2.025.000	2.475.000	20,00	5.850.000	60	10.350.000	60	90	160	21.550.000	0	0		Kec. Kabanjahe	
		1	22	19	02	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK		orang kali	400	185.595.040	100	11.200.000	100	11.450.000	0	0	2.025.000	40	2.475.000	20,00	5.850.000	60	10.350.000	60,00	90,39	160	21.550.000	0,40	0,12		Kec. Kabanjahe
		1	22	19	04	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK		tahun	5	122.102.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe	
	9	4	03	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah		100 %		78.875.457	0	43.461.000	320	15.975.000	0	0	15.975.000	-	-	-	0	15.975.000	0	100	596	59.436.000	0	1		Kec. Kabanjahe	
		4	03	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan		orang kali	1380	78.875.457	596	43.461.000	320	15.975.000	0	0	15.975.000	0	-	-	0	15.975.000	0,00	100,00	596	59.436.000	0,43	0,75		Kec. Kabanjahe	
	10	4	01	25		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan		100 %		18.027.350.350	0	4.213.385.110	250	5.269.135.000	0	0	9.900.000	755.542.920	80,00	3.192.494.410	8	11.250.000	67	#DIV/0!	41	4.224.635.110	1	2		Kec. Kabanjahe	
		4	01	25	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan		kali	60	46.051.000	33	73.470.000	12	11.250.000	0	0	9.900.000	0	-	8,00	1.350.000	8	11.250.000	66,67	0,21	41	84.720.000	0,68	1,84		Kec. Kabanjahe
		4	01	25	02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan		sistem	3	15.000.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe
						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Paket	103	15.847.280.380	37	3.907.325.910	44	2.942.354.500	0	0	0	-	37,00	2.011.503.100		0,00	# DIV/0!		3.907.325.910				Kec. Kabanjahe		
						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		Kali	394	2.119.018.970	89	232.589.200	194	2.315.530.500	0	0	120	755.542.920	35,00	1.179.641.310		0,00	0,00		232.589.200				Kec. Kabanjahe		
						Program Pembangunan Sarana dan Fasilitas Perhubungan		100 %		78.875.457	0	65.450.000	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	1	65.450.000	0	1		Kec. Kabanjahe	
						Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		kali	4	78.875.457	1	65.450.000	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0,00	0,00	1	65.450.000	0,25	0,83		Kec. Kabanjahe	
	11					Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		100 %		61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		Kec. Kabanjahe	
						Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan		km	25	61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe	
	12	1	19	19		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		100 %		167.890.250	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		Kec. Kabanjahe	
		1	19	19	01	Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat		orang	125	167.890.250	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe	
	13	1	19	18		Program Penataan Administrasi Kependudukan		100 %		51.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		Kec. Kabanjahe	
		1	19	15	3	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan		orang kali	480	51.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	-	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe
	14	1	19	16		Program Meningkatkan Peran Serta Komunitas		100 %		61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		Kec. Kabanjahe	
		1	19	16	7	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan		orang kali	125	61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe	
	15	1	19	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100 %		61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		Kec. Kabanjahe	
		1	19	18	10	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes		orang kali	750	61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe	
	16	1	19	15		Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		100 %		80.587.320	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		Kec. Kabanjahe	
		1	19	15	23	Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Balho, Selebaran dan Hibmauan		kali	60	80.587.320	0	-	0	0	0	0	0	-	-	0	-	0	0,00	0,00	0	-	0,00	0,00		Kec. Kabanjahe	
JUMLAH										25.904.336.509		7.228.016.011		6.375.571.022		96.455.300		192.543.250		920.547.270	1.111,00	3.837.248.074		1.100.106.564	264	#DIV/0!	17.767	8.328.122.575	9	9	

1	2	3	4			5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						KECAMATAN BERASTAGI																										
1						Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		3.663.697.294	0	2.044.737.197	2.421	814.365.905	175	113.661.937	8	170.382.811	0	69.710.541		382.399.468	186	736.154.757	24	151	5.635	2.780.891.954	49	76		Kec. Berastagi		
		1	20	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	800	5.439.644	410	3.120.000		-		-	0	-	-	0	-	0,00	0	410	3.120.000	51,25	57,36		Kec. Berastagi			
		1	20	1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya sumber daya air dan listrik	bln	60	134.312.200	24	33.874.655	12	24.600.000,00	3	2.107.937	2	3.940.811	0	1.606.541	3,00	5.357.468	8	13.012.757	66,67	0	32	46.887.412	53,33	34,91	Kec. Berastagi	
		1	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	35	67.156.100	2	2.028.230	2	2.300.000,00	0		0	-	2,00	2.300.000	0	2.300.000	0,00	9,3495935	2	4.328.230	5,71	6,45		Kec. Berastagi		
		1	20	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	266	293.875.094	105	106.880.000	301	150.045.000,00		0	7.910.000	0	-	-	89.830.000	0	97.740.000	0,00	0	105	204.620.000	39,47	69,63		Kec. Berastagi	
		1	20	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	75	60.440.490	48	59.760.000	24	29.485.000,00	6	4.860.000	6	9.720.000	0	2.430.000	-	12.475.000	12	29.485.000	50,00	19,6507714	60	89.245.000	80,00	147,66		Kec. Berastagi
		1	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	50	38.010.353	18	14.330.000	18	13.050.000,00		0	5.200.000	0	-	-	7.850.000	0	13.050.000	0,00	44,2597931	18	27.380.000	36,00	72,03		Kec. Berastagi	
		1	20	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	225	325.105.043	98	192.089.300	50	58.691.905,00	25	24.192.000		0	24.192.000	-	10.307.000	25	58.691.000	50,00	449,739464	123	250.780.300	54,67	77,14		Kec. Berastagi	
		1	20	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	15	33.578.050	7	46.951.000	4	12.940.000,00	2	5.540.000	0	1.000.000	0	-	-	6.400.000	2	12.940.000	50,00	22,0473334	9	59.891.000	60,00	178,36		Kec. Berastagi
		1	20	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	bh	180	33.578.050	82	6.673.000	6	3.340.000,00	6	3.340.000		0	-	-	-	6	3.340.000	100,00	25,8114374	88	10.013.000	48,89	29,82		Kec. Berastagi	
		1	20	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	27	329.064.890	15	218.092.400	2	20.500.000,00	0		0	-	-	19.500.000	0	19.500.000	0,00	583,832335	15	237.592.400	55,56	72,20		Kec. Berastagi		
		1	20	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bh	1426	67.156.100	478	52.513.000	840	26.084.000,00	10	8.042.000		0	8.042.000	-	10.000.000	10	26.084.000	1,19	0	488	78.597.000	34,22	117,04		Kec. Berastagi	
		1	20	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan peraturan perundangan-undangan	bh	3320	53.724.880	2.184	15.960.000	360	2.160.000,00			0	-	-	2.160.000	0	2.160.000	0,00	8,28093851	2.184	18.120.000	65,78	33,73		Kec. Berastagi		
		1	20	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	ohk	2570	376.074.160	978	313.803.112	298	44.640.000,00	0		0	11.452.000	0	-	-	19.870.000	0	31.322.000	0,00	0	978	345.125.112	38,05	91,77		Kec. Berastagi
		1	20	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	ob	1631	1.846.182.240	1.000	978.662.500	504	426.530.000,00	123	65.580.000		131.160.000	0	33.440.000	-	196.350.000	123	426.530.000	24,40	955,488351	1.123	1.405.192.500	68,85	76,11		Kec. Berastagi
		1	20	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		%	100	1.178.119.462	0	339.477.900	1	33.600.000	0	0	0	0	-		33.600.000	3	33.600.000	33	0	56	373.077.900	48	32		Kec. Berastagi	
		1	20	02	10	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Meubeler	unit	220	405.824.312	45	108.700.000		-	0		0	-	-	-	0	-	0,00	0	45	108.700.000	20,45	26,78		Kec. Berastagi		
		1	20	03	11	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	35	335.780.500	1	84.996.800		25.600.000,00			0	-	2,00	25.600.000	2	25.600.000	0,00	0	3	110.596.800	8,57	32,94		Kec. Berastagi		
		1	20	06	14	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	unit	7	436.514.650	7	145.781.100	1	8.000.000,00		0	-	1,00	8.000.000	1	8.000.000	100,00	0	8	153.781.100	114,29	35,23		Kec. Berastagi			
		1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur			400.921.917	0	96.915.000	60	28.200.000	0	0	0	0	-		27.000.000	0	27.000.000	0	0	215	123.915.000	44	41		Kec. Berastagi		
						Pengadaan Mesin Absensi	Tersedianya mesin absensi	unit	4	71.246.517	1	9.000.000	-			0	-	-	-	0	-	0,00	0	1	9.000.000	25,00	12,63		Kec. Berastagi			
						Pengadaan Pakaian Dinas Khusus Hari - hari tertentu	Adanya Pakaian Khusus Hari hari tertentu	stel	345	164.837.700	108	17.280.000		28.200.000,00			0	-	-	27.000.000	0	27.000.000	0,00	0	108	44.280.000	31,30	26,86		Kec. Berastagi		
		1	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	345	164.837.700	106	70.635.000	60	-		0	-	-	-	0	-	0,00	0	106	70.635.000	30,72	42,85		Kec. Berastagi			
		1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah			112.939.771	0	41.600.000	150	15.480.000	150	15.480.000	0	0	-		-	150	15.480.000	100	100	550	57.080.000	100	51		Kec. Berastagi		
		1	06	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terselenggarana Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	ok	551	112.939.771	400	41.600.000	150	15.480.000,00	150	15.480.000		0	-	-	-	150	15.480.000	100,00	100	550	57.080.000	99,82	50,54		Kec. Berastagi	
		1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			131.290.176	0	128.210.000	1	0	0	0	0	0	-		-	0	-	0	0	2	128.210.000	40	98		Kec. Berastagi		
		1	19	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggarannya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	131.290.176	2	128.210.000	1	-		0	-	-	-	0	-	0,00	0	2	128.210.000	40,00	97,65		Kec. Berastagi			
2		1	19	17		Program Pengelolaan kekayaan budaya			221.615.130	0	42.345.000	2	12.849.000	1	0	0	12.849.000	-		-	1	12.849.000	50	100	4	55.194.000	10	25		Kec. Berastagi		
		1	19	17	04	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	41	221.615.130	3	42.345.000	2	12.849.000,00	1		12.849.000	0	-	-	-	1	12.849.000	50,00	100,00	4	55.194.000	9,76	24,91		Kec. Berastagi	
3		1	19	17		Program Peningkatan Peran serta kepemudaan			236.389.472	0	-	0	0	0	0	0	0	-		-	0	-	0	0	0	-	0	0		Kec. Berastagi		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	19	17	04	pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	okh	250	236.389.472	0	-	-	0			
4		1	19	17		Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraza			369.358.550	0	-	2	0	2	0	0	
		1	19	17	04	pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	jenis	16	369.358.550	0	-	2		0	-	-
5						Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik			73.871.710	0	54.700.000	0	0	0	0	
						Rehabilitas/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	73.871.710	3	54.700.000	-	-	0	-	-
6		1	19	17		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)			167.890.250	0	49.130.000	130	0	0	0	
		1	19	17	04	Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	terselenggaranya pencegahan peredaran penggunaan minuman keras dan narkoba	ok	402	167.890.250	100	49.130.000	130		0	-	-
7					18	Program Penataan Administrasi Kependudukan				406.294.405	0	-	0	0	0	0	
					15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Sistem	5	152.627.500	0	-	-	0			
					15	05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	ok	75	253.666.905	0	-	-	0		0	-
8		1	19	18		Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan	Meningkatnya Peran Perempuan di Perdesaan			61.051.000	0	-	0	0	0	0	
		1	19	15	03	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakannya Tim Penggerak PKK	OK	60	30.525.500	0	-	-	0		0	-
		1	19	15	05	Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Dana Operasionalisasi Tim Penggerak PKK	Tahun	5	30.525.500	0	-	-	0		0	-
						Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				80.587.320	0	-	0	0	0	0	
						Penyebaran Informasi melalui Spanduk, Balho, Sebaran dan Hibauan	Tersedianya Informasi melalui Spanduk, Balho, Sebaran dan Hibauan	Jenis	12	80.587.320	0	-			0	-	-
10		1	19			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				61.051.000	0	4.634.000	0	0	0	0	
						Monitoring dan Evaluasi RanperDes	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi RanperDes	orang kali	40	61.051.000	0	4.634.000	-	0		-	-
11		1	19	18		Program Peningkatan pelayanan kecamatan				4.403.359.000	0	2.299.697.869	86	4.176.225.000	0	0	0
		1	19	15	03	rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Terselenggaranya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	60	61.051.000	18	97.246.000	12	6.450.000,00		6.450.000	0
		1	19	15	03	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi e-Paten untuk pelayanan terpadu kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkannya Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	0	-	0	-	-	-		0	-
		1	9	24	04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terselenggaranya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	paket	0	4.085.141.000	17	2.072.445.869	71	3.341.565.000		0	-
		1	9	24	05	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		0	257.167.000	5	130.006.000	3	828.210.000		0	475.812.500
										0						-	2.639.058.865
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM				11.568.436.457		5.101.446.966		5.080.719.905		129.141.937	
																189.681.811	545.523.041
																2.639.058.865	2.639.058.865
																3.503.405.654	#DIV/0!
																356	6.607
																8.604.852.620	370
																	777
						KECAMATAN TIGABINANGA											
		4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.882.793.631	0	1.130.913.349	1.520	391.208.363	55	46.365.162	277
		4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat-menyurat	buah	1250	12.088.098	760	3.540.000	270	-			
		4	01	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	24.176.196	36	20.476.585	12	31.200.000	3	7.095.162	3
																7.328.582	2
																4.947.431	3,00
																5.979.982	11
																25.351.157	91,7
																0,0	47
																45.827.742	78,3
																189,6	

2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
									K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
		4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	unit	10		10.744.976	4	3.484.250	2	2.000.000										0	-	0,0	0,0	4	3.484.250	40,0	32,4	Kec. Tigabinanga			
		4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	ob	540	295.352.528	261	113.940.000	96	43.202.320	10	3.240.000	20	6.480.000	10	3.240.000	119,00	54.860.000	159	67.820.000	165,6	0,0	420	181.760.000	77,8	61,5	Kec. Tigabinanga					
		4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	ob	60	56.411.124	36	36.780.000	12	14.645.730	3	3.645.000	1	1.215.000	4	4.860.000	3,00	3.645.000	11	13.365.000	91,7	30,9	47	50.145.000	78,3	88,9	Kec. Tigabinanga					
		4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	50	10.093.804	12	7.980.000	4	5.102.925		7	4.960.000						7	4.960.000	175,0	33,9	19	12.940.000	38,0	128,2	Kec. Tigabinanga					
		4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	175	116.124.582	152	80.889.507	30	25.569.354		27	7.999.385	27	7.000.145	27,00	11.863.820	81	26.863.350	270,0	526,4	233	107.752.857	133,1	92,8							
		4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	25	25.049.225	10	14.957.776	2	6.991.400		2	2.000.000	2	2.000.000	2,00	2.991.400	6	6.991.400	300,0	27,3	16	21.949.176	64,0	87,6	Kec. Tigabinanga						
		4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/ Penerangan kantor	buah	150	6.446.986	70	3.442.000	20	1.151.520		20	1.140.000					20	1.140.000	100,0	16,3	90	4.582.000	60,0	71,1	Kec. Tigabinanga						
		4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	75	161.174.640	16	158.294.100	8	24.000.000					8,00	23.900.000	8	23.900.000	100,0	2075,5	24	182.194.100	32,0	113,0								
		4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan Rumah Tangga	buah	50	12.826.815	222	25.000.631	12	15.648.996		112	2.999.135	112	2.649.861	1,00	10.000.000	225	15.648.996	1875,0	0,0	447	40.649.627	894,0	316,9							
		4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	120	24.176.196	72	10.800.000	24	-							0	-	0,0	0,0	72	10.800.000	60,0	44,7	Kec. Tigabinanga							
		4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang/hari/ kali	2750	394.783.849	1.816	314.288.500	860	83.090.388		46	13.618.000	20	1.000.000	423,00	64.062.000	489	78.680.000	56,9	0,0	2.305	392.968.500	83,8	99,5							
		4	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	orang/bulan	240	733.344.612	480	337.040.000	168	138.605.730	39	32.385.000	39	32.385.000	13	10.795.000	65,00	62.975.000	156	138.540.000	92,9	166,7	636	475.580.000	265,0	64,9	Kec. Tigabinanga					
		4	01	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur			358.277.794	0	166.589.996	25	37.600.000	0	0	0	0	0	2,00	26.580.000	2	26.580.000	0	0	102	193.169.996	56	49							
		4	01	02	10	Pengadaan Mebeulair	Adanya mebeleur	unit	75	131.045.972	90	72.066.800	23	-	0	0					0	-	0,00	0	90	72.066.800	120,0	55,0								
		4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	10	135.655.322	8	80.523.196	2	37.600.000	0	0					0	-	0,00	0	8	80.523.196	80,0	59,4								
		4	01	02		Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor	Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor	unit	5	30.525.500	2	14.000.000	0		0	0			2,00	26.580.000	2	26.580.000	0,00	0	4	40.580.000	80,0	132,9								
		4	01	02		Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	unit	5	30.525.500	0	-	0		0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0								
		4	01	02		Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	unit	5	30.525.500	0	-	0		0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0								
		4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			182.664.592	0	49.396.400	27	34.944.000	0	0	0	0	0	27,00	18.144.000	27	18.144.000	50	0	109	67.540.400	32	31							
		4	01	03		Pengadaan mesin/ kartu absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	5	33.578.050	1	7.627.400	0		0	0					0	-	0,00	0	1	7.627.400	20,0	22,7								
		4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian dinas khusus hari-hari tertentu	stel	250	149.086.542	81	41.769.000	27	34.944.000	0	0				27,00	18.144.000	27	18.144.000	100,00	0	108	59.913.000	43,2	40,2							
		4	01	16		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan			61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0							
		4	01	16	06	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	5	30.525.500	0	-	0		0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0								
		4	01			Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	ok	25	30.525.500	0	-	-	0	0						0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0								
		4	01			Program Pengelolaan kekayaan budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya			61.051.000	0	56.000.000	1	19.150.000	1	19.150.000	0	0	0	-	-	-	1	19.150.000	100	100	3	75.150.000	20	123						
		4	01			Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	kali	15	61.051.000	2	56.000.000	1	19.150.000	1	19.150.000					1	19.150.000	100,00	100	3	75.150.000	20,0	123,1								
		4	01			Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan			61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0							
		4	01			Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terlaksananya Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	ok	50	61.051.000	0	-	0		0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0								
		4	01	17		Program Pembinaan dan permasyarakatan olah raga	Meningkatnya pembinaan dan permasyarakatan olah raga			61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0							
		4	01	17	04	Pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	Terlaksananya pembinaan olah raga yang berkembang di masyarakat	kali	5	30.525.500	0	-	0		0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0								

2		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga	Terlaksananya Pembinaan Generasi Muda dan Olahraga	kali	5	30.525.500	0	-	0	0	0							0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0				
		4	01	20	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan			57.163.272	0	54.436.000	1	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	3	54.436.000	60	95			
			4	01	20	01	Peringatan HUT Proklamasi RI	Terlaksananya peringatan HUT Proklamasi RI	kali	5	57.163.272	3	54.436.000	1		0	0					0	-	0,00	0	3	54.436.000	60,0	95,2			
			4	01	21	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatny pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)			61.051.000	0	25.194.600	12	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	2	25.194.600	4	41		
			4	01	21	16	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	50	61.051.000	2	25.194.600	12	-	0	0					0	-	0,00	0	2	25.194.600	4,0	41,3			
			4	01	21	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan			61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
			4	01	25	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25	61.051.000	0	-	0	0	0	0						0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0			
			4	01	25	01	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah			117.187.395	0	47.014.600	1	16.113.000	1	16.113.000	0	0	0	-	-	-	1	16.113.000	50	50	4	63.127.600	40	36	
			4	01	25	02	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	86.661.895	3	47.014.600	1	16.113.000	1	16.113.000					1	16.113.000	100,00	100	4	63.127.600	80,0	72,8			
			4	01			Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	orang kali	25	30.525.500	0	-	0	-	0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0			
			4	01			Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan			61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
			4	01			Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender	orang kali	25	61.051.000	0	-	0	-	0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0			
			4	01			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa			61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
			4	01			Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	25	32.051.000	0	-	0		0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0			
			4	01			Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa	orang kali	25	29.000.000	0	-	0		0	0					0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0			
			4	01			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata			61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	-	0	0	0	-	0	0		
					Pelaksanaan Lomba	Terlaksananya Lomba	lomba	5	61.051.000	0	-	0		0	0							0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0			
					Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan			61.051.000	0	881.731.130	13	1.058.627.000	1	2.350.000	2	4.700.000	3	305.000.000	7,00	278.996.000	13	591.046.000	186	492	51	1.472.777.130	26	11.788			
					Rapat koordinasi pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Tersedianya makanan dan minuman rapat	kali	60	36.051.000	24	56.400.000	3	7.050.000	1	2.350.000	2	4.700.000					3	7.050.000	100,00	0,7	27	63.450.000	45,0	176,0			
					Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Paket	36	3.000.000	5	818.206.130	9	277.727.000	0	0				4,00	127.240.000		4	127.240.000	44,44	1804,8227	9	945.446.130	25,0	31514,9			
					Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	kali	45	3.000.000	9	7.125.000	1	773.850.000	0	0			3	305.000.000	3,00	151.756.000	6	456.756.000	600,00	164,462224	15	463.881.000	33,3	15462,7			
					Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	5	19.000.000	0	-	0	0	0	0							0	-	0,00	0	0	-	0,0	0,0	0		
									3.208.596.683	0	2.411.276.075	1.600	1.557.642.363	58	83.978.162	279	84.825.102	193	341.492.437	687,00	563.997.202	1.217	1.074.292.903	623	848	5.394	3.485.568.978	378	12.267			
					KECAMATAN NAMAN TERAN																											
		4	20	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	1.173.270.127	1650	548.148.131	435	215.163.897	91	33.324.000	182	29.984.060	61	29.343.375	208,00	80.185.500	539	172.836.935	99,71	82,89	2189	720.985.066	84,57	57,16			
		4	20	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	63.700.000	36	12.918.282	12	9.000.000	3	2.005.000	3	1.507.800,00	3	2.872.700	3,00	2.547.600	12	8.933.100	100,00	99,26	48,00	21.851.382	80,00	34,30	Kec.Naman Teran	

		3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
		4	20	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	17	14.500.000	6	2.144.399	2	3.200.000							2,00	2.002.900	2	2.002.900	100,00	62,59	8,00	4.147.299	47,06	28,60	Kec.Naman Teran	
		4	20	01	08	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	540	249.000.000	240	95.360.000	48	70.648.500	9	3.133.500	6	1.870.000,00	12	3.740.000	49,00	46.705.000	76	55.448.500	158,33	78,49	316,00	150.808.500	58,52	60,57	Kec.Naman Teran	
		4	20	01	09	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	59.000.000	36	31.200.000	12	12.328.500	3	3.328.500	3	3.000.000,00	3	3.000.000	3,00	3.000.000	12	12.328.500	100,00	100,00	48,00	43.528.500	80,00	73,78	Kec.Naman Teran	
		4	20	01	10	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	34	14.850.000	12	3.600.000	5	-									0	-	0,00	0,00	12,00	3.600.000	35,29	24,24	Kec.Naman Teran	
		4	20	01	11	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	168	89.800.000	63	46.880.215	54	17.830.675	49	8.300.000			5	8.030.675	2,00	1.500.000	54	17.830.675	100,00	100,00	117,00	64.710.890	69,64	72,06		
		4	20	01	12	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	jenis	23	45.450.000	14	28.852.900	2	3.380.000				2	2.180.000,00			1,00	1.200.000	2	3.380.000	100,00	100,00	16,00	32.232.900	69,57	70,92	
		4	20	01	13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Peningaman Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	buah	125	77.900.000	50	2.441.000	13	411.600				13	411.600,00					13	411.600	100,00	100,00	63,00	2.852.600	50,40	3,66	
		4	20	01	15	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	unit	102	30.728.110	213	24.841.520	93	7.470.960				93	2.490.960,00			28,00	4.980.000	121	7.470.960	130,11	100,00	334,00	32.312.480	327,45	105,16	
		4	20	01	01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	2150	290.682.017	883	198.509.815	157	56.636.662	20	3.000.000	56	11.623.700,00	32	4.800.000	114,00	11.350.000	222	30.773.700	141,40	54,34	1105,00	229.283.515	51,40	78,88		
		4	20	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	orang bulan	180	207.660.000	94	83.400.000	36	28.257.000	6	7.557.000	6	6.900.000,00	6	6.900.000	6,00	6.900.000	24	28.257.000	66,67	100,00	118,00	111.657.000	65,56	53,77		
		4	20	01	21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	unit	5	30.000.000	3	18.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000							1	6.000.000	100,00	100,00	4,00	24.000.000	80,00	80,00		
		4	20	02		PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur		18	147.801.222	3	28.489.500	2	25.699.774	0	-	0	-	-	-	1,00	24.987.500	1	24.987.500	50	97,228481	4,00	53.477.000	22,22	36,18		
		4	20	02	24	Pemeliharaan Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya Rutin/Kendaraan Dinas/Operasional	unit	18	147.801.222	3	28.489.500	2	25.699.774						1,00	24.987.500	1	24.987.500	50	97,23	4	53.477.000	22,22	36,18			
		4	20	03		PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Meningkatnya Disiplin Aparatur		291	153.189.323	20	11.200.000	19	12.768.000	0	-	0	-	-	-	19,00	12.768.000	19	12.768.000	100	100	39,00	23.968.000	13,40	15,65		
		4	20	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	stel	291	153.189.323	20	11.200.000	19	12.768.000						19,00	12.768.000	19	12.768.000	100	100,00	39	23.968.000	13,40	15,65			
		2	20	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		13	183.153.000	2	22.260.000	2	10.879.400	1	10.879.400	0	-	-	-	-		1	10.879.400	50	100	3,00	33.139.400	23,08	18,09		
		2	20	16	06	Pengembangan Kedudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	13	183.153.000	2	22.260.000	2	10.879.400	1	10.879.400,00						1	10.879.400	50	100,00	3	33.139.400	23,08	18,09			
		1	20	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan		5	121.552.541	3	59.808.080	1	0	-	-	0	-	-	-			0	-	0	0	3	59.808.080	60,00	49,20		
		1	20	17	4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	121.552.541	3	59.808.080	1	0									0	-	0	0	3	59.808.080	60,00	49,20		
		1	20	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		100	579.984.500	240	26.164.800	90	0	-	-	0	-	-	-			0	-	0	0	240	26.164.800	240,00	4,51		
		1	20	20	1	Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	100	579.984.500	240	26.164.800	90	0									0	-	0	0	240	26.164.800	240,00	4,51		
		4	20	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		690	60.151.034	335	35.492.600	110	15.780.400	177	12.356.400			-	-			177	12.356.400	160,91	78,30	512,00	47.849.000	74,20	79,55		
		4	20	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	orang kali	690	60.151.034	335	35.492.600	110	15.780.400	177	12.356.400							177	12.356.400	160,91	78,30	512,00	47.849.000	74,20	79,55		
		4	20	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		60	141.027.810	14	33.332.000	12	7.907.000	2	4.370.000	0	-	0	-	2,00	3.534.000	4	7.904.000	33,33	99,96	18,00	41.236.000	30,00	29,24		

[illegible]

1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18							
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
		1	06	21	16	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	Terlaksananya musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	orang kali	750	122.627.039	285	13.866.000	160	12.268.000	160	11.340.000	160	11.340.000	100	92	445	25.206.000	59	21							
8		1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan	5	77.983.678	1	50.480.000	0	0	0	0	0	0	-	0	-	1	50.480.000	20	65							
		1	19	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (Hut Proklamasi RI)	kali	5	77.983.678	1	50.480.000	-				0	-	-	-	1	50.480.000	20	65							
6		1	19	18		Program penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	10	386.147.575	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-							
			19	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	sistem	5	250.615.075	0	-					0	-	-	-	-	-	-	-							
			19	15	06	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	5	135.532.500	0	-					0	-	-	-	-	-	-	-							
7		1	19	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	20	335.780.500	2	43.100.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	100	100	3	60.600.000	15	18						
			19	16	06	Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	jenis	20	335.780.500	2	43.100.000	1	17.500.000	1	17.500.000	1	17.500.000	100	100	3	60.600.000	15	18							
8		1	19	17		Program peningkatan Peran serta Kemudahan	Meningkatnya Peran Serta Kemudahan	15	214.899.520	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-							
			19	17	07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Orang kali	15	214.899.520	0	-					0	-	-	-	-	-	-	-							
9		1	19	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah raga	Meningkatnya Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga	15	335.780.500	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-							
			19	20	14	Pembinaan Olah raga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	15	335.780.500	0	-					0	-	-	-	-	-	-	-							
10		1	19	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	500	268.624.400	100	12.590.000	0	0	0	0	0	0	-	0	-	100	12.590.000	20	5							
			19	20		Penyuluhan Pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	orang kali	500	268.624.400	100	12.590.000	-				0	-	-	-	100	12.590.000	20	5							
11		2	07	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	15	335.780.500	0	-	0	0	0	0	0	0	-	0	-	-	-	-	-							
			07	18	08	Monitoring dan evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	15	335.780.500	0	-					0	-	-	-	-	-	-	-							
12		1	19	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	5	33.578.050				0	0							-	-	-	-							
		1	18	18	3	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	km	5	33.578.050	0	-					0	-	-	-	-	-	-	-							
13		4	01	28		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	125	141.027.810	10	21.000.000	6	5.250.000	1	1.925.000					1	1.925.000	17	37	11	22						
			01	25	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	120	102.410.000	10	21.000.000	6	5.250.000	1	1.925.000					1	1.925.000	17	37	11	22					
		01	25	02		Penerapan untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan		sistem	5	38.617.810	0	-									-	-	-	-							
JUMLAH									1.781	4.098.608.769	1.096	475.971.449	3.966	420.249.670	1.961	50.187.901	213	14.291.708	32	27.520.562	1.466,00	141.603.908	3.672	384.112.079	292	317	4.768	860.083.528	345	221	-
KECAMATAN KUTABULUH																															
		01	16	01		Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.384	688.146.278	428	219.696.000	74	24.784.251	-	-	25	18.711.195	254,00	171.996.266	353	215.491.712	111%	73%	1.737	903.637.990	58%	70%		
		01	16	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	buah	500	7.600.000	300	2.700.000	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	300	2.700.000	60%	36%	Kec. Kutabuluh		
		01	16	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Listrik,Internet,Air	bln	60	36.000.000	12	8.134.138	12	14.400.000	3	2.730.251	0	-	4	3.327.195	5,00	4.372.266	12	10.429.712	100%	72%	24	18.563.850	40%	52%	Kec. Kutabuluh
		01	16	01	07	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	7.900.000	2	2.987.500	1	1.900.000	-	-	0	-	0	-	1,00	1.900.000	1	1.900.000	0%	0%	3	4.887.500	30%	62%	Kec. Kutabuluh
		01	16	01	08	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	OB	420	179.000.000	93	85.680.000	84	63.760.000	7	2.740.000	0	-	0	-	84,00	61.020.000	91	63.760.000	108%	100%	184	149.440.000	44%	83%	
		01	16	01	09	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan kantor	OB	60	49.000.000	25	34.980.000	12	14.580.000	2	2.430.000	0	-	5	6.075.000	5,00	6.075.000	12	14.580.000	100%	100%	37	49.560.000	62%	101%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18													
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.														
	01	16	01	10	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	25	22.000.000	8	8.800.000	3	2.650.000	0	1	1.200.000	2,00	1.450.000	3	2.650.000	100%	100%	11	11.450.000	44%	52%				
	01	16	01	11	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	jenis	175	52.118.543	118	42.979.500	34	12.900.000	34	9.954.000	0	-	0	-	10,00	2.946.000	44	12.900.000	129%	100%	162	55.879.500	93%	107%	
	01	16	01	12	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	jenis	35	19.682.000	30	13.177.700	6	3.761.000	6	1.900.000	0	-	6	1.049.000	6,00	811.000	18	3.760.000	300%	100%	48	16.937.700	137%	86%	
	01	16	01	14	penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	50	11.500.000	20	1.000.000	10	1.533.000	10	500.000	0	-	0	-	5,00	1.000.000	15	1.500.000			35	2.500.000			
	01	16	01	15	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	unit	30	183.000.000	11	105.850.100	3	45.200.000	-	0	-	0	-	6,00	45.000.000	6	45.000.000	200%	0%	17	150.850.100	57%	82%		
	01	16	01	16	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	buah	90	26.000.000	53	14.909.400	14	12.972.000	10	2.000.000	0	-	4	735.000	5,00	10.237.000	19	12.972.000	136%	100%	72	27.881.400	80%	107%	
	01	16	01	17	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	60	9.500.000	0	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-			0	-	0%	0%		
	01	16	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	orang hari kali	1.000	339.300.000	674,4172	305.987.940	225	30.860.000	-	0	-	0	-	120,00	30.860.000	120	30.860.000	53%	100%	794,4172	336.847.940	79%	99%		
	01	16	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	OB	60	65.400.000	38	60.960.000	12	15.180.000	2	2.530.000	0	-	5	6.325.000	5,00	6.325.000	12	15.180.000	100%	100%	50	76.140.000	83%	116%	
	01	16	01		Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Tersedianya Jasa keamanan Kantor	OB	60	16.000.000	-	-	12	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-			0	-	0%	0%		
	01	16	02		Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur			407.012.304	54	258.824.800	2	54.790.000	-	-	-	-	-	8,00	54.690.000	2	54.690.000	67%	67%	56	313.514.800	39%	96%		
	01	16	02	01	Pengadaan mebeleur	Adanya Mebeleur	unit	54	175.677.955	47	110.470.000	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	0%	0%	47	110.470.000	87%	63%		
	01	16	02	02	Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	10	136.334.349	2	60.832.000	1	21.190.000	-	0	-	0	-	1,00	21.190.000	1	21.190.000	1	100%	3	82.022.000	30%	60%		
	01	16	02	03	Pengadaan perlengkapan rumah dinas/jabatan	Adanya Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	unit	19	50.000.000	0	-	1	33.600.000	-	0	-	0	-	7,00	33.500.000	1	33.500.000	100%	100%	1	33.500.000	5%	67%		
	01	16	02	04	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	15	45.000.000	5	87.522.800	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-			5	87.522.800	33%	194%		
	01	16	03		Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur			107.120.000	93	25.059.000	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			66	25.059.000	43%	42%		
	01	16	02	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Tersedianya Mesin/Kartu Absensi	unit	1	9.000.000	-	-	1	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-			0	-	0%	0%		
	01	16	02	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan PNS kantor camat	stel	220	98.120.000	66	25.059.000	27	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-			66	25.059.000	30%	26%		
	01	16	02	03	Pengadaan Pakaian Khusus Hari Hari Tertentu	Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapan PNS kantor camat	stel	27	-	27	13.500.000	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-			27	13.500.000	100%	100%		
	01	16	20		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Tersedianya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			250.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	0	-	0%	0%				
	01	16	20	14	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	kali	25	250.000.000	-	0	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-			0	-	0%	0%		
	01	16	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Tersedianya fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat desa			250.000.000	1	16.700.000	2	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	1	16.700.000	4%	7%				
	01	16	20	14	Pembinaan Olahraga yang berimbang di masyarakat	Terbinanya Olahraga yang berimbang di masyarakat	kali	25	250.000.000	1	16.700.000	2	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-			1	16.700.000	4%	7%		
	01	16	20		Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	-terfasilitasinya pemberdayaan masyarakat desa			100.000.000	200	2.050.000	200	2.500.000	20	2.500.000	-	-	-	0	2.500.000	0%	0%	200	4.550.000	20%	5%				
	01	16	20	14	Pembinaan PKK di Kecamatan	tersedianya Pembinaan PKK di Kecamatan	kali	1.000	100.000.000	200	2.050.000	200	2.500.000	20	2.500.000	0	-	-	0	2.500.000			200	4.550.000	20%	5%				
					Urusan Pemerintahan wajib, yang berkaitan dengan pelayanan dasar				-									-	-					-				1,44		
					Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				-									-	-				-					1,44		
	01	16	17		Program Pembangunan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pembangunan Wawasan Kebangsaan			64.213.000	2	92.560.000	1	-	-	-	-	-	-	0	-	0%	0%	2	92.560.000	40%	144%				
	01	16	17	04	Peringatan HUT RI	Terlaksananya Peringatan HUT RI di Kecamatan	kali	5	64.213.000	2	92.560.000	1	-	-	0	-	0	-	-	-	0	0%	0%	2	92.560.000	40%	144%			

1	2	3	4			5	6	K	7	Rp.	K	8	Rp.	K	9	Rp.	K	10	Rp.	K	11	Rp.	K	12	Rp.	K	13	Rp.	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
						Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					-															K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	
		01	16	17		Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			200.000.000	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%		
		01	16	17	04	Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan	kali	1	200.000.000	-		-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-	-				-	-	-	-	0	-	0%	0%			
						Bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat					-																	-					-		-			
		01	16	05		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			100.000.000	-		-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0	-	-	0%	0%	0	-	0%	0%		
		01	16	05	20	Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	kali	10	100.000.000	-		-	1	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-				-	-	-	-	0	-	0%	0%			
						Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					-																	-				-			0,02			
		01	16	05		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			360.000.000	2	5.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				0	-	-	0%	0%	2	5.450.000	3%	2%			
		01	16	05	20	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	kali	60	360.000.000	2	5.450.000	0	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-				-	-	-	0%	2	5.450.000	3%	2%				
						Urusan Pemerintahan fungsi Penunjang					-																	-				-		0,45				
						Bidang Perencanaan					-																	-				-		0,45				
		01	16	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah			66.550.000	2	23.840.000	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-				1	6.000.000	100%	100%	3	29.840.000	60%	45%				
		01	16	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	kali	5	66.550.000	2	23.840.000	1	6.000.000	1	6.000.000	0	-	0	-	-	-	-				1	6.000.000	1	100%	3	29.840.000	60%	45%				
						Bidang Urusan pemerintahan Umum					-																	-				-						
		01	16	25		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Daerah			135.000.000	27	62.700.000	12	13.500.000	2	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-				10.500.000	10	13.500.000	42%	50%	37	76.200.000	41%	56%			
		01	16	25	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	90	135.000.000	27	62.700.000	12	13.500.000	2	3.000.000	0	-	0	-	-	-	-				8,00	10.500.000	10	13.500.000	1	100%	37	76.200.000	41%	56%		
		01	16	25	02	Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	adanya Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	Sistem	1	20.000.000	0	-	1	-	-	-	0	-	0	-	-	-	-				-	-	0	0%	0	-	0%	0%				
		01	16	16		Program Pengelolaan Kelayaan Budaya	terpeliharanya kelayaan budaya			300.000.000	2	61.605.000	3	14.500.000	1	14.365.000	-	-	-	-	-	-	-				1	14.365.000	33%	99%	3	75.970.000	20%	25%				
		01	16	16	06	Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata	kali	15	300.000.000	2	61.605.000	3	14.500.000	1	14.365.000	0	-	0	-	-	-	-				1	14.365.000	0	99%	3	75.970.000	20%	25%				
						JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							310.986.000																306.546.712									
						TOTAL RATA																																
						RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM)																																
						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d. PROGRAM)																																
						Faktor pendorong keberhasilan kinerja:																																
						Faktor penghambat pencapaian kinerja:																																
						Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya:																																
						Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD tahun berikutnya.																																
						KECAMATAN TIGAPANAH																																
1		4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		8.428	1.048.978.282	3.357	701.247.021	1.059	209.512.076	231	37.644.756	111	29.908.110	11	11.233.635	706,00	125.142.502	1.059	203.929.003	71,43	69,32	4.416	905.176.024	1,18	1,00	Kecamatan Tigapanah							
		4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1.000	2.775.000	450	2.250.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-	-	0,00	0,00	450	2.250.000	45%	81%				
		4	01	01	02	Penyediaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya komunikasi,sumber daya air dan listrik	bulan	60	36.000.000	12	8.238.897	12	16.162.196	3	3.793.460	3	2.843.110	3	2.778.635	3,00	2.650.422	12	12.065.627	100,00	74,65	24	20.304.524	40%	56%								

		3	4				5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
		4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	99.752.000	-	-	1	2.500.000	-	-	-	-	-	-	1,00	1.933.500	1	1.933.500	0,00	0,00	1	1.933.500	10%	2%		
		4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	orang bulan	460	187.700.000	109	106.700.000	76	59.450.000	3	2.595.000	6	1.730.000	2	865.000	65,00	54.260.000	76	59.450.000	100,00	100,00	185	166.150.000	40%	89%		
		4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	44.400.000	38	34.980.000	12	13.980.000	3	3.495.000	3	3.495.000	2	2.330.000	4,00	4.660.000	12	13.980.000	100,00	100,00	50	48.960.000	83%	110%		
		4	01	01	09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	68	17.300.000	37	8.490.000	7	5.030.000	-	-					7,00	5.030.000	7	5.030.000	100,00	100,00	44	13.520.000	65%	78%		
		4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	175	72.870.200	109	53.072.140	39	14.983.580	39	11.900.060					-	3.083.520	39	14.983.580	100,00	100,00	148	68.055.720	85%	93%		
		4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	20	41.077.662	9	17.565.900	3	4.653.148	1	2.653.148					2,00	2.000.000	3	4.653.148	100,00	100,00	12	22.219.048	60%	54%		
		4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	buah	230	8.868.420	82	3.422.769	41	1.701.600	41	1.701.600							41	1.701.600	100,00	100,00	123	5.124.369	53%	58%		
		4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	15	110.395.000	28	108.311.700	-	-	-	-							-	-	0,00	0,00	28	108.311.700	187%	98%		
		4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	buah	100	6.420.000	218	6.901.150	595	22.273.548	135	3.616.488					460,00	17.737.060	595	21.353.548	100,00	95,87	813	28.254.698	813%	440%		
		4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	4.800	24.000.000	1.212	8.400.000	-	-	-	-							-	-	0,00	0,00	1.212	8.400.000	25%	35%		
		4	01	01	18	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Adanya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	orang hari kali	1.250	228.220.000	981	238.754.465	249	37.218.004	-	-	93	13.950.000			156,00	23.268.000	249	37.218.000	100,00	100,00	1.230	275.972.465	98%	121%		
		4	01	01	19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi /teknis perkantoran	orang bulan	180	169.200.000	72	104.160.000	24	31.560.000	6	7.890.000	6	7.890.000	4	5.260.000	8,00	10.520.000	24	31.560.000	100,00	100,00	96	135.720.000	53%	80%		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								71,43	69,32					1,18	1	
Predikat Kinerja																																
2		4	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur		2	372.716.355	-	360.687.348	1	24.200.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,01		1	24.200.000	14,29	14,29	31	384.887.348	12,14	89,96		Kecamatan Tigapanah
		4	01	02	10	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	adanya kendaraan dinas/operasional	unit	2	71.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		4	01	02	10	Pengadaan Meubelair	adanya Meubelair	unit	121	48.176.355	4	22.360.248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	4	22.360.248	3	46,4133		
		4	01	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	60	57.000.000	24	58.295.000	1	24.200.000	-	-					1,00	24.200.000	1	24.200.000	100,00	100,00	25	82.495.000	42	144,7281		
						Pemeliharaan rutin/ berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung kantor	unit	5	65.000.000	1	175.543.400	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	0,00	1	175.543.400	20	#####		
						Rehabilitas sedang/berat rumah Gedung Kantor	Adanya rehabilitas sedang/berat rumah gedung kantor	unit	5	34.500.000			-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	0%		
		4	01	02	21	Pemeliharaan Rutin/berkala rumah dinas	Adanya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	unit	5	62.000.000	1	104.488.700	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	0,00	1	104.488.700	20	168,5302		
		4	01	02	27	Rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Adanya rehabilitas sedang/berat kendaraan dinas/operasional	unit	5	35.040.000			-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								14,29				54.983.907	12			
Predikat Kinerja																																
3		4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningktanya Disiplin Aparatur		1	124.104.473	124	51.230.000	36	24.192.000	0,0	-	0,0	-	0,0		0,15		0	24.192.000	33,33	33,33	124	75.422.000	60	80,09		Kecamatan Tigapanah
		4	01	03	01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Adanya mesin/kartu absensi	unit	1	10.000.000	1	9.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	9.000.000	100	90,00		
		4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	201	93.047.905	82	20.760.000	36	24.192.000	-	-	-	-	-	-	36,00	24.192.000	36	24.192.000	100,00	100,00	118	44.952.000	59	48,31		
		4	01	03	02	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Adanya pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	187	21.056.568	39	21.470.000	-	-	-	-					-	-	-	-	0,00	0,00	39	21.470.000	21	101,96		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								33,33	3333%				59,85	80,09		
Predikat Kinerja																																
						Program Pembinaan dan Fasilitas Keuangan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa			1	4.900.000			0	0										0,00	0,00						
														0	0																	
						Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes	Adanya Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDes			1	4.900.000			0	0										0,00	0,00						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																								0%	0%							
Predikat Kinerja																																
4						Program Penata Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		5	70.916.842	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Kecamatan Tigapanah

116

4					5		6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
14					Peningkatan pelayanan kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan	60	61.051.000	1.336	97.720.000	12	44.910.000	3	8.400.000	-	-	-	-	9,00	13.200.000	12	21.600.000	50,00	48,10	1.348	119.320.000	2.247	195,4432	Kecamatan Tigapanah		
					Rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	bulan	60	61.051.000	36	69.120.000	12	44.910.000	3	8.400.000	-	-	-	-	9,00	13.200.000	12	21.600.000	100,00	48,10	48	90.720.000	80	148,5971		
					Gotong royong	Terlaksananya gotong royong kebersihan lingkungan se kecamatan tigapanah	Orang		1.300	28.600.000	-	-										-	-	-	-						
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							50,00	32,06					775,56	114,68	
Predikat Kinerja																									-	-	-	-	Kecamatan Tigapanah		
15					Program pengembangan dan pemasaran Pariwisata	Meningkatnya program pengembangan dan pemasaran pariwisata	5	61.051.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kecamatan Tigapanah	
					Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata	kali	5	61.051.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																							0%	0%							
Predikat Kinerja																															
16					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintahan desa	4	91.576.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	Kecamatan Tigapanah	
					Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya pelatihan aparaturn pemerintahan desa dalam bidang manajemen	kali	10	57.000.000											-	-	0,00	0,00			-	-	-	-		
					Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	kali	4	34.576.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																															
Predikat Kinerja																															
JUMLAH									2.609.522.463		1.400.504.369		344.710.076	-	72.640.756	1.020	29.908.110	11	11.233.635	715,16	138.342.502		300.517.003	42,99	44,68			883,84	28%		
Rata-Rata capaian kinerja (%)																	11	11.233.635	752,00	186.734.502											
Predikat kinerja																															
Total rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program																															
Predikat kinerja dari seluruh program																															
					KECAMATAN MUNTE																										
		4	10	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100%	1.534.248.321	520	637.478.850	504	270.313.434	26	24.624.170	105	39.240.331	70	23.866.508	236,00	160.441.435	437	248.172.444	43%	56%	957,0	885.651.294	34%	56%		
		4	10	01	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	Lembar	1035	10.000.000	207	2.718.000	0	0	0	-							0	-	0%	0,0	207,0	2.718.000	0,2	0,3	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis	48	60.000.000	12	19.200.000	12	21.600.000	3	4.090.270	3	Rp 4.183.631	3	2.767.408	3,00	4.339.085	12	15.380.394	100%	0,7	24,0	34.580.394	0,5	0,6	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	5	12.500.000	0	1.784.250	1	3.000.000	0	-				1,00	2.374.750	1	2.374.750	0%	0,0	1,0	4.159.000	0,2	0,3	Kantor Camat Munte		
		4	10	01	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Orang bulan	480	280.000.000	48	87.140.000	48	83.728.500	0	-	16	Rp 4.348.500			32,00	68.700.000	48	73.048.500	0%	0,9	96,0	160.188.500	0,2	0,6	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	Orang bulan	60	64.800.000	12	39.180.000	12	15.508.500	3	3.795.000	3	Rp 4.123.500	2	2.530.000	4,00	5.060.000	12	15.508.500	100%	1,0	24,0	54.688.500	0,4	0,8	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Unit	16	10.400.000	4	4.000.000	10	2.920.000	0	-	4	Rp 2.920.000					4	2.920.000	40%	1,0	8,0	6.920.000	0,5	0,7	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Jenis	130	185.148.321	26	51.193.600	27	14.983.534	8	4.982.100	9	Rp 5.254.600	10	4.739.300			27	14.976.000	100%	1,0	53,0	66.169.600	0,4	0,4	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	11 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	10	27.000.000	1	10.450.500	4	5.289.000	1	969.000	1	Rp 999.000	1	1.799.800	1,00	1.488.600	4	5.256.400	0%	1,0	5,0	15.706.900	0,5	0,6	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	57	5.500.000	-		66	1.780.000	0	-	5	Rp 1.780.000					5	1.780.000	0%	0,0	5,0	1.780.000	0,1	0,3	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	10	377.000.000	4	144.924.900	5	38.500.000	0	-				5,00	38.400.000	5	38.400.000	0%	0,0	9,0	183.324.900	0,9	0,5	Kantor Camat Munte		
		4	10	01	14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jenis	60	25.000.000	14	9.796.600	15	22.048.900	5	3.992.800	8	Rp 679.100			2,00	17.377.000	15	22.048.900	100%	1,0	29,0	31.845.500	0,5	1,3	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jenis	100	12.500.000	-	1.440.000		0	0	-						0	-	0%	0,0	0,0		1.440.000	0,0	0,1	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	17 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Jenis	2400	125.000.000	-	31.000.000		0	0	-						0	-	0%	0,0	0,0		31.000.000	0,0	0,2	Kantor Camat Munte	
		4	10	01	18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Orang	1200	214.000.000	168	157.021.000	280	29.938.000	0	-	50	Rp 7.500.000	50	7.500.000	180,00	13.642.000	280	28.642.000	100%	1,0	448,0	185.663.000	0,4	0,9	Kantor Camat Munte	

		3				4	5				6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18																		
										K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																		
		4	10	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Orang bulan	120		125.400.000	24	77.630.000	24	31.017.000	6	6.795.000	6	Rp 7.452.000	4	4.530.000	8,00	9.060.000	24	27.837.000	100%	0,9	48,0	105.467.000	0,4	0,8					Kantor Camat Munte																	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				43%	0,6	957,0	885.651.294	0,3	0,6																					
																							Predikat Kinerja																														
		4	10	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100%		334.437.378	23	294.455.000	1	27.207.336	0	0	0		0		1,00	26.966.600	1	26.966.600	13%	12%	24,0	321.421.600	22%	107%					Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Adanya Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	1		23.258.000	-	-	0	-	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0				Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	07	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit/Set	4		34.000.000	-	30.000.000	0	-	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	0,0	30.000.000	0,0	0,9				Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	10	Pengadaan Mebeleur	Adanya Mebeleur	Unit	112		103.179.378	21	132.730.000	0	-	0	-							0	-	0%	0,0	21,0	132.730.000	0,2	1,3					Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	21	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas	Terpeliharanya rumah dinas	Unit	1		10.000.000	1	45.753.000	0	-	0	-							0	-	0%	0,0	1,0	45.753.000	1,0	4,6					Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	Unit	3		30.000.000	1	34.032.000	0	-	0	-							0	-	0%	0,0	1,0	34.032.000	0,3	1,1					Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	5		114.000.000	-	51.940.000	1	27.207.336	0	-				1,00	26.966.600	1	26.966.600	100%	1,0	1,0	78.906.600	0,2	0,7						Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	25	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas	TerpeliharanyaPerlengapan rumah jabatan/dinas	Unit	1		10.000.000	-		0	0	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0					Kantor Camat Munte																	
		4	10	02	41	Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	Unit	1		10.000.000			0	0	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0				Kantor Camat Munte																	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				13%	0,1	24,0	321.421.600	0,2	1,1																					
																							Predikat Kinerja																														
		4	10			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	%	100%		169.233.372	50	67.123.000	18	12.096.000	-	Rp	-	-	-		18,00	12.096.000	18	12.096.000	50%	50%	68,0	79.219.000	16%	46%					Kantor Camat Munte																	
		4	10	03	01	Pengadaan Mesin/ Kartu Absensi	Adanya mesin/kartu absensi	Unit	2		20.000.000	-	9.000.000	0	0	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	0,0	9.000.000	0,0	0,5					Kantor Camat Munte																
		4	10	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Adanya Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Stel	210		149.233.372	50	58.123.000	18	12.096.000	0	-				18,00	12.096.000	18	12.096.000	100%	1,0	68,0	70.219.000	0,3	0,5																							
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				50%	0,5	68,0	79.219.000	0,2	0,5																					
																							Predikat Kinerja																														
		3	10	18		Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	%	100%		61.051.000	0	-	0	0	0	Rp	-	0	0		-		0%	-	0%	0,0	0,0	-	0%	0,0					Kantor Camat Munte																	
		3	10	18	03	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/pemeliharaan jalan	km	25		61.051.000	0	-	0	0	0	-								-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0					Kantor Camat Munte																	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0																					
																							Predikat Kinerja																														
		6	10	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	%	100%		61.051.000	0	-	0	0	0	Rp	-	0	0		-		0%	-	0%	0,0	0,0	-	0%	0,0					Kantor Camat Munte																	
		6	10	15	05	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	1		2.000.000	0	-	0	0	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0					Kantor Camat Munte																	
		6	10	15	06	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	60		59.051.000	0	-	0	0	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0					Kantor Camat Munte																	
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0																				
																							Predikat Kinerja																														
		4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan	%	100%		61.051.000	8	12.000.000	3	4.500.000	0	Rp	-	2	Rp 3.000.000	0	3,00	1.500.000	5	4.500.000	167%	100%	13,0	16.500.000	22%	27%					Kantor Camat Munte																	
		4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang dilaksanakan	Kali	60		61.051.000	8	12.000.000	3	4.500.000	0	-	2	Rp 3.000.000		3,00	1.500.000	5	4.500.000	167%	1,0	13,0	16.500.000	0,2	0,3					Kantor Camat Munte																		
																							Rata-Rata Capaian Kinerja (%)				167%	1,0	13,0	16.500.000	0,2	0,3																					
																							Predikat Kinerja																														
		4	10	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan daerah	%	100%		135.823.213	1	43.760.000	300	10.549.700	300	Rp 9.400.000	0	0		-			300	9.400.000	50%	45%	301,0	53.160.000	60%	20%					Kantor Camat Munte																	
		4	10	21	16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan yang dilaksanakan	Orang Kali	250		133.823.213	1	43.760.000	300	10.549.700,00	300	9.400.000							300	9.400.000	100%	0,9	301,0	53.160.000	1,2	0,4					Kantor Camat Munte																	
		4	10	21	17	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orang bulan	5		2.000.000	0	-	0	0	0	-							0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0					Kantor Camat Munte																	

		4			5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		4	10	21		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	%	100%	73.261.200	1	7.579.000	0		0	Rp	-	0						0%	-	0%	0,0	1,0	7.579.000	20%	0,1	Kantor Camat Munte		
		4	10	21	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Terlaksananya Pembinaan Organisasi Perempuan	Organisasi	5	73.261.200	1	7.579.000	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	1,0	7.579.000	0,2	0,1	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		1	10	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan	%	100%	93.803.641	1	57.200.000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0		-	0	-	0%	0,0	1,0	57.200.000	20%	0,6	Kantor Camat Munte	
		1	10	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Kali	5	93.803.641	1	57.200.000	0		-	0		-							-	0%	0,0	1,0	57.200.000	0,2	0,6	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		13	10	16		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	100%	61.051.000	0	-	0		0	0	Rp	-	0	Rp	-	0		-	0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte	
		13	10	16	07	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Terbinanya Organisasi Kepemudaan	Organisasi	4	51.051.000	0	-	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte		
		13	10	16	08	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Orang kali	220	10.000.000	0	-	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		13	10	20		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	%	100	61.051.000	0	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0		-	0	-	0%	0,0	0,0	-	0%	0,0	Kantor Camat Munte	
		13	10	20	14	Penyelenggaraan Kompetensi Olahraga	Terselenggaranya Kompetensi Olahraga	orang kali	4	51.051.000	0	-	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte		
		13	10	16	15	Pembinaan Olahraga yang berkembang di Masyarakat	Terbinanya Olahraga yang berkembang di Masyarakat	jenis	1	10.000.000	0	-	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		2	10	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100	61.051.000	100	4.300.000	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0		-	0	-	0%	0,0	100,0	4.300.000	23%	0,1	Kantor Camat Munte	
		2	10	18	09	Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	orang kali	440	61.051.000	100	4.300.000	0		0	0		-							-	0%	0,0	100,0	4.300.000	0,2	0,1	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		2	10	22		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	%	100	61.051.000	0	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0		-	0	-	0%	0,0	0,0	-	0%	0,0	Kantor Camat Munte	
		2	10	22	08	Pengendalian Keammnanan Lingkungan	Terkendalinya Keamanan Lingkungan	orang	1100	61.051.000	0	-	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		1	10	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	%	100	61.051.000	0	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0		-	0	-	0%	0,0	0,0	-	0%	0,0	Kantor Camat Munte	
		1	10	20	01	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	Terlaksananya Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman keras dan Narkoba	orang kali	1100	61.051.000	0	-	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		1	10	17		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	%	100	61.051.000	0	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0	Rp	-	0		-	0	-	0%	0,0	0,0	-	0%	0,0	Kantor Camat Munte	
		1	10	17	01	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	orang	550	61.051.000	0	-	0		0	0		-						0	-	0%	0,0	0,0	-	0,0	0,0	Kantor Camat Munte		
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		
Predikat Kinerja																																		
		1	10	16		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya	%	100	61.051.000	1	12.965.000	2	Rp	15.800.000	1	Rp	13.400.000	0	Rp	2.400.000	0		-	-	1	15.800.000	50%	1,0	2,0	28.765.000	13%	0,5	Kantor Camat Munte
		1	10	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Kegiatan	15	61.051.000	1	12.965.000	2	15.800.000,00	1	13.400.000		Rp	2.400.000						1	15.800.000	50%	1,0	2,0	28.765.000	0,1	0,5	Kantor Camat Munte	
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)																																		

120

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18										
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.											
		4	01	20	14	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	terbinanya olahraga yang berkembang di masyarakat	Jenis	25	61.051.000	0	-	0	0	0	0	-	-	0	-	-	-	Kecamatan Barusjahe										
5		4	01	16		Program peningkatan peran serta kepemudaan	Meningkatnya peran serta kepemudaan		100%	61.051.000	-		0	0	0	0	-	-					Kecamatan Barusjahe										
		4	01	16	07	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terbinanya pemuda pelopor keamanan lingkungan	Orang Kali	750	61.051.000	0	-	0	0	0	0	-	-					Kecamatan Barusjahe										
6		4	01	18		Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik		100%	61.051.000	40	18.000.000	80	-	0	0	0	0	-	-	-	40	18.000.000	13,33	29,48	Kecamatan Barusjahe							
		4	01	18	03	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	terlaksananya rehabilitasi /pemeliharaan jalan	Km	300	61.051.000	40	18.000.000	80	-	0	0	0	0	-	-	-	40	18.000.000	13,33	29,48	Kecamatan Barusjahe							
7		4	01	16		Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		100%	61.051.000	45.200.000	17.800.000	17.800.000	0	0	0	0	-	-	-	1	17.800.000	100,00	100,00	63.000.000	20,00	103,19	Kecamatan Barusjahe					
		4	01	16	06	Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata	Jenis	15	61.051.000	2	45.200.000	1	17.800.000	1	17.800.000	0	0	0	-	-	-	1	17.800.000	100,00	100,00	3	63.000.000	20,00	103,19	Kecamatan Barusjahe		
8		4	01	15		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya pemasaran wisata		100%	61.051.000																					Kecamatan Barusjahe		
		4	01	15	15	Pelaksanaan Pesta Budaya Bunga dan Buah	Terlaksananya Pesta Budaya Bunga dan Buah	Kali	5	30.525.500	-		0	0	0	0	0	-	-	-	-											Kecamatan Barusjahe	
		4	01	15	16	Pelaksanaan Pesta Mejuah-Juah	Terlaksananya Pesta Mejuah-Juah	Kali	5	30.525.500	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-												Kecamatan Barusjahe
9		4	01	17		Program Pengembangan wawasan kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan		100%	152.108.567	127.280.500	0	-	0	0	0	0	-	-	-	-			127.280.500	40,00	83,68	Kecamatan Barusjahe						
		4	01	17	04	Pelaksanaan Perayaan HUT RI	Terlaksananya Perayaan HUT RI	Kali	5	152.108.567	2	127.280.500	0	-	0	0	0	0	-	-	-	0	-	2	127.280.500	40,00	83,68	Kecamatan Barusjahe					
10		5	01	20		Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	meningkatkan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)		100%	122.102.000	100	6.650.000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	100	6.650.000	20,00	10,89	Kecamatan Barusjahe							
		5	01	20	01	Penerbitan penyakit masyarakat	terlaksananya penerbitan penyakit masyarakat	Jenis	10	61.051.000	0	-	0	0	0	0	0	-	-	-	-											Kecamatan Barusjahe	
		5	01	20	09	Penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran /penggunaan miras dan narkoba	orang kali	500	61.051.000	100	6.650.000	0	0	0	0	0	-	-	-	-	100	6.650.000	20,00	10,89	Kecamatan Barusjahe							
11		04	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	90.358.533	40.200.000	8.400.000	8.400.000	0	0	0	0	-	-	-	-	8.400.000	100,00	100,00	48.600.000	63,33	61,40	Kecamatan Barusjahe					
		04	01	16		Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Orang Kali	1.200	79.158.533	560	40.200.000	200	8.400.000	200	8.400.000	0	0	0	-	-	-	200	8.400.000	100,00	100,00	760	48.600.000	63,33	61,40	Kecamatan Barusjahe		
		04	01	21		Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orang Bulan	60	10.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-										Kecamatan Barusjahe	
		04	01	21		Rapat- rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	Kali	25	1.200.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-											Kecamatan Barusjahe
12		04	1	15		Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		100%	61.051.000	-		0		0	0	0	-	-	-	-											Kecamatan Barusjahe	
		04	1	15	03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Diterapkannya sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	Sistem	5	30.525.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-											Kecamatan Barusjahe
		04	1	15	05	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Orang Kali	150	17.526.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-											Kecamatan Barusjahe
		04	1	15	08	Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang kependudukan	Meingkatnya pelayanan publik dalam bidang kependudukan	bulan	60	13.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-											Kecamatan Barusjahe
13		4	01	18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Meningkatnya Peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		100%	61.051.000	-		0		0	0	0	-	-	-	-	0	-	0	-							Kecamatan Barusjahe	
		4	01	18		Kegiatan Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Terberdayakan nya tim penggerak PKK	orang kali	150	29.051.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-		0	-						Kecamatan Barusjahe
		4	01	18		Kegiatan Operasional Tim Penggerak PKK	Dana Operasional Tim Penggerak PKK	Tahun	5	32.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-									Kecamatan Barusjahe
14		7	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		100%	61.051.000	154	6.640.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-		6.640.000	23,69	10,88	Kecamatan Barusjahe				
		7	01	18	09	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	orang kali	650	61.051.000	154	6.640.000	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-		154	6.640.000	23,69	10,88	Kecamatan Barusjahe					

3				4				5				6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18			
								K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.		K		Rp.	
18	4	01	23	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100%	61.051.000	34	78.900.000	6	10.800.000	3	5.400.000	0	0	0	0	-	3,00	5.400.000	6	10.800.000	100,00	100,00	40	89.700.000	66,67	293,85	Kecamatan Barusjahe									
	4	01	23	01	Kegiatan Penerapan dan pengembangan aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan	Diterapkannya dan pengembangannya aplikasi e-PATEN untuk pelayanan terpadu kecamatan	Sistem	5	30.525.500	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	0	-			0	-					Kecamatan Barusjahe							
	4	01	23	02	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	Kali	60	30.525.500	34	78.900.000	6	10.800.000	3	5.400.000	0	0	0	-	3,00	5.400.000	6	10.800.000	100,00	100,00	40	89.700.000	66,67	293,85	Kecamatan Barusjahe									
JUMLAH ANGGARAN								2.705.128.141		1.387.064.057		377.990.630		65.151.894		13.566.087		-			-		354.954.213	84,98	93,91		1.742.018.270	37,35	64,40										
																							Tinggi	Tinggi					Sangat Rendah	Rendah									
KECAMATAN MARDINGDING																																							
				Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran		100%	1.482.065.902	1.257	274.675.792	412	239.502.547	0	0	80	25.560.000	57	26.403.700	162,00	93.043.491	299	145.007.191	104,67	79,36	1.556	419.682.983	28,62	28,17	Kec. Mardinding										
	1	20	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	1490	8.617.527	350	1.650.000	-			-	Rp	-				0	-			350	1.650.000	23,49	19,15											
	1	20	1	2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bln	60	128.771.561	12	14.400.000	12	7.800.000		3	Rp	2.100.000		3,00	2.744.667	6	4.844.667	50,00	62,11	18	19.244.667	30,00	14,94	Kec. Mardinding										
	1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan / kendaraan dinas/ operasional	unit	17	15.469.758			1	2.500.000					1,00	1.898.500	1	1.898.500	100,00	75,94	1	1.898.500	5,88	12,27	Kec. Mardinding											
	1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	540	236.400.000	108	10.860.000	94	66.680.000				8	3.020.000	96,00	63.660.000	104	66.680.000	110,64	100,00	212	77.540.000	39,26	32,80											
	1	20	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	60	46.800.000	12	15.180.000	12	9.600.000		3	Rp	2.400.000	4	3.200.000	5,00	4.000.000	12	9.600.000	100,00	100,00	24	24.780.000	40,00	52,95										
	1	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kantor	unit	28	12.500.000	5	3.200.000	6	1.500.000					5,00	1.500.000	5	1.500.000	83,33	100,00	10	4.700.000	35,71	37,60												
	1	20	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jenis	168	126.500.000	40	21.249.600	28	20.310.324		47	Rp	8.500.000		49,00	11.810.324	96	20.310.324	342,86	100,00	136	41.559.924	80,95	32,85											
	1	20	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	23	29.523.600	2	7.957.000	3	7.430.000					3,00	7.430.000	3	7.430.000	100,00	100,00	5	15.387.000	21,74	52,12												
	1	20	01	12	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor	buah	125	26.500.000	44	2.145.492	25	1.480.000					0	-		0	-			44	2.145.492	35,20	8,10											
	1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	24	222.722.956	1	59.366.000	3	22.550.000					0	-		0	-			1	59.366.000	4,17	26,65											
	1	20	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bh	102	46.060.500	16	9.407.700	15	11.039.700					0	-		0	-			16	9.407.700	15,69	20,42											
	1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	94	19.000.000	360	-	-	-					0	-		0	-			360	-													
	1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	ohk	2150	403.400.000	271	98.900.000	153	58.252.523		25	Rp	7.500.000	39	12.593.700		64	20.093.700	41,83	34,49	335	118.993.700	15,58	29,50											
	1	20	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	ob	180	159.800.000	36	30.360.000	60	30.360.000		2	Rp	5.060.000	6	7.590.000		8	12.650.000	13,33	41,67	44	43.010.000	24,44	26,91											
	1	20	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100%	441.893.854	4	51.275.000	20	69.053.911		Rp	-			20,00	65.540.000	20	65.540.000	100,00	93,68	24	116.815.000	37,41	73,57	Kec. Mardinding										
	1	20	02	10	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	unit	3	45.673.429									0	-		0	-			-	-													
	1	20	02	10	Pengadaan mebelair	Tersedianya mebeleur	unit	30	103.335.434	3	21.275.000	19	21.126.575						19,00	19.120.000	19	19.120.000	100,00	90,50	22	40.395.000	73,33	39,09											
	1	20	03	11	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	18	153.766.781			1	47.927.336					1,00	46.420.000	1	46.420.000	100,00	96,85	1	46.420.000	5,56	30,19												
	1	20	04	12	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	tersedianya rehabilitasi/pemeliharaan gedung kantor	unit	5	12.038.079									0	-		0	-			-	-													
	1	20	05	13	Rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas	unit	3	107.269.437									0	-		0	-			-	-													
	1	20	06	14	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	unit	3	19.810.694	1	30.000.000							0	-		0	-		1	30.000.000	33,33	151,43												
	1	20	02	24	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	unit	5	-									0	-		0	-			-	-													
	1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	127.059.341	38	10.735.000	20	15.940.000		Rp	-			-	21,00	15.940.000		15.940.000	102,63	100,00	38	26.675.000	22,47	22,39	Kec. Mardinding									
	1	20	03	01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	tersedianya mesin/kartu absensi	unit	2	22.106.800									0	-		0	-			-	-													

2		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu	stel	4		13.653.369			1	2.500.000							1,00	2.500.000	1	2.500.000	100,00	100,00	1	2.500.000	25,00	18,31		
		1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	291	91.299.172	38	10.735.000	19	13.440.000	Rp	-					20,00	13.440.000	20	13.440.000	105,26	100,00	58	24.175.000	19,93	26,48		
		1	20	03		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa		100%	335.780.500		-	0	Rp	-								-				-				Kec. Mardingding	
		1	20	03	01	Bimbingan teknis aparatur desa	terselenggaranya bimbingan teknis aparatur desa	keg	5	335.780.500		-	0									0	-		-		-					
		1	20	03		Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa					-	0	Rp	-								-			0	-				Kec. Mardingding	
		1	20	03	01	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa	tersedianya evaluasi rancangan	kali														0	-		-		-					
		1	20	03		Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100%	141.027.810	12	24.000.000	12	9.000.000	Rp	-	Rp	-	5	7.500.000		-	5	7.500.000	41,67	83,33	17	31.500.000	28,33	28,37	Kec. Mardingding	
		1	20	03	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Tersedianya koordinasi penyelenggara pemerintah	kali	60	111.027.810	12	24.000.000	12	9.000.000					5	7.500.000		5	7.500.000	41,67	83,33	17	31.500.000	28,33	28,37			
		1	20	03	01	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Adanya E-paten	sistem	1	30.000.000			0	0								0	-		-		-					
		1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan	%	100	86.295.589	1	17.384.000	1	12.990.400	1	Rp 12.990.400	Rp	-				1	12.990.400	100,00	100,00	2	30.374.400	40,00	35,20	Kec. Mardingding		
		1	06	21	16	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan	kali	5	86.295.589	1	17.384.000	1	Rp 12.990.400	1	Rp 12.990.400					1	12.990.400	100,00	100,00		2	30.374.400	40,00	35,20			
		1	06	21	16	Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	Tersedianya Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	kali	5													0	-		-		-					
		1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan		100%	81.064.128	1	27.605.580	1	0	Rp	-			-				-			1	27.605.580	20,00	34,05	Kec. Mardingding		
		1	19	17	04	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	kali	5	81.064.128	1	27.605.580	1	-								0	-		-		1	27.605.580	20,00	34,05		
					Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik				33.578.050		-																		Kec. Mardingding		
					Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan	km	25	33.578.050	0	-															-	-					
		1	19	17		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya pengelolaan kekayaan budaya	%	100%	122.102.000	3	54.350.000	1	20.919.400	Rp	-	Rp	-			-	1,00	20.919.400	1	20.919.400	100,00	100,00	4	75.269.400	26,67	61,64	Kec. Mardingding
		1	19	17	04	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	Terselenggaranya Pengembangan kebudayaan pariwisata	keg	15	122.102.000	3	54.350.000	1	20.919.400							1,00	20.919.400	1	20.919.400	100,00	100,00		4	75.269.400	26,67	61,64	
		1	19	17		Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya Peran Serta Kepemudaan	%	100%	122.102.000		-	0	Rp	-	Rp	-			-		-		-			-				Kec. Mardingding	
		1	19	17	04	Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan	keg	100	122.102.000	0	-	0									0	-		-		-					
		1	19	17		Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	%	100%	427.357.000		-	0	Rp	-	Rp	-			-		-		-			-				Kec. Mardingding	
		1	19	17	04	Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	Terselenggaranya pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat	keg	15	427.357.000	0	-										0	-		-		-					
		1	19	17		Program Peningkatan Peran Serta Perempuan di Pedesaan	Meningkatnya peran serta perempuan	%	100%	146.522.400		-	0	Rp	-	Rp	-			-		-		-			-				Kec. Mardingding	
		1	19	17	04	Pembinaan Tim Penggerak PKK	Adanya Pembinaan Tim Pkk	ok	60	141.522.400	0	-										0	-		-		-					
					Operasional Tim Penggerak PKK	Tersedianya Operasional Tim	kali	1	5.000.000													0	-		-		-					
		1	19	17		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)	%	100%	259.466.750	1	6.000.000	0	Rp	-	Rp	-			-		-		-		1	6.000.000	20,00	2,31	Kec. Mardingding		
		1	19	17	04	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba bulana	Terselenggaranya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman dan narkoba bulana	kali	5	259.466.750	1	6.000.000	90	-								0	-		-		1	6.000.000	20,00	2,31		

2		3			4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18
		1	19	15			%	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
		1	19	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya penataan administrasi Kependudukan		100%	231.993.800	-	0	-	Rp	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mardinding
		1	19	15	03	Koordinasi pelaksanaan kebijakan Kependudukan	orang kali	75	108.843.200	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	19	15	08	Implementasi Sistem administrasi Kependudukan(membangun, updating, dan pemeliharaan)	kali	5	123.150.600	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1	19	15	Program Pengembangan Pemasaran Wisata	Meningkatnya Pemasaran Wisata	%	100%	250.309.100	-	0	-	Rp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kec. Mardinding
		1	19	15	03	Pemasaran Pariwisata	kali	5	250.309.100	0	-	0	-	Rp	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH									4.288.618.224	1317	466.025.372	467	367.406.258	1	12.990.400	80	25.560.000	62	33.903.700	204,00	195.442.891	326	267.896.991	91,49	72,92	1643	733.922.363	27,94	17,11	
					KECAMATAN PAYUNG																		Sangat Tinggi	Sedang				Sangat Rendah	Sangat Rendah	
1		4.01	8	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%		1.586.788.750	1259	541.965.556	425	284.094.226	84	37.895.966	87	41.018.544	179	37.833.388	181,00	125.474.435	531	242.222.333	171,97	93,05	1790	784.187.889	60,84	58,19	
					01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	buah	950	5.950.000	260	1.380.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260	1.380.000	27,37	23,19	Ktr Camat Payung
					06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60	41.700.000	24	39.582.379	12	19.140.000	3	6.622.266	2	2.614.844	4	4.829.688	3,00	2.386.435	12	16.453.233	100,00	85,96	36	56.035.612	60,00	134,38	Ktr Camat Payung
					06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Unit	10	9.000.000	2	953.750	1	4.000.000	-	-	-	-	-	1,00	1.968.500	1	1.968.500	100,00	49,21	3	2.922.250	30,00	32,47	Ktr Camat Payung	
					07	Penyediaan Jasa administrasi keuangan	orang bulan	360	273.077.830	75	48.150.700	96	77.548.500	-	15	4.410.000	3	1.380.000	78,00	54.232.500	96	60.022.500	100,00	77,40	171	108.173.200	47,50	39,61	Ktr Camat Payung	
					08	Penyediaan Jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	74.261.200	17	19.293.700	12	15.180.000	10	1.265.000	4	5.060.000	4	5.060.000	3,00	3.795.000	21	15.180.000	175,00	100,00	38	34.473.700	63,33	46,42	Ktr Camat Payung
					09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	unit	40	17.673.000	8	12.390.000	4	5.400.000	2	2.485.700	-	-	-	8,00	5.400.000	10	7.885.700	250,00	146,03	18	20.275.700	45,00	114,73	Ktr Camat Payung	
					10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis	140	67.692.000	46	25.042.200	39	14.919.100	39	7.980.600	-	-	-	6.938.300	-	39	14.918.900	100,00	100,00	85	39.961.100	60,71	59,03	Ktr Camat Payung	
					11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis	50	24.389.120	8	13.203.000	1	2.940.000	1	2.940.000	-	-	-	-	-	1	2.940.000	100,00	100,00	9	16.143.000	18,00	66,19	Ktr Camat Payung	
					12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	60	9.909.660	25	4.657.022	46	1.105.200	20	482.400	-	26	622.800	-	46	1.105.200	100,00	100,00	71	5.762.222	118,33	58,15	Ktr Camat Payung		
					13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Unit	55	503.690.000	24	107.300.000	16	16.400.000	-	-	-	-	-	16,00	10.582.000	16	10.582.000	100,00	64,52	40	117.882.000	72,73	23,40	Ktr Camat Payung	
					14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	buah	60	25.378.360	-	-	16	14.329.920	-	127	2.522.600	-	1,00	16.300.000	128	18.822.600	800,00	131,35	128	18.822.600	213,33	74,17			
					15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	buah	40	34.390.320	6	1.975.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.975.000	15,00	5,74	Ktr Camat Payung	
					18	Rapat-Rapat Koordinasi ke Luar Daerah	orang hari kali	3000	254.629.600	678	159.288.105	145	46.411.506	-	-	50	8.693.700	3	1.300.000	59,00	15.630.000	112	25.623.700	77,24	55,21	790	184.911.805	26,33	72,62	Ktr Camat Payung
					19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	orang bulan	240	206.217.060	84	96.749.700	36	60.720.000	8	10.120.000	16	20.240.000	12	15.180.000	12,00	15.180.000	48	60.720.000	133,33	100,00	132	157.469.700	55,00	76,36	Ktr Camat Payung
					21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Unit	5	38.830.600	2	12.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	-	-	-	-	1	6.000.000	100,00	100,00	3	18.000.000	60,00	46,36	Ktr Camat Payung		
		4.01	8	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	100%		333.435.409	15	169.456.800	3	139.685.500	-	-	-	-	-	3,00	136.416.500	3	136.416.500	100,00	97,23	18	305.873.300	28,67	104,48		
					10	Pengadaan Mebeleur Kantor	unit	50	165.470.000	12	43.848.000	1	12.000.000	-	-	-	-	-	1,00	11.900.000	1	11.900.000	100,00	99,17	13	55.748.000	26,00	33,69		
					22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	unit	5	104.156.764	1	96.400.000	1	88.985.500	-	-	-	-	-	1,00	88.500.000	1	88.500.000	100,00	99,45	2	184.900.000	40,00	177,52		
					24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	unit	15	63.808.645	2	29.208.800	1	38.700.000	-	-	-	-	-	1,00	36.016.500	1	36.016.500	100,00	93,07	3	65.225.300	20,00	102,22	Ktr Camat Payung	
		4.01	8	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	100%		118.194.736	93	43.820.000	19	12.768.000	-	-	-	-	-	19,00	12.768.000	19	12.768.000	100,00	100,00	112	56.588.000	93,33	57,63		
					02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Stel	120	98.194.736	93	43.820.000	19	12.768.000	-	-	-	-	-	19,00	12.768.000	19	12.768.000	100,00	100,00	112	56.588.000	93,33	57,63	Ktr Camat Payung	
		4.01	8	15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	100%		140.417.300	126	9.630.000	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126	9.630.000	252,00	15,19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12)	15=13/8x100%	16=(7+13)	17=15/6x100%	18												
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.													
			3	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, updating dan pemeliharaan)	sistem	5	-	77.000.000	-	0	-	-	-	-	0	-													
			5	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	orang kali	50	126	63.417.300	10	-	-	-	-	-	126	9.630.000	15,19	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	100%	2	122.102.000	6	12.800.000	1	12.800.000	1	12.800.000	16,67	100,00	60,86												
			6	Pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	15	2	122.102.000	6	12.800.000	1	12.800.000	1	12.800.000	16,67	100,00	60,86	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	16	Program Peningkatan Peran Serta Kemudahan	100%		61.051.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
			7	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	80		61.051.000	0	-	-	-	-	-	0	-	-	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	17	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	100%	2	102.943.586	-	-	-	-	-	-		85.365.000	82,92												
			4	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	2	102.943.586	0	-	-	-	-	-	2	85.365.000	82,92	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	18	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	100%		30.525.500	-	-	-	-	-	-		-	-												
			3	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	km	7.5		30.525.500	0	-	-	-	-	-	0	-	-	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	20	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	100%	35	122.102.000	-	-	-	-	-	-	35	7.530.200	6,17												
			1	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba	orang kali	250	35	122.102.000	-	-	-	-	-	-	35	7.530.200	6,17	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga			305.255.000	-	-	-	-	-	-		-	-												
			14	Pembinaan Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	15		305.255.000	0	-	-	-	-	-	0	-	-	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	100%	100	85.691.184	90	10.400.000	90	10.200.000	90	10.200.000	100	98	30,62												
			16	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Orangkali	250	100	70.691.184	90	10.400.000	90	10.200.000	90	10.200.000	100,00	98,08	30,62	Ktr Camat Payung											
			17	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Orangkali	25		15.000.000																					
		4.01	08	22	Program Peningkatan Peran Perempuan Di Pedesaan			61.051.000	-	-	-	-	-	-		-	-												
			2	Pemberdayaan Tim Penggerak PKK	Orang Kali	100		61.051.000	20	-	-	-	-	-	0	-	-	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	23	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	100%	15	155.130.591	12	13.950.000	2	3.600.000	1	1.800.000	50,00	100,00	34,32												
			01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	60	15	80.130.591	12	13.950.000	2	3.600.000	1	1.800.000	50,00	100,00	34,32	Ktr Camat Payung											
			102	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Sistem	5		75.000.000	-	-	-	-	-	-		-	-	Ktr Camat Payung											
		4.01	08	17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa			61.051.000	0																				
			01	Monitoring dan evaluasi	Orang Kali	250		61.051.000	-																				
				Rata-rata capaian kinerja (%)		100%		3.285.739.056	1.647	944.272.556	565	473.697.726	177	64.495.966	88	42.818.544	179	37.833.388	206,00	283.208.935	650	428.356.833	90	90	2.295	1.372.629.389	72	42	
				KECAMATAN DOLAT RAYAT																									

	2	3	4			5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18				
		4	01	01	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
								100%	1.614.909.452	1.687	824.840.502	456	294.219.324	37	34.198.244	5	15.798.160	173	80.930.866	175,00	139.522.401	390	270.449.671	122	88	2.077	1.095.290.173							
1		4	01	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	buah	1.250	6.200.000	292	1.707.000	0	-	0						0	-			292	1.707.000					Kec. Dolat Rayat			
2		4	01	01	02	Penyedian Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60	92.000.000	36	72.623.557	12	21.000.000	3	3.532.507	2	1.933.160	4	7.089.794	3,00	6.586.098	12	19.141.559	100,00	91,15	48	91.765.116						
3		4	01	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan dinas/Operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	unit	10	7.400.000			1	22.000.000						1,00	1.933.500	1	1.933.500	100,00	8,79	1	1.933.500							
4		4	01	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	orang bulan	480	247.975.000	152	87.140.000	12	71.790.000			2	12.650.000	6	4.340.000	4,00	66.810.000	12	83.800.000	100,00	116,73	164	170.940.000						
5		4	01	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Adanya jasa kebersihan kantor	orang bulan	60	56.423.450	36	33.280.000	12	14.837.065	2	2.430.000	1	1.215.000	5	6.075.000	4,00	4.860.000	12	14.580.000	100,00	98,27	48	47.860.000						
6		4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	25	44.500.000	0	-									0	-			-	-	-	-						
7		4	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	buah	175	123.165.002	135	58.523.936	17	13.957.532	17	6.999.737			17	6.813.675			34	13.813.412	200,00	98,97	169	72.337.348						
8		4	01	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan surat	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan surat	jenis	15	34.470.000	9	10.557.840	3	5.041.200	2	2.586.000					2,00	2.455.200	4	5.041.200	133,33	100,00	13	15.599.040						
9		4	01	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik dan penerangan kantor	buah	10	20.000.000		-			0	0							0	-		-	-	-						
10		4	01	01	13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	50	230.227.000	25	145.765.879			0	0							0	-			25	145.765.879						
11		4	01	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	75	94.809.000	70	32.094.650	17	25.643.697					17	6.662.397	17,00	17.427.603	34	24.090.000	200,00	93,94	104	56.184.650						
12		4	01	01	15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	buah	120	16.040.000	8	6.600.000			0	0							0	-			8	6.600.000						
		4	01	01	16	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	kotak	1.200	28.400.000	-	-											0											
13		4	01	01	17	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Terselenggaranya rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	orang hari kali	2.750	391.000.000	850	183.047.640	333	37.535.700	0	0			100	12.000.000	120,00	14.150.000	220	26.150.000	66,07	69,67	1.070	209.197.640						
14		4	01	01	19	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/teknis perkantoran	orang bulan	240	186.300.000	72	181.500.000	48	76.414.130	12	12.650.000			24	37.950.000	24,00	25.300.000	60	75.900.000	125,00	99,33	132	257.400.000						
15		4	01	01	21	Penyediaan jasa sewa gedung dan kendaraan	Tersedianya jasa sewa gedung dan kendaraan	unit	5	36.000.000	2	12.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000							1	6.000.000	100,00	100,00	3	18.000.000						
		4	01	03	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan		100%	258.550.985		-		-		-		-		-	1,00	24.090.000	1	24.090.000	100,00	100,00	23	272.356.303							
		4	01	03	06	Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	kali	48	143.550.985	0	-		-		-		-					0			-	-	-	-					
		4	01	03	15	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	Diterapkannya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, Dan Pemeliharaan)	sistem	5	115.000.000	0	-		-		-		-					0			-	-	-	-					
		4	01	03	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	223.885.994	22	248.266.303	1	24.090.000	0		-		-		1,00	24.090.000	1	24.090.000	100,00	100,00	23	272.356.303							
1		4	01	03	06	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Adanya Perlengkapan Gedung Kantor	unit	48	25.000.000								-				0	-			-	-	-						
2		4	01	03	15	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya Mebeleur	unit	5	70.000.000	18	60.154.003										0	-			18	60.154.003							
3		4	01	03	16	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Gedung Kantor	unit	1	25.533.916	2	137.300.000										0	-			2	137.300.000							
4		4	01	03	18	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional	unit	1	75.000.000	2	50.812.300	1	24.090.000						1,00	24.090.000	1	24.090.000	100,00	100,00	3	74.902.300							
5		4	01	03	19	Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas	Adanya Rehabilitasi Sedang/ Berat rumah dinas	unit	5	28.352.078												0	-			-	-	-						
		4	01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		100%	145.057.176	78	46.518.000	36	14.950.000	0		-		-			14.950.000		14.950.000			78	61.468.000							
1		4	01	03	01	Pengadaan Mesin Absensi	Adanya Mesin/Kartu Absensi	unit	5	46.000.000	1	9.000.000										0	-			1	9.000.000							
2		4	01	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	196	99.057.176	77	37.518.000	36	14.950.000						36,00	14.950.000	36	14.950.000			113	52.468.000							
		4	01	16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Budaya		100%	147.743.420	2	62.995.557	1	9.342.000	0		1	9.342.000		-			-	1	9.342.000	100,00	100,00	3	72.337.557						

		3				4	5	6	7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18		
								K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.		K	Rp.			
1		4	01	16	06	Pengembangan kebudayaan dan Pariwisata	Terlaksananya pengembangan kebudayaan dan pariwisata	jenis	15	147.743.420	2	62.995.557	1	9.342.000			1	9.342.000					1	9.342.000	100,00	100,00	3	72.337.557					
		4	01	16		Program Peningkatan Peran Serta Kemudahan	Meningkatnya Peran Serta Kemudahan		100%	73.871.710		-		-	0		-						-	-		-		-					
1		4	01	16	07	Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	Terbinanya Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	orang kali	60	73.871.710	0	-		-			-						0	-		-		-					
		4	01	20		Program Pembinaan dan pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		100%	369.358.550		-		-	0		-						-	-		-		-					
1		4	01	20	14	Pembinaan Olah raga yang berkembang Di Masyarakat	Terbinanya Olahraga Yang Berkembang Di Masyarakat	jenis	5	369.358.550	0	-		-			-						0	-		-		-					
		4	01	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100%	137.468.537	2	70.840.000	0	-	0		-			-			-	-		-	2	70.840.000					
1		4	01	17	04	Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	Terlaksananya Peringatan Hari Besar Nasional (HUT Proklamasi RI)	kali	5	137.468.537	2	70.840.000	0	0									0	-		-	2	70.840.000					
		4	01	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya Jalan dan Jembatan yang baik		100%	221.615.130		-		-	0		-			-	-		-	-		-		-					
1		4	01	18	03	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	km	35	221.615.130	0	-	0				-						0	-		-		-					
		5	01	20		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)		100%	147.743.420		-		-	0		-			-	-		-	-		-		-					
1		5	01	20	03	Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	Terlaksananya penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba	orang kali	500	147.743.420	0	-	0		-		-						0	-		-		-					
		4	01	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Daerah		100%	110.807.565	310	42.800.000	125	9.000.000	125	9.000.000		-		-			-	125	9.000.000	100,00	100,00	435	51.800.000				
1		4	01	21	03	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	orang kali	690	69.000.000	310	42.800.000	125	9.000.000	125	9.000.000		-						125	9.000.000	100,00	100,00	435	51.800.000				
2		5	02	22	04	Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	Adanya Biaya Operasional Tim Verifikasi Perencanaan Pembangunan Desa	orang kali	150	41.807.565	0	-		-			-						0	-		-		-					
		7	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Desa		100%	335.780.500	1	9.159.000															1	9.159.000					
1		7	01	18	09	Bimbingan Teknis Aparatur Desa	Terlaksananya Bimbingan Teknis Aparatur Desa	kali	48	60.000.000	-	-	0	-			-						0				-	-					
2		7	01	18	10	Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan perundang-undangan	sistem	1	85.000.000	-	-	0	-			-						0				-	-					
3		7	01	18	11	Penyusunan Profil Kecamatan	Terlaksananya profil kecamatan	kali	48	89.000.000	1	9.159.000	0	-			-						0				1	9.159.000					
4		7	01	18	12	Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Ranperdes	sistem	1	101.780.500	-	-	0	-			-						0				-	-					
		4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya Pelayanan Kecamatan		100%	155.130.591	7	28.640.000	12	9.000.000	0		6	8.640.000		-			-	6	8.640.000	50,00	96,00	13	17.280.000				
1		4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kecamatan	Terlaksananya rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kecamatan	kali	48	85.000.000	6	8.640.000	12	9.000.000			6	8.640.000					6	8.640.000	50,00	96,00	12	17.280.000					
2		4	01	23	02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Diterapkannya dan dikembangkan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan terpadu Kecamatan	sistem	3	70.130.591	1	20.000.000											0				1	20.000.000					
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM									100%	3.941.923.030	2.109	1.334.059.362	631	360.601.324	162	43.198.244	12	33.780.160	173	80.930.866	176,00	178.562.401	523	336.471.671	94,49	93,31		1.650.531.033					
KECAMATAN TIGANDERKET																																	
		4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	1.304.576.802	4318	846.809.088	706	228.547.938	193	47.896.667	131	32.604.865	27	21.430.784	355,00	124.246.476	704	226.178.792	100	98	5022	1.072.987.880	72	69	Kec. Tiganderket		
		4	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	bh	1250	6.000.000	750	3.375.000	0	0	0	-	0	0	0	-	-		-			750	3.375.000	60	56				
		4	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	bln	60	53.000.000	24	26.700.000	12	13.946.762	3	2.521.967	3	3.164.865	3	4.090.784	3,00	1.800.000	12	11.577.616	100	83	36	38.277.616	60	72			
		4	01	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	unit	6	4.000.000	2	1.718.500	2	1.100.000	0	0	0	0	0	-	2,00	1.100.000				2	1.718.500	33	43				

2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18										
									K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.								
1		4	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi keuangan	ob	528		245.000.000	306		106.635.000	84		71.790.000	21		4.935.000	9		3.345.000	9		3.345.000	45,00		60.165.000	84		71.790.000	100		100	390		178.425.000	74		73		
		4	01	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	ob	60		45.600.000	36		30.130.000	12		9.660.000	3		2.460.000	3		2.400.000	3		2.400.000	3,00		2.400.000	12		9.660.000	100		100	48		39.790.000	80		87		
		4	01	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja	unit	45		34.700.000	26		13.500.000	8		4.000.000	8		4.000.000	0		-	0		-	-	-	8		4.000.000	100		100	34		17.500.000	76		50			
		4	01	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	jns	184		75.676.802	113		46.507.090	23		12.061.476	10		3.975.000	5		2.850.000	3		2.850.000	5,00		2.386.476	23		12.061.476	100		100	136		58.568.566	74		77		
		4	01	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jns/lbr	15		32.200.000	11		21.700.000	3		4.950.000	3		4.950.000	0		0	0		-	-	-	3		4.950.000	100		100	14		26.650.000	93		83			
		4	01	01	12	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	bh	90		19.500.000	36		4.947.000	32		978.000	32		978.000	0		0	0		-	-	-	32		978.000	100		100	68		5.925.000	76		30			
		4	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	41		186.000.000	33		176.698.500	0		0	0		-	0		-	0		-	-	-					33		176.698.500	80		95					
		4	01	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	jenis	71		101.000.000	41		57.175.288	24		15.828.000	16		5.828.000	0		0	0		-	8,00	10.000.000	24		15.828.000	100		100	65		73.003.288	92		72			
		4	01	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	1920		12.600.000	1.200		5.760.000	0		0	0		-	0		-	0		-	-	-					1200		5.760.000	63		46					
		4	01	01	19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ohk	2770		293.000.000	1.641		235.207.710	470		59.193.700	88		9.443.700	102		12.100.000	0		-	280,00	37.650.000	470		59.193.700	100		100	2111		294.401.410	76		100			
	4	01	01	18	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	Tersedianya jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	ob	195		196.300.000	99		116.755.000	36		35.040.000	9		8.805.000	9		8.745.000	9		8.745.000	9,00		8.745.000	36		35.040.000	100,00		100,00	135		151.795.000	69,23		77,33			
	4	01	15		Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan	%	100		61.051.000	0		-	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-														Kec. Tiganderket		
	4	01	15	03	Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating dan Pemeliharaan)	Terlaksananya Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun, Updating, dan Pemeliharaan)	sistem	5		25.000.000	0		-	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-													Kec. Tiganderket			
	4	01	15	05	Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	ok	60		36.051.000	0		-	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-																
	4	01	23		Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya pelayanan kecamatan	%	100		61.051.000	26		116.820.000	10		12600000	3		3.780.000	0,00		-	1		1.260.000	6,00		7.560.000	10		12.600.000	100,00		100,00	36		129.420.000	72,22		212,42			Kec. Tiganderket
	4	01	23	01	Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	Terlaksananya Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan	kali	36		30.000.000	24		58.670.000	10		12.600.000	3		3.780.000	0		-	1		1.260.000	6,00		7.560.000	10		12.600.000	100,00		100,00	34		71.270.000	94,44		238			Kec. Tiganderket
	4	01	23	02	Penerapan dan Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Pengembangan Aplikasi E-Paten untuk Pelayanan Terpadu Kecamatan	sistem	4		31.051.000	2		58.150.000	0		0	0		0	0		-	0		-	-	-					2		58.150.000	50,00		187						
2	4	01	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100		304.217.133	91		187.339.025	2		33456000	0,00		0	0,0		0	0		-	2,00	33.456.000	2		33.456.000	100,0		100,0	93		220.795.025	70,59		80,49			Kec. Tiganderket	
	4	01	02	05	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Adanya kendaraan Dinas/ Operasional	unit	2		33.030.000	1		25.771.525	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-	0		-			1		25.771.525	50,00		78,02					
	4	01	02	10	Pengadaan meubelair	Adanya Meubelair	unit	85		92.200.000	87		82.700.000	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-	0		-			87		82.700.000	102,35		89,70					
	4	01	02	18	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional	unit	5		74.707.300	2		68.867.500	2		33.456.000	0		0	0		0	0		-	2,00	33.456.000	2		33.456.000	100,00		100,00	4		102.323.500	80,00		136,97				
	4	01	02	40	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	unit	2		46.323.730	0		-	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-	0		-													
	4	01	02	41	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	unit	2		57.956.103	1		10.000.000	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-	0		-			1		10.000.000	50,00		17,25					
	4	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparat	%	100		182.664.592	159		77.345.000	30		19.500.000	0		0	0		0	0		-	-	19.500.000	30		19.500.000	100,0		100,0			96.845.000	68,47		75,29			Kec. Tiganderket	
	4	01	03	01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Adanya Mesin/ Kartu Absensi	unit	1		9.000.000	1		9.000.000	0		-	0		0	0		0	0		-	-	-	0		-			1		9.000.000	100		100					
	4	01	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Adanya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	333		173.664.592	158		68.345.000	30		19.500.000	0		0	0		0	0		-	30,00	19.500.000	30		19.500.000	100,00		100,00	123		87.845.000	36,94		50,58				
	4	01	18		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam kondisi baik	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik	%	100		61.051.000	0		-	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-	-		-												Kec. Tiganderket	
	4	01	18	03	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Terlaksananya Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan	km	32		61.051.000	0		-	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-	0		-													
3	4	01	18		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	%	100		61.051.000	0		-	0		0	0		0	0		0	0		-	-	-	-		-													

129

2		3			4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14=(9+10+11+12)		15=13/8x100%		16=(7+13)		17=15/6x100%		18	
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	1	20	01	11	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	jenis	15	28.700.000	9	25.597.000	3	2.176.400			0	Rp	-	3	1.876.400	-	-	3	1.876.400		12	29.228.750	80,00	101,84					
	1	20	01	12	Penyediaan komponen instalansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ bangunan kantor	buah	50	15.700.000	10	6.481.500	3	3.632.020			0	Rp	-	3	3.631.750	-	-	3	3.631.750		13	6.481.500	26,00	41,28					
	1	20	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	unit	25	181.000.000	13	153.104.600	0	0			0	Rp	-			-	-	0	-		13	166.317.028	52,00	91,89					
	1	20	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	bh	80	68.000.000	48	16.806.850	14	13.213.158			0	Rp	-	14	3.213.158	-	9.999.270	14	13.212.428		62	16.806.850	77,50	24,72					
	1	20	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	bh	1200	12.000.000	24	4.320.000	0	0			0	Rp	-			-	-	0	-		24	60.238.000	2,00	501,98					
	1	20	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	ohk	1300	61.800.000	857	281.646.200	175	56.297.000	0	Rp	-	35	Rp	14.218.000		139,00	41.700.000	174	55.918.000	99,43	99,33	1031	281.646.200	79,31	455,74				
	1	20	01	18	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	ohk	1200	505.000.000			0	0									0	-		0	-								
	1	20	01	19	Penyediaan jasa pendukung administrasi/ teknis perkantoran	tersedianya jasa pendukung administrasi perkantoran	ob	240	235.600.000	96	127.637.000	41	52.522.300	6	Rp	7.590.000	15	Rp	11.385.000	6	7.590.000	20,00	25.957.300	47	52.522.300	114,63	100,00	143	165.876.500	59,58	70,41			
	1	20	02		Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	967.047.840		239.741.000	1	39.531.000		Rp	-				1,00	38.239.500	1	38.239.500	100,00	96,73	5	217.241.000	28,00	35,23				Kec. Lau Baleng	
	1	20	02	10	Pengadaan kendaraan Dinas/ Operasional	Tersedianya kendaraan dinas	unit	5	90.000.000	0	-	0	0									0	-		-		-							
	1	20	02	10	Pengadaan mebelair	Tersedianya mebeleur	unit	25	190.264.000	2	69.223.000	0	0									0	-		-		1	46.723.000	4,00	24,56				
	1	20	03	11	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	unit	5	362.470.400	2	95.518.000	1	39.531.000						1,00	38.239.500	1	38.239.500	100,00	96,73	3	95.518.000	60,00	26,35						
	1	20	04	12	Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor	tersedianya rehabilitasi/ pemeliharaan gedung kantor	unit	5	136.913.440	1	75.000.000	0	0									0	-		-		1	75.000.000	20,00	54,78				
	1	20	05	13	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	unit	5	100.000.000	0	-	0	0									0	-		-		-		-					
	1	20	05	14	Rehabilitasi sedang/ berat rumah dinas	Tersedianya rehabilitasi sedang/berat rumah dinas	unit	5	50.000.000	0	-	0	0									0	-		-		-		-					
					Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Tersedianya pemeliharaan gedung kantor	unit	5	37.400.000			0	0									0	-		-									
	1	20	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur		100%	157.145.274	47	59.952.400	25	16.800.000		Rp	-					24,00	16.128.000	24	16.128.000	96	96	47	76.080.400	20	67				Kec. Lau Baleng
	1	20	03	01	Pengadaan mesin/ kartu absensi	tersedianya mesin/kartu absensi	unit	5	9.000.000	1	9.000.000	0	0									0	-		-		1	9.000.000	20,00	100,00				
	1	20	03	02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	stel	230	148.145.274	46	50.952.400	25	Rp	16.800.000	Rp	-	Rp	-			24,00	16.128.000	24	16.128.000	96,00	96,00	46	50.952.400	20,00	34,39				
	1	20	03		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa		100%	30.525.500			0		Rp	-								-		-		-						Kec. Lau Baleng	
	1	20	03	01	Bimbingan teknis aparatur desa	terselenggaranya bimbingan teknis aparatur desa	ohk	100	8.975.500			0	0										-		0	-								
	1	20	03	01	Monitoring evaluasi ranperdes	terlaksananya monitoring dan evaluasi ranperdes	ohk	100	6.000.000			0	0										-		0	-								
					Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan	ohk	100	15.550.000			0	0																					
	1	20	03		Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Meningkatnya jalan dan jembatan dalam kondisi baik		100%	61.051.000			0		Rp	-								-		-		-						Kec. Lau Baleng	
	1	20	03	01	Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	Tersedianya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan	km	25	61.051.000			0	0									-		0	-									
	1	06	21		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya perencanaan pembangunan	%	100	99.223.138		8.284.000	1	16.655.160	1	Rp	16.655.160							1	16.655.160	100,00	100,00	2	24.939.160	40,00	9,50			Kec. Lau Baleng	
	1	06	21	16	Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	terselenggaranya kegiatan Musyawarah perencanaan pembangunan	kali	5	87.223.138	1	8.284.000	1	16.655.160	1	16.655.160							1	16.655.160	100,00	100,00	2	8.284.000	40,00	9,50					
	1	06	21		Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	Biaya Operasional Tim Verifikasi perencanaan pembangunan desa	kali	5	12.000.000			0	0																					
	1	19	17		Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan		100%	125.978.128	1	31.205.580	0		Rp	-								-		-			31.205.580	20,00	24,77			Kec. Lau Baleng	
	1	19	17	04	Peringatan hari besar nasional (HUT Proklamasi RI)	Terselenggaranya Peringatan HUT RI	kali	5	125.978.128	1	31.205.580		0									0	-		1		31.205.580	20,00	24,77					



LAMPIRAN II
PROGRAM/ KEGIATAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2022
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023

DAFTAR HALAMAN KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2022

NO	PERANGKAT DAERAH	PAGU	HALAMAN
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp 396.114.164.993,00	1
2	DINAS KESEHATAN	Rp 210.198.099.651,00	12
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Rp 55.789.283.329,00	24
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp 68.138.497.034,00	27
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Rp 14.723.785.482,00	36,42
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp 12.089.509.720,00	43
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp 5.356.910.000,00	49
8	DINAS SOSIAL	Rp 3.997.757.700,00	52
9	DINAS KETENAGAKERJAAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	Rp 5.857.067.416,00	57, 60
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp 19.194.600.886,00	62, 68
11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Rp 7.831.559.177,00	75, 79
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp 28.760.841.458,00	79, 82
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 5.835.967.373,00	83
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Rp 14.733.762.877,00	85
15	DINAS PERHUBUNGAN	Rp 8.088.616.101,00	89
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp 7.459.748.314,00	94, 96
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 6.769.744.902,00	97
18	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA	Rp 22.420.951.820,00	101, 104
19	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Rp 16.613.683.791,00	107, 108
20	DINAS PERTANIAN	Rp 34.050.895.791,00	112
21	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN SERTA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Rp 123.018.120.841,00	118, 119,123
22	SEKRETARIAT DAERAH	Rp 27.661.260.094,00	123
23	SEKRETARIAT DPRD	Rp 37.563.834.300,00	132
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 8.581.096.821,00	140, 145
25	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 291.979.624.319,00	146
26	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 5.265.531.635,00	152
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rp 5.803.383.725,00	154, 157
28	INSPEKTORAT DAERAH	Rp 17.355.489.793,00	157
29	KECAMATAN KABANJAHE	Rp 10.026.571.129,00	162, 163
30	KECAMATAN BARUSJAHE	Rp 2.909.300.629,00	167
31	KECAMATAN MEREK	Rp 2.973.110.015,00	170
32	KECAMATAN MUNTE	Rp 2.382.386.885,00	173
33	KECAMATAN JUHAR	Rp 3.384.766.813,00	177
34	KECAMATAN TIGABINANGA	Rp 4.191.531.594,00	180, 183
35	KECAMATAN LAU BALENG	Rp 2.502.354.025,00	184
36	KECAMATAN MARDINDING	Rp 2.431.584.521,00	189
37	KECAMATAN PAYUNG	Rp 2.067.444.235,00	192
38	KECAMATAN SIMPANG EMPAT	Rp 3.098.433.359,00	195
39	KECAMATAN KUTABULUH	Rp 3.071.684.888,00	199
40	KECAMATAN DOLATRAYAT	Rp 2.048.401.925,00	203
41	KECAMATAN NAMAN TERAN	Rp 2.265.163.136,00	208
42	KECAMATAN TIGANDERKET	Rp 2.985.989.591,00	212
43	KECAMATAN BERASTAGI	Rp 8.191.603.180,00	216, 219, 220, 221
44	KECAMATAN TIGAPANAH	Rp 3.653.665.311,00	221
45	KECAMATAN MERDEKA	Rp 2.211.819.365,00	224
46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 9.729.960.270,00	227
JUMLAH		Rp 1.531.379.560.214	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						396,114,164,993		450,290,599,082						
1	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	301,148,148,326						83 indeks	351,949,200,748	
1	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Adanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	2 dokumen	125,000,000						2 dokumen	125,000,000	
1	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Adanya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 dokumen	125,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Semua stakeholder bidang pendidikan	2 dokumen	125,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	295,363,570,675						12 bulan	346,546,362,137	
1	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	294,776,890,675	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - TPG PNSD DAK Non Fisik - Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik - TKG PNSD		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	12 bulan	345,996,362,137	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				912 orang/bulan	586,680,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	912 orang/bulan	550,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	324,598,737						12 bulan	257,158,611	
1	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atributnya				120 setel	69,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo dan Sekolah	120 setel	88,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya Pelayananan Administrasi Perkantoran				1 tahun	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo dan Sekolah	1 tahun	20,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai				12 bulan	225,598,737	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo dan Sekolah	12 bulan	116,158,611	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi				5 orang/kali	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo dan Sekolah	5 orang/kali	33,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	437,978,914						12 bulan	335,500,000	
1	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik				150 jenis	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	150 jenis	11,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				40 jenis	105,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	40 jenis	110,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga				200 jenis	107,978,914	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	200 jenis	44,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Meningkatnya Pelayananan Administrasi Perkantoran				1 tahun	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 tahun	55,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				6 buah	5,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	6 buah	5,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan minum				200 orang kali	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	200 orang kali	10,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				100 orang/kali	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	100 orang/kali	100,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Buah		Unit Buah	26 Unit Buah	215,000,000						26 Unit Buah	5,500,000	
1	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel				25 buah	15,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	25 buah	5,500,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor dan bangunan lainnya				1 Unit	200,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 Unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	4,597,740,000						12 bulan	4,585,420,000	
1	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet Air dan Listrik				12 bulan	61,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Jasa Pendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan	12 bulan	67,980,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50 unit	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Jasa Pendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan	50 unit	11,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				13872 orang/bulan	4,505,940,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan dan Jasa Pendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan	13872 orang/bulan	4,505,940,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	44 Unit	84,260,000						44 Unit	94,260,000	
1	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 unit	44,260,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 unit	44,260,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				1 unit	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	1 unit	20,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Meningkatnya Pelayananan Administrasi Perkantoran				2 jenis	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan Kab. Karo	2 jenis	30,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen		Persen	50.09 Persen	94,936,016,667						50.09 Persen	98,311,398,334	
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP)	Persen		Persen	77.68 Persen	39,435,881,428						77.68 Persen	42,940,703,334	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar		0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru				10 ruang	2,400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	10 ruang	2,640,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU				2 ruang	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 ruang	330,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah				2 ruang	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 ruang	220,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah				2 ruang	760,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 ruang	836,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana dan Prasarana dan Utilitas Sekolah				2 paket	400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 paket	440,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Ruang Kelas yang direhab				4 ruang	440,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	4 ruang	484,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang direhab				2 ruang	220,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 ruang	242,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab				1 tahun	500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	1 tahun	550,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhab				2 paket	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 paket	220,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang direhab				2 paket	400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 paket	440,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah				2 paket	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 paket	88,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah				2 paket	110,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	2 paket	121,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta Didik Sekolah Dasar Penerima Biaya Personil				850 orang/kali	450,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	850 orang/kali	495,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa				5 paket	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	5 paket	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta Didik mengikuti Proses Belajar dan Ujian				8000 orang/kali	223,514,761	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	8000 orang/kali	224,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Frekuensi Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar				40 orang/kali	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	40 orang/kali	11,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa mengikuti Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa				350 orang/kali	400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	350 orang/kali	440,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar yang dilatih				100 Orang	230,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	100 Orang	230,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru, Diklat Penguatan Pengawas Sekolah, Olimpiade Guru				956 orang	1,009,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	956 orang	799,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Sekolah Dasar yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				284 orang/kali	600,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	284 orang/kali	600,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar dan BOS Daerah (BOSDA)				260 sekolah/tahun	30,263,366,667	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	260 sekolah/tahun	33,289,703,334	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Sekolah Dasar mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				100 sekolah	40,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Dasar	100 sekolah	41,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) Sekolah Menengah Pertama	persen		persen	77.68 persen	50,291,200,000						77.68 persen	49,691,200,000	
1	01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	unit sekolah baru				1 unit	600,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 unit	0	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	ruang kelas baru				2 ruang	421,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	421,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	ruang guru/kepala sekolah/TU				2 ruang	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	ruang unit kesehatan sekolah				2 ruang	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah				2 ruang	760,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	760,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Laboratorium				2 ruang	820,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	820,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sarana,prasarana dan utilitas sekolah				6 paket	593,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	6 paket	593,400,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	ruang kelas sekolah yang direhab				5 ruang	2,206,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5 ruang	2,206,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	ruang guru sekolah yang direhab				2 ruang	220,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	220,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang direhab				3 ruang	500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	3 ruang	500,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang direhab				2 ruang	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	rumah dinas kepala sekolah/guru/penjaga sekolah yang direhab				2 ruang	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sarana,prasarana dan utilitas sekolah yang direhab				4 ruang	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	4 ruang	200,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	mebel sekolah				2 paket	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 paket	80,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	perlengkapan sekolah				1 paket	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 paket	300,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	peserta didik sekolah menengah pertama penerima biaya personil				1000 orang/tahun	765,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1000 orang/tahun	765,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	34	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	perlengkapan belajar peserta didik				1 paket	992,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1 paket	992,800,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Alat Praktik dan Peraga Siswa				13 paket	7,000,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SMP		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	13 paket	7,000,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	36	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Peserta Didik mengikuti Proses belajar dan ujian				65 sekolah	70,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	65 sekolah	70,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Frekuensi Penyiapan dan tindaklanjuti evaluasi satuan pendidikan Sekolah menengah pertama				66 sekolah	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66 sekolah	20,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	siswa mengikuti pembinaan minat,bakat dan kreativitas siswa				400 orang/tahun	360,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	400 orang/tahun	360,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang dilatih				100 Orang	230,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	100 Orang	230,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Diklat Calon Kepala Sekolah, Pelatihan Peningkatan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi, Penyediaan Bantuan Operasional Tim Sertifikasi Guru, Diklat Penguatan Pengawas Sekolah, Olimpiade Guru				616 orang	1,009,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	616 orang	1,009,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	sekolah menengah pertama yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				2 sekolah	530,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2 sekolah	530,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah menengah pertama pengelola dana BOS Reguler sekolah menengah pertama				66 sekolah	31,694,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOS Reguler		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66 sekolah	31,694,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	sekolah menengah pertama mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOS sekolah menengah pertama				66 sekolah	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	66 sekolah	20,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) Anak Usia Dini (PAUD)	%		%	12.5 %	4,208,935,239						12.5 %	4,624,495,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	01	02	2.03	01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD				1 ruang	110,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Dinas Pendidikan	1 ruang	121,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD				1 paket	110,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 paket	121,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang direhab				1 ruang	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 ruang	82,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang direhab				1 paket	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 paket	82,500,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	10	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Perlengkapan Siswa PAUD				1 Paket	10,450,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 Paket	11,495,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD				1 paket	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	1 paket	22,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satua PAUD yang menerima pengembangan karir				50 Orang	136,485,239	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	50 Orang	160,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satua PAUD yang menerima pengembangan karir				30 orang	72,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	30 orang	72,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan PAUD yang mengikuti Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah				15 sekolah	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	15 sekolah	22,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan PAUD Pengelola Dana BOP PAUD				166 sekolah	3,500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	166 sekolah	3,850,000,000	Dinas Pendidikan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	01	02	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan PAUD mengikuti Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD				166 sekolah	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	166 sekolah	80,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) Non Formal/Kesetaraan	Persen		Persen	32.5 Persen	1,000,000,000						32.5 Persen	1,055,000,000	
1	01	02	2.04	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan				1 paket	120,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 paket	132,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	04	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang direhab				1 paket	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pendidikan - Reguler - SKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 paket	88,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik mengikuti proses belajar nonformal/kesetaraan				1 tahun	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 tahun	110,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	15	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang menerima pengembangan karir				50 orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	50 orang	50,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang mengikuti pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah				1 sekolah	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1 sekolah	33,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Nonformal/Kesetaraan Pengelola Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				4 sekolah	600,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 sekolah	620,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	02	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Sekolah Nonformal/Kesetaraan mengikuti peningkatan kapasitas pengelolaan dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan				4 sekolah	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4 sekolah	22,000,000	Dinas Pendidikan
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Indeks Pemerataan Guru	Persen		Persen	0.3 Persen	20,000,000						0.3 Persen	20,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Indeks Pemerataan Guru	persen		persen	0.3 persen	20,000,000						0.3 persen	20,000,000					
1	01	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kajian Penghitungan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan Pemetaan Kuantitas dan Kualitasnya pada Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nongormal/Kesetaraan				100 sekolah	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	100 sekolah	20,000,000	Dinas Pendidikan				
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Swasta/Masyarakat yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal	persen		persen	2 persen	10,000,000						2 persen	10,000,000					
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Rekomendasi Penyelenggaraan PAUD Dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat	Lembaga		Lembaga	2 Lembaga	10,000,000						2 Lembaga	10,000,000					
1	01	05	2.02	03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat yang mengikuti Pembinaan				20 Lembaga	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	20 Lembaga	10,000,000	Dinas Pendidikan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						210,198,099,651								197,536,362,346				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		indeks	83 indeks	96,361,389,425						83 indeks	99,074,450,000					
1	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya perencanaan dan penganggaran perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	25,000,000						12 bulan	30,000,000					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
														Nasional					Daerah	
1	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Dinas Kesehatan dan Puskesmas				2 dokumen	25,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	2 dokumen	30,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	94,109,973,466							12 bulan	96,788,760,198	
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	93,449,613,466	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	12 bulan	96,118,760,198	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan				66 orang bulan	660,360,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	66 orang bulan	670,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	760,704,000							12 bulan	739,200,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta Atribut				1132 stel	760,704,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1132 stel	739,200,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	269,760,157							12 bulan	269,929,802	
1	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				10 jenis	7,385,639		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	10 jenis	0	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				33 jenis	79,909,320	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	33 jenis	80,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				20 jenis	24,999,088	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	20 jenis	25,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan penggandaan				5 jenis	25,316,110	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	5 jenis	26,000,000	Dinas Kesehatan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				4 buah	7,150,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	4 buah	7,150,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalan Dinas				30 orang kali	125,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	30 orang kali	131,779,802	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit/Buah		Unit/Buah	12 Unit/Buah	77,554,302						12 Unit/Buah	55,000,000	
1	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				12 buah	77,554,302	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	12 buah	55,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	999,560,000						12 bulan	999,560,000	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bulan	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	12 bulan	50,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				62 orang bulan	949,560,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	62 orang bulan	949,560,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	12 unit	118,837,500						12 unit	192,000,000	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				11 unit	18,837,500	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	11 unit	92,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	100,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	1 unit	100,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rasio puskesmas per 1.000 penduduk / Rasio Pustu per 1.000 Penduduk / Rasio Rumah Sakit per 1.000 penduduk	Rasio		Rasio	0,05 / 0,5 / 0,01 Rasio	111,902,586,701					0,05 / 0,5 / 0,01 Rasio	95,767,212,151		
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten	%		%	100 %	76,673,375,000					100 %	62,592,740,650		
1	02	02	2.01	01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Pembangunan RSUD				1 RSUD	50,000,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Rumah Kabanjahe	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 RSUD	50,000,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	02	Pembangunan Puskesmas	jumlah puskesmas dibangun				1 Puskesmas	6,000,000,000	Kab. Karo, Naman Teran, Naman	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Puskesmas	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Puskesmas Pembantu dibangun				1 Pustu	350,000,000	Kab. Karo, Merek, Negeri Tongging	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Pustu	350,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan dibangun				4 unit	1,470,000,000	Kab. Karo, Munte, Munte Kab. Karo, Kutabuluh, Kutabuluh	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	4 unit	1,125,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	06	Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas dilaksanakan pengembangan/penambahan ruangan				1 Puskesmas	3,000,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Puskesmas	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Pustu dilaksanakan Rehabilitasi dan pemeliharaan				4 Pustu	410,000,000	Kab. Karo, Munte, Nageri Kab. Karo, Tigabinanga, Gunung Kab. Karo, Tigabinanga, Bunga Baru Kab. Karo, Tigabinanga, Kuta Buara	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	4 Pustu	410,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan				2 unit	0	Kab. Karo, Munte, Munte	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	2 unit	270,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan diadakan				193 unit	4,500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	193 unit	1,650,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan puskesmas yang diadakan				450 unit	5,000,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	450 unit	2,500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kesehatan Puskesmas yang dikalibrasi				21 item	109,789,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	21 item	167,820,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	jumlah Obat, Vaksin yang diadakan				329000 orang	4,606,693,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	329000 orang	4,837,027,650	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Medis Habis Pakai yang diadakan				80000 orang	1,120,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	80000 orang	1,176,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0					Masyarakat		0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.01	21	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Distribusi obat dan BMHP ke puskesmas				19 Puskesmas	106,893,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	19 Puskesmas	106,893,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayan Kesehatan menyediakan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	%		%	100 %	33,651,065,901						100 %	32,281,687,671	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standart				100 %	949,212,106	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	950,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	1,942,227,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	2,200,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir yang medapat pelayanan kesehatan sesuai standar				100 %	77,750,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	78,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai standar				100 %	1,174,420,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	1,175,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Usia Pendidikan Dasar Mendapat Pelayanan Kesehatan				100 %	671,640,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	675,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Usia Produktif Mendapat Pelayanan Kesehatan				100 %	133,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	135,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase Usia Lanjut Mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai standar				100 %	484,550,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	485,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar				100 %	19,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN TRANSFER		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase Penderita Diabetes Melitus mendapat pelayanan Kesehatan sesuai standar				100 %	19,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan Gangguan Jiwa Berat mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai standar				100 %	97,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	100,000,000	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	02	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Orang Terduga Tuberkulosis mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai standar				100 %	294,960,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	300,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang dengan Risiko Terinfeksi HIV mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai standar				100 %	190,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	190,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				19 puskesmas	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	19 puskesmas	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Puskesmas melaksanakan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan / atau Berpotensi Bencana				19 Puskesmas	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	19 Puskesmas	500,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Persentase Balita mendapat Pelayanan Gizi				100 %	1,591,742,795	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	100 %	1,591,742,795	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga					0	0				Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	0	0	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional		Daerah			
1	02	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat/jumlah Fasilitas Tempat Umum dilaksanakan pengawasan sanitasi/jumlah sarana air bersih diperiksa Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat/jumlah Fasilitas Tempat Umum dilaksanakan pengawasan sanitasi/jumlah sarana air bersih diperiksa Jumlah Desa/Kelurahan Melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat/jumlah Fasilitas Tempat Umum dilaksanakan pengawasan sanitasi/jumlah sarana air bersih diperiksa				15 desa 20 Lokasi 20 Sarana	147,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	15 desa 20 Lokasi 20 Sarana	147,500,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				19 puskesmas	534,905,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	19 puskesmas	534,905,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional				19 Puskesmas	45,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	19 Puskesmas	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas menyelenggarakan Pengelolaan Surveilans Kesehatan				19 Puskesmas	146,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	19 Puskesmas	25,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA				19 Puskesmas	69,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			Masyarakat	19 Puskesmas	70,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				19 Puskesmas	1,605,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	19 Puskesmas	878,280,638	Dinas Kesehatan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Karo
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	- Jumlah Masyarakat miskin mendapat bantuan iuran Jaminan Kesehatan / Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasinal / BPJS Kesehatan - Jumlah Masyarakat miskin mendapat bantuan iuran Jaminan Kesehatan / Jumlah Puskesmas Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Peserta Jaminan Kesehatan Nasinal / BPJS Kesehatan				19 Puskesmas 14709 Orang	20,037,749,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	19 Puskesmas 14709 Orang	20,037,749,238	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah				1000 orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1000 orang	50,000,000	Dinas Kesehatan	
1	02	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	operasional Pelayanan Puskesmas				19 Puskesmas	1,103,510,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	19 Puskesmas	1,103,510,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	operasional kesehatan Kabupaten				19 Puskesmas	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	19 Puskesmas	100,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Puskesmas Terakreditasi				7 Puskesmas	305,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - Akreditasi Puskesmas		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	7 Puskesmas	305,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah					0	0					Masyarakat	0	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Gedung , Ambulance dan Peralatan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu				1 Set	1,759,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Set	75,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Puskesmas menyelenggarakan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	%		%	0 %	748,345,800						0 %	67,783,830	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.03	01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Profil Kesehatan				30 eks/buku	19,320,800	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	30 eks/buku	20,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Pembinaan, bimbingan dan Monev pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas				19 Puskesmas	11,525,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	19 Puskesmas	47,783,830	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.03	03	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas				5 set	717,500,000	Kab. Karo, Barusjahe, Barusjahe Kab. Karo, Merek, Merek Kab. Karo, Munte, Munte Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	5 set	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen mempunyai izin	%		%	100 %	829,800,000						100 %	825,000,000	
1	02	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit dilaksanakan Pengawasan, Monitoring dan Pembinaan pengelolaan Pelayanan Kesehatan Rujukan				5 RS	19,800,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Simomo Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	5 RS	15,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	02	2.04	03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Puskesmas dilaksanakan bimbingan / pendampingan untuk Peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan				19 puskesmas	810,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	19 puskesmas	810,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga Kesehatan sesuai standar	%		%	100 %	1,376,547,850						100 %	2,036,650,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan memiliki STR dan SIP/SIK	%		%	100 %	17,432,000						100 %	10,000,000	
1	02	03	2.01	01	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan dilaksanakan pengendalian izin praktik tenaga kesehatan				75 Puskesmas/RS/Klinik	17,432,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	75 Puskesmas/RS/Klinik	10,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang memiliki jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%		%	42 %	1,229,450,000						42 %	1,776,650,000	
1	02	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan dengan perjanjian kerja				57 Orang	1,094,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	57 Orang	1,641,600,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Puskesmas dilaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi				19 Puskesmas	135,050,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	19 Puskesmas	135,050,000	Dinas Kesehatan
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan mengikuti pendidikan dan pelatihan Tenaga kesehatan mengikuti Pelatihan	% orang		% orang	10 % 76 orang	129,665,850						10 % 76 orang	250,000,000	
1	02	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan Mengikuti Pelatiha				76 orang	129,665,850	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur	76 orang	250,000,000	Dinas Kesehatan
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana dan produk farmasi dan makanana minuman memenuhi persyaratan	%		%	65 %	149,562,900						65 %	158,050,195	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Persentase sarana kefarmasian yang diawasi	sarana %		sarana %	60 sarana 90 %	20,183,000						60 sarana 90 %	22,201,300	
1	02	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional yang diawasi dan dibina				60 sarana	20,183,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	60 sarana	22,201,300	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengawasan dan pembinaan Industri Rumah Tangga pangan Persentase sarana Industri Rumah Tangga yang memproduksi makanan minuman yang diawasi	sarana %		sarana %	60 sarana 90 %	36,740,000						60 sarana 90 %	38,577,000	
1	02	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga yang memproduksi makanan minuman yang diawasi dan dibina				60 sarana	36,740,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	60 sarana	38,577,000	Dinas Kesehatan
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya. Persentase makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diawasi	produk / sampel %		produk / sampel %	631 produk / sampel 63 %	92,639,900						631 produk / sampel 63 %	97,271,895	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
1	02	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah produk/sampel makanan jajanan dan sentra makanan jajanan yang diperiksa				631 produk/sampel	92,639,900	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	631 produk/sampel	97,271,895	Dinas Kesehatan				
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rasio posyandu per 1.000 balita				8,8	408,012,775						8,8	500,000,000					
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Puskesmas Melaksanakan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Puskesmas		Puskesmas	0 19 Puskesmas	0						0 19 Puskesmas	0					
1	02	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					0	0			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyrakat	0	0	Dinas Kesehatan				
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Posyandu yang dilaksanakan pembinaan	Posyandu		Posyandu	377 Posyandu	408,012,775						377 Posyandu	500,000,000					
1	02	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Posyandu yang dilaksanakan pembinaan				377 Posyandu	408,012,775	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	377 Posyandu	500,000,000	Dinas Kesehatan				
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						55,789,283,329								56,763,813,329				
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	50,327,606,147						83 Indeks	50,538,136,147					
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	23,202,719,633						12 Bulan	23,228,249,633					
1	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	22,943,249,633	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai RSU Kabanjahe	12 Bulan	22,943,249,633	Rumah Sakit Umum Daerah				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				252 Orang/Bulan	259,470,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai RSU Kabanjahe	252 Orang/Bulan	285,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	279,000,000						12 Bulan	464,000,000	
1	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut				372 Stel	279,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai RSU Kabanjahe	372 Stel	279,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				93 Orang/Kali	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai RSU Kabanjahe	93 Orang/Kali	185,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Buah		Buah	300 Buah	50,000,000						300 Buah	50,000,000	
1	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				58 Buah	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Kantor	58 Buah	50,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,664,359,998						12 Bulan	3,664,359,998	
1	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	381,600,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	SDM dan Sarana Prasarana kantor	12 Bulan	381,600,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kebersihan, Petugas Jaga Malam				240 Orang/Bulan	3,282,759,998	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	SDM dan Sarana Prasarana kantor	240 Orang/Bulan	3,282,759,998	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	12 Unit	55,271,141						12 Unit	55,271,141	
1	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				12 Unit	55,271,141	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana kantor	12 Unit	55,271,141	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				42 Unit	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana kantor	42 Unit	0	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya Pelayanan BLUD	Bulan		Bulan	12 Bulan	23,076,255,375						12 Bulan	23,076,255,375	
1	02	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Terlaksananya pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat				1 Tahun	23,076,255,375	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Pendapatan dari BLUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pasien RSU Kabanjahe	1 Tahun	23,076,255,375	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kelengkapan Alat Kesehatan Rumah Sakit sesuai standar	%		%	80 %	5,461,677,182						80 %	6,225,677,182	
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	5,161,677,182						100 Persen	5,925,677,182	
1	02	02	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat non medis yang sesuai standar				750 Unit	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pelayanan RSU Kabanjahe	750 Unit	200,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat medis yang sesuai standar				56 Unit	5,161,677,182	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Rujukan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pelayanan RSU Kabanjahe	56 Unit	5,625,677,182	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Peralatan Medis Dalam Kondisi Baik dan Dikalibrasi				50 Unit	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pelayanan RSU Kabanjahe	50 Unit	100,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen		Persen	100 Persen	300,000,000						100 Persen	300,000,000	
1	02	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Korban Bencana				12 Bulan	20,629,922	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pasien RSU Kabanjahe	12 Bulan	10,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	02	02	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Pelayanan Kepada Pasien Terlantar/ Tidak Mampu, Pelayanan Kepada Pasien Umum, Penguburan Mayat Tidak dikenal				12 Bulan	165,790,907	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pasien RSU Kabanjahe	12 Bulan	150,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1	02	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Status Akreditasi Rumah Sakit				12 Dokumen	113,579,171	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pasien RSU Kabanjahe	12 Dokumen	140,000,000	Rumah Sakit Umum Daerah
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						68,138,497,034						68,091,239,823		
1	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	17,576,435,386						83 Indeks	18,576,435,386	
1	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan Bulan		Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan	6,889,613,686						12 Bulan 12 Bulan	6,849,613,686	
1	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	6,367,858,686	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	12 Bulan	6,327,858,686	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				1 Orang Bulan	521,755,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	1 Orang Bulan	521,755,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	50,000,000						12 Bulan	50,000,000	
1	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				75 stel	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab.Karo	75 stel	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,355,501,700						12 Bulan	1,555,501,700	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor, Adanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan jalan Umum dan Terpeliharanya Jaringan Instalasi Listrik Lampu Penerangan Jalan Umum				3 Jenis	603,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	3 Jenis	603,300,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42 Jenis	301,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	42 Jenis	301,800,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				27 Jenis	20,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	27 Jenis	20,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	30,401,700	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	2 Jenis	30,401,700	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				805 orang kali	400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	805 orang kali	600,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	3 Unit	410,000,000						3 Unit	150,000,000	
1	03	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	350,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab.Karo	1 unit	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				2 Buah	60,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab.Karo	2 Buah	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	8,421,320,000						12 Bulan	9,421,320,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tagihan Listrik Lampu jalan Penerangan Jalan Umum (LPJU) Telepon,Internet,air dan Listrik				10 bulan 12 bulan	7,500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab.Karo	10 bulan 12 bulan	8,500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				112 unit	54,560,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab.Karo	112 unit	54,560,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				2823 orang bulan	866,760,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab.Karo	2823 orang bulan	866,760,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	34 Unit	450,000,000						34 Unit	550,000,000	
1	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				15 unit	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	15 unit	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar				19 unit	400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Dinas PUPR Kab. Karo	19 unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%		%	50,11 %	11,246,512,614						50,11 %	10,656,000,000	
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Jaringan Irigasi	ha		ha	480 ha	11,246,512,614						480 ha	10,656,000,000	
1	03	02	2.02	01	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Dokumen Rencana Teknis Dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa				2 Dokumen	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	02	2.02	03	Pembangunan Bendung Irigasi	Bendung Irigasi				2 unit	890,512,614	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	2 unit	400,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Rehabilitasi Jaringan Irigasi				480 ha	7,200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Irigasi - Penugasan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	480 ha	7,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Honorarium Non PNS Lainnya, Petugas Lapangan Bidang Pengairan,Pekerja Saluran (Peksal) Monitoring,evaluasi kondisi irigasi dan Honorarium Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan				1920 orang bulan 1 Kegiatan 2000 ha	3,056,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1920 orang bulan 1 Kegiatan 2000 ha	3,156,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	%		%	68,702 %	450,000,000						68,702 %	450,000,000	
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sambungan Rumah	SR		SR	44 SR	450,000,000						44 SR	450,000,000	
1	03	03	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi danTeknis SPAM				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Optimalisasi SPAM				416 m	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	416 m	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	03	2.01	07	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Tersedianya Sambungan Rumah				44 SR	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	44 SR	200,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	03	2.01	08	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rehabilitasi SPAM Kawasan Perdesaan				416 m	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	416 m	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rurnah tinggal bersanitasi	%		%	74,08 %	2,100,000,000						74,08 %	2,200,000,000	
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Unit		Unit	4 Unit	2,100,000,000						4 Unit	2,200,000,000	
1	03	05	2.01	08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Peningkatan SDM terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik				50 orang	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	50 orang	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	05	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman				4 unit	2,000,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Reguler DAK Fisik - Bidang Sanitasi - Penugasan		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	4 unit	2,100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	%		%	61 %	3,110,557,665						61 %	3,010,557,665	
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalamTersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara	m		m	8000 m	3,110,557,665						8000 m	3,010,557,665	
1	03	06	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong				2 Dokumen	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	06	2.01	05	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Saluran Drainase/ Gorong-gorong Perkotaan				1080 m'	800,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1080 m'	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	06	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang Optimal				400 m	1,000,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	400 m	1,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Tersedianya Saluran Drainase yang baik				500 m'	310,557,665	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	500 m'	310,557,665	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	09	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Tersedianya Saluran Drainase yang Terpelihara				8000 m	650,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	8000 m	700,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	06	2.01	14	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Saluran Drainase Lingkungan				200 m'	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	200 m'	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Gedung Pemerintah dalam kondisi baik	%		%	61 %	2,726,553,876						61 %	1,726,553,876	
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor	Unit		Unit	6 Unit	2,726,553,876						6 Unit	1,726,553,876	
1	03	08	2.01	02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung Kantor				9 unit	2,243,157,876	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah Kabupaten Karo	9 unit	1,243,157,876	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	03	08	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Bangunan Gedung yang Optimal				3 unit	483,396,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah Kabupaten Karo	3 unit	483,396,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%		%	25 %	1,000,000,000						25 %	1,000,000,000	
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan	Tahun		Tahun	1 Tahun	1,000,000,000						1 Tahun	1,000,000,000	
1	03	09	2.01	03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Penataan Taman Kawasan Perkotaan				1 unit	500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 unit	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	09	2.01	04	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Taman Kawasan Perkotaan				1 Tahun	500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Tahun	500,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%		%	63 %	28,878,437,493						63 %	29,921,692,896	
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jalan dilebarkan	m		m	12000 m	28,878,437,493						12000 m	29,921,692,896	
1	03	10	2.01	01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Dokumen Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	02	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Tersedianya Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan				40 unit	800,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	40 unit	800,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	03	Pengelolaan Leger Jalan	Pengelolaan Leger Jalan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	143,396,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	03	10	2.01	04	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan				1 Dokumen	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	05	Pembangunan Jalan	Jalan dibangun / ditingkatkan				9200 m	6,581,072,994	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	9200 m	7,381,072,994	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	06	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Jalan dilebarkan				12000 m	12,497,598,258	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Jalan- Reguler DAK Fisik - Bidang Jalan - Penugasan		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	12000 m	12,631,708,750	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	08	Rekonstruksi Jalan	Rekonstruksi Jalan				800 m	1,012,751,216	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	800 m	812,751,216	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	09	Rehabilitasi Jalan	Turap/Talud/Bronjong dan Drainase Jalan				3 Jenis	2,652,763,936	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	3 Jenis	2,352,763,936	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Pemeliharaan Berkala Jalan				1100 m	800,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1100 m	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Pemeliharaan Rutin Jalan				45000 m	3,734,251,089	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	45000 m	4,000,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	Jembatan				1 unit	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 unit	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1	03	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	Penggantian Jembatan				1 unit	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 unit	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	03	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	Rehabilitasi Jembatan				1 unit	250,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 unit	150,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	10	2.01	19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Pemeliharaan Rutin Jembatan				1 unit	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 unit	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	10	2.01	21	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat				1 Kegiatan	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Kegiatan	300,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	10	2.01	23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan				1 Dokumen	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	100,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya SDM Tenaga terampil konstruksi	orang		orang	100 orang	150,000,000							100 orang	150,000,000	
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Orang		Orang	50 Orang	150,000,000							50 Orang	150,000,000	
1	03	11	2.01	04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				50 orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	50 orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	11	2.01	06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi				50 orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	50 orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	11	2.01	07	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi				50 orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	50 orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Ketaatan terhadap RTRW	%		%	75 %	900,000,000							75 %	400,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Sosiali Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang	Orang		Orang	100 Orang	50,000,000						100 Orang	50,000,000		
1	03	12	2.01	04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Rencana Tata Ruang				100 orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur Pemerintah Kabupaten Karo	100 orang	50,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	RRTR Kabupaten/Kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	500,000,000						1 Dokumen	0		
1	03	12	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	RRTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Tahun		Tahun	1 Tahun	350,000,000						1 Tahun	350,000,000		
1	03	12	2.04	04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				1 Tahun	350,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	1 Tahun	350,000,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						0							0		
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						0							0		
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan						0							0		
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian						0							0	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						14,673,785,482							9,888,296,306		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		indeks	83 indeks	3,697,054,274						83 indeks	3,246,725,000	
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	3,023,829,274						12 bulan	2,565,225,000	
1	04	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	2,723,829,274	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	12 bulan	2,265,225,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				12 orang/bulan	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	12 orang/bulan	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	stel		stel	45 stel	40,000,000						45 stel	40,000,000	
1	04	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				45 stel	40,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	45 stel	40,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	380,000,000						12 bulan	351,500,000	
1	04	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8 jenis	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	8 jenis	1,500,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 jenis	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	5 jenis	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				22 jenis	40,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	22 jenis	55,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				6 jenis	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	6 jenis	25,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang- Undangan				60 buah	40,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	60 buah	20,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				700 orang/kali	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	700 orang/kali	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	12 unit	50,000,000						12 unit	100,000,000	
1	04	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pengadaan peralatan dan mesin lainnya				5 unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	5 unit	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				5 buah	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	5 buah	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	53,225,000						12 bulan	90,000,000	
1	04	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bulan	18,225,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	12 bulan	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor				15 unit	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	15 unit	25,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				12 orang/bulan	15,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	12 orang/bulan	15,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	8 unit	150,000,000						8 unit	100,000,000	
1	04	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				5 unit	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	5 unit	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 unit	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Dinas perkim	1 unit	50,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persentase		persentase	100 persentase	1,069,881,249						100 persentase	2,200,000,000	
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	persentase		persentase	100 persentase	1,069,881,249						100 persentase	2,200,000,000	
1	04	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana				20 unit	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	20 unit	400,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	02	2.03	02	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				1 dokumen	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	1 dokumen	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	02	2.03	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Adanya Sarana Dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat				2 lokasi	419,881,249	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	2 lokasi	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	02	2.03	04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				100 unit	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	100 unit	600,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	02	2.03	05	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				40 unit	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	40 unit	500,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	02	2.03	06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota				17 kegiatan	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	17 kegiatan	300,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	persentase		persentase	25 persentase	940,000,000						25 persentase	940,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	persentase		persentase	25 persentase	940,000,000					25 persentase	940,000,000		
1	04	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				100 rumah	940,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Perumahan dan Permukiman - Reguler		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	100 rumah	940,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	04	2.01	02	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha						0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo		0	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	persentase		persentase	50 persentase	8,966,849,959						50 persentase	3,501,571,306	
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase satuan perumahan yang sudah dilengkapi dengan PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	persentase		persentase	50 persentase	8,966,849,959						50 persentase	3,501,571,306	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	04	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian				30 unit	8,234,849,959	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Air Minum - Reguler	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	30 unit	2,501,571,306	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1	04	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana , Utilitas Umum Perumahan				7 kegiatan	732,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kabupaten Karo	7 kegiatan	1,000,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						50,000,000							600,000,000	
2	10	02			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		%	45 %	0						45 %	200,000,000	
2	10	02	2.01		Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		%	45 %	0						45 %	200,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	10	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha						0		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo		200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		%	45 %	50,000,000						45 %	400,000,000	
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%		%	45 %	50,000,000						45 %	400,000,000	
2	10	05	2.01	01	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Bantuan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				20 orang	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	20 orang	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
2	10	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Satuan Tanah Untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				2 kegiatan	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kab. Karo	2 kegiatan	200,000,000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						12,089,509,720						13,023,831,000		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Bulan		Indeks Bulan	83 Indeks 12 Bulan	11,830,809,720						83 Indeks 12 Bulan	12,745,506,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan	bulan		bulan	12 bulan	4,021,767,681					12 bulan	4,371,288,961		
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				14 Bulan	3,971,767,681	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten karo	14 Bulan	4,311,288,961	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				6 Bulan	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kabupaten karo	6 Bulan	60,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Stel Bulan		Stel Bulan	13 Stel 14 Bulan	11,000,000						13 Stel 14 Bulan	11,000,000	
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				13 stel	11,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kabupaten Karo	13 stel	11,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi				2 orang kali	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kabupaten Karo	2 orang kali	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah	bulan		bulan	12 bulan	100,022,039						12 bulan	140,197,039	
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				60 jenis	15,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	60 jenis	15,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60 Jenis	35,022,039	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	60 Jenis	37,197,039	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				16 jenis	2,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	16 jenis	2,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				5 Jenis	3,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	5 Jenis	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang undangan				5 buah	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	5 buah	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				23 OK	45,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	23 OK	80,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Unit		Unit	2 Unit	10,000,000						2 Unit	535,000,000	
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas/Kendaraan Dinas Jabatan				2 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	2 Unit	500,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	mebeler				2 unit	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	2 unit	35,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan mesin				0 Buah	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	0 Buah	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	1 Unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	meningkatnya penunjang urusan pemerintah daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan Bulan		bulan Bulan	12 bulan 12 Bulan	7,157,020,000						12 bulan 12 Bulan	7,157,020,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	telepon,internet,air dan listrik				12 Bulan	16,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	12 Bulan	16,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				18 Unit	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	18 Unit	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				335 orang bulan	7,131,020,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kab. Karo	335 orang bulan	7,131,020,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Unit		Unit	79 Unit	531,000,000						79 Unit	531,000,000	
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan,dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapanganraan,Pajak,dan Dinas Operasional atau Lapangan				67 unit	528,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kabupaten Karo	67 unit	528,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya				12 Unit	3,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Satpol-PP Kabupaten Karo	12 Unit	3,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan PERDA	%		%	73,17 %	255,700,000						73,17 %	264,325,000	
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	bulan		bulan	12 bulan	143,700,000						12 bulan	154,325,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
1	05	02	2.01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	kerjasama pengendalian kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan instansi terkait operasi kasing sayang Penertiban Pedagang Kaki Lima Pengamanan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah dan Tamu Pemerintah Pengendalian Keamanan Lingkungan peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskam swakarsa di daerah peningkatan kerja sama dengan aparat dalam tehnik pencegahan kejahatan				10 Kali 2 Kali 5 Kali 12 Bulan 10 kali 11760 orang hari 2 Kegiatan	104,450,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	masyarakat kabupaten karo	10 Kali 2 Kali 5 Kali 12 Bulan 10 kali 11760 orang hari 2 Kegiatan	115,075,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Diklat Kopetensi Polisi Pamong Praja Diklat PPNS Hut Satpol PP Latihan Bela Diri Penyegaran Satpol PP Study Banding Keluar Daerah				1 Orang 2 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kali	28,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	masyarakat kabupaten karo	1 Orang 2 Orang 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kali	28,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Kerja sama pengembangan kemampuan, aparatur satpol-pp,TNI/Polri dan Kejaksaan Mou Antara Satpol-pp dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Polri Penertipan Tempat Hiburan Malam				30 kali 1 buah 5 kali	11,250,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	masyarakat kabupaten karo	30 kali 1 buah 5 kali	11,250,000	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.01	08	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentrman dan Ketertiban Umum	Peralatan dan Perlengkapan Operasional Lapangan				2 unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	masyarakat kabupaten karo	2 unit	0	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	meningkatnya ketentrman dan ketertipan umum	bulan		bulan	12 bulan	112,000,000						12 bulan	110,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif				
														Nasional					Daerah		
1		05	02	2.02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Organisasi Kemasyarakatan (orkemas) Penyuluhan Kepada Masyarakat Penyusunan Bahan Kebijakan Prudak Hukum Satpol PP Sosislisai Peraturan Daerah				30 Kali 20 Kali 1 Perda 1 Kegiatan	100,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	masyarakat kabupaten karo	30 Kali 20 Kali 1 Perda 1 Kegiatan	100,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1		05	02	2.02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Penertipan Bangunan dan Kegiatan yang menyalahi Peraturan Daerah Pengawasan Asset Daerah				10 Kali 5 Kali 5 Kali	12,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	masyarakat kabupaten karo	10 Kali 5 Kali 5 Kali	10,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1		05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%		%	0,212 %	3,000,000						0,212 %	14,000,000		
1		05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota	%		%	0 %	3,000,000						0 %	14,000,000		
1		05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelatihan Anggota Barisan Pencegah Pemadam Kebakaran (BP2K) Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Kepada Masyarakat				0 Orang Hari 3 Kali	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Karo	0 Orang Hari 3 Kali	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1		05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Kebutuhan Sarana dan Prasaran Non Kebakaran Sarana Prasarana serta Pakaian Khusus Pemadam Kebakaran				5 unit 2 unit	3,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Karo	5 unit 2 unit	14,000,000	Satuan Polisi Pamong Praja	
1		05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Aplikasi Integrasi Pelaporan Kebakaran Secara online serta sosialisasi penggunaan Aplikasi kepada Masyarakat				1 unit/kali	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Karo	1 unit/kali	0	Satuan Polisi Pamong Praja	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						5,356,910,000								5,311,910,000		
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	4,756,910,000						83 Indeks	4,706,910,000			
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,116,780,004						12 Bulan	3,116,780,004			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan				12 Bulan	3,000,116,004	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS dan PHL	12 Bulan	3,000,116,004	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan				168 Orang Bulan	116,664,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS dan PHL	168 Orang Bulan	116,664,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	45,024,000						12 Bulan	45,024,000			
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut				67 Stel	45,024,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS dan PHL	67 Stel	45,024,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	540,856,000						12 Bulan	540,856,000			
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4 Jenis	4,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS, dan PHL serta Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	4 Jenis	4,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43 Jenis	48,850,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS, dan PHL serta Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	43 Jenis	48,850,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				15 Jenis	7,606,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS, dan PHL serta Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	15 Jenis	7,606,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				6 Jenis	45,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS, dan PHL serta Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	6 Jenis	45,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				720 Buah	5,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS, dan PHL serta Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	720 Buah	5,400,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan minum				2000 Orang Kali	96,640,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS, dan PHL serta Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	2000 Orang Kali	96,640,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				207 Orang Kali	333,360,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	PNS, CPNS, dan PHL serta Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	207 Orang Kali	333,360,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	9 Unit	122,169,996						9 Unit	72,169,996	
1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				9 Buah	122,169,996	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Pegawai BPBD Kab. Karo	9 Buah	72,169,996	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	586,780,000						12 Bulan	586,780,000	
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet, air dan listrik				12 Bulan	28,960,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	12 Bulan	28,960,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				480 Orang Bulan	557,820,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Gedung Kantor BPBD Kab. Karo	480 Orang Bulan	557,820,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	34 Unit	345,300,000						34 Unit	345,300,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				13 Unit	231,920,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Barang Milik Daerah pada BPBD Kab. Karo	13 Unit	231,920,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				20 Unit	13,380,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Barang Milik Daerah pada BPBD Kab. Karo	20 Unit	13,380,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 Unit	100,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Barang Milik Daerah pada BPBD Kab. Karo	1 Unit	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Menurunnya Indeks Risiko Bencana Kab. Karo	Indeks		Indeks	110 Indeks	600,000,000						110 Indeks	605,000,000	
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	100,000,000						12 Bulan	110,000,000	
1	05	03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Warga Negara di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				500 Orang	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Warga Negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	500 Orang	110,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Bulan		Bulan	12 Bulan	450,000,000						12 Bulan	495,000,000	
1	05	03	2.02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang ikut pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana				100 Orang	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	100 Orang	200,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Layanan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan				1 Jenis	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	1 Jenis	50,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penanganan pasca bencana				2 Jenis	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	2 Jenis	100,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan Bencana				400 Orang	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur dan warga negara yang tinggal di daerah rawan bencana Kab. Karo	400 Orang	145,000,000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Bulan		Bulan	12 Bulan	50,000,000						12 Bulan	0		
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Aktivasi Anggota Tim Komando penanganan bencana				144 Orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Aparatur dan warga negara korban bencana di Kab. Karo yang dicari, diselamatkan dan dievakuasi	144 Orang	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						3,997,757,700							4,117,146,600		
1	06	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	3,301,032,000						83 Indeks	3,297,276,000		
1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Honorarium Pegawai	%		%	100 %	2,726,578,625						100 %	2,726,578,596		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bln	2,588,928,625	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Sosial Kab.Karo	12 bln	2,588,928,596	Dinas Sosial	
1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				132 Orang Bulan	137,650,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Sosial Kab.Karo	132 Orang Bulan	137,650,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						23,520,000							23,520,000		
1	06	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				35 stel	23,520,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi		35 stel	23,520,000	Dinas Sosial	
1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	216,297,935						100 %	222,541,964		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15 jenis	4,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	15 jenis	4,500,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				46 jenis	25,508,235	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	46 jenis	25,508,264	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				23 Jenis	5,191,800	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	23 Jenis	8,191,800	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				4 jenis	18,397,900	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	4 jenis	21,641,900	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				450 buah	2,700,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	450 buah	2,700,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				250 Orang Kali	16,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	250 Orang Kali	16,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				115 Orang Kali	144,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	115 Orang Kali	144,000,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						10,000,000							0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				1 buah	10,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi		1 buah	0	Dinas Sosial
1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	216,510,000						100 %	216,510,000	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bln	26,760,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	12 bln	26,760,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor				16 unit	8,190,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	16 unit	8,190,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				144 Orang Bulan	181,560,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	144 Orang Bulan	181,560,000	Dinas Sosial
1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya pemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%		%	100 %	108,125,440						100 %	108,125,440	
1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				4 unit	91,125,440	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	4 unit	91,125,440	Dinas Sosial
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	17,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Sosial Kab.Karo	1 unit	17,000,000	Dinas Sosial
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		%	50 %	100,000,000						50 %	80,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	%		%	100 %	100,000,000					100 %	80,000,000		
1	06	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)				5 Kelompok	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Karo	5 Kelompok	80,000,000	Dinas Sosial
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		%	50 %	21,044,400					50 %	10,044,000		
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan masyarakat yang terlantar di Kab.Karo	%		%	100 %	21,044,400					100 %	10,044,000		
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan As				30 Orang Kali	21,044,400	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat terlantar di Kabupaten Karo	30 Orang Kali	10,044,000	Dinas Sosial
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%		%	50 %	218,759,100					50 %	372,904,400		
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Pelayanan Dasar terhadap penyandang Disabilitas terlantar,Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan dan pengemis diluar panti	%		%	100 %	140,979,400					100 %	122,904,400		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas				85 unit	118,075,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Insentif Daerah	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Penyandang Disabilitas terlantar,Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan dan pengemis diluar panti.	85 unit	100,000,000	Dinas Sosial
1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Tersedianya Layanan Rujukan bagi Penyandang Penyakit Sosial				60 Orang Kali	22,904,400	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Penyandang Disabilitas terlantar,Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, Gelandangan dan pengemis diluar panti.	60 Orang Kali	22,904,400	Dinas Sosial
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS di Luar Panti Sosial	%		%	100 %	77,779,700						100 %	250,000,000	
1	06	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terdatanya Masyarakat PMKS melalui SLRT				12 bln	77,779,700	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Karo	12 bln	250,000,000	Dinas Sosial
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keakuratan data program perlindungan kesejahteraan sosial (Per Desa/Kelurahan)	%		%	39,06 %	150,000,000						39,06 %	150,000,000	
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	150,000,000						100 %	150,000,000	
1	06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				2 dokumen	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kabupaten Karo	2 dokumen	150,000,000	Dinas Sosial
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%		%	100 %	81,996,800						100 %	81,996,800	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan Bahan Makanan dan Sandang Bagi Korban Bencana Alam dan Sosial	%		%	100 %	81,996,800						100 %	81,996,800	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Bahan Makanan				45 paket	19,112,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Karo	45 paket	19,112,000	Dinas Sosial
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Sandang				45 paket	62,884,800	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Korban Bencana Alam dan Sosial di Kabupaten Karo	45 paket	62,884,800	Dinas Sosial
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	124,925,400						83 Indeks	124,925,400	
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan	%		%	100 %	124,925,400						100 %	124,925,400	
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional,Monumen dan Tugu Juang				12 bln	124,925,400	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Taman Makam Pahlawan, Monumen Nasional dan Tugu Juang di Kabupaten Karo	12 bln	124,925,400	Dinas Sosial
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						3,582,536,074							3,892,722,343	
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	3,362,536,074						83 Indeks	3,650,722,343	
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,638,447,766						12 Bulan	2,902,292,343	
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				14 Bulan	2,480,832,766	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaa n dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	14 Bulan	2,728,916,043	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				156 Orang Bulan	157,615,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaa n dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	156 Orang Bulan	173,376,300	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	23,520,000						12 Bulan	23,520,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				35 Stel	23,520,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	35 Stel	23,520,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	333,000,000						1 Tahun	358,950,000	
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				40 Jenis	3,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	40 Jenis	5,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Jenis	30,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	3 Jenis	21,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				24 Jenis	5,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	24 Jenis	9,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Bahan Logistik Kantor				45 Jenis	35,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	45 Jenis	38,500,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				7 Jenis	9,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	7 Jenis	10,450,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				150 Orang Kali	250,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	150 Orang Kali	275,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pelayanan Administrasi Umum	Tahun		Tahun	1 Tahun	204,960,000						1 Tahun	200,960,000	
2	07	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Listrik dan Telepon				12 Bulan	23,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	12 Bulan	19,400,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				144 Orang Bulan	181,560,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	144 Orang Bulan	181,560,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tahun		Tahun	1 Tahun	162,608,308						1 Tahun	165,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	07	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	25,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	1 Unit	35,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				5 Unit	70,608,308	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	5 Unit	55,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya				10 Unit	17,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	10 Unit	25,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemelihara Gedung Kantor				1 Unit	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi, Usaha Kecil Menengah	1 Unit	50,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang dilatih	%		%	15 %	120,000,000						15 %	132,000,000	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja yang dilatih Bersertifikat Kompetensi	%		%	100 %	120,000,000						100 %	132,000,000	
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Dilatih Berdasarkan Klaster Kompetensi				48 Orang	120,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Pencari Kerja dan Angkatan Kerja	48 Orang	132,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%		%	45 %	100,000,000						45 %	110,000,000	
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perusahaan yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%		%	0.19 %	30,000,000						0.19 %	33,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Perusahaan yang Mengesahkan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama				4 Perusahaan	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan	4 Perusahaan	33,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pembinaan Hubungan Industrial	Perusahaan		Perusahaan	35 Perusahaan	70,000,000							35 Perusahaan	77,000,000	
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penentuan UMK Kabupaten Karo				1 Dokumen	70,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Perusahaan	1 Dokumen	77,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						2,274,531,342		3,025,484,476							
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase usaha koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang legal	%		%	20 %	60,000,000							20 %	30,000,000	
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam KSP/USP	Koperasi		Koperasi	10 Koperasi	60,000,000							10 Koperasi	30,000,000	
2	17	02	2.02	01	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	1). Jumlah Rekomendasi penerbitan izin Usaha Simpan pinjam KSP/USP, 2). Jumlah Rekomendasi penerbitan izin Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi				12 Rekomendasi	60,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam	12 Rekomendasi	30,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi patuh	koperasi		koperasi	10 koperasi	100,000,000							10 koperasi	120,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi	Koperasi		Koperasi	10 Koperasi	100,000,000						10 Koperasi	120,000,000	
2	17	03	2.01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	1). Jumlah koperasi yang diperiksa tingkat kepatuhannya, 2). Jumlah KSP/USP yang dinilai tingkat kesehatannya				60 Koperasi	100,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Lau Gumba	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Ekonomi Masyarakat Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Koperasi	60 Koperasi	120,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	persentase koperasi aktif	%		%	63 %	140,000,000						63 %	130,000,000	
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	%		%	20 %	140,000,000						20 %	130,000,000	
2	17	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang Dilatih				60 Orang	140,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Koperasi	60 Orang	130,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat pendapatannya	%		%	20 %	100,000,000						20 %	110,000,000	
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Pendapatannya	Koperasi		Koperasi	25 Koperasi	100,000,000						25 Koperasi	110,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	17	06	2.01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang diberdayakan				25 Koperasi	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Koperasi	25 Koperasi	110,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang bermitra	%		%	0,29 %	1,300,000,000						0,29 %	2,075,000,000		
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah UMKM yang Bermitra	Usaha Mikro		Usaha Mikro	50 Usaha Mikro	1,300,000,000						50 Usaha Mikro	2,075,000,000		
2	17	07	2.01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemberdayaan melalui Kemitraan				20 Usaha Mikro	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Usaha Mikro	20 Usaha Mikro	75,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terlaksananya pembangunan plut				1 Plut	1,200,000,000	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Usaha Mikro	1 Plut	2,000,000,000	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	persentase umkm naik kelas	%		%	0,39 %	574,531,342						0,39 %	560,484,476		
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	UMKM Yang Naik Kelas	Usaha Mikro		Usaha Mikro	40 Usaha Mikro	574,531,342						40 Usaha Mikro	560,484,476		
2	17	08	2.01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Produk Usaha Mikro yang Difasilitasi				60 Produk	574,531,342	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Usaha Mikro	60 Produk	560,484,476	Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						9,910,184,190							10,012,046,089		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	8,593,059,190						83 indeks	9,411,707,689	
2	08	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	%		%	20 %	6,692,137,989						20 %	7,586,492,239	
2	08	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	6,344,344,889	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN DPPPA	12 bulan	7,126,767,239	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan				12 bulan	347,793,100	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN DPPPA	12 bulan	459,725,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian	bkn		bkn	12 bkn	22,750,000						12 bkn	44,254,000	
2	08	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				32 stell	22,750,000	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	32 stell	44,254,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan administrasi Umum Perangkat daerah	%		%	20 %	375,234,305						20 %	478,419,030	
2	08	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				41 jenis	2,175,770	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai DPPA,Pegawai Non PNS dan sarana kantor DPPA	41 jenis	2,225,770	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan danperlengkapan kantor				30 jenis	71,535,035	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai DPPA,Pegawai Non PNS dan sarana kantor DPPA	30 jenis	73,535,035	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetak dan penggandaan				5 jenis	16,879,500	Kab. Karo, Berastagi, R a y a				Pegawai DPPA,Pegawai Non PNS dan sarana kantor DPPA	5 jenis	117,018,225	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				1 buah	2,520,000	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai DPPA,Pegawai Non PNS dan sarana kantor DPPA	1 buah	12,640,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				86 org/kali	282,124,000	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai DPPA,Pegawai Non PNS dan sarana kantor DPPA	86 org/kali	273,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	2 unit	950,000,000						2 unit	850,000,000	
2	08	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						750,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0		825,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor atau bangunan lainnya				1 unit	200,000,000	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 unit	25,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	%		%	20 %	281,671,656						20 %	176,950,656	
2	08	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon,Internet,air dan Listrik				12 bulan	24,420,000	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jasa Listrik,WFI ,Jasa kebersihan Kantor,supir dan operator	12 bulan	25,512,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				192 orang/bulan	257,251,656	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Jasa Listrik,WFI ,Jasa kebersihan Kantor,supir dan operator	192 orang/bulan	151,438,656	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah Terlaksananya Pengadaan barang milik daerah Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit % %		unit % %	4 unit 20 % 20 %	271,265,240						4 unit 20 % 20 %	275,591,764	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	08	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan			3 unit	271,265,240	Kab. Karo, Berastagi, R a y a	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	3 unit	275,591,764	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAA N GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender	%		%	96,35 %	150,000,000					96,35 %	70,000,000		
2	08	02	2.01		Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelebagaan Pengarusutamaan gender	%		%	20 %	150,000,000					20 %	70,000,000		
2	08	02	2.01	04	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah sosialisasi PERDA PUG			7 Kecamatan	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	7 Kecamatan	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%		%	100 %	552,125,000					100 %	115,000,000		
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah Kabupaten Kota	%		%	20 %	43,920,000					20 %	20,000,000		
2	08	03	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi pencegahan kekerasan terhadaap perempuan dan anak termasuk TPPOp perempuan d			76 org/kali	43,920,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	masyarakat,per empuan dan anak	76 org/kali	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memelukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	20 %	408,205,000					20 %	95,000,000		
2	08	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya layananpengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan perlindungan perempuan			12 bln	175,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Perempuan dan anak korban kekerasan,masy arakat	12 bln	75,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	08	03	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya koordinasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan				12 bulan	233,205,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perempuan dan anak korban kekerasan,masy arakat	12 bulan	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	03		2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100,000,000					100 %	0		
2	08	03		2.03	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan SDM Pengelola Pelayanan			120 org/kali	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	120 org/kali	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Rasio KDRT	%		%	0.01 %	150,000,000					0.01 %	130,000,000		
2	08	04		2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	TerlaksananyaPeningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	20 %	75,000,000					20 %	90,000,000		
2	08	04		2.01	03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan industri rumah tangga (IRT) bagi perempuan			80 org/kali	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	80 org/kali	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	04		2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengebangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak	%		%	20 %	75,000,000					20 %	40,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	08	04	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan SDM Organisasi Perempuan				80 org/kali	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat dan stekholder	80 org/kali	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Ketersediaan data Gender dan Anak	dokumen		dokumen	1 dokumen	80,000,000						1 dokumen	40,000,000	
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengumpulan ,pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data	%		%	20 %	80,000,000						20 %	40,000,000	
2	08	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil Gender dan Anak				1 dokumen	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Masyarakat,stekholder	1 dokumen	40,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%		%	50 %	175,000,000						50 %	132,500,000	
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	%		%	20 %	100,000,000						20 %	50,000,000	
2	08	06	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	JumlahPerda Penyelenggaraan Perlindungan Anak				1 dokumen	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat,anak,stekholder	1 dokumen	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	20 %	75,000,000						20 %	82,500,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	08	06	2.02	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peringatan hari anak dan Jambore Anak				150 org/kali	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			anak Kabupaten Karo	150 org/kali	82,500,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%		%	50 %	210,000,000					50 %	112,838,400			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah Kabupaten/ Kota	%		%	20 %	200,000,000					20 %	85,000,000			
2	08	07	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pertemuan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan anak				70 org	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	70 org	65,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	07	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pencegahan Kekerasan terhadap anak kewenangan Kabupaten				3 jenis	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	3 jenis	20,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memelukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	%		%	100 %	10,000,000					100 %	27,838,400			
2	08	07	2.02	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota						10,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0		27,838,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						9,284,416,696							10,306,284,885		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	0Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	%		%	50 %	1,204,688,500					50 %	1,325,157,350		
2	14	02		2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemeritah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kualitas Penduduk	%		%	100 %	514,903,280					100 %	566,393,608		
2	14	02		2.01	05	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Jumlah Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			60 orang	14,903,280		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	60 orang	16,393,608	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	02		2.01	07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai isu Lokal Kabupaten/Kota			100 dokumen	9,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	100 dokumen	9,900,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	02		2.01	09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah peserta Sosialisasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal			100 orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	100 orang	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	02		2.01	10	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	Jumlah peserta Sosialisasi Inflementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Non Formal			60 orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	60 orang	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	02		2.01	11	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah peserta Sosialisasi Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan jalur informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat			100 orang	28,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		0	100 orang	30,800,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	02	2.01	14	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah peserta Pendataan Keluarga				125 orang	23,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	125 orang	25,300,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah peserta Pengendalian Penduduk				43 orang	360,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK			0	43 orang	396,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	%		%	50 %	689,785,220						50 %	758,763,742	
2	14	02	2.02	02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Data Kependudukan				126000 kk	230,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	126000 kk	253,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil Kependudukan				1 dokumen	33,993,960		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	1 dokumen	37,393,356	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah terbentuknya Erumah Data di Kampung KB				29 Desa	200,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	29 Desa	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Peserta Sosialisasi Siga				340 orang	100,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	340 orang	110,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen Laporan				804 dokumen	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	804 dokumen	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah peserta Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				150 orang	25,791,260		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	150 orang	28,370,386	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	02	2.02	14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah peserta Pembinaan terhadap petugas pencatatan klinik KB pemerintah dan Swasta				60 orang	50,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	60 orang	55,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Rasio Akseptor KB Baru	%		%	40 %	6,131,531,696						40 %	6,744,684,865		
2		14	03	2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	%		%	100 %	2,124,544,000						100 %	2,336,998,400		
2		14	03	2.01	05	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Penggunaan Media Cetak dan Elektronik			3 jenis	102,544,000			DBH CHT			Masyarakat	3 jenis	112,798,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		14	03	2.01	07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Operasional Balai Penyuluhan			13 balai	2,022,000,000			DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			Masyarakat	13 balai	2,224,200,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	%	%	15 %	2,254,500,000							15 %	2,479,950,000	
2		14	03	2.02	02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Sarana Operasional			3 jenis	963,300,000			DBH CHT			Petugas Lapangan KB	3 jenis	1,059,630,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		14	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Penyuluhan oleh IMP			766 orang	1,291,200,000			DBH CHT			Petugas Lapangan KB	766 orang	1,420,320,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2		14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Alat dan Obat Kontrasepsi di Faskes	%	%	40 %	879,503,696							40 %	967,454,065	
2		14	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarangnya	Jumlah faskes yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB			49 Faskes	46,950,000			DBH CHT			Faskes	49 Faskes	51,645,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.03	02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Pertemuan peningkatan kompetensi pengelola dan petugas logistik alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang pelayanan KB				36 orang	6,660,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Faskes	36 orang	7,326,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase pengguna MKJP dari seluruh akseptor KB				600 orang	139,200,000		DBH CHT			Faskes	600 orang	153,120,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	04	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah dukungan ayoman komplikasi berat dan kegagalan penggunaan MKJP				6 orang	30,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Faskes	6 orang	33,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB				16 orang	8,160,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Faskes	16 orang	8,976,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah IUD Kit dan Implan Kit yang tersedia				20 Unit	200,000,000		DBH CHT			Faskes	20 Unit	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	07	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah akseptor KB yang mendapatkan pembinaan pasca pelayanan				49 Faskes	104,006,586		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Faskes	49 Faskes	114,407,244	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah pembinaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya				17 Kecamatan	61,149,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Faskes	17 Kecamatan	67,263,900	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Pelatihan peningkatan kompetensi tenaga pelayanan KB dan kesehatan reproduksi				17 Kecamatan	200,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			Faskes	17 Kecamatan	220,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Peningkatan persentase akseptor KB				17 Kecamatan	11,978,110		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Faskes	17 Kecamatan	13,175,921	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	2.03	12	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	Jumlah PUS pasca persalinan dan pasca keguguran yang mendapatkan promosi dan konseling KB				17 Kecamatan	71,400,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Faskes	17 Kecamatan	78,540,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
														Nasional	Daerah				
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Ikut sertanya Oraganisasi Kemasyaratan dalam pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	%		%	15 %	872,984,000					15 %	960,282,400		
2	14	03	2.04	04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah desa Pembinaan Kampung KB				29 Desa	872,984,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB		Masyarakat	29 Desa	960,282,400	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	0Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%		%	015,49 %	1,948,196,500					015,49 %	2,236,442,670		
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	%		%	60 %	554,496,500					60 %	703,372,670		
2	14	04	2.01	01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Rapat Pembentukan Kelompok BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKS				250 orang	53,359,800		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	0		250 orang	152,122,300	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
2	14	04	2.01	02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaan Sarana Kelompok BKB, BKL dan PIK R				60 Unit	250,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB	0		60 Unit	275,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	04	2.01	03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rapat Orientasi dan pelatihan teknis pengelola BKB, BKR, BKL , PIK-R dan UPPKS				75 orang	36,282,600		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	75 orang	39,910,860	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Rapat Orientasi dan pelatihan Pelaksana/Kader kelompok BKB, BKR, BKL , PIK-R dan UPPKS				210 orang	79,795,500		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			0	210 orang	87,775,050	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.01	08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Rapat Promosi dan Sosialisasi PIK-R (Generasi Berenana)				150 orang	135,058,600		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			0	150 orang	148,564,460	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah	%		%	40 %	1,393,700,000						40 %	1,533,070,000	
2	14	04	2.02	01	Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Pengadaaan Sarana BKB KIT Emas dan Kit Siap Nikah di Desa Stunting				20 Unit	780,000,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			Kelompok Masyarakat	20 Unit	858,000,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	14	04	2.02	04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Rapat Promosi dan Sosialisasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				10 kali	613,700,000		DAK Non Fisik - BOKKB - BOKB			Kelompok Masyarakat	10 kali	675,070,000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						7,531,559,177							7,335,405,865	
2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	6,844,197,529						83 Indeks	6,877,905,865	
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	5,885,050,143						12 Bulan	6,058,408,686	
2	09	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	5,708,052,004	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 Bulan	5,841,843,140	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				12 Bulan	176,998,139	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 Bulan	216,565,546	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Barang Milik Daerah	unit		unit	2 unit	35,000,000						2 unit	0	
2	09	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Barang Milik Daerah				2 Unit	35,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Barang Milik Daerah	2 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	71,670,000						12 Bulan	78,670,000	
2	09	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				51 Stel	38,250,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	51 Stel	45,250,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi				5 Orang	33,420,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	5 Orang	33,420,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	453,337,386						12 Bulan	404,487,179	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 Jenis	2,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	3 Jenis	2,200,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45 Jenis	181,080,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	45 Jenis	88,662,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				14 Jenis	33,854,342	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	14 Jenis	36,354,342	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				6 jenis	14,791,396	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	6 jenis	15,491,396	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				12 Bulan	221,611,648	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	12 Bulan	261,779,441	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan Pelayanan Administrasi Umum Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan Bulan Bulan		Bulan Bulan Bulan	12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	279,140,000						12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan	246,340,000	
2	09	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	24,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	25,100,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor				7 Unit	58,560,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Dinas Ketahanan Pangan	7 Unit	25,060,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				12 Bulan	196,180,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	196,180,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit		unit	6 unit	120,000,000						6 unit	90,000,000	
2	09	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				6 Unit	120,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Barang Milik Daerah	6 Unit	90,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana untuk mendukung kemandirian pangan	Persen		Persen	20 Persen	75,000,000						20 Persen	82,500,000	
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana infrastruktur kemandirian pangan	Unit		Unit	1 Unit	75,000,000						1 Unit	82,500,000	
2	09	02	2.01	01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Infrastruktur Lumbung Pangan				0 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	0 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	02	2.01	02	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah Infrastruktur Lantai Jemur				0 Unit	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	0 Unit	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	02	2.01	03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana Infrastruktur Kemandirian Lainnya				1 Unit	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	1 Unit	82,500,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan pangan	Persen		Persen	20 Persen	247,361,648						20 Persen	275,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah informasi harga pangan dan neraca bahan makanan Jumlah pangan berbasis sumber daya lokal PPH ketersediaan Energi dan Protein Perkapita per hari	Buku Jenis Kkal/Kap/Hari		Buku Jenis Kkal/Kap/Hari	2 Buku 1 Jenis 2400 Kkal/Kap/Hari	107,361,648						2 Buku 1 Jenis 2400 Kkal/Kap/Hari	135,000,000	
2	09	03	2.01	01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Buku	42,361,648	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	2 Buku	70,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.01	02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Jenis	65,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	1 Jenis	65,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah survey data Pameran B2SA kecamatan PPH ketersediaan Energi dan Protein Perkapita per hari Tersusnya penetapan target konsumsi pangan	Dokumen Kecamatan kkal/tahun/kap Kecamatan		Dokumen Kecamatan kkal/tahun/kap Kecamatan	1 Dokumen 17 Kecamatan 2400 kkal/tahun/kap 17 Kecamatan	140,000,000						1 Dokumen 17 Kecamatan 2400 kkal/tahun/kap 17 Kecamatan	140,000,000	
2	09	03	2.04	01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Survey Data				1 Dokumen	70,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	80,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pameran B2SA Kecamatan				17 Kecamatan	70,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	17 Kecamatan	60,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Penanganan daerah rentan Pangan	Persen		Persen	1 Persen	300,000,000						1 Persen	0	
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Grand Desain Ketahanan Pangan Kabupaten Karo	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	300,000,000						1 Dokumen	0	
2	09	04	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Grand design Ketahanan Pangan Kabupaten Karo				1 Dokumen	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	1 Dokumen	0	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Persen		Persen	20 Persen	65,000,000					20 Persen	100,000,000		
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Serifikasi Pangan Segar Asal Tmbuhan	sampel		sampel	5 sampel	65,000,000					5 sampel	100,000,000		
2	09	05	2.01	02	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Pangan Segar asal Tumbuhan				20 Sampel	65,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat	20 Sampel	100,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN														
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						300,000,000							600,000,000	
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Perikanan Budidaya	%		%	90 %	300,000,000					90 %	600,000,000		
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Perikanan Budidaya	Unit		Unit	5 Unit	150,000,000					5 Unit	300,000,000		
3	25	04	2.02	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya				5 Unit	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Pembudidaya Ikan	5 Unit	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Produksi Bibit Ikan	Ekor		Ekor	814.9 Ekor	150,000,000					814.9 Ekor	300,000,000		
3	25	04	2.04	03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sarana pembudidayaan Ikan				814900 Ekor	150,000,000	Kab. Karo, Munte, Singgamanik	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BBI Lokal Singgamanik	814900 Ekor	300,000,000	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						28,760,841,458							26,126,273,528	
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	11,660,536,128					83 indeks	12,350,937,665		
2	11	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keuangan	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	4,196,414,678					12 bulan 12 bulan	4,496,626,724		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	3,940,430,628	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Pegawai ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	12 bulan	4,263,441,749	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				12 bulan	255,984,050	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai ASN Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	12 bulan	233,184,975	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	bulan		bulan	12 bulan	314,978,769						12 bulan	268,217,822	
2	11	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				45 jenis	40,474,354	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	45 jenis	35,393,685	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga				20 jenis	4,394,515	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	20 jenis	3,842,042	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	barang cetakan dan penggandaan				9 jenis	86,334,900	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	9 jenis	107,590,295	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				272 orang hari kali	183,775,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	272 orang hari kali	121,391,800	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	415,061,867						83 indeks	451,552,264	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet , air dan listrik				12 bulan	50,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	12 bulan	56,025,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				21 unit	16,713,867	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	21 unit	12,000,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				300 orang bulan	347,948,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kab.Karo	300 orang bulan	383,527,264	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan masyarakat Jumlah Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	indeks unit		indeks unit	83 indeks 161 unit	6,734,080,814						83 indeks 161 unit	7,134,540,855	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				171 unit	6,734,080,814	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171 unit	7,134,540,855	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Predikat		Predikat	Baik Predikat	82,850,000						Baik Predikat	91,135,000	
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Informasi tentang kualitas lingkungan Pemantauan kualitas lingkungan	kali kali		kali kali	2 kali 2 kali	82,850,000						2 kali 2 kali	91,135,000	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Informasi tentang kualitas lingkungan				2 kali	82,850,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Kabupaten Karo	2 kali	91,135,000	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Pemeliharaan RTH RTH	RTH Lokasi		RTH Lokasi	1 RTH 1 Lokasi	20,253,570						1 RTH 1 Lokasi	22,278,927	
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengkayaan Keanekaragaman Tanaman	lokasi		lokasi	1 lokasi	20,253,570						1 lokasi	22,278,927	
2	11	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Pengkayaan keanekaragaman tanaman				1 RTH	20,253,570	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Ruang Terbuka Hijau	1 RTH	22,278,927	Dinas Lingkungan Hidup
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Pemberian Penghargaan Tentang Lingkungan Hidup	Ada		Ada	Ada Ada	144,211,000						Ada Ada	158,632,100	
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sekolah yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan jumlah sekolah di kab.karo	%		%	30 %	144,211,000						30 %	158,632,100	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase jumlah sekolah yang mendapat penghargaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan jumlah sekolah di kab.karo				30 persen	144,211,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Sekolah	30 persen	158,632,100	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah	Persen		Persen	80 Persen	16,852,990,760						80 Persen	13,503,289,836		
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Honorarium tukang sapu, supir, supir viar, mandor, pencatat TPA Persentase Penanganan Sampah	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	16,852,990,760						12 bulan 12 bulan	13,503,289,836		
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Sampah (wilayah Pelayanan)				80 %	11,862,993,607	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Kabupaten Karo	80 %	13,049,292,968	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.01	04	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Pembinaan dan pembentukan bank sampah, rumah kompos, dan pusat daur ulang				3 lokasi	39,997,153	Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Kabupaten Karo	3 lokasi	43,996,868	Dinas Lingkungan Hidup	
2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah Pembangunan dan pembelian sarana dan prasarana				3 unit	4,950,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Ketaren	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Penugasan - Lingkungan Hidup		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Kabupaten Karo	3 unit	410,000,000	Dinas Lingkungan Hidup	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						0								0	
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Jumlah Pengusaha yang Memiliki Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	Pengusaha		Pengusaha	17 Pengusaha	0						17 Pengusaha	0		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kajian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan izin pemanfaatan panas bumi	dokumen		dokumen	1 dokumen	0						1 dokumen	0				
3		29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kajian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan izin pemanfaatan panas bumi "Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi"			1 dokumen 1 dokumen	0	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Pengusaha Pemanfaatan Langsung Panas Bumi	1 dokumen 1 dokumen	0	Dinas Lingkungan Hidup			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5,835,967,373									5,682,952,243		
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	5,815,967,373							83 Indeks	5,611,056,733			
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	17,032,092							12 Bulan	20,252,150			
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Dokumen	17,032,092		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	14 Dokumen	20,252,150		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,600,998,936							12 Bulan	3,536,655,017			
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	3,466,218,936		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai	12 Bulan	3,401,875,017		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				17 Orang Bulan	134,780,000		Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai	17 Orang Bulan	134,780,000		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	230,440,896							12 Bulan	234,992,300			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				43 Stel	32,250,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	43 Stel	32,250,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				4 Jenis	198,190,896	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	4 Jenis	202,742,300	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,249,423,193						12 Bulan	1,076,089,866	
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1 Jenis	2,944,800	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	1 Jenis	2,944,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penerbitan Dokumen Kependudukan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Kegiatan 31 Jenis	1,030,404,089	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	3 Kegiatan 31 Jenis	942,960,796	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				17 Jenis	6,509,335	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	17 Jenis	3,622,853	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				5 Jenis	24,238,500	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	5 Jenis	19,131,634	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1 Buah	2,160,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	1 Buah	2,160,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				45 Orang Kali	183,166,469	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai dan Masyarakat	45 Orang Kali	105,270,583	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	633,042,256						12 Bulan	658,037,400	
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai	12 Bulan	12,000,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 Unit	4,420,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai	8 Unit	400,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Pelayanan Administrasi Kependudukan				302 Orang Bulan 2 Kegiatan	616,622,256	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik - Dana Yanminduk		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai	302 Orang Bulan 2 Kegiatan	645,637,400	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Unit		Unit	5 Unit	85,030,000						5 Unit	85,030,000			
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5 Unit	85,030,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai	5 Unit	85,030,000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Ketersediaan Database Nasional Skala Provinsi	Ada		Ada	Ada Ada	20,000,000						Ada Ada	71,895,510			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Tersusunnya Profil Kependudukan	Bulan		Bulan	12 Bulan	20,000,000						12 Bulan	71,895,510			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Profil Perkembangan Kependudukan				1 Dokumen	20,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat	1 Dokumen	71,895,510	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						14,733,762,877								9,141,052,000		
2	13	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakt (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	4,348,012,803						83 Indeks	4,652,052,000			
2	13	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Gaji dan Tunjangan serta Honorarium Pengelola Keuangan	%		%	100 %	3,731,068,474						100 %	4,140,457,594			
2	13	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	3,468,918,474	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	12 Bulan	3,878,307,594	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
2	13	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				121 Orang/Bulan	262,150,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	121 Orang/Bulan	262,150,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%		%	100 %	53,520,000						100 %	53,520,000	
2	13	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				35 Stel	23,520,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai DPMD	35 Stel	23,520,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pegawai yang Mengikuti Diklat				6 Orang/Kali	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai DPMD	6 Orang/Kali	30,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	%		%	100 %	216,223,809						100 %	151,373,886	
2	13	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				15 Jenis	2,830,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	15 Jenis	1,980,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	ATK, Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50 Jenis	55,393,809	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	50 Jenis	33,393,886	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				30 Jenis	29,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	30 Jenis	9,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak Penggandaan				6 Jenis	9,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	6 Jenis	7,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan				24 Buah	12,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	24 Buah	10,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				256 Orang/Kali	108,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	DPMD	256 Orang/Kali	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%		%	100 %	217,200,520						100 %	220,200,520	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	19,380,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas PMD	12 Bulan	19,380,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25 Unit	9,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas PMD	25 Unit	12,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				144 Orang /Bulan	188,820,520	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas PMD	144 Orang /Bulan	188,820,520	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah	%		%	100 %	130,000,000						100 %	86,500,000	
2	13	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				4 Unit	130,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas PMD	4 Unit	86,500,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PERANGKAT DESA YANG DILATIH/DIBINA	%		%	20 %	9,735,750,074						20 %	4,119,000,000	
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	%		%	100 %	9,735,750,074						100 %	4,119,000,000	
2	13	04	2.01	01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Pesrta Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa				26376 Orang/Bulan	3,400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa, Masyarakat Desa, BPD	26376 Orang/Bulan	3,400,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa				259 Orang	155,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa, Masyarakat Desa, BPD	259 Orang	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	05	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Peserta Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa				11 Orang	15,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa, Masyarakat Desa, BPD	11 Orang	129,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	13	04	2.01	08	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang Terbentuk Jumlah Peserta Pelatihan BUMDesa				15 BUMDes 50 Orang	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa, Masyarakat Desa, BPD	15 BUMDes 50 Orang	250,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa Melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa antar Waktu				231 Desa	6,005,750,074	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa, Masyarakat Desa, BPD	231 Desa	0	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	04	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Peserta Pelatihan Anggota BPD				10 Orang	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa, Masyarakat Desa, BPD	10 Orang	90,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	JUMLAH MASYARAKAT DESA/KADER LEMBAGA DESA YANG DILATIH/DIBINA	orang		orang	1000 orang	650,000,000						1000 orang	370,000,000	
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	650,000,000						100 %	370,000,000	
2	13	05	2.01	03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)				2 %	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Desa / Kader Lembaga Desa	2 %	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	05	2.01	05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Pembinaan Kelompok UP2K & SPP Serta Pelatihan Kreativitas Masyarakat				7 Lembaga	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Desa / Kader Lembaga Desa	7 Lembaga	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	13	05	2.01	06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Terbentuknya Posyantek dan Keikutsertaan pada Jambore TTG Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional				17 Desa	60,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Desa / Kader Lembaga Desa	17 Desa	70,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	05	2.01	07	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat				17 Desa	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Desa / Kader Lembaga Desa	17 Desa	50,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2	13	05	2.01	09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK (aktif)				75 %	390,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Desa / Kader Lembaga Desa	75 %	150,000,000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						8,088,616,101								7,758,137,769	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	7,219,161,802						83 Indeks	7,488,909,000		
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dokumen		dokumen	6 dokumen	15,174,470						6 dokumen	14,000,000		
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah				2 dokumen	9,174,470	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat	2 dokumen	7,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	2,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	2 dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja Perangkat daerah				2 dokumen	4,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	2 dokumen	2,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	6,069,851,228						12 bulan	7,021,770,000		
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	5,914,997,578	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	12 bulan	6,360,580,834	Dinas Perhubungan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				192 OB	150,853,650	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	192 OB	659,689,166	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	1,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	1 dokumen	1,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Dokumen	3,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	6 Dokumen	500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	279,425,128						12 Bulan	253,196,000	
2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 jenis	3,546,350	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	5 jenis	2,500,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				45 jenis	29,947,248	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	45 jenis	32,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga				30 jenis	15,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	30 jenis	13,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				6 jenis	30,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	6 jenis	54,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				12 buah	3,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	12 buah	1,696,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				200 OK	197,431,530	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	200 OK	150,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah daerah	unit		unit	2 unit	30,000,000						2 unit	10,000,000	
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				2 buah	30,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	2 buah	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	754,710,976						12 Bulan	49,943,000	
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bulan	35,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	12 bulan	39,943,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				10 unit	20,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	10 unit	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				480 OB	699,710,976	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	480 OB	0	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	unit		unit	16 unit	70,000,000						16 unit	140,000,000	
2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				15 unit	60,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	15 unit	120,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilit asi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 unit	10,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	1 unit	20,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rasio Konektivitas dan Kinerja Lalu Lintas	Indeks Rasio dan indeksT		Indeks Rasio dan indeksT	83 Indeks 93.94 dan 0.35 Rasio dan indeksT	869,454,299						83 Indeks 93.94 dan 0.35 Rasio dan indeksT	269,228,769	
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	jenis		jenis	2 jenis	27,431,530						2 jenis	35,228,769	
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				2 jenis	27,431,530	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	2 jenis	35,228,769	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	dokumen		dokumen	1 dokumen	107,466,769						1 dokumen	10,000,000	
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan danPembangunan Fasilitas Parkir KewenanganKabupaten/Kota				3 kegiatan	107,466,769	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	3 kegiatan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%		%	0 %	123,162,000						0 %	40,000,000	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermoto				13 orang	92,308,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	13 orang	30,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.05	08	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				2 kegiatan	30,854,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	2 kegiatan	10,000,000	Dinas Perhubungan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Pemasangan rambu- rambu	%		%	65 %	443,394,000						65 %	172,000,000	
2	15	02	2.06	01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota				1 dokumen	40,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	1 dokumen	5,000,000	Dinas Perhubungan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam RangkaManajemen dan Rekayasa Lalu Lintas				3 jenis	300,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	3 jenis	100,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pengawasan dan Pengendalian EfektivitasPelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Provinsi/Kabupaten				6 kegiatan	80,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	6 kegiatan	57,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Forum Lalu Linta dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota				4 kegiatan	23,394,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	4 kegiatan	10,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	kali		kali	10 kali	20,000,000							10 kali	12,000,000	
2	15	02	2.08	03	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal				3 kali	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	3 kali	12,000,000	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	kali		kali	1 kali	78,000,000							1 kali	0	
2	15	02	2.09	02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten				1 kali	78,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	1 kali	0	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	20,000,000							1 dokumen	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
2	15	02	2.11	01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) DaerahKabupaten/Kota				1 dokumen	20,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	dokumen		dokumen	1 dokumen	50,000,000						1 dokumen	0		
2	15	02	2.12	01	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota	Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan kabupaten/Kota				1 dokumen	50,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat	1 dokumen	0	Dinas Perhubungan	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							7,390,638,314							9,029,478,366	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN Pemerintahan DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	5,343,547,000						83 Indeks	7,155,981,766		
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan Bulan		bulan Bulan	12 bulan 12 Bulan	3,226,709,372						12 bulan 12 Bulan	3,948,135,605		
2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	3,109,105,591	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Kominfo	12 Bulan	3,830,531,824	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				140 Orang Bulan	117,603,781	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Kominfo	140 Orang Bulan	117,603,781	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan Bulan		bulan Bulan	12 bulan 12 Bulan	165,651,561						12 bulan 12 Bulan	255,435,161		
2	16	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				29 Jenis	20,685,561	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo	29 Jenis	20,685,561	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	41,730,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo	3 Jenis	41,730,000	Dinas Komunikasi dan Informatika	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan				1080 buah	5,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo	1080 buah	5,400,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum				300 Orang Kali	20,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo	300 Orang Kali	25,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				200 Orang Kali	77,836,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo	200 Orang Kali	162,619,600	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	1 Unit	40,000,000						1 Unit	0	
2	16	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	40,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Dinas Kominfo	1 unit	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,911,186,067						12 Bulan	2,952,411,000	
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet dan Listrik				12 bulan	1,592,406,067	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo	12 bulan	2,633,631,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				252 Orang Bulan	318,780,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo	252 Orang Bulan	318,780,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks SPBE	indeks		indeks	2,2 indeks	661,398,670						2,2 indeks	473,389,550	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Bulan		Bulan	12 Bulan	661,398,670						12 Bulan	473,389,550	
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	konten dan perencanaan media komunikasi publik				40 buah	419,228,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo dan Kabupaten Karo	40 buah	145,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Pelayanan informasi publik				193 kali	209,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo dan Kabupaten Karo	193 kali	212,960,000	Dinas Komunikasi dan Informatika

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	16	02	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Bimtek E-Jurnalis Media Kreatif dan editing video				1 kegiatan	15,429,550	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo dan Kabupaten Karo	1 kegiatan	15,429,550	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	02	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Tersedianya Bimtek PPID				1 kegiatan	17,341,120	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo dan Kabupaten Karo	1 kegiatan	100,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Indeks SPBE	indeks		indeks	2,2 indeks	1,385,692,644						2,2 indeks	1,400,107,050	
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/	bulan		bulan	12 bulan	476,038,500						12 bulan	523,642,350	
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah				8 Jenis	476,038,500	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo	8 Jenis	523,642,350	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02		Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	bulan		bulan	12 bulan	909,654,144						12 bulan	876,464,700	
2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik				1 Jenis	100,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo	1 Jenis	211,200,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas				2 Jenis	484,468,019	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Dinas Kominfo	2 Jenis	459,002,500	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Government Chief Information Officer (GCIO)				1 kegiatan	325,186,125	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kominfo	1 kegiatan	206,262,200	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						69,110,000							69,110,000	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks SPBE	indeks		indeks	2,2 indeks	69,110,000						2,2 indeks	69,110,000	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	bulan		bulan	12 bulan	69,110,000						12 bulan	69,110,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral				2 Jenis	69,110,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	2 Jenis	69,110,000	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						6,769,744,902								5,794,913,014		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat	87 Indeks Indeks		86.2 Indeks Indeks	86.2 Indeks 86.2 Indeks	5,170,122,902						86.2 Indeks 86.2 Indeks	5,117,913,014			
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	3,570,454,262						12 bulan 12 bulan	3,793,372,688			
2	18	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	3,469,814,262	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	12 bulan	3,682,672,688	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				144 ob	100,640,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN	144 ob	110,700,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	73,920,000						12 bulan 12 bulan	81,312,000			
2	18	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				110 stell	73,920,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN dan THL	110 stell	81,312,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 122 bulan	612,948,640						12 bulan 122 bulan	365,568,326			
2	18	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 jenis	2,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	3 jenis	2,750,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				50 jenis	133,520,076	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	50 jenis	63,696,906	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				23 jenis	20,843,334	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	23 jenis	17,427,667	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan				6 jenis	156,085,230	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	6 jenis	61,693,753	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				500 orang kali	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	500 orang kali	220,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jenis		jenis	2 jenis	250,000,000						2 jenis	150,000,000	
2	18	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				30 buah	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN dan THL	30 buah	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				2 buah	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN dan THL	2 buah	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan bulan bulan		bulan bulan bulan	12 bulan 12 bulan 12 bulan	624,380,000						12 bulan 12 bulan 12 bulan	685,398,000	
2	18	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet, air dan listrik				12 bulan	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	12 bulan	27,500,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				10 unit	14,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	10 unit	14,200,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				360 ob	585,180,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN dan THL	360 ob	643,698,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	unit unit		unit unit	1 unit 1 unit	38,420,000						1 unit 1 unit	42,262,000	
2	18	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	38,420,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN	1 unit	42,262,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA/PMDN	investor		investor	77 investor	400,000,000						77 investor	100,000,000	
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Pemberian Fasilitas/Insentif Di bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan	peraturan		peraturan	1 peraturan	200,000,000						1 peraturan	100,000,000	
2	18	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 peraturan	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat pelaku usaha	1 peraturan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota yang disusun	dokumen		dokumen	1 dokumen	200,000,000						1 dokumen	0	
2	18	02	2.02	02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota				1 dokumen	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat dan Stakeholder	1 dokumen	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA/PMDN	investor		investor	77 investor	300,000,000						77 investor	100,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang diselenggarakan	kali		kali	2 kali	300,000,000						2 kali	100,000,000	
2	18	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota				2 kali	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Stakeholder	2 kali	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal	izin		izin	1200 izin	200,000,000						1200 izin	100,000,000	
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Jumlah perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal	laporan izin		laporan izin	2 laporan 1200 izin	200,000,000						2 laporan 1200 izin	100,000,000	
2	18	04	2.01	02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal				1 laporan	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat pelaku usaha	1 laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	2.01	03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan				1 laporan	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat pelaku usaha	1 laporan	50,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Jumlah PMA/PMDN	investor		investor	77 investor	579,622,000						77 investor	277,000,000	
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	perusahaan		perusahaan	7 perusahaan	579,622,000						7 perusahaan	277,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
2	18	05	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 laporan	118,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	pelaku usaha	1 laporan	77,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2	18	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 Kali	264,722,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			pelaku usaha	1 Kali	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2	18	05	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal				1 laporan	196,600,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik			pelaku usaha	1 laporan	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Perizinan dan Non Perizinan di bidang Penanaman Modal	izin		izin	1200 izin	120,000,000						1200 izin	100,000,000					
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikelola	sistem		sistem	1 sistem	120,000,000						1 sistem	100,000,000					
2	18	06	2.01	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik				1 sistem	120,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat pelaku usaha	1 sistem	100,000,000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						577,000,000								634,700,000				
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Jumlah Wirausaha Muda/Jumlah Organisasi yang Aktif	Kegiatan		Kegiatan	15 Kegiatan	345,000,000						15 Kegiatan	379,500,000					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda/i yang Aktif	Orang		Orang	125 Orang	285,000,000					125 Orang	313,500,000		
2	19	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Wirausaha Muda				3 Orang	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pemuda/i	3 Orang	82,500,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
2	19	02	2.01	04	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda Dalam Mengikuti Sosialisasi Narkoba				50 Orang	60,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pemuda/i	50 Orang	66,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
2	19	02	2.01	08	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Anggota Paskibraka TK Nasional/Provinsi dan Kab.Karo				72 Orang	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pemuda/i	72 Orang	165,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda/i yang Aktif	Orang		Orang	125 Orang	60,000,000						125 Orang	66,000,000	
2	19	02	2.02	02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Pemuda Yang Kreatif, Kreasi dan Inovasi Dalam Pengembangan Seni Budaya				20 Orang	60,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Wirausaha Muda dan Pemuda Kader	20 Orang	66,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga Jumlah Atlet Berprestasi Dalam Olahraga Jumlah Prestasi Olahraga Pelatih Yang Bersertifikasi	Kegiatan orang Kegiatan Kegiatan		Kegiatan orang Kegiatan Kegiatan	26 Kegiatan 374 orang 26 Kegiatan 69 Kegiatan	232,000,000					26 Kegiatan 374 orang 26 Kegiatan 69 Kegiatan	255,200,000		
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	sarana prasarana yang lengkap dan sesuai standar olahraga	Unit		Unit	1 Unit	12,000,000					1 Unit	13,200,000		
2	19	03	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Olahraga Berkuda di Siosar				1 Unit	12,000,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Olahraga, Atlet Berprestasi	1 Unit	13,200,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjaringnya Atlet Berprestasi	Orang		Orang	374 Orang	10,000,000					374 Orang	11,000,000		
2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Berprestasi				374 Orang	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Olahraga, Atlet yang Berprestasi	374 Orang	11,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terselenggaranya POPDA, PORWIL dan PORPROV	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	200,000,000					3 Kegiatan	220,000,000		
2	19	03	2.03	02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pemusatan Latihan Daerah Kabupaten Karo (Hibah Koni)				71 Orang	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Olahraga, Atlet Berprestasi	71 Orang	55,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	
2	19	03	2.03	03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Event Olahraga SELEKDA, KEJURDA, PORPROV (Hibah Koni) dan Jumlah Atlet yang Mengikuti Event Olahraga POPDA (Dispora)				380 Orang	150,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sarana dan Prasarana Olahraga, Atlet Berprestasi	380 Orang	165,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata	
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Standarisasi pembinaan organisasi olahraga	Orang		Orang	400 Orang	10,000,000					400 Orang	11,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
2	19	03	2.04	04	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi	Insan Olahraga Yang Berprestasi Yang Diberi Penghargaan				400 Orang	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Atlet Berprestasi	400 Orang	11,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata				
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						652,494,602							717,744,062					
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali		Kali	4 Kali	220,490,360						4 Kali	242,539,396					
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang mengikuti seminar kesenian tradisional	orang		orang	150 orang	220,490,360						150 orang	242,539,396					
2	22	02	2.01	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah SDM Yang Mengikuti Seminar Adat dan Budaya				150 Orang	220,490,360	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	situs dan cagar budaya yang dilestarikan	150 Orang	242,539,396	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata				
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	Kali		Kali	4 Kali	230,659,422						4 Kali	253,725,364					
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM kesenian tradisional yang dilatih	orang		orang	90 orang	230,659,422						90 orang	253,725,364					
2	22	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah SDM kesenian Tradisional Yang Dilatih				90 Orang	230,659,422	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat dan pelaku seni	90 Orang	253,725,364	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata				
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Benda, situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya adat		Cagar Budaya adat	10 Cagar Budaya adat	201,344,820						10 Cagar Budaya adat	221,479,302					
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	Cagar Budaya		Cagar Budaya	10 Cagar Budaya	201,344,820						10 Cagar Budaya	221,479,302					
2	22	05	2.01	01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya Yang Terdaftar				10 Cagar Budaya	201,344,820	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	situs, cagar budaya yang ada di kabupaten karo	10 Cagar Budaya	221,479,302	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						21,191,457,218							23,310,602,941					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	10,024,771,505						83 Indeks	11,027,248,656	
3	26	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah honorarium pengelola keuangan yang dibayar	bulan		bulan	12 bulan	7,324,502,706						12 bulan	8,056,952,977	
3	26	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	7,095,342,706	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	12 bulan	7,804,876,977	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				17 Orang Bulan	229,160,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata	17 Orang Bulan	252,076,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan yang diadakan	bulan		bulan	12 bulan	56,250,000						12 bulan	61,875,000	
3	26	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut				75 Stel	56,250,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN dan Tenaga Honoharium	75 Stel	61,875,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	bulan		bulan	12 bulan	1,101,057,171						12 bulan	1,211,162,888	
3	26	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				48 Jenis	543,988,676	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	48 Jenis	598,387,544	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				22 Jenis	5,503,814	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	22 Jenis	6,054,195	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				7 Jenis	61,500,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	7 Jenis	67,650,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan				2 Buah	16,800,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	2 Buah	18,480,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				77 Orang Kali	473,264,681	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	77 Orang Kali	520,591,149	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebeleur	Unit/Buah		Unit/Buah	2 Unit/Buah	6,581,628						2 Unit/Buah	7,239,791	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	26	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				2 Buah	6,581,628	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata	2 Buah	7,239,791	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah honoharium pegawai tidak tetap yang dibayar	bulan		bulan	12 bulan	1,164,380,000						12 bulan	1,280,818,000	
3	26	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air, Dan listrik				12 bulan	108,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	12 bulan	118,800,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				10 Unit	22,880,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	10 Unit	25,168,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honoharium Pegawai Tidak Tetap				33 Orang Bulan	1,033,500,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	33 Orang Bulan	1,136,850,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	bulan		bulan	12 bulan	372,000,000						12 bulan	409,200,000	
3	26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				8 Unit	172,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Dinas Pariwisata	8 Unit	189,200,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya				1 Unit	200,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Dinas Pariwisata	1 Unit	220,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		orang	600000 orang	9,065,388,311						600000 orang	9,971,927,142	
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana objek wisata yang ditingkatkan	kelompok		kelompok	5 kelompok	9,065,388,311						5 kelompok	9,971,927,142	
3	26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Objek Wisata yang Ditingkatkan				4 objek	8,986,552,557	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat dan pelaku wisata	4 objek	9,885,207,813	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata
3	26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Sadar Wisata Yang Dibina				5 kelompok	78,835,754	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat dan pelaku wisata	5 kelompok	86,719,329	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Jumlah Kunjungan Wisatawan	orang		orang	600000 orang	1,155,536,637						600000 orang	1,271,090,301					
3		26	03	2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/kota	Event		Event	8 Event	1,155,536,637						8 Event	1,271,090,301					
3		26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata kabupaten/kota			8 event	1,155,536,637	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Wisatawan domestik dan mancanegara	8 event	1,271,090,301	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata				
3		26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata Yang Tersertifikasi	orang		orang	500 orang	945,760,765						500 orang	1,040,336,842				
3		26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kemitraan pariwisata yang dilaksanakan	kerjasama		kerjasama	3 kerjasama	945,760,765						3 kerjasama	1,040,336,842				
3		26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Yang Mengikuti Pelatihan Berbasis Kompetensi			500 orang	865,760,765	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat, pelaku wisata dan kemitraan pariwisata	500 orang	952,336,842	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata				
3		26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Kemitraan Pariwisata Yang Dilaksanakan			3 Kerjasama	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat, pelaku wisata dan kemitraan pariwisata	3 Kerjasama	88,000,000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Serta Pariwisata				
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						750,000,000								531,000,000			
2	23	02				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang		orang	3999 orang	750,000,000						3999 orang	531,000,000				
2	23	02	2.01			Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	300,000,000						100 %	522,000,000				

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan daerah yang berkualitas				1 unit	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	1 unit	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan dan pustakawan				40 orang	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	40 orang	20,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.01	08	Pengembangan Bahan Pustaka	jumlah bahan pustaka				2000 buah	200,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	2000 buah	500,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	450,000,000						100 %	9,000,000			
2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana perpustakaan di tempat umum				2 unit	400,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	2 unit	6,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	23	02	2.02	03	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan yang di berikan dalam gerakan budaya gemar membaca				20 orang	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	20 orang	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						15,863,683,791								3,892,452,311		
2	24	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	15,543,683,791						83 Indeks	3,848,283,791			
2	24	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%		%	100 %	2,663,283,791						100 %	2,663,283,791			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	2,585,283,791	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 bulan	2,585,283,791	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				144 orang bulan	78,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	144 orang bulan	78,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% %		% %	100 %	25,000,000						100 % 100 %	4,000,000	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Baik															
2	24	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atributnya				50 stel	25,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	50 stel	4,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	% % % %		% % % %	100 %	204,400,000						100 % 100 % 100 % 100 %	182,000,000	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik															
				Terlaksananya dministrasi Umum Perangkat Daerah dengan baik															
				Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum															
2	24	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	peralatan dan perlengkapan kantor				50 jenis	25,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	50 jenis	45,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga				10 jenis	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10 jenis	5,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				5 jenis	5,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5 jenis	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan				650 buah	4,400,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	650 buah	4,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				350 orang kali	120,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	350 orang kali	125,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% %		% %	100 % 100 %	11,100,000,000						100 % 100 %	121,000,000	
2	24	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				10 buah	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	10 buah	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				10 Buah	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	10 Buah	10,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				2 unit	10,000,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	2 unit	1,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				50 Buah	1,000,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	50 Buah	100,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	401,000,000						100 % 100 %	396,000,000	
2	24	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bulan	54,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	12 bulan	60,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30 unit	12,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	30 unit	1,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
2	24	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				288 orang bulan	335,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	288 orang bulan	335,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% %		% %	100 % 100 %	1,150,000,000						100 % 100 %	482,000,000	
2	24	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				8 unit	150,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	8 unit	481,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	1,000,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab Karo	1 unit	1,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip Secara Baku	%		%	83 %	200,000,000						83 %	37,168,520	
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota sesuai standar ANRI Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	% %		% %	100 % 100 %	100,000,000						100 % 100 %	30,168,520	
2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	jumlah arsip dinamis				3000 Arsip	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	3000 Arsip	28,168,520	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	jumlah arsip yang di susutkan				200 Arsip	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	200 Arsip	2,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																							
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif					
														Nasional	Daerah								
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	%		%	100 %	100,000,000						100 %	7,000,000					
2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah arsip dan layanan melalui JIKN				1 sistem	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	1 sistem	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan				50 unit	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	50 unit	4,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	%		%	83 %	120,000,000						83 %	7,000,000					
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Terlaksananya Kegiatan Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	%		%	100 %	120,000,000						100 %	7,000,000					
2	24	03	2.01	01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	arsip				1000 Arsip	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	1000 Arsip	4,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	arip				1000 Arsip	70,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kabupaten Karo	1000 Arsip	3,000,000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan				
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																		
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						34,050,895,791								22,771,680,284				
3	27	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	18,668,645,831						83 indeks	19,598,880,324					
3	27	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	17,628,384,479						12 bulan 12 bulan	18,558,618,972					

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	27	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	15,629,194,479	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	12 bulan	16,559,428,972	Dinas Pertanian	
3	27	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan				12 bulan	1,999,190,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	12 bulan	1,999,190,000	Dinas Pertanian	
3	27	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Barang cetakan dan penggandaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Peralatan dan perlengkapan kantor Peralatan Rumah Tangga Perjalanan dinas	jenis jenis jenis jenis orang kali		jenis jenis jenis jenis orang kali	13 jenis 8 jenis 45 jenis 18 jenis 296 orang kali	491,050,592						13 jenis 8 jenis 45 jenis 18 jenis 296 orang kali	491,050,592		
3	27	01	2.06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				8 jenis	32,684,780	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	8 jenis	32,684,780	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				45 jenis	63,316,565	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	45 jenis	63,316,565	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga				18 jenis	10,382,247	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	18 jenis	10,382,247	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	05		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				13 jenis	45,107,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	13 jenis	45,107,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas				296 orang kali	339,560,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	296 orang kali	339,560,000	Dinas Pertanian	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	jenis		jenis	4 jenis	98,000,000						4 jenis	98,000,000	
3	27	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				4 jenis	98,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	4 jenis	98,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honorarium pegawai tidak tetap Telepon,internet, air dan listrik	orang bulan bulan		orang bulan bulan	19 orang bulan 12 bulan	352,020,000						19 orang bulan 12 bulan	352,020,000	
3	27	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik				12 bulan	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	12 bulan	75,000,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor				19 orang	277,020,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	19 orang	277,020,000	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	unit unit		unit unit	99 unit 26 unit	99,190,760						99 unit 26 unit	99,190,760	
3	27	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan				99 unit	94,190,760	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	99 unit	94,190,760	Dinas Pertanian
3	27	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				26 unit	5,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai Dinas Pertanian Kab.Karo	26 unit	5,000,000	Dinas Pertanian
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan sarana pertanian	persen		persen	20 persen	5,317,700,000						20 persen	1,300,000,000	
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah kios di kecamatan dan chopper yang diawasi	kelompok tani		kelompok tani	3 kelompok tani	619,000,000						3 kelompok tani	275,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Kabupaten Karo

Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	27	02	2.01	01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah kios di kecamatan dan chopper yang diawasi Jumlah kios di kecamatan dan chopper yang diawasi				3 kelompok tani 17 kecamatan	165,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani dan Ternak	3 kelompok tani 17 kecamatan	100,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	02	2.01	02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah kelompok tani penerima sarana produksi pertanian/perkebunan				18 kelompok tani	454,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani dan Ternak	18 kelompok tani	175,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi dan kelompok tani penerima benih/bibit unggul tanaman perkebunan dan hortikultura Jumlah komoditi dan kelompok tani penerima benih/bibit unggul tanaman perkebunan dan hortikultura														
						Jumlah komoditi,kelompok tani pennagkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB	kelompok tani komoditi produsen penangkar		kelompok tani komoditi produsen penangkar	12 kelompok tani 12 komoditi 1 produsen 2 penangkar	3,894,454,069						12 kelompok tani 12 komoditi 1 produsen 2 penangkar	575,000,000		
						Jumlah komoditi,kelompok tani pennagkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB	komoditi produsen akseptor		komoditi akseptor	3 komoditi 3000 akseptor							3 komoditi 3000 akseptor			
						Jumlah komoditi,kelompok tani pennagkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB														
						Jumlah komoditi,kelompok tani pennagkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah komoditi, kelompok tani penangkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB Jumlah komoditi, kelompok tani penangkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB Jumlah komoditi, kelompok tani penangkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB Jumlah komoditi, kelompok tani penangkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB Jumlah komoditi, kelompok tani penangkar,produsen benih dan ternak yang menerima IB				1 produsen benih 2 penangkar 3 komoditi 3000 akseptor	3,194,454,069	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Hewan/Ternak	1 produsen benih 2 penangkar 3 komoditi 3000 akseptor	270,581,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah komoditi dan kelompok tani penerima b Jumlah komoditi dan kelompok tani penerima benih/bibit unggul tanaman perkebunan dan hortikultura				12 kelompok tani 12 komoditi	700,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Hewan/Ternak	12 kelompok tani 12 komoditi	304,419,000	Dinas Pertanian
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan	ekor		ekor	120 ekor	804,245,931						120 ekor	450,000,000	
3	27	02	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih/bibit ternak yang diadakan				120 ekor	804,245,931	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Peternak	120 ekor	450,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase ketersediaan prasarana pertanian	persen		persen	20 persen	8,381,300,000						20 persen	499,999,960	
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Pameran hasil pertanian	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	75,000,000						2 kegiatan	49,999,960	
3	27	03	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Pameran hasil pertanian				2 kegiatan	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	2 kegiatan	49,999,960	Dinas Pertanian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian	Embung pertanian	unit		unit	1 unit	8,306,300,000						1 unit	450,000,000	
				Jalan usaha tani		unit		unit	10 unit										
				Jaringan irigasi usaha tani		unit		unit	12 unit										
				Prasarana pertanian lainnya		unit		unit	2 unit										
				Rumah potong hewan		unit		unit	2 unit										
3	27	03	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jaringan irigasi usaha tani				12 unit	2,400,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Hewan/Ternak	12 unit	200,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Embung pertanian				1 unit	240,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Hewan/Ternak	1 unit	0	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani				10 unit	2,000,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Hewan/Ternak	10 unit	200,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	07	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan	Rumah Potong Hewan				2 unit	1,368,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Hewan/Ternak	2 unit	25,000,000	Dinas Pertanian
3	27	03	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Prasarana pertanian lainnya				2 unit	2,298,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani, Hewan/Ternak	2 unit	25,000,000	Dinas Pertanian
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	persen		persen	15 persen	747,799,960						15 persen	672,800,000	
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang divaksin dna diobati	ekor		ekor	15000 ekor	672,799,920						15000 ekor	597,799,960	
3	27	04	2.01	01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah hewan yang divaksin dan diobati				15000 ekor	672,799,920	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Hewan/Ternak	15000 ekor	597,799,960	Dinas Pertanian

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan	unit		unit	115 unit	75,000,040					115 unit	75,000,040			
3	27	04	2.04	02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pengawasan peredaran hewan dan produk hewan				115 Unit	75,000,040	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Ternak dan Mayarakat Veteriner	115 Unit	75,000,040	Dinas Pertanian	
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas pertanaman yang dikendalikan OPTnya	persen		persen	23 persen	200,000,000					23 persen	200,000,000			
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah komoditi yang dikendalikan OPTnya	komoditi		komoditi	2 komoditi	200,000,000					2 komoditi	200,000,000			
3	27	05	2.01	01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah komoditi yang dikendalikan OPTnya				2 komoditi	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kelompok Tani	2 komoditi	200,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	persen		persen	6,13 persen	735,450,000					6,13 persen	500,000,000			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan	poktan orang		poktan orang	20 poktan 131 orang	735,450,000					20 poktan 131 orang	500,000,000			
3	27	07	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan				131 orang	535,450,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyuluh dan Kelompok Tani	131 orang	300,000,000	Dinas Pertanian	
3	27	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan				20 poktan	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Penyuluh dan Kelompok Tani	20 poktan	200,000,000	Dinas Pertanian	
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN															
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						274,112,804							301,524,085		
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Pertambangan Yang Memiliki Izin	persen		persen	20 persen	274,112,804						20 persen	301,524,085		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan	Pengusaha		Pengusaha	40 Pengusaha	274,112,804						40 Pengusaha	301,524,085			
3	29	05	2.01	03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan				40 Pengusaha	274,112,804	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	40 Pengusaha	301,524,085	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						118,849,953,184								71,497,185,013		
3	30	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Operasional Perkantoran	Bulan		Bulan	12 Bulan	8,186,114,844						12 Bulan	65,514,988,439			
3	30	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan Honorarium Pengelola Keuangan	Bulan OB		Bulan OB	12 Bulan 110 OB	5,910,047,506						12 Bulan 110 OB	63,011,314,367			
3	30	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN Insentif Pemungut Retribusi				83 indeks 12 Bulan	5,708,107,506		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mioneral	83 indeks 12 Bulan	62,789,180,367	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				110 OB	201,940,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mioneral	110 OB	222,134,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stell		Stell	133 Stell	89,376,000						133 Stell	98,313,600			
3	30	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				133 stell	89,376,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	133 stell	98,313,600	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral		
3	30	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Barang Cetakan dan Penggandaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan Rumah Tangga Perjalanan Dinas	Jenis Jenis Jenis OK		Jenis Jenis Jenis OK	13 Jenis 25 Jenis 10 Jenis 200 OK	587,972,893						13 Jenis 25 Jenis 10 Jenis 200 OK	646,770,182			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
3	30	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25 Jenis	74,925,650	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	25 Jenis	82,418,215	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				14 jenis	5,171,643	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	14 jenis	5,688,807	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				13 Jenis	117,875,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	13 Jenis	129,663,160	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				200 OK	390,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	200 OK	429,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Mebel Mebeleur	Buah Buah		Buah Buah	10 Buah 10 Buah	80,199,795						10 Buah 10 Buah	88,219,775		
3	30	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				20 Buah	80,199,795	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	20 Buah	88,219,775	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honorarium Pegawai Tidak Tetap Service Peralatan dan perlengkapan Kantor Telephon, Internet, Air dan Listrik	OB Unit Bulan		OB Unit Bulan	1104 OB 10 Unit 12 Bulan	1,444,028,650						1104 OB 10 Unit 12 Bulan	1,588,431,515		
3	30	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telephon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	37,740,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian , Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	12 Bulan	41,514,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	
3	30	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10 Unit	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian , Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	10 Unit	11,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				1104 Orang Bulan	1,396,288,650	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas perindustrian , Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	1104 Orang Bulan	1,535,917,515	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	unit		unit	8 unit	74,490,000						8 unit	81,939,000	
3	30	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas				8 unit	74,490,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral	8 unit	81,939,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Sarana Perdagangan yang Terkelola Dengan Baik Jumlah Sarana Perdagangan Yang Terkelola Dengan Baik Jumlah Sarana Perdagangan Yang Terkelola Dengan Baik	Pasar Gudang Unit		Pasar Gudang Unit	1 Pasar 1 Gudang 1 Unit	110,170,974,400						1 Pasar 1 Gudang 1 Unit	5,440,046,240	
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Gudang Yang Diperbaiki Jumlah Gudang Yang Memadai Jumlah Pasar Yang Direvitalisasi Jumlah Pasar Yang Memadai	Gudang Gudang Pasar Pasar		Gudang Gudang Pasar Pasar	1 Gudang 1 Gudang 1 Pasar 1 Pasar	109,995,974,400						1 Gudang 1 Gudang 1 Pasar 1 Pasar	5,247,546,240	
3	30	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Gudang Yang Memadai Jumlah Pasar yang Memadai				1 Gudang 1 Pasar	107,740,000,000		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	1 Gudang 1 Pasar	2,765,974,400	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Gudang Yang diperbaiki jumlah pasar yang direvitalisasi				1 Gudang 1 pasar	2,255,974,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	1 Gudang 1 pasar	2,481,571,840	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah kelompok Pedagang Jumlah Sarana Perdagangan Yang Terkelola Dengan Baik Meningkatnya Produk Ekspor Unggulan Daerah	Kelompok Kelompok unit usaha		Kelompok Kelompok unit usaha	1 Kelompok 1 Kelompok 1 unit usaha	175,000,000					1 Kelompok 1 Kelompok 1 unit usaha	192,500,000		
3	30	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	jumlah kelompok pedagang				1 Kelompok	175,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	1 Kelompok	192,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan Nilai Ekspor	milyar		milyar	5399,52 milyar	330,000,000					5399,52 milyar	363,000,000		
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Jumlah Pelaku Usaha Yang Dibina	Pameran Orang		Pameran Orang	3 Pameran 20 Orang	330,000,000					3 Pameran 20 Orang	363,000,000		
3	30	05	2.01	01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	jumlah pelaku usaha yang dibina				20 orang	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Insentif Daerah	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	20 orang	165,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	05	2.01	02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pameran				3 pameran	90,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	3 pameran	99,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	05	2.01	03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pameran				3 pameran	90,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	3 pameran	99,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat Ukur Sarana Perdagangan Yang Di Tera dan Tera Ulang	persen		persen	5 persen	162,863,940					5 persen	179,150,334		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Alat Ukur Yang Ditera/tera Ulang Jumlah Sosialisasi/Standarisasi Alat Ukur bYang Dilaksanakan	Unit Kali		Unit Kali	10 Unit 1 Kali	162,863,940						10 Unit 1 Kali	179,150,334	
3	30	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Alat Ukur Yang yang ditera/Tera Ulang				10 Unit	92,863,940	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	10 Unit	102,150,334	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	30	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluh an Metrologi Legal	Jumlah Sosialisasi Standarisasi Alau Ukur Yang Dilaksanakan				1 Kali	70,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	1 Kali	77,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						3,894,054,853							4,283,460,338	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Industri/IKM	%		%	0,19 %	3,894,054,853						0,19 %	4,283,460,338	
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Jumlah Kelompok IKM Kopi Yang Aktif Jumlah Pelatihan/Fasilitasi Peralatan Kerajinan	Dokumen Kelompok Pelatihan		Dokumen Kelompok Pelatihan	1 Dokumen 10 Kelompok 1 Pelatihan	3,894,054,853						1 Dokumen 10 Kelompok 1 Pelatihan	4,283,460,338	
3	31	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	1 Dokumen	165,000,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Pelatihan/Fasilitasi Peralatan Kerajinan				1 Pelatihan	449,054,853	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	1 Pelatihan	493,960,338	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
3	31	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah IKM Kopi Yang Aktif				10 Kelompok	3,295,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Industri Kecil dan Menengah - Reguler		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Kabupaten Karo	10 Kelompok	3,624,500,000	Dinas Perindustrian, Perdagangan serta Energi dan Sumber Daya Mineral
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN														
4	01				SEKRETARIAT DAERAH						27,661,260,094							28,531,513,870	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	24,420,050,469						83 Indeks	25,505,611,031	
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	13,543,312,965						12 Bulan	14,073,733,527	
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				14 bulan	13,109,702,965	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	14 bulan	13,412,423,527	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				12 Bulan	433,610,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	661,310,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	120,200,000						12 Bulan	120,200,000	
4	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				131 Stel	90,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Disiplin Aparatur	131 Stel	90,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat				8 Orang Kali	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Disiplin Aparatur	8 Orang Kali	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,066,760,959						12 Bulan	3,047,600,959	
4	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Intalasi Listrik				1200 Jenis	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1200 Jenis	150,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				24 Jenis	630,193,109	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	24 Jenis	611,033,109	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				20 Jenis	181,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	20 Jenis	181,200,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	174,704,050	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Jenis	174,704,050	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan Minum				345 Orang Kali	520,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	345 Orang Kali	520,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				146 Orang Kali	1,410,663,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	146 Orang Kali	1,410,663,800	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	12 Unit	803,000,000						12 Unit	799,000,000	
4	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebel				10 Buah	250,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Buah	250,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				5 Buah	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	5 Buah	300,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana danPrasarana Pendukung Gedung Kantor				10 Buah	253,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	10 Buah	249,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,551,239,529						12 Bulan	2,330,539,529	
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	50,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	1,064,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	1,071,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				20 Unit	159,039,529	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	20 Unit	159,039,529	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				20 Orang/Bulan	1,277,700,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	20 Orang/Bulan	1,050,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,759,370,000						12 Bulan	1,798,370,000	
4	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Dinas Kendaraan Jabatan				4 Unit	192,600,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	4 Unit	192,600,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur				12 Unit	590,270,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Unit	587,270,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Unit	91,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	20 Unit	133,500,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20 Unit	885,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	20 Unit	885,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	776,381,290						12 Bulan	776,381,290	
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	672,381,290	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 bulan	672,381,290	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah				12 Stel	104,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Stel	104,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah Wakil Daerah dan Sekretaris Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,000,000,000						12 Bulan	1,750,000,000	
4	01	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah				12 Bulan	350,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	600,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah				12 Bulan	350,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	500,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah				12 Bulan	300,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	12 Bulan	650,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Terlaksananya Penataan Organisasi	Bulan		Bulan	12 Bulan	501,785,726						12 Bulan	501,785,726	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen dan Laporan				4 Laporan Peraturan	135,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	4 Laporan Peraturan	135,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Laporan				2 Kegiatan Laporan	125,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	2 Kegiatan Laporan	125,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan dan Fasilitasi				1 Laporan	163,785,726	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	1 Laporan	163,785,726	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen dan Laporan				1 Laporan	78,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Organisasi	1 Laporan	78,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Bulan		Bulan	12 Bulan	298,000,000						12 Bulan	308,000,000		
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Fasilitasi Keprotokolan				50 Org/Kali	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	50 Org/Kali	50,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Konfrensi Pers/Baliho/Spanduk				800 Orang kali buah	208,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	800 Orang kali buah	208,000,000	Sekretariat Daerah	
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Dokumentasi Tugas Pimpinan				200 Kali	40,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan	200 Kali	50,000,000	Sekretariat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori		Kategori	Tinggi Kategori	2,501,066,285						Tinggi Kategori	2,084,859,794	
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,849,044,285						12 Bulan	628,902,000	
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Aplikasi E-Office				1 Aplikasi	130,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Aplikasi	130,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Penetapan dan Penegasan Batas Pemekaran Desa Batas Desa				3 Perbup	1,038,122,470	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	3 Perbup	71,542,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Desk Pilkada Upacara Hari Otonomi Daerah LPPD Kerjasama Dalam Daerah				60 Laporan	680,921,815	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur	60 Laporan	427,360,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Bulan		Bulan	12 Bulan	300,000,000						12 Bulan	1,218,935,794	
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 laporan	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat Sosial Masyarakat	12 laporan	406,311,932	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial				12 laporan	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat Sosial Masyarakat	12 laporan	406,311,931	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Monitoring dan Koordinasi dalam Penyusunan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat				12 laporan	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Kesejahteraan Rakyat Sosial Masyarakat	12 laporan	406,311,931	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Bulan		Bulan	12 Bulan	352,022,000						12 Bulan	237,022,000	
4	01	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Keputusan Propempera Produk Hukum Daerah				1 Keputusan 603 Produk Hukum Daerah	152,022,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang Undangan	1 Keputusan 603 Produk Hukum Daerah	152,022,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Perkara RANHAM				2 Perkara 2 Laporan	175,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang Undangan	2 Perkara 2 Laporan	50,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Dokumentasi Produk Hukum JDIH Penyuluhan Hukum				50 Peraturan 0 Website 0 Kecamatan	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Penataan Peraturan Perundang Undangan	50 Peraturan 0 Website 0 Kecamatan	35,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Jumlah Paket Tender dengan Jumlah Permohonan Tender	Paket		Paket	220 Paket	740,143,340						220 Paket	941,043,045	
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terlaksananya Kebijakan Perekonomian	Bulan		Bulan	12 Bulan	280,899,705						12 Bulan	481,799,410	
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Monitoring dan Pengawasan BUMD dan BLUD Kab. Karo				1 Laporan	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya urusan pemerintahan Sekretariat	1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Pengendalian Inflasi dan Inklusi Keuangan Daerah Kab. Karo terlaksana				1 Laporan	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya urusan pemerintahan Sekretariat	1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Laporan	10,000,000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya urusan pemerintahan Sekretariat	1 Laporan	210,899,705	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terbentuknya BUMD Kab. Karo				1 Peraturan Daerah	210,899,705	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya urusan pemerintahan Sekretariat	1 Peraturan Daerah	210,899,705	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terlaksananya Administrasi Pembangunan	Bulan		Bulan	12 Bulan	83,930,000						12 Bulan	83,930,000	
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Program Pembangunan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan	1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan	1 Laporan	30,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Monitoring Pelaksanaan Pembangunan				1 laporan	23,930,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Perekonomian dan Pembangunan	1 laporan	23,930,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Bulan		Bulan	12 Bulan	345,313,635						12 Bulan	345,313,635	
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Paket Pengadaan				120 Paket	145,313,635	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	120 Paket	145,313,635	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Paket Pengadaan Secara Elektronik				60 Kegiatan	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Kegiatan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				60 Kegiatan	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	60 Kegiatan	100,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Bulan		Bulan	12 Bulan	30,000,000						12 Bulan	30,000,000	
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Monitoring dan Pengawasan Hasil Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kab.Karo				1 Laporan	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya urusan pemerintahan Sekretariat	1 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Monitoring dan Pengawasan hasil Pertambangan dan lingkungan Hidup				1 Laporan	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya urusan pemerintahan Sekretariat	1 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Monitoring dan Pengawasan Hasil Energi dan Air				1 Laporan	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya urusan pemerintahan Sekretariat	1 Laporan	10,000,000	Sekretariat Daerah	
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN															
4	02				SEKRETARIAT DPRD						37,563,834,300							34,337,140,000		
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	27,225,941,300						83 Indeks	25,619,481,141		
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan %		Bulan %	12 Bulan 20 %	3,162,879,693						12 Bulan 20 %	3,289,109,943		
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	2,899,159,693	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Bulan	3,025,389,943	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				16 Orang Bulan	263,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	16 Orang Bulan	263,720,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	416,228,000						12 Bulan	178,000,000		
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				84 Stel	56,448,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	84 Stel	63,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				3 Orang Kali	359,780,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	3 Orang Kali	115,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Bulan		% Bulan	10 % 12 Bulan	1,624,942,111						10 % 12 Bulan	1,909,227,660	
4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor				710 Jenis	25,848,030	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Sekretariat DPRD	710 Jenis	28,052,330	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9 Jenis	379,437,581	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Sekretariat DPRD	9 Jenis	300,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				26 Jenis	286,394,300	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Sekretariat DPRD	26 Jenis	100,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				13 Jenis	51,928,200	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Sekretariat DPRD	13 Jenis	46,891,210	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan				10 Buah	40,800,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Sekretariat DPRD	10 Buah	40,800,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum				6748 Orang Kali	303,136,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Sekretariat DPRD	6748 Orang Kali	200,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				19 Orang Kali	537,398,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Sekretariat DPRD	19 Orang Kali	1,193,484,120	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Unit		% Unit	10 % 20 Unit	868,089,318					10 % 20 Unit	80,000,000		
4	02	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	513,709,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	1 Unit	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor				19 Buah	354,380,318	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	19 Buah	80,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,030,960,000						12 Bulan	1,030,960,000	
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	157,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	12 Bulan	157,200,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36 Unit	52,520,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	36 Unit	52,520,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				64 Orang Bulan	821,240,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Sekretariat DPRD	64 Orang Bulan	821,240,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Unit		% Unit	10 % 26 Unit	1,836,196,440						10 % 26 Unit	1,536,196,440	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				11 Unit	285,450,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	11 Unit	285,450,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	33,470,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	1 Unit	33,470,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				14 Unit	1,517,276,440	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Sekretariat DPRD	14 Unit	1,217,276,440	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD Terlaksananya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	% Bulan		% Bulan	10 % 12 Bulan	17,627,870,450						10 % 12 Bulan	17,557,870,450	
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Gaji dan Tunjangan serta Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD				35 Orang/Bulan	17,017,270,450	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Orang/Bulan	16,947,270,450	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD				210 Stel	400,600,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	210 Stel	400,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengikuti Medical Check Up				35 Orang	210,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Orang	210,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Terlaksananya Layanan Administrasi DPRD	Bulan		Bulan	12 Bulan	658,775,288						12 Bulan	38,116,648	
4	02	01	2.16	01	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang dilantik				2 Orang	28,775,288	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Orang	28,116,648	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				3 Unit	630,000,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Unit	10,000,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	.Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJMD) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD), Terintegrasi program- program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Ada/Tidak Ada		Ada/Tidak Ada	Ada Ada/Tidak Ada	10,337,893,000						Ada Ada/Tidak Ada	8,717,658,859		
4	02	02	2.01			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	%		%	20 %	2,792,043,000						20 %	1,657,971,040	
4	02	02	2.01	01		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Propemperda yang dibahas				1 Dokumen	24,720,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pembkab Karo dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	101,323,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.01	02		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rancangan PERDA				8 Dokumen	2,196,659,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pembkab Karo dan Masyarakat Kabupaten Karo	8 Dokumen	1,315,884,900	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Laporan Pembahasan Ranperda dan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan				8 Dokumen	436,400,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pembkab Karo dan Masyarakat Kabupaten Karo	8 Dokumen	84,837,500	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik dan Ranperda dan Hearing Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah dan Tokoh Agama/Masyarakat				2 Dokumen	123,200,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pembkab Karo dan Masyarakat Kabupaten Karo	2 Dokumen	142,538,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.01	05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD				1 Dokumen	11,064,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD, Pemkab Karo dan Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	13,387,440	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terlaksananya Pembahasan Kebijakan Anggaran	%		%	10 %	239,284,000						10 %	1,179,446,400	
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Pembahasan KUA dan PPAS				1 Kegiatan	36,576,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta TAPD	1 Kegiatan	270,100,160	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Nota Kesepakatan Perubahan Pembahasan KUA dan PPAS				1 Dokumen	35,508,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta TAPD	1 Dokumen	29,504,640	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Persetujuan Bersama Ranperda APBD				1 Dokumen	52,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta TAPD	1 Dokumen	288,763,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Persetujuan Bersama Perubahan Ranperda APBD				1 Dokumen	52,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta TAPD	1 Dokumen	288,763,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Laporan Pembahasan Laporan Semester				2 Dokumen	10,400,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta TAPD	2 Dokumen	12,584,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Persetujuan Bersama Pembahasan PErtanggungjawaban APBD				1 Dokumen	52,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta TAPD	1 Dokumen	289,731,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%		%	10 %	235,876,000						10 %	1,188,783,200	
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan/Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan Bidang Pemerintahan dan Hukum				12 Dokumen	40,768,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	12 Dokumen	334,977,280	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan/Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan Bidang Infrastruktur				12 Dokumen	23,440,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	12 Dokumen	337,224,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan/Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan Bidang Kesejahteraan Rakyat				12 Dokumen	39,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	12 Dokumen	47,432,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan/Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan Bidang Perekonomian				12 Dokumen	31,360,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	12 Dokumen	346,808,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan/Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan Bidang Sumber Daya Alam				12 Dokumen	31,360,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	12 Dokumen	37,945,600	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK				1 Dokumen	22,516,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	27,244,360	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan Alat Kelengkapan DPRD				36 Dokumen	18,752,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	36 Dokumen	22,690,360	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.03	08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan/Rekomendasi Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	28,480,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD Beserta Masyarakat Kabupaten Karo	1 Dokumen	34,460,800	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas DPRD	%		%	10 %	1,621,336,000						10 %	708,724,000	
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD				35 Kali/Orang	932,676,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	35 Kali/Orang	15,260,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi DPRD				12 Bulan	15,260,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Bulan	60,080,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli				3 Orang	60,080,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	3 Orang	18,392,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	596,600,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	8 Orang	596,600,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.04	07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	16,720,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	18,392,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Adanya Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	%		%	20 %	1,283,195,000						20 %	1,284,817,000	
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Kunjungan Kerja Dalam Daerah				12 Dokumen	272,675,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Masyarakat Kabupaten Karo	12 Dokumen	272,675,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Keputusan DPRD tentang Pokok Pikiran DPRD				35 Dokumen	16,220,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Masyarakat Kabupaten Karo	35 Dokumen	17,842,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Keputusan DPRD tentang Reses DPRD				3 Dokumen	994,300,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Masyarakat Kabupaten Karo	3 Dokumen	994,300,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	%		%	10 %	19,640,000						10 %	37,182,000	
4	02	02	2.06	01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Peraturan DPRD tentang Kode Etik				1 Dokumen	9,820,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.06	02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Badan Kehormatan DPRD hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				2 Dokumen	9,820,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	2 Dokumen	37,182,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas DPRD	%		%	20 %	4,146,519,000						20 %	2,660,735,219	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Konsultasi dan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Keluar Daerah				100 Dokumen	4,071,847,000	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	100 Dokumen	2,147,338,019	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja DPRD				1 Dokumen	13,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	1 Dokumen	221,692,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.08	03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Agenda Kerja DPRD dan Kebijakan DPRD				12 Dokumen	48,672,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	174,435,200	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
4	02	02	2.08	04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Laporan Pimpinan DPRD				12 Dokumen	12,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pimpinan dan Anggota DPRD	12 Dokumen	117,270,000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	01				PERENCANAAN						7,793,497,069							7,883,751,955		
5	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	5,289,082,000						83 indeks	5,289,082,000		
5	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	4,287,011,564						12 bulan	4,287,011,564		
5	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	4,101,173,319	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BAPPEDA KAB KARO	12 bulan	4,101,173,319	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				15 orang bulan	185,838,245	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BAPPEDA KAB KARO	15 orang bulan	185,838,245	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	100,000,000						12 bulan	100,000,000		
5	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				39 stel	40,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN BAPPEDA KAB KARO	39 stel	40,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi				4 orang kali	60,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN BAPPEDA KAB KARO	4 orang kali	60,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	652,070,436						12 bulan	652,070,436	
5	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				4 jenis	1,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	4 jenis	1,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				60 jenis	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	60 jenis	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				26 jenis	26,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	26 jenis	26,500,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				5 jenis	27,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	5 jenis	27,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				6 buah	30,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	6 buah	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum				231 orang kali	30,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	231 orang kali	30,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				37 orang kali	487,570,436	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	37 orang kali	487,570,436	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	buah/unit		buah/unit	13 buah/unit	30,000,000						13 buah/unit	30,000,000	
5	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				10 buah	10,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BAPPEDA KAB KARO	10 buah	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				3 buah	20,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			BAPPEDA KAB KARO	3 buah	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	132,872,710						12 bulan	132,872,710	
5	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bulan	16,200,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	12 bulan	16,200,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				30 unit	22,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	30 unit	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				84 orang bulan	94,672,710	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	84 orang bulan	94,672,710	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	3 unit	87,127,290						3 unit	87,127,290	
5	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				3 unit	87,127,290	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			BAPPEDA KAB KARO	3 unit	87,127,290	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	%		%	100 %	1,433,384,365						100 %	1,506,922,802	
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Dokumen Perencanaan dan Pendanaan	%		%	100 %	1,020,604,770						100 %	1,042,865,247	
5	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah orang kali				200 Orang kali	36,487,039	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	200 Orang kali	40,135,743	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah orang kali				200 org kali	42,950,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	200 org kali	47,245,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah orang kali				250 orang kali	143,167,731	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	250 orang kali	157,484,504	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	01	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Perencanaan				1 dokumen	798,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	KABUPATEN KARO	1 dokumen	798,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	209,190,915						100 %	230,110,007	
5	01	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Sistem Informasi Pembangunan Daerah				1 Sistem	209,190,915	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	1 Sistem	230,110,007	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Dokumen Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	%		%	100 %	203,588,680						100 %	233,947,548	
5	01	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan				4 Dokumen	203,588,680	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	4 Dokumen	233,947,548	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah	%		%	100 %	1,071,030,704						100 %	1,087,747,153	
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%		%	100 %	202,000,000						100 %	202,000,000	
5	01	03	2.01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Draf RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan				3 dokumen	22,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	KABUPATEN KARO	3 dokumen	22,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan				3 dokumen	180,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	KABUPATEN KARO	3 dokumen	180,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Koordinasi Perencanaan bidang perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	%		%	100 %	600,980,704						100 %	600,980,704	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
5	01	03	2.02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Draf RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian				3 dokumen	316,504,899	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	3 dokumen	316,504,899	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				3 kali	26,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	3 kali	26,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				12 kali	108,475,805	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	12 kali	108,475,805	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Draf RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang SDA				3 dokumen	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	3 dokumen	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				1 kali	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	1 kali	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				1 kali	50,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	KABUPATEN KARO	1 kali	50,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	%		%	100 %	268,050,000						100 %	284,766,449	
5	01	03	2.03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)bidang infrastruktur				3 Dokumen	67,164,490	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	3 Dokumen	73,880,939	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	01	03	2.03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				12 Bulan	100,885,510	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	KABUPATEN KARO	12 Bulan	100,885,510	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				3 dokumen	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	3 dokumen	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	01	03	2.03	08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				12 bulan	50,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	12 bulan	55,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						787,599,752								787,599,752	
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Daya Saing Daerah	Nilai		Nilai	3 Nilai	787,599,752						3 Nilai	787,599,752		
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Regulasi	kebijakan		kebijakan	1 kebijakan	136,536,280						1 kebijakan	136,536,280		
5	05	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				1 Dokumen	136,536,280	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	1 Dokumen	136,536,280	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Kebijakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	kebijakan		kebijakan	1 kebijakan	75,000,000						1 kebijakan	75,000,000		
5	05	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				1 dokumen	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			KABUPATEN KARO	1 dokumen	75,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Kebijakan	kebijakan		kebijakan	1 kebijakan	250,000,000						1 kebijakan	250,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
5	05	02	2.03	13	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				1 Dokumen	250,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	1 Dokumen	250,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	IGA Kabupaten Karo	skor		skor	3500 skor	326,063,472						3500 skor	326,063,472			
5	05	02	2.04	01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi				1 Dokumen	281,063,472	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	1 Dokumen	281,063,472	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	2.04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah penyelenggaraan Diseminasi Hasil Kelitbangan Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				150 Orang Kali	15,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	150 Orang Kali	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	2.04	04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil Kelitbangan				150 Orang Kali	15,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	150 Orang Kali	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5	05	02	2.04	05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah HAKI yang difasilitasi				10 HAKI	15,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			KABUPATEN KARO	10 HAKI	15,000,000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																
5	02				KEUANGAN						291,979,624,319								286,917,021,435		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	85 Indeks	3,517,111,205						85 Indeks	5,034,903,061			
5	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Anggaran Daerah yang Disusun dan Dikoordinasikan	dokumen		dokumen	2 dokumen	25,738,000						2 dokumen	25,738,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	02	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan rapat evaluasi kinerja perangkat daerah				4 pertemuan	25,738,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat daerah	4 pertemuan	25,738,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	3,001,882,610							12 bulan	3,498,370,871	
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	2,881,632,610	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai BPKPAD Kabupaten Karo	12 Bulan	3,169,795,871	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan				84 Orang Bulan	120,250,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai BPKPAD Kabupaten Karo	84 Orang Bulan	328,575,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	15,000,000							12 Bulan	64,000,000	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut				20 stel	15,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	20 stel	64,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan Bulan		bulan Bulan	12 bulan 12 Bulan	169,150,595							12 bulan 12 Bulan	647,514,190	
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				3 jenis	36,628,595	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai BPKPAD Kab. Karo	3 jenis	211,957,190	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan				4 jenis	30,350,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai BPKPAD Kab. Karo	4 jenis	33,385,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas				74 Orang Kali	102,172,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Pegawai BPKPAD Kab. Karo	74 Orang Kali	402,172,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	249,670,000						12 Bulan	710,140,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet, air dan listrik				12 bulan	9,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN dan pegawai honorer	12 bulan	18,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki				4 unit	2,840,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN dan pegawai honorer	4 unit	29,260,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				120 orang bulan	237,830,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN dan pegawai honorer	120 orang bulan	662,880,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Unit		Unit	2 Unit	55,670,000						2 Unit	89,140,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan				2 unit	55,670,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kendaraan Dinas	2 unit	89,140,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK		Opini BPK	WTP Opini BPK	287,912,684,519						WTP Opini BPK	281,358,475,669	
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Jumlah Rencana Anggaran Daerah yang Disusun dan Dikoordinasikan	Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2,053,504,874						2 Dokumen	1,992,368,804	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun				2 Dokumen	200,448,574	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	200,448,574	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun				2 Dokumen	196,898,550	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Stakeholder terkait	2 Dokumen	196,898,550	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA- SKPD yang diverifikasi				2 dokumen	169,892,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Stakeholder terkait	2 dokumen	169,892,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DKA- SKPD yang diverifikasi				2 dokumen	169,892,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Stakeholder terkait	2 dokumen	169,892,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	jumlah dokume peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD				1 Peraturan	494,401,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Stakeholder terkait	1 Peraturan	494,401,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	jumlah dokumen peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD				1 Peraturan	797,972,750	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Stakeholder terkait	1 Peraturan	716,072,750	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	jumlah regulasi serta kebijakan bidang anggaran				4 Peraturan	24,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo dan Stakeholder terkait	4 Peraturan	44,763,930	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang dilakukan	bulan		bulan	12 bulan	226,185,890						12 bulan	235,186,290	
5	02	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	jumlah dokumen kas daerah yang dikelola				8000 Dokumen	159,999,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	8000 Dokumen	169,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah laporan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya				12 Laporan	66,186,290	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	12 Laporan	66,186,290	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah yang dilaksanakan dan dikoordinasikan	Laporan		Laporan	2 Laporan	330,521,955						2 Laporan	530,000,000	
5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD dan Laporan keuangan pemerintah daerah yang dikonsolidasikan				2 Laporan	175,694,155	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Laporan	260,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	jumlah dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten yang disusun				2 Peraturan	154,827,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Peraturan	270,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dikelola	Jenis		Jenis	3 Jenis	285,302,471,800						3 Jenis	278,600,920,575	
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	jumlah bantuan keuangan yang disalurkan				259 desa	270,769,507,800	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Desa		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa dan Perangkat Daerah serta Stakeholder Terkait	259 desa	270,769,507,800	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah dana darurat dan mendesak yang dikelola				4 kegiatan	2,600,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa dan Perangkat Daerah serta Stakeholder Terkait	4 kegiatan	2,600,000,000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah dana bagi hasil kabupaten yang dikelola				259 desa	11,932,964,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Desa dan Perangkat Daerah serta Stakeholder Terkait	259 desa	5,231,412,775	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini BPK		Opini BPK	WTP Opini BPK	549,828,595						WTP Opini BPK	523,642,705	
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang Dikelola	OPD		OPD	59 OPD	549,828,595						59 OPD	523,642,705	
5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar harga yang tersusun				4 dokumen	20,763,930	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	4 dokumen	20,763,930	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	jumlah barang milik daerah yang bersertifikat				200 Sertifikat	392,073,035	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	200 Sertifikat	365,887,145	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun				2 Laporan	136,991,630	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah Kabupaten Karo	2 Laporan	136,991,630	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	02				KEUANGAN						5,265,531,635							5,453,959,276		
5	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	3,487,611,306						83 Indeks	4,843,503,672		
5	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,789,957,611						12 Bulan	3,300,370,872		
5	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjan				12 Bulan	2,701,632,611	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	2,971,795,872	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				72 Orang Bulan	88,325,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	72 Orang Bulan	328,575,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	23,700,000						12 Bulan	82,000,000		
5	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Mesin Absensi yang Ada				1 Unit	10,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	18,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atributnya				18 Stel	13,700,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	18 Stel	64,000,000	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	180,013,695						12 Bulan	661,852,800		
5	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan KAntor				3 Jenis	36,628,595	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	3 Jenis	211,957,190	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				9 Jenis	43,385,100	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	9 Jenis	47,723,610	Badan Pendapatan Daerah	
5	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				73 Orang Kali	100,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	73 Orang Kali	402,172,000	Badan Pendapatan Daerah	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	460,470,000						12 Bulan	710,140,000	
5	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	9,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	12 Bulan	18,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Unit	26,420,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	3 Unit	29,260,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai Tidak Tetap				336 Orang Bulan	425,050,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	336 Orang Bulan	662,880,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	Unit		Unit	1 Unit	33,470,000						1 Unit	89,140,000	
5	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	33,470,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	89,140,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pendapatan Asli DAerah (PAD)	Rp		Rp	54019196520 Rp	1,777,920,329						54019196520 Rp	610,455,604	
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah yang Dikelola	Rp		Rp	54019196520 Rp	1,777,920,329						54019196520 Rp	610,455,604	
5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Laporan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				54019196520 Rp	32,936,910	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	54019196520 Rp	50,000,000	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak Daerah yang Didata dan Terdaftar				300 WP	18,859,080	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	300 WP	19,859,080	Badan Pendapatan Daerah
5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah SPPT PBB pedesaan dan perkotaan				140000 WP	447,296,699	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	140000 WP	468,596,699	Badan Pendapatan Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah yang Diawasi dan Diperiksa				18544647247 Rp	1,278,827,640	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	18544647247 Rp	71,999,825	Badan Pendapatan Daerah
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN														
5	03				KEPEGAWAIAN						4,978,383,725							4,884,387,000	
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	3,624,717,025						83 indeks	3,804,337,000	
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	%		%	100 %	3,164,410,305						100 %	3,315,377,823	
5	03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	3,039,410,305	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN pada Badan Kepegawaian Derah	12 bulan	3,200,377,823	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				120 orang bulan	125,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Derah	120 orang bulan	115,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah	%		%	100 %	20,832,000						100 %	22,000,000	
5	03	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut				32 stel	20,832,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	32 stel	22,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	%		%	100 %	273,444,720						100 %	280,000,000	
5	03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				53 jenis	77,444,720	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	53 jenis	75,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan				3 jenis	18,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	3 jenis	19,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
5	03	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas				142 orang kali	178,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	142 orang kali	186,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	30,000,000						100 %	49,259,177		
5	03	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung kantor atau bangunan lainnya				1 unit	30,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada pemerintah Kabupaten Karo	1 unit	49,259,177	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	91,200,000						100 %	91,200,000		
5	03	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet, air dan listrik				12 bulan	19,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	12 bulan	19,200,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				48 orang bulan	72,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	48 orang bulan	72,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	%		%	100 %	44,830,000						100 %	46,500,000		
5	03	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan				1 unit	38,420,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	1 unit	40,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				8 unit	6,410,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	8 unit	6,500,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	orang		orang	5200 orang	1,353,666,700						5200 orang	1,080,050,000		
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN	%		%	100 %	701,616,700						100 %	380,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.01	04	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Evaluasi pengadaan dan pengadaan ASN				500 orang	500,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	500 orang	230,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem informasi kepegawaian				1 sistem	201,616,700	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	1 sistem	150,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya mutasi dan promosi ASN	%		%	100 %	220,000,000						100 %	252,000,000	
5	03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Mutasi ASN				150 Orang	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	150 Orang	200,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kenaikan pangkat ASN				1000 Orang	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	1000 Orang	52,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya pengembangan kompetensi ASN	%		%	100 %	240,000,000						100 %	235,000,000	
5	03	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Ujian Penyesuaian Ijazah				60 orang	55,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	60 orang	50,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat				40 orang	145,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	40 orang	130,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jabatan fungsional ASN				1 dokumen	40,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	1 dokumen	55,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	%		%	100 %	192,050,000						100 %	213,050,000	
5	03	02	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilaian dan evaluasi kinerja aparatur				80 orang	80,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	80 orang	73,050,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
5	03	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Penghargaan bagi pegawai				47 orang	67,050,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	47 orang	80,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah pembinaan disiplin ASN				500 orang	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	500 orang	25,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	03	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Pelanggaran disiplin ASN				6 kasus	20,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	6 kasus	35,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						825,000,000							1,940,000,000	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%		%	11 %	825,000,000						11 %	1,940,000,000	
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Terlaksananya pengembangan kompetensi teknis	%		%	100 %	25,000,000						100 %	45,000,000	
5	04	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat				10 orang	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	10 orang	45,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Terlaksananya sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional	%		%	100 %	800,000,000						100 %	1,895,000,000	
5	04	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat				52 orang	800,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo	52 orang	1,895,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN														
6	01				INSPEKTORAT DAERAH						17,355,489,793							21,784,518,377	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	14,596,012,193						83 Indeks	18,748,733,015	
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12,918,849,306						12 Bulan	16,918,853,840	
6	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan				13 bulan	5,290,633,197	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	13 bulan	8,527,816,120	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	honorarium pengelola keuangan				35 orang bulan	7,628,216,109	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	35 orang bulan	8,391,037,720	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	207,657,600						12 Bulan	213,423,360	
6	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				77 stel	57,657,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah	77 stel	63,423,360	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi				15 Orang	150,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Daerah	15 Orang	150,000,000	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,099,867,390						12 Bulan	1,209,854,129	
6	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				125 Jenis	687,145,495	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	125 Jenis	755,860,045	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga				1354 jenis	310,240,485	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	1354 jenis	341,264,534	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan Dan Penggandaan				11 Jenis	4,227,287	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	11 Jenis	4,650,015	Inspektorat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan				11 buah	14,350,523	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	11 buah	15,785,575	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	bahan material				32 jenis	4,752,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	32 jenis	5,227,200	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum				1716 kotak	51,502,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	1716 kotak	56,652,200	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				163 orang kali	27,649,600	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	163 orang kali	30,414,560	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit/Buah		Unit/Buah	2 Unit/Buah	9,217,780						2 Unit/Buah	10,139,557	
6	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				2 Buah	9,217,780	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	2 Buah	10,139,557	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	260,254,117						12 Bulan	286,279,529	
6	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air Dan Listrik				12 bulan	235,141,117	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	12 bulan	258,655,229	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				36 Jenis	21,318,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	36 Jenis	23,449,800	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				10 orang	3,795,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	10 orang	4,174,500	Inspektorat Daerah
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	3 Unit	100,166,000						3 Unit	110,182,600	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Jabatan				3 Unit	100,166,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	3 Unit	110,182,600	Inspektorat Daerah
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Jumlah Temuan BPK Persentase pelanggaran pegawai Persentase tindak lanjut temuan	temuan % %		temuan % %	10 temuan 0 % 97 %	2,341,686,050						10 temuan 0 % 97 %	2,575,854,656	
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Pengawasan yang dilaksanakan	Obrik		Obrik	181 Obrik	2,174,706,050						181 Obrik	2,392,176,656	
6	01	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Reguler yang dilaksanakan sesuai PKPT				74 Obrik	1,124,494,525	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	74 Obrik	1,236,943,978	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				44 Obrik	240,350,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Inspektorat Kabupaten Karo	44 Obrik	264,385,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah reviu laporan kinerja				50 Laporan	440,770,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	50 Laporan	484,847,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	jumlah reviu laporan keuangan				6 Laporan	7,480,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	6 Laporan	8,228,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	05	Pengawasan Desa	Melaksanakan Pengawasan Pemerintah Desa				50 Desa	5,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	50 Desa	6,050,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksanya sosialisasi penerapan dan pengawasan Pemerintahan desa				5 Kegiatan	84,480,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	5 Kegiatan	92,928,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	jumlah laporan hasil pemutahiran data tindak lanjut temuan Inspektorat Provinsi, Inspektorat Daerah dan BPK RI				3 Laporan	271,631,525	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	3 Laporan	298,794,678	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu	Laporan		Laporan	20 Laporan	166,980,000						20 Laporan	183,678,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
6	01	02	2.02	01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Hasil Audit Investigasi				10 Laporan	137,940,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	10 Laporan	151,734,000	Inspektorat Daerah
6	01	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu				10 Laporan	29,040,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	10 Laporan	31,944,000	Inspektorat Daerah
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Temuan BPK Persentase pelanggaran pegawai Persentase tindak lanjut temuan	Temuan % %		Temuan % %	10 Temuan 0 % 97 %	417,791,550						10 Temuan 0 % 97 %	459,930,706	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Kebijakan Pegawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Buah		Buah	4 Buah	98,241,550						4 Buah	108,425,706	
6	01	03	2.01	01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Regulasi pengawasan				2 Buah	53,355,775	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	2 Buah	58,691,353	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.01	02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah dokumen keputusan				2 buah	44,885,775	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	2 buah	49,734,353	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi yang dilaksanakan	Kegiatan		Kegiatan	8 Kegiatan	319,550,000						8 Kegiatan	351,505,000	
6	01	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daera				3 Kegiatan	162,030,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	3 Kegiatan	178,233,000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	jumlah Pendampingan dan Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokerasi				3 Kegiatan	148,500,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	3 Kegiatan	163,350,000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan Hasil Pemeriksaan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	4,510,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	1 Kegiatan	4,961,000	Inspektorat Daerah
6	01	03	2.02	04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Laporan Monitoring				1 Laporan	4,510,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Inspektorat Kabupaten Karo	1 Laporan	4,961,000	Inspektorat Daerah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						700,000,000								1,177,326,880		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	700,000,000						5 Kegiatan	1,177,326,880			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana	Unit		Unit	4 Unit	700,000,000						4 Unit	1,177,326,880			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 Unit	509,328,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Unit	1,055,296,800	Kecamatan Kabanjahe		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				840 orang kali	190,672,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	840 orang kali	122,030,080	Kecamatan Kabanjahe		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						700,000,000								1,156,676,380		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	700,000,000						5 Kegiatan	1,156,676,380			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit		Unit	4 Unit	700,000,000						4 Unit	1,156,676,380			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 Unit	467,996,812	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel. Gung Negeri	4 Unit	1,020,875,300	Kecamatan Kabanjahe		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2000 orang/kali	232,003,188	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel. Gung Negeri	2000 orang/kali	135,801,080	Kecamatan Kabanjahe		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						700,000,000								1,413,445,243		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	700,000,000						5 Kegiatan	1,413,445,243			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit		Unit	3 Unit	700,000,000						3 Unit	1,413,445,243			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				3 Unit	567,199,869	Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel, Padang Mas	3 Unit	1,299,450,038	Kecamatan Kabanjahe		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1000 Orang/kali	132,800,131	Kab. Karo, Kabanjahe, Padang Mas	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel, Padang Mas	1000 Orang/kali	113,995,205	Kecamatan Kabanjahe		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						700,000,000								1,309,959,454		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	700,000,000						5 Kegiatan	1,309,959,454		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit		Unit	6 Unit	700,000,000						6 Unit	1,309,959,454		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan prasarana kelurahan				6 Unit	382,083,795	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel. Lau Cimba	6 Unit	883,403,590	Kecamatan Kabanjahe	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2000 orang/kali	317,916,205	Kab. Karo, Kabanjahe, Lau Cimba	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel. Lau Cimba	2000 orang/kali	426,555,864	Kecamatan Kabanjahe	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						700,000,000							1,149,034,043		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	700,000,000						5 Kegiatan	1,149,034,043		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Unit		Unit	10 Unit	700,000,000						10 Unit	1,149,034,043		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				4 Unit	459,608,036	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto				Masyarakat Kel. Gung Leto	4 Unit	1,007,442,072	Kecamatan Kabanjahe	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1100 orang kali	240,391,964	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Leto	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kel. Gung Leto	1100 orang kali	141,591,971	Kecamatan Kabanjahe	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						6,526,571,129							7,807,925,356		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks Indeks		Indeks Indeks	85 Indeks 85 Indeks	6,372,574,168						85 Indeks 85 Indeks	7,614,689,002		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	6,049,258,700						12 bulan	7,259,110,440		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	5,234,702,454	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	12 bulan	6,281,642,945	Kecamatan Kabanjahe	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				706 orang bulan	814,556,246	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	706 orang bulan	977,467,495	Kecamatan Kabanjahe	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut	Stel		Stel	40 Stel	30,000,000						40 Stel	3,600,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				40 stel	30,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	40 stel	3,600,000	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah		buah	2944 buah	118,773,543						2944 buah	142,528,252	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				3 jenis	3,250,294	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	3 jenis	3,900,353	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				43 jenis	51,908,929	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	43 jenis	62,290,715	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				15 jenis	7,335,920	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	15 jenis	8,803,104	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				4 jenis	8,374,400	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	4 jenis	10,049,280	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	perjalanan dinas				320 orang kali	47,904,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	320 orang kali	57,484,800	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel	Unit		Unit	8 Unit	36,364,919						8 Unit	43,637,903	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				8 buah	36,364,919	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	8 buah	43,637,903	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Honorarium Pegawai Tidak Tetap	orang bulan		orang bulan	9 orang bulan	24,627,006						9 orang bulan	29,552,407	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet, air dan listrik				9 bulan	9,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	9 bulan	10,800,000	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				5 unit	3,530,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	5 unit	4,236,000	Kecamatan Kabanjahe
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				9 orang bulan	12,097,006	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	9 orang bulan	14,516,407	Kecamatan Kabanjahe

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Unit		Unit	6 Unit	113,550,000						6 Unit	136,260,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas operasional atau lapangan				6 unit	113,550,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	6 unit	136,260,000	Kecamatan Kabanjahe
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	106,503,893						83 Indeks	127,804,672	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	orang/kali		orang/kali	350 orang/kali	106,503,893						350 orang/kali	127,804,672	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait				350 orang kali	18,550,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanajahe	350 orang kali	22,260,000	Kecamatan Kabanjahe
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan				1 kegiatan	87,953,893	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanajahe	1 kegiatan	105,544,672	Kecamatan Kabanjahe
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	%		%	83 %	9,890,000						83 %	11,868,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	9,890,000						1 Kegiatan	11,868,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	9,890,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	11,868,000	Kecamatan Kabanjahe

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan kebutuhan negara Kesatuan Republik Indoensia	Kali		Kali	1 Kali	32,303,068					1 Kali	38,763,682		
7	01	05			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kali		Kali	1 Kali	32,303,068					1 Kali	38,763,682		
7	01	05			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 kali	32,303,068	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	0	1 kali	38,763,682	Kecamatan Kabanjahe		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintah Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintah Desa		Pemerintah Desa	8 Pemerintah Desa	5,300,000					8 Pemerintah Desa	14,800,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pemerintahan desa		Pemerintahan desa	8 Pemerintahan desa	5,300,000						8 Pemerintahan desa	14,800,000			
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				8 pemerintahan desa	5,300,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kec. Kabanjahe	8 pemerintahan desa	14,800,000	Kecamatan Kabanjahe		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						2,909,300,629								2,815,703,829		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	2,694,459,532						85 Indeks	2,668,862,732			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,479,553,235						12 Bulan	2,479,553,235			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	2,376,922,735	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	12 Bulan	2,376,922,735	Kecamatan Barusjahe		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				96 Orang Bulan	102,630,500	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	96 Orang Bulan	102,630,500	Kecamatan Barusjahe		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	20,250,000						12 Bulan	20,250,000			
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				27 Stel	20,250,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	27 Stel	20,250,000	Kecamatan Barusjahe		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	120,860,168						12 Bulan	86,669,436			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan KantorBangunan Kantor				4 Jenis	4,160,295	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	4 Jenis	1,866,189	Kecamatan Barusjahe		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40 Jenis	52,023,230	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	40 Jenis	20,126,604	Kecamatan Barusjahe		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				14 Jenis	2,687,743	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	14 Jenis	2,687,743	Kecamatan Barusjahe
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	2,482,900	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	3 Jenis	2,482,900	Kecamatan Barusjahe
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				216 Orang Kali	59,506,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	216 Orang Kali	59,506,000	Kecamatan Barusjahe
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Buah		Unit Buah	4 Unit Buah	15,871,829						4 Unit Buah	16,394,476	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				4 Buah	15,871,829	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	4 Buah	16,394,476	Kecamatan Barusjahe
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	34,094,300						12 Bulan	34,094,300	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik Bulan				12 Bulan	16,500,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	12 Bulan	16,500,000	Kecamatan Barusjahe
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Unit	2,840,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	4 Unit	2,840,000	Kecamatan Barusjahe
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				12 Orang Bulan	14,754,300	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	12 Orang Bulan	14,754,300	Kecamatan Barusjahe
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	1 Unit	23,830,000						1 Unit	31,901,285	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	23,830,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Barusjahe	1 Unit	31,901,285	Kecamatan Barusjahe
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	80,401,548						85 Indeks	57,401,548	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	56,221,548						3 Kegiatan	33,221,548	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				200 Orang Kali	15,720,400	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Barusjahe	200 Orang Kali	12,720,400	Kecamatan Barusjahe
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	40,501,148	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan				Masyarakat Kecamatan Barusjahe	2 Kegiatan	20,501,148	Kecamatan Barusjahe
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Urusan		Urusan	8 Urusan	24,180,000						8 Urusan	24,180,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Kali	24,180,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Barusjahe	12 Kali	24,180,000	Kecamatan Barusjahe
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	30,340,800						5 Kegiatan	15,340,800	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	30,340,800						5 Kegiatan	15,340,800	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Kegiatan	30,340,800	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Barusjahe	5 Kegiatan	15,340,800	Kecamatan Barusjahe
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%		%	100 %	24,340,800						100 %	14,340,800	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	24,340,800						6 Kegiatan	14,340,800	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				18 Kegiatan	24,340,800	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Barusjahe	18 Kegiatan	14,340,800	Kecamatan Barusjahe

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	39,717,838					1 Urusan	30,717,838		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	39,717,838					1 Urusan	30,717,838		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 Kali	39,717,838	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kecamatan Barusjahe	1 Kali	30,717,838	Kecamatan Barusjahe		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	40,040,111					19 Pemerintahan Desa	29,040,111		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	40,040,111					19 Pemerintahan Desa	29,040,111		
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Di Fasilitasi				38 Perdes dan Perkades	15,890,111	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Desa Se- Kecamatan Barusjahe	38 Perdes dan Perkades	13,890,111	Kecamatan Barusjahe	
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi				19 Pemerintahan Desa	24,150,000	Kab. Karo, Barusjahe, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Pemerintahan Desa Se- Kecamatan Barusjahe	19 Pemerintahan Desa	15,150,000	Kecamatan Barusjahe	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						2,973,110,015						3,022,890,528		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	2,758,076,918						83 Indeks	2,933,900,528	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,553,320,939						12 Bulan	2,787,344,087	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan				12 Bulan	2,481,180,939	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	12 Bulan	2,700,044,087	Kecamatan Merek
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				96 orang bulan	72,140,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	96 orang bulan	87,300,000	Kecamatan Merek
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian dinas beserta aribut	Stel		Stel	15 Stel	15,000,000						15 Stel	15,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				25 stel	15,000,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Merek	25 stel	15,000,000	Kecamatan Merek
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis		Jenis	13 Jenis	101,135,979						13 Jenis	76,621,402	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				13 Jenis	818,076	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	13 Jenis	17,164,602	Kecamatan Merek
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				41 jenis	58,196,225	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	41 jenis	4,850,000	Kecamatan Merek
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga				101 Jenis	3,051,954	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	101 Jenis	850,000	Kecamatan Merek
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan				2 jenis	1,897,724	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	2 jenis	2,850,800	Kecamatan Merek
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				106 orang kali	37,172,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	106 orang kali	50,906,000	Kecamatan Merek
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		Bulan	12 Bulan	67,320,000						12 Bulan	36,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	7,800,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	12 Bulan	12,000,000	Kecamatan Merek
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				48 Orang Bulan	59,520,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	48 Orang Bulan	24,000,000	Kecamatan Merek
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Unit		Unit	1 Unit	21,300,000						1 Unit	18,935,039	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	21,300,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	1 Unit	18,935,039	Kecamatan Merek
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	73,570,000						83 Indeks	27,740,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Orang Kali		Orang Kali	250 Orang Kali	26,050,000						250 Orang Kali	12,340,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				150 Orang Kali	26,050,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	150 Orang Kali	12,340,000	Kecamatan Merek
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Urusan		Urusan	24 Urusan	47,520,000						24 Urusan	15,400,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 kali	47,520,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Merek	8 kali	15,400,000	Kecamatan Merek
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentasi penegakan Perda dan Perkada	%		%	20 %	37,350,000						20 %	23,800,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	37,350,000					1 Kegiatan	23,800,000			
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI, dan Instansi Vertkal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	37,350,000	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kecamatan Merek	1 Kegiatan	23,800,000	Kecamatan Merek		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	104,113,097					1 Urusan	37,450,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kali	Kali	1 Kali	104,113,097						1 Kali	37,450,000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			2 kali	104,113,097	Kab. Karo, Merek, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kecamatan Merek	2 kali	37,450,000	Kecamatan Merek			
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						2,382,386,885							2,434,663,560		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	2,136,931,720						83 Indeks	2,334,663,560	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,919,066,873						12 Bulan	2,110,973,560	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	1,835,366,873	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Munte	12 Bulan	2,018,903,560	Kecamatan Munte
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				132 Orang Bulan	83,700,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Munte	132 Orang Bulan	92,070,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	12,768,000						12 Bulan	16,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				19 Stel	12,768,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Munte	19 Stel	16,000,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	98,378,847						12 Bulan	107,500,000	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				40 Jenis	27,971,563	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	40 Jenis	35,500,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				10 Jenis	3,542,684	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	10 Jenis	4,000,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	4,862,600	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	3 Jenis	3,000,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				404 Orang Kali	62,002,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	404 Orang Kali	65,000,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	66,720,000						12 Bulan	72,140,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	17,400,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	12 Bulan	19,140,000	Kecamatan Munte

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				6 unit	4,380,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	6 unit	3,500,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				36 Orang Bulan	44,940,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	36 Orang Bulan	49,500,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	unit		unit	2 unit	39,998,000						2 unit	28,050,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				1 Unit	25,500,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	1 Unit	28,050,000	Kecamatan Munte
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1 unit	14,498,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Munte	1 unit	0	Kecamatan Munte
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks		indeks	83 indeks	139,889,165						83 indeks	30,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	70,900,000						3 Kegiatan	15,000,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				350 Orang Kali	22,700,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Munte	350 Orang Kali	5,000,000	Kecamatan Munte
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan				2 Kegiatan	48,200,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kantor Camat Munte	2 Kegiatan	10,000,000	Kecamatan Munte
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Urusan		Urusan	8 Urusan	46,080,000						8 Urusan	15,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				8 Kali	46,080,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Munte	8 Kali	15,000,000	Kecamatan Munte
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum yang dikoordinasikan Pemeliharaannya	Unit		Unit	1 Unit	22,909,165						1 Unit	0	
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta				1 unit	22,909,165	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Munte	1 unit	0	Kecamatan Munte
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%		%	100 %	15,080,000						100 %	20,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan dalam Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	10,080,000						6 Kegiatan	10,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergisitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				10 kegiatan	10,080,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Munte	10 kegiatan	10,000,000	Kecamatan Munte
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Perda dan Perkada yang Dikoordinasikan Penerapan dan Penegakannya	Perda dan Perkada		Perda dan Perkada	4 Perda dan Perkada	5,000,000						4 Perda dan Perkada	10,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				4 kali	5,000,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Munte	4 kali	10,000,000	Kecamatan Munte
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	67,446,000						1 Urusan	45,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang Diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	67,446,000					1 Urusan	45,000,000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 Kali	67,446,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Masyarakat Kecamatan Munte	1 Kali	45,000,000	Kecamatan Munte			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang Dibina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	22 Pemerintahan Desa	23,040,000					22 Pemerintahan Desa	5,000,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang Difasilitasi, yang Diberi Rekomendasi dan yang Dikoordinasikan Pembinaan dan Pengawasan	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	22 Pemerintahan Desa	23,040,000					22 Pemerintahan Desa	5,000,000			
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan				22 Pemerintahan Desa	23,040,000	Kab. Karo, Munte, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	0		22 Pemerintahan Desa	5,000,000	Kecamatan Munte		
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						3,384,766,813							3,515,267,473		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	3,107,737,580					85 Indeks	3,182,832,393			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	2,889,963,516					12 bulan	2,921,503,516			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	2,732,263,516	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kecamatan Juhar	12 Bulan	2,732,263,516	Kecamatan Juhar		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				151 orang bulan	157,700,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	151 orang bulan	189,240,000	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	buah		buah	34 buah	154,074,064						34 buah	184,888,877	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				36 jenis	50,524,064	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	36 jenis	60,628,877	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	peralatan rumah tangga				15 jenis	4,710,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	15 jenis	5,652,000	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetak dan penggandaan				2 jenis	6,680,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	2 jenis	8,016,000	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				360 buah	2,160,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	360 buah	2,592,000	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				436 orang kali	90,000,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	436 orang kali	108,000,000	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		bulan	12 bulan	32,400,000						12 bulan	38,880,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	telepon, internet, air, dan listrik				12 bulan	18,000,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	12 bulan	21,600,000	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium pegawai tidak tetap				12 orang bulan	14,400,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	12 orang bulan	17,280,000	Kecamatan Juhar
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	unit		unit	1 unit	31,300,000						1 unit	37,560,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	31,300,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	1 unit	37,560,000	Kecamatan Juhar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	158,314,533						85 Indeks	189,977,440	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	orang kali		orang kali	200 orang kali	74,074,533						200 orang kali	88,889,440	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				200 orang kali	38,504,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	200 orang kali	46,204,800	Kecamatan Juhar
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 kegiatan	35,570,533	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	3 kegiatan	42,684,640	Kecamatan Juhar
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kali		kali	36 kali	84,240,000						36 kali	101,088,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				36 kali	84,240,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			kecamatan Juhar	36 kali	101,088,000	Kecamatan Juhar
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda/Perkada	%		%	20 %	37,350,000						20 %	44,820,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	kali		kali	1 kali	37,350,000						1 kali	44,820,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	37,350,000	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Juhar	1 Kegiatan	44,820,000	Kecamatan Juhar

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah yang diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	81,364,700						1 Urusan	97,637,640		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kali		kali	1 kali	81,364,700						1 kali	97,637,640		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 kali	81,364,700	Kab. Karo, Juhar, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Juhar	1 kali	97,637,640	Kecamatan Juhar		
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						3,491,531,594							4,260,113,791		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	91 Indeks	3,266,293,807						91 Indeks	3,989,828,447		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	156 Bulan	3,064,414,715						156 Bulan	3,677,297,658		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	2,770,071,267	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	12 bulan	3,324,085,520	Kecamatan Tigabinanga	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				144 orang bulan	294,343,448	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	144 orang bulan	353,212,138	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	106,058,374						12 Bulan	127,270,049	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 Jenis	750,928	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	12 Jenis	901,114	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 Jenis	25,485,104	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	8 Jenis	30,582,125	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				14 Jenis	1,624,432	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	14 Jenis	1,949,318	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				2 Jenis	3,197,910	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	2 Jenis	3,837,492	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				233 Orang Kali	75,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	233 Orang Kali	90,000,000	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	60,028,718						12 Bulan	97,124,924	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bulan	30,600,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	12 bulan	36,720,000	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor				3 Unit	4,260,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	3 Unit	30,202,462	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				12 orang bulan	25,168,718	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	12 orang bulan	30,202,462	Kecamatan Tigabinanga
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	2 Unit	35,792,000						2 Unit	88,135,816	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	35,792,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tigabinanga	2 Unit	88,135,816	Kecamatan Tigabinanga
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	70,946,513						83 Indeks	85,135,816	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	212 Kegiatan	70,946,513						212 Kegiatan	85,135,816	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Orang Kali	18,920,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	12 Orang Kali	22,704,000	Kecamatan Tigabinanga
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				200 Kegiatan	52,026,513	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	200 Kegiatan	62,431,816	Kecamatan Tigabinanga
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat Penegakan Perda dan Perkada	%		%	20 %	23,620,000						20 %	28,344,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	20 Kegiatan	23,620,000						20 Kegiatan	28,344,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				20 Kegiatan	23,620,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	20 Kegiatan	28,344,000	Kecamatan Tigabinanga
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	2 Urusan	56,336,822						2 Urusan	67,604,186	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepala daerah yang diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	56,336,822						1 Urusan	67,604,186				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 kali	56,336,822	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	1 kali	67,604,186	Kecamatan Tigabinanga				
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	74,334,452						19 Pemerintahan Desa	89,201,342				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi, yang diberi rekomendasi dan dikoordinasikan pembinaan dan pengawasannya	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	19 Pemerintahan Desa	74,334,452						19 Pemerintahan Desa	89,201,342				
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				19 Pemerintahan Desa	74,334,452	Kab. Karo, Tigabinanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigabinanga	19 Pemerintahan Desa	89,201,342	Kecamatan Tigabinanga			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						700,000,000								840,000,000			
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	700,000,000						19 Kegiatan	840,000,000				
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan kelurahan di Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	14 Kegiatan	700,000,000						14 Kegiatan	840,000,000				
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				14 Unit	637,169,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kelurahan Tigabinanga	14 Unit	764,602,800	Kecamatan Tigabinanga			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 orang kali	62,831,000	Kab. Karo, Tigabinanga, Tiga Binanga	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat di Kelurahan Tigabinanga	100 orang kali	75,397,200	Kecamatan Tigabinanga		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						2,502,354,025								2,498,714,025		
7		01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88 Indeks	2,329,419,685						88 Indeks	2,309,279,685			
7		01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,100,035,669						12 Bulan	2,100,035,669			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	2,037,675,669	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	12 Bulan	2,037,675,669	Kecamatan Laubaleng		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				88 orang bulan	62,360,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	88 orang bulan	62,360,000	Kecamatan Laubaleng		
7		01	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	13,000,000						12 Bulan	13,000,000			
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	3,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Laubaleng	1 Unit	3,000,000	Kecamatan Laubaleng		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut				20 Stel	10,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Laubaleng	20 Stel	10,000,000	Kecamatan Laubaleng		
7		01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	79,244,016						12 Bulan	79,244,016			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	2,702,774	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	5 Jenis	2,702,774	Kecamatan Laubaleng		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25 Jenis	21,541,242	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	25 Jenis	21,541,242	Kecamatan Laubaleng		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				10 jenis	4,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	10 jenis	4,000,000	Kecamatan Laubaleng		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				3 jenis	4,200,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	3 jenis	4,200,000	Kecamatan Laubaleng		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				148 Orang Kali	46,800,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	148 Orang Kali	46,800,000	Kecamatan Laubaleng		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Buah		Unit Buah	5 Unit Buah	18,500,000						5 Unit Buah	18,500,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				4 Unit	8,500,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Laubaleng	4 Unit	8,500,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya				1 Unit	10,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Laubaleng	1 Unit	10,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	75,020,000						12 Bulan	38,500,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 bulan	10,300,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	12 bulan	18,500,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor				5 Unit	4,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	5 Unit	8,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				48 Orang Bulan	60,720,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	48 Orang Bulan	12,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dipelihara	Unit		Unit	2 Unit	43,620,000						2 Unit	60,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Jabatan				1 unit	23,620,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	1 unit	40,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan				1 Unit	20,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN KECAMATAN LAUBALENG	1 Unit	20,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	88 Indeks	24,000,000						88 Indeks	40,500,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	8,000,000						3 Kegiatan	24,500,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				180 orang kali	4,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	180 orang kali	4,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 kali	4,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	12 kali	20,500,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Urusan		Urusan	8 Urusan	2,000,000						8 Urusan	2,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 kali	2,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	12 kali	2,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah sarana dan prasarana pelayanan umum yang dikoordinasikan pemeliharaanya	Unit		Unit	6 Unit	8,000,000						6 Unit	8,000,000	
7	01	02	2.03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 Kali	4,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	12 Kali	4,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				1 Unit	4,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	1 Unit	4,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah layanan perizinan, non perizinan dan kewenangan lainnya.	Urusan		Urusan	8 Urusan	6,000,000						8 Urusan	6,000,000	
7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait				2 Urusan	2,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	2 Urusan	2,000,000	Kecamatan Laubaleng

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan				5 Urusan	2,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	5 Urusan	2,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Urusan	2,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	1 Urusan	2,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	18,000,000						5 Kegiatan	18,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	18,000,000						5 Kegiatan	18,000,000	
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100 orang kali	18,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	100 orang kali	18,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penegakan Perda dan Perkada	Perda dan Perkada		Perda dan Perkada	20 Perda dan Perkada	71,034,340						20 Perda dan Perkada	71,034,340	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	20 Kegiatan	71,034,340						20 Kegiatan	71,034,340	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	71,034,340	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	1 Kegiatan	71,034,340	Kecamatan Laubaleng
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	19,900,000						1 Urusan	19,900,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kali		kali	1 kali	19,900,000					1 kali	19,900,000		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 kali	19,900,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	1 kali	19,900,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	15 Pemerintahan Desa	40,000,000						15 Pemerintahan Desa	40,000,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasaannya	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	15 Pemerintahan Desa	40,000,000						15 Pemerintahan Desa	40,000,000	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Di Fasilitasi				30 Perdes dan Perkades	15,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	30 Perdes dan Perkades	15,000,000	Kecamatan Laubaleng
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi				15 Pemerintahan Desa	10,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	15 Pemerintahan Desa	10,000,000	Kecamatan Laubaleng

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi				15 Pemerintahan Desa	15,000,000	Kab. Karo, Laubaleng, Lau Baleng	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Laubaleng	15 Pemerintahan Desa	15,000,000	Kecamatan Laubaleng	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						2,431,584,521							2,476,404,967		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	2,290,008,249						85 Indeks	2,304,404,967		
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,115,964,967						12 Bulan	2,115,964,967		
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	2,047,984,967	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	12 Bulan	2,047,984,967	Kecamatan Mardinding	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				12 Bulan	67,980,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	12 Bulan	67,980,000	Kecamatan Mardinding	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Beserta Atribut Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Stel Stel Stel		Stel Stel Stel	18 Stel 18 Stel 18 Stel	15,000,000						18 Stel 18 Stel 18 Stel	17,000,000		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				18 Stel	15,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	18 Stel	17,000,000	Kecamatan Mardinding	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	74,003,282						12 Bulan	82,000,000		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	1,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	5 Jenis	1,800,000	Kecamatan Mardinding	
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30 Jenis	18,503,282	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	30 Jenis	20,000,000	Kecamatan Mardinding	
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				10 Jenis	2,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	10 Jenis	2,500,000	Kecamatan Mardinding	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				3 Jenis	2,500,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	3 Jenis	2,700,000	Kecamatan Mardinding
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				170 Orang Kali	50,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	170 Orang Kali	55,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Buah		Unit Buah	4 Unit Buah	8,000,000						4 Unit Buah	10,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				4 Buah	8,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Mardinding	4 Buah	10,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	55,540,000						12 Bulan	56,440,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	9,600,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	12 Bulan	10,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor				4 Unit	1,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	4 Unit	1,500,000	Kecamatan Mardinding
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				48 Orang Bulan	44,940,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	48 Orang Bulan	44,940,000	Kecamatan Mardinding
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	3 Unit	21,500,000						3 Unit	23,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Jabatan				1 Unit	21,500,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Mardinding	1 Unit	23,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	84,000,000						85 Indeks	102,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	72,000,000						3 Kegiatan	87,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				200 orang kali	12,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	200 orang kali	15,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				4 Kegiatan	60,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 Kegiatan	72,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan unit kerja perangkat daerah yang ada dikecamatan	Urusan		Urusan	8 Urusan	12,000,000						8 Urusan	15,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 kali	12,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Mardinding	12 kali	15,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	14 Kegiatan	9,576,272						14 Kegiatan	12,000,000	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kegiatan pemberdayaan desa yang dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	14 Kegiatan	9,576,272						14 Kegiatan	12,000,000	
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Kegiatan	9,576,272		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	12 Kegiatan	12,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	Persen		Persen	80 Persen	18,000,000						80 Persen	23,000,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan keamaan dan ketertiban umum	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	12,000,000						1 Kegiatan	15,000,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia , Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	12,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	15,000,000	Kecamatan Mardinding
7	01	04	2.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	kegiatan dalam upaya penyelenggaraan keamaan dan ketertiban umum	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	6,000,000						1 Kegiatan	8,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	04	2.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 kali	6,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Mardinding	2 kali	8,000,000	Kecamatan Mardinding		
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	30,000,000						1 Urusan	35,000,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	urusan pemerintahan umum sesuai dengan penugasan kepada daerah yang diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	30,000,000						1 Urusan	35,000,000			
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Kegiatan	30,000,000	Kab. Karo, Mardinding, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 Kegiatan	35,000,000	Kecamatan Mardinding		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						2,067,444,235								3,637,844,522		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	1,961,141,120						85 Indeks	1,957,391,120			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,776,257,363						12 Bulan	1,776,257,363			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji Dan Tunjangan ASN				12 Bulan	1,668,707,363	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	12 Bulan	1,668,707,363	Kecamatan Payung		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				99 Orang Bulan	107,550,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	99 Orang Bulan	107,550,000	Kecamatan Payung		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Stel		Stel	20 Stel	15,000,000						20 Stel	20,250,000			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut				20 Stel	15,000,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Pendapatan Pajak Daerah			ASN Kec.Payung	20 Stel	20,250,000	Kecamatan Payung
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	100,838,757						12 Bulan	100,838,757	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35 Buah	4,342,505	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	35 Buah	4,342,505	Kecamatan Payung
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				877 Buah	47,769,714	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	877 Buah	47,769,714	Kecamatan Payung
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				200 Buah	5,712,438	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	200 Buah	5,712,438	Kecamatan Payung
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	3,014,100	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	2 Jenis	3,014,100	Kecamatan Payung
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				148 Orang Hari Kali	40,000,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	148 Orang Hari Kali	40,000,000	Kecamatan Payung
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	39,920,000						12 Bulan	39,920,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	16,500,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	12 Bulan	16,500,000	Kecamatan Payung
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				4 Unit	2,840,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	4 Unit	2,840,000	Kecamatan Payung
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				12 Orang Bulan	20,580,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	12 Orang Bulan	20,580,000	Kecamatan Payung
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Unit		Unit	1 Unit	29,125,000						1 Unit	20,125,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	29,125,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	1 Unit	20,125,000	Kecamatan Payung
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	31,220,400						85 Indeks	40,221,548	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	15,720,400						3 Kegiatan	36,221,548	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				90 Orang Kali	15,720,400	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Payung	90 Orang Kali	15,720,400	Kecamatan Payung
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	0	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Payung	2 Kegiatan	20,501,148	Kecamatan Payung
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kali		Kali	12 Kali	15,500,000						12 Kali	4,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Kali	15,500,000	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamtan Payung	12 Kali	4,000,000	Kecamatan Payung
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%		%	100 %	40,501,148						100 %	24,340,800	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	20 Kegiatan	40,501,148						20 Kegiatan	24,340,800	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum				20 Kegiatan	40,501,148	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	20 Kegiatan	24,340,800	Kecamatan Payung

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	26,879,967						1 Urusan	26,879,967	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	26,879,967						1 Urusan	26,879,967	
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 Kali	26,879,967	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Payung	1 Kali	26,879,967	Kecamatan Payung	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	20 Pemerintahan Desa	7,701,600						20 Pemerintahan Desa	1,589,011,087	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintah Desa		Pemerintah Desa	20 Pemerintah Desa	7,701,600						20 Pemerintah Desa	1,589,011,087	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Pemerintahan Desa yang difasilitasi				8 Pemerintahan Desa	7,701,600	Kab. Karo, Payung, Semua Kelurahan				0	8 Pemerintahan Desa	1,589,011,087	Kecamatan Payung
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						3,098,433,359							3,718,120,031	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	2,904,321,640						85 Indeks	3,485,185,968	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	2,706,096,557						12 bulan	3,247,315,868	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	2,566,766,557	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	12 bulan	3,080,119,868	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				144 orang bulan	139,330,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	144 orang bulan	167,196,000	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	128,488,923						12 bulan	154,186,708	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				12 jenis	1,120,380	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	12 jenis	1,344,456	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				8 jenis	54,975,473	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	8 jenis	65,970,568	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga				14 jenis	1,985,820	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	14 jenis	2,382,984	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				2 jenis	3,067,250	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	2 jenis	3,680,700	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				233 orang kali	67,340,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	233 orang kali	80,808,000	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	bulan		bulan	12 bulan	38,146,140						12 bulan	45,775,368	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon,Internet,Air dan Listrik				12 bulan	20,400,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	12 bulan	24,480,000	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				1 unit	2,500,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	1 unit	3,000,000	Kecamatan Simpang Empat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				12 orang bulan	15,246,140	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	12 orang bulan	18,295,368	Kecamatan Simpang Empat
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit		unit	1 unit	31,590,020						1 unit	37,908,024	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	31,590,020	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Simpang Empat	1 unit	37,908,024	Kecamatan Simpang Empat
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	85 Indeks	101,678,704						85 Indeks	122,014,445	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	kegiatan		kegiatan	4 kegiatan	54,878,704						4 kegiatan	65,854,445	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 orang kali	22,324,510	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	1 orang kali	26,789,412	Kecamatan Simpang Empat
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				3 kegiatan	32,554,194	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Simpang Empat	3 kegiatan	39,065,033	Kecamatan Simpang Empat
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	bulan		bulan	12 bulan	46,800,000						12 bulan	56,160,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 kali	46,800,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Simpang Empat	12 kali	56,160,000	Kecamatan Simpang Empat
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentasi Penegakan Perda dan Perkada	%		%	20 %	27,050,000						20 %	32,460,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	kegiatan		kegiatan	2 kegiatan	27,050,000					2 kegiatan	32,460,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				2 kegiatan	27,050,000	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Kantor Camat Simpang Empat	2 kegiatan	32,460,000	Kecamatan Simpang Empat	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	urusan		urusan	1 urusan	65,383,015					1 urusan	78,459,618		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kali		kali	1 kali	65,383,015					1 kali	78,459,618		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 kali	65,383,015	Kab. Karo, Simpang Empat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Kantor Camat Simpang Empat	1 kali	78,459,618	Kecamatan Simpang Empat		
7					UNSUR KEWILAYAHAN														

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01				KECAMATAN						3,071,684,888			3,896,914,933					
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	2,888,033,859						83 Indeks	3,680,289,933	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,694,179,608						12 Bulan	3,471,195,533	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	2,622,019,608	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	12 Bulan	3,399,035,533	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				84 Orang Bulan	72,160,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	84 Orang Bulan	72,160,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Stel Stel		Stel Stel	30 Stel 30 Stel	28,500,000						30 Stel 30 Stel	34,000,000	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	9,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan			Peningkatan Ekonomi Masyarakat	ASN kantor camat Kutabuluh	1 Unit	9,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				30 Stel	19,500,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN kantor camat Kutabuluh	30 Stel	25,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah		buah	15 buah	70,469,651						15 buah	96,714,400	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				15 jenis	1,042,400	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Kutabuluh	15 jenis	1,042,400	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				50 Jenis	25,580,251	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Kutabuluh	50 Jenis	40,000,000	Kecamatan Kutabuluh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				15 jenis	3,372,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Kutabuluh	15 jenis	3,372,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				300 jenis	1,945,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Kutabuluh	300 jenis	2,300,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				150 Orang Kali	38,530,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Kutabuluh	150 Orang Kali	50,000,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit Unit		Unit Unit	6 Unit 14 Unit	31,820,000						6 Unit 14 Unit	11,500,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	mebeulaur				10 Buah	6,900,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Kantor Camat Kutabuluh	10 Buah	0	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				4 Buah	24,920,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Kutabuluh	4 Buah	11,500,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	43,322,000						12 Bulan	36,855,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	12,600,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor camat Kutabuluh	12 Bulan	16,675,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor				6 Unit	962,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor camat Kutabuluh	6 Unit	5,000,000	Kecamatan Kutabuluh

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				24 OB	29,760,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor camat Kutabuluh	24 OB	15,180,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	6 Unit	19,742,600						6 Unit	30,025,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	19,742,600	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor Camat Kutabuluh	2 Unit	30,025,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	76,141,029						83 Indeks	91,540,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	29,050,000						2 Kegiatan	70,840,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Kali	6,450,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor camat Kutabuluh	1 Kali	7,590,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				1 Kali	22,600,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor camat Kutabuluh	1 Kali	63,250,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						18,000,000							20,700,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				18 Kali	18,000,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kantor camat Kutabuluh	18 Kali	20,700,000	Kecamatan Kutabuluh
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Unit		Unit	1 Unit	29,091,029						1 Unit	0	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
														Nasional					Daerah
7	01	02	2.03	02	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta			1 Unit	29,091,029	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	0	1 Unit	0	Kecamatan Kutabuluh	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda/ Perkada dan Ketertiban Umum	%		%	20 %	66,155,000					20 %	66,155,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat Jumlah Kegiatan Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Kegiatan		Kegiatan Kegiatan	1 Kegiatan 1 Kegiatan	66,155,000					1 Kegiatan 1 Kegiatan	66,155,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan			200 orang kali	21,800,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	200 orang kali	21,800,000	Kecamatan Kutabuluh	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat			2 Kegiatan	44,355,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	2 Kegiatan	44,355,000	Kecamatan Kutabuluh	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	34,175,000					1 Urusan	51,750,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	34,175,000					1 Urusan	51,750,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 kali	34,175,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Kecamatan Kutabuluh	1 kali	51,750,000	Kecamatan Kutabuluh			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa yang Di bina dan Diawasi	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	16 Pemerintahan Desa	7,180,000							16 Pemerintahan Desa	7,180,000			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan	kali		kali	2 kali	7,180,000							2 kali	7,180,000			
7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Pedesaan di Wilayah kecamatan				2 kali	7,180,000	Kab. Karo, Kutabuluh, Semua Kelurahan			0		2 kali	7,180,000	Kecamatan Kutabuluh			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						2,048,401,925								2,048,401,925			
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	95 Indeks	1,974,759,077							95 Indeks	1,974,759,077			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	1,751,013,801							12 Bulan	1,751,013,801			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	1,681,773,801	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	12 Bulan	1,681,773,801	Kecamatan Dolat Rayat			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				96 Orang Bulan	69,240,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	96 Orang Bulan	69,240,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	29,900,000						12 Bulan	29,900,000	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	14,950,000		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	1 Unit	14,950,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				27 Stel	14,950,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	27 Stel	14,950,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	51,815,276						12 Bulan	51,815,276	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				4 Jenis	1,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	4 Jenis	1,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				27 Jenis	7,887,375	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	27 Jenis	7,887,375	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				17 Jenis	1,999,901	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	17 Jenis	1,999,901	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	2,500,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	3 Jenis	2,500,000	Kecamatan Dolat Rayat

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				216 Orang/ Kali	38,428,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	216 Orang/ Kali	38,428,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit		Unit	1 Unit	9,000,000						1 Unit	9,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				4 Buah	9,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	4 Buah	9,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	113,230,000						12 Bulan	113,230,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet Air dan Listrik				12 Bulan	18,750,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	12 Bulan	18,750,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 Unit	4,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	4 Unit	4,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	honorarium Pegawai Tidak Tetap				72 Orang Bulan	90,480,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	72 Orang Bulan	90,480,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di Pelihara	Unit Unit		Unit Unit	1 Unit 1 Unit	19,800,000						1 Unit 1 Unit	19,800,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				1 unit	19,800,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	1 unit	19,800,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	95 Indeks	27,984,000						95 Indeks	27,984,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Orang Kali		Orang Kali	200 Orang Kali	18,984,000						200 Orang Kali	18,984,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				200 Orang/ Kali	9,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	200 Orang/ Kali	9,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan di Tingkat Kecamatan				1 Kali	9,984,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	1 Kali	9,984,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	9,000,000						1 Urusan	9,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Kali	9,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	1 Kali	9,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan KelurahanDesa yang di Koordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	9,000,000						1 Kegiatan	9,000,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kegiatan Pemberdayaan Desa yang di Koordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	9,000,000					1 Kegiatan	9,000,000		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Kegiatan	9,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan	9,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	14,520,435					1 Kegiatan	14,520,435		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	14,520,435					2 Kegiatan	14,520,435		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan InstansiVertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	9,520,435		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan	9,520,435	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kegiatan harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan	5,000,000	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	1 Kegiatan	5,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	9,479,565					1 Urusan	9,479,565		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kali		Kali	1 Kali	9,479,565					1 Kali	9,479,565		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 Kali	9,479,565	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Meningkatnya pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraa n pemerintah daerah dan Desa	1 Kali	9,479,565	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	7 Pemerintahan Desa	12,658,848						7 Pemerintahan Desa	12,658,848	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi yang diberi Rekomendasi dan di Koordinasi Pembinaan dan Pengawasannya	Pemerintahan Desa		Pemerintahan Desa	7 Pemerintahan Desa	12,658,848						7 Pemerintahan Desa	12,658,848	
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang di Fasilitasi				7 Perdes dan Perkades	5,000,000		Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	7 Perdes dan Perkades	5,000,000	Kecamatan Dolat Rayat
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang di Fasiilitasi				7 Pemerintahan Desa	7,658,848	Kab. Karo, Dolat Rayat, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	0	7 Pemerintahan Desa	7,658,848	Kecamatan Dolat Rayat
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN						2,265,163,136							2,718,195,763	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	2,102,881,485						83 Indeks	2,523,457,782	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	1,925,932,158						12 bulan	2,311,118,590	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 bulan	1,857,512,158	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	12 bulan	2,229,014,590	Kecamatan Namanteran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				88 orang bulan	68,420,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	88 orang bulan	82,104,000	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pakaian dinas beserta atribut	stel stel		stel stel	19 stel 19 stel	14,250,000						19 stel 19 stel	17,100,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta atribut				19 stel	14,250,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Naman Teran	19 stel	17,100,000	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	jenis		jenis	7 jenis	78,120,527						7 jenis	93,744,632	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor				15 jenis	2,035,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	15 jenis	2,442,000	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor				33 jenis	14,217,987	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	33 jenis	17,061,584	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan rumah tangga				11 jenis	2,530,040	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	11 jenis	3,036,048	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan				2 jenis	1,373,500	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	2 jenis	1,648,200	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan dinas				433 orang kali	57,964,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	433 orang kali	69,556,800	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah mebel Mebeleur	unit buah		unit buah	3 unit 3 buah	6,928,800						3 unit 3 buah	8,314,560	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				3 buah	6,928,800	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	3 buah	8,314,560	Kecamatan Namanteran

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan		bulan	12 bulan	49,050,000						12 bulan	58,860,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet, air & listrik				12 bulan	9,450,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	12 bulan	11,340,000	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium pegawai tidak tetap				35 orang bulan	39,600,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	35 orang bulan	47,520,000	Kecamatan Namanteran
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan	unit unit		unit unit	4 unit 4 unit	28,600,000						4 unit 4 unit	34,320,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas operasional atau lapangan				4 unit	28,600,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			0	4 unit	34,320,000	Kecamatan Namanteran
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	60,500,000						83 Indeks	72,600,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	orang kali		orang kali	200 orang kali	20,900,000						200 orang kali	25,080,000	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				200 orang kali	20,900,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	200 orang kali	25,080,000	Kecamatan Namanteran
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kali		kali	12 kali	39,600,000						12 kali	47,520,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 kali	39,600,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	12 kali	47,520,000	Kecamatan Namanteran
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentasi penegakan Perda dan Perkada	%		%	100 %	20,900,000						100 %	25,080,000	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	kegitan kegiatan		kegitan kegiatan	1 kegitan 1 kegiatan	20,900,000						1 kegitan 1 kegiatan	25,080,000	
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan sinergitas dengan kepolisian negara RI, TNI, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan				1 kegiatan	20,900,000	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 kegiatan	25,080,000	Kecamatan Namanteran
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	2 Urusan	80,881,651						2 Urusan	97,057,981	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kali		kali	1 kali	80,881,651						1 kali	97,057,981	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 kali	80,881,651	Kab. Karo, Naman Teran, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Kecamatan Naman Teran	1 kali	97,057,981	Kecamatan Namanteran		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						2,985,989,591								2,954,989,591		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	93 Indeks	2,791,941,872						93 Indeks	2,791,941,872			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	2,576,242,937						12 Bulan	2,576,242,937			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	2,523,042,937	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	12 Bulan	2,523,042,937	Kecamatan Tiganderket		
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				84 Orang Bulan	53,200,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	84 Orang Bulan	53,200,000	Kecamatan Tiganderket		
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	25,500,000						12 Bulan	19,500,000			
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Mesin Absensi				1 buah	6,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	1 buah	0	Kecamatan Tiganderket		
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				30 Stel	19,500,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	30 Stel	19,500,000	Kecamatan Tiganderket		
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	72,418,935						12 Bulan	72,418,935			
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	2,080,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	5 Jenis	2,080,000	Kecamatan Tiganderket		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				25 Jenis	15,238,935	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	25 Jenis	15,238,935	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				10 Jenis	4,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	10 Jenis	4,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				3 Jenis	2,500,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	3 Jenis	2,500,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan dan Minum				720 Orang Kali	3,600,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	720 Orang Kali	3,600,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				450 Orang Kali	45,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	450 Orang Kali	45,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Adanya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daera Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	buah Unit		buah Unit	12 buah 12 Unit	36,000,000						12 buah 12 Unit	42,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				10 buah	18,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	10 buah	18,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Bertambah				2 Buah	18,000,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Gung Negeri	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	2 Buah	24,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan bulan		Bulan bulan	12 Bulan 12 bulan	55,780,000						12 Bulan 12 bulan	55,780,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, Internet, Air dan Listrik				12 Bulan	7,200,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	12 Bulan	7,200,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor				5 Unit	4,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	5 Unit	4,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				48 Orang Bulan	44,580,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	48 Orang Bulan	44,580,000	Kecamatan Tiganderket

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Dipelihara Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Unit unit		Unit unit	2 Unit 2 unit	26,000,000					2 Unit 2 unit	26,000,000		
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	26,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Pegawai Kantor Camat Tiganderket	2 Unit	26,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	93 Indeks	12,600,000					93 Indeks	12,600,000		
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	1 Kegiatan	12,600,000					1 Kegiatan	12,600,000		
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				720 Orang Kali	12,600,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Tiganderket dan Pemerintah Desa	720 Orang Kali	12,600,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	29,000,000					2 Kegiatan	24,000,000		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Desa Yang Dikoordinasikan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	29,000,000					2 Kegiatan	24,000,000		
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang				125 Orang Kali	14,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	125 Orang Kali	14,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Masyarakat Yang Dibina				50 Orang Kali	15,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	50 Orang Kali	10,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Penegakan Perda dan Perkada	Perda/Perkada		Perda/Perkada	2 Perda/Perkada	50,000,000					2 Perda/Perkada	24,000,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Dalam Upaya Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	50,000,000					4 Kegiatan	24,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Kegiatan	45,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Kegiatan	5,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Kegiatan	4,000,000	Kecamatan Tiganderket
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	4 Urusan	72,447,719					4 Urusan	72,447,719		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	Urusan		Urusan	3 Urusan	72,447,719					3 Urusan	72,447,719		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			1 Kali	30,447,719	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Kali	30,447,719	Kecamatan Tiganderket	
7	01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan bangsa				3 Kegiatan	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	3 Kegiatan	15,000,000	Kecamatan Tiganderket

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
7	01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah KegiatanPembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				3 Kegiatan	10,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	3 Kegiatan	20,000,000	Kecamatan Tiganderket			
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				4 Kali	7,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Tiganderket	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	4 Kali	7,000,000	Kecamatan Tiganderket			
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Dibina Dan Diawasi	Pemerintah Desa		Pemerintah Desa	17 Pemerintah Desa	30,000,000						17 Pemerintah Desa	30,000,000				
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pemerintahan Desa Yang Difasilitasi Yang Diberi Rekomendasi Dan Dikoordinasi Pembinaan Dan Pengawasannya	Pemerintah Desa		Pemerintah Desa	17 Pemerintah Desa	30,000,000						17 Pemerintah Desa	30,000,000				
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Yang Di Fasilitasi				34 Perdes/Perkades	10,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Pemerintah Desa	34 Perdes/Perkades	10,000,000	Kecamatan Tiganderket			
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang difasilitasi				17 Pemerintah Desa	10,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Pemerintah Desa	17 Pemerintah Desa	10,000,000	Kecamatan Tiganderket			
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa yang difasilitasi				17 Desa	10,000,000	Kab. Karo, Tiganderket, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Pemerintah Desa	17 Desa	10,000,000	Kecamatan Tiganderket			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						5,391,603,180									6,103,138,595		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		indeks	97.28 indeks	5,269,308,287						97.28 indeks	6,000,945,031				
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	bulan		bulan	12 bulan	5,172,848,210						12 bulan	5,873,793,924				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	gaji dan tunjangan				12 bulan	4,503,308,210	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	12 bulan	5,168,133,924	Kecamatan Berastagi			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				588 orang bulan	669,540,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	588 orang bulan	705,660,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan		bulan	12 bulan	53,187,452						12 bulan	55,313,107	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				14 jenis	1,180,302	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	14 jenis	1,237,107	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				42 Jenis	26,702,145	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Berastagi	42 Jenis	26,400,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah tangga				18 jenis	5,145,005	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Berastagi	18 jenis	5,500,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				2 jenis	3,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	2 jenis	3,300,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan				360 buah	2,160,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	360 buah	2,376,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				140 orang kali	15,000,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	140 orang kali	16,500,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	unit		unit	1 unit	9,627,625						1 unit	14,300,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				1 buah	9,627,625	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	1 buah	14,300,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	31,145,000						12 bulan	32,538,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon, internet air dan listrik				12 bulan	13,015,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	12 bulan	11,000,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5 unit	3,550,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kantor Camat Berastagi	5 unit	5,500,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				12 orang bulan	14,580,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	12 orang bulan	16,038,000	Kecamatan Berastagi
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	unit		unit	1 unit	2,500,000						1 unit	25,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	2,500,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN Kantor Camat Berastagi	1 unit	25,000,000	Kecamatan Berastagi
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	indeks		indeks	97.28 indeks	89,682,012						97.28 indeks	78,598,564	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	orang kali		orang kali	150 orang kali	54,582,012						150 orang kali	65,098,564	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				150 orang kali	31,907,786	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Berastagi	150 orang kali	35,098,564	Kecamatan Berastagi
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan pemerintahan yang diselenggarakan di tingkat kecamatan				2 kegiatan	22,674,226	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Berastagi	2 kegiatan	30,000,000	Kecamatan Berastagi

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																						
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif				
														Nasional	Daerah							
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah	kali kali		kali kali	6 kali 6 kali	35,100,000					6 kali 6 kali	13,500,000					
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 kali	35,100,000	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Berastagi	6 kali	13,500,000	Kecamatan Berastagi			
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	urusan		urusan	1 urusan	32,612,881					1 urusan	23,595,000					
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kali		kali	1 kali	32,612,881					1 kali	23,595,000					
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 kali	32,612,881	Kab. Karo, Berastagi, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat Kecamatan Berastagi	1 kali	23,595,000	Kecamatan Berastagi			
7					UNSUR KEWILAYAHAN																	
7	01				KECAMATAN						700,000,000								805,000,001			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	700,000,000						19 Kegiatan	805,000,001		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	700,000,000						6 Kegiatan	805,000,001		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				6 unit	619,811,000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	6 unit	664,884,863	Kecamatan Berastagi	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 orang kali	80,189,000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap II	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap II	100 orang kali	140,115,138	Kecamatan Berastagi	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						700,000,000							805,000,001		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	700,000,000						19 Kegiatan	805,000,001		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	700,000,000						6 Kegiatan	805,000,001		
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				6 unit	619,811,000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	6 unit	664,884,863	Kecamatan Berastagi	
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 orang kali	80,189,000	Kab. Karo, Berastagi, Tambak Lau Mulgap I	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	100 orang kali	140,115,138	Kecamatan Berastagi	
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						700,000,000							805,000,001		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	700,000,000						19 Kegiatan	805,000,001		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	700,000,000						2 Kegiatan	805,000,001		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																					
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif			
														Nasional	Daerah						
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				6 Unit	619,811,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gundaling II	6 Unit	664,884,863	Kecamatan Berastagi		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 orang kali	80,189,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling II	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gundaling II	100 orang kali	140,115,138	Kecamatan Berastagi		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						700,000,000								805,000,001		
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	19 Kegiatan	700,000,000						19 Kegiatan	805,000,001			
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	unit		unit	6 unit	700,000,000						6 unit	805,000,001			
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prarana Kelurahan				6 unit	619,811,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur dan Ketahanan Bencana	Masyarakat Kelurahan Gundaling I	6 unit	664,884,863	Kecamatan Berastagi		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100 orang kali	80,189,000	Kab. Karo, Berastagi, Gundaling I	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Masyarakat Kelurahan Gundaling I	100 orang kali	140,115,138	Kecamatan Berastagi		
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN						3,653,665,311								3,813,452,201		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	3,365,599,388						83 Indeks	3,527,323,953			
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	3,115,700,531						12 Bulan	3,307,233,996			
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	3,017,960,531	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	12 Bulan	3,209,493,996	Kecamatan Tigapanah		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorrium Pengelola Keuangan				96 orang bulan	97,740,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	96 orang bulan	97,740,000	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Pakaian Dinas Beserta Atributnya	Stel stel		Stel stel	34 Stel 34 stel	35,500,000						34 Stel 34 stel	51,000,000	
7	01	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1 Unit	10,000,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Tigapanah	1 Unit	0	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atributnya				34 Stell	25,500,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Tigapanah	34 Stell	51,000,000	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Umum	Bulan		Bulan	12 Bulan	108,114,779						12 Bulan	83,329,957	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7 Jenis	1,067,514	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	7 Jenis	1,178,514	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				34 Jenis	45,638,855	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	34 Jenis	20,084,012	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				14 Jenis	7,612,410	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	14 Jenis	9,026,500	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				2 Jenis	3,370,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	2 Jenis	4,114,931	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				150 orang kali	50,426,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	150 orang kali	48,926,000	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel	Buah		Buah	8 Buah	40,140,138						8 Buah	15,000,000	
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Mebeleur				8 buah	40,140,138	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Tigapanah	8 buah	15,000,000	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	43,320,000						12 Bulan	46,760,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon , Internet,Air dan Listrik				12 Bulan	13,560,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Tigapanah	12 Bulan	17,000,000	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				24 orang bulan	29,760,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Pegawai Kecamatan Tigapanah	24 orang bulan	29,760,000	Kecamatan Tigapanah
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit		Unit	1 Unit	22,823,940						1 Unit	24,000,000	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				1 Unit	22,823,940	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			ASN Kecamatan Tigapanah	1 Unit	24,000,000	Kecamatan Tigapanah
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks		Indeks	83 Indeks	89,240,400						83 Indeks	141,128,248	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	41,720,400						2 Kegiatan	83,128,248	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				250 Orangkali	29,220,400	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigapanah	250 Orangkali	41,720,400	Kecamatan Tigapanah
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Di Tingkat Kecamatan				2 Kegiatan	12,500,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigapanah	2 Kegiatan	41,407,848	Kecamatan Tigapanah
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Kali		Kali	8 Kali	47,520,000						8 Kali	58,000,000	
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 kali	47,520,000	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigapanah	12 kali	58,000,000	Kecamatan Tigapanah

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	%		%	100 %	50,901,200						100 %	55,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Kegiatan		Kegiatan	3 Kegiatan	50,901,200						3 Kegiatan	55,000,000		
7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergisitas dengan kepolisian negara RI TNI, dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan				300 Orang Kali	26,560,400	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigapanah	300 Orang Kali	30,659,200	Kecamatan Tigapanah	
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Kegiatan Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				2 Kali	24,340,800	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigapanah	2 Kali	24,340,800	Kecamatan Tigapanah	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	147,924,323						1 Urusan	90,000,000		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Dengan Penugasan Kepala Daerah Yang Diselenggarakan	Urusan		Urusan	1 Urusan	147,924,323						1 Urusan	90,000,000		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			2 Kali	147,924,323	Kab. Karo, Tigapanah, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat Kecamatan Tigapanah	2 Kali	90,000,000	Kecamatan Tigapanah		
7					UNSUR KEWILAYAHAN															
7	01				KECAMATAN						2,211,819,365							2,727,183,238		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	91 Indeks	2,101,457,161						91 Indeks	2,583,748,593	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan Tunjangan ASN Honorarium Pengelola Keuangan	bulan bulan		bulan bulan	12 bulan 12 bulan	1,909,110,275						12 bulan 12 bulan	2,341,932,329	
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	1,821,834,075	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	12 bulan	2,237,200,889	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium Pengelola Keuangan				92 orang bulan	87,276,200	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	92 orang bulan	104,731,440	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pakaian Dinas Beserta Atribut	stel		stel	22 stel	16,500,000						22 stel	30,800,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				22 stel	16,500,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	22 stel	30,800,000	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan		bulan	12 bulan	79,795,506						12 bulan	95,754,608	
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				35 Jenis	4,141,130	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	35 Jenis	4,969,356	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan perlengkapan Kantor				28 jenis	17,949,230	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	28 jenis	21,539,076	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				127 Jenis	7,273,983	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	127 Jenis	8,728,780	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Penggandaan				2 jenis	3,271,163	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	2 jenis	3,925,396	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan				360 buah	2,160,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	360 buah	2,592,000	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				300 orang kali	45,000,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Kantor Camat Merdeka	300 orang kali	54,000,000	Kecamatan Merdeka

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	bulan		bulan	12 bulan	58,574,300						12 bulan	70,289,160	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Telepon,Internet, Air dan Listrik				12 bulan	26,400,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat se- Kecamatan Merdeka	12 bulan	31,680,000	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4 unit	2,840,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat se- Kecamatan Merdeka	4 unit	3,408,000	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				24 Orang Bulan	29,334,300	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat se- Kecamatan Merdeka	24 Orang Bulan	35,201,160	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		unit		unit	1 unit	37,477,080						1 unit	44,972,496	
7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan				1 unit	22,033,966	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat se- Kecamatan Merdeka	1 unit	26,440,759	Kecamatan Merdeka
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilit asi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				1 unit	15,443,114	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			Masyarakat se- Kecamatan Merdeka	1 unit	18,531,737	Kecamatan Merdeka
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	91 Indeks	78,000,308						91 Indeks	104,600,370	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	orang kali		orang kali	200 orang kali	40,560,308						200 orang kali	59,672,370	
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				200 orang kali	15,116,508	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Se- kecamatan Merdeka	200 orang kali	29,139,810	Kecamatan Merdeka
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				2 kegiatan	25,443,800	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Se- kecamatan Merdeka	2 kegiatan	30,532,560	Kecamatan Merdeka

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kali		kali	6 kali	37,440,000					6 kali	44,928,000		
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 kali	37,440,000	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat se- Kecamatan Merdeka	12 kali	44,928,000	Kecamatan Merdeka
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Yang Diselenggarakan Kecamatan	Urusan		Urusan	1 Urusan	32,361,896					1 Urusan	38,834,275		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	kali		kali	1 kali	32,361,896					1 kali	38,834,275		
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				1 kali	32,361,896	Kab. Karo, Merdeka, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat se- Kecamatan Merdeka	1 kali	38,834,275	Kecamatan Merdeka
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM														
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						9,729,960,270						9,730,596,859		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks		Indeks	83 Indeks	5,073,452,527						83 Indeks	5,083,452,527	
8	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Gaji dan tunjangan Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tahun tahun bulan		tahun tahun bulan	1 tahun 1 tahun 12 bulan	4,676,138,563						1 tahun 1 tahun 12 bulan	4,676,138,563	
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan tunjangan				12 bulan	4,453,078,563	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN	12 bulan	4,453,078,563	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Honorarium pengelola keuangan				1 tahun	223,060,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	ASN	1 tahun	223,060,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	bulan		bulan	12 bulan	31,584,000						12 bulan	31,584,000	
8	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas Beserta Atribut				47 stel	31,584,000	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum			ASN Badan Kesbang, Politik	47 stel	31,584,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Komponen Instalasi Listrik Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	tahun bulan		tahun bulan	1 tahun 12 bulan	206,709,964						1 tahun 12 bulan	206,709,964	
8	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				1 tahun	1,003,440	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1,003,440	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 tahun	25,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	25,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah Tangga				12 jenis	1,305,524	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 jenis	1,305,524	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Barang Cetakan dan Pengggandaan				2 jenis	7,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	2 jenis	7,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1 tahun	1,800,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	1,800,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Perjalanan Dinas				1 tahun	170,601,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 tahun	170,601,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Bulan		Bulan	12 Bulan	0						12 Bulan	10,000,000	
8	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan dan Mesin				1 buah	0	Kab. Karo, Kabanjahe, Kampung Dalam	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			0	1 buah	10,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	rekening telepon dan internet Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tahun bulan		tahun bulan	1 tahun 12 bulan	109,500,000						1 tahun 12 bulan	109,500,000	
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening telepon dan internet				1 tahun	19,020,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Badan Keatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1 tahun	19,020,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Honorarium Pegawai Tidak Tetap				1 tahun	90,480,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Badan Keatuan Bangsa, Politik dan Linmas	1 tahun	90,480,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Mesin piger print Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	buah unit		buah unit	1 buah 4 unit	49,520,000						1 buah 4 unit	49,520,000	
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Jabatan				1 tahun	49,520,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Bakesbang	1 tahun	49,520,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	PELAKSANAAN HARI- HARI BESAR NASIONAL	kali/tahun		kali/tahun	12 kali/tahun	927,621,250					12 kali/tahun	927,621,250			
8	01	02		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	HUT Proklamasi RI, Hari Besar Nasional (Hari Pahlawan, Hari Sumpah Pemuda, Hari Olah Raga Nasional, Hari Pendidikan Nasional, Hari Kesaktian Pancasila, Hari Kebangkitan Nasional, Hari Nusantara, Hari Lahir Pancasila, Hari Legiun Veteran RI dan Hari Bela Negara) Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	kali bulan kali/tahun		kali bulan kali/tahun	11 kali 12 bulan 12 kali/tahun	927,621,250					11 kali 12 bulan 12 kali/tahun	927,621,250			
8	01	02		2.01		01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				11 kali	727,621,250	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, pelajar, pemuda dan tokoh- tokoh lainnya	11 kali	727,621,250	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02		2.01		02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				1 tahun	200,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat, pelajar, pemuda dan tokoh- tokoh lainnya	1 tahun	200,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	JUMLAH PARPOL YANG DUDUK DIDPRD	kali		kali	6 kali	1,243,518,906					6 kali	1,243,518,906		
8	01	03		2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Sosialisasi dan pembinaan partai politik, Penyuluhan politik kepada masyarakat, Indeks demokrasi indonesia , Verifikasi bantuan keuangan partai politik, Bantuan keuangan untuk Parpol yg mendapat Kursi di DPRD dan Monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan politik Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan partai politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	kali kali bulan	kali kali bulan	6 kali 6 kali 12 bulan	1,243,518,906					6 kali 6 kali 12 bulan	1,243,518,906			

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Sosialisasi dan pembinaan partai politik, Penyuluhan politik kepada masyarakat, Indeks demokrasi indonesia , Verifikasi bantuan keuangan partai politik, Bantuan keuangan untuk Parpol yg mendapat Kursi di DPRD dan Monitoring evaluasi dan pelaporan perkembangan politik			6 kali	1,243,518,906	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Parpol	6 kali	1,243,518,906	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	JUMLAH ORMAS YANG AKTIF	ormas		ormas	18 ormas	98,958,176						18 ormas	98,958,176	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	ormas		ormas	18 ormas	98,958,176						18 ormas	98,958,176	
8	01	04	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Inventarisasi Ormas, Peraturan Perundang-undangan Ormas			1 tahun	98,958,176	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Ormas	1 tahun	98,958,176	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	JUMLAH PERTEMUAN DAN SOSIALISASI	kali/kegiatan/forum		kali/kegiatan/forum	14 kali/kegiatan/forum	1,899,209,411						14 kali/kegiatan/forum	1,889,846,000	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	kali		kali	8 kali	1,899,209,411						8 kali	1,889,846,000	

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																			
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
														Nasional	Daerah				
8	01	05	2.01	02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Perda P4GN, Sosialisasi P4GN, Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur, Peningkatan rasa soladaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarkat			3 kegiatan	145,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan pelajar	3 kegiatan	145,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Natal Oukemene,Natal Korpri, DPRD, TNI dan Polri, Pesparawi, Pesparani, Buka Puasa, Pelepasan Calon Jemaah Haji dan MTQ,Dialog Lintas Agama			8 kali	1,594,209,411	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan pelajar	8 kali	1,584,846,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Forum strategi daerah (FKUB, FKDM, FPK, Peningkatan Toleransi dalam kehidupan beragama, Studi bandi forum strategis daerah			3 forum	160,000,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Masyarakat dan pelajar	3 forum	160,000,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	JUMLAH PERTEMUAN FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM	bulan		bulan	12 bulan	487,200,000					12 bulan	487,200,000		
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	bulan		bulan	12 bulan	487,200,000					12 bulan	487,200,000		

Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karo Tahun 2022																				
Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
										Target 2022	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif		
														Nasional	Daerah					
8	01	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Penyelenggaraan koordinasi forum pimpinan daerah (Forkopimda) dan Forkomfomcam, Pengembangan kapasitas aparatur dibidang kewaspadaan dini dan deteksi dini, Pemantauan orang asing, Penanganan Konflik sosial				12 bulan	487,200,000	Kab. Karo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi	Forkopimda	12 bulan	487,200,000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
TOTAL											1,531,379,560,214								1,505,304,262,954	